RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN MOROWALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengmbangan Daerah (Bappelitbangda0 Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada RKPD Tahun 20024, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan perpedoman pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026, maka disusunlah Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 yang berisikan Program, Kegiatan dan Sub. kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun kedepannya.

Morowali, 03 Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan,Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Morowali



HASYIM, S.PI
Pembina, IV/a
Nip. 19761120 200701 1 008

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2021 ...**	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bapelitbangda Kabupaten Morowali	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Morowli	II-15
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Morowali	II-16
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-30
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA**	III-1
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda Kabupaten Morowali	III-1
	3.3 Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	IV-1
BAB V	**PENUTUP**	V-1

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Morowali s/d Tahun 2023 dan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).....	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Morowali.....	II-15
Tabel 2.3	Reviuw terhadapa Rancangan RKPD Tahun 2024.....	II-17
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Morowali.....	II-31
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024.....	III-2
Tabel 3.2	Rumusan Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025.....	III-4
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bapelitbangda Tahun Anggaran 2023.....	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappelitbangda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappelibangda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bapelitbangda.

Selanjutnya Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukun penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengmebangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 No. 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusuanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Bappelitbangda

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Morowali adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten

Morowai Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda kabupaten Morowali secara berkesinambungan.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali bertujuan :

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bapelitbangda tahun 2024;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Morowali secara sistematis dan terorganisir;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahululan.
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2024.
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapelitbangda;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Bapelitbangda kabupaten Morowali.
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda;
- 3.3 Program dan kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Bapelitbangda Kabupaten Morowali.

Bab V : Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bapelitbangda Kabupaten Morowali.

Penyusunan Renja Bapelibangda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub. kegiatan dalam pencaian prioritas pembanguan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bapeltbangda.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub. Kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Morowali tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 Bapelitbangda Kab. Morowali melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 14.189.658.822 (empat belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 13.152.906.344 (tiga belas milyar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau sebesar 92,69%.

Pelaksanaan program-program Bappelitbangda Kab. Morowali sampai dengan Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1
Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Morowali s/d Tahun 2023 dan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
URUSAN PERENCANAAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahahn yang dilaksanakan**		100	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi***		100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	2	100	2	2	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4	100	4	4	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak***		100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	39	39	100	39	39	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	1	1	100	12	12	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1	1	100	4	4	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah***			100	100	100	100	100	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1	1	100	4	4	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan***		100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			2	2	100	83	83	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		65	1	1	100	1	1	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1	1	100	0	0	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		23	28	28	100	4	4	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100	1	1	100	1	1	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	1	100	1	1	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan***		100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan		5	0	0	0	4	4	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1	1	100	0	0	0
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***		100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara***		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		100	15	15	100	10	10	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1	1	1	100	1	1	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan**		100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah***		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		3	1	1	100	2	2	100
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		30	1	1	100	0	0	100
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/LintasSKPD	Jumlah Berita Acara Forum PerangkatDaerah/Lintas Perangkat Daerah		100	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1	1	100	1	1	100
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang melaksanakan Musrenbang			50	50	100	9	9	100
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)			3	3	100	2	2	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Presentase ketersediaan data dan informasi Pembangunan Daerah***			**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1	1	100	0	0	100
	Penyusunan Profil Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yangDiterbitkan			1	1	100	0	0	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase Capaian pembangunan Daerah***		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		100	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya			2	2	100	0	0	0
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		100	4	4	100	4	4	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
		Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
		Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap RPJMD***		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap renstra OPD		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		100	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		100	7	7	100	7	7	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		100	1	1	100	1	1	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan		100	1	1	100	2	2	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		100	2	2	100	2	2	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			8	8	100	7	7	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			7	7	100	6	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			1	1	100	2	2	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Perekonomian dan SDA Terhadap RPJMD***		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap renstra OPD		**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		100	1	1	100	2	2	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		100	7	7	100	8	8	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		100	7	7	100	8	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian		100	1	1	100	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		100	1	1	100	2	2	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		100	12	12	100	8	8	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		0	12	12	100	11	11	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		100	1	1	100	2	2	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur danKewilayahan	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan Terhadap RPJMD***		0	100	100	100	100	100	100
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan terhadap renstra OPD		100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		100	2	2	100	2	2	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		100	4	4	100	3	3	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		100	6	6	100	3	3	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		100	6	6	100	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		100	5	5	100	2	2	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		100	4	4	100	13	13	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		100	6	6	100	13	13	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Kewilayahan		1	6	6	100	1	1	100
URUSAN PENELITIAN										
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan**			100	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***			100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			10	10	100	1	1	100
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			7	7	100	0	0	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (N-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			21	21	100	3	3	100
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			17	17	100	3	3	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi***			100	100	100	100	100	100
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			17	17	100	1	1	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Morowli

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kabupaten Morowali berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kabupaten Morowali adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Morowali

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Penting
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	NILAI SAKIP			BB	BB	A	B	B	A***	B	
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan			75	80	100	75	100	100	100	
3.	Persentase Tingkat Capaian kinerja pembangunan			85	90	95	85	90	95	100	
4.	Presentase Terlaksanany Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase pemanfaatan hasil Penelitian dalam pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	85	
6.	Persentase inovasi Daerah yang dimanfaatkan			100	100	100	100	100	85	85	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Morowali.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Morowali adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijkan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Morowali didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah.
2. Kurangnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum efektifnya pengelolaan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih rendahnya diseminasi hasil-hasil penelitian.
5. Masih rendahnya pengembangan inovasi dan teknologi.

Melihat permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bapelitbangda Kabupaten Morowali di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Peran Bappelitbangda sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.
2. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya perencana dengan berbekal keterbatasan jumlah sumber daya aparatur perencana.
3. Ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
4. Keterpaduan database perencanaan.
5. Masih adanya pemahaman sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dianggap formalitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2024 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Reviuw terhadapa Rancangan RKPD Tahun 2024

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
URUSAN PERENCANAAN														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahahn yang dilaksanakan**	Kab. Morowali	%	100	12.233.916.622		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahahn yang dilaksanakan**	Kab. Morowali	%	100	12.233.916.622	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi***	Kab. Morowali	%	100	7.520.000		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi***	Kab. Morowali	%	100	7.520.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	2	5,600,000.00		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	2	5,600,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000.00		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak***	Kab. Morowali	%	100	7.117.630.766		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak***	Kab. Morowali	%	100	7.117.630.766	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	orang	39	5,978,310,766		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	orang	39	5,978,310,766	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,114,200,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,114,200,000	

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Morowali	Dokumen	4	25,120,000		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Morowali	Dokumen	4	25,120,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah***	Kab. Morowali	%	100	1,920,000		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah***	Kab. Morowali	%	100	1,920,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan***	Kab. Morowali	%	100	525,422,500		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan***	Kab. Morowali	%	100	525,422,500	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Morowali	unit	2	8,222,500		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Morowali	unit	2	8,222,500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Morowali	paket	1	78,200,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Morowali	paket	1	78,200,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali	orang	1	22,500,000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali	orang	1	22,500,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali	orang	28	416,500,000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali	orang	28	416,500,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,598,722,524		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,598,722,524	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	14,483,225		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	14,483,225	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	427,169,554		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	427,169,554	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	335,252,995		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	335,252,995	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	92,200,750		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	92,200,750	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	Laporan	4	60,400,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	Laporan	4	60,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Laporan	4	669,216,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Laporan	4	669,216,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan**	Kab. Morowali	%	100	2,528,440,000		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan**	Kab. Morowali	%	100	2,528,440,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kab. Morowali	unit	1	2,528,440,000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kab. Morowali	unit	1	2,528,440,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	Kab. Morowali	%	100	95,666,200		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	Kab. Morowali	%	100	95,666,200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Laporan	4	6,165,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Laporan	4	6,165,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	65,251,200		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	65,251,200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	23,350,000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	23,350,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Laporan	12	900,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Laporan	12	900,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara**	Kab. Morowali	%	100	358,594,632		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara**	Kab. Morowali	%	100	358,594,632	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Morowali	unit	15	159,750,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Morowali	unit	15	159,750,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Morowali	unit	1	198,844,632		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Morowali	unit	1	198,844,632	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan**	Kab. Morowali	%	100	3,336,090,350		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Indeks Kualitas Perencanaan**	Kab. Morowali	%	100	3,336,090,350	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah**	Kab. Morowali	%	100	2,179,974,350		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah**	Kab. Morowali	%	100	2,179,974,350	

	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Morowali	Dokumen	2	343,724,350		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Morowali	Dokumen	2	343,724,350	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum PerangkatDaerah Lintas Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Berita Acara	1	132,270,000		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum PerangkatDaerah Lintas Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Berita Acara	1	132,270,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Berita Acara	1	57,230,000		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Berita Acara	1	57,230,000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang	Kab. Morowali	Kecamatan	9	101,051,000		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Morowali	Kecamatan	9	101,051,000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	1,545,699,000		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	1,545,699,000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Capaian pembangunan Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,156,116,000		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Capaian pembangunan Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,156,116,000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Morowali	Laporan	4	352,106,000		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Morowali	Laporan	4	352,106,000	

	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Morowali	Laporan	2	804,010,000		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Morowali	Laporan	2	804,010,000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kab. Morowali	**%**	100	2.461.496.150		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kab. Morowali	**%**	100	2.461.496.150	
		Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Morowali	**%**	100				**Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	Kab. Morowali	**%**	100		
		Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Morowali	**%**	100				**Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**	Kab. Morowali	**%**	100		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase konsistensi program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap RPJMD**	Kab. Morowali	**%**	100	1.259.186.800		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase konsistensi program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap RPJMD**	Kab. Morowali	**%**	100	1.259.186.800	
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap renstra OPD	Kab. Morowali	**%**	100				**Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap renstra OPD**	Kab. Morowali	**%**	100		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	72,740,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	72,740,000	

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	11,400,000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	11,400,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	1	20,520,000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	1	20,520,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan	Kab. Morowali	Laporan	1	81,850,000		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan	Kab. Morowali	Laporan	1	81,850,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	317,590,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	317,590,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	13,680,000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	13,680,000	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	500,400,000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	500,400,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Laporan	1	241,006,800		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Laporan	1	241,006,800	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Perekonomian dan SDA Terhadap RPJMD***	**Kab. Morowali**	**%**	**100**	693.447.350		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Perekonomian dan SDA Terhadap RPJMD***	**Kab. Morowali**	**%**	**100**	693.447.350	
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap renstra OPD	**Kab. Morowali**	**%**	**100**				***Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap renstra OPD***	**Kab. Morowali**	**%**	**100**		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	110,074,500.00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	110,074,500.00	

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	9,500,000.00		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	9,500,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	29,725,000.00		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	29,725,000.00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Laporan	2	65,878,000.00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Laporan	2	65,878,000.00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	106,964,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	106,964,000.00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	11,950,000.00		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	11,950,000.00	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	22,679,500.00		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	22,679,500.00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang SDA	Kab. Morowali	Laporan	2	336.676.350		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang SDA	Kab. Morowali	Laporan	2	336.676.350	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan Terhadap RPJMD***		**%**	100	508.862.000		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan Terhadap RPJMD***		**%**	100	508.862.000	
		Persentase konsistensi Kegiatan / Sub Kegiatan OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan terhadap renstra OPD		**%**	100				***Persentase konsistensi Kegiatan / Sub Kegiatan OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan terhadap renstra OPD***		**%**	100		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	61.485.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	61.485.000	

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	26,515,000.00		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	26,515,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	10,800,000.00		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	10,800,000.00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Laporan	1	200,942,000.00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Laporan	1	200,942,000.00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	54,415,000.00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	54,415,000.00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	20,045,000.00		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	20,045,000.00	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	10,560,000.00		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	10,560,000.00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Laporan	1	124,100,000.00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Laporan	1	124,100,000.00	
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	POGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan**	Kab. Morowali	%	100	1.524.426.720		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan**	Kab. Morowali	%	100	1.524.426.720	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	Kab. Morowali	%	100	1.450.375.400		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	***Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	Kab. Morowali	%	100	1.450.375.400	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Morowali	Laporan	10	198,318,000.00		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Morowali	Laporan	10	198,318,000.00	

	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Morowali	Laporan	21	511,989,100.00		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Morowali	Laporan	21	511,989,100.00	
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Morowali	Laporan	17	740,068,300.00		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Morowali	Laporan	17	740,068,300.00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	Kab. Morowali	%	100	74.051.320		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	***Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	Kab. Morowali	%	100	74.051.320	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Morowali	Laporan	17	74,051,320.00		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Morowali	Laporan	17	74,051,320.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Kabupaten Morowali tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Morowali pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan direncanakan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa memperhatikan usulan dari berbagai pihak termasuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan hingga pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Pada Bappelitbangda Kabupaten Morowali usulan pemangku kepentingan tidak ada, usulan dari pemangku kepentingan ditujukan kepada PD sesuai bidang peruntukannya, yakni Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, serta Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah. Perolehan Usulan Program dan Kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Morowali, melalui Proses sebagai berikut :

1. Musrenbang Desa, Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan Para Pemangku Kepentingan Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
2. Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
3. Forum PD, Forum PD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan PD atau gabungan PD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait.
4. Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-PD hasil Forum PD dengan cara meninjau keserasian antara Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) Kabupaten Morowali

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi. Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan. Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda Kabupaten Morowali.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 -2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Morowali yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya kualitas penelitiaan, pengembangan dan inovasi daerah.

Dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bappelitbangda Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	B
	Indeks Inovasi Daerah	32,50-37,5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	*Nilai Sakip Bappelitbangda*	*B*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	*Indeks Perencanaan Pembangunan*	*100*
Meningkatnya kualitas penelitiaan, pengembangan dan inovasi daerah	*Indeks Kelitbangan*	*85*

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD , Program kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
URUSAN PERENCANAAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahahn yang dilaksanakan**	Kab. Morowali	%	100	12.233.916.622		100	12.233.916.622
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi***	Kab. Morowali	%	100	7.520.000		100	7.520.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	2	5,600,000.00		2	5,600,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000.00		4	1,920,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak***	Kab. Morowali	%	100	7.117.630.766		100	7.117.630.766
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	orang	39	5,978,310,766		39	5,978,310,766
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,114,200,000		4	1,114,200,000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Morowali	Dokumen	4	25,120,000		4	25,120,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah***	Kab. Morowali	%	100	1,920,000		100	1,920,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000		4	1,920,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan***	Kab. Morowali	%	100	525,422,500		100	525,422,500
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Morowali	unit	2	8,222,500		2	8,222,500
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Morowali	paket	1	78,200,000		1	78,200,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali	orang	1	22,500,000		1	22,500,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali	orang	28	416,500,000		28	416,500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,598,722,524		100	1,598,722,524
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	14,483,225		1	14,483,225

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	427,169,554		1	427,169,554
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	335,252,995		1	335,252,995
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	92,200,750		1	92,200,750
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	Laporan	4	60,400,000		4	60,400,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Laporan	4	669,216,000		4	669,216,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan**	Kab. Morowali	%	100	2,528,440,000		100	2,528,440,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kab. Morowali	unit	1	2,528,440,000		1	2,528,440,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	Kab. Morowali	%	100	95,666,200		100	95,666,200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Laporan	4	6,165,000		4	6,165,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	65,251,200		4	65,251,200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	23,350,000		4	23,350,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Laporan	12	900,000		12	900,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara**	Kab. Morowali	%	100	358,594,632		100	358,594,632
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Morowali	unit	15	159,750,000		15	159,750,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Morowali	unit	1	198,844,632		1	198,844,632
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan**	Kab. Morowali	%	100	3,336,090,350		100	3,336,090,350
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah**	Kab. Morowali	%	100	2,179,974,350		100	2,179,974,350
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Morowali	Dokumen	2	343,724,350		2	343,724,350
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum PerangkatDaerah Lintas Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Berita Acara	1	132,270,000		1	132,270,000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Berita Acara	1	57,230,000		1	57,230,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang	Kab. Morowali	Kecamatan	9	101,051,000		9	101,051,000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	1,545,699,000		2	1,545,699,000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Capaian pembangunan Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,156,116,000		100	1,156,116,000
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Morowali	Laporan	4	352,106,000		4	352,106,000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Morowali	Laporan	2	804,010,000		2	804,010,000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kab. Morowali	**%**	100	2.461.496.150		100	2.461.496.150
		Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Morowali	**%**	100			100	
		Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Morowali	**%**	100			100	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase konsistensi program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap RPJMD**	Kab. Morowali	**%**	100	1.259.186.800		100	1.259.186.800

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap renstra OPD	Kab. Morowali	**%**	100			100	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	72,740,000		2	72,740,000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	11,400,000		7	11,400,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	1	20,520,000		1	20,520,000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan	Kab. Morowali	Laporan	1	81,850,000		1	81,850,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	317,590,000		2	317,590,000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	13,680,000		8	13,680,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	500,400,000		7	500,400,000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Laporan	1	241,006,800		1	241,006,800
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Perekonomian dan SDA Terhadap RPJMD***	**Kab. Morowali**	**%**	**100**	693.447.350		**100**	693.447.350
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap renstra OPD	**Kab. Morowali**	**%**	**100**			**100**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	110,074,500.00	Pendapatan Bagi Hasil	2	110,074,500.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	9,500,000.00	Retribusi Daerah	8	9,500,000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	29,725,000.00	Retribusi Daerah	8	29,725,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Laporan	2	65,878,000.00	Retribusi Daerah	2	65,878,000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	106,964,000.00	Retribusi Daerah	2	106,964,000.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	11,950,000.00	Retribusi Daerah	11	11,950,000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	22,679,500.00	Retribusi Daerah	11	22,679,500.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang SDA	Kab. Morowali	Laporan	2	336.676.350	Pendapatan Bagi Hasil	2	336.676.350
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan Terhadap RPJMD***		**%**	100	508.862.000		100	508.862.000
		Persentase konsistensi Kegiatan / Sub Kegiatan OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan terhadap renstra OPD		**%**	100			100	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	61.485.000		2	61.485.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	26,515,000.00		3	26,515,000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	10,800,000.00		3	10,800,000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Laporan	1	200,942,000.00		1	200,942,000.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	54,415,000.00		2	54,415,000.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	20,045,000.00		12	20,045,000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	10,560,000.00		12	10,560,000.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Laporan	1	124,100,000.00		1	124,100,000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuahn Dana /Pagu Indikatif
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	POGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan**	Kab. Morowali	%	100	1.524.426.720		100	1.524.426.720
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	Kab. Morowali	%	100	1.450.375.400		100	1.450.375.400
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Morowali	Laporan	10	198,318,000.00		10	198,318,000.00
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Morowali	Laporan	21	511,989,100.00		21	511,989,100.00
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Morowali	Laporan	17	740,068,300.00		17	740,068,300.00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	Kab. Morowali	%	100	74.051.320		100	74.051.320
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Morowali	Laporan	17	74,051,320.00		17	74,051,320.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BaPpelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Secara rinci rumusan program dan kegiatan pada Renja BaPpelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bapelitbangda Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahahn yang dilaksanakan**	Kab. Morowali	%	100	12.233.916.622	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi***	Kab. Morowali	%	100	7.520.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	2	5,600,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK, Tenaga Kontrak***	Kab. Morowali	%	100	7.117.630.766	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	orang	39	5,978,310,766	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,114,200,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Morowali	Dokumen	4	25,120,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah***	Kab. Morowali	%	100	1,920,000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Morowali	Dokumen	4	1,920,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan***	Kab. Morowali	%	100	525,422,500	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Morowali	unit	2	8,222,500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Morowali	paket	1	78,200,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali	orang	1	22,500,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali	orang	28	416,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,598,722,524	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	14,483,225	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	427,169,554	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	335,252,995	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	paket	1	92,200,750	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	Laporan	4	60,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Laporan	4	669,216,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik daerah yang menjadi Kebutuhan**	Kab. Morowali	%	100	2,528,440,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Kab. Morowali	unit	1	2,528,440,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	Kab. Morowali	%	100	95,666,200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Laporan	4	6,165,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	65,251,200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	4	23,350,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Laporan	12	900,000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan anggaran Barang Milik daerah yang dipelihara**	Kab. Morowali	%	100	358,594,632	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Morowali	unit	15	159,750,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Morowali	unit	1	198,844,632	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan**	Kab. Morowali	%	100	3,336,090,350	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Konsistensi Perencanaan Pembangunan daerah**	Kab. Morowali	%	100	2,179,974,350	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Morowali	Dokumen	2	343,724,350	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum PerangkatDaerah Lintas Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Berita Acara	1	132,270,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Berita Acara	1	57,230,000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang	Kab. Morowali	Kecamatan	9	101,051,000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	1,545,699,000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Capaian pembangunan Daerah**	Kab. Morowali	%	100	1,156,116,000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Morowali	Laporan	4	352,106,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Morowali	Laporan	2	804,010,000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kab. Morowali	**%**	100	2.461.496.150	
		Indeks KuaLitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Morowali	**%**	100		
		Indeks KuaLitas Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Morowali	**%**	100		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase konsistensi program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap RPJMD**	Kab. Morowali	**%**	100	1.259.186.800	
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap renstra OPD	Kab. Morowali	**%**	100		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	72,740,000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	11,400,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	1	20,520,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan	Kab. Morowali	Laporan	1	81,850,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	317,590,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	13,680,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	7	500,400,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali	Laporan	1	241,006,800	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Perekonomian dan SDA Terhadap RPJMD***	**Kab. Morowali**	**%**	**100**	693.447.350	
		Persentase konsistensi Kegiatan/Sub Kegiatan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap renstra OPD	**Kab. Morowali**	**%**	**100**		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	110,074,500.00	Pendapatan Bagi Hasil
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	9,500,000.00	Retribusi Daerah
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	8	29,725,000.00	Retribusi Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Morowali	Laporan	2	65,878,000.00	Retribusi Daerah
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	106,964,000.00	Retribusi Daerah
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	11,950,000.00	Retribusi Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	11	22,679,500.00	Retribusi Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang SDA	Kab. Morowali	Laporan	2	336.676.350	Pendapatan Bagi Hasil
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Persentase konsistensi program OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan Terhadap RPJMD***		**%**	100	508.862.000	
		Persentase konsistensi Kegiatan / Sub Kegiatan OPD Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan terhadap renstra OPD		**%**	100		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	61.485.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	26,515,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	3	10,800,000.00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali	Laporan	1	200,942,000.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali	Dokumen	2	54,415,000.00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	20,045,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Perangkat Daerah	12	10,560,000.00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Morowali	Laporan	1	124,100,000.00	
	POGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan**	Kab. Morowali	%	100	1.524.426.720	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	Kab. Morowali	%	100	1.450.375.400	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Morowali	Laporan	10	198,318,000.00	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Morowali	Laporan	21	511,989,100.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Morowali	Laporan	17	740,068,300.00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	Kab. Morowali	%	100	74.051.320	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Morowali	Laporan	17	74,051,320.00	

BAB V
PENUTUP

Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub. kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Morowali di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappelitbangda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali;
2. Penyusunan Renja Bapelitbangda ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
3. Renja Bappelitbangda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024;

Dengan disusunnya Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2024.

Morowali, 03 Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan,Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Morowali

HASYIM, S.PI
Pembina, IV/a
Nip. 19761120 200701 1 008

DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024







Perpusdakabmorowali@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan rencana pelaksanaan kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas dan sifatnya mendesak untuk segera diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 mengacu dan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Ada 2 (dua) urusan yaitu Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali tahun 2024.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali.

Bungku, 3 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ZAINUDDIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670608 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023 ..... **7**

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 7

2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH 27

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 29

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 29

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **42**

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 42

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 45

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **57**

BAB V PENUTUP **66**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Arah pembangunan bidang Perpustakaan yang merupakan urusan wajib Pemerintahan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024 - 2026. Pembangunan bidang perpustakaan tersebut merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan bersama yang berkeadilan dan bertaqwa.

Sasaran pembangunan perpustakaan, terutama diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan yang maksimal pada perpustakaan daerah, perpustakaan khusus, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah.
2. Tersediaanya gedung depo arsip yang memiliki standar mutu untuk dapat melestarikan, memelihara menampung seluruh jenis arsip daerah yang ada di Kabupaten Morowali untuk dapat terjaga dengan baik.
3. Tersedianya sarana dan prasarana media elektronik untuk menunjang pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis IT untuk mempermudah pelayanan.

Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional, yang hakekatnya merupakan suatu proses bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkup yang sangat luas serta semua ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Dalam penataan sistem pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang bertanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali mengawalinya dengan perencanaan berkualitas yang akan dijalankan dan prioritas strategi yang telah ditetapkan disertai rencana pengukuran kinerja dari setiap kegiatan yang akan direncanakan.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan tersebut adalah penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang merupakan proses penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali khususnya. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah terkecil.

Perumusan rancangan dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali dimulai dengan mengumpulkan data, pengolahan data dan informasi. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali dan RKPD.

Konsekuensi dari implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah adanya pelimpahan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diberbagai Sektor, salah satu diantaranya adalah sektor pelayanan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 dan peraturan nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;

27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Nomor 05 Tahun 2009 (lembar Daerah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 07. Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Morowali;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No, 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
31. Peraturan Bupati Morowali No. 41 Tahun 2022 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Morowali No. 5 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kerarsipan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka penyeenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berpijak pada maksud tersebut, maka Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan arah bagi peningkatan minat baca bagi Masyarakat Morowali.
2. Berkembangnnya perpustakaan sebagai media informasi, penelitian, pelestarian budaya dan rekreasi.
3. Terpeliharanya arsip untuk mempermudah akses data perpustakaan dan arsip di Kabupaten Morowali.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pada Tahun 2023 dan capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali selama tahun 2023.

Penetapan kebijakan pembangunan di Daerah Kabupaten Morowali didasarkan kepada analisis berbagai potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi, serta kebijakan pembangunan nasional bidang perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai gambaran dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat dari indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali pada tabel T-C 29 yaitu:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
(Tabel T- C.29, Lampiran Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
Tabel 2.1

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**								
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**								
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	2	100%
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Target Keuangan Dinas Perpustakaan Daerah**	**100%**				100%			**100%**
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	29	29	29	100%	29	29	100%
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19	19	19	19	100%	19	19	100%
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	**XX**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Target Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	100%				100%			100%
X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Target Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**							**100%**
X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	35	0	0	0%	55	0	100%
						Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	55	10	0	0	0%	55	0	100%
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	0	0	0%	1	0	100%
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	0	0	0%	1	0	100%
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	1	0	0	0%	1	0	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	0	0	0%	1	0	100%
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	0	0	0%	1	0	100%
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Target Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**				100%			100%
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	0	0%
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	7	7	7	100%	7	5	19%
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	1	1	1	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaaan yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	0	0	0%	1	0	0%
X	XX	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	35	15	15	100%	15	15	100%
X	XX	01	2.06	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	0	0	0%	0	0	0%
X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**				0%			100%
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	2	0	0	0%	4	4	100%
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	2	0	0	0%	1	1	100%
X	XX	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	14	9	9	100%	23	23	100%
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	2	2	2	100%	1	1	100%
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0%	1	1	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	1	0	0%	1	1	100%
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	2	0	0%	1	1	100%
X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Capaian Target Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**				0%			0%
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	0	0%
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	0	0%
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	0	0%
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Capaian Target Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**				0%			

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100%	0	0	0%
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	1	100%	0	0	0%
X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1	1	1	1	100%	1	0	0
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	1	1	100%	1	0	0
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	1	0	0%	1	0	0
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	1	0	0%	1	0	0
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	0%	0	0	0

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	1	1	1	1	100%	1	0	0
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**								
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang Dilindungi dan Diselamatkan**								
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1500	2500	2500	5469	100%	12000	12000	100%
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1500	2500	2500	5469	100%	12000	12000	100%
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan arsip	1	1	0	0	0%	1	1	100%
						Jumlah Pengawasan Internal Arsip	1	1	0	0	0%	1	1	100%
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Arsip Statis Yang di Kelola**	**100%**							
2	**24**	**02**	**2.02**	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI								

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	**24**	**02**	**2.02**	02	Akusisi,pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10000	400	250	250	100%	8000	8000	100%
2	**24**	**02**	**2.03**		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota								
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	**1**	1	1	1		1	1	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbagsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemeintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**								
2	**24**	**03**	**2.01**		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan**					0%			

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1	1	0	0	0%	1	1	100%
2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip statis yang di musnahkan di kabupaten /kota**					0%			
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1	0	0	0	0%	1	1	100%
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000	1050	1050	1050	100%	1050	1050	100%
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan									
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	1000	1000	1000	1000				

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan								
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan								
2	**24**	**03**	**2.04**		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Presentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsp Hasil Alih Media kabupaten/Kota**								
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan								

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip								
2	**24**	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Jumlah Arsip Statis yang dinyatakan hilang**								
2	**24**	**03**	**2.05**	**01**	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan								
2	**24**	**03**	**2.05**	**02**	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang								
2	**24**	**03**	**2.05**	**03**	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman								
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Presentase Perizinan Penggunaan Arsip**					0%			
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Presentase Pelayanan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**					0%			

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan								
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk**								
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	1	0	0	0	0%	1	1	100%
2	23	02	2.01	02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	24	15	15	15	100%	24	24	100%
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/kota yang Dikembangkan	250	0	0	0	0%	250	250	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	5	5	5	100%	5	5	100%
2	23	02	2.01	05	Pembinaaan Perpustakaan Khusus tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	9	0	0	0	0%	9	9	100%
2	23	02	2.01	06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	0	0	0	0%	3	3	100%
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan perpustakaan Rujukan Tingkat kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1	0	0	0	0%	0	0	0%
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan								

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2800	1006	300	300	100%	2500	2500	100%
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/daerah	5	0	0	0	0%	5	0	0%
2	23	02	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun**								
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pengunjung Perpustakaan mobil keliling	12	70	50	37	74%	12	12	100%
						Jumlah Pengunjung Perpustakaan daerah	500	5580	2580	2200	85%	450	450	100%
						Jumlah pengunjung Perpustakaan kapal terapung	0	0	0	0	0%	0	0	100%
						Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan Pegiat Literasi	8	10	5	5	100%	8	8	100%
						Jumlah MOU Perpustakaan	15	10	2	2	100%	15	15	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah kegiatan sosialisasi Budaya Baca kesekolah-sekolah & Masyarakat	12	12	8	8	100%	12	12	100%
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Pembangunan Perpustakaan dan Sarana Prasarana	5	1	0	0	0%	5	5	100%
						pembangunan pojok baca/Pojok baca digital dan sejenisnya	2	1	0	0	0%	2	2	100%
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Motor Perpustakaan Keliling	2	1	0	0	0%	2	2	100%
						Jumlah Perpustakaan yang Mendapatkan Bantuan	5	10	0	0	0%	5	5	100%
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1	50	38	38	100%	1	1	100%
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6	5	5	5	100%	6	6	100%
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah sKabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3	5	0	0	0%	3	3	100%

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	23	03			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Jumlah Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (%)**								
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang di lestarikan								
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR								
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam								
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan di daerah								
				01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan								
				02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan								
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik kabupaten/kota	Jumlah Pelestarian Naskah Kuno Milik kabupaten/kota								

Kode					Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1	10	5	5	100%	1	1	100%
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4	0	0	0	0%	2	2	100%
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah kabupaten/kota								
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	1	0	0	0	0%	1	1	100%
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: penetaan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya.Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya di lanjutkan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan menuju Morowali sejahtera. Pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Masalah pokok yang harus segera diselesaikan adalah masyarakat Morowali belum memanfaatkan perpustakaan secara baik (data pengunjung perpustakaan daerah Kab. Morowali Tahun 2019 sebanyak 3.573, Tahun 2020 sebanyak 2.139, dan Tahun 2021 sebanyak 4.500 pengunjung), tahun 2022 sebanyak 2.962 pengunjung, tahun 2023 sebanyak 6.212 pengunjung Sampai pada tahun 2024 ketersediaan perpustakaan pada titik kumpul masyarakat, obyek wisata, Kecamatan, dan Desa masih sangat terbatas (perpustakaan umum 4 unit, pojok baca 10 unit, Perpustakaan Desa 20 Unit, Perpustakaan Universitas 2 Unit, dan perpustakaan sekolah 181 unit). Untuk itu, pada tahun 2024 perlu dilakukan penambahan pojok baca di titik kumpul masyarakat, obyek wisata, dan desa.

Pelayanan kunjungan mobil keliling tahun 2024, 40 kali kunjungan dari target 30 kali. Pada Tahun 2024 pelayanan mobil keliling perlu dioptimalkan melalui pelayanan yang bersinergi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Perangkat Daerah, pegiat literasi, dan masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
(Tabel T-C.30, Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
Tabel 2.2

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Rasio Ketercukupan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan		√	21,38%	21,60%	21,57%	21,90%	21,38%	21,60%	21,57%	21,38%	
2	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat		√	2,36%	3,38%	4,4%	5,42%	2,36%	3,38%	4,4%	5,42%	
3	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		√	25%	25%	25%	50%	25%	25%	25%	50%	
4	Jumlah Kunjungan Pemustaka		√	4.024	6.212	6.300	6,500	4.024	6.212	6.300	6.500	
5	Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang dikelola Secara Baku		√	25,39%	25,64%	25,89	26,14%	25.39%	25,64%	25.89%	26.14%	
6	Persentase OPD yang Menerapkan Kearsipan Kategori Baik		√	10,42%	20,83%	25%	29,17%	10,42%	20,83%	25%	29,17%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu-isu strategis dalam tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali adalah :

1. Percepatan dan pemerataan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat melalui pendirian perpustakaan umum di setiap kecamatan, pengembangan perpustakaan desa;
2. Peningkatan jumlah dan jenis koleksi akan dapat mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca masyarakat serta pengembangan fasilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan keterlibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stakeholder lainnya di Kabupaten Morowali berupa sosialisasi/penyuluhan dan pelaksanaan berbagai keterampilan yang mengajarkan masyarakat mandiri dan sejahtera;
4. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan di seluruh perangkat daerah/pemerintah desa melalui sosialisasi, supervisi, pembinaa, monitoring dan evaluasi akan mendukung terwujudnya good governance dan clean governance (penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih) di Kabupaten Morowali;
5. Peningkatan saranan dan prasarana perpustakaan dan kearsipan akan dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
6. Peningkatan kualiatas dan kuantitas sumber daya manusia dalam hal tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan yang professional dan terampil pada semua sektor dan lini akan mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang perpustakaan dan kearsipan;
7. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai program prioritas nasional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijkan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di susun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023 ditargetkan 100%. Tingkat capaian tersebut berdasarkan realisasi dengan target kinerja yang telah direncanakan dan selaras dengan Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah total Anggaran Tahun 2024 yang diusulkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Rp.7.679.630.825,00 -.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah
(Tabel T-C.31, Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
Tabel 2.4

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.932.131.030,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.932.131.030,00**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPK	Persentase Capaian Target Keuangan Dinas Perpustakaan Daerah	100%	**4.214.096.880,00**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPK	Persentase Capaian Target Keuangan Dinas Perpustakaan Daerah	100%	**4.214.096.880,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPK	Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	3.662.946.880,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPK	Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	3.662.946.880,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	541.150.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	541.150.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPK	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	20.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Rp 20.000.000	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi	100	0,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian	100%	0,00	

			penilaian barang milik daerah SKPD					barang milik daerah SKPD			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPK	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	729.749.750,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPK	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	729.749.750,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang disediakan	30	210.602.550,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang disediakan	30	210.602.550,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	48.611.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	48.611.700,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.037.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.037.500,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPK	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	26.470.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPK	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	26.470.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	409.028.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	409.028.000,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPK	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	2	**866.800.400,00**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPK	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	2	**866.800.400,00**	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPK	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	513.114.000,00	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPK	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	513.114.000,00	

	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	DPK	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1	353.666.400,00	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	DPK	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1	353.666.400,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32.564.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32.564.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	31.664.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	31.664.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	900.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	900.000,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**88.920.000,00**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**88.920.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	70.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	18.920.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	18.920.000,00	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Rehabilitasi	1	0,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Rehabilitasi	1	0,00	
B	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**90%**	**1.097.437.055,00**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**90%**	**1.097.437.055,00**	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MOROWALI / LUAR DAERAH	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum	100%	690.076.085,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MOROWALI / LUAR DAERAH	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum	100%	690.076.085,00	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	MOROWALI / LUAR DAERAH	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	4	95.702.960,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	MOROWALI / LUAR DAERAH	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	4	95.702.960,00	
	Pembinaa perpustakaan pada satuan pendiidkan dasar di seluruh wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan standat nasional perpustakaan	MOROWALI	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	74.186.000,00	Pembinaa perpustakaan pada satuan pendiidkan dasar di seluruh wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan standat nasional perpustakaan	MOROWALI	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	74.186.000,00	

	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	25.035.000,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	25.035.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1487	495.152.125,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1487	495.152.125,00	
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Persentase Pemustaka yang Memanfaatkan Perpustakaan	100%	**407.360.970,00**	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Persentase Pemustaka yang Memanfaatkan Perpustakaan	100%	**407.360.970,00**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	MORO WALI	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10	179.575.490,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	MORO WALI	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10	179.575.490,00	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	6	86.376.910,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	6	86.376.910,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10	141.408.570,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10	141.408.570,00	

	pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya			pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya			
C	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	MOROWALI / LUAR DAERAH	**Jumlah Koleksi Hasil Pelestarian Naskah Kuno**	**1050**	**61.494.800,00**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	MORO WALI / LUAR DAERAH	**Jumlah Koleksi Hasil Pelestarian Naskah Kuno**	**1050**	**61.494.800,00**	
1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	MOROWALI / LUAR DAERAH I	Jumlah Koleksi Hasil Pelestarian Naskah Kuno	1050	**61.494.800,00**	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH I	Jumlah Koleksi Hasil Pelestarian Naskah Kuno	1050	**61.494.800,00**	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	MORO WALI	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	50	61.494.800,00	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	MORO WALI	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	50	61.494.800,00	
	Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan			Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan			
D	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	MORO WALI	**Presentase OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku**	**100%**	**549.469.660,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	MORO WALI	**Presentase OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku**	**100%**	**549.469.660,00**	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI	Persentase Perangkat Daerah yang dibina	100%	449.269.660,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI	Persentase Perangkat Daerah yang dibina	100%	449.269.660,00	

	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	MORO WALI	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	70	279.725.800,00	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	MORO WALI	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	70	279.725.800,00	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	MORO WALI	Jumla naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan peyusutan	70	49.259.500,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	MORO WALI	Jumla naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan peyusutan	70	49.259.500,00	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	MORO WALI	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2	120.284.360,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	MORO WALI	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2	120.284.360,00	
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI	Jumlah pengelolaan arsip statis			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI	Jumlah pengelolaan arsip statis			
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	MORO WALI	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	MORO WALI	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Presentase Peningkatan Jumlah Koleksi Layanan Arsip	100%	100.200.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Presentase Peningkatan Jumlah Koleksi Layanan Arsip	100%	100.200.000,00	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			

	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2	100.200.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	MORO WALI / LUAR DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2	100.200.000,00	
E	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	LUAR/ DALAM DAERAH	**Persentase Penyelematan Arsip**	**90**	**39.098.280,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	LUAR/ DALAM DAERAH	**Persentase Penyelematan Arsip**	**90**	**39.098.280,00**	
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	LUAR/ DALAM DAERAH	Persentase Arsip Dinamis yang Dilindungi dan Diselamatkan (%)			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	LUAR/ DALAM DAERAH	Persentase Arsip Dinamis yang Dilindungi dan Diselamatkan (%)			
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	LUAR/ DALAM DAERAH	jumlah Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun			Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	LUAR/ DALAM DAERAH	jumlah Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun			
2	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah Unit Arsip Bernilai Perangkat Daerah yang Digabung dan/dibubarkan, Dimekarkan yang Terselamatkan	10	39.098.280,00	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah Unit Arsip Bernilai Perangkat Daerah yang Digabung dan/dibubarkan, Dimekarkan yang Terselamatkan	10	39.098.280,00	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	MORO WALI	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan			Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	MORO WALI	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan			

	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	MORO WALI	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	60	39.098.280,00	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	MORO WALI	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	60	39.098.280,00	
3	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			
4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	LUAR/ DALAM DAERAH	Jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan			
	Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang	MORO WALI	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan			Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang	MORO WALI	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan			
			TOTAL		**7.679.630.825,00**			**TOTAL**		**7.679.630.825,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali berupaya menyelaraskan beberapa usulan dari berbagai elemen masyarakat dalam hal pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat budaya baca pelajar dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan perpustakaan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Morowali
(Tabel T-C.32, Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021)
Tabel 2.5

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Meningkatkan budaya gemar membaca, melalui:
   a. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi;
   b. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; dan
   c. Pembudayaan kegemaran membaca.
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas melalui:
   a. Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata yang mendukung pengembangan *techno park, science park* dan pelaksanaan revolusi mental;
   b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno;
   c. Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
   d. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional RI

1. Peningkatan gemar membaca, dengan strategi:
   a. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
   b. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan.
   c. Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.
   d. Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
2. Pengembangan koleksi lndonesiana yang lengkap dan mutakhir, dengan strategi:
   a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan.
   b. Meningkatkan pengelolaan koleksi naskah kuno.
   c. Meningkatkan pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Indonesia dan atau tentang Indonesia.

d. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan adat, berbagai komunitas, dan 30 perorangan (ahli) untuk membangun komunitas budaya local.

3. Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK, dengan strategi:
   a. Memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan dalam pengembangan layanan secara demokratis dan berkeadilan.
   b. Meningkatkan pola interaksi perpustakaan, lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, satuan pendidikan, masyarakat ilmiah dalam pengembangan repository dan diversifikasi layanan.
   c. Meningkatkan akses bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.
   d. Membangun partisipasi aktif lembaga penelitian dan pengkajian, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan melalui pemberdayaan perpustakaan.
4. Pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa, dengan strategi:
   a. Memperkuat preservasi dan konservasi bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.
   b. Memperkuat preservasi warisan dokumenter dan budaya dalam format digital.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, dengan strategi:
   a. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan.
   b. Meningkatkan kerjasama dan jejaring antar perpustakaan baik nasional maupun internasional
   c. Membangun resource sharing antar perpustakaan di Indonesia.
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dengan strategi:
   a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pustakawan.
   b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi pustakawan.
   c. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pelatihan kepustakawanan.

C. Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

Arah kebijakan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Kebijakan Kearsipan

   Kebijakan kearsipan sebagai landasan dalam melaksanaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang meliputi:

a. pengembangan NSPK sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/Lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
b. penyusunan NSPK sebagai amanat UU Nomor 43 Tahun Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang 2009 dan Peraturan berimplikasi pada kementerian/lembaga (pusat) dan pemerintahan daerah yang menyangkut 10 area yaitu: Pembinaan, Pengelolaan Arsip, Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Organisasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip, Sosialisasi Kearsipan, Kerja Sama, dan Pendanaan

2. Pembinaan Kearsipan

   Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu:

   a. Penguatan dan penataan lembaga kearsipan, yang meliputi penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan pada kementerian/lembaga, Lembaga kearsipan di daerah dan perguruan tinggi; serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga kearsipan pada kementerian/lembaga dan daerah serta perguruan tinggi.
   b. Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis TIK di tingkat pusat dan daerah melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (*central file*) dan Sentral Arsip lnaktif (*records center*) dan pembangunan depot arsip statis;
   c. pengembangan sarana dan prasarana kearsipan melalui standarisasi gedung, peralatan dan sistem jaringan kearsipan;
   d. Jaringan sinergitas dan koneksi dengan unit dan lembaga kearsipan;
   e. Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar arsip;
   f. Hal yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis. Untuk mewujudkan sistem kearsipan secara menyeluruh, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia (Arsiparis). Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi, termasuk pembinaan Arsiparis.

3. Pengelolaan Arsip

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sedangkan Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Lebih lanjut dipertegas oleh Pasal 41 butir (1) bahwa pencipta arsip sebagaimana Pasal 40 ayat (2) penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali berupaya untuk mendukung dan menterjemahkan visi misi kedalam beberapa program dan kegiatan.

Tabel 3.2. Tabel Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran	Indikator	Target		
				2024	2025	2026
1		*2*	*3*	*4*	*5*	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan melalui budaya literasi	Meningkatkan Minat dan Budaya literasi dikalangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2,36%	3,65%	34,34%
2	Meningkattnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan Daerah	Persentase OPD yang Menerapkan Kearsipan Kategori Baik	25%	29,17%	33,33%
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Sakip	B	BB	A

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rangka mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian Program dan Kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Program yang akan dilakukan di masa yang akan datang, merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana aksi. Suatu Program yang telah ditetapkan mungkin saja akan dapat mencapai beberapa Sasaran, sebaliknya beberapa Program harus dilakukan untuk mencapai beberapa Sasaran.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
(Tabel T-C.33, Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
Tabel 3.3

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegitan / Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4		5	6	7	9	Rp 9
X	**XX**	**1**		**A**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**%**	**DPK**	**100**	**5.932.131.030,00**		**100**	**5.228.407.242,00**
X	**XX**	**1**	**2.02**	**1**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**DPK**	**100**	**4.214.098.880,00**		**100**	3.614.480.242,00
X	XX	1	2.02	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org.	DPK	29	3.662.946.880,00		29	3.113.280.242,00
X	XX	1	2.02	B	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	DPK	12	541.150.000,00		12	451.200.000
X	XX	1	2.02	c	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok.	DPK	4	20.000.000,00		4	50.000.000,00
X	**XX**	**1**	**2.03**	**2**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**%**	**DPK**					

X	XX	1	2.03	a	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	DPK					
X	**XX**	**1**	**2.05**	**3**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Target Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**DPK**					
X	XX	1	2.05	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	DPK					
X	XX	1	2.05	b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org.	MOROWALI/ LUAR DAERAH					
X	XX	1	2.05	c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org.	DPK					
X	**XX**	**1**	**2.06**	**4**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**DPK**	**100**	**729.749.750,00**		**100**	**697.470.000,00**
X	XX	1	2.06	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	paket	DPK	30	210.602.550,00		30	300.000.000,00
X	XX	1	2.06	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	DPK	10	48.611.700,00		10	60.000.000,00
X	XX	1	2.06	c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	DPK	1	35.037.500,00		1	50.000.000,00
X	XX	1	2.06	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	DPK	1	26.470.000,00		1	27.470.000

X	XX	1	2.06	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DPK	30	409.028.000,00		31	260.000.000,00
X	**XX**	**1**	**2.07**	**5**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Unuit**	**DPK**	**2**	**866.800.400,00**		**2**	**752.340.000,00**
X	XX	1	2.07	a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	DPK	1	513.114.000,00		1	452.340.000,00
				b	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	DPK	1	353.686.400,00		1	300.000.000,00
X	**XX**	**1**	**2.08**	**6**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**DPK**	**100**	**32.564.000,00**		**100**	**24.117.000,00**
X	XX	1	2.08	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	DPK	12	31.664.000,00		12	23.217.000,00
X	XX	1	2.08	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	DPK	12	900.000,00		12	900.000,00
X	**XX**	**1**	**2.09**	**7**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**DPK**	**88.920.000,00**		**100**	**115.000.000,00**

X	XX	1	2.09	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	DPK	3	70.000.000,00		4	100.000.000,00
X	XX	1	2.09	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	DPK	10	18.920.000,00		10	15.000.000,00
X	XX	1	2.09	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	DPK					
				B	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	**%**	**DPK**	**90**	**1.097.437.055,00**		**100**	**1.080.000.000,00**
				1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum	**%**	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	90	690,076,085,00		100	760.000.000,00
				a	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	**4**	95.702.960,00		4	150.000.000,00

				b	pengembangan perpustakaan di tingakat daerah kabipaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI						
				c	Pembinaa perpustakaan pada satuan pendiidkan dasar di seluruh wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan standat nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	Morowali	10	74.186.000,00		30	150.000.000,00
				d	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI						
				e	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	3	25.036.000,00		5	100.000.000,00
				f	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Perpustakaan	Morowali						
				g	Pengembangan Bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Buku	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI						
				h	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	1.487	495.152.125,00	Eksemplar	1.487	360.000.000,00

				2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pemustaka yang Memanfaatkan Perpustakaan	**%**	MOROWALI	**100**	**407.360.970,00**		**100**	**320.000.000,00**
				a	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Morowali	10	179.575.490,00		10	100.000.000,00
				b	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
				c	Pemberian Peghargaan Gerakan Budaya Gemar Mmbaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	80	86.376.910,00		80	70.000.000,00
				d	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	10	141.408.570,00		10	150.000.000,00
				e	pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya							
				C	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Koleksi Hasil Pelestarian Naskah Kuno	**Koleksi**	**Morowali**	**1050**	**61.494.800,00**		**1050**	**48.000.000,00**
				1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil seleksi dan penggandaan							

				a	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	Morowali	50	61.494.800,00		60	48.000.000,00
				b	Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan							
				D	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Presentase Jumlah OPD yang Menerapka Arsip Secara Baku	**%**	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	**35**	**549.469.660,00**		**50**	**695.000.000,00**
2	24	2	2.01	1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Perangkat Daerah yang Dibina	%	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	**100**	449.269.660,00			495.000.000,00
2	24	2	2.01	a	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	MOROWALI	70	279.7250.800,00		70	200.000.000,00
				b	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	DPK	70	49.259.500,00		130	95.000.000,00
				c	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	DPK	2	120.264.360,00		3	200.000.000,00
				2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pengelolaan arsip statis							
				a	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis							

				3	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Presentase Peningkatan Jumlah Koleksi Layanan Arsip	%	DPK	100	**100.200.000,00**		100	**150.000.000,00**
				a	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
				b	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	DPK	2	100.200.000,00		2	150.000.000,00
2	**24**	**3**		**E**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Presentase Penyelamatan Arsip	**%**	**DPK**	**90**	**39.098.280,00**		**95**	**50.000.000,00**
				1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							
				a	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							

				2	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Unit Arsip Bernilai Perangkat Daerah yang digabung dan / atau dibubarkan dan dimekarkan yang Terselamtakan	Unit	DPK	10	**39.098.280,00**		10	**50.000.000,00**
				a	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan							
				b	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	DPK	60	39.098.280,00		80	50.000.000,00
				3	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip statis yang di musnahkan di kabupaten /kota**							
				a	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip							
				4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan							
				a	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Etnis Nusantara	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan							
							JUMLAH			**7.679.630.825,00**			**7.051.407.242,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Renja Tahun 2024 ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran yang menjadi bahan dalam penyusunan APBK Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini mengedepankan manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas terutama terkait fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku penanggungjawab pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi.

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Tahun 2024

Tabel 4.1

KODE					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegitan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*Rp 6,00*	*7*
X	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**DPK**	**100**	**5.932.131.030,00**	
X	**XX**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPK**	**100**	**4.214.098.880,00**	
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPK	29	3.662.946.880,00	
X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPK	12	541.150.000,00	
X	XX	1	2.02	3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPK	4	20,000,000,00	
X	**XX**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Target Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**				
X	XX	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				

X	**XX**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Target Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
X	XX	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
						Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				
X	XX	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
X	**XX**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPK**	**100**	**729.749.750,00**	
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	DPK	30	210.602.550,00	
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DPK	10	48.611.700,00	
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	DPK	1	35.037.500,00	
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPK	1	26.470.000,00	
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK	30	409.028.000,00	

X	**XX**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**DPK**	**2**	**866.800.400,00**	
X	XX	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DPK	1	513.114.000,00	
X	XX	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPK	1	353.686.400,00	
X	**XX**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPK**	**100**	**32.564.000,00**	
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPK	12	31.664.000,00	
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPK	12	900.000,00	
X	**XX**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPK**	**100**	**88.920.000,00**	
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPK	3	70.000.000,00	

X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPK	10	18.920.000,00	
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	90	**1.097.437.055,00**	
2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	**90**	690,076,085,00	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	4	95.702.960,00	
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam	MOROWALI	10	74.186.000,00	

					Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	3	25.036.000,00	
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	MOROWALI	1.487	495.152.125,00	
2	**23**	**2**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemustaka yang Memanfaatkan Perpustakaan**	**MOROWALI**	**100**	**407.360.970,00**	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	MOROWALI	10	179.575.490,00	
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	MOROWALI/ LUAR DAERAH	80	86.376.910,00	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	MOROWALI	10	141.408.570,00	
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang				

						Dipilih dan Didukung Kegiatannya					
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Koleksi Hasil Pelestarian Naskah Kuno**	KAB. MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	**1050**	**61.494.800,00**		
2	**23**	**3**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil seleksi dan penggandaan					
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	MOROWALI	50	61.494.800,00		
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan					
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Jumlah OPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku**	KAB. MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	**35**	**549.469.660,00**		
2	**24**	**2**	**2.01**		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Dearah yang dibina	KAB. MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	100	449.269.660,00		
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	KAB. MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	70	279.7250.800,00		
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumla naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan peyusutan	KAB. MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	70	49.259.500,00		
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. MOROWALI/ LUAR DAERAH MOROWALI	2	120.264.360,00		

2	**24**	**2**	**2.02**		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Inaktif yang di Kelola dan Arsip yang Masuk Database				
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Jumlah Koleksi Layanan Arsip	MOROWALI	100	**100.200.000,00**	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	MOROWALI	2	100.200.000,00	
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Presentase Penyelamatan Arsip	MOROWALI	**90**	**39.098.280,00**	

2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Unit Arsip Bernilai Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, Dimekarkan yang Terselamatkan	MOROWALI	10	**39.098.280,00**	
2	24	3	2.03	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa / Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	MOROWALI	60	39.098.280,00	
							JUMLAH		**7.679.630.825,00**	

BAB V
PENUTUP

Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan tersebut telah terinci dan terencana dalam rencana strategis tahun 2024-2026 beserta indikatornya.

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali sebagai dokumen perencanaan untuk menjadi acuan perencanaan program kegiatan tahun yang akan datang.

Bungku, 3 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ZAINUDDIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196706081991031010

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Jl. KTM MOROWALI
Telp.
Email : inspektoratmorowali14@gmail.com
HOTLINE SMS/WA : 082334036234

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Kabupaten Morowali dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2023 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Morowali.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Morowali. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Kabupaten Morowali merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Morowali, dan RPD dan Renstra 2024-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Morowali sampai dengan bulan Mei 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Morowali tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Morowali, 24 Juni 2024

Inspektur

Kabupaten Morowali,



AFRIDIN, SH., M.SA.
Pembina Utama Mudah, IV/c
NIP 196703081992031010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Morowali Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Morowali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Morowali tahun 2024-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.

g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Inspektorat Kabupaten Morowali berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (sampai TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Kabupaten Morowali yang tercantum dalam RKPD yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Hukum. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Morowali pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, sesuai dengan prioritas pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah menjadi misi yang ke 2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan pelayanan publik, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Tahun 2024 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan
PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undangg-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undangg-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Morowali Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 0316, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0316);
16. Peraturan Bupati Morowali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PEUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada **tabel 2.4.**

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah **tabel 3.1**

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Sasaran Persentase Nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori BB. Pada tahun 2023 nilai sakip Pemerintah Daerah kabupaten Morowali nilai CC dengan kategori Cukup, hasil penilaian dari Kementerian PAN-RB.
2. Terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi qualitas assurance maupun consulting partner, yang diukur dengan Indikator Sasaran "Nilai Maturitas SPIP, Nilai Kapabilitas APIP, dan Presentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari pihak eksternal dan Internal. Pada tahun 2023 target Nilai Maturitas SPIP adalah pada level 3 (skor 3,191) dan Nilai Kapabilitas APIP adalah pada level 3 (skor 3,00). Untuk tahun 2024 nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tetap Pada level 3 namun nilai skor masing-masing lebih ditingkatkan dengan target 3,200 untuk Maturitas SPIP dan 3,02 untuk Kapabilitas APIP.

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Inspektorat tahun 2023 :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Sasaran Inspektorat	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Keterangan
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	81,82	
Terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi qualitas assurance maupun consulting partner	Level 3 dengan Nilai 3,000	Level 3 dengan Nilai 3,191	Tahun 2024, Sasaran ini menjadi 3 Indikator, yakni: Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Presentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari pihak eksternal.

Terhadap sasaran program Inspektorat Kabupaten Morowali pada tahun 2024 memiliki 3 Program, yaitu 2 Program yang mengampu pengawasan, dan 1 program penunjang program pengawasan. Adapun program dan sasaran yang dimaksud adalah:

Tabel 2.2 Program, Sasaran, Indikator, Target 2023, Realisasi 2023, & Target 2024

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Target Tahun 2024	Ket
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kepatuhan Auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	91%	100%	95%	
	Kepatuhan Auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	91%	100%	95%	
	Kepatuhan Auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	91%	100%	95%	
	Kepatuhan Auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	100%	95%	
	Kepatuhan Auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan eksternal meningkat	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	91%	100%	91%	

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Target Tahun 2024	Ket
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	-	-	18,18%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	-	20%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	18,18%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	40%	Merupakan sasaran Program baru di tahun 2023, sehingga di tahun 2022 tidak terdapat target dan realisasi
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat meningkat	SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	-	(Nilai A ; Predikat **"Memuaskan")**	Nilai A	sasaran program baru di tahun 2023 sehigga pada tahun 2022 tidak terdapat target, namun untuk realisasi pada tahun 2021 sebesar 88,80 yang berarti pada tahun 2022

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Target Tahun 2024	Ket
						Mengalami Penurunan Sebesar 4,20%. Hal ini dikarenakan Tidak Tercapainya Sasaran OPD Inspektorat di tahun 2022

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II (sd Mei 2024) sebagai berikut :

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 10 Mei 2024) Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat s.d 10 Mei 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1.	**INSPEKTORAT DAERAH**	**13.802.897.540**	**5.878.102.900**	**42,58%**	**49,87%**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**12.896.563.930**	**5.670.695.623**	**43,97%**		
A.1	**Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**66.604.000**	**40.259.000**	**60,44%**		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.978.000	1.135.000	57,38%	67%	
1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.250.000	165.000	13,2%	50%	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.000	440.000	35,2%	50%	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.257.000	460.000	36,59%	49%	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.257.000	0	0%	35%	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.037.000	38.059.000	54,46%	63%	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	575.000	0	0%	0%	
A.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.952.657.000**	**4.737.705.211**	**43,25%**		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.933.452.000	4.729.908.211	43,26%	54%	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.000	575.000	100%	100%	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	575.000	299.000	52%	52%	
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.150.000	0	0%	0%	
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	575.000	0	0%	0%	
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	575.000	575.000	100%	100%	
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.180.000	6.348.000	41,81%	40%	
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	575.000	0	0%	0%	
A.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.040.500**	**3.015.000**	**74,61%**		
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	932.500	804.000	86,21%	94,50%	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.120.000	670.000	59,82%	63%	
3.3	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.088.000	644.000	59,19%	67,60%	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000	897.000	99,66%	100**%**	
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	900.000	391.000	43,44%	54**%**	
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	900.000	900.000	100%	100**%**	
A.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.369.000**	**3.248.750**	**74,35%**	**79%**	
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Kinerja Pegawai	4.369.000	3.248.750	74,35%	79	
A.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**542.938.830**	**191.600.075**	**35,28%**		
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.316.000	1.315.000	24,73%	30**%**	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.439.330	19.824.900	27,36%	41,40**%**	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.779.000	7.877.835	24,03%	38,30**%**	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.229.500	7.888.850	28,97%	34,30**%**	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000	1.225.000	38,52%	33,30**%**	
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.460.000	146.943.490	37,15%	41,30**%**	
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6.535.000	6.525.000	99,84%	100**%**	
A.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**416.437.600**	**296.561.420**	**71,21%**	**72%**	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	416.437.600	296.561.420	71,21%	72**%**	
A.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**413.373.000**	**135.205.392**	**32,70%**		

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.997.000	404.000	6,73%	24,70**%**	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.200.000	1.311.392	31,22%	35,70**%**	
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	25.800.000	9.300.000	36,04%	30**%**	
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.376.000	124.190.000	32,08%	31,45**%**	
A.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**494.344.000**	**261.809.775**	**53,56%**		
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.080.000	7.822.768	25,39%	56,30**%**	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.204.000	27.827.207	13,36%	36,80**%**	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.560.000	16.346.000	51,79%	60,30**%**	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.500.000	209.813.800	93,45%	96,14**%**	
B	**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**374.032.110**	**108.220.310**	**28,93%**		
B.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**231.493.110**	**79.504.660**	**34,34%**		
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	97.275.610	45.525.510	46,80%	50**%**	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	86.865.750	6.658.200	7,77%	5**%**	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	10.489.750	10.364.700	98,80%	100**%**	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	8.716.000	8.373.750	96,07%	100**%**	
1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28.146.000	8.582.500	30,49%	31**%**	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
B.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**142.539.000**	**26.715.650**	**18,74%**		
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.185.000	2.815.000	39,17**%**	36**%**	
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	135.354.000	23.900.650	17,65**%**	18**%**	
C.	**PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**532.301.500**	**99.186.967**			
C.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**94.179.500**	**46.536.000**	**49,41%**		
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	79.049.500	41.606.000	52,63**%**	54**%**	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	15.130.000	4.930.000	32,58**%**	35**%**	
C.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**438.122.000**	**52.650.967**	**12,01%**		
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	67.728.000	19.826.667	29,27**%**	40**%**	
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16.051.000	368.000	2,29**%**	10**%**	
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	320.159.000	20.750.300	6,48**%**	11**%**	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34.184.000	11.706.000	34,24**%**	62**%**	
	Total	**13.802.897.540**	**5.878.102.900**		**49,87%**	

Sumber : Data Fungsional Subbag Keuangan s.d 10 Mei 2024

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengangkatan dari CPNS ke PNS, serta kenaikan jabatan beberapa pegawai, namun data jumlah anggaran masih menunggu dari BPKAD dan BKPSDM
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian alat tulis kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, diusulkan pengurangan anggaran fotocopy karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan ada kemungkinan tidak terserap sampai akhir tahun
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, diusulkan penambahan anggaran untuk iuran FIDSI (Iuran Inspektorat seluruh Indonesia)
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, diusulkan untuk penambahan anggaran pembelian peralatan rumah tangga
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, diusulkan penambahan anggaran pada belanja peralatan dan mesin (belanja modal) mebel, Megaphone, Sound Portable, laptop, PC, tablet
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, diusulkan pengurangan anggaran untuk penyesuaian sisa anggaran pengiriman surat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, diusulkan pengurangan anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, diusulkan penyesuaian pengurangan anggaran sewa alat fotocopy karena menyesuaikan kebutuhan dan harga sewa
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor, diusulkan berkurang untuk penyesuaian pada sisa anggaran pemeliharaan keamanan dan kebesihan
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, diusulkan engurangan untuk sisa pembayaran pajak
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, diusulkan pengurangan pada anggaran BBM
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, diusulkan penambahan anggaran untuk belanja suku cadang genset
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, diusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung rutin perbaikan plafon, pengecatan dan perbaikan tembok, mushola
15. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, diusulkan penambahan untuk memfasilitasi FGD P3DN

16. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, diusulkan pengurangan pada anggaran makmin fasilitasi kegiatan dan honorarium untuk narsum
17. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, diusulkan pengurangan pada anggaran makmin untuk fasilitasi kegiatan
18. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan
19. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan
20. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan
21. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, diusulkan pengurangan anggaran makmin fasilitasi kegiatan

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2023 sampai dengan 12 Juni 2023 atau Triwulan II) keseluruhan anggaran murni Inspektorat Kabupaten Morowali pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. **13.802.855.540,-**

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 3) bahwa capain fisik sebesar 49,87% dari target fisik 52,13% sampai dengan bulan Juni 2023 , dengan capaian keuangan sebesar 41,63 % dari target yang direncanakan sampai dengan 12 Juni 2023 sebesar 62,52%, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan, karena durasi pelaksanaan renja perubahan hanya kurang lebih 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 12 Juni 2023) EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (INSPEKTORAT) TA. 2023 (dari Data Fungsional Subbag Keuangan) atau ***Tabel 2.4 sebagai berikut***

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI INSPEKTORAT TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:			
1	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan	Level 3
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi	Nilai A

Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Kabupaten Morowali tahun 2023 (Cut Off 10 Mei 2024)

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip dari Inspektora	Hasil Penilaian Sakip dari Inspektorat		0		0		12.896.521.930	63,52%	8.191.606.986	69,23%	5.670.695.623	100,00%	69,23%						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0				1.978.000	67,00%	1.311.000	86,58%	1.135.000	100,00%	86,58%						
						0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen													
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1.250.000	50,00%	367.500	44,90%	165.000	100,00%	44,90%						
						0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen													
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.250.000	50,00%	575.000	76,52%	440.000	100,00%	76,52%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen													
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.257.000	49,00%	575.000	80,00%	460.000	100,00%	80,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen													
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.215.000	35,00%	575.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			59.037.000	65,31%	38.557.000	98,71%	38.059.000	100,00%	98,71%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17 laporan		0,00%											
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	575.000	0,00%	0										
		8	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN			0 Dokumen		0 Dokumen			10.933.452.000	54,00%	7.045.957.606	67,13%	4.729.908.211	100,00%	67,13%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						83 orang/bulan													
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	100,00%	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3 Dokumen													
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	52,00%	575.000	52,00%	299.000	100,00%	52,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3 Dokumen													
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.150.000	0,00%	115.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1 Dokumen				#DIV/0!									
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 laporan													
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	100,00%	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						1 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			15.180.000	40,00%	7.337.000	86,52%	6.348.000	100,00%	86,52%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 laporan													
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	69.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen													
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			932.500	94,50%	850.000	94,59%	804.000	100,00%	94,59%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKDP						2 Dokumen													
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			1.120.000	63,00%	900.000	74,44%	670.000	100,00%	74,44%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah						3 Dokumen													
		18	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKDP			0 Dokumen		0 Dokumen			1.088.000	67,60%	736.000	87,50%	644.000	100,00%	87,50%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen													
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			900.000	100,00%	900.000	99,67%	897.000	100,00%	99,67%						
				Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD						12 Laporan													
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			900.000	54,00%	900.000	43,44%	391.000	100,00%	43,44%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD						2 Dokumen													
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			900.000	100,00%	900.000	100,00%	900.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen		0 Dokumen			4.369.000	79,00%	3.379.000	96,15%	3.248.750	100,00%	96,15%						
				Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2 Dokumen												
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			5.316.000	30,00%	3.516.000	37,40%	1.315.000	100,00%	37,40%						
				Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan						6 Jenis												
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			72.439.330	41,40%	49.663.380	39,92%	19.824.900	100,00%	39,92%						
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						64 Jenis												
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0 Dokumen		0 Dokumen			32.779.000	38,30%	13.641.000	57,75%	7.877.835	150,79%	57,75%						
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						19 Jenis												
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0 Dokumen		0 Dokumen			27.229.500	34,30%	10.130.000	77,88%	7.888.850	100,00%	77,88%						
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						10 Jenis												
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			0 Dokumen		0 Dokumen			3.180.000	33,30%	1.325.000	92,45%	1.225.000	100,00%	92,45%						
				Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen												
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			395.460.000	41,30%	186.195.000	78,92%	146.943.490	100,00%	78,92%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan												
		29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			6.535.000	100,00%	6.535.000	99,85%	6.525.000	100,00%	99,85%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2 Dokumen												
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			416.437.600	66,68%	304.097.600	97,52%	296.561.420	100,00%	97,52%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						14 Unit												

No	Sasaran PD		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Dokumen		0 Dokumen			5.997.000	24,70%	1.641.000	24,62%	404.000	100,00%	24,62%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan													
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0 Dokumen		0 Dokumen			4.200.000	35,70%	1.800.000	72,86%	1.311.392	100,00%	72,86%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan													
		33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			25.800.000	30,00%	9.300.000	100,00%	9.300.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan						12 laporan													
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			377.376.000	31,45%	147.890.000	83,97%	124.190.000	100,00%	83,97%						
				Jumlah Lapaoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan						12 laporan													
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 Dokumen		0 Dokumen			30.080.000	56,30%	18.340.000	42,65%	7.822.768	75,76%	42,65%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya						1 Unit													
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			0 Dokumen		0 Dokumen			208.204.000	36,80%	88.713.900	31,37%	27.827.207	85,24%	31,37%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						18 Unit													
		37	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			31.560.000	60,30%	26.370.000	61,99%	16.346.000	100,00%	61,99%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara						6 Unit													
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			224.500.000	96,14%	216.720.000	96,81%	209.813.800	100,00%	96,81%						

No	Sasaran PD		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit													
Rata-Rata Capaian Kinerja																87,15%	65,37%						
Predikat Kinerja																tinggi	sedang						
2	**Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peningatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan**	**B**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Masing-Masing Bidang = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Masing-Masing Bidang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Masing-Masing Bidang dikali 100%**	**97%**		**100%**		**95%**	**374.032.110**	**0,00%**	**195.489.360**	**0,00%**	**108.220.310**	**0,00%**	**55,36%**						**Irban Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Irban pengelolaan Keuangan dan Aset, irban Pembangunan Sarpras, dan Irban Perekonomian Kesejahteraan Rakyat**
				Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal = Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%**	**92%**		**100%**		**92%**	**374.032.110**												
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			97.275.610	76,00%	77.862.110	48,86%	47.525.510	64,28%	61,04%						
				Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						55 Laporan													
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			86.865.750	5,00%	31.748.000	7,66%	6.658.200	100,00%	20,97%						
				Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						35 laporan													
		3	Reviu Laporan Kinerja			0 Dokumen		0 Dokumen			10.489.750	100,00%	10.489.750	98,81%	10.364.700	98,81%	98,81%						

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja						1 Laporan													
		4	Reviu Laporan Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen			8.716.000	100,00%	8.405.000	96,07%	8.373.750	100,00%	99,63%						
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan						1 Laporan													
		5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP			0 Dokumen		0 Dokumen			28.146.000	31,00%	14.821.500	30,49%	8.582.500	98,36%	57,91%						
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							11 Dokumen													
		6	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			7.185.000	36,00%	3.305.000	39,18%	2.815.000	100,00%	85,17%						
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani						1 laporan													
		7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			0 Dokumen		0 Dokumen			135.354.000	18,00%	48.858.000	17,66%	23.900.650	98,10%	48,92%						
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						25 Laporan													
Rata-rata capaian kinerja																**94,22%**	**67,49%**						
Predikat kinerja																**sangat tinggi**	**rendah**						

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)			
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		C	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi** **Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset** **Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana** **Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Masing-Masing Bidang yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Masing-Masing Bidang x 100%**	**63,64%** **60%** **63,64%** **70%**		**-**		**18,18%** **20%** **18,18%** **40%**	**532.301.500**		**242.713.500**	**-**	**99.186.967**	**-**	**40,87%**						**Irban Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Irban pengelolaan Keuangan dan Aset, irban Pembangunan Sarpras, dan Irban Perekonomian Kesejahteraan Rakyat**
		1	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			0 Dokumen		0 Dokumen			79.049.500	58,00%	48.798.000	52,63%	41.606.000	90,75%	85,26%						
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Penagwasan Yang Disusun						3 Rekomendasi													
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			0 Dokumen		0 Dokumen			15.130.000	35,00%	6.580.000	32,58%	4.930.000	93,10%	74,92%						
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun						1 Rekomendasi													
		3	Pendampingan Asistensi dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			67.728.000	40,00%	33.594.000	29,27%	19.826.667	73,18%	59,02%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						44 perangkat Daerah													
		4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			0 Dokumen		0 Dokumen			16.051.000	49,00%	14.401.000	2,29%	368.000	4,68%	2,56%						
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifiaksi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						44 Perangkat Daerah													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			0 Dokumen		0 Dokumen			320.159.000	11,00%	117.504.500	6,48%	20.750.300	58,92%	17,66%						
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						4 Dokumen													
		6 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			0 Dokumen		0 Dokumen			34.184.000	62,00%	21.836.000	34,24%	11.706.000	55,23%	53,61%						
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						44 Perangkat Daerah													
Rata-rata capaian kinerja															**62,64%**	**48,84%**						
Predikat kinerja															**rendah**	**sangat rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**13.802.855.540**		**8.629.809.846**		**5.878.102.900**								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)															**tinggi**	**rendah**						
				- Pelatihan di Kantor Sendiri oleh auditor tetap berjalan sesuai tata kala																		
				- Koordinasi pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik																		
				- SDM dan APIP yang berkompeten dan telah bersertifikasi																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja				- Adanya kegiatan mandatori dari Pusat yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan menggeser kegiatan yang sudah dijadwalkan pada																	
				- Kurangnya SDM yang melaksanakan ketugasan administrasi (JFU), sehingga pekerjaan administrasi juga dihandle oleh beberapa auditor																	
				- Kurangnya pegawai yang memahami teknologi informasi, mengingat saat ini ketugasan dilaksanakan menggunakan teknologi informasi																	

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kabupaten Morowali No : 050/2821/SE/2023 tanggal 05 Juni 2023 hal Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kabupaten Morowali berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2023. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Morowali

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHA N	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	**01**								**BELANJA INSPEKTORAT**				**21.629.412.885**	**21.952.597.833**	**323.184.948**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**17.302.741.885**	**17.682.738.833**	**379.996.948**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**12.360.000**	**12.360.000**	**0**
6	01	6	01	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.280.000	2.280.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.257.000	1.257.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.215.000	1.215.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	17 laporan	59.037.000	59.037.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**02**		**Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.952.657.000**	**11.407.785.000**	**455.128.000**
6	01	6	01	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83 orang/bulan	83 orang/bulan	10.933.452.000	11.388.580.000	455.128.000

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHA N	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000	1.150.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	12 laporan	12 laporan	15.180.000	15.180.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				**5.840.500**	**5.840.500**	**0**
6	01	6	01	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	932.500	932.500	0
6	01	6	01	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.120.000	1.120.000	0
6	01	6	01	01	01	2	03	03	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKDP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.088.000	1.088.000	0

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHA N	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	900.000	900.000	0
6	01	6	01	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000	900.000	0
6	01	6	01	01	01	2	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000	900.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**4.369.000**	**4.369.000**	**0**
6	01	6	01	01	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	4.369.000	4.369.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**542.938.830**	**575.592.250**	**32.653.420**
6	01	6	01	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	5.316.000	5.316.000	0
6	01	6	01	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Jenis	64 Jenis	72.439.330	75.969.330	3.530.000
6	01	6	01	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Jenis	19 Jenis	32.779.000	68.744.420	35.965.420
6	01	6	01	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	27.229.500	17.587.500	-9.642.000
6	01	6	01	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.180.000	3.000.000	-180.000
6	01	6	01	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	395.460.000	398.440.000	2.980.000
6	01	6	01	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.535.000	6.535.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**416.437.600**	**650.992.300**	**234.554.700**

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHA N	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	416.437.600	650.992.300	234.554.700
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**413.373.000**	**379.031.000**	**-34.342.000**
6	01	6	01	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.997.000	2.303.000	-3.694.000
6	01	6	01	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000	3.600.000	-600.000
6	01	6	01	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	25.800.000	18.600.000	-7.200.000
6	01	6	01	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	377.376.000	354.528.000	-22.848.000
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**494.344.000**	**609.134.000**	**114.790.000**
6	01	6	01	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.080.000	28.400.000	-1.680.000
6	01	6	01	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	208.204.000	110.374.000	-97.830.000
6	01	6	01	01	01	2	09	06	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	31.560.000	65.860.000	34.300.000
6	01	6	01	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	224.500.000	404.500.000	180.000.000
															0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**374.032.110**	**341.107.110**	**-32.925.000**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**231.493.110**	**226.415.110**	**-5.078.000**
6	01	6	01	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55 Laporan	55 Laporan	97.275.610	112.467.610	15.192.000

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHA N	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 laporan	35 laporan	86.865.750	66.595.750	-20.270.000
6	01	6	01	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	10.489.750	10.489.750	0
6	01	6	01	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	8.716.000	8.716.000	0
6	01	6	01	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11 Dokumen	11 Dokumen	28.146.000	28.146.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**				**142.539.000**	**114.692.000**	**-27.847.000**
6	01	6	01	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	1 laporan	7.185.000	7.174.000	-11.000
6	01	6	01	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	25 Laporan	135.354.000	107.518.000	-27.836.000
															0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**532.301.500**	**468.412.500**	**-63.889.000**
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**03**	**2**	**01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**				**94.179.500**	**94.044.500**	**-135.000**
6	01	6	01	01	03	2	01	01	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Penagwasan Yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	79.049.500	78.914.500	-135.000
6	01	6	01	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	15.130.000	15.130.000	0
6	**01**	**6**	**01**	**01**	**03**	**2**	**02**		**Pendampingan dan Asistensi**				**438.122.000**	**374.368.000**	**-63.754.000**
6	01	6	01	01	03	2	02	01	Pendampingan Asistensi dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 perangkat Daerah	44 perangkat Daerah	67.728.000	62.724.000	-5.004.000

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHA N	
1									2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifiaksi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	16.051.000	6.712.000	-9.339.000
6	01	6	01	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	4 Dokumen	320.159.000	280.514.000	-39.645.000
6	01	6	01	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	34.184.000	24.418.000	-9.766.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 (Cut Off 12 Juni 2024) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Kabupaten Morowali berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2023 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Morowali, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 705.970.120,- atau 5,11 %** dari anggaran semula murni Rp.**13.802.855.540,-** menjadi anggaran perubahan Rp.**14.508.825.660,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Inspektorat Tahun 2023.

Morowali, 24 Juni 2024

Inspektur

Kabupaten Morowali,

AFRIDIN, SH., M.SA.
Pembina Utama Mudah, IV/c
NIP196703081992031010

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI

2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Visi yang terdapat di dalam Renja merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh OPD pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, OPD menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, OPD memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , dalam rangka melaksanakan prioritas segala bentuk program/kegiatan yang menuju kegiatan prioritas. Sekretariat Daerah dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai bentuk perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja). Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini mengacu kepada Rencana Kerja Kabupaten Morowali. Perencanaan-perencanaan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 011 tahun 2016) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka Rencana Sekretariat Daerah direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 dengan mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
39. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat.
40. Peraturan kepmendagri 050 tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
41. Peraturan inmendagri 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

42. Peraturan Bupati RPD nomor ……tahun 2023.
43. RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan RENJA

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali adalah :

a) Memberikan landasan kebijakan pembangunan selama Satu tahun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran OPD;
b) Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025,
c) Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di Bagian masing-masing ;
d) Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan sebagai refrensi wajib dalam penyusunan LAKIP setiap tahun.
e) Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sekaligus rangka mewujudkan tujuan dan sasaran OPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan RENJA

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah adalah:

a). Untuk memudahkan unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dalam merumuskan kembali tujuan dan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur pada tahun 2025,
b) Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dalam memahami dan menilai serta mengevaluasi pencapaian arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan ,
c) Sebagai penjabaran kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional melalui Pelayanan yang maksimal

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai bagian:
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 maksud dan tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB.II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menguraikan bagian:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

menguraikan bagian:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3 Program dan Kegiatan dan sub kegiatan

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V PENUTUP,

memberikan penjelasan secara ringkas mengenai pelaksanaan, kecukupan anggaran atau tidak, kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, dan informasi nama perangkat daerah dan pengesahan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang dimaksud.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk pencapaian Sasaran strategis tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali adalah Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Layanan Investasi Daerah serta Tumbuhnya Investasi Daerah. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan dengan cakupan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
     - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - B. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - C. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - a) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - D. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
     - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
     - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - H. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM SEKRETARIAT DAERAH
   - A. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
   - B. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
     - a) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Sekretariat Daerah
3. PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN SEKRETARIAT DAERAH
   - A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Sekretariat Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
     - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Sekretariat Daerah

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Sekretariat Daerah

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Sekretariat Daerah

4. PROGRAM PROGRAM PROMOSI SEKRETARIAT DAERAH

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Sekretariat Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian kinerja tahun sebelumnya. Renstra Kabupaten Morowali telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra SEKRETARIAT DAERAH dilihat pada tabel berikut ini :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali menangani Urusan Wajib untuk itu berkewajiban memenuhi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambaran Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dapat di lihat pada Tabel T-C.30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-2 "Meningkatkan pengelolaan SDA Guna meningkatkan PAD dengan melibatkan UKM local dan koperasi agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menyerap TK local dengan tetap menjaga hak – hak pekerja, iklim investasi yang baik dan kelestarian alam". Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan PAD, Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan penyerapan tenaga kerja local melalui pelibatan UKM dan koperasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi hak – hak pekerja serta tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana kerja (renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali yaitu:

a) Belum optimalnya Pertumbuhan Investasi Daerah,
b) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terhadap Sekretariat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali perlu dilakukan Review atas rancangan awal RKPD sehingga dapat dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dimana proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan penjelasan atas temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Adapun hasil review tersebut dapat dilahat pada table sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Percepatan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki oleh masing-masing daerah, seyogyanya didukung oleh perencanaan yang sistematis dan terstruktur serta melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan. Visi merupakan tonggak tujuan yang memberi arah kepada semua pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatannya masing-masing. Dilain pihak, Misi merupakan cara bagaimana mewujudkan Visi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus realistis,disusun dan dirumuskan secara rinci disertai dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali merancang semua program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dan didasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali serta Visi dan Misi Bupati Morowali.

Adapun program dan kegiatan tersebut diseleranggakan Sekertariat Daerah untuk Penyelenggaraan tugas pemerintah dan kemasyarakatan dalam bentuk pemberian pelayanan umum dan pimpinan dan tidak berkaitan langsung dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (1 hingga 5 Tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Morowalidapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejau mana visi dan misi telah dicapai mengacu pada tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan *(Goals)* merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa depan. Tujuan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam perioe 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Dengan demikian, tujuan dan sasaran merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Dalam rangka perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, Sekertariat Daerah telah memperhatikan Reancangan Awal RPJMD dimana perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang sinergi harus menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung tercapainya sasaran strategis RPJMD.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis ini juga akan tercapai. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat Daerah yang akan dicapai untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
2. Meningkatnya Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali di susun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 yang Berisikan penjelasan mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
     - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - B. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
     - b) Sub Kegiatan Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
     - c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
   - C. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
     - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
     - b) Sub Kegiatan Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
     - c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
   - D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - a) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
     - b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - E. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - F. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM SEKRETARIAT DAERAH
    A. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
        a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Sekretariat daerah Kabupaten/Kota
        b) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota
    B. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Sekretariat Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
        a) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Sekretariat Daerah
        b) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Sekretariat Daerah
3. PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN SEKRETARIAT DAERAH
    A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Sekretariat Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
        a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Sekretariat Daerah
        b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Sekretariat Daerah
        c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Sekretariat Daerah
4. PROGRAM PROGRAM PROMOSI SEKRETARIAT DAERAH
    A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Sekretariat Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
        a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten/Kota
        b) Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Sekretariat Daerah
5. PROGRAM PROGRAM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
    A. Kegiatan Pelayanan Administrasi di Sekretariat Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
        a) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Sekretariat Daerah Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
        b) Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Sekretariat Daerah
        c) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI SEKRETARIAT DAERAH
    A. Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Sekretariat Daerah yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sekretariat Daerah berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali merupakan program prioritas Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap tahun anggaran. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali pada Tahun 2025 dapat dilihat tabel exel Sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*

Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2025	2022	2023	2023	2023	2024	2024		
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
4.					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.	01.				Sekretariat Daerah										
					Bagian Umum										
4.	01.	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00
4.	01.	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	100	100	100	1.00

4.	01.	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keuangan pada Bagian Umum	1	-	-	-	-	1	1	1	1.00
4.	01.	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	1.00
4.	01.	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	96	96	*97*	*97*	100	96	96	289	3.01
4.	01.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	143	132	*122*	*122*	100	143	143	397	2.78
4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	1.00
4.	01.	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	180	160	160	160	100	-	-	320	1.78
4.	01.	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Bintek ASN	4	-	3	3	100	4	4	7	1.75
4.	01.	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	1.00
4.	01.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19	5	*12*	*12*	100	36	36	53	2.79
4.	01.	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga	2	2	*10*	*10*	100	9	9	21	10.50
4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya' Bahan Logistik Kantor	7	4	*1*	*1*	100	7	7	12	1.71
4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4	4	*1*	*1*	100	4	4	9	2.25

4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 tahun)	100	100	*36*	*36*	100	100	100	236	2.36
4.	01.	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	1.00
4.	01.	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100	100	100	1	1	201	2.01
4.	01.	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	8	*1*	*1*	100	8	8	17	2.13
4.	01.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	28	28	*28*	*28*	100	27	27	83	2.96
4.	01.	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	1.00
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33	33	*22*	*22*	100	32	32	87	2.64
4.	01.	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28	7	*8*	*8*	100	40	40	55	1.96
4.	01.	01	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	1.00
4.	01.	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	100	-	-	4	2.00

4.	01.	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	100	1	1	5	2.50
4.	01.	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	100	1	1	5	2.50
4.	01.	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	300	3.00
4.	01.	01	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	1.00
4.	01.	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8	8	1	1	100	1	1	10	1.25
4.	01.	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	11	4	1	1	100	1	1	6	0.55
4.	01.	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	8	-	1	1	100	1	1	2	0.25
					BAGIAN ORGANISASI										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00
4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**86**	**77**	**77**	100.00	**100**	**100**	263	2.63

4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	9	9	9	100.00	9	9	27	3.38
4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**3.00**
4.	01.	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	350	86	285	285	100.00	300	300	671	1.92
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**100**	77	77	100.00	100	100	277	2.77
4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	10	86	7	7	100.00	10	10	103	10.30
4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	7	86	3	3	100.00	5	5	94	13.43
4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	2	86	2	2	100.00	2	2	90	45.00
4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	86	3	3	100.00	3	3	92	30.67

4.	01.	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	**100**	77	77	100.00	100	100	277	2.77
4.	01.	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengdaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	0	86	28	28	100.00	12	12	126	-
4.	01.	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	**100**	77	77	100.00	100	100	277	2.77
4.	01.	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	86	1	1	100.00	1	1	88	88.00
4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	**100**	**77**	**77**	100.00	100	100	277	2.77
4.	01.	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (%) (Unit)	7	86	2	2	100.00	4	4	92	13.14
4.	01.	01.	2.13		**Penataan Organisasi**	**Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100**	**100**	**77**	**77**	100.00	**100**	**100**	277	2.77
4.	01.	01.	2.13	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	86	56	56	100.00	2	2	144	72

						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	86	0	0	100.00	0	0	86	86
						Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan (Dokumen)	1	86	0	0	100.00	0	0	86	86.00
						Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan (Aplikasi)	1	86	0	0	100.00	0	0	86	86.00
						Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah (Paket)	1	0	0	0	100.00	0	0	-	-
4.	01.	01.	2.13	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	1	86	1	1	100.00	1	1	88	88.00
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	86	1	1	100.00	1	1	88	88.00
						Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	86	1	1	100.00	1	1	88	88.00
						Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik	3	0	3	3	100.00	-	-	3	1
						Jumlah Peraturan Bupati	1	0	-	-	0.00	-	-	-	0
						Jumlah OPD Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah	49	0	-	-	0.00	-	-	-	0
4.	01.	01.	2.13	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	86	-	-	0.00	1	1	87	87

						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	47	0	47	47	100.00	0	0	47	1
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi	`	0	15	15	100.00	0	0	15	15
						Jumlah OPD Yang Mengikuti PMPRB	15	0	15	15	100.00	0	0	15	1
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	0	0	0	0.00	0	0	-	0
						Jumlah Dokumen Peningkatan Reformasi Birokrasi	49	0	0	0	0.00	0	0	-	0
4.	01.	01.	2.13	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Dokumen)	1	0	1	1	100.00	1	1	2	2
					Bagian Protokol										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00
4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00
4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	20	19	20	19	95.0	20	19	57	2.85
4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**-**	-	-	0	-	-	-	-

4.	01.	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL	30	23	23	23	0	30	30	76	2.53
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	300	3.00
4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)	8	5	8	8	100	8	8	21	2.63
4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	2	2	2	2	100	2	2	6	3.00
4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	300	3.00
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	8	6	8	8	100	8	8	22	2.75
4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	16	20	20	100	20	20	56	2.80
4.	01.	01	2.14		**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase Kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00
4.	01.	01	2.14	01.	Sub Kegiatan Fasilitasi keprotokolan	Jumlah peserta bimtek keprotokolan	25	25	-	-	0.00	25	25	50	2.00
						Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol	5	18	12	12	100.00	5	5	35	7.00

					Bagian Tata Pemerintahan										
4.	**01.**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	**01.**	**01**	**0.1**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	**01.**	01	0.08	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	4 Dokumen	28 Dokumen	100
4.	**01.**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	**01.**	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	100
4.	**01.**	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	**01.**	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	100
4.	**01.**	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	100
4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	100
4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100

4.	**01.**	01	2.06		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	**01.**	01	2.06	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	0 Unit	1 Unit	100
4.	**01.**	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100
4.	**01.**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100
4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	11 Unit	0 Unit	0 Unit	100
4.	**01.**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	**01.**	**02**	**01**		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**persentase administrasi tata pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	01.	02	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen	100
4.	01.	02	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	30 Dokumen	100

4.	01.	02	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen	100
4.	**01.**	**02**	**04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**persentase kerja sama daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.	01.	02	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	100
					Bagian Kesra										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00
4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00
4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	15	16	16	15	93.8	15	15	46	3.07
4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**-**	-	-	0	-	-	-	-
4.	01.	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	-	-	-	0	-	-	-	-
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	300	3.00

4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	3	8	8	100	3	3	14	14.00
4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Paket)	1	1	1	1	100	1	1	3	3.00
4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor dan Penggandaan Dokumen (Paket)	1	1	1	1	100	1	1	3	3.00
4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	1	1	1	1	100	1	1	3	3.00
4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	300	3.00
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	1	0	1	1	100	1	1	2	2.00
4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	0	-	-	0	-	-	-	-
4.	01.	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00

4.	01.	02	2.02		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kegiatan dan Pembinaan dibidang Keagamaan, Sosial, Kemasyarakatan yang difasilitasi**	**85**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	240	2.82
4.	01.	02	2.02	01.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan dan Pembinaan keagamaan yang difasilitasi	7	10	16	5	31.25	15	7	22	3.14
						Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang difasilitasi	2,125	1896	1,897	1,896	99.95	1949	2,073	5,865	2.76
						Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang difasilitasi	46	52	20	131	655.00	25	18	201	4.37
						Jumlah Lembaga/ Organisasi Keagamaan Yang difasilitasi	16	11	7	9	128.57	10	16	36	2.25
4.	01.	02	2.02	02.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Sosial	7	1	7	4	57.14	7	1	6	0.86
4.	01.	02	2.02	03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	0	7	6	85.71	5	4	10	2.00
					Bagian Hukum										
4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PRESENTASE CAPAIAN KINERJA**									

4.	01.	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	01.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446 Dokumen								
4.	01.	01	2.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	01.	01	2.05	09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang								
4.	01.	01	2.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	01.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket								
4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Alat Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket								
4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket								
4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan								
4.	01.	01	2.07		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	01.	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket								
4.	01.	01	2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

4.	01.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan								
4.	01.	01	2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unut								
4	01	02	2.03		***PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***		***100%***								
4	01	02	2.03	01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	11 Dokumen								
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	14 Kasus								
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi	446 Dokumen								
4.					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**		**100**	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00
4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	100	100	0	100	100	300	3.00
4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00
4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00
4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Kantor dan Penggandaan	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00
4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	-	-	-	-	-	-	12	1.00
4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	300	3.00
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	2	1.00
4.	01.	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00

4.	01.	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3.00
4.	01.	03	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kegiatan Kebijakan Perekonomian**	**100**	-	-	-	-	-	-	**100**	1.00
4.	01.	03	2.01	01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00
4.	01.	03	2.01		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	-	-	-	-	-	-	4	1.00
4.	01.	03	2.01		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	-	-	-	-	-	-	1	1.00
4.	01.	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	-	-	-	-	-	-	100	1.00
4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Peretanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	-	-	-	-	-	-	1	

4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	-	-	-	-	-	-	1	
4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	1	-	-	-	-	-	-	1	
					BAGIAN PBJ											
4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3
4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2	4	1	1	3	8	8
4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	2	4	1	1	1	6	6

4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	10	10	10	10	10	10	10	30	3
4.	01.	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	3	3
4.	01.	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3
4.	01.	03	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	300	3
4.	01.	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	180	98	100	1	1	1	180	279	2
4.	01.	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	80	1	1	1	100	1	1	3	0
4.	01.	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	3	1	1	1	100	1	1	3	0

4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja Administrasi Pembangunan**	**100%**	**0%**	-	-	0.00	**100**	**38%**	*13%*	
4.	01.	01	2.06		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***100%***	**0%**	-	-	0.00	*100*	*25%*	*8%*	
4.	01.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	0	-	-	0.00	12	3	3	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***100%***	**0%**	-	-	0.00	*100*	*0%*	*0%*	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9	0	-	-	0.00	3	0	0	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	12	0	-	-	0.00	6	0	0	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***100%***	**0%**	-	-	0.00	*100*	*60%*	*20%*	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	0	-	-	0.00	2	1	1	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	0	-	-	0.00	1	1	1	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	0	-	-	0.00	3	2	2	

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	0	-	-	0.00	12	3	3	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***100%***	**0%**	-	-	0.00	*100*	*0%*	*0%*	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	-	-	0.00	1	0	0	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100%***	**0%**	-	-	0.00	*100*	*100%*	*33%*	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	0	-	-	0.00	2	2	2	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***100%***	**0%**	-	-	0.00	*100*	*0.4*	*13%*	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	0	-	-	0.00	5	2	2	
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**0%**	-	-	0.00	**95**	**17%**	*6%*	

					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	***100%***	**0%**	-	-	0.00	*95*	**17%**	*6%*	
					Fasilitas Penyusun Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6	0	-	-	0.00	2	0	0	
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48	0	-	-	0.00	16	4	4	
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	48	0	-	-	0.00	16	4	4	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023-2024 dan Prakiraan 2025-2026

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bagian Umum											
1	Jumlah Tenaga Ahli Pendamping			0	1	1	1	0	1	1	1	
2	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya			97	96	96	96	97	96	96	96	
3	Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya			143	143	0	0	143	143	0	0	
4	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas dan Atribut			0	162	180	180	0	162	0	180	
5	Jumlah Kegiatan Bintek ASN			4	22	23	4	3	22	23	4	
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36	19	19	10	36	19	19	10	
7	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga			2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Tersedianya' Bahan Logistik Kantor			7	7	7	7	7	7	7	7	
9	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			4	4	4	4	4	4	4	4	

10	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 tahun)			100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			38	38	38	38	38	38	38	38	
12	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			8	8	8	8	8	8	8	8	
14	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			28	33	33	33	33	33	33	33	
15	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9	32	28	28	28	28	28	28	
16	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2	2	2	2	2	2	2	2	
17	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3	3	2	2	3	2	2	2	
18	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3	3	2	2	3	2	2	2	
19	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3	3	2	2	3	2	2	2	
20	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			8	8	11	8	8	11	11	8	

21	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			4	6	11	5	4	11	11	4	
22	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			3	0	3	3	3	3	3	3	
	Bagian Organisasi											
1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			9	9	8	8	9	9	8	8	
2	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			285	300	300	350	285	300	300	350	
3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)			7	10	12	15	7	10	12	15	
4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)			3	5	7	8	3	5	7	8	
5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)			2	2	2	3	2	2	2	3	
6	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			3	3	3	3	3	3	3	3	
7	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)			28	12	0	8	28	12	0	8	

8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)			2	4	7	8	2	4	7	8	
9	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah (Dokumen)			56	2	2	2	56	2	2	2	
10	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)			0	0	1	2	0	0	1	2	
11	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan (Dokumen)			0	0	1	1	0	0	1	1	
12	Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan (Aplikasi)			0	0	1	1	0	0	1	1	
13	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah (Paket)			0	0	1	1	0	0	1	1	
14	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik			1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			1	1	1	1	1	1	1	1	
17	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik			3	0	1	1	3	0	1	1	
18	Jumlah Peraturan Bupati			1	1	1	1	1	1	1	1	

19	Jumlah OPD Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah			0	0	49	49	0	0	49	49	
20	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)			0	1	1	1	0	1	1	1	
21	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)			47	0	47	47	47	0	47	47	
22	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi (OPD)			15	0	0	0	15	0	0	0	
23	Jumlah OPD Yang Mengikuti PMPRB (Dokumen)			15	0	0	0	15	0	0	0	
24	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			0	0	1	1	0	0	1	1	
25	Jumlah Dokumen Peningkatan Reformasi Birokrasi			0	0	49	49	0	0	49	49	
26	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bagian Protokol											
1	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)			20	20	20	20	19	19	20	20	
2	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL			23	30	30	30	23	30	30	30	
3	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)			8	8	8	8	8	8	8	8	

4	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)			2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)			8	8	8	8	8	8	8	8	
6	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			20	20	20	20	20	20	20	20	
7	Jumlah peserta bimtek keprotokolan			0	25	25	25	0	25	25	25	
8	Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol			12	12	15	15	12	11	15	15	
	Bagian Tata Pemerintahan											
1	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
6	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

7	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
8	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
9	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
11	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
13	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
14	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
16	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	11 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
17	Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan			100	100	100	100	100	100	100	100	
18	persentase administrasi tata pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	100	

19	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
20	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
21	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
22	persentase kerja sama daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Bagian Kesra											
1	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)			16	15	15	15	15	15	15	15	
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			0	4	4	4	0	0	2	2	
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)			8	3	3	3	8	3	1	3	
4	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor dan Penggandaan Dokumen (Paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	

7	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)			1	1	1	1	1	1	1	2	
8	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			0	3	3	3	0	3	3	3	
9	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi			16	16	16	16	5	7	7	16	
10	Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang difasilitas			1897	1949	1978	1978	1896	2073	2,125	2,125	
11	Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang difasilitasi			20	25	25	25	131	25	46	46	
12	Jumlah Lembaga/ Organisasi Keagamaan Yang difasilitasi			7	10	10	10	9	10	16	16	
13	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Sosial			7	7	7	7	4	7	1	7	
14	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Masyarakat			7	5	7	7	6	5	7	7	
	Bagian PBJ											
1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	

2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD (Laporan)			10	10	10	10	10	10	10	10	
5	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)					1						
6	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)			180	1	180	1	1	1	1	1	
7	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)			80	1	80	1	1	1	1	1	
8	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)			1	1	3	1	1	1	1	1	

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : Bagian Sekretariat Daerah Morowali

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	BAGIAN UMUM										
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bag. Umum**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bag. Umum**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**		
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**20,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**20,000,000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag. Umum	*Tersedianya Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keuangan pada Bagian Umum*	1 ASN Pendamping	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag. Umum	*Tersedianya Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keuangan pada Bagian Umum*	1 ASN Pendamping	20,000,000	
b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	-	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*ASN Sekretariat Daerah*	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	96 ASN	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*ASN Sekretariat Daerah*	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	96 ASN	-	Anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN belum terakomodir
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*PHL Bagian Umum*	Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	*143 PHL*	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*PHL Bagian Umum*	Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	*143 PHL*	-	Anggaran Honorarium PHL, Sopi, Sekpri dan Ajudan belum terakomidir
c.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**501,216,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**501,216,000**	

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*ASN dan PHL Bagian Umum*	Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan atribut	180 Org	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*ASN dan PHL Bagian Umum*	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	180 Org	-	Anggaran utk belanja Pakaian Dinas ASN dan PHL Sekretariat Daerah belum terkafer
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*ASN Bagian Umum dan PHL*	Jumlah Kegiatan Bintek ASN	*5 Kegiatan*	501,216,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*ASN Bagian Umum dan PHL*	Jumlah Kegiatan Bintek ASN	*5 Kegiatan*	501,216,000	
d.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**9,213,455,610**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**9,213,455,610**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Paket	1,583,302,810	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Paket	1,583,302,810	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Bagian Umum (Tersebar)*	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga	9 Paket	124,504,450	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Bagian Umum (Tersebar)*	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga	9 Paket	124,504,450	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya' Bahan Logistik Kantor	7 Paket	2,163,308,850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya' Bahan Logistik Kantor	7 Paket	2,163,308,850	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Bagian Umum*	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	*286,881,500*	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Bagian Umum*	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	*286,881,500*	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Bagian Umum (Sekda, Aisten, Staf Ahli & Bagian Umum)*	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 tahun)	100 Laporan	5,055,458,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Bagian Umum (Sekda, Aisten, Staf Ahli & Bagian Umum)*	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 tahun)	100 Laporan	5,055,458,000	
e.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**2,515,574,912**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**2,515,574,912**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*38 Kegiatan*	975,107,412	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*38 Kegiatan*	975,107,412	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Bagian Umum*	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	*421,127,500*	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Bagian Umum*	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	*421,127,500*	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Bagian Umum*	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*8 Kegiatan*	1,119,340,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Bagian Umum*	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*8 Kegiatan*	1,119,340,000	

f.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**11,090,226,093**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**11,090,226,093**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Bagian Umum (Kendaraan Operasional Pimpinan)*	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 Kegiatan	*554,170,000*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Bagian Umum (Kendaraan Operasional Pimpinan)*	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 Kegiatan	*554,170,000*	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*32 Kendaraan*	10,536,056,093	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*32 Kendaraan*	10,536,056,093	
g.	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**8,547,019,484**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**8,547,019,484**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	777,129,484	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	777,129,484	
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	303,600,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	303,600,000	
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Kegiatan	400,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Kegiatan	400,000,000	
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Laporan	7,066,290,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Laporan	7,066,290,000	

h.	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100**	**3,112,507,504**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100**	**3,112,507,504**	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*8 Kegiatan*	1,421,734,219	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*8 Kegiatan*	1,421,734,219	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (WKDH)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	16 Kegiatan	1,257,507,505	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (WKDH)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	16 Kegiatan	1,257,507,505	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Bagian Umum (Sekretaris Daerah)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 Kegiatan	433,265,780	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Bagian Umum (Sekretaris Daerah)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 Kegiatan	433,265,780	Anggaran untuk belanja kebutuhan Rumah Jabatan Sekda belum sepenuhnya terakomodir sesuai RKBMD.
	BAGIAN ORGANISASI										
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota (%)**	**100**	**2,648,236,491**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota (%)**	**100**	**2,648,236,491**	
A.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**198,240,000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**198,240,000**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	197,240,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	197,240,000	
B.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**66,960,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**66,960,000**	

1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	66,960,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	66,960,000	
C.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**422,322,408**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	**422,322,408**	-
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	10	78,269,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	10	78,269,000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	5	93,816,158	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	5	93,816,158	
3	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	2	51,749,250	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	2	51,749,250	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	198,488,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	198,488,000	
D.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	-	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	-	
1	Sub Kegiatan Pengdaan Mebel	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	0	-	Sub Kegiatan Pengdaan Mebel	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	0	-	
E.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%))**	**100**	**6,820,000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%))**	**100**	**6,820,000**	

1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	6,820,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	6,820,000	
F.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	**51,590,000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	**51,590,000**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	7	51,590,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Bag. Organisasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	7	51,590,000	
G.	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Pemerintah Daerah (%)**	**100**	**1,902,304,083**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Pemerintah Daerah (%)**	**100**	**1,902,304,083**	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	787,258,360	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	787,258,360	
		Bag. Organisasi	'Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	-		**Bag. Organisasi**	'Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan (Dokumen)	1	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan (Dokumen)	1	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan (Aplikasi)	1	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan (Aplikasi)	1	-	

		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah (Paket)	1	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah (Paket)	1	-	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**Bag. Organisasi**	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	1	602,295,230	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**Bag. Organisasi**	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik (Laporan)	1	602,295,230	
		Bag. Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Peraturan Bupati Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Laporan)	0	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik	3	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah Peraturan Bupati	1	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Peraturan Bupati Pakaian Dinas (Dokumen)	1	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah OPD Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah	49	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah (Dokumen)	49	-	
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	436,157,383	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	436,157,383	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)	47	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)	47	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi (OPD)	0	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi (OPD)	0	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah OPD Yang Mengikuti PMPRB (Dokumen)	15	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah OPD Yang Mengikuti PMPRB (Dokumen)	15	-	

		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	-	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Reformasi Birokrasi	49	-		**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Peningkatan Reformasi Birokrasi	49	-	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Dokumen)	1	76,593,110	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Dokumen)	1	76,593,110	
	BAGIAN PROTOKOL										
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Protokol**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Protokol**	**100**	**4,034,614,104**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Protokol**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Protokol**	**100**	**4,034,614,104**	
A.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**606,920,000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**606,920,000**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Protokol**	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	20	606,920,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Protokol**	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	20	606,920,000	
B.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**71,914,500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**71,914,500**	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	**Bag. Protokol**	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL	30	71,914,500	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	**Bag. Protokol**	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL	30	71,914,500	
C.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	**2,216,172,804**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	**2,216,172,804**	

1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Protokol	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)	8	568,092,804	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Protokol	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)	8	568,092,804	
2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Protokol	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	2	1,648,080,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Protokol	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	2	1,648,080,000	
D.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Protokol**	**Terpenuhinya Kebutuhan barang yang akan dipelihara**	**100**	**131,700,000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Protokol**	**Terpenuhinya Kebutuhan barang yang akan dipelihara**	**100**	**131,700,000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Bag. Protokol**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	8	102,650,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Bag. Protokol**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	8	102,650,000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bag. Protokol	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	29,050,000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bag. Protokol	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	29,050,000	
E	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan**	**Bag. Protokol**	**Persentase Kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	100	1,007,906,800	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan**	**Bag. Protokol**	**Persentase Kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	100	1,007,906,800	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi keprotokolan	Bag. Protokol	Jumlah peserta bimtek keprotokolan	25	345,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi keprotokolan	Bag. Protokol	Jumlah peserta bimtek keprotokolan	25	345,000,000	
2		Bag. Protokol	Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol	6	662,906,800		Bag. Protokol	Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol	6	662,906,800	
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN										

I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**	**772,013,682**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**	**772,013,682**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**295,800,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**295,800,000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	295,800,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	295,800,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100**	**5,250,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100**	**5,250,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,250,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,250,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**369,038,210**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**369,038,210**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,370,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,370,400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,473,310	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,473,310	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,647,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,647,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. TAPEM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290,547,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. TAPEM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290,547,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**69,705,472**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**69,705,472**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. TAPEM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	44,590,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. TAPEM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	44,590,000	
	Pengadaan Mebel	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25,115,472	Pengadaan Mebel	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25,115,472	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**32,220,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**32,220,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. TAPEM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24,550,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. TAPEM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	24,550,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. TAPEM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7,670,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. TAPEM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7,670,000	
II.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan**	**100**	**670,890,330**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan**	**100**	**1,523,786,220**	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		**persentase administrasi tata pemerintahan**	**100**	**607,890,330**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**persentase administrasi tata pemerintahan**	**100**	**1,178,963,320**	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	68,556,270	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	254,442,570	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	444,888,740	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	219,020,000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	94,445,320	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	705,500,750	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**persentase kerja sama daerah**	**100**	**63,000,000**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**persentase kerja sama daerah**	**100**	**344,822,900**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	63,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	344,822,900	
	BAGIAN KESRA										
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Kesra**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**332,516,820**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Kesra**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**665,025,050**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Bag. Kesra**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**-**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Kesra**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**348,120,000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Kesra**	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	15	-	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Kesra**	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	15	348,120,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Bag. Kesra**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Kesra**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**35,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Bag. Kesra**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Bag. Kesra**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	35,000,000	Perlu dianggarkan mengingat Bagian Kesra Memerlukan ASN yang Terlatih dan berintergritas

A.	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Bag. Kesra**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	**308,386,820**	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Bag. Kesra**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	**257,775,050**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bag. Kesra	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	54,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bag. Kesra	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	54,000,000	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bag. Kesra	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Paket)	1	20,789,820	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bag. Kesra	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Paket)	1	12,887,550	
4	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. Kesra	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen (Paket)	1	50,584,500	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. Kesra	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen (Paket)	1	7,875,000	
7	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam daerah	Bag. Kesra	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	1	183,012,500	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam daerah	Bag. Kesra	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	1	183,012,500	
B.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bag. Kesra	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**24,130,000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Bag. Kesra	**Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran (%)**	**100**	**24,130,000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Kesra	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	1	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Kesra	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	1	15,000,000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bag. Kesra	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	9,130,000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bag. Kesra	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	9,130,000	

II.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Bag. Kesra	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**14,667,483,180**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Bag. Kesra	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**52,730,379,270**	
A.	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Bag. Kesra	**Persentase Kegiatan dan Pembinaan dibidang Keagamaan, Sosial, Kemasyarakatan yang difasilitasi**	**85**	**14,667,483,180**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Bag. Kesra	**Persentase Kegiatan dan Pembinaan dibidang Keagamaan, Sosial, Kemasyarakatan yang difasilitasi**	**85**	**52,730,379,270**	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bag. Kesra	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	7	4,242,537,500	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bag. Kesra	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	7	4,293,149,270	
		Bag. Kesra	Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang difasilitas	2,073	-		Bag. Kesra	Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang difasilitas	2,125	24,210,480,000	Perlu Penambahan Anggaran Untuk Honor Pengurus Rumah Ibadah, Guru Keagamaan dan Petugas Kebersihan Rumah Ibadah se Kab. Morowali selama 12 Bulan
		Bag. Kesra	Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang difasilitasi	14	5,404,195,680		Bag. Kesra	Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang difasilitasi	46	19,206,000,000	Perlu Penambahan Anggaran Untuk Lanjutan Pembangunan Pondok Pesantren dan Usulan Baru Sarana Rumah Ibadah
		Bag. Kesra	Jumlah Lembaga/ Organisasi Keagamaan Yang difasilitasi	10	4,925,000,000		Bag. Kesra	Jumlah Lembaga/ Organisasi Keagamaan Yang difasilitasi	16	4,925,000,000	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bag. Kesra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Sosial	7	95,750,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bag. Kesra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Sosial	7	95,750,000	

3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bag. Kesra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Masyarakat	5		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bag. Kesra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Bagian Hukum**	***Presentase Capaian Kinerja***	**100%**		***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Bagian Hukum**	***Presentase Capaian Kinerja***	**100%**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Hukum	***Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Bagian Hukum	***Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446 Dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Hukum	***Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	*100%*		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Bagian Hukum	***Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	*100%*		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	86,770,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bagian Hukum	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	86,770,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Hukum	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*100%*		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Bagian Hukum	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*100%*		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Hukum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,215,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Hukum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,215,300	
	Penyediaan Alat Logistik Kantor	Bagian Hukum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,879,480	Penyediaan Alat Logistik Kantor	Bagian Hukum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,879,480	

	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bagian Hukum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,446,750	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bagian Hukum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,446,750	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	286,954,000	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	286,954,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Bagian Hukum	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	1 Paket		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	11,120,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Hukum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	11,120,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		100%	Bagian Hukum	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Hukum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	17,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Hukum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	17,800,000	
	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Hukum		100%				***PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***	100%		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum	***Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	100%		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	Bagian Hukum	***Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	100%		
	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	11 Dokumen	1,510,724,000	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	11 Dokumen	1,510,724,000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	14 Kasus	1.363.730.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	14 Kasus	1,363,730,000	

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi	446 Dokumen	116,320,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi	446 Dokumen	116,320,000	
I.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Bag. Perekonomian dan SDA**				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	Bag. Perekonomian dan SDA				
	Sekretariat Daerah	**Bag. Perekonomian dan SDA**				**Sekretariat Daerah**	Bag. Perekonomian dan SDA				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	**Bag. Perekonomian dan SDA**		**100**	**536,327,680**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	Bag. Perekonomian dan SDA		**100**	**536,327,680**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Bag. Perekonomian dan SDA**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**278,500,000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bag. Perekonomian dan SDA	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	**278,500,000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN	1	273,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN	1	273,000,000	
A.	Sub Kegiatan engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1	**5,500,000**	Sub Kegiatan engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1	**5,500,000**	
1	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Perekonomian dan SDA**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**217,507,680**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bag. Perekonomian dan SDA	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**217,507,680**	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	76,735,200	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bag. Perekonomian dan SDA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	76,735,200	

4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1	18,983,480	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1	18,983,480	
7	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Paket Barang Cetak Kantor dan Penggandaan	1	13,513,000	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Paket Barang Cetak Kantor dan Penggandaan	1	13,513,000	
B.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	108,276,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	108,276,000	
1	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Perekonomian dan SDA**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**40,320,000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bag. Perekonomian dan SDA	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**40,320,000**	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	2	25,320,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	2	25,320,000	
II.	Pengadaan Mebel	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Paket Mebel	1	15,000,000	Pengadaan Mebel	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Paket Mebel	1	15,000,000	
A.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Bag. Perekonomian dan SDA**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100**		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Bag. Perekonomian dan SDA	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100**		
1	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Bag. Perekonomian dan SDA**	**Persentase Kegiatan Kebijakan Perekonomian**	**100**	**525,882,000**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Bag. Perekonomian dan SDA	**Persentase Kegiatan Kebijakan Perekonomian**	**100**	**525,882,000**	

2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	85,736,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	85,736,000	
3	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	100,300,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	100,300,000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	339,846,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	339,846,000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	**310,790,000**	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bag. Perekonomian dan SDA	Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	**310,790,000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Peretanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	110,460,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Peretanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	110,460,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	100,720,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	100,720,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	**Bag. Perekonomian dan SDA**	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	1	99,610,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bag. Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	1	99,610,000	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (%)**	**100**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum (%)**	**100**		
A	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum (%)**	**100**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	**100**		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp25,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp25,000,000	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp18,363,050	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	Rp18,363,050	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Rp172,564,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	10 Laporan	Rp172,564,800	

B	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	Rp15,000,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	**100**	Rp15,000,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	1	Rp15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)**	1	Rp15,000,000	
II	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)**	**100**		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)**	**100**		
A	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)**	**100**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	**100**		
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	180	Rp927,194,780	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	180	Rp927,194,780	
2	Pengeloaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	80	Rp455,581,440	Pengeloaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	80	Rp455,581,440	
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	3	Rp150,000,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**Bag.Pengadaan Barang dan Jasa**		3	Rp150,000,000	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Capaian Kinerja Administrasi Pembangunan**	**100%**	**1,306,952,946**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Capaian Kinerja Administrasi Pembangunan**	**100%**	**938,253,650**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*100%*	*403,320,000*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Bagian Administrasi Pembangunan*	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100%*	*360,840,000*	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	403,320,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	360,840,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*100%*	*26,000,000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Bagian Administrasi Pembangunan*	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100%*	*109,371,000*	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	11,571,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	*97,800,000*	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***100%***	***692,661,519***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Bagian Administrasi Pembangunan**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***412,807,650***	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	332,050,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44,990,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,352,150	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	17,256,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	324,611,519	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	326,209,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***100%***	***153,731,427***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Bagian Administrasi Pembangunan**	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***22,995,000***	
	Pengadaan Mebel	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	153,731,427	Pengadaan Mebel	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22,995,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100%***	***9,140,000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Bagian Administrasi Pembangunan**	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***7,140,000***	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9,140,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	7,140,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***100%***	***22,100,000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Bagian Administrasi Pembangunan***	***Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***25,100,000***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	22,100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	25,100,000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**967,911,278**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**1,422,586,350**	

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	***95%***	***967,911,278***	***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Bagian Administrasi Pembangunan***	***Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***95%***	***1,422,586,350***	
	Fasilitas Penyusun Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	422,380,350.00	Fasilitas Penyusun Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	427,076,350.00	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	372,928.00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	396,280,000.00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	545,158,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	599,230,000	
			Persentase Serapan anggaran Daerah dengan nilai baik (80-100%)	85%				Persentase Serapan anggaran Daerah dengan nilai baik (80-100%)	85%		

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Morowali

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	BAGIAN UMUM				
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bag. Umum**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**	
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag. Umum	*Tersedianya Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keuangan pada Bagian Umum*	1 ASN Pendamping	
b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*ASN Sekretariat Daerah*	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	96 ASN	Anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN belum terakomodir
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*PHL Bagian Umum*	Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	*143 PHL Bagian Umum*	Anggaran Honorarium PHL, Sopi, Sekpri dan Ajudan belum terakomidir
c.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*ASN dan PHL Sekretariat Daerah*	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas dan Atribut	180 Org	Anggaran utk belanja Pakaian Dinas ASN dan PHL Sekretariat Daerah belum terkafer
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*ASN dan PHL Bagian Umum*	Jumlah Kegiatan Bintek ASN dan PHL	*5 Kegiatan*	
d.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Paket	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Bagian Umum (Tersebar)*	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga	9 Paket	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya' Bahan Logistik Kantor	7 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Bagian Umum*	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Bagian Umum (Sekda, Aisten, Staf Ahli & Bagian Umum)*	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 tahun)	100 Laporan	
e.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*38 Kegiatan*	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Bagian Umum*	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Bagian Umum*	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*8 Kegiatan*	

f.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Bagian Umum (Kendaraan Operasional Pimpinan)*	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 Kendaraan	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Bagian Umum (Tersebar)*	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*28 Paket*	
g.	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Kegiatan	
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Laporan	
h.	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Bag. Umum**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100**	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Bagian Umum (KDH)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*8 Kegiatan*	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Bagian Umum (WKDH)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	11 Kegiatan	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Bagian Umum (Sekretaris Daerah)*	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	8 Kegiatan	

	BAGIAN ORGANISASI				
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota (%)**	**100**	
A.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	
B.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	
C.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	10	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	5	
3	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	2	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	

D.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Pengdaan Mebel	**Bag. Organisasi**	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	0	
E.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%))**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	
F.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Organisasi**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	7	
G.	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Bag. Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Pemerintah Daerah (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	
		Bag. Organisasi	'Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan (Dokumen)	1	

		Bag. Organisasi	Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan (Aplikasi)	1	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah (Paket)	1	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	**Bag. Organisasi**	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	1	
		Bag. Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	
		Bag. Organisasi	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik	3	
		Bag. Organisasi	Jumlah Peraturan Bupati	1	
		Bag. Organisasi	Jumlah OPD Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah	49	
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)	47	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi (OPD)	0	
		Bag. Organisasi	Jumlah OPD Yang Mengikuti PMPRB (Dokumen)	15	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	
		Bag. Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Reformasi Birokrasi	49	

4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	**Bag. Organisasi**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Dokumen)	1	
	BAGIAN PROTOKOL				
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Protokol**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Protokol**	**100**	
A.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Protokol**	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	20	
B.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	**Bag. Protokol**	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL	30	
C.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Protokol**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Protokol	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)	8	
2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Protokol	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	2	
D.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Protokol**	**Terpenuhinya Kebutuhan barang yang akan dipelihara**	**100**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Bag. Protokol**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	8	

2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bag. Protokol	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	
E	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan**	**Bag. Protokol**	**Persentase Kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**100**	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi keprotokolan	Bag. Protokol	Jumlah peserta bimtek keprotokolan	25	
2		Bag. Protokol	Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol	5	
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**772,013,682**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**295,800,000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	295,800,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**5,250,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5,250,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**369,038,210**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40,370,400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21,473,310	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16,647,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. TAPEM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290,547,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69,705,472**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. TAPEM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	44,590,000	
	Pengadaan Mebel	Bag. TAPEM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25,115,472	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**32,220,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. TAPEM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,550,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. TAPEM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7,670,000	
II.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan**	**1,523,786,220**	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		**persentase administrasi tata pemerintahan**	**1,178,963,320**	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	254,442,570	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	219,020,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	705,500,750	

	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**persentase kerja sama daerah**	**344,822,900**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bag. TAPEM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	344,822,900	
	BAGIAN KESRA				
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Bag. Kesra**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**100**	
A.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bag. Kesra**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Bag. Kesra**	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	15	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Bag. Kesra**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Bag. Kesra**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	2	Perlu dianggarkan mengingat Bagian Kesra Memerlukan ASN yang Terlatih dan berintergritas
B.	**Kegiatan Administrasi Umum**	**Bag. Kesra**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bag. Kesra	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	1	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bag. Kesra	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Tahun)	1	
3	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. Kesra	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen (Tahun)	1	

4	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam daerah	Bag. Kesra	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Tahun)	1	
C.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bag. Kesra	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Kesra	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	1	
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bag. Kesra	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	
II.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Bag. Kesra	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	
-	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Bag. Kesra	**Persentase Kegiatan dan Pembinaan dibidang Keagamaan, Sosial, Kemasyarakatan yang difasilitasi**	**85**	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bag. Kesra	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	7	
		Bag. Kesra	Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang difasilitas	2,125	Perlu Penambahan Anggaran Untuk Honor Pengurus Rumah Ibadah, Guru Keagamaan dan Petugas Kebersihan Rumah Ibadah se Kab. Morowali selama 12 Bulan

		Bag. Kesra	Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang difasilitasi	46	Perlu Penambahan Anggaran Untuk Lanjutan Pembangunan Pondok Pesantren dan Usulan Tahun Sebelumnya yang Belum Terakomodir serta Usulan Baru Sarana Rumah Ibadah
		Bag. Kesra	Jumlah Lembaga/ Organisasi Keagamaan Yang difasilitasi	16	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bag. Kesra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Sosial	7	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bag. Kesra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	
	BAGIAN HUKUM				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Bag. Hukum	**Persentase Capaian Kinerja**	**100%**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bag. Hukum	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bag. Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bag. Hukum	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100%***	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bag. Hukum	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Org'	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Hukum	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Hukum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Hukum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. Hukum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Hukum	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Hukum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Hukum	***Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bag. Hukum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bag. Hukum			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum	***Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	**100%**	
	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	11 Dokumen	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag. Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	14 Kasus	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi	446 Dokumen	

I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (%)**	**100**	
A	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	
B	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah**	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah (%)**	**100**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	
II	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)**	**100**	
A	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	180 Dokumen	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	80 Dokumen	
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**-**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Bagian Administrasi Pembangunan*	***Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Bagian Administrasi Pembangunan*	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	
	Pengadaan Mebel	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	*Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Administrasi Pembangunan	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**-**	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	***Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	-	
	Fasilitas Penyusun Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	
		Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Serapan anggaran Daerah dengan nilai baik (80-100%)		

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : Bagian Sekretariat Daerah Morowali

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3			4	5	6	7	8	9	10
4.					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**										
					Bagian Umum										
4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Jumlah Program penunjang bagian Umum / total Program urusan penunjang pemerintah daerah x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**77,737,449,311**	APBD		**100**	**34,999,999,603**
4.	01.	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan penunjang bagian Umum / total kegiatan urusan penunjang pemerintah daerah x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**20,000,000**	APBD		**100**	**20,000,000**
4.	01.	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keuangan pada Bagian Umum	Jumlah Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keuangan pada Bagian Umum yang dibayarkan (Orang)	Orang	Bag. Umum	1	20,000,000	APBD		1	20,000,000

4.	01.	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		%	**Bag. Umum**	100	**19,481,418,070**	APBD		**100**	-
4.	01.	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang dibayarkan (Orang)	Orang	*ASN Sekretariat Daerah*	97	15,660,618,070	APBD	Perlu di anggarkan sesuai jumlah ASN Sekretariat Daerah	96	-
4.	01.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	Jumlah Tenaga PHL, Sopir, Ajudan, Sekpri dan Staf Khusus yang dibayarkan (Orang)	Orang	*PHL Bagian Umum*	143	*3,820,800,000*	APBD	Perlu di anggarkan sesuai jumlah Tenaga PHL, Sopir, Ajudan, Sekpri dan Stah Khusus Bagian Umum Sekretariat Daerah	143	-
4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian PD yang terlaksana/jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian PD yang dilaksanakan x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**454,500,000**	APBD		**100**	**501,216,000**
4.	01.	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas dan Atribut Sekretariat Daerah	Jumlah ketersediaan Pakaian dinas dan atribut (Orang)	Orang	*ASN dan PHL Sekretariat Daerah*	162	201,000,000.00	APBD	Perlu di anggarkan sesuai jumlah ASN dan PHL Sekretariat Daerah	162	-
4.	01.	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Bintek ASN	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	*ASN dan PHL Bagian Umum*	22	*253,500,000*	APBD		22	501,216,000
4.	01.	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi umum yang terlaksana/jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**15,278,834,065**	APBD		**100**	**9,213,455,610**
4.	01.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	Paket	*Bagian Umum (Tersebar)*	19	6,960,440,990	APBD		19	1,583,302,810
4.	01.	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga (Paket)	Paket	*Bagian Umum (Tersebar)*	2	334,057,480	APBD		2	124,504,450
4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya' Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor (Paket)	Paket	*Bagian Umum (Tersebar)*	7	2,098,709,345	APBD		7	2,163,308,850

4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggadaan (Paket)	Paket	*Bagian Umum*	4	*202,266,250*	APBD		4	*286,881,500*
4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 tahun)	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan/Tahun)	Laporan/Tahun	*Bagian Umum (Sekda, Aisten, Staf Ahli & Bagian Umum)*	100	5,683,360,000	APBD		100	5,055,458,000
4.	01.	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana / jumlah Jasa Penunjang yang dilaksanakan x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**11,557,287,392**	APBD		**100**	**2,515,574,912**
4.	01.	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	Laporan/Tahun	*Bagian Umum (Tersebar)*	100	975,107,412	APBD		100	975,107,412
4.	01.	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Jasa Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (kegiatan)	Kegiatan	*Bagian Umum*	8	*467,479,980*	APBD		8	*421,127,500*
4.	01.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (kegiatan)	Kegiatan	*Bagian Umum*	28	10,114,700,000	APBD		28	1,119,340,000
4.	01.	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana/jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**24,357,053,736**	APBD		**100**	**11,090,226,093**
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara/perbaiki, dan dibayarkan Pajak kendaraan (Unit)	Unit	*Bagian Umum (Kendaraan Operasional Pimpinan)*	33	*676,480,000*	APBD		33	*554,170,000*
4.	01.	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)	Paket	*Bagian Umum (Tersebar)*	34	23,680,573,736	APBD		28	10,536,056,093

4.	01.	01	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana/jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**4,426,567,500**	APBD		**100**	**8,547,019,484**
4.	01.	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan (Orang)	Orang	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	2	-	APBD		12	777,129,484
4.	01.	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan pakaian dinas dan atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan (Paket)	Paket	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	2	110,159,500	APBD		12	303,600,000
4.	01.	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terealisasi (kegiatan)	Kegiatan	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	2	200,000,000	APBD		2	400,000,000
4.	01.	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan/Tahun)	Laporan/Tahun	*Bagian Umum (KDH & WKDH)*	100	4,116,408,000	APBD		100	7,066,290,000
4.	01.	01	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terlaksana/jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan x 100%**	%	**Bag. Umum**	100	**2,161,788,548**	APBD		**100**	**3,112,507,504**
4.	01.	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Paket)	Paket	*Bagian Umum (KDH)*	8	2,161,788,548	APBD		8	1,421,734,219
4.	01.	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Paket)	Paket	*Bagian Umum (WKDH)*		-	APBD		11	1,257,507,505

4.	01.	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Paket)	Paket	*Bagian Umum (Sekretaris Daerah)*		-	APBD	Perlu di tambah anggarannya mengingat ada beberapa kegiatan belum terakomodir	8	433,265,780
					Bagian Organisasi										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan penunjang bagian organisasi/total kegiatan urusan penunjang pemerintah daerah kali 100%**	%	**Bag. Organisasi**	**100**	**1,875,701,363**	APBD		**100**	**2,648,236,491**
4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Administrasi Keuagna Perangkat Daerah (%)**	**Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana/jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kali 100%**	**%**	**Bag. Organisasi**	**100**	**226,560,000**	**APBD**		**100**	**198,240,000**
4.	01.	01	02:02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan (Orang)	Org	Bag. Organisasi	9	226,560,000	APBD		8	198,240,000
4.	01.	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana/jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan Kali 100%**	%	**Bag. Organisasi**	**100**	**86,595,000**	APBD		**100**	**66,960,000**
4.	01.	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	Bag. Organisasi	300	86,595,000	APBD		300	66,960,000

4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana/jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kali 100%**	%	**Bag. Organisasi**	**100**	**585,120,590**	APBD		**100**	**422,322,408**
4.	01.	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	Bag. Organisasi	10	185,243,800	APBD		10	78,269,000
4.	01.	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor	Paket	Bag. Organisasi	5	96,126,290	APBD		5	93,816,158
4.	01.	01	2.06	0005	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggadaan	Paket	Bag. Organisasi	2	63,178,500	APBD		2	51,749,250
4.	01.	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Tahun)	Laporan	Bag. Organisasi	3	240,572,000	APBD		3	198,488,000
4.	01.	01	2.07		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana/jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Kali 100%**	%	**Bag. Organisasi**	**100**	**32,907,900**	APBD		**0**	**-**
4.	01.	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Jumlah kebutuhan Paket Mebel Yang Dibutuhkan	Unit	Bag. Organisasi	12	32,907,900	APBD		-	-
4.	01.	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dilaksanakan (%)**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Yang Terlaksana/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang dilaksanakan Kali 100%**	%	**Bag. Organisasi**	**100**	**4,590,000**	APBD		**100**	**6,820,000**
4.	01.	01	2.08	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibutuhkan	Laporan	Bag. Organisasi	1	4,590,000	APBD		1	6,820,000

4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Yang Dilaksanakan (%)**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana/jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Kali 100%**	%	**Bag. Organisasi**	**100**	**23,250,000**	APBD		**100**	**51,590,000**
4.	01.	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara (%)	Jumlah kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Bag. Organisasi	4	23,250,000	APBD		7	51,590,000
4.	01.	01.	2.13		**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi (%)**	**Jumlah Penataan Organisasi yang terlaksana/jumlah Penataan Organisasi yang dilaksanakan Kali 100%**	%	**Bag. Organisasi**	**100**	**916,677,873**	APBD		**100**	**1,902,304,083**
4.	01.	01.	2.13	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah	Dokumen	Bag. Organisasi	2	454,641,490	APBD		2	387,258,360
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	Bag. Organisasi	1		APBD		1	
						Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan	Dokumen	Bag. Organisasi	1		APBD		1	
						Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan	Paket	Bag. Organisasi	1		APBD		1	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah	Aplikasi	Bag. Organisasi	1		APBD		1	400,000,000
4.	01.	01.	2.13	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan Publik	Laporan	Bag. Organisasi	1	208,938,800	APBD		1	252,295,230

						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kegiatan Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	Bag. Organisasi	1		APBD		1	
						Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan	Bag. Organisasi	0		APBD		0	
						Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik	Jumlah Kebutuhan Dokumen Laporan Pelayanan Publik	Dokumen	Bag. Organisasi	3		APBD		3	
						Jumlah Peraturan Bupati	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati	Dokumen	Bag. Organisasi	1		APBD		1	
						Jumlah OPD Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah	Jumlah Dokumen OPD Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah	Dokumen	Bag. Organisasi	49		APBD		49	350,000,000
4.	01.	01.	2.13	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Bag. Organisasi	1	253,097,583	APBD		1	236,157,383
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	OPD	Bag. Organisasi	47		APBD		47	
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Dokumen Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi	OPD	Bag. Organisasi	0		APBD		0	
						Jumlah OPD Yang Mengikuti PMPRB	Jumlah Laporan OPD Yang Mengikuti PMPRB	Dokumen	Bag. Organisasi	15		APBD		15	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja (dokumen penjenjangan kinerja /penyelarasan antara sasaran strategisindikator kinerja dan target kinerja organisasi kepa unit organsasi sampai dengan individu pegawai)dan pohon kinerja atau casecading	Dokumen	Bag. Organisasi			APBD		1	

						Jumlah Dokumen Peningkatan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi (dokumen road map pemerintah daerah sesuai dengan road map nasional, dokumen rencana Aksi)	OPD	Bag. Organisasi			APBD		49	200,000,000
4.	01.	01.	2.13	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Unit Organisasi	Dokumen	Bag. Organisasi	1	57,507,810	APBD		1	76,593,110
					Bagian Protokol										
4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Protokol**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Protokol**	%	**Bag. Protokol**	**100**	**4,034,614,104**	APBD		**100**	**4,034,614,104**
4.	01.	01	02:02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**%**	**Bag. Protokol**	**100**	**606,920,000**	**APBD**		**100**	**606,920,000**
4.	01.	01	02:02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	Org	**Bag. Protokol**	20	606,920,000	APBD		20	606,920,000
4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**Bag. Protokol**	**100**	**71,914,500**	**APBD**		**100**	**71,914,500**
4.	01.	01	2.05	09	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL	Org	**Bag. Protokol**	30	71,914,500	APBD		30	71,914,500
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	%	**Bag. Protokol**	**100**	**2,216,172,804**	APBD		**100**	**2,216,172,804**

4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)	Paket	Bag. Protokol	1	568,092,804	APBD		1	568,092,804
4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	Paket	Bag. Protokol	1	1,648,080,000	APBD		1	1,648,080,000
4.	01.	01	2.06	05	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen (Paket)**	**Terpenuhinya Kebutuhan barang yang akan dipelihara**	Paket	**Bag. Protokol**	1	**131,700,000**	APBD		1	**131,700,000**
4.	01.	01	2.06	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	Paket	**Bag. Protokol**	1	102,650,000	APBD		1	102,650,000
4.	01.	01	2.09		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Bag. Protokol	**100**	29,050,000	APBD		**100**	29,050,000
4.	01.	01	2.09	02	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase Kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**Persentase Kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	Unit	**Bag. Protokol**	1	1,007,906,800	APBD		1	1,007,906,800
4.	01.	01	2.09	06	Sub Kegiatan Fasilitasi keprotokolan	Jumlah peserta bimtek keprotokolan	Jumlah peserta bimtek keprotokolan	Unit	Bag. Protokol	3	345,000,000	APBD		3	345,000,000
4.	01.	02				Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol	Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol	%	Bag. Protokol	**100**	662,906,800	APBD		**100**	662,906,800
					Bagian Tata Pemerintahan										

4.	**01.**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**772,013,682**
4.	**01.**	**01**	**0.085**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**295,800,000**
4.	**01.**	01	0.085	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Bag. TAPEM	-	-			1 Dokumen	295,800,000
4.	**01.**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**5,250,000**
4.	**01.**	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Bag. TAPEM	-	-			1 Paket	5,250,000
4.	**01.**	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**369,038,210**
4.	**01.**	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Bag. TAPEM	-	-			1 Paket	40,370,400
4.	**01.**	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Bag. TAPEM	-	-			1 Paket	21,473,310
4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Bag. TAPEM	-	-			**1 Paket**	**16,647,500**
4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Bag. TAPEM	-	-			**1 Laporan**	**290,547,000**

4.	**01.**	01	2.06		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**69,705,472**
4.	**01.**	01	2.06	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Bag. TAPEM	-	-			**1 Unit**	**44,590,000**
4.	**01.**	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Bag. TAPEM	-	-			1 Paket	25,115,472
4.	**01.**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**32,220,000**
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Bag. TAPEM	-	-			1 Unit	24,550,000
4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Bag. TAPEM	-	-			1 Unit	7,670,000
4.	**01.**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**670,890,330**
4.	**01.**	**02**	**01**		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**persentase administrasi tata pemerintahan**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**607,890,330**
4.	01.	02	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			Bag. TAPEM	-	-			1 Dokumen	68,556,270

4.	01.	02	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			Bag. TAPEM	-	-			1 Dokumen	444,888,740
4.	01.	02	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Bag. TAPEM	-	-			1 Dokumen	94,445,320
4.	**01.**	**02**	**04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**persentase kerja sama daerah**		**Persen**		**-**	**-**			**100**	**63,000,000**
4.	01.	02	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			Bag. TAPEM	-	-			1 Dokumen	63,000,000
					Bagian Kesra										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah kegiatan penunjang bagian adm.Kesra/total kegiatan urusan penunjang pemerintah daerah kali 100%**	%	**Bag. Kesra**	**100**	**665,025,050**	APBD		**100**	**722,491,000**
4.	01.	01	02:02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**		**%**	**Bag. Kesra**	**100**	**348,120,000**	**APBD**		**100**	**348,120,000**
4.	01.	01	02:02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan (Orang)	Org	Bag. Kesra	15	348,120,000	APBD		15	348,120,000
4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian PD yang terlaksana/jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian PD yang dilaksanakan x 100%**	**%**	**Bag. Kesra**	**100**	**35,000,000**	**APBD**		**100**	**35,000,000**
4.	01.	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Org	Bag. Kesra	2	35,000,000	APBD		2	35,000,000

4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**Jumlah kegiatan administrasi umum yang terlaksana/jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan x 100%**	%	**Bag. Kesra**	**100**	**257,775,050**	APBD		**100**	**300,241,000**
4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	Paket	Bag. Kesra	1	54,000,000	APBD		1	35,000,000
4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Paket)	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor (Paket)	Paket	Bag. Kesra	1	12,887,550	APBD		1	15,650,000
4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor dan Penggandaan Dokumen (Paket)	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggadaan (Paket)	Paket	Bag. Kesra	1	7,875,000	APBD		1	8,225,000
4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Tahun)	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Tahun)	Paket	Bag. Kesra	1	183,012,500	APBD		1	241,366,000
4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana/jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan x 100%**	%	Bag. Kesra	**100**	**24,130,000**	APBD		**100**	**39,130,000**
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	Jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional (Unit)	Unit	Bag. Kesra	1	15,000,000	APBD		2	30,000,000
4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya dipelihara (Unit)	Unit	Bag. Kesra	3	9,130,000	APBD		3	9,130,000

4.	01.	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat**	Kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti / Kebijakan Strategis bidang Pemerintahan dan Kesra yang Direncanakan x 100 %	%	Bag. Kesra	**100**	**52,730,379,270**	APBD		**100**	**56,343,620,000**
4.	01.	02	2.02		**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kegiatan dan Pembinaan dibidang Keagamaan, Sosial, Kemasyarakatan yang difasilitasi**	Kebijakan Kesejahteraan rakyat di bidang Bina Mental Spritual, Sosial dan Masyarakat ditindak lanjuti / Kebijakan Kesejahteraan rakyat di bidang bina Mental Spritual, Sosial dan Masyarakat ditindak lanjuti yang di rencanakan x 100%	%	Bag. Kesra	**85**	**52,730,379,270**	APBD		**95**	**56,343,620,000**
4.	01.	02	2.02	01.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan dan Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan	Keg.	Bag. Kesra	7	4,293,149,270	APBD		7	5,374,000,000
						Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang difasilitas	Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang diberikan tunjangan	Orang	Bag. Kesra	2,125	24,210,480,000	APBD	Perlu Penambahan Anggaran Untuk Honor Pengurus Rumah Ibadah, Guru Keagamaan dan Petugas Kebersihan Rumah Ibadah se Kab. Morowali selama 12 Bulan	2,135	24,453,120,000
						Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang difasilitasi	Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang diberikan fasilitas	Unit	Bag. Kesra	46	19,206,000,000	APBD	Perlu Penambahan Anggaran Untuk Lanjutan Pembangunan Pondok Pesantren dan Usulan Tahun Sebelumnya yang Belum Terakomodir serta Usulan Baru Sarana Rumah Ibadah	40	20,000,000,000

						Jumlah Lembaga/ Organisasi Keagamaan Yang difasilitasi	Jumlah Lembaga/Organisasi Keagamaan Yang diberikan fasilitas	Lembaga		16	4,925,000,000			16	5,825,000,000
4.	01.	02	2.02	02.	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	Bag. Kesra	7	95,750,000	APBD		7	191,500,000
4.	01.	02	2.02	03.	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja yang terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	Bag. Kesra	5	-	APBD		5	500,000,000
					BAGIAN HUKUM										
4	**01**	**01**			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***			Bagian Hukum	***100%***		APBD		***100%***	
4	01	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			Bagian Hukum	***100%***		APBD		***100%***	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Bagian Hukum	100%	304,680,000	APBD		100%	
4	01	01	2.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			Bagian Hukum	***100%***		APBD		***100%***	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Bagian Hukum	100%	111,994,000	APBD		100%	86,770,000

4	01	01	2.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***			Bagian Hukum	***100%***		APBD		***100%***	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Bagian Hukum	100%	30,197,480	APBD		100%	43,215,300
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Bagian Hukum	100%	113,434,150	APBD		100%	27,879,480
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Bagian Hukum	100%	28,859,250	APBD		100%	35,446,750
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Bagian Hukum	100%	171,778,000	APBD		100%	286,954,000
4	01	01	2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			Bagian Hukum	***100%***		APBD		**100%**	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			Bagian Hukum	100%	8,280,000	APBD		100%	11,120,000
4	01	01	2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			Bagian Hukum	***100%***		APBD		**100%**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			Bagian Hukum	100%	23,600,000	APBD		100%	17,800,000

4	01	02			***PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***				Bagian Hukum	100%		APBD		100%	
4	01	02	2.03		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***			Bagian Hukum	100%		APBD		100%	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun			Bagian Hukum	100%	1,452,844,000	APBD		100%	1,510,724,000
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			Bagian Hukum	100%	1,419,693,000	APBD		100%	1,363,730,000
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi			Bagian Hukum	100%	127,920,000	APBD		100%	116,320,000
					BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA										
4.					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**										
4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**		**Jumlah kegiatan penunjang bagian Perekonomian dan SDA/total kegiatan urusan penunjang pemerintah daerah kali 100%**	%	**Bag. perekonomian dan SDA**	**-**	**-**	APBD		**100**	**536,327,680**

4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**		**%**	**Bag. perekonomian dan SDA**	-	-	**APBD**		**100**	**278,500,000**
4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN	Dokumen	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	273,000,000
4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Paket	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	**APBD**		1	**5,500,000**
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan penunjang bagian Perekonomian dan SDA/totalAdministrasi Umum pemerintah daerah kali 100%**		**Bag. perekonomian dan SDA**	-	-	APBD		**100**	**217,507,680**
4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	Jumlah Paket	Paket	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	76,735,200
4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Jumlah Paket	Paket	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	18,983,480
4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Kantor dan Penggandaan	Jumlah Paket	Paket	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	13,513,000
4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggadaan (Paket)	Paket	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	108,276,000
4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		%	**Bag. perekonomian dan SDA**	-	-	**APBD**		**100**	**40,320,000**

4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Unit	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		2	25,320,000
4.	01.	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel	Paket	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	15,000,000
4.	01.	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**		%	**Bag. perekonomian dan SDA**	-	-	APBD		100	
4.	01.	03	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kegiatan Kebijakan Perekonomian**		**%**	**Bag. perekonomian dan SDA**	-	-	**APBD**		**100**	**525,882,000**
4.	01.	03	2.01	01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	85,736,000
4.	01.	03	2.01		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		**100**	100,300,000
4.	01.	03	2.01		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	Bag. perekonomian dan SDA	-	-			**100**	339,846,000
4.	**01.**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Dokumen**	**Bag. perekonomian dan SDA**	-	-	**APBD**			**310,790,000**

4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Peretanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	Bag. perekonomian dan SDA	-	-	APBD		1	110,460,000
4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	Bag. perekonomian dan SDA	-	-			1	100,720,000
4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	Dokumen	Bag. perekonomian dan SDA	-	-			1	99,610,000
					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa										
4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**										

4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah kegiatan penunjang bagian Pengadaan Barang dan Jasa total kegiatan urusan penunjang pemerintah daerah kali 100%**	%	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**232,767,000**	**DBH**		100	**232,767,000**
4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	**%**	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**25,000,000**	**DBH**		100	**30,000,000**
4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	1	25,000,000	DBH		1	30,000,000
4.	01.	01	2.06	09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	1	18,363,050	DBH		1	22,035,660
4.	01.	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Laporan	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	10	172,564,800	DBH		12	180,560,000
4.	01.	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah (%)**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah (%)**	%	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**15,000,000**	DBH		100	**15,000,000**
4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya	Unit	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	**1**	15,000,000	DBH		1	15,000,000
4.	01.	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)**	%	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**1,467,233,000**	DBH		100	**1,467,233,000**

4.	01.	03	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa (%)**	**Persentase Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa (%)**	%	**Bag. Pengadaan Barang dan Jasa**	100	**927,194,780**	DBH		100	**991,946,000**
4.	01.	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	180	927,194,780	DBH		185	991,946,000
4.	01.	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	80	455,581,440	DBH		87	476,079,000
4.	01.	03	2.03	03	Pembinaan dan Pelatian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	3	150,000,000	DBH		3	150,000,000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase Capaian Kinerja Administrasi Pembangunan**			**Bagian Adpem**	**100%**	**1,306,952,946**	**APBD**		**100%**	**938,253,650**
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			***Bagian Adpem***	*100%*	*403,320,000*	**APBD**		*100%*	360,840,000
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Bagian Adpem	1 Dokumen	403,320,000	APBD		12 Dokumen	360,840,000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			***Bagian Adpem***	*100%*	*26,000,000*	**APBD**		*100%*	109,371,000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Bagian Adpem	1 Paket	26,000,000	APBD		1 Paket	11,571,000

					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Bagian Adpem	5 Orang	-	APBD		6 Orang	97,800,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**			***Bagian Adpem***	***100%***	***692,661,519***	**APBD**		***100%***	**412,807,650**
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Bagian Adpem	4 Paket	332,050,000	APBD		1 Paket	44,990,000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Bagian Adpem	1 Paket	25,000,000	APBD		1 Paket	24,352,150
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Bagian Adpem	3 Paket	11,000,000	APBD		3 Paket	17,256,500
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Bagian Adpem	6 Laporan	324,611,519	APBD		12 Laporan	326,209,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			***Bagian Adpem***	***100%***	***153,731,427***	**APBD**		***100%***	**22,995,000**
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Bagian Adpem	1 Paket	153,731,427	APBD		1 Paket	22,995,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			***Bagian Adpem***	***100%***	***9,140,000***	**APBD**		***100%***	**7,140,000**
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Bagian Adpem	2 Laporan	9,140,000	APBD		2 Laporan	7,140,000

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			***Bagian Adpem***	***100%***	***22,100,000***	**APBD**		***100%***	**25,100,000**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Bagian Adpem	6 Unit	22,100,000	APBD		6 Unit	25,100,000
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**			**Bagian Adpem**	**100%**	**967,911,278**	**APBD**		**100%**	**1,422,586,350**
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			***Bagian Adpem***	***95%***	***967,911,278***	**APBD**		***95%***	**1,422,586,350**
					Fasilitas Penyusun Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			Bagian Adpem	2 Dokumen	422,380,350.00	APBD		3 Dokumen	427,076,350.00
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Bagian Adpem	12 Laporan	372,928.00	APBD		15 Laporan	396,280,000.00
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Bagian Adpem	3 Laporan	545,158,000	APBD		15 Laporan	599,230,000
						Persentase Serapan anggaran Daerah dengan nilai baik (80-100%)				85%				85%	

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2025

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2025			
										Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja **Bagian Umum**	**4.**					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
		4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**						
		4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**	-	**100**	**34,999,999,603**	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**100**	**20,000,000**	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Keuangan pada Bagian Umum	-	1	20,000,000	Bagian Umum	Bagian Umum

		4.	01.	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**0**	-	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	-	96	-	Bagian Umum	Sekretariat Daerah
		4.	01.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya	-	143	-	Bagian Umum	Bagian Umum (Tersebar)
		4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**100**	**501,216,000**	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas dan Atribut Sekretariat Daerah	-	162	-	Bagian Umum	Sekretariat Daerah
		4.	01.	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Bintek ASN	-	22	501,216,000	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**100**	**9,213,455,610**	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	19	1,583,302,810	Bagian Umum	Bagian Umum (Tersebar Dalam dan Luar Daerah)
		4.	01.	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah tangga	-	2	124,504,450	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya' Bahan Logistik Kantor	-	7	2,163,308,850	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	-	4	*286,881,500*	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 tahun)	-	100	5,055,458,000	Bagian Umum	Tersebar dalam dan luar daerah

		4.	01.	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	-	**100**	**2,515,574,912**	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	100	975,107,412	Bagian Umum	Bagian Umum (Tersebar)
		4.	01.	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	8	*421,127,500*	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	28	1,119,340,000	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100**	**11,090,226,093**	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	33	*554,170,000*	Bagian Umum	Bagian Umum (Tersebar)
		4.	01.	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	28	10,536,056,093	Bagian Umum	Tersebar dalam dan luar daerah
		4.	01.	01	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	**100**	**8,547,019,484**	Bagian Umum	Bagian Umum

		4.	01.	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	12	777,129,484	Bagian Umum	KDH & WKDH
		4.	01.	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	12	303,600,000	Bagian Umum	KDH & WKDH
		4.	01.	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	2	400,000,000	Bagian Umum	KDH & WKDH
		4.	01.	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100	7,066,290,000	Bagian Umum	Tersebar dalam dan luar daerah
		4.	01.	01	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	**100**	**3,112,507,504**	Bagian Umum	Bagian Umum
		4.	01.	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	8	1,421,734,219	Bagian Umum	Rujab KDH
		4.	01.	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	11	1,257,507,505	Bagian Umum	Rujab WKDH
		4.	01.	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	8	433,265,780	Bagian Umum	Sekretaris Daerah
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja **Bagian Organisasi**	**4.**					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
		4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**						

		4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	**100**	**2,648,236,491**	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	-	**100**	**198,240,000**	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	9	198,240,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	-	**100**	**66,960,000**	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	300	66,960,000	Bagian Organisasi	9 Kecamatan
		4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Di laksanakan (%)**	-	**100**	**422,322,408**	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	-	10	78,269,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	-	5	93,816,158	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	-	2	51,749,250	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

		4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	3	198,488,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	-	**100**	-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengdaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	-	12	-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**	-	**100**	**6,820,000**	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)		1	6,820,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)**		**100**	**51,590,000**	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (%) (Unit)		4	51,590,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01.	2.13		**Penataan Organisasi**	**Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)**		**100**	**1,902,304,083**	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

		4.	01.	01.	2.13	01		Jumlah Dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan Perangkat Daerah (Dokumen)		2	387,258,360	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
							Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		1		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
								Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Analisis Jabatan (Dokumen)		1		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
								Jumlah Layanan Penataan Kelembagaan dan Pengelolaan Analisis Jabatan (Aplikasi)		1		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
								Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabata, Analisis Beban Kerja Seluruh Perangkat Daerah (Paket)		1	400,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01.	2.13	02		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik (Laporan)		1	252,295,230	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		1		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
								Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Laporan)		0		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
								Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik (Dokumen)		3		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

								Jumlah Peraturan Bupati (Dokumen)		1		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
								Jumlah OPD Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah (Dokumen)		49	350,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01.	2.13	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1	200,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
								Jumlah Dokumen Peningkatan Reformasi Birokrasi		47	236,157,383	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		4.	01.	01.	2.13	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah		1	76,593,110	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja Bagian Protokol	**4.**					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
		4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**						
		4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Protokol**	**-**	**100**	**4,034,614,104**	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**
		4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	-	**100**	**606,920,000**	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**
		4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	-	20	606,920,000	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**
		4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**100**	**71,914,500**	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**

		4.	01.	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berdasarkan pegawai negeri sipil dan PHL	-	30	71,914,500	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**
		4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	-	**100**	**2,216,172,804**	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**
		4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bahan kebutuhan kantor Kantor (Paket)	-	1	568,092,804	Bag. Protokol	Bag. Protokol
		4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	-	1	1,648,080,000	Bag. Protokol	Bag. Protokol
		4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan barang yang akan dipelihara**	-	1	**131,700,000**	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**
		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	-	1	102,650,000	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**
		4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	**100**	29,050,000	Bag. Protokol	Bag. Protokol
		4.	01.	01	2.14		**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase Kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	-	1	1,007,906,800	**Bag. Protokol**	**Bag. Protokol**

		4.	01.	01	2.14	01.	Sub Kegiatan Fasilitasi keprotokolan	Jumlah peserta bimtek keprotokolan	-	3	345,000,000	Bag. Protokol	Bag. Protokol
								Jumlah pengadaan barang kebutuhan bagian protokol	-	**100**	662,906,800	Bag. Protokol	Bag. Protokol
Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik								**Nilai Sakip**	**CC**	**BB**	**2,295,799,902**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah							**Nilai Sakip Sekretariat Daerah**	**B**	**BB**	**2,295,799,902**		
		4.					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
		4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**						
		4.	**01.**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**772,013,682**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	**Kab Morowali**
		4.	**01.**	**01**	**0.08**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**295,800,000**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	
		4.	**01.**	01	0.08	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	295,800,000	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
		4.	**01.**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100**	**100**	**5,250,000**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	
		4.	**01.**	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5,250,000	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	

4.	**01.**	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**369,038,210**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	
4.	**01.**	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40,370,400	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
4.	**01.**	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21,473,310	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,647,500	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	290,547,000	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
4.	**01.**	01	2.06		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**69,705,472**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	
4.	**01.**	01	2.06	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	44,590,000	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
4.	**01.**	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25,115,472	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
4.	**01.**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**100**	**32,220,000**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	

		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4 Unit	24,550,000	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
		4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11 Unit	7,670,000	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
		4.	**01.**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan**	**100**	**100**	**1,523,786,220**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	
		4.	**01.**	**02**	**01**		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**persentase administrasi tata pemerintahan**	**100**	**100**	**1,178,963,320**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	
		4.	01.	02	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	-	254,442,570	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
		4.	01.	02	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	-	219,020,000	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
		4.	01.	02	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen		705,500,750	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	
		4.	**01.**	**02**	**04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**persentase kerja sama daerah**	**100**	**100**	**344,822,900**	**Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali**	
		4.	01.	02	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	-	344,822,900	Bagian TAPEM Sekretariat Daerah Kab. Morowali	

Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja **Bagian Kesra**												
		4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat**	-	**100**	**665,025,050**	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	02:02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	-	**100**	**348,120,000**	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	02:02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	-	15	348,120,000	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**100**	**35,000,000**	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	2	35,000,000	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	-	**100**	**257,775,050**	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	-	1	54,000,000	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Paket)	-	1	12,887,550	Bagian Kesra	Bag. Kesramas

		4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen (Paket)	-	1	7,875,000	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan Dalam Daerah (Paket)	-	1	183,012,500	Bagian Kesra	dalam dan luar daerah
		4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100**	**24,130,000**	Bagian Kesra	
		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	-	1	15,000,000	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
		4.	01.	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	3	9,130,000	Bagian Kesra	Bag. Kesramas
	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat	4.	01.	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat**	-	**100**	**52,730,379,270**	Bagian Kesra	Kab. Morowali

		4.	01.	02	2.02		**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kegiatan dan Pembinaan dibidang Keagamaan, Sosial, Kemasyarakatan yang difasilitasi**	-	**85**	**52,730,379,270**	Bagian Kesra	Kab. Morowali
		4.	01.	02	2.02	01.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-	7	4,293,149,270	Bagian Kesra	Kab. Morowali
								Jumlah Pengurus Rumah ibadah dan Guru Keagamaan yang difasilitas	-	2,125	24,210,480,000	Bagian Kesra	Kab. Morowali
								Jumlah Sarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Yang difasilitasi	-	46	19,206,000,000	Bagian Kesra	Kab. Morowali
								Jumlah Lembaga/ Organisasi Keagamaan Yang difasilitasi		16	4,925,000,000	Bagian Kesra	Kab. Morowali
		4.	01.	02	2.02	02.	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan sosial	-	7	95,750,000	Bagian Kesra	Kab. Morowali
		4.	01.	02	2.02	03.	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi kinerja kesejahteraan Masyarakat	-	5	-	Bagian Kesra	Kab. Morowali

Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja **Bagian Hukum**	4.	01.	01			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	***PRESENTASE CAPAIAN KINERJA***	**-**	***100%***		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	-	100%		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	446 Dokumen		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	-	100%		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	6 Orang	86,770,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	-	100%		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	43,215,300	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	27,879,480	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	35,446,750	Bagian Hukum	Bagian Hukum

		4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	23 Laporan	286,954,000		
		4.	01.	01	2.07		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-	***100%***		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.07	05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	11,120,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.08		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-	100%		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.	01.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	6 Unit	17,800,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4	01	02	2.03		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***		100%		Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4	01	02	2.03	01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		11 Dokumen	1,510,724,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum

		4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		14 Kasus	1,363,730,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi		446 Dokumen	116,320,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja **Bagian Perekonomian**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
		4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**						
		4.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**		-	**100**	**536,327,680**	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	-	**100**	**278,500,000**	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN	-	1	273,000,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	-	1	**5,500,000**	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

		4.	01.	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**100**	**217,507,680**	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	-	1	76,735,200	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	-	1	18,983,480	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.06	05	Sub Kegitan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Kantor dan Penggandaan	-	1	13,513,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	-	1	108,276,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100**	**40,320,000**	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	-	2	25,320,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	-	1	15,000,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	-	100		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian	4.	01.	03	2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kegiatan Kebijakan Perekonomian**	-	**100**	**525,882,000**	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	03	2.01	01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	1	85,736,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	03	2.01		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	**100**	100,300,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

		4.	01.	03	2.01		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	**100**	339,846,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya Kebijakan Sumber Daya Alam	**4.**	**01.**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	-		**310,790,000**	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Peretanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1	110,460,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		1	100,720,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

		4.	01.	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan		1	99,610,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan bersih	Meningkatnya Kinerja **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**4.**					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
		4.	**01.**				**Sekretariat Daerah**						
		4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (%)**	-	**100**	**232,767,000**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01	02:06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)**	-	**100**	**232,767,000**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	25,000,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01	02:06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	1	18,363,050	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	10	172,564,800	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	-	**100**	**15,000,000**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	-	1	15,000,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**100**	**15,000,000**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	-	1	15,000,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	Meningkatnya Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat	4.	01.	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa(%)**	-	**100**	**1,467,233,000**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	03	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa (%)**	-	**100**	**927,194,780**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	-	180	927,194,780	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	-	80	455,581,440	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	-	3	150,000,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		4.	01.	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja Administrasi Pembangunan**	-	**100%**	**938,253,650**	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	01	02:06		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	*100%*	360,840,000	*Bagian Adpem*	*Bagian Adpem*
		4.	01.	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	360,840,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem

		4.	01.	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	*100%*	109,371,000	*Bagian Adpem*	*Bagian Adpem*
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	11,571,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	01	2.05	09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	6 Orang	97,800,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	***100%***	**412,807,650**	*Bagian Adpem*	*Bagian Adpem*
		4.	01.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	44,990,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	24,352,150	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket	17,256,500	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	326,209,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	***100%***	**22,995,000**	*Bagian Adpem*	*Bagian Adpem*
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	22,995,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem

		4.	01.	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	***100%***	**7,140,000**	*Bagian Adpem*	*Bagian Adpem*
		4.	01.	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Laporan	7,140,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	***100%***	**25,100,000**	*Bagian Adpem*	*Bagian Adpem*
		4.	01.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	6 Unit	25,100,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
		4.	01.	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	-	**100%**	**1,422,586,350**	Bagian Adpem	Bagian Adpem
							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Kebijakan Strategis Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	***95%***	**1,422,586,350**	*Bagian Adpem*	*Bagian Adpem*
							Fasilitas Penyusun Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	3 Dokumen	427,076,350	Bagian Adpem	Bagian Adpem

							Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	15 Laporan	396,280,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	15 Laporan	599,230,000	Bagian Adpem	Bagian Adpem
								Persentase Serapan anggaran Daerah dengan nilai baik (80-100%)	-	85%			

DEKS RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2025

Pagu Indikatif Rancangan Awal RKPD	15,000,000,000
Hasil Analisis Kebutuahan Pagu Indikatif	46,460,520,000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah yang lebih terukur dan akuntabel. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2024.

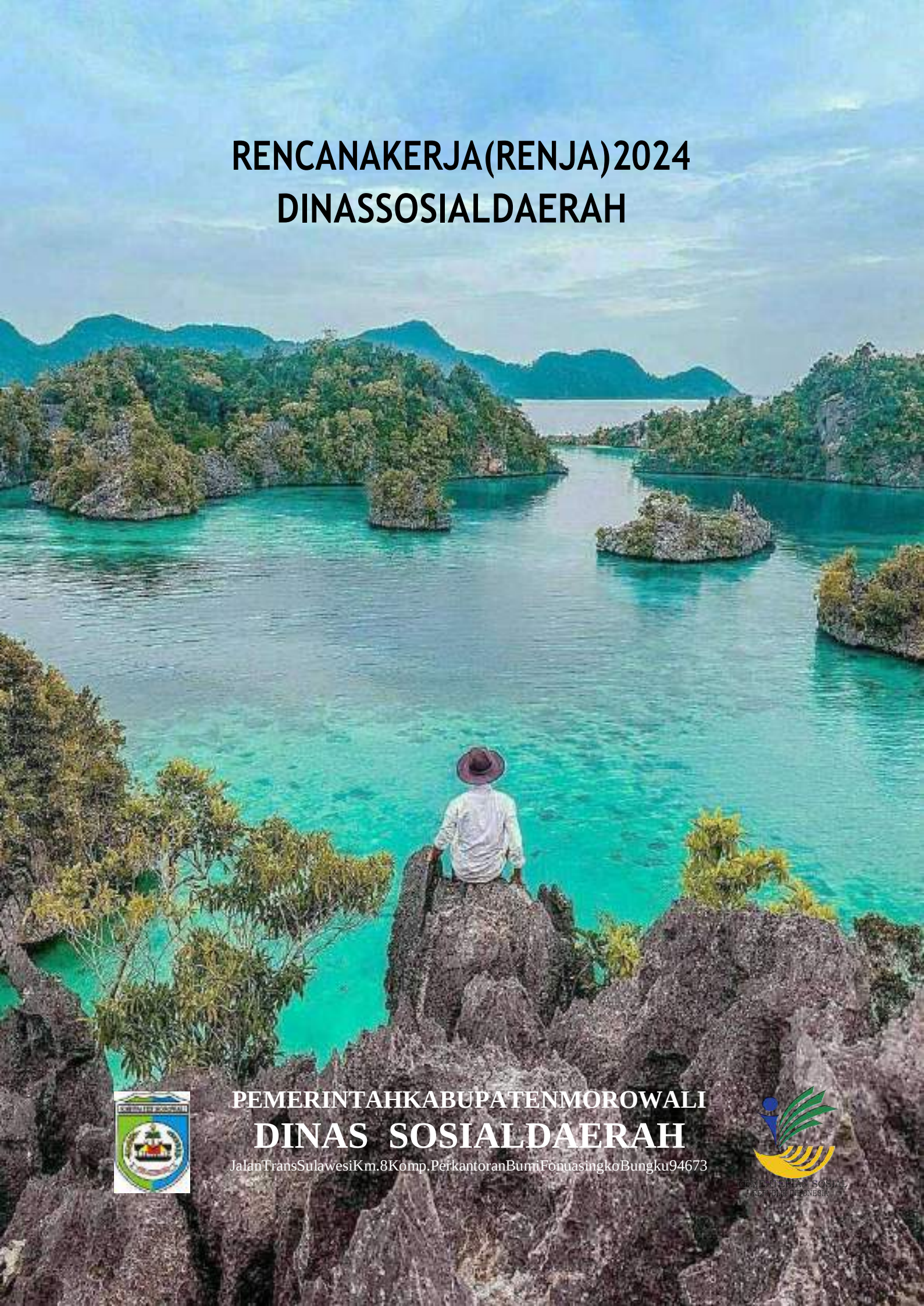
Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 maka Sekretariat Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2024 - 2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renja Tahun 2025.

Bungku, 17 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19670606 199403 1 011

RENCANAKERJA(RENJA)2024
DINASSOSIALDAERAH



PEMERINTAHKABUPATENMOROWALI

DINAS SOSIALDAERAH

JalanTransSulawesiKm.8Komp.PerkantoranBumiFonuasingkoBungku94673


PulauSamboriKec.MenuiKepulauan

KataPengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namundapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Rencana Kerja ini merupakan kesepakatan bersama yang disepakati secara bersama - samaseluruh jajaran Dinas SosialDaerah Kabupaten Morowali. Kami sadar bahwaini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan Penyusunan Rencana Kerja pada tahun-tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikanbimbingan,sehingga penyusunanRencana Kerja (Renja) DinasSosialDaerah Kabupaten Morowali tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semogaini bermanfaatkhususnya bagi Dinas SosialDaerah Kabupaten Morowali dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak -pihak yang berkepentingan.

Bungku, 27 Desember 2023

Kepala

AK[illegible]NE,S.Pd, M.Pd

NIP.19740311200502100[illegible]



Bab1

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan) mana sumber daya yangdialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harusmemperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 didasarkan kepada Rencana Strategis Daerah (Renstra) 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Perubahan Kabupaten Morowali dengan tetap memperhatikan programprioritasyangtelahdituangkandidalam DokumenRancangan AwalRencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya(RPJPD, RKPD dan Renstra).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuaidengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi Dinasyang telahditetapkan.RencanaKerja(RENJA)DinasSosialTahun2024inidisusun

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentangTata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan.

1.2. LandasanHukum

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2004Nomor125,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-UndangNomor13Tahun2011tentangPenanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor83,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian danEvqaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan.
14. Peraturan Daerah Nomor 5tahun 2023tentangTugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah .
15. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali periode 2024-2026.

1.3. MaksuddanTujuan

1. Maksud.

   Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Morowali Tahun 2024.

2. Tujuan

   Tujuan disusunya Rencana Kerja Dinas Sosialadalah sebagai pedomandalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja setiap tahun berdasarkan capaian target indicator program yang telah ditetapkan

1.4. SistematikaPenulisan

RencanaKerjaDinasSosialKabupatenMorowaliTahun2024,disusundengan sistimatika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. LandasanHukum

1.3. MaksuddanTujuan

1.4. SistematikaPenulisan

BABIIEVALUASIPELAKSANAAN RENJADINASSOSIALTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

2.2. AnalisisKinerjaPelayanan DinasSosial.

2.3. Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiDinasSosial

2.4. ReviewTerhadapRancanganAwalRKPD

2.5. PenelaahanUsulanProgramdan Kegiatan

BABIIITUJUANDANSASARANRENJADINASSOSIAL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

3.3Programdan kegiatan

BABIVRENCANAKERJADANPENDANAANDINASSOSIAL BAB V

PENUTUP

a. CatatanpentingdalampenyusunanRenja

b. Kaidah-KaidahPelaksanaan

c. RencanaTindakLanjut



Bab2

HASILEVALUASIRENJA DINAS SOSIALTAHUNLALU

2.1. EvaluasiPelaksanaanTahun2022danCapaianRenstraDinasSosial

a. EvaluasiPelaksanaanRenjaTahun Lalu

Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk BelanjalangsungsebesarRp.12.927.522.547,-dipergunakanuntukmembiayai

6 program dan 14 jenis kegiatan dan 29 jenis Sub kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Morowali. Secara umum pencapaian Dinas Sosial Kabupaten Morowali untuk realisasi keuangan sebesar98.87 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

a. EvaluasiCapaianKinerjaRenstra

Review hasil pelaksanaan Renja OPD Dinas Sosial Kabupaten Morowali dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan Tahun 2022 Dinas Sosial melebihi target kinerja yang telahdirencanakan . Dari 6 Program dan 14 kegiatan dan 29 jenis sub kegiatan.Berikut ini capaian kinerja tahun 2022 meliput:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar 96.24%
   - ProgramPemberdayaanSosialRealisasi3%
   - ProgramRehabilitasi Sosialsebesar31%
   - ProgramPerlindungandanjaminanSosialsebesar100%
   - ProgramPenanganan Bencanasebesar100%
   - ProgramPengelolaanTamanMakamPahlawan 100%

Perkiraan capaian tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitudiatas100%sehinggadiharapkanpenyerapananggaranbisadilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2022.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tercapainya Target sesuai dengan Program Kegiatan yang telah direncanakan disebabkan antara lain karena adanya Program/Kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBN dan APBD I.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan dapat dilihat pada table berikut.

RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenjaDinasSosialdan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang UrusanPemerintahanDaerahdanProgram Kegiatan	IndikatorKinerjaProgramOutcomes/KegiatanOutput	TargetCapaian ProgramRenstraPerangkatDaerahTahun2023	RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatansampaidengantahun2021	TargetdanRealisasiKinerjaProgramdankegiatan Tahun 2022			TargetProgramdanKegiatan(Renja)PerangkatDaerahTahun2022	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PerangkatDaerah s/d tahun berjalan	
					TargetRenjaPerangkatDaerahTahun2022	RealisasiRenjaPerangkatDaerahTahun2022	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaianProgramdankegiatansampai dengantahun2023	TingkatCapaianRealisasiTarget Renstra%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	**ProgramPenunjangUrusanPemerintahanDaerah**	**MeningkatnyaKinerjaakuntabilitas DinasSosial**	100%	100	100	100	1	100%	100%	
	AdministrasiKeuangan PerangkatDaerah	**PresentaseAdministrasi Keuangan**	100	100	100	100	1	100	100	1
	PenyediaanGajidan Tunjangan ASN	JumlahAparaturSipil Negara dalam1 tahun	20	20	20	20	1	20	20	1
	PenyedianAdministrasi PelaksanaTugasASN	JumlahHonorerdalam1tahun	18	18	18	18	1	18	18	1
	AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah	**PresentaseAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	1	**100**	**100**	1
	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkanTugas danFungsi	PresentasePejabatAparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%0	3	0	0	0	#DIV/0!	3	3	1
	AdministrasiUmumPerangkatDaerah	**PresentaseAdministrasiumum dalam 1 tahun**	**100**	**100**	**100**	**100**	1	**100**	**100**	1
	PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor	JumlahBelanjaModalPeralatanda n Mesin Selama 1 Tahun	12	12	12	12	1	12	12	1
	PenyediaanPeralatanRumahTangga	JumlahPeralatanRumahtanggaSelama 1 Tahun	12	12	12	12	1	12	12	1
	PenyediaanBahan Logistik Kantor	JumlahAlatTulis Kantor (ATK) selama1tahundalam1tahun	12	12	12	12	1	12	12	1

	PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan	JumlahBarangCetakandanFotoCopy selama 1(tahun)	12	12	12	12	1	12	12	1
	PenyelenggaraRapatKoordinasidanKonsultasi SKPD	Jumlah Rapat Konsultasi danKoordinasikeluardaerahselama1 Tahun	12	12	12	12	1	12	12	1
	PengadaanBarangMilikDaetahPenunjangUrusanPemerintahDaerah	**PresentasePengadaanMilikdaerahpenunjangUrusanpemerintahDaerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	1	**100**	**100**	1
	PengadaanKendaraanDinasOperasional/Lapangan	JumlahKendaraanDinas Operasionalyangdiadakandalam1tahun	4	0	2	1	0,5	4	5	1,25
	PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahDaerah	**Presentase jasa PenunjangUrusanPemerintahdaerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	1	**100**	**100**	1
	PenyediaanJasaSuratMenyurat	Jumlahketersediaanjasasuratmenyuratdalam 1 tahun	12	**12**	**0**	**0**	#DIV/0!	12	**12**	1
	PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik	JumlahTagihanTelepon,Internetdan air dalam 1 tahun	12	12	12	12	1	12	**12**	1
	PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor	JumlahIuranPengadaanPeralatan KebersihanKantordalam1 tahun	12	12	12	12	1	12	**12**	1
	PemeliharaanBarangMilikDaerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	**PresentasebarangMilikDaerahpenunjang Urusan Pemerintah Yangdipelihara**	**100**	**100**	**100**	**100**	1	**100**	**100**	1
	PenyediaanJasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan,PajakdanPerizinan KendaraanDinas/Operasionalataulapangan	JumlahKendaraanDinas /Operasionalyangdipeliharadalam1tahun	4	3	3	3	1	4 Buah	4	1
	PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya	JumlahPemeliharaanPeralatandanMesin dalam 1 tahun	8		0	0	#DIV/0!	0	8	1
	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantordanBangunanLainnya	Jumlahgedungkantoryang dipeliharasecararutin/berkaladalam 1 tahun	2	0	1	1	1	2	3	1,5
2	**ProgramPemberdayaan Sosial**	**Presentase PMKS yangmemperolehbantuansosial**	**30,5**	**0**	31,5	0	0	**30,5**	30,5	1
	PemberdayaanSosialKomunitasAdatTerpencil(KAT)	**Presentase Komunitas AdatTerpencilyangdiBerdayakan**	**30**	**0**	**30**	**0**	0	**30**	30	1
	FasilitasPemberdayaanSosial KAT	JumlahKATyangmendapatkan BantuanSosial	100	0	15	0	0	100	100	1

3	**ProgramRehabilitasiSosial**	**Presentase Penyandang CacatFisik danMentalsertaLanjut Usiatidakpotensialyangtelahmenerima Jaminan Sosial**	**26**	**21**	**17**	**17**	1	**26**	25,5	1
	Rehabilitasi Sosial DasarPenyandangDisabilitasTerlantar,AnakTerlantar,LanjutUsiaterlantar,serta GelandanganPengemisdiLuar Panti Sosial	**PresentasePenyandangDisilibitas Terlantar, AnakTerlantar,LanjutUsiaTerlantarserta Gelandangan pengemisdiluar panti yang direhabilitasi**	**18**	**100**	**17**	**17**	1	**18**	18	1
	PenyediaanPermakanan	Jumlah Jiwa PenyandangDisabilitas Terlantar,AnakTerlantar,Lanjut Usia Terlantar,sertaGelandangan,pengemisdiluarpanti yang menerima penyediaan Pemakanan	355	235	210	210	1	355	800	2,253521127
	PenyediaanSandang	Jumlah JiwaPenyandang Disabilitas Terlantar,AnakTerlantar,Lanjut Usia Terlantar,sertaGelandangan,pengemisdiluarpanti yang menerima penyediaanSandang	200	200	200	200	1	200	600	3
	PenyediaanAlat Bantu	Jumlah Jiwa PenyandangDisabilitas Terlantar,AnakTerlantar,Lanjut Usia Terlantar,sertaGelandangan,pengemisdiluarpanti yang menerima penyediaan AlatBantu	100	38	80	80	1	100	218	2,18
	RehabilitasiSosialPenyandangMasalahKesejahteraanSosial(PMKS)Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan Napza diluar PantiSosial	**PenyandangMasalahKesejahteraanSosial(PMKS)Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan Napza diluarPantiSosialyangdirehabiliasi Sosial**	**100**	**0**	**16**	**0**	0	**100**	100	1
	PenyediaanPermakanan	JumlahJiwaPMKSdiluarKorbanHIV/AIDSdanNapzadiluarpantiyang menerima Bantuan Pemakanan	0	0	25	0	0	0	0	#DIV/0!
	PenyediaanSandang	JumlahJiwaPMKSdiluarKorban HIV/AIDSdanNapzadiluarpantiyang menerimaBantuanSandang	0	0	25	0	0	0	0	#DIV/0!
	PenyediaanAlat Bantu	JumlahJiwaPMKSdiluarKorbanHIV/AIDSdanNapzadiluarpantiyang menerima Bantuan Sandang	0	0	25	0	0	0	0	#DIV/0!

4	**ProgramPerlindungandan JaminanSosial**	**PresentasePMKSyang Tertangani**	100	100	98,3	98,3	1	100	100	1

	PemeliharaanAnak-anak Terlantar	**PresentaseAnakTerlantaryang Dipelihara**	100	0	100	100	1	100	100	1
	PenjangkauanAnak-anak Terlantar	JumlahAnak-anakTerlantaryang Dijangkau	860	0	855	100	0,116959064	860	960	1,11627907
	PemantauanTerhadap PelaksanaanPemeliharaan AnakTerlantar	JumlahKecamatanPemantauan terhadapPemeliharaanAnakTerlantar	3	0	3	0	0	3	3	1
	Pengelolaan Data FakirMiskinCakupanDaerah Kabupaten/Kota	**Presentase Data Fakir MiskinCakupanDaerahyangdikelola**	**100**	**93**	**100**	**100**	1	**100**	100	1
	Pendataan Fakir MiskinCakupanDaerahKab/Kota	JumlahKKFakirMiskincakupandaerah yang di data	17.518	16400	17518	17518	1	17.518	17.518	1
	PengelolaanDataFakirMiskinCakupanDaerah Kabupaten/Kota	JumlahKKFakirMiskincakupan daerahyangdikeloladata	17.518	16.400	17.518	17.518	1	17.518	17.518	1
5	**ProgramPenanganan Bencana**	**PresentaseKorbanBencanayang MenerimaBantuanSosialSelama Masa Tanggap Darurat**	100	100	100	100	1	100	100	1
	PerlindunganSosialKorbanBencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	PresentaseKorbanBencanaAlam SosialKabupaten/Kotayangdilindungi	100	100	100	100	1	100	100	1
	PenyediaanMakanan	PresentaseKorbanbencanayangmendapatkan bantuan makanan	100	100	100	100	1	100	100	1
	PenyediaanSandang	PresentaseKorbanbencanayang mendapatkanbantuansandang	100	100	100	100	1	100	100	1
	PenyelenggaraanPemberdayaanMasyarakat terhadapKesiapsiagaanBencana Kabupaten/Kota	PresentasePemberdayaanMasyarakat terhadapKesiapsiagaanBencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	1	100	100	1
	Koordinasi,Sosialisasidan PelaksanaanTarunaSiaga Bencana	JumlahPelaksanaanKoordinasidan SosialisasiTarunaSiagaBencana	100	100	100	100	1	100	100	1
6	**ProgramPengelolaanTamanMakam Pahlawan**	**PresentaseWahanaKesejahteraanSosialyangmenyediakan sarana dan prasaranakesejahteraansosial**	**100**	100	**100**	**100**	1	**100**	100	1
	PemeliharaanTamanMakamPahlawanNasional Kabupaten/Kota	PresentaseTamanMakam PahlawanNasionalKabupaten/ Kota yang dipelihara	100	100	100	100	1	100	100	1
	Pemeliharaan Taman MakamPahlawanNasionalKabupaten/ Kota	JumlahTamanMakamPahlawanyangdipelihara	1	1	1	1	1	1	1	1

2.2. AnalisisKinerjaPelayananDinasSosial

Capaianindikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali tahun 2022 melampaui target, Hal ini di sebabkan ada beberapa kegiatan yang anggarannya bersumberdari Dana APBN Pusat dan Anggaran APBD I Seperti Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta lanjut Usia yang tidak potensial yang menerima jaminan Sosial yang semula ditargetkan 21% realisasi pencapaian mencapai 23%

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam capaian indicator kinerja, capaian tahun2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel2.2
PencapaianKinerjaPelayananDinasSosial

No.	Indikator	SPMSTANDARNASIONAL	IKK	TargetRenstra					RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PersentasePMKSyangMemperolehBantuanSosial	PersentasePMKSyangMemperolehBantuanSosial	JmhPMKSyangMenerimabantuan	15	15	25	65	65	5	0	241	65	
			JmhPMKSyangseharusnyamenerimaBantuan	167	167	411	411	411	411	0	411	411	
			Persentase	8,9	8,9	6,08	15,81	15,81	91,62	0	58,6	15,81	
2	PersentasePMKSyangTertangani	PersentasePMKSyangTertangani	JmhPMKSyang Tertangani	64.000	64.000	85,636	86.247	87.118	64.000	0	85,636	86.247	
			JumlahPMKSyangada	87.118	87.118	87.118	87.118	87.118	87.118	0	87.118	87.118	
			Persentase	73,4	73,4	98,30	99	100,00	73,4	0	98,30	99	
7	PersentaseKorbanBencanayangMenerimaBantuanSosialSelamaMasatanggapdarurat	PersentaseKorbanBencanayangMenerimaBantuanSosialSelamaMasatanggapdarurat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	PersentasePenyandangCacatFisikdanMentalsertalanjutusiatidakpotensialyangtelahmenerimaJaminanSosial	PersentasePenyandangCacatFisikdanMentalsertalanjutusiatidakpotensialyangtelahmenerimaJaminanSosial	JmhPenyandangCacatFisikdanMentalsertalanjutusiatidakpotensialyangtelahmenerimaJaminanSosialdlm 1 thn	368	368	1,271	1.395	1.407	1.910	0	1.271	1.395	
			JmhPenyandangCacatFisikdanMentalsertalanjutusiatidakpotensialyangtelahmenerimaJaminan Sosial	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	6.464	0	6.464	6.464	

			dlm1thn										
			Persentase	5,6	5,6	19,6	21,5	21,7	29,5	0	19,6	21,5	

2.3. Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiDinasSosial

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Morowali sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Morowali, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PPKS oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.

Data yang tersedia secara Nasional, mengemukakan sedikitnya ada empat masalah Kesejahteraan Sosial yang dapat di urai yang terkait dengan problema kemiskinan (powerty); yaitu kefakirmiskinan, kecacatan, keterlantaran, dan ketidak layakan hunian.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Kabupaten Morowalitermasuk yang masih tinggi permasalahan kesejahteraan sosial, terutama di 2 (dua) daerah kepulauan, adapun permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

a. PemberdayaanSosial

Secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Morowali relative tinggi terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten dan daerah kepulauan. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Morowali menunjukan bahwa jumlah PPKS yang termuat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2022 adalah 85.536 jiwa, maka di perlukan adanya Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

b. PelayananandanRehabilitasiSosial

Untuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyangkut Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteran Lainya (PMKS) Bukan Korban HIV dan NapzadanDatalansiaDinasSosialKabupatenMorowalimenunjukanData

berjumlah5.048 orang. Data Penyandang Cacat sejumlah 1.416 JiwaCapaian target penanganan sampai tahun 2023 baru 32,7% atau sekitar 2.010 Jiwa

c. PerlindungandanJaminanSosial

Untuk perlindungan dan jaminan sosial, pendataan fakirmiskin yangsangat krusial. dimana untuk data fakir miskin selalu berubah ubah, disebabkan adanya penduduk yang tinggalnya tidak menetap dan banyaknya kk keluarga fakir miskin yang invalid, sehingga bantuan untuk jaminan sosial seperti PKH, Sembako mengalami saldo nol.

d. PenangananBencana

Untuk kabupaten morowali bencana banjir yang sering terjadi setiap tahun, maka perlu untuk mengantisipasi setiap saat, seperti penyediaan bantuan logistik bencana yang terdiri dari penyediaan permakanan, penyediaan sandang, dan kesiapsiagaan bencana seperti pelatihan taruna siaga bencana.

e. PemeliharaanTamanMakamPahlawan

Taman Makam Pahlawan (TMP) sampai saat ini sebenarnya bukan factor yang sangat penting dan mendesak untuk penanganannya. Dibandingkan dengan permasalahan social yang sangat krusial untuk ditangani. Tetapimengingat Taman Makam Pahlawan perlu dipersiapkan sedini mungkin, maka diperlukan perhatian untuk mempersiapkannya. Kabupaten morowali sekarang sudah mempunyai lokasi Taman Makam Pahlawan yang terletak di Desa Lanona Kecamatan Bungku Tengah. maka diperlukan pemeliharaannya.

Hasil identifikasi Dinas Sosial tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil program dan kegiatan , akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Sosial. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Sosial dalam pebcapaian Program dan kegiatan..

Adapun faktor-faktor penghambat terhadap pencapaianVisi dan misi yaitu Alokasi dana yang belum memadai dibandingkan Volume dan Jenis pelayanan yang harus dilaksanakan.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidangkesejahteraansosialadalahbagaimanameningkatkanaksesdankualitas

pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal itu dapat di antisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan kabupaten morowali diarahkan pada beberapa hal yang dianggap ***merupakan isu strategis daerah*)*** sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera.

2.4. ReviewTerhadapRancanganAwalRKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yangdibutuhkan. Pada tahun anggaran 2022 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel2.3

REVIUWTERHADAPRANCANGANAWALRKPDTAHUN2022

RancanganAwalRKPD					HasilAnalisisKebutuhan				
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**PaguIndikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**KebutuhanDana**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.927.522.547,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.927.522.547,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.927.522.547,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.927.522.547,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH	**Dinas Sosial**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah**	**100%**	**4.790.576.547,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Dinas Sosial**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah**	**100%**	**4.790.576.547,00**
Administrasi Keunagan PerangkatDaerah			**100**	**2.740.968.867,00**	**Administrasi Keunagan PerangkatDaerah**			**100**	**2.740.968.867,00**
PenyediaanGajidan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Aparatur Sipil Negaradalam1 tahun	21	2.212.768.867,00	PenyediaanGajidan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Aparatur Sipil Negaradalam1 tahun	21	2.212.768.867,00
Penyediaan Administrasi PelaksanaanASN	Kabupaten Morowali	JumlahPeg. Honorerdalam 1 tahun	20	528.200.000,00	Penyediaan Administrasi PelaksanaanASN	Kabupaten Morowali	JumlahPeg. Honorerdalam 1 tahun	20	528.200.000,00

Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	**-**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah**	**-**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**-**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas danFungsi	-	Presentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yangmengikuti Pendidikandan Pelatihan Struktural	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas danFungsi	-	Presentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yangmengikuti Pendidikandan Pelatihan Struktural	-	-
Administrasi UmumPerangkat Daerah		**Presentase Administrasi Keuangan dalam1 tahun**	**100%**	**823.803.750,00**	**AdministrasiUmum Perangkat Daerah**		**Presentase Administrasi Keuangan dalam1 tahun**	**100%**	**823.803.750,00**
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	DinasSosial	JumlahBelanja ModalPeralatan danMesin Selama1Tahun	12	314.310.830,00	PenyediaanPeralatan danPerlengkapan Kantor	DinasSosial	JumlahBelanja ModalPeralatan danMesin Selama1Tahun	12	314.310.830,00
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	DinasSosial	Jumlah Peralatan Rumahtangga Selama1 Tahun	12	1.030.960,00	PenyediaanPeralatan RumahTangga	DinasSosial	Jumlah Peralatan Rumahtangga Selama1 Tahun	12	1.030.960,00
PenyediaanBahan Logistik Kantor	DinasSosial	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)selama1 tahundalam1 tahun	12	112.577.060,00	PenyediaanBahan Logistik Kantor	DinasSosial	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)selama1 tahundalam1 tahun	12	112.577.060,00
PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	DinasSosial	JumlahBarang Cetakan dan FotoCopy selama1(tahun)	12	25.375.000,00	PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	DinasSosial	JumlahBarang Cetakan dan FotoCopy selama1(tahun)	12	25.375.000,00
Penyelenggara RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu-Jakarta	JumlahRapat Konsultasidan Koordinasi ke luar daerah selama1tahun	12	370.509.900,00	PenyelenggaraRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Palu-Jakarta	JumlahRapat Konsultasidan Koordinasi ke luar daerah selama1tahun	12	370.509.900,00

PengadaanBarang Milik Daetah PenunjangUrusan PemerintahDaerah		**Presentase Pengadaan Milikdaerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**100%**	**128.253.000,00**	**PengadaanBarang Milik Daetah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**		**Presentase Pengadaan Milikdaerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**100%**	**128.253.000,00**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DinasSosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yangdiadakan dalam1 tahun	12	128.253.000,00	PengadaanKendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DinasSosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yangdiadakan dalam1 tahun	12	128.253.000,00
PenyediaanJasa PenunjangUrusan PemerintahDaerah		**Presentasejasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**17.062.630,00**	**PenyediaanJasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah**		**Presentasejasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**17.062.630,00**
PenyediaanJasa SuratMenyurat	DinasSosial	Jumlah ketersediaanjasa surat menyuratdalam 1 tahun	12	3.094.630,00	PenyediaanJasaSurat Menyurat	DinasSosial	Jumlah ketersediaanjasa surat menyuratdalam 1 tahun	12	3.094.630,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDayaAir dan Listrik	DinasSosial	JumlahTagihan Telepon, Internet dan air dalam1 tahun	12	13.068.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber DayaAirdanListrik	DinasSosial	JumlahTagihan Telepon, Internet dan air dalam1 tahun	12	13.068.000,00
Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	DinasSosial	Jumlah Iuran Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantordalam1 tahun	12	900.000,00	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	DinasSosial	Jumlah Iuran Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantordalam1 tahun	12	900.000,00
Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah		**Presentase barangMilik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Yang**	**100%**	**1.080.488.300,00**	**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah**		**Presentase barangMilik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Yang**	**100%**	**1.080.488.300,00**

		dipelihara					**dipelihara**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional ataulapangan	DinasSosial	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yangdipelihara dalam 1 tahun	12	193.330.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional ataulapangan	DinasSosial	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yangdipelihara dalam 1 tahun	12	193.330.000,00
Pemeliharaan PeralatandanMesin Lainnya	DinasSosial	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesindalam1 tahun	12	4.880.000,00	Pemeliharaan PeralatandanMesin Lainnya	DinasSosial	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesindalam1 tahun	12	4.880.000,00
Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DinasSosial	Jumlahgedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala dalam1tahun	12	882.278.300,00	Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung KantordanBangunan Lainnya	DinasSosial	Jumlahgedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala dalam1tahun	12	882.278.300,00
PROGRAM PEMBERDAYAANSOSIAL	**Bungku Timur-Bungku Barat**	**Presentase PMKSyang memperoleh bantuansosial**	**100%**	**92.442.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAANSOSIAL**	**Bungku Timur-Bungku Barat**	**Presentase PMKSyang memperoleh bantuansosial**	**100%**	**92.442.000,00**
Pemberdayaan SosialKomunitas Adat Terpencil (KAT)	**-**	**Presentase Komunitas AdatTerpencil yang di Berdayakan**	**100**	**92.442.000,00**	**Pemberdayaan SosialKomunitas Adat Terpencil (KAT)**	**-**	**Presentase Komunitas AdatTerpencil yang di Berdayakan**	**100**	**92.442.000,00**
Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	-	JumlahKAT yang mendapatkan BantuanSosial	100	92.442.000,00	Fasilitas PemberdayaanSosial KAT	-	JumlahKAT yang mendapatkan BantuanSosial	100	92.442.000,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**9 Kecamatan**	**Presentase Penyandang Cacat Fisik danMental serta Lanjut Usia tidak potensialyang telah menerima JaminanSosial**	**100%**	**3.400.222.000,00**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**9 Kecamatan**	**Presentase Penyandang Cacat Fisik danMental serta Lanjut Usia tidak potensialyang telah menerima JaminanSosial**	**100%**	**3.400.222.000,00**
RehabilitasiSosial DasarPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar PantiSosial	**-**	**Presentase Penyandang Disilibitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantarserta Gelandangan pengemis diluar panti yang direhabilitasi**	**100**	**3.400.222.000,00**	**RehabilitasiSosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usiaterlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar PantiSosial**	**-**	**Presentase Penyandang Disilibitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantarserta Gelandangan pengemis diluar panti yang direhabilitasi**	**100**	**3.400.222.000,00**
Penyediaan Permakanan	9 Kecamatan	JumlahJiwa Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, pengemisdiluar panti yang menerima penyediaan pemakanan	700	3.164.042.000,00	Penyediaan Permakanan	9 Kecamatan	JumlahJiwa Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, pengemisdiluar panti yang menerima penyediaan pemakanan	700	3.164.042.000,00

PenyediaanSandang	9 Kecamatan	JumlahJiwa Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, pengemisdiluar panti yang menerima penyediaan Sandang	200	151.400.000,00	PenyediaanSandang	9 Kecamatan	JumlahJiwa Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, pengemisdiluar panti yang menerima penyediaan Sandang	200	151.400.000,00
PenyediaanAlat Bantu	9 Kecamatan	JumlahJiwa Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, pengemisdiluar panti yang menerima penyediaanAlat Bantu	100	84.780.000,00	PenyediaanAlat Bantu	9 Kecamatan	JumlahJiwa Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, pengemisdiluar panti yang menerima penyediaanAlat Bantu	100	84.780.000,00
RehabilitasiSosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan Napza diluar PantiSosial	-	**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) LainnyaBukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar PantiSosial yang direhabiliasi sosial**	-	-	**RehabilitasiSosial PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial**	-	**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) LainnyaBukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar PantiSosial yang direhabiliasi sosial**	-	-

Penyediaan Permakanan	-	JumlahJiwa PMKS diluar Korban HIV/AIDSdan Napza diluar panti yang menerima Bantuan Pemakanan	-	-	Penyediaan Permakanan	-	JumlahJiwa PMKS diluar Korban HIV/AIDSdan Napza diluar panti yang menerima Bantuan Pemakanan	-	-
PenyediaanSandang	-	JumlahJiwa PMKS diluar Korban HIV/AIDSdan Napza diluar panti yang menerima Bantuan Sandang	-	-	PenyediaanSandang	-	JumlahJiwa PMKS diluar Korban HIV/AIDSdan Napza diluar panti yang menerima Bantuan Sandang	-	-
PROGRAM PERLINDUGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**9 Kecamatan**	**Presentase PMKSyang tertangani**	**100%**	**4.502.286.200,00**	**PROGRAM PERLINDUGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**9 Kecamatan**	**Presentase PMKSyang tertangani**	**100%**	**4.502.286.200,00**
Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	**9 Kecamatan**	**Presentase Anak Terlantaryang dipelihara**	**100**	**3.981.747.100,00**	**PemeliharaanAnak-anakTerlantar**	**9 Kecamatan**	**Presentase Anak Terlantaryang dipelihara**	**100**	**3.981.747.100,00**
Penjangkauan Anak-anakTerlantar	9 Kecamatan	JumlahAnak-anakTerlantar yangdijangkau	652	3.956.747.100,00	PenjangkauanAnak-anakTerlantar	9 Kecamatan	JumlahAnak-anakTerlantar yangdijangkau	652	3.956.747.100,00
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan PemeliharaanAnak Terlantar	9 Kecamatan	Jumlah Kecamatan Pemantauan terhadap Pemeliharaan AnakTerlantar	100	25.000.000,00	PemantauanTerhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	9 Kecamatan	Jumlah Kecamatan Pemantauan terhadap Pemeliharaan AnakTerlantar	100	25.000.000,00
PengelolaanData Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	**9 Kecamatan**	**Presentase DataFakir Miskin Cakupan**	**100**	**520.539.100,00**	**PengelolaanData Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota**	**9 Kecamatan**	**Presentase DataFakir Miskin Cakupan**	**100**	**520.539.100,00**

		Daerahyang dikelola					**Daerahyang dikelola**		
PengelolaanData Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah KK Fakir Miskin cakupandaerah yang dikelola data	100	520.539.100,00	Pengelolaan Data FakirMiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	Jumlah KK Fakir Miskin cakupandaerah yang dikelola data	100	520.539.100,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Palu-Kab. Morowali**	**Presentase Korban Bencana yang Menerima BantuanSosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**100%**	**91.816.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Palu-Kab. Morowali**	**Presentase Korban Bencana yang Menerima BantuanSosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**100%**	**91.816.000,00**
Perlindungan SosialKorban BencanaAlamdan Sosial Kabupaten/Kota	**Palu**	**Presentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota yang dilindungi**	**100**	**59.966.000,00**	**PerlindunganSosial KorbanBencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Palu**	**Presentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota yang dilindungi**	**100**	**59.966.000,00**
Penyediaan Makanan	Palu	Presentase Korbanbencana yang mendapatkan bantuan makanan	100	29.998.000,00	PenyediaanMakanan	Palu	Presentase Korbanbencana yang mendapatkan bantuan makanan	100	29.998.000,00
PenyediaanSandang	Palu	Presentase Korbanbencana yang mendapatkan bantuan sandang	100	29.968.000,00	PenyediaanSandang	Palu	Presentase Korbanbencana yang mendapatkan bantuan sandang	100	29.968.000,00

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100**	**31.850.000,00**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Morowali**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100**	**31.850.000,00**
Koordinasi, Sosialisasidan PelaksanaanTaruna Siaga Bencana	Kabupaten Morowali	Jumlah Pelaksanaan Koordinasidan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana	100	31.850.000,00	Koordinasi, Sosialisasidan PelaksanaanTaruna Siaga Bencana	Kabupaten Morowali	Jumlah Pelaksanaan Koordinasidan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana	100	31.850.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMANMAKAM PAHLAWAN	**Kec. Bungku Tengah**	**Presentase Wahana Kesejahteraan Sosialyang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial**	**100%**	**50.179.800,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMANMAKAM PAHLAWAN**	**Kec. Bungku Tengah**	**Presentase Wahana Kesejahteraan Sosialyang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial**	**100%**	**50.179.800,00**
Pemeliharaan TamanMakam PahlawanNasional Kabupaten/Kota	Kec. Bungku Tengah	**Presentase TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kotayang dipelihara**	100	**50.179.800,00**	**Pemeliharaan TamanMakam PahlawanNasional Kabupaten/Kota**	Kec. Bungku Tengah	**Presentase TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kotayang dipelihara**	100	**50.179.800,00**
Pemeliharaan TamanMakam PahlawanNasional Kabupaten/ Kota	Kec. Bungku Tengah	JumlahTaman Makam Pahlawanyang dipelihara	100	50.179.800,00	PemeliharaanTaman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/ Kota	Kec. Bungku Tengah	JumlahTaman Makam Pahlawanyang dipelihara	100	50.179.800,00
				12.927.522.547,00					12.927.522.547,00

2.5. PenelaahanUsulanProgramdanKegiatanMasyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 sd 2026. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Morowali dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahandantantangan,melayani/memenuhikebutuhandasar PemerluPelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masayarakata secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 didasarkan kepada RKPD Dinas Sosial Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan seperti pada Table dibawah.

Tabel2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari
ParaPemangkuKepentingantahun2024

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan


AirTerjunLantesaiDs.BulengKec.BungkuPesisir

Bab 3

TUJUAN,SASARAN DINASSOSIAL

3.1. TelaahanTerhadapKebijakanNasional

Dalam RPJMN2020-2024, "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**" merupakan visi Presiden yang menjadi visi bagi seluruh Kementerian/Lembaga. Kementerian Sosial RI hadir dan mengambil perandari salahsatumisi pada RPJMN yaitu *"KementerianSosial yangandal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi"*

Kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024.Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat Misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Peningkatankualitasmanusia Indonesia.
2. Pembangunan yangmeratadan berkeadilan.
3. PengelolaanPemerintahanyangbersih,efektif,danterpercaya.
4. Sinergipemerintahdaerahdalamkerangkanegarakesatuan.

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkanwilayahuntukmengurangikesenjangandanmenjamin pemerataan.
3. MeningkatkanSDM yangberkualitasdanberdayasaing.
4. Revolusimentaldanpembangunankebudayaan.
5. Memperkuatinfrastrukturuntukmendukungpembangunanekonomidanpelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahaniklim.
7. Memperkuatstabilitaspolhukhankamdantransformasipelayananpublik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

Prioritas percepatan penurunan angka kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya.

Dinas Sosial sebagai perangkat Daerah yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPD sebagai berikut:

Programprioritasdalampercepatanpenurunantingkatkemiskinanadalah:

1. ProgramPemberdayaanSosial
2. ProgramRehabilitasiSosial
3. ProgramPerlindungandanJaminan Sosial
4. ProgramPenanganan Bencana
5. ProgramPengelolaanTamanMakam Pahlawan

3.2. TujuandanSasaranDinas Sosial

TujuanpembangunanbidangkesejahteraansosialyangingindicapaiDinasSosial Kabupaten Morowaliadalah

1. MenurunyaKesenjanganPendudukMiskin
2. MeningkatnyaDesatangguhBencana

Dengan Sasaran yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan pembangunagan bidang kesejahteraan social adalah:

1. MeningkatkanPelayananterhadapPemerluPelayananKesejahteraanSosial
2. MeningkatkanPenangananBencana

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPD ,Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi. Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial tahun 2024 serta target kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

TUJUANDANSASARAN

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Target2024
Menurunya Kesenjangan PendudukMiskin	Meningkatkan Pelayananterhadap PemerluPelayanan KesejahteraanSosial	Presentase PPKS Yang meningkat Kemampuannya untuk PemenuhanKebutuhan Dasarnya	41,3
MeningkatnyaDesa TangguhBencana	Meningkatkan PenangananBencana	Presentase Korban Bencanayangmenerima Bantuan Selama Masa tanggapdarurat	100

3.3. ProgramdanKegiatan

Perandan FungsiDinasSosialakandilaksanakandalamrangka meningkatkankualitas hidup dan daya saing penduduk teruitama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

DinasSosialMempunyaitugasmenyelenggarakanurusandibidang Rehabilitasisosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, Penanganan Bencana, dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) dalammenyelenggarakan pemerintahan daerah Tujuan yangakan dicapai DinasSosial Kabupaten Morowali tahun 2024 adalah :

Menurunya KesenjanganPendudukMiskindanmeningkatnyaDesatangguhBencana

AdapunrumusanrencanaProgram dankegiatanDinasSosialtahun2024dapatdilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel3.2

RUMUSANRENCANAPROGRAMDANKEGIATANPERANGKATDAERAHTAHUN2024DAN PERKIRAANMAJUTAHUN2025
DINASSOSIALKABUPATENMOROWALI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan ProgramKegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/Kegiatan Output	RencanaTahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	PerkiraanMajuRencana Tahun2025	
							Lokasi	Target Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase urusan penunjang pemerintahanyang dilaksanakan		100%	**5.679.111.668,22**			100%	**5.943.253.807,46**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	PresentaseAdministrasi Keuangan		100	**4.205.076.008,86**			100	**4.400.659.022,11**
1	06	01	2.02	01	PenyediaanGajidan Tunjangan ASN	JumlahOrangyang MenerimaGajidan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	20	3.437.630.245,83	APBDKab.		20	3.597.518.457,24
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	JumlahPelaksana Kegiatan ASN	DinasSosial	20	767.445.763,03	APBDKab.		20	803.140.564,86
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah**	PersentasePejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)yangmengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dalampersen	DinasSosial	2	**99.952.365,36**			2	**104.601.267,01**

1	**06**	**01**	**2.05**	**009**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas danFungsi	JumlahPegawai BerdasarkanTugasdan FungsiyangMengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DinasSosial	2	99.952.365,36	APBDKab.		2	104.601.267,01
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	Presentase Administrasi AdministrasiUmum dalam 1 tahun	DinasSosial	100	**827.664.268,95**			100	**1.172.353.147,97**
1	**06**	**01**	**2.06**	**002**	PenyediaanPeralatan danPerlengkapan Kantor	JumlahPaketPeralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	DinasSosial	15	188.934.122,94	APBDKab.		15	205.534.803,53
1	06	01	2.06	004	PenyediaanBahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantoryang Disediakan	DinasSosial	5	128.533.015,43	APBDKab.		5	139.826.557,86
1	06	01	2.06	005	PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	JumlahPaketBarang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DinasSosial	12	85.801.070,56	APBDKab.		12	93.339.974,30
1	06	01	2.06	009	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	DinasSosial	13	424.396.060	APBDKab.		13	752.017.150,77
1	**06**	**01**	**2.07**	05	**PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**	PresentaseBarang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah Dalamsetahun	DinasSosial	100	**296.896.946,42**			-	-
1	**06**	**01**	**2.07**	002	Pengadaan KendaraanDinas Operasionalatau Lapangan	JumlahUnitKendaraan DinasOperasionalatau Lapangan yang Disediakan	DinasSosial	1	46.896.946,42	APBDKab.		-	-

					PengadaanSarana danPrasarana PendukungGedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung KantordanBangunan Kantor Lainnya	DinasSosial	3	250.000.000,00	APBDKab.		-	-
1	**06**	**01**	**2.08**		**PenyediaanJasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	PresentasePenyediaan JasaPenunjangUrusan pemerintahan daerah	DinasSosial	100	**48.778.260,73**			100	**51.046.994,80**
1	**06**	**01**	**2.08**	002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber DayaAirdanListrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber DayaAirdanListrik yangDisediakan	DinasSosial	12	36.259.320,60	APBDKab.		12	37.945.784,09
1	**06**	**01**	**2.08**	**003**	PenyediaanJasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	JumlahJasa Peralatan KantorYangdi Perbaiki	DinasSosial	4	11.159.827,21	APBDKab.		4	11.678.883,85
1	**06**	**01**	**2.08**	004	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	JumlahBulan PembayaranRetribusi Sampah	Dinas Sosial	12	1.359.112,92	APBDKab.		12	1.422.326,86
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	DinasSosial	100	**200.272.839,62**			100	**209.587.764,09**
1	**06**	**01**	**2.09**	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan DinasOperasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DinasSosial	4	200.272.839,62	APBDKab.		4	209.587.764,09
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	PersentaseKelompok diberdayakan		6,08	**75.466.255,09**			15,82%	**78.976.279,06**

1	**06**	**02**	2.01		**Pemberdayaan SosialKomunitas Adat Terpencil (KAT)**	PresentaseKomunitas Adat(KAT)terpencil yang diberdayakan		0	-			37	**78.976.279,06**
1	**06**	**02**	2.01	001	Fasilitasi Pemberdayaan SosialKAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas PemberdayaanSosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun Sigendo	0	-			25	78.976.279,06
1	**06**	**02**	**02.03**		**PengembanganPotensiSumberKesejahteraanSosialKab/Kota**	**Presentase PSKS yangdikembangkan**		**31,00**	**75.466.255,09**			**0**	-
1	**06**	**02**	**02.03**	**003**	PeningkatanKemampuanPotensiSumberKesejahteraanKeluargaKewenaganKab/Kota	Jumlah PSKS KeluargaKab/Kota yang ditingkatkan Kemampuannya	Kec.Bungku Pesisr, Kec. Bungku Selatan,Kec. Bungku Tengah	65	75.466.255,09	APBDKab.		0	-
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase(%) penyandangdisabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnyadiluarpanti		19,66	**4.693.561.771,34**			21,58	**4.911.864.829,87**
1	**06**	**04**	**2.01**		**RehabilitasiSosial DasarPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar PantiSosial**	PresentasePenyandang Disabilitas terlantr, AnakTerlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandanganpengemis diluar panti yang direhabilitasi		31,50%	**4.693.561.771,34**			31,50%	**4.911.864.829,87**

1	**06**	**04**	**2.01**	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	1000 Orang	4.308.466.487,80	APBDKab.		1000 Orang	4.508.858.313,39
1	**06**	**04**	**2.01**	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang MenerimaPakaiandan Kelengkapan Lainnya yangTersediadalam1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	200orang	214.063.305,39	APBDKab.		300 Orang	224.019.640,60
1	**06**	**04**	**2.01**	03	PenyediaanAlat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat BantudanAlatBantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	71Orang	171.031.978,15	APBDKab.		95Orang	178.986.875,89
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			98,30%	**8.466.236.951,05**			99,00%	**8.860.011.553,54**
1	**06**	**05**	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	PresentaseAnak Terlantar yang dipelihara		75	**7.261.837.655,04**			85,00	**7.861.222.027,77**
1	**06**	**05**	2.01	**001**	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	JumlahAnak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	1.153 orang	7.204.644.522,17	APBDKab.		1.307 orang	7.801.368.775,26
1	**06**	**05**	2.01	**003**	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan PemeliharaanAnak Terlantar	JumlahAnakTerlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/ Kota	9 Kecamatan	35Orang	55.289.699,41	APBDKab.		40orang	59.853.252,51

1	**06**	**05**	2.02		**PengelolaanData Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota**	PresentaseDataFakir MiskinCakupan Daerahyangdikelola		85%	**954.399.296,01**			95,00	**998.789.525,77**
1	**06**	**05**	2.02	01	PendataanFakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kotayang Didata	9 Kecamatan	72.705 orang	225.241.254,11	APBDKab.		81.259 Orang	235.717.488,81
1	**06**	**05**	2.02	02	PengelolaanData FakirMiskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	JumlahKeluargayang Mendapatkan PengentasanFakir Miskin Kabupaten/ Kota	9 Kecamatan	72.705 orang	729.158.041,90	APBDKab.		81.259 Orang	763.072.036,96
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			85%	**320.358.016,86**			95%	**335.258.243,66**
1	**06**	**06**	**2.01**		**PerlindunganSosial KorbanBencana Alamdan Sosial Kabupaten/Kota**	Presentase Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kotayang dilindungi		100%	**212.655.868,46**			100%	**222.546.742,12**
1	**06**	**06**	**2.01**	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	100	98.967.582,70	APBDKab.		130	103.570.680,95

1	**06**	**06**	**2.01**	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang MendapatkanPakaian dan Kelengkapan LainnyayangTersedia pada Masa Tanggap Darurat(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kecamatan	100	113.688.285,76	APBDKab.		130	118.976.061,17
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsiagaanBencana Kabupaten/ Kota		76%	**107.702.148,40**			93%	**112.711.501,55**
1	**06**	**06**	**2.02**	002	Koordinasi, Sosialisasidan PelaksanaanTaruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi danPelaksanaan TarunaSiagaBencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Bahodopi, Kec.Bungku Tengah	71	107.702.148,40	APBDKab.		87	112.711.501,55
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMANMAKAM PAHLAWAN**	persentase taman makampahlawanyang terpelihara		100%	**71.596.030,04**			100%	**74.926.045,30**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan TamanMakam PahlawanNasional Kabupaten/Kota**	persentase taman makanpahlawanyang terpelihara		100%	**71.596.030,04**			100%	**74.926.045,30**
1	**06**	**07**	**2.01**	**002**	PemeliharaanTaman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	JumlahMakamyang Terpenuhi Pemeliharannyapada TamanMakam Pahlawan Kabupaten/Kota	DesaLanona Kec.Bungku Tengah	1 TMP	71.596.030,04	APBDKab.		1 TMP	74.926.045,30
									19.306.330.692,60				20.204.290.758,90


Air TerjunBatuKapalDs. Wosu

Bab4

RENCANAKERJADAN PENDANAANDINAS SOSIAL

Faktor–Faktoryangmenjadibahanpertimbangan terhadap rumusanprogram dan kegiatan merujuk pada RPD Tahun 2024-2026, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD yang mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan didaerah yang berkelanjutan".

Program/kegiatanRenjaTahun2024meliputisebagaiberikut:

1. ProgramPenunjangUrusan PemerintahanDaerahKabupaten/Kota

a. AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah

1. PenyediaanGajidanTunjangan ASN

2. PenyedianAdministrasiPelaksanaTugas ASN

b. AdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah

1. PendidikandanPelatihanPegawaiBerdasarkanTugasdanFungsi

c. AdministrasiUmumPerangkatDaerah

1. PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor

2. PenyediaanBahanLogistikKantor

3. PenyediaanBarangCetakandanpenggandaan

4. PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD

d. PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah

1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. PengadaanSaranadanprasaranapendukunggedungkantordanbangunankantorlainnya

e.PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah

1. PenyediaanJasaKomunikasiSumberDaya AirdanListrik
2. PenyediaanJasaPeralatandanPerlengkapanKantor
3. PenyediaanJasaPelayananUmum Kantor

f.PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah

1. PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,PajakdanPerizinanKendaraan Dinas Operasinal Dinas atau Lapangan

2. ProgramPemberdayaan Sosial

a. PemberdayaanSosialKomunitasAdatterpencil(KAT)

1. FasilitasiPemberdayaanSosialKAT

b. PengembanganPotensiSumberKesejahteraanSosialKabupaten/Ko

1. PeningkatanKemampuanPotensiSumberKesejahteraanSosialKeluargaKewenangan Kabupaten/Kota.

3. ProgramRehabilitasiSosial

a. RehabilitasiSosialDasar,PenyandangDisabilitasTerlantar,AnakTerlantar,LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti social

1. PenyediaanPermakanan
2. PenyediaanSandang
3. PenyediaanAlat Bantu

4. ProgramPerlindungandanJaminan Sosial

a. PemeliharaanAnakTerlantar

1. PenjangkauanAnak Terlantar
2. PemantauanterhadapPelaksanaanPemeliharaanAnakTerlantar

b. PengelolaanData FakirMiskinCakupanDaerahKabupaten/Kota

1. PendataanFakirMiskinCakupanDaerahKabupaten/Kota
2. PengelolaanData FakirMiskinCakupanDaerahKabupaten/Kota

5. ProgramPenangananBencana

a. PerlindunganSosialKorbanBencanaAlamdanSosialKabupaten/Kota

1. PenyediaanMakanan
2. PenyediaanSandang

b. PenyelenggaraanPemberdayaanMasyarakatterhadapkesiapsiagaanBencana Kabupaten/Kota

1. KoordinasiSosialisasidanpelaksanaanTarunaSiagaBencana

6. ProgrampengelolaanTaman MakamPahlawan

a. PemeliharaanTamanMakamPahlawanNasionalKabupaten/Kota

1. PemeliharaanTamanMakamPahlawanNasionalKabupaten/Kota

Tabel4.1

RENCANAKERJADANPENDANAANDINASSOSIAL
TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerahdan ProgramKegiatan	IndikatorKinerjaProgram Outcomes/KegiatanOutput	Satuan	RencanaTahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1					2	3		4	5	6	7	8
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentaseurusanpenunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen		100%	**5.679.111.668,22**		
1	**06**	**01**	**2.02**		**AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah**	PresentaseAdministrasi Keuangan	Persen		100	**4.205.076.008,86**		
1	06	01	2.02	01	PenyediaanGajidanTunjangan ASN	JumlahOrangyang MenerimaGajidan TunjanganASN	Orang	DinasSosial	20	3.437.630.245,83	APBD Kab.	
1	06	01	2.02	02	PenyediaanAdministrasi PelaksanaanTugasASN	JumlahPelaksanaKegiatan ASN	Orang	DinasSosial	20	767.445.763,03	APBD Kab.	
1	**06**	**01**	**2.05**		**AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah**	PersentasePejabatAparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan PelatihanStrukturaldalam persen	Persen	DinasSosial	33	**99.952.365,36**		
1	**06**	**01**	**2.05**	**009**	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkanTugas danFungsi	JumlahPegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	DinasSosial	2	99.952.365,36	APBD Kab.	
1	**06**	**01**	**2.06**		**AdministrasiUmum Perangkat Daerah**	Presentase Administrasi AdministrasiUmumdalam1 tahun	Persen	DinasSosial	100	**827.664.268.95**		

1	**0 6**	**0 1**	**2.06**	**002**	PenyediaanPeralatandan Perlengkapan Kantor	JumlahPaketPeralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	DinasSosial	15	188.934.122,94	APBD Kab.	
1	0 6	0 1	2.06	004	PenyediaanBahanLogistik Kantor	JumlahPaketBahanLogistik Kantor yang Disediakan	Paket	DinasSosial	5	128.533.015,43	APBD Kab.	
1	0 6	0 1	2.06	005	PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang CetakandanPenggandaan yang Disediakan	Paket	DinasSosial	12	85.801.070,56	APBD Kab.	
1	0 6	0 1	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat KoordinasidanKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat KoordinasidanKonsultasi SKPD	Laporan	DinasSosial	13	424.396.060	APBD Kab.	
1	**0 6**	**0 1**	**2.07**	05	**Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	Presentase Barang Milik DaerahPenunjangUrusan PemerintahDaerahDalam setahun	Persen	DinasSosial	100	**296.896.946,42**		
1	**0 6**	**0 1**	**2.07**	002	PengadaanKendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganyangDisediakan	Unit	DinasSosial	1	46.896.946,42	APBD Kab.	
					Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukungGedung Kantor danBangunan Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan BangunanKantorLainnya	Unit	DinasSosial	3	250.000.000,00	APBD Kab.	
1	**0 6**	**0 1**	**2.08**		**PenyediaanJasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah**	PresentasePenyediaanJasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Persen	DinasSosial	100	**48.778.260,73**		
1	**0 6**	**0 1**	**2.08**	002	PenyediaanJasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	DinasSosial	12	36.259.320,60	APBD Kab.	

1	**06**	**01**	**2.08**	**003**	PenyediaanJasaPeralatandan Perlengkapan Kantor	JumlahJasaPeralatanKantor Yang di Perbaiki	Buah	DinasSosial	4	11.159.827,21	APBD Kab.	
1	**06**	**01**	**2.08**	004	PenyediaanJasaPelayanan Umum Kantor	JumlahBulanPembayaran RetribusiSampah	Bulan	DinasSosial	12	1.359.112,92	APBD Kab.	
1	**06**	**01**	**2.09**		**PemeliharaanBarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	PresentasePemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	DinasSosial	100	**200.272.839,62**		
1	**06**	**01**	**2.09**	002	PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan,Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Buah	DinasSosial	4	200.272.839,62	APBD Kab.	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAANSOSIAL**	PersentaseKelompokdi berdayakan	Persen		6,08	**75.466.255,09**		
1	**06**	**02**	2.01		**PemberdayaanSosial KomunitasAdatTerpencil (KAT)**	PresentaseKomunitasAdat (KAT) terpencil yang diberdayakan	Persen		0	-		
1	**06**	**02**	2.01	001	FasilitasiPemberdayaan SosialKAT	JumlahKeluargapadaKAT yang MendapatkanFasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DusunSigendo	0	-		
1	**06**	**02**	**02.03**		**PengembanganPotensiSumber KesejahteraanSosialKab/Kota**	**PresentasePSKSyang dikembangkan**	**Persen**		**31,00**	**75.466.255,09**		
1	**06**	**02**	**02.03**	**003**	PeningkatanKemampuanPotensiSumberKesejahteraanKeluargaKewenaganKab/Kota	JumlahPSKSKeluarga Kab/Kota yang ditingkatkan Kemampuannya	KK	Kec. Bungku Pesisr, Kec.BungkuSelatan, Kec.Bungku Tengah	65	75.466.255,09	APBD Kab.	

1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASISOSIAL**	Persentase(%) penyandang disabilitasterlantar.anak terlantar.lanjutusiaterlantar dangelandangan pengemisyangterpenuhi kebutuhandasarnyadiluar panti	Persen	19,66	**4.693.561.771,34**		
1	**06**	**04**	**2.01**		**RehabilitasiSosialDasar Penyandang Disabilitas Terlantar,AnakTerlantar, LanjutUsiaTerlantar,serta GelandanganPengemisdi LuarPantiSosial**	PresentasePenyandang Disabilitas terlantr, Anak Terlantar, Lanjut Usia TerlantarsertaGelandangan pengemis diluar panti yang direhabilitasi	Persen	31,50%	**4.693.561.771,34**		
1	**06**	**04**	**2.01**	01	PenyediaanPermakanan	Jumlah Orang yang MendapatkanPemenuhan Kebutuhan Permakanan SesuaidenganStandarGizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa 9 Kecamatan	1000 Orang	4.308.466.487,80	APBD Kab.	
1	**06**	**04**	**2.01**	02	PenyediaanSandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan KelengkapanLainnyayang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jiwa 9 Kecamatan	200 orang	214.063.305,39	APBD Kab.	
1	**06**	**04**	**2.01**	03	PenyediaanAlat Bantu	Jumlah Orang yang MendapatkanAlatBantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jiwa 9 Kecamatan	71 Orang	171.031.978,15	APBD Kab.	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGANDAN JAMINAN SOSIAL**		Persen	98,30%	**8.466.236.951,05**		
1	**06**	**05**	2.01		**PemeliharaanAnak-Anak Terlantar**	PresentaseAnakTerlantar yangdipelihara	Persen	75	**7.261.837.655,04**		

1	**06**	**05**	2.01	**001**	PenjangkauanAnak-Anak Terlantar	JumlahAnak-AnakTerlantar yangDijangkauKewenangan Kabupaten/ Kota	Jiwa 9 Kecamatan	1.153 orang	7.204.644.522,17	APBD Kab.	
1	**06**	**05**	2.01	**003**	PemantauanTerhadap PelaksanaanPemeliharaan AnakTerlantar	JumlahAnakTerlantaryang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kecamatan 9 Kecamatan	35 Orang	55.289.699,41	APBD Kab.	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupanDaerah Kabupaten/Kota**	PresentaseDataFakirMiskin Cakupan Daerah yang dikelola	Persen 85%		**954.399.296,01**		
1	**06**	**05**	2.02	01	PendataanFakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin CakupanDaerahKabupaten/ Kota yang Didata	Jiwa 9 Kecamatan	72.705 orang	225.241.254,11	APBD Kab.	
1	**06**	**05**	2.02	02	PengelolaanDataFakir MiskinCakupanDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang MendapatkanPengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Jiwa 9 Kecamatan	72.705 orang	729.158.041,90	APBD Kab.	
1	**06**	**06**			**PROGRAMPENANGANAN BENCANA**		Persen 85%		**320.358.016,86**		

1	**06**	**06**	**2.01**		**PerlindunganSosialKorban Bencana Alam dan SosialKabupaten/Kota**	Presentase Korban Bencana AlamSosialKabupaten/Kota yang dilindungi	Persen 9 Kecamatan	100%	**212.655.868,46**		
1	**06**	**06**	**2.01**	01	PenyediaanMakanan	Jumlah Orang yang MendapatkanPermakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa 9 Kecamatan	100	98.967.582,70	APBD Kab.	
1	**06**	**06**	**2.01**	02	PenyediaanSandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang TersediapadaMasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa 9 Kecamatan	100	113.688.285,76	APBD Kab.	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan PemberdayaanMasyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	PresentasePemberdayaan Masyarakat Terhadap kesiapsiagaanBencana Kabupaten/ Kota	Persen	76%	**107.702.148,40**		
1	**06**	**06**	**2.02**	002	Koordinasi,Sosialisasidan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, SosialisasidanPelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jiwa Kec.Bahodopi,Kec. BungkuTengah	71	107.702.148,40	APBD Kab.	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAANTAMAN MAKAM PAHLAWAN**	persentase taman makam pahlawanyangterpelihara	Persen	100%	**71.596.030,04**		
1	**06**	**07**	**2.01**		**PemeliharaanTamanMakam PahlawanNasional Kabupaten/Kota**	persentase taman makan pahlawanyangterpelihara	Persen	100%	**71.596.030,04**		

1	**0 6**	**0 7**	**2.01**	**002**	PemeliharaanTamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang TerpenuhiPemeliharannya pada Taman Makam PahlawanKabupaten/Kota	Jumlah Makam	DesaLanonaKec. BungkuTengah	1 TMP	71.596.030,04	APBD Kab.	
										19.306.330.692,60		



Bab 5

PENUTUP

5.1. CatatanPentingDalamPenyusunanRenja

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Morowali Tahun 2024. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidahPelaksanaan

Pelaksanaanpenyusunansertapenetapanprogramdankegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Sosial Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial 2024-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitasdan partisipasi. Sehubungan hal tersebut,ditetapkankaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJADinasSosial tahun 2024, harusdilaksanakansecara konsisten,tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalamprosesperencanaanperluterusditingkatkan,mulaidaritahapan

perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembanguanan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Morowalidan Renstra Dinas).
6. RENJA Dinas Sosial Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. RencanaTindakLanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

RENJA

RENCANA KERJA

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunannnya, Rencana Kerja ini mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan juga mempertimbangkan hasil hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah untuk satu tahun mendatang yaitu tahun 2024, melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk yang akan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali. Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini, semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan Ridho-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali.

Morowali, 16 Maret 2023
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Morowali

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

ASHAR M. MA'RUF, S.E. M.Si
NIP. 19720112 199403 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 0

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I. PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.3.1 Maksud 9

1.3.2 Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2020 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Morowali 125

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 139

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 140

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 173

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 174

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 174

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 175

3.3 Program dan Kegiatan 175

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan 175

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan 178

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 186

BAB V. PENUTUP 325

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen UUD tahun 1945 pasal 28 huruf (H) memandang kesehatan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus merupakan kewajiban semua pihak (individu, masyarakat, dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap warga negara dalam keadaan selalu sehat sehingga mereka dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam rangka pemenuhan hak - hak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan.

Di Kabupaten Morowali, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati Kabupaten Morowali pada Urusan Bidang Kesehatan dan Urusan Pengendalian Penduduk. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada permasalahan di bidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu, bayi, balita, serta gizi buruk. Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan pembangunan kesehatan. Selain itu, semakin berkembangnya pelayanan kesehatan swasta (tradisional dan modern) yang belum terkoordinir melalui

sistem yang baik merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2024, disusunlah Rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi pendukung. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam prosesnya berpedoman pada Renstra dan

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pengkajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya dilakukan perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah adalah pengesahan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Tahun 2024 berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali tahun 2024 merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali juga memuat usulan dari hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program

dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman serta acuan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
6. Peraturan daerah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan daerah Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Daerah Kabupaten Morowali;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Morowali
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Nomor 05 Tahun 2009 (lembar Daerah Daerah Kabupaten Morowali

Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 05)

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Nomor .....Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan (RPD) Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2024) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan pengendalian Penduduk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Morowali
b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan
c. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
d. Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

e. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat
f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2022

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Morowali

Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Morowali meliputi realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan dan realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja sasaran tahun 2022 telah dilakukan dengan hasil bahwa dari 3 (tiga) indikator Sasaran 2 (dua) indikator telah mencapai target sementara 1 (satu) indikator belum mencapai target. Adapun hasil pengukuran kinerja indikator sasaran diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIANN 2022	KRITERIA PENILAIAN
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	100	100	100	Tinggi
2	Meningkatnya Rata	Usia Harapan hidup	69	69	100	Tinggi

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIANN 2022	KRITERIA PENILAIAN
	–Rata Harapan Hidup					
3	Menurunnya Angka kelahiran	Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2.1	1	100	Tinggi

Pengukuran kinerja pada program tahun 2022 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar sasaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan, Hasil pengukuran kinerja indikator program diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	TARGET RPJMD	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	Memenuhi Target
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	205/100.000 LH	308/100.000 LH	214/100.000 LH	214	Tidak Melebihi Target
	Angka Kematian Bayi	18,6/1000 LH	16/1000 LH	17,7/1000 LH	17,7	Tidak Melebihi Target
	Angka Kesakitan	39	39	51	51	Tidak Tercapai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter Umum	1 : 18	1 : 18	1 : 36	200	Melebihi Target
	Rasio Dokter Gigi	1 : 4	1 : 4	1 : 8	200	Melebihi Target
	Rasio Prawat	1 : 238	1 : 238	1 : 341	143	Melebihi

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	TARGET RPJMD	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
						Target
	Rasio Bidan	1 : 163	1 : 163	1 : 340	250	Melebihi Target
	Rasio Farmasi	1 : 30	1 : 30	1 : 67	223	Melebihi Target
	Rasio Kesehatan Masyarakat	1 : 45	1 : 45	1 : 69	153	Melebihi Target
	Rasio kesehatan Lingkungan	1 : 17	1 : 17	1 : 26	152	Melebihi Target
	Rasio Gizi	1 : 10	1 : 10	1 : 25	250	Melebihi Target
	Rasio tenaga Ahli Laboratorium	1 : 10	1 : 10	1 : 33	330	Melebihi Target
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat & BMHP	100	100	100	100	Mencapai Target
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Keluarga sehat	>0.8	>0.8	0.42	0.42	Tidak Tercapai
Program Pengendalian Penduduk	Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2.6	2.1	1	1	Mencapai Target
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran pada Remaja	100	100	100	100	Mencapai Target

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	TARGET RPJMD	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
	Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)					
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	100	100	100	100	Mencapai Target
Rata-rata Capaian Indikator					143,6	Sangat Tinggi

Rata- Rata capaian Indikator Kinerja Program sebesar 147% dengan predikat Sangat Tinggi, dari 18 indikator kinerja terdapat 14 (empat) indikator telah mencapai dan melebihi target dan masih terdapat 4 (empat) indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Kinerja **sasaran, Program** yang belum mencapai target **(<100%)** diantaranya :
   a. Indikator sasaran :
      ✓ Usia Harapan hidup
   b. Indikator Program :
      ✓ Angka Kesakitan
2. Realisasi Indikator Kinerja **Sasaran, Program** yang telah memenuhi target sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja diantaranya :
   a. Indikator sasaran :
      ✓ Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah
      ✓ Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)
   b. Indikator Program :
      ✓ Angka Kematian Ibu (AKI)
      ✓ Angka Kematian Bayi
      ✓ Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran
      ✓ Persentase Ketersediaan Obat & BMHP
      ✓ Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)
      ✓ Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)
      ✓ Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
3. Realisasi Indikator Kinerja, **sasaran, program** yang melebihi target sebanyak 9 (Sembilan) indikator kinerja yang terdiri dari :
   a. Indikator sasaran :
      ✓
   b. Indikator Program :

- ✓ Rasio Ahli tenaga Lab
- ✓ Rasio Dokter Gigi
- ✓ Rasio Perawat
- ✓ Rasio Bidan
- ✓ Rasio Farmasi
- ✓ Rasio Kesehatan Masyarakat
- ✓ Rasio Kesehatan Lingkungan
- ✓ Rasio Gizi
- ✓ Rasio Tenaga Ahli

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Indikator kinerja :
    1. Indikator Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah telah mencapai target dipengaruhi oleh reformasi birokrasi yang mulai diimplementasikan di pemerintahan Kabupaten Morowali sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
    2. Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah di Kabupaten Morowali disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kematian neonatus (bayi) masih cukup tinggi (34 kematian bayi), kematian yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular (189 Kematian) cukup tinggi, rendahnya cakupan skrining kesehatan bagi lansia dan akses pelayanan kesehatan yang belum maksimal di beberapa daerah sulit (wilayah kepulauan)
    3. Tingkat Penurunan Angka Kelahiran (TFR) mencapai target dapat dipengaruhi oleh cakupan keluarga ber KB sudah meningkat.
    4. Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran telah memenuhi target disebabkan oleh adanya dukungan pembiayaan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran yang telah direncanakan.

5. Angka Kematian Ibu (AKI) tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya status kesehatan ibu, cakupan pelayanan ANC yang rendah di masa kehamilan, keterlambatan pertolongan persalinan karena akses ke faskes yang sulit dan sosial budaya di wilayah tertentu.
6. Angka Kematian Bayi (AKB) tidak mencapai target karena disebabkan oleh faktor dari ibu, seperti komplikasi pada saat kehamilan/persalinan, usia, cakupan ANC, pendidikan ibu, paritas, status gizi ibu, penolong persalinan dan penyakit infeksi.
7. Angka Kesakitan tidak mencapai target disebabkan oleh masih rendahnya cakupan PHBS rumah tangga/keluarga.
8. Rasio Dokter Umum melebihi target karena adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan namun perlu pemetaan kembali kebutuhan tenaga kesehatan per wilayah/kecamatan sehingga terjadi pemerataan dalam pendistribusian tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan.
9. Rasio Dokter Gigi melebihi target (sda)
10. Rasio Perawat melebihi target (sda)
11. Rasio Bidan melebihi target (sda)
12. Rasio Farmasi melebihi target (sda)
13. Rasio Kesehatan Masyarakat melebihi target (sda)
14. Rasio Kesehatan Lingkungan melebihi target (sda)
15. Rasio Gizi melebihi target (sda)
16. Rasio Tenaga Ahli Laboratorium Medis melebihi target (sda)
17. Persentase ketersedian obat dan BMHP mencapai target karena adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah dan pusat dalam pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP.
18. Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) tidak mencapai target disebabkan oleh masih banyak keluarga yang masuk dalam kategori tidak sehat

karena tidak memenuhi 12 indikator yang menjadi tolak ukur keluarga sehat.

19. Angka kelahiran pada remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) mencapai target disebabkan oleh capaian TFR juga meningkat yang menggambarkan bahwa program KB cukup berhasil di Kabupaten Morowali
20. Persentase pendapatan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) mencapai target karena masyarakat mulai menyadari pentingnya membangun keluarga sejahtera sehingga mau terlibat dan perpartisipasi dalam program program UPPKS yang efektif membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian proram Renstra Perangkat Daerah:
   - ✓ Meski masih ada masalah dalam pencapai target tersebut ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah rasionalisasi anggaran, sumberdaya manusia, dan distribusi pelayanan.
   - ✓ Tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan bahwa masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Morowali .
   - ✓ Rendahnya Indeks keluarga sehat (IKS) dan angka kesakitan yang masih tinggi hal ini dapat dilihat dari rendahnya indikator prilaku hidup bersih dan sehat yang mana hal ini bisa berdampak terhadap terhadap menurunnya usia harapan hidup dan kualitas sumber daya manusia .
   - ✓ Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) mencapai target disebabkan oleh capaian TFR juga meningkat hal ini menggambarkan bahwa cakupan KB cukup berhasil dan ini bisa berdampak bisa menekan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Morowali.
   - ✓ Meskipun ratio petugas sudah melebihi target akan tetapi dalam pendistribusian belum merata hal ini dapat tergambar dari adanya beberapa puskesmas yang masih kekurangan tenaga tetapi juga ada

beberapa puskesmas yang sudah kelebihan tenaga. Hal ini bisa berdampak terhadap mutu pelayanan kesehatan dimasyarakat.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab :
   - ✓ Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, pemegang program sampai dengan staf Dinas Kesehatan sampai ketingkat Puskesmas
   - ✓ Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor
   - ✓ Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di Kabupaten/Kota sampai ke Puskesmas
   - ✓ Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah
   - ✓ Pertemuan monitoring dan evaluasi program secara rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di lapangan.
   - ✓ Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan program

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN PP & KB KABUPATEN MOROWALI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				URUSAN KESEHATAN									
				BIDANG URUSAN KESEHATAN									
				Program : Penunjang Urusan	**Persentase Pemenuhan**	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pemerintah Daerah	**Administrasi Perkantoran**								
				Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun**	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Peresentase Pelaksanaan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja								
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peresentase Pemenuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Evaluasi Perangkat daerah yang tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan : Administrasi Keuangan	**Presentase Dokumen Keuangan yang tersusundan kegiatan yang**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					terlaksana								
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Keuangan									
				- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyusunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kegiatan rutin yang terlaksana								
				- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan : Administrasi Umum	**Presentase kegiatan Rutinyang**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					terlaksana								
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Presentase kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rutinyang terlaksana								
				- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyediaan Jasa Kebersihan	Presentase kegiatan Rutinyang	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kantor	terlaksana								
				- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	1 00	1 00	100	100	100	100	100	100
				- Pengadaan Kendaraan	Presentase kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Dinas/Operasional	Rutinyang terlaksana								
				- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Pengadaan Mebeleur	Presentase kegiatan Rutinyang	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					terlaksana								
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Presentase kegiatan Rutinyang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Presentase kegiatan Rutin yang terlaksana**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Formal	Perentase Ketersediaan Mesin/Kartu Absensi di OPD dan Jaringannya	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
				- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				undangan									
				Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Angka Kematian Bayi (AKB)**	**>12**		20,6	13,45	65,29	19,5	13,47	69,07
					Angka Kematian Ibu (AKI)	**>308**		230	65,6	28,5	217	378	174,6
					Angka Kesakitan	**50**							
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	**Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang**	**100**							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	**memberikan pelayanan sesuai standar**								
				- Pembangunan Puskesmas	jumlah puskesmas sesuai standar	4		0	0	0	1	1	1
				- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	2		0	0	0	0	0	0

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang di bangun	4		4	4	4	7	7	7
				- Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di kembangkan	2		0	0	0	1	1	1
				- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pengembangan Fasilitas Kesehatan	1		0	0	0	0	0	0

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					Lainnya								
				- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di Rehabilitasi dan di pelihara	3		0	0	0	1	1	1
				- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5		2	2	2	1	1	1

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	15		3	3	3	2	2	2
				- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Alat Kesehatan di faskes yang layak kalibrasi	100		100	100	100	100	0	0
				- Pengadaan Obat,	Pesentase	100		100	100	100	100	75	75

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Vaksin	Ketersediaan Obat, Vaksin								
				- Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pesentase Ketersediaan BHP	100		100	100	100	100	75	75
				- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	sarana pelayanan kesehatan yang bermutu	100		100	100	100	100	75	75
				- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung	prasarana pelayanan kesehatan yang	100		100	100	100	100	75	75

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan	terpelihara dan bermutu								
				- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Alat Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	100		100	100	100	100	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	100		100	94%	94	100	74%	74

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				jaringannya	kesehatan ibu hamil								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100		100	100%	100	100	93%	93
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	100		100	100	100	100	92%	92

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					kesehatan bayi baru lahir								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100		100	72%	72	100	64%	64
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	100		100	71 %	71	100	35 %	35

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					kesehatan sesuai standar								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia Produktif (15–59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		73,005	77,951	93,7 %	55.445	79.796	69,48 %
				- Pengelolaan Pelayanan	Persentase warga usia ≥60 tahun	100		8.184	9.706	84,3 %	6.686	10.774	62,1 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan pada Usia Lanjut	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		10.688	28.711	43,2 %	10.688	28.711	37,22 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		3.137	7.452	42,1 %	2.524	7.658	32,78 %
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100		259	259	100 %	216	262	82,4 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Jiwa Berat	kesehatan jiwa sesuai standar								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	100		100	83,7	83,7	100	78,3	78,3
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan	100		100	99,4	99,4	100	90,9	90,9

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Terinfeksi HIV	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa	100		259	259	100 %	216	262	82,4 %
				- Pengelolaan Pelayanan	Persentase Pelayanan Krisis	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Kesehatan								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI	100		85	11,3	13,3	85	9,6	11,3

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin								
					Prevalensi stunting	100		24,1	7,8	32,4	21,1	5,2	24,6
					Prevalensi wasting	100		8,1	4,1	50,6	7,8	2,1	26,9
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olah	100		60%	22%	36,7%	60%	52%	86,7%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					Raga	100		60%	33%	55%	60%	60%	100%
					Persentase Puskesmas yang melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)								
					Jumlah Jamaah Haji yang diukur kebugarannya								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100							
					Persentase Penduduk dengan akses air minum yang layak	100		100	85,4	85,4	100	84,71	84,71%
					Persentase KK dengan akses	100		100	79	79	100		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					sanitasi layak								
					Persentase Desa Yang mendukung penyelenggaraan STBM	100		100	48,1	100	100	48,8	100
				- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu berstrata Purnama dan Mandiri	100		97	96		105	114	
				- Pengelolaan Pelayanan	Persentase Puskesmas yang	100		9	7	77 %	10	8	80 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	memberikan pelayanan Kesehatan tradisional								
				- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan	100		60 %	28,3 %	47,2 %	65 %	36,5 %	36,2 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				dan Tidak Menular	Penderita Pneumonia Pada Balita								
					Persentase Cakupan Penanganan Kasus Diare	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					Penderita DBD								
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan deteksi dini Hepatitis B sesuai standar	100		60 %	108 %		65 %	73,2 %	
					(Annual ParaCite Indeks - API) Malaria Per 1000 Penduduk	<1		1/1000	0,08/1000	8 %	1/1000	0,02/1000	2 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					Cakupan Pelayanan Orang dengan Gigitan Hewan Penyebab Rabies (GHPR) sesuai Standar	100		100	100	100	100	100	100
					Prevalensi Penderita Kusta	< 1/1000		< 1/1000	0,87/10.000	100	<1/10.000	0,96	100
					Prevalensi Kecacingan pada Anak Usia 1 - 12	<10 %		-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					Tahun								
					Persentase Wanita Usia 30-50 Thn yang dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	80		708	1.753	40,4 %	2.295	2.295	80 %
				- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	100		95	95	95	95	95	95
				- Pengelolaan Upaya Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan Khusus	100							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Khusus	yang mendapat pelayanan								
				- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Masyarakat Berisiko	100							
				- Pengelolaan Jaminan	Persentase penduduk miskin	80		46.391 Jiwa	30.110 Jiwa	65 %	45.203 Jiwa	33.115 Jiwa	73 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan Masyarakat	yang memiliki jaminan Kesehatan								
				- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100		100	100	100	100	100	100
				- Penyelenggaraan	Cakupan	10							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kabupaten/Kota Sehat	Kecamatan/kawasan yang menyelenggrakan Kecamatan/kawasan Sehat								
				- Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas memiliki biaya Operasional	100		9	9	100 %	9	9	100 %
				- Operasional Pelayanan	Cakupan Pemenuhan	100		0	0	0	0	0	0

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Faskes Lainnya								
				- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	100		9	9	100 %	9	9	100 %
				- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Angka Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/Pemberi	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	an Obat								
				- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Respon Dini Wabah	100		100	100	100	100	100	100
				Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi	**Persentase Ketersediaan Data dan terintegrasi**	100							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan secara Terintegrasi									
				- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Data	100							
				- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Data	100							
				- Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi	Cakupan Ketersediaan Data	100							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan dan Jaringan Internet									
				Kegiatan : Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Izin**	100							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah RS yang direview Perizinan	100		2	2	100 %	2	2	90 %
				- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar yang BLUD	1		1	1	100 %	1	1	100 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota									
				- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pembinaan secara Terpadu	100		9	99	100 %	11	10	90 %
				Program : Peningkatan	**Rasio Tenaga Dokter**	1 : 18		36,5	36,5	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Rasio Tenaga Dokter Gigi**	1 : 4		8,1	8,1	100	100	100	100
					Rasio Tenaga Bidan	1 : 238		341,1	341,2	100	100	100	100
					Rasio Tenaga Perawat	1 : 163		340,4	340,4	100	100	100	100
					Rasio Tenaga Farmasi	1 : 30		67,2	67,2	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					Rasio Tenaga Kesmas	1 : 45		68,9	100	100	100	100	100
					Rasio Tenaga Kesling	1 : 17		25,1	25,1	100	100	100	100
					Rasio Tenaga Gizi	1 : 10		25,1	25,1	100	100	100	100
					Rasio Tenaga Lab. Medik	1 : 10		33,2	33,2	100	100	100	100
				Kegiatan : Pemberian Izin	**Persentase Tenaga Kesehatan**	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	**yang memiliki izin prakter**								
				- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memenuhi syarat kepemilikan SIP	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan : Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin prakter**								
				- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	Presentase SDMK Yang Melaksanakan Tugas Sesuai	80		80	80	80	80	80	80

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesehatan	Standar								
				- Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun	100		100	100	100	100	100	100
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	**Cakupan Tenaga Kesehatan di Fasyankes**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota									
				- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Tenaga Kesehatan di Fasyankes**								
				- Peningkatan Kompetensi dan	Cakupan Nakes Tersertifikasi	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
				- Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Cakupan Nakes Tersertifikasi	100		100	100	100	100	100	100
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin prakter**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
				- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase SDMK Yang Melaksanakan Tugas Sesuai Standar	100		100	100	100	100	100	100
				- Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya	Cakupan Ketersedian Data Informasi Tenaga	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Manusia Kesehatan	Kesehatan								
				Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	**Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar**	100		100	100	100	100	100	100
				Kegiatan :	**Presentase**	100		100	100	100	100	80 %	80 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar**								
				- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan	100		63	63	100	73	86	118 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	TTU Mamin yang memenuhi Standar								
				Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi	**Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri**	100		26	22	84,62 %	36	29	80,56 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga informasi	**Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit									
				- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	100		26	22	84,12	36	29	80,56 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Pesentase TPM yang di periksa dan memenuhi Syarat**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)									
				- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Jumlah TPM yang memiliki Sertifikat Laik Higiene	80		100	20	100	100	-	-
					Persentase TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat			100	88	100	100	87,50	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
				Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada	**Persentase Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**dan Sentra Makanan Jajanan**								
				- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	Persentase Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75		100	75,49	100	100	90,80	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Jajanan									
				Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Cakupan Produk Mamin Memenuhi Standar**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan Produk Mamin Memenuhi Standar								
				- Penyediaan dan	Cakupan								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Ketersediaan Data Izin Industri Rumah Tangga								
				Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Indeks Keluarga sehat**								
				Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan,	**jumlah kebijakan berwawasan**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**kesehatan**								
				- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	cakupan tema pesan komunikasi informasi edukasi dalam gerakan masyrakat hidup	7		7	-	8	-	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pemberdayaan Masyarakat	sehat								
				Kegiatan : Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Presentase Kesadaran Masyarakat Terhadap Pola Hidup Sehat (PHBS)**								
				- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	Presentase Kesadaran Masyarakat	72		71,59	50,48	100	81,06		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terhadap Pola Hidup Sehat (PHBS)								
				Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase UKBM aktif**								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM Aktif	100		97	96	100	105	114	100
				Program :Pengendalian Penduduk	**Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)**	2.1							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Penurunan angka kelahiran total (TFR)**	2.1		2.1	2,27	2,40			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terselenggaranya program KKBPK	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				(Program KKBPK)									
				- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Grand Desain	1		1					
				- Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan	Jumlah Pendataan	1		1					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan									
				- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Persentase Jumlah Sekolah yang telah melaksanakan Pendidikan Kependudukan	100		100					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Persentase Masyarakat yang telah Mengetahui tentang Kependudukan	70		70					
				- Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	100		100					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Kepadatan Penduduk**	22.5		22,5	22,5				
				- Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB	Persentase Rumah Data yang terdapat di Kampung KB	80		26	15	57,69			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.									
				- Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	100		100	100	100			
				- Penyediaan Data dan Informasi	Persentase hasil Data informasi	100		100	100	100			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Keluarga	keluarga								
				- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Hasil Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100		100	100	100			
				Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)**	1		1	58				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Presentase Komitmen atau kesepakatan yang dibuat**	100		100					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Cakupan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	100		100					
				- Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Presentase Kegiatan Rutin Yang dilakukan	100		1 kali	100	100	-	-	-
				- Pengelolaan Operasional dan	Cakupan Pemenuhan	100		100	100	100	-	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Operasional Balai Penyuluh KKBPK								
				Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/	**Cakupan Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelayanan KB**	100		100					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kota									
				- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Tenaga Pengelola dan petugas Logistik Alat dan Obat kontrasepsi	100						1 kali	-
				- Peningkatan Kesertaan	Persentase Peserta KB MKJP	100		100	100	100	-	1080	84,16

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
				- Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan	Presentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100		-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Sarana Penunjang Pelayanan KB									
				- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	Presentase Pembinaan KB/KR di Faskes dan Jaringannya	100		-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Jaringan dan Jejaringannya									
				- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Nakes Yang Tersertifikasi	100						1 kali	-
				- Dukungan Operasional	Cakupan Operasional KB	100		18.700	-	-		18.700,00	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pelayanan KB Bergerak	Bergerak								
				Kegiatan : Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelayanan Dan Pembinaan	**Jumlah Kampung KB yang Terbentuk**	26		26	26				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kesertaan Ber – Kb									
				- Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Terbentuk	26		26	26	26	26	26	26
				Program : Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan**	100		60			65	55	84,61 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
					keluarga sejahtera (UPPKS)								
				- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Keluarga Yang mempunyai Balita, Remaja, dan Lansia yang sudah membentuk Kelompok	60 BKB 1.130 BKR 1.130 BKL 1.130		200 200 200			220 220 220	103 67 76	46,81 % 30,45 % 34,54 %
				- Pembentukan Kelompok	Presentase Keluarga Yang	60 PIK-R 1.130 UPPKS 1.130		200			220	21	9,54 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja	mempunyai Balita, Remaja, dan Lansia yang sudah membentuk Kelompok	BKB 1.130 BKR 1.130 BKL 1.130		200 200 200 200			220 220 220 220	55 103 67 76	25 % 46,81 % 30,45 % 34,54 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				(PIK-R), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)									
				- Pengadaan Sarana Kelompok	Presentase Kelompok Tribina	60 1.130		BKB=200	49	24,5 %	220	BKB KIT =10	4,54 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(BKB, BKR, BKL) PIK-R dan UPPKS yang sudah mempunyai alat peraga (BKB KIT, BKR KIT, BKL KIT, GenRe KIT dan Alat Penunjang Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG)			BKR=200 BKL=200 PIK-R=200 UPPKS=200	0 21 0 0	0 10,5 % 0 0		Gendre Kit=10 (PIK_R)	4,54 %
				- Orientasi dan	Cakupan	70		BKB = 3 0rg BKR = 3 org	0		BKB = 3 0rg	2 orang	66,67 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pengelola yang sudah mengikuti pelatihan teknis BKB, BKR, BKL, PIKR, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)			BKL = 3 org PIK-R =3 org UPPKS = 3 org	0 0 0 0		BKR = 3 org BKL = 3 org PIK-R =3 org UPPKS = 3 org	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	33,33 % 33,33 % 33,33 % 33,33 %
				- Orientasi dan	Cakupan	70		BKB =25	6	24 %	BKB = 300rg		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pelaksana/Kader yang sudah mengikuti pelatihan teknis BKB, BKR, BKL, PIKR, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)			BKR = 25 BKL = 25 PIK-R = 25 UPPKS =25	6 5 0 2	24 % 24 % 24 % 24 %	BKR = 30 org BKL = 30 org PIK-R =30org UPPKS = 30 org	0 org	0 %
				- Penyediaan Biaya	Cakupan	100		0	0	0	0	0	0

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terlaksananya Dukungan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) BKB, BKR, BKL, PIKR, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				- Advokasi dan Promosi IPK	Cakupan Kelompok Keluarga yang sudah menerapkan 8 fungsi Keluarga	100		45			50	26	52 %
				Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	**Cakupan Kelompok Keluarga yang sudah menerapkan 8**	100							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**fungsi Keluarga**								
				- Promosi dan Sosialisasi	Cakupan Kelompok	100		45			50 Kelompo	26 Kelompok	52 %

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denagn tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
				Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Keluarga yang sudah menerapkan 8 fungsi keluarga dan mengikuti pelatihan dr instansi terkait						k		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Morowali

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Morowali dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Indikator Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah telah mencapai target dipengaruhi oleh reformasi birokrasi yang mulai diimplementasikan di pemerintahan Kabupaten Morowali sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

2. Usia Harapan Hidup

a. Meningkatnya Rata-rata Usia Harapan Hidup

Perhitungan umur harapan hidup Dinas Kesehatan masih mempedomani hasil dari Badan Statistik (BPS), UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya Umur Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (**Age Specific Death Rate/ASDR**) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian dalam periode tahunan.

Dalam evaluasi kinerja tahun 2021 target UHH Kabupaten Morowali sebesar 69,00 tahun, dengan realisasi yang dicapai sebesar 69,00 tahun, maka persentase tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori mencapai target. Pada tahun 2020 Umur Harapan Hidup penduduk Morowali rata-rata 69,00 tahun dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup penduduk Indonesia rata-rata 71,34 tahun, rata-rata umur harapan hidup masyarakat morowali lebih rendah 2,34 tahun dari Umur Harapan Hidup Nasional. dapat disimpulkan bahwa rata-rata Umur Harapan Hidup masyarakat morowali mengalami kenaikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

3. Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)

Tingkat Penurunan Angka Kelahiran (TFR) mencapai target dapat dipengaruhi oleh cakupan keluarga ber KB sudah meningkat, Karena di dukung dengan ketersediaan sumber daya untuk pelayanan keluarga berencana dan capaian indikator sub kegiatan yang mencapai target sehingga capaian TFR dapat memenuhi target.

4. Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran Target RPJMD 100% dan telah mencapai target kinerja dengan Capaian kinerja 100% kegiatan dilakukan meliputi :

1. Menyusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan (RENJA, RKA, RPK, RUK, & SAKIP)
2. Menyusun Dokumen Keuangan sebagai bahan laporan kinerja tiap tahunnya (Realisasi Anggaran Tahun Berjalan)

disebabkan oleh adanya dukungan pembiayaan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran yang telah direncanakan

5. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu atau Maternal Mortality Rate adalah jumlah wanita yang meninggal mulai dari saat hamil hingga 6 minggu setelah persalinan per 100.000 persalinan. AKI merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas.

Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam SDG`s yaitu pada tahun 2030, mengurangi AKI hingga kurang dari 70/100.000 KH. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas.

Angka Kematian Ibu (AKI) target RPJMD 308 namun masih terdapat kematian ibu di lihat dari capaian kinerja angka kematian ibu mencapai 93 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya status kesehatan ibu, cakupan pelayanan ANC yang rendah di masa kehamilan, keterlambatan pertolongan persalinan karena akses ke faskes di wilayah sulit dan sosial budaya di wilayah tertentu, Dalam upaya penurunan AKI pemerintah memberikan dukungan anggaran yang cukup besar.

kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Kegiatan Pelayanan ANC terstandar
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pemberian TTD Bumil
4. Konseling
5. Pelayanan KB
6. Pemeriksaan Anemia Bumil

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JLH KEMATIAN IBU
1.	Menui Kepulauan	Ulunambo	0
2.	Bungku Selatan	Kaleroang	1

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JLH KEMATIAN IBU
3.	Bungku Pesisir	Lafeu	0
4.	Bahodopi	Bahodopi	0
5.	Bungku Timur	Bahomotefe	0
6.	Bungku Tengah	Bungku	1
7.	Bungku Barat	Wosu	0
8.	Bumi Raya	Bahonsuai	0
9.	Wita Ponda	Laantula Jaya	0
Kabupaten			2

Sumber :Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kab. Morowali 2020

6. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate adalah jumlah kematian penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (0-11) bulan yang dinyatakan dalam 1.000 KH pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Angka Kematian Bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB disuatu wilayah tertinggi artinya bahwa status kesehatan diwilayah tersebut sangat rendah.

Angka Kematian Bayi (AKB) Target RPJMD 16 namun masih ada kasus kematian bayi dilihat dari capaian kinerja angka kematian bayi yang mencapai 14 karena disebabkan oleh faktor dari ibu, seperti komplikasi pada saat kehamilan/persalinan, usia, cakupan ANC, pendidikan ibu, paritas, status gizi ibu, penolong persalinan dan penyakit infeksi. Dalam rangka menurunan AKB di kabupaten Morowali Pemerintah Memberikan dukungan anggaran terhadap program dan kegiatan yang terkait dengan Upaya Penurunan AKB.

kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir
2. Pemberian Vitamin A
3. kunjungan neonatus 6 - 48 jam
4. kunjungan 8 - 28 hari
5. Pelayanan neonatus komplikasi
6. pelayanan neonatal esensial

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JLH KEMATIAN NEONATAL	JLH KEMATIAN BAYI
1.	Menui Kepulauan	Ulunambo	0	0
2.	Bungku Selatan	Kaleroang	3	0
3.	Bungku Pesisir	Lafeu	5	2
4.	Bahodopi	Bahodopi	10	3
5.	Bungku Timur	Bahomotefe	5	1
6.	Bungku Tengah	Bungku	8	1
7.	Bungku Barat	Wosu	0	0
8.	Bumi Raya	Bahonsuai	2	1
9.	Wita Ponda	Laantula Jaya	0	0
Kabupaten			33	8

Sumber :Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kab. Morowali 2020

7. Angka Kesakitan (Morbiditas)

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu dan dapat dijadikan suatu penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Angka Kesakitan tidak mencapai target disebabkan oleh masih rendahnya cakupan PHBS rumah tangga/keluarga dan distribusi tenaga Kesehatan yang belum merata di beberapa wilayah kerja puskesmas, hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri masih rendah.

8. Rasio Tenaga Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya.

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem kesehatan nasional yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Upaya dan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral tinggi, keahlian, dan berwenang. Menurut Undang–undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam 12 jenis tenaga yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya.

Tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung oleh SDM yang berkualitas disamping ketersediaan sumber daya yang lain. Hal yang penting diperhatikan dalam

pengadaan SDM adalah jumlah, jenis, distribusi tenaga kesehatan dan rationya terhadap jumlah penduduk.

Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, penguatan system informasi Tenaga Kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya. Namun dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai sesuai dengan karateristik dan fungsi tenaganya. Kondisi saat ini pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sudah terpenuhi secara kuantitas hal tersebut dilakukan melalui penganggaran terhadap rekrutmen tenaga kontrak daerah. Adapun Jumlah dan Ratio Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Per 100.000 Penduduk diuraikan sebagai berikut :

Rasio Tenaga Kesehatan telah melebihi Target, hal tersebut dilihat dari pemenuhan tenaga secara kuantitas namun dari pemerataan pedistribusian belum sesuai kebutuhan di setiap wilayah (tidak Merata) dan masih perlunya peningkatan kompetensi terhadap tenaga kesehatan yang sudah ada.

9. Persentase ketersedian obat

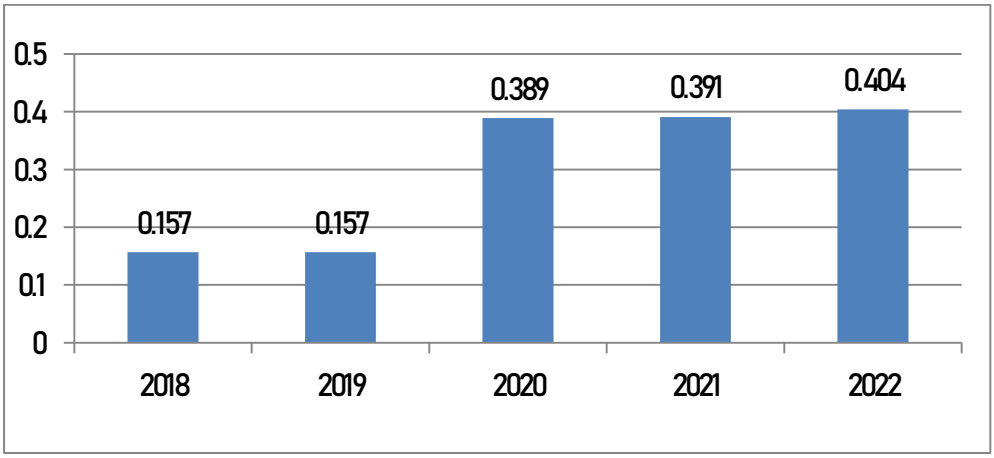
Persentase ketersedian obat mencapai target karena adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah dan pusat dalam pemenuhan kebutuhan obat sesuai dengan rencana kebutuhan obat selama 18 bulan

10. Persentase ketersedian BMHP

Persentase ketersedian obat mencapai target karena adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah dan pusat dalam pemenuhan kebutuhan obat sesuai dengan rencana kebutuhan BMHP selama 18 bulan

11. **Indeks Keluarga Sehat (IKS)**

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) tidak mencapai target disebabkan oleh masih banyak keluarga yang masuk dalam kategori tidak sehat karena tidak memenuhi 12 indikator yang menjadi tolak ukur keluarga sehat. Dimana kriteria keluarga sehat adalah diatas 0.8 namun capaian kinerja kabupaten morowali masih di angka 0.38 dalam kategori tidak sehat hal ini disebabkan integrasi program di lingkup puskesmas dan kabupaten belum optimal.



12. **Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)**

Angka kelahiran pada remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR) mencapai target disebabkan oleh capaian TFR juga meningkat yang menggambarkan bahwa program KB cukup berhasil di Kabupaten Morowali, dilihat dari data Total Fertility Rate (TFR) daerah yang mencapai target pemerintah daerah di angka 2.1 hal ini di sebapkan dukungan sumber daya pemerintah daerah dan pusat terhadap program pelayanan keluarga berencana

13. **Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha**

a. **Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)**

Persentase pendapatan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) mencapai target dilihat dari capaian kinerja mencapai 100% karena masyarakat

mulai menyadari pentingnya membangun keluarga sejahtera sehingga mau terlibat dan perpartisipasi dalam program program UPPKS yang efektif membantu meningkatkan pendapatan keluarga

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
	Sasaran 1 : Indeks Reformasi Birokrasi											
	Indikator Sasaran Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sasaran 2. Meningkatnya Rata –Rata Harapan Hidup											
	Indikator Sasaran Usia Harapan hidup		√	69	69	70	70	69	69	70	70	
	Sasaran 3 Menurunnya Angka											

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2020	**TAHUN 2022**	**TAHUN 2024**	**TAHUN 2024**	**TAHUN 2020**	**TAHUN 2022**	**TAHUN 2024**	**TAHUN 2024**	
	kelahiran											
	Indikator Sasaran : Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator Program : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		√	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
	Indikator Program : Angka Kematian Ibu	√	√	0	0	0	0	315		0	0	
	Indikator program : Angka Kematian Bayi	√	√	0	0	0	0			0	0	
	Indikator Program Angka Kesakitan	√	√	39	39	39	39			39	39	
	Indikator program : Rasio Dokter		√	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 18			1 : 18	1 : 18	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
	Indikator program : Rasio Dokter Giigi		√	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8			1 : 8	1 : 8	
	Indikator program : Rasio Perawat		√	1 : 238	1 : 238	1 : 238	1 : 238			1 : 238	1 : 238	
	Indikator program : Rasio Bidan		√	1 : 163	1 : 163	1 : 163	1 : 163			1 : 163	1 : 163	
	Indikator program : Rasio Parmasi		√	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30			1 : 30	1 : 30	
	Indikator program : Rasio Kesehatan Masyarakat		√	1 : 45	1 : 45	1 : 45	1 : 45			1 : 45	1 : 45	
	Indikator program : Rasio Kesehatan Lingkungan		√	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17			1 : 17	1 : 17	
	Indikator program : Rasio Tenaga Gizi		√	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10			1 : 10	1 : 10	
	Indikator program : Rasio		√	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10			1 : 10	1 : 10	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
	Tenaga Ahli Laboratorium											
	Indikator program : Persentase Ketresediaan Obat dan BMHP		√	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
	Indikator program : Indeks Keluarga Sehat		√	>0,8	>0,8	>0,8	>0,8			>0,8	>0,8	
	Indikator program : Tingkat Penurunan TFR (Total Fertily Rate)		√	2,1	2,1	2,1	2,1			2,1	2,1	
	Indikator program : Angka Kelahiran Pada Remaja usia (15-19) Tahun (ASFR)		√	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
	Indikator program : Persentase pendapatan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan		√	100%	100%	100%	100%			100%	100%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
	keluarga sejahtera (UPPKS)											

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Morowali tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dari evaluasi kinerja Dinas kesehatan PPKB dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan cukup berhasil karena dari 3 indikator kinerja sasaran dan 18 indikator 147% sudah dapat mencapai target yang telah ditentukan bahkan ada yang melebihi target. Hal kritis/permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas kesehatan PPKB antara lain adalah :

1. Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita
2. Masih ada balita gizi buruk, kurang dan stunting
3. Masih adanya peningkatan penyakit menular dan tidak menular

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus masih dihadapi, diantaranya adalah:

1. Sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
2. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktorfaktor ini dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyumbang angka kematian ibu melahirkan maupun jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Morowali
3. Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.
4. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal
5. Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif.
6. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah

usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.

7. Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.
8. Sistem Informasi Kesehatan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

1. Mengupayakan tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Melaksanakan percepatan dalam mencapai target SDG's dan SPM Kesehatan yang belum sepenuhnya tercapai
3. Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan desa/kelurahan siaga aktif dan cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat
4. Mengoptimalkan sistem informasi dan manajemen pencatatan dan pelaporan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam P-RPD tahun 2024-2026 dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan berubah dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur kegiatan yang disesuaikan berdasarkan Kepmendagri 050 tahun 2020 secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
01:01	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**55,845,097,318**				**55,845,097,318**	
01:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**55,845,097,318**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**55,845,097,318**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**354,288,300**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**354,288,300**	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	50,000,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	50,000,000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	304,288,300	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	304,288,300	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**54,084,139,708**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**54,084,139,708**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	736	38,987,179,708	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	736	38,987,179,708	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	451	15,096,960,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	451	15,096,960,000	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**100,000,000**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**100,000,000**	
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKP	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100,000,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100,000,000	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**200,000,000**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**200,000,000**	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		200,000,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		200,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Pendidikan dan Pelatihan				Pendidikan dan Pelatihan			
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**455,389,470**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**455,389,470**	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		52,804,930	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		52,804,930	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5,108,340	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5,108,340	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30,000,200	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		30,000,200	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		367,476,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		367,476,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**223,444,840**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**223,444,840**	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,000,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,000,000	
1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		123,444,840	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		123,444,840	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**123,795,000**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**123,795,000**	
01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan, PP & KB			4,995,000	Dinas Kesehatan, PP & KB			4,995,000	
01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan, PP & KB			118,800,000	Dinas Kesehatan, PP & KB			118,800,000	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**50,000,000**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**50,000,000**	
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		50,000,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		50,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.01.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase Faskes yang melaksanakan pelayanan BLUD**	**36**	**254,040,000**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase Faskes yang melaksanakan pelayanan BLUD**	**36**	**254,040,000**	
1.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8	254,040,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8	254,040,000	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**77,648,619,195**				**98,622,701,369**	
01:02:02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kab. Morowali**	**1 Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup**	**183**	**74,336,119,195**	**Kab. Morowali**	**1 Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup**	**183**	**95,310,201,369**	
			2. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	**15.7**			**2. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup**	**15.7**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			3 Prevalensi Stunting	14			3 Prevalensi Stunting	14		
			4. Prevalensi Wasting	1.6			4. Prevalensi Wasting	1.6		
			5. Angka Kesakitan	35			5. Angka Kesakitan	35		
'1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Kab. Morowali**	**Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar**	**100**	**30,042,815,826**	**Kab. Morowali**	**Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar**	**100**	**48,726,898,000**	
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	**0,52**			**Indeks Keluarga Sehat (IKS)**	**0,52**		
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Morowali	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan	1	4,695,711,700	Kab. Morowali	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah	1	20,000,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Kab. Morowali	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	2,500,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	4,000,000,000	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Morowali	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	1,000,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	1,000,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1,800,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1,800,000,000	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4	4,000,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4	6,000,000,000	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	1,800,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	1,800,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8	3,020,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8	3,020,000,000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	494	2,006,546,126	Kab. Morowali	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	494	2,000,000,000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Morowali	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	4,148,993,300	Kab. Morowali	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	4,148,993,300	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Morowali	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	4,526,654,700	Kab. Morowali	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	4,526,654,700	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1	50,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1	50,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	928	381,250,000	Kab. Morowali	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	928	381,250,000	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	113,660,000	Kab. Morowali	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	113,660,000	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai**	**100**	**44,223,303,369**	**Kab. Morowali**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai**	**100**	**46,513,303,369**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Standar				Standar			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Morowali	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3961	1,000,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3961	2,000,000,000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Morowali	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang	3782	500,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang	3782	1,000,000,000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Morowali	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3601	500,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3601	500,000,000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Morowali	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18746	500,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18746	500,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22881	500,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22881	500,000,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Morowali	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115778	150,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115778	150,000,000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Morowali	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10751	250,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10751	250,000,000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Morowali	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18054	100,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18054	100,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Morowali	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3931	100,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3931	100,000,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODJG)	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	358	150,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	358	150,000,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Morowali	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2727	400,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2727	400,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Morowali	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	3870	400,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3870	400,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Standar							
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	210,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	200,000,000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	200,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	200,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	1,000,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	1,000,000,000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	100,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	100,000,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	1,000,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	1,500,000,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	**200,000,000**	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	200,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	**100,000,000**	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	100,000,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	200,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	200,000,000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Morowali	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	78	50,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	78	50,000,000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Morowali	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	50,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	50,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	**200,000,000**	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	200,000,000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	150,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	150,000,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	2,000,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	2,300,000,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	14,991,480,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	14,991,480,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1,000,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1,000,000,000	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1	300,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1	300,000,000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	17,133,550,829	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	17,133,550,829	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	381,528,140	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	381,528,140	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	12	100,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	100,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Obat Massal)							
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	150,000,000	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	150,000,000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Morowali	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	362,638,650	Kab. Morowali	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	362,638,650	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase faskes yang melaksanakan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**36**	**70,000,000**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase faskes yang melaksanakan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**36**	**70,000,000**	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	70,000,000	Dinas Kesehatan, PP & KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	70,000,000	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase Rumah Sakit kelas C dan D yang diterbitkan isinnya**		**-**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase Rumah Sakit kelas C dan D yang diterbitkan isinnya**		**-**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya**		**1,000,000,000**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya**		**1,000,000,000**	
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase Tenaga Yang Memiliki Izin Praktek**		**-**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**Persentase Tenaga Yang Memiliki Izin Praktek**		**-**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**			**-**	**Kab. Morowali**			**-**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**			**1,000,000,000**	**Kab. Morowali**			**1,000,000,000**	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali		100	*1,000,000,000*	Kab. Morowali		100	*1,000,000,000*	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Kab. Morowali**			**997,500,000**	**Kab. Morowali**			**997,500,000**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Kab. Morowali**			**76,000,000**	**Kab. Morowali**			**76,000,000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Morowali		2	**11,000,000**	Kab. Morowali		2	**11,000,000**	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Morowali		125	65,000,000	Kab. Morowali		125	65,000,000	
1.01.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**				**-**				**-**	
1.01.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Kab. Morowali**		**100**	**121,500,000**	**Kab. Morowali**		**100**	**121,500,000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Morowali		38	*121,500,000*	Kab. Morowali		38	*121,500,000*	
1.01.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kab. Morowali**		**90**	**500,000,000**	**Kab. Morowali**		**90**	**500,000,000**	
1.01.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Morowali		1	500,000,000	Kab. Morowali		1	500,000,000	
1.01.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Kab. Morowali**			**150,000,000**	**Kab. Morowali**			**150,000,000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.01.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Morowali			1	150,000,000	Kab. Morowali			1	150,000,000	
1.01.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Kab. Morowali**			**100**	**150,000,000**	**Kab. Morowali**			**100**	**150,000,000**	
1.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Morowali			38	150,000,000	Kab. Morowali			38	150,000,000	
1.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kab. Morowali**			**10**	**1,315,000,000**	**Kab. Morowali**			**10**	**1,315,000,000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.01.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Morowali**			**11**	**800,000,000**	**Kab. Morowali**			**11**	**800,000,000**	
1.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Morowali			6	800,000,000	Kab. Morowali			6	800,000,000	
1.01.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**				**315,000,000**	**Kab. Morowali**				**315,000,000**	
1.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Morowali			9	210,000,000	Kab. Morowali			9	210,000,000	
1.01.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Morowali			20700	105,000,000	Kab. Morowali			20700	105,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.01.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**				**200,000,000**	**Kab. Morowali**				**200,000,000**	
1.01.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Morowali			1	200,000,000	Kab. Morowali			1	200,000,000	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**699,802,217**					**699,802,217**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Kab. Morowali**				**183,002,217**	**Kab. Morowali**				**183,002,217**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Kab. Morowali				183,002,217	Kab. Morowali				183,002,217	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Morowali			5	50,000,000	Kab. Morowali			5	50,000,000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand DesignPembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Morowali			1	70,000,000	Kab. Morowali			1	70,000,000	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab. Morowali			60	10,000,000	Kab. Morowali			60	10,000,000	
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Morowali			9	53,002,217	Kab. Morowali			9	53,002,217	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**				**-**	**Kab. Morowali**				**-**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Kab. Morowali**				**286,800,000**	**Kab. Morowali**				**286,800,000**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kab. Morowali**				**70,000,000**	**Kab. Morowali**				**70,000,000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Morowali			70,000,000	Kab. Morowali			70,000,000	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kab. Morowali**			**5,000,000**	**Kab. Morowali**			**5,000,000**	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Morowali		1	5,000,000	Kab. Morowali		1	5,000,000	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**			**135,340,000**	**Kab. Morowali**			**135,340,000**	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Morowali		12	8,540,000	Kab. Morowali		12	8,540,000	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Morowali		9	56,000,000	Kab. Morowali		9	56,000,000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Morowali		1	70,800,000	Kab. Morowali		1	70,800,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kab. Morowali**			**76,460,000**	**Kab. Morowali**			**76,460,000**	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Morowali		2	31,460,000	Kab. Morowali		2	31,460,000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Morowali		26	45,000,000	Kab. Morowali		26	45,000,000	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kab. Morowali**			**230,000,000**	**Kab. Morowali**			**230,000,000**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Morowali**			**230,000,000**	**Kab. Morowali**			**230,000,000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Morowali		200	70,000,000	Kab. Morowali		200	70,000,000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Morowali		200	70,000,000	Kab. Morowali		200	70,000,000	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Morowali		1	30,000,000	Kab. Morowali		1	30,000,000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Morowali		20	30,000,000	Kab. Morowali		20	30,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Morowali		1	30,000,000	Kab. Morowali		1	30,000,000	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kab. Morowali**			**-**	**Kab. Morowali**			**-**	
TOTAL					**134,193,518,730**				**155,167,600,904**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TABEL 2.4

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1	Rehabilitasi Pustu	Kolono	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Usulan dari Bapak Nurfai
2	Rehabilitasi Pustu	Laroue	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Usulan dari Bapak Samirudin
3	Pembangunan Pagar Pustu	Laroue	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Usulan dari Bapak Samirudin
4	Rehabilitasi Pustu	Bungintende	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Usulan dari Bapak Ardi

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam rancangan teknokratik RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya. Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efekstivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2020 – 2024 diarahkan pada :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.

2. Pelayanan hidup kesehatan menggunakan pendekatan siklus, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 disesuaikan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Morowali dimana pembangunan bidang kesehatan masuk dalam misi RPD sehingga tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan adalah :

3.2.1 Sasaran

- ✓ Meningkatkan pelayanan kesehatan
- ✓ Menurunkan Angka Kelahiran

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

1. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPD Bidang Kesehatan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kabupaten Morowali

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan PPKB harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun Layanan SPM tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN		TARGET 2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	3	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
4	Pelayanan kesehatan Balita	4	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	6	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 - 59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
7	Pelayanan pada usia lanjut	7	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	8	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai Standar	100

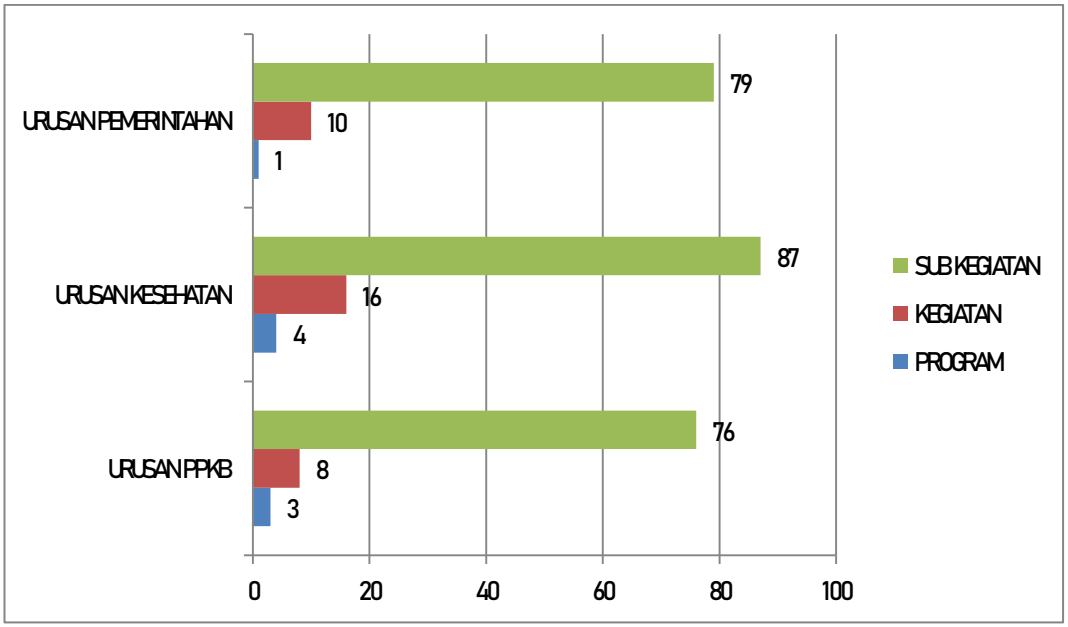
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	9	Setiap Penderita Deabetes melitus mendapatakan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	100
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10	Setiap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	11	Setiap Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs sesuai standar	100

3. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Morowali Dinas kesehatan melalui program jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan telah menjamin penduduk miskin di Kabupaten Morowali mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis
4. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat
5. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan melalui Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama" dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2024 dirumuskan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah disusun berdasarkan Kepmendagri 050 tahun 2020 Program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja 2024 sebanyak 8 (delapan) Program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Dari 8 Program yang dibagi kedalam 3 (tiga) bagian urusan diantaranya 1) Urusan Pemerintahan 2) Urusan Bidang Kesehatan 3) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

GRAFIK PEMBAGIAN URUSAN BIDANG DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN PPKB KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024



RINCIAN

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DINAS KESEHATAN PPKB

TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

					dan Konsultasi SKPD
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				4	Pengadaan Obat, Vaksin
				5	Pengadaan Bahan Habis Pakai
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

				4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
				7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				10	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				11	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				12	Pengelolaan

					Jaminan Kesehatan Masyarakat
				13	Operasional Pelayanan
				13	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
				2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
				2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan

				Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran

					dan Depot Air Minum (DAM)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
				2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	1	Pelaksanaan Pembangunan	1	Orientasi dan Pelatihan Teknis

	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Tabel 2.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01:01	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**55,286,769,018**	**55,286,769,018**				**55,839,982,732**
01:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**55,286,769,018**	**55,286,769,018**				**55,839,982,732**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**50,000,000**	**50,000,000**				**50,000,000**
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, PP & KB		Dokumen	50,000,000	50,000,000			Dokumen	50,000,000
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, PP & KB			304,288,300	304,288,300				554,288,300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**54,084,139,708**	**54,084,139,708**				**54,687,353,422**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, PP & KB	736	Orang	38,987,179,708	38,987,179,708		736	Orang	35,213,033,422
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan, PP & KB	451	Orang	15,096,960,000	15,096,960,000		100		19,474,320,000
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**100,000,000**	**100,000,000**				**100,000,000**
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan, PP & KB		Loporan	100,000,000	100,000,000			Loporan	100,000,000
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**200,000,000**	**200,000,000**				**150,000,000**
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dinas Kesehatan, PP & KB								50,000,000
1.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Orang	200,000,000	200,000,000			Orang	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**455,389,470**	**455,389,470**				**455,389,470**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	52,804,930	52,804,930			Paket	52,804,930
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	5,108,340	5,108,340			Paket	5,108,340
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	30,000,200	30,000,200			Paket	30,000,200
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Laporan	367,476,000	367,476,000			Laporan	367,476,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Konsultasi SKPD									
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**223,444,840**	**223,444,840**				**223,444,840**
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	100,000,000	100,000,000			Paket	100,000,000
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Unit	123,444,840	123,444,840			Unit	123,444,840
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**123,795,000**	**123,795,000**				**123,795,000**
01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Kesehatan, PP & KB		Laporan	4,995,000	4,995,000				4,995,000
01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Kesehatan, PP & KB		Laporan	118,800,000	118,800,000				118,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas Kesehatan, PP & KB								
01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**50,000,000**	**50,000,000**				**50,000,000**
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Lapangan										
1.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan, PP & KB		Unit	50,000,000	50,000,000			Unit	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.01.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Faskes yang melaksanakan pelayanan BLUD**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**36**	**%**	**254,040,000**	**254,040,000**				**100,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan, PP & KB	8	Unit Kerja (Faskes)	254,040,000	254,040,000		9	Unit Kerja (Faskes)	100,000,000
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**94,820,201,369**	**75,525,201,369**				**102,479,494,098**
01:02:02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1 Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup**	**Kab. Morowali**	**183**	**Angka**	**94,820,201,369**	**75,525,201,369**		**172**	**Angka**	**102,479,494,098**
		2. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup		**15.7**	**Angka**				**14.7**	**Angka**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		3 Prevalensi Stunting		14	%				12	%	
		4. Prevalensi Wasting		1.6	%				1.4	%	
		5. Angka Kesakitan		35	Angka				35	Angka	
'1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar	Kab. Morowali	100	%	48,726,898,000	31,226,898,000		100	%	52,285,215,200
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,52	Angka				0,55	Angka	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Morowali	0	Unit	-	-		0	Unit	-
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Morowali		Unit	-	-		1	Unit	4,500,000,000
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Morowali		Unit	-	-		1	Unit	3,500,000,000
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Morowali	2	Unit	-	-		2	Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Morowali	1	Unit	20,000,000,000	5,000,000,000			Unit	-
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,	Kab. Morowali	1	Unit	4,000,000,000	3,500,000,000		0	Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar									
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Morowali	0	Unit	-	-		2	Unit	-
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Morowali	5	Unit	1,000,000,000	1,000,000,000		2	Unit	500,000,000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	1	Unit	1,800,000,000	1,800,000,000		4	Unit	6,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Morowali	4	Unit	6,000,000,000	4,000,000,000		4	Unit	6,000,000,000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Morowali	1	Unit	1,800,000,000	1,800,000,000		1	Unit	1,800,000,000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Morowali	8	Unit	3,020,000,000	3,020,000,000		99	Unit	2,086,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Morowali	494	Unit	2,000,000,000	2,000,000,000		**237**	**Unit**	17,000,000,000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kab. Morowali		Unit					Unit	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Morowali	1	Paket	4,148,993,300	4,148,993,300		1	Paket	4,978,792,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Morowali	1	Paket	4,526,654,700	4,526,654,700		1	Paket	5,431,985,700
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Morowali		unit					unit	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Morowali	1	Paket	50,000,000	50,000,000			Paket	50,000,000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	Kab. Morowali	928	Unit	381,250,000	381,250,000		934	Unit	438,437,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Sesuai Standar									
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	12	Paket	113,660,000	113,660,000		12	Paket	123,992,700
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah	Kab. Morowali		Keluarga					Keluarga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas									
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar**	**Kab. Morowali**	**100**	**%**	**46,023,303,369**	**44,228,303,369**		**100**	**%**	**50,094,278,898**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	3961	Orang	2,000,000,000	1,000,000,000		4357	Orang	2,100,000,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang	Kab. Morowali	3782	Orang	1,000,000,000	500,000,000		4160	Orang	1,050,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	3601	Orang	500,000,000	500,000,000		3962	Orang	525,000,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	18746	Orang	500,000,000	500,000,000		20621	Orang	525,000,000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	22881	Orang	500,000,000	500,000,000		25169	Orang	525,000,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	115778	Orang	150,000,000	150,000,000		117612	Orang	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	10751	Orang	250,000,000	250,000,000		11715	Orang	262,000,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	18054	Orang	100,000,000	100,000,000		19860	Orang	200,000,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Morowali	3931	Orang	100,000,000	100,000,000		4325	Orang	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kesehatan Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODJG)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Morowali	358	Orang	150,000,000	150,000,000		433	Orang	157,500,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Morowali	2727	Orang	400,000,000	400,000,000		3000	Orang	450,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Morowali	3870	Orang	400,000,000	400,000,000		4257	Orang	450,000,000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Morowali	1	Dokumen	210,000,000	210,000,000		1	Dokumen	**250,000,000**
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Kab. Morowali	1	Dokumen	200,000,000	**200,000,000**		1	Dokumen	**250,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Morowali	12	Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000		12	Dokumen	1,050,000,000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Morowali	3	Dokumen	100,000,000	100,000,000		3	Dokumen	105,000,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Morowali	5	Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000		5	Dokumen	1,500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Morowali	4	Dokumen	200,000,000	**200,000,000**		4	Dokumen	210,000,000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Morowali	1	Dokumen	100,000,000	**100,000,000**		1	Dokumen	105,000,000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Morowali	3	Dokumen	200,000,000	200,000,000		3	Dokumen	350,000,000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	Jumlah Orang dengan Masalah	Kab. Morowali	78	Orang	50,000,000	**50,000,000**		**86**	Orang	52,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan									
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	0	Orang	50,000,000	**50,000,000**		**0**	Orang	52,500,000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Morowali	1	Dokumen	200,000,000	**200,000,000**		1	Dokumen	300,000,000
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Morowali	1	Dokumen	150,000,000	**150,000,000**		1	Dokumen	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Morowali	9	Dokumen	2,300,000,000	2,000,000,000		9	Dokumen	2,500,000,000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Morowali	12	Dokumen	14,991,480,000	14,991,480,000		12	Dokumen	15,741,054,000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab. Morowali	0	Orang		5,000,000		0	Orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Morowali	20	Paket				23	Paket	15,000,000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Morowali	1	Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000		1	Dokumen	1,500,000,000
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan	Kab. Morowali	3	Unit	-	-		2	Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas									
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kab. Morowali	1	Dokumen (Kasus)	300,000,000	**300,000,000**		**1**	Dokumen (Kasus)	**300,000,000**
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Morowali	2					**2**		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Morowali	12	Dokumen	17,133,550,829	17,133,550,829		12	Dokumen	17,930,452,358
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Kab. Morowali	1	Dokumen	381,528,140	381,528,140		1	Dokumen	381,528,140

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Fasilitas Kesehatan Lainnya									
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	13	Unit	-	-		14	Unit	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Morowali	12	Laporan	100,000,000	100,000,000		12	Laporan	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Morowali	1	Dokumen	150,000,000	150,000,000		1	Dokumen	200,000,000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Morowali	1	Unit	156,744,400	156,744,400		1	Unit	156,744,400
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga										
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan kesehatan orang dengan tuberkullosis										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan kesehatan malaria										
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase faskes yang melaksanakan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**36**	**%**	**70,000,000**	**70,000,000**		**64**	**%**	**100,000,000**
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, PP & KB	5	Dokumen	70,000,000	70,000,000		1	Dokumen	100,000,000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, PP & KB	1	Dokumen	-	-		1	Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB	3	Unit	-	-		1	Unit	-
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Sakit kelas C dan D yang diterbitkan isinnya**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**-**	**-**				**-**
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, PP & KB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan, PP & KB								
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**		**%**	**-**	**-**				**-**
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Yang Memiliki Izin Praktek**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**-**	**-**				**-**
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan										
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kab. Morowali								
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Morowali								
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Morowali								
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Kab. Morowali								
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
1.01.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**					**-**	**-**				**-**
1.01.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Tangga										
1.01.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga										
1.01.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**Kab. Morowali**	**100**		**-**	**-**		**100**		**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Kab. Morowali								
1.01.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**			**Kab. Morowali**	**90**		**-**	**-**		**90**		**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Kab. Morowali								
1.01.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
1.01.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**			**Kab. Morowali**	**100**		**-**	**-**		**100**		**-**
1.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga			Kab. Morowali								
1.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**Kab. Morowali**	**10**		**-**	**-**		**10**		**-**
1.01.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**			**Kab. Morowali**	**11**		**-**	**-**		**11**		**-**
1.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
1.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Kab. Morowali								
1.01.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Kab. Morowali								
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**-**	**-**				**-**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian**			Kab. Morowali			-	-				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kuantitas Penduduk											
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand DesignPembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pendidikan Formal dan Nonformal											
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan											
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Kab. Morowali								
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			Kab. Morowali								
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK			Kab. Morowali								
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholdersdan Mitra Kerja			Kab. Morowali								
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kearifan Budaya Lokal										
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Kab. Morowali								
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Kab. Morowali								
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK		Kab. Morowali								
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini		Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Lokakarya (Minilok)										
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Kab. Morowali								
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBP		Kab. Morowali								
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Kab. Morowali**								
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Kab. Morowali								
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			Kab. Morowali								
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			Kab. Morowali								
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kab. Morowali								
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Kab. Morowali								
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Kab. Morowali								
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**				**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan		Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK		Kab. Morowali								
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK		Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Kab. Morowali			-	-				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Morowali								
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan			Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali								
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Kab. Morowali								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
TOTAL						**150,106,970,387**	**130,811,970,387**				**158,319,476,830**

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Morowali untuk tahun 2024 sebesar Rp. **129.350.894.843**. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 diuaraikan pada tabel

Tabel 2.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
01:01	**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**55,286,769,018**	**55,286,769,018**
01:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**55,286,769,018**	**55,286,769,018**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**50,000,000**	**50,000,000**
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, PP & KB		Dokumen	50,000,000	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, PP & KB			304,288,300	304,288,300
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**54,084,139,708**	**54,084,139,708**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, PP & KB	736	Orang	38,987,179,708	38,987,179,708
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan, PP & KB	451	Orang	15,096,960,000	15,096,960,000
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**100,000,000**	**100,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan, PP & KB		Loporan	100,000,000	100,000,000
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**200,000,000**	**200,000,000**
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Orang	200,000,000	200,000,000
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**455,389,470**	**455,389,470**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	52,804,930	52,804,930
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	5,108,340	5,108,340

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	30,000,200	30,000,200
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan, PP & KB		Laporan	367,476,000	367,476,000
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**223,444,840**	**223,444,840**
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Paket	100,000,000	100,000,000
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB		Unit	123,444,840	123,444,840
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**123,795,000**	**123,795,000**
01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Kesehatan, PP & KB		Laporan	4,995,000	4,995,000
01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Kesehatan, PP & KB		Laporan	118,800,000	118,800,000
01.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas Kesehatan, PP & KB				
01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**50,000,000**	**50,000,000**
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan, PP & KB		Unit	50,000,000	50,000,000
1.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.01.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Faskes yang melaksanakan pelayanan BLUD**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**36**	**%**	**254,040,000**	**254,040,000**
1.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan, PP & KB	8	Unit Kerja (Faskes)	254,040,000	254,040,000
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**94,820,201,369**	**75,525,201,369**
01:02:02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1 Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup**	**Kab. Morowali**	**183**	**Angka**	**94,820,201,369**	**75,525,201,369**
		2. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup		**15.7**	**Angka**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
		3 Prevalensi Stunting		**14**	**%**		
		4. Prevalensi Wasting		**1.6**	**%**		
		5. Angka Kesakitan		**35**	**Angka**		
'1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar**	**Kab. Morowali**	**100**	**%**	**48,726,898,000**	**31,226,898,000**
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		**0,52**	**Angka**		
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Morowali	0	Unit	-	-
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Morowali		Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Morowali		Unit	-	-
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Morowali	2	Unit	-	-
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Morowali	1	Unit	20,000,000,000	5,000,000,000
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Morowali	1	Unit	4,000,000,000	3,500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Morowali	0	Unit	-	-
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kab. Morowali				
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Morowali	5	Unit	1,000,000,000	1,000,000,000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	1	Unit	1,800,000,000	1,800,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Morowali	4	Unit	6,000,000,000	4,000,000,000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Morowali	1	Unit	1,800,000,000	1,800,000,000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Morowali	8	Unit	3,020,000,000	3,020,000,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Morowali	494	Unit	2,000,000,000	2,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kab. Morowali		Unit		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Morowali	1	Paket	4,148,993,300	4,148,993,300
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Morowali	1	Paket	4,526,654,700	4,526,654,700
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Morowali		unit		
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Morowali	1	Paket	50,000,000	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Morowali	928	Unit	381,250,000	381,250,000
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	12	Paket	113,660,000	113,660,000
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Morowali		Keluarga		
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Dilaksanakan Sesuai Standar**	**Kab. Morowali**	**100**	**%**	**46,023,303,369**	**44,228,303,369**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	3961	Orang	2,000,000,000	1,000,000,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang	Kab. Morowali	3782	Orang	1,000,000,000	500,000,000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	3601	Orang	500,000,000	500,000,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	18746	Orang	500,000,000	500,000,000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	22881	Orang	500,000,000	500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	115778	Orang	150,000,000	150,000,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	10751	Orang	250,000,000	250,000,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	18054	Orang	100,000,000	100,000,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Morowali	3931	Orang	100,000,000	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODJG)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Morowali	358	Orang	150,000,000	150,000,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Morowali	2727	Orang	400,000,000	400,000,000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Morowali	3870	Orang	400,000,000	400,000,000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Morowali	1	Dokumen	210,000,000	210,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Morowali	1	Dokumen	200,000,000	**200,000,000**
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Morowali	12	Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Morowali	3	Dokumen	100,000,000	100,000,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Morowali	5	Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Morowali	4	Dokumen	200,000,000	**200,000,000**
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Morowali	1	Dokumen	100,000,000	**100,000,000**
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Morowali	3	Dokumen	200,000,000	200,000,000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	78	Orang	50,000,000	**50,000,000**
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Morowali	0	Orang	50,000,000	**50,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Morowali	1	Dokumen	200,000,000	**200,000,000**
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Morowali	1	Dokumen	150,000,000	**150,000,000**
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Morowali	9	Dokumen	2,300,000,000	2,000,000,000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Morowali	12	Dokumen	14,991,480,000	14,991,480,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab. Morowali	0	Orang		5,000,000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Morowali	20	Paket		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Morowali	1	Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kab. Morowali	3	Unit	-	-
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kab. Morowali	1	Dokumen (Kasus)	300,000,000	**300,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Morowali	2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Morowali	12	Dokumen	17,133,550,829	17,133,550,829
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Morowali	1	Dokumen	381,528,140	381,528,140
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	13	Unit	-	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Morowali	12	Laporan	100,000,000	100,000,000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Morowali	1	Dokumen	150,000,000	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Morowali	1	Unit	156,744,400	156,744,400
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga						
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan kesehatan orang dengan tuberkullosis						
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan kesehatan malaria						
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase faskes yang melaksanakan sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**	**36**	**%**	**70,000,000**	**70,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, PP & KB	5	Dokumen	70,000,000	70,000,000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan, PP & KB	1	Dokumen	-	-
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Dinas Kesehatan, PP & KB	3	Unit	-	-
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Sakit kelas C dan D yang diterbitkan isinnya**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, PP & KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan, PP & KB				
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**		**%**	**-**	**-**
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Yang Memiliki Izin Praktek**	**Dinas Kesehatan, PP & KB**			**-**	**-**
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kab. Morowali				
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Morowali				
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kab. Morowali				
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Kab. Morowali				
1.01.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
1.01.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**					**-**	**-**
1.01.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						
1.01.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**Kab. Morowali**	**100**		**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Kab. Morowali				
1.01.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**			**Kab. Morowali**	**90**		**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Kab. Morowali				
1.01.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
1.01.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**			**Kab. Morowali**	**100**		**-**	**-**
1.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga			Kab. Morowali				
1.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**Kab. Morowali**	**10**		**-**	**-**
1.01.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**			**Kab. Morowali**	**11**		**-**	**-**
1.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
1.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Kab. Morowali				
1.01.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
1.01.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Kab. Morowali				
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**-**	**-**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			Kab. Morowali			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand DesignPembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Kab. Morowali				
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			Kab. Morowali				
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK			Kab. Morowali				
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholdersdan Mitra Kerja			Kab. Morowali				
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			Kab. Morowali				
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Kab. Morowali				
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK		Kab. Morowali				
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Kab. Morowali				
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Kab. Morowali				
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBP		Kab. Morowali				
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Kab. Morowali**				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Kab. Morowali				
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Kab. Morowali				
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Kab. Morowali				
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Kab. Morowali				
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Kab. Morowali**			**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			Kab. Morowali				
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria			Kab. Morowali				
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Kab. Morowali				
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			Kab. Morowali				
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			Kab. Morowali				
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK		Kab. Morowali				
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK		Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**Kab. Morowali**			**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Morowali				
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kab. Morowali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Morowali				
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Kab. Morowali				
TOTAL						**150,106,970,387**	**130,811,970,387**

BAB V. PENUTUP

1. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali yang Sehat dan Mandiri, dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
4. Pada akhir tahun anggaran 2022 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Morowali. 16 Maret 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Morowali

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

ASHAR M. MA'RUF, S.E. M.Si
NIP. 19720112 199403 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

RENCANA KERJA
TAHUN 2025





SIGAP MEMBANGUN NEGERI





BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Periode satu (1) Tahun yang memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempat dengan mendorong partisipasi masyarakat Perumusan rancangan renja SKPD dilakukan melalui serangkaian partisipasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelola Data dan Informasi
2. Analisa gambar pelayanan SKPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaaan renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD
4. Isu-isu penting penyelengara tugas dan fungsi SKPD
5. Telahan terhadap rancangan amal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan Kegiatan Prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan renja SKPD
10. Penyempurnaan rancangan renja SKPD
11. Pembahasan Form SKPD
12. Penyesuaian dokumen rancangan renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Tahun 2025, di susun berpedoman pada renstra PUPRD tahun 2024-2026 dan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 sedangkan renstra disusun berpedoman pada rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2). Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 200 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

11) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

12) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

13) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

23) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

24) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;

28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

29) Peraturan Presiden Nomor: 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

30) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

31) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;

32) Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

33) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

41) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

42) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

43) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

44) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

45) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

Disamping Dasar Hukum yang menyertai penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Kabupaten Morowali juga tetap berpijak pada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026, yang dilandasi dengan Tugas Pokok pada pencapaian visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya, yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun secara sistematis dalam rencana kerja SKPD tahun 2025.

Dengan Dasar Hukum ini, menjadi dasar semua Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tahun 2025 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai urusan yang dilaksanakan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tahun adalah:

1. Menetapkan Program dan Kegiatan yang mendukung Visi & Misi Kabupaten Morowali

2. Memberikan Arah dan Tujuan Pembangunan yang ingin di capai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tahun dalam satu tahun kedepan; dan

3. Terwujudnya Pembangunan yang berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tahun 2025, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali, agar substansi pada babbab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja PD, Proses Penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKP dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hokum di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang tekait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV Penutup

Menguraikan catatan penting tentang pelaksanaan yang harus diperhatikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta menguraikan rencana rindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dapat teridentifikasi dari sejauhmana proses kegiatan dilaksanakan oleh seluruh Bidang dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun mendatang.

Rencana kerja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sesuai dengan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Morowali "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Yang Sejahtera Bersama*"

Rencana penganggaran pada tahun 2024 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali sebesar **Rp. 384,008,012,770**,- anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Operasi	Rp.60.285.109.296	Rp.60.285.109.296
2.	Belanja Modal	Rp.323.722.903.474	Rp.323.722.903.474

Dengan alokasi anggaran tersebut di atas direncanakan untuk membiayai 9 Program dan 24 kegiatan sebesar **Rp.384.008.012.770,-** pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten

Morowali dapat berjalan dengan baik. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah merupakan program dan kegiatan yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA):**
  - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM:**
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH:**
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE:**
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG:**
  - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  -

- **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA:**
    - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN:**
    - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI:**
    - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG:**
    - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    -

Selama tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali telah melaksanakan 8 program dan 24 Kegiatan , terdiri dari 1 Program Penunjang/penduduk dengan 5 Kegiatan dan 8 Program Utama dengan 15 Kegiatan. Realisasi capaian target kinerja 9 Program Utama adalah sebagai berikut :

1. Program Utama Mencapai Target (100%)

- Program Sumber Daya Air(SDA) (100%)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (100%)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (100%)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (100%)
- Program Penetapan Bangunan Gedung(100%)
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (100%)
- Program Penyelenggaraan Jalan(100%)
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi (100%)
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang(100%)

2. **Implikasi Yang Timbul Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Dan Kendala Yang Dihadapi Terkait Target Kinerja Program/Kegiatan** antara lain keterlambatan pengelola kegiatan, keterlambatan pencairan anggaran karena dalam pelaksanaan anggaran memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran dan perencanaan kegiatan.

Pada dasarnya seluruh program kegiatan pada program penunjang/pendukung sudah tercapai sesuai dengan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali.

Untuk program utama yang masih berlanjut ke periode RPD/Renstra sebagai berikut :

- Program Sumber Daya Air(SDA)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penetapan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Masih berlanjutnya 10 program utama tersebut karena masih berjalannya program untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk program-program penunjang/pendukung, karena sifatnya sebagai program pendukung kinerja internal instansi dalam menjalankan tupoksinya, masih akan berlanjut dalam periode RPD/Renstra berikutnya.

3. **Beberapa upaya yang minimal dapat dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkualitas menerapkan beberapa hal sebagai berikut :**
   a. Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya untuk merealisasikan target kinerja serta mengkomunikasinya kepada pegawai.

b. Interaksi intensif dan komunikasi yang efektif antar pimpinan dengan pejabat di bawahnya dan seluruh pegawai untuk selalu menganalisis capaian kinerja untuk mendapatkan umpan balik.
c. Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target secara tepat dan akurat, pimpinan memberikan respon positif berupa masukan-masukan untuk pencapaian kinerja.

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,806,749,325.00	18,806,749,325.00	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**61,423,525,969.00**	**61,423,525,969.00**	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**6,379,554,957.00**	**6,379,554,957.00**	100%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**248,750,250.00**	**248,750,250.00**	100%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**15,290,254,510.00**	**15,290,254,510.00**	100%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**4,619,550,000.00**	**4,619,550,000.00**	100%
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**121,661,725,186.00**	**121,661,725,186.00**	100%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**152,054,093,183.00**	**152,054,093,183.00**	100%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**495,825,490.00**	**495,825,490.00**	100%
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**3,027,983,900.00**	**3,027,983,900.00**	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM , pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatiff dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali sebesar **Rp. 384.008.012.770,-** didapatkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 384.008.012.770.,-** atau terealisasi **100 %** yang artinya secara rata-rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali merupakan unsur teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali memilki perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan OPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan OPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah serta Kementerian dan Lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Permasalahan yang dialami dalam peningkatan pembangunan telah diinventarisir secara sistematisakan diuraikan sebagai berikut:

a. Masalah

1. Masih Rendah Infrastruktur Kebinamargaan dalam kondisi Mantap2. Belum adanya saluran drainase dibeberapa kawasan permukiman.
3. Kurangnya Ketersediaan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Masih Rendahnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA
6. Belum optimalnya Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Belum optimal Penataan Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten

8. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan Persampahan Regional
10. Belum optimalnya Pengelolaan dan pengembangan air limbah

b. Sasaran

1. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Layanan Pemerintah Dinas PUPR
2. Meningkatknya Infrastruktur KePUan dalam kondisi baik
3. Meningktnya penyelenggaraan penataan ruang
4. Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dan lingkunganya Di Wilayah Kabupaten
5. Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan air limbah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, drainase dan sungai di Kabupaten Morowali. Isu-isu strategis diatas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Moorowali.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang dimasa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali telah menyiapkan 10 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengantisipasi adanya kebutuhan sarana dan prasarana di kantor DPUPRD
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yang ada di dalam program tersebut

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu air bersih yang di bangun
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu Jumlah Dranase yang di bangun
e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu untuk membangun kebutuhan kegiatan di program tersebut
f. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu untuk membangun kebutuhan kegiatan di program tersebut
g. Program Penyelenggara Jalan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun
h. Program Program Penataan Gedung diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu untuk membangun kebutuhan kegiatan di program tersebut
i. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu untuk membangun kebutuhan kegiatan di program tersebut
j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu jumlah kegiatan yang ada dalam program tersebut
k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan yaitu untuk menyelesaikan kegiatan tata ruang

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali yaitu:

1. Penyusunan rencana rumusan kebijakan teknis operasional;
2. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan;

3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat : rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber- sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPD pada tahun yang direncanakan.

Agar harapan, kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasi secara optimal, maka Rencana Kerja ini menjadi instrument yang bisa mengarahkan seluruh sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali secara sistematis dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Usulan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel T-C. 32.

B A B I I I

T U J U AN D AN S A S AR A N P E R A N G K A T D AE R A H

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah penyesuaian antara program pembangunan yang diarahkan dengan permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta relevansinya dengan perkembangan Kabupaten Morowali kedepan.

Kebijakan pengembangan Tata ruang dan Lingkungan, serta Kebijakan Penguatan Struktur Ekonomi merupakan kebijakan Pokok yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali yang menjadi rujukan pembangunan infrastuktur di daerah baik yang di pemerintah pusat maupun provinsi dan Kabupaten Morowali.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.

Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024-2026 yang disusun dengan skala prioritas dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kabupaten Morowali.

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kabupaten Morowali yang berfokus pada kebijakan Pembangunan infrastuktur dengan program dan kegiatan masing-masing SKPD.

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Layanan Pemerintah Dinas PUPR
2. Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik
3. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

3.3 Program Kegiatan dan Pagu Indikatif menurut sumber pendanaan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mewujudkan pencapaian Misi yang telah dikemukakan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang memberikan arahan dalam mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur disegala bidang melalui penguatan pembangunan yang diharapkan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun dapat dilihat pada tabel T-C.33

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Prangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja–SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2025.

Morowali, 22 Januari 2024

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



RUSTAM SABALIO, ST.MT
Pembina Tkt.I / IVb
NIP.19760929 200212 1 005

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali s/d Tahun 2025

TabelT-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali

TabelT-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Morowali

TabelT-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Morowali

TabelT-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Morowali

RENCANA KERJA
(RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuania-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan gambaran umum keberhasilan dan Kegagalan pelaksanaan misi instansi juga sebagai tolak ukur pencapaian kinerja instansi. juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Morowali khususnya di bidang penanggulangan dan penanganan masalah bencana.

Khusus di bidang kebencanaan maka diperlukan suatu perencanaan yang baik dan berkesinambungan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan legitimate, guna pelaksanaan penananggulangan dan penanganan bencana yang cepat, tepat, berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Pada sub sektor kebencanaan Kabupaten Morowali, visi tersebut mengacu pada Sistem Penanggulangan Bencana secara Nasional yang diselaraskan dengan program penanggulangan bencana Kabupaten Morowali yang bertujuan terselenggaranya penanggulangan bencana oleh semua potensi masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah secara sinergis,dan berhasil guna.

Penyusun telah berusaha dan berupaya menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Morowali Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali, namun disadari karena keterbatasan kami maka laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali di masa mendatang. Atas kerjasama dari semua pihak dalam penyelasaian laporan ini diucapkan terima kasih.

Bungku, 20 Maret 2024

Badan Penanggulangan Bencana daerah

Kabupaten Morowali

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ILHAM, SH.I.MM

Pembina, IV/a

NIP. 197004021994081001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja OPD merupakan hal yang sangat penting didalam menunjang proses Pembangunan Daerah.

Renja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025, Renstra-OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 - 2026, Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan serangkaian partisipasi kegiatan sebagai berikut:

1. Engelola Data dan Informasi;
2. Analisa gambar pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu- isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap Rancangan awal RKPD;
6. Perumusan Tujuan dan Sasaran;
7. Penelahan usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat;
8. Perumusan Kegiatan Prioritas;
9. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan Form SKPD;
12. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2024 - 2026

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024, di susun berpedoman pada **Renstra BPBD** tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 sedangkan Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar Republik IndonesiaTahun1945
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping Dasar Hukum yang menyertai penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali juga tetap berpijak pada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023, yang dilandasi dengan Tugas Pokok pada pencapaian visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya, yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun secara sistematis dalam rencana kerja SKPD tahun 2024.

Dengan Dasar Hukum ini, menjadi dasar semua Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tahun 2024 - 2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan
b. Acuan dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai urusan yang dilaksananakan yaitu Urusan Wajib Sub. Kebencanaan
c. Sebagai referensi dan tolok ukur penilaian kinerja

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali adalah :

a. Sebagai acuan, arah dan tujuan pembangunan serta penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas daerah tahun 2024
b. Pedoman penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024
c. Menetapkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daearah kabupaten Morowali
d. Diperolehnya program prioritas yang menjadin upaya konkrit pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Morowali dalam bidang kebencanaan

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun berdasarkan tata aturan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUHAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja PD, Proses Penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKP dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hokum di dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN SEBELUMYA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
2.3. Isu-Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi BPBD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal
2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;

3.3. Program dan Kegiatan menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dapat teridentifikasi dari sejauhmana proses kegiatan dilaksanakan oleh seluruh Bidang dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun mendatang.

Rencana kerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sesuai dengan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Morowali "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Yang Sejahtera Bersama*"

Rencana penganggaran pada tahun 2023 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali sebesar **Rp. 19,186,808,640**,- anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.437.289.477	Rp. 2.437.289.477
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.127.920.037	Rp. 6.127.920.037
3	Belanja Modal	Rp. 10.621.599.126	Rp. 10.621.599.126

Dengan alokasi anggaran tersebut di atas direncanakan untuk membiayai 2 Program dan 22 kegiatan sebesar **Rp. 19.186.808.640,**- pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali dapat berjalan dengan baik. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah merupakan program dan kegiatan yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA :**
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sejalan dengan telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Program Utama Mencapai Target (100%)

- Program Penanggulangan Bencana (100%)
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2. Implikasi yang timbul terhadap Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Dan Kendala yang Dihadapi Terkait Target Kinerja Program/Kegiatan

antara lain keterlambatan pengelola kegiatan, keterlambatan pencairan anggaran karena dalam pelaksanaan anggaran memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran dan perencanaan kegiatan.

Pada dasarnya seluruh program kegiatan pada program penunjang/pendukung sudah tercapai sesuai dengan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali.

Untuk program utama yang masih berlanjut ke periode RPD/Renstra sebagai berikut :

- Program Penanggulangan Bencana (100%)
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Masih berlanjutnya Program Penanggulangan Bencana yang merupakan program utama tersebut karena masih berjalannya program untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk program-program penunjang/pendukung, karena sifatnya sebagai program pendukung kinerja internal instansi dalam menjalankan tupoksinya, masih akan berlanjut dalam periode RPD/Renstra berikutnya.

3. **Beberapa upaya yang minimal dapat dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkualitas menerapkan beberapa hal sebagai berikut :**
   a. Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya untuk merealisasikan target kinerja serta mengkomunikasinya kepada pegawai.
   b. Interaksi intensif dan komunikasi yang efektif antar pimpinan dengan pejabat di bawahnya dan seluruh pegawai untuk selalu menganalisis capaian kinerja untuk mendapatkan umpan balik.
   c. Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target secara tepat dan akurat, pimpinan memberikan respon positif berupa masukan-masukan untuk pencapaian kinerja.

REALIASASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

NO		PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
I	1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.438.652.380	2.438.652.380	100%
	1.2	Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	1.095.163.440	1.095.163.440	
	2	**Administrasi Kepeg. Perangkat Daerah**			
	2.1	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (APD/PDL TRC)	37.950.000	37.950.000	100%
	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
	3.1	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	36.183.096	36.183.096	100%
	3.2	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.694.390	347.694.390	100%
	3.3	Penyedia Bahan Logistik Kantor	193.539.710	193.539.710	
	3.4	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan	23.816.750	23.816.750	
	3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	358.517.000	358.517.000	
	3.6	0	_	_	
	3.7	Penyedia Jasa Komunikasi , Sumeber daya Air Dan Listrik	54.071.256	54.071.256	
	3.8	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.260.000	9.260.000	
	3.9	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000	900.000	
	3.10	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	730.000.250	730.000.250	
	3.11	Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	_	_	
II	2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota**			
	1.1	Penyusunan kajian Resiko Bencana Kabupaten	_	_	100%
	1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Perjenis Bencana)	172.714.700	172.714.700	
	2	**Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			
	2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	207.778.800	207.778.800	100%
	2.2	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Saran Dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	807.322.900	807.322.900	
	2.3	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.114.245.307	1.114.245.307	
	2.4	Pengembangan Kapasitas Tim (TRC) Bencana Kab./Kota	240.492.500	240.492.500	
	2.5	Respon Cepat Darurat Bencana Kab. / Kota	143.650.000	143.650.000	100%
	2.6	Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	201.959.080	201.959.080	
	2.7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10.974.259.984	10.974.259.984	100%
		TOTAL			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM , pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Morowali sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Daerah semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat disaat kejadian Bencana di wilayah Kabupaten Morowali. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatiff dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 total anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali sebesar **Rp. 19,186,808,640,-** didapatkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 19,186,808,640.,-** atau terealisasi **100 %** yang artinya secara rata-rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Morowali Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali memilki perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan OPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan OPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran. Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Morowali tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dalam rangka penanganan Risiko Bencana

Permasalahan yang dialami dalam peningkatan pembangunan telah diinventarisir secara sistematisakan diuraikan sebagai berikut:

a. Masalah

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi diwilayah-wilayah tertentu seperti banjir dan banjir bandang,
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya.
3. Pola pembangunanyang kurang memperhatikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana kedalam prioritas pembangunan.
4. Kurangnya koordinasi dan jarring komunikasi dalam penanggulangan bencana.
5. Belum terintegrasi pemulihan pasca bencana lintas sektor.
6. Masih kurangnya jumlah personil Kebencanan
7. Kurangnya Ketersediaan peralatan Rescue dan logistik Kebencanaan
8. Belum maksimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dikarenakan pusdalops baru terbentuk sehingga ruangan/bangunan serta sarana dan prasarana penunjang belum ada/memadai.
9. Belum tervalidasinya Peta Rawan Bencana seharusnya terupdate setiap lima tahun agar data dan informasi lebih akurat
10. Belum Semua Ancaman Potensi Bencana Dibuatkan Rencana Kontijensi
11. Belum Optimalnya Sistem Peringatan Dini Bencana
12. Belum optimalnya kegiatan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) dikarenakan anggaran kegiatan pasca bencana tidak mencukupi
13. Anggaran yang belum mencukupi sehingga sasaran tidak tercapai misalnya peralatan penyelamatan diri, evakuasi korban, pencarian orang hilang dan sarana prasarana lainnya.

b. Sasaran

1. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Layanan Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali
2. Meningkatnya Persentase Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Morowali
3. Menurunnya Persentase Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten Morowali
4. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) yang berkelanjutan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali dan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Morowali Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang dimasa depan khususnya bidang Kebencanaan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali mempunnyai program yakni :

- Program Penanggulangan Bencana (100%)
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Pasca Bencana)

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, BPBD Kabupaten Morowali mempunyai fungsi:

a. Koordinasi Penyelenggara Penanggulangan Bencana;
b. Komando Penyelenggara Penanggulangan Bencana; dan
c. Pelaksanaan Dalam Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat : rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber- sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPD pada tahun yang direncanakan.

Agar harapan, kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasi secara optimal, maka Rencana Kerja ini menjadi instrument yang bisa mengarahkan seluruh sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali secara sistematis dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan *Indeks Ketahanan Bencana (IKD)* melalui peningkatan pembangunan *Desa Tangguh Bencana (Destana)* dan peningkatan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali dalam menghadapi bencana baik mitigasi bencana, darurat bencana dan pasca bencana yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Usulan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel 2

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI

3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,*bottomup* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah,peningkatan skor integritas pelayanan publik, peningkatkan peringkat kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas pemerintahan,dan peningkatkan kinerja pemerintahan provinsi / kabupaten / kota yang transparan,partisipatif dan akuntabel.

Telaahan kebijakan nasional / BNPB terkait program dan kegiatan penanggulangan bencana berguna untuk mewujudkan keterpaduan,keserasian,saling mendukung capaian kinerja antara Pemerintah Nasional dengan Pemerintah Daerah.Sebagai acuannya digunakan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang terkait dengan penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maupun yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RPJMD 2018-2023. Fokusnya pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021, tentang penanggulangan bencana.

1. Kebijakan Internal

   Kebijakan internal adalah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana,yaitu :

   a. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dibidang penanggulangan bencana yang berkualitas

b. Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana yang dinamis, akuntabel dan transparan

c. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas

2. Kebijakan Eksternal

Kebijakan eksternal yaitu kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali dalam rangka mengatur,mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, antaralain :

a. Peningkatan kualitas penanggulangan bencana scara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh.
b. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintah,swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap pra bencana,saat bencana dan pasca bencana.
c. Mengutamakan pengurangan resiko bencana dengan tetap melakukan penanganan darurat yang cepat dan akurat.
d. Meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, mengembangkan Sistem Kewaspadaan Dini.

3.2 Tujuan danSasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor)*yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu " **Morowali Sejahtera Bersama**". Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,terinci,dan terukur.

A. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
2. Meningkatkan manajemen Perencanaan penanggulangan bencana
3. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.
4. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal.
5. Meningkatkan kapasitas perencanaan penanganan pasca bencana yang meliputi tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi

B. Sasaran

Sasaran Strategis yang ingin dicapai sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut

1. Tercapainya manajemen mutu kelembagaan dan Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan administrasi umum. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator:
   a) Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
   b) Jumlah penyediaan sapras kantoryang respresentatif
2. Tersedianya perencanaan penanggulangan bencana yang akuntabel
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
   a) Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD
   b) Pelaksanaan rapat – rapat penanggulanga nbencana
   c) Tersedianya data – data bencana
   d) Jumlah bulan monevlap program kegiatan
3. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
   a) Persentaseterbentuknyamasyarakat desa tangguh bencana
   b) PersentasePelatihan Penanggulangan bencana
4. Meningkatnya Pelayanan masyarakat dalam penanggulanganbencana
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
   a) ProsentaseTim Penanggulangan bencana yang terdidik
   b) Prosentase jumlah korban yang mendapat bantuan
   c) Prosentase jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana
   d) Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana(RPB)
   e) Terlaksananya Pemantauan dan monitoring pada saat pra bencana, tanggap darurat dan Pascabencana
5. Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
   a) Persenta sejumlah sarana dan prasarana umum yang direhabilitasi dan direkonstruksi.
   b) Pelayanan Pemulihan dan Pembangkitan kondisi wilayah Pasca bencana

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Morowali. pada dasarnya program/kegiatan BPBD Kabupaten Morowali adalah sebagai *"pengarah"* setiap program pembangunan yang memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan serta pengukuran tingkat keberhasilannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Morowali tahun 2018 – 2023 yaitu **"Morowali Sejahtera Bersama",** maka program dan kegiatan yang dirancang BPBD Kabupaten Morowali tahun 2021 menyesuaikan dengan Misi yang telah ditetapkan khususnya pada MISI ke 5 : **Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana.**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan Program – program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali sesuai sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana. Program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA :**
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Adapun uraian kegiatan dari masing–masing program dapat dilihat pada lampiran Matrik Rencana Kerja BPBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan disesuikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan Lembaga dan instansi terkait.

Secara garis besar, peran dan fungsi Lembaga Pemerintah di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana lintas OPD.
2. Kabag Hukum mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
3. Keuangan penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat dan pasca bencana.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana.
5. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi.
6. Dinas Pertanian merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait bidang pertanian.
7. Dinas Kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya kebakaran hutan/lahan. Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.
8. Dinas Pekerjaan Umum merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana publik.
9. Dinas Kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis.
10. Dinas Pendidikan merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemuliah sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana.
11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi.
12. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan Ketertiban dan ketentraman, penanggulangan konflik, PRB dan darurat bencana.
13. Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan.

14. Dinas Lingkungan Hidup merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup.
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merencanakan dan mengendalikanprogram-program pembangunan di daerah Pedesaanl yang berdasarkan kajian risiko bencana.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka risiko bencana.
17. Tentara Nasional Indonesia membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana.
18. Kepolisian Republik Indonesia membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.
19. Basarnas mendukung BNPB/BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
20. BMKG membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
21. BPS membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik.
22. BPN membantu dalam bidang penyediaan data-data pertanahan.
23. Perguruan Tinggi membantu dalam bidang pengkajian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Selanjutnya agar lebih terarah, program-program tersebut dideskripsikan menjadi fokus prioritas. Fokus prioritas dimaksud untuk memberikan gambaran prioritas dari masing-masing program. Gambaran prioritas ini sebagai arahan dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan bencana yang multi stakeholder, sehingga lebih terfokus. Sehingga diharapkan tidak terjadi suatu kegiatan dilakukan oleh lebih dari satu instansi atau ada suatu kegiatan yang tidak dilakukan oleh satupun instansi.

Secara umum, masing-masing fokus prioritas mempunyai sasaran yang menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan untuk menjawab isu dan permasalahan yang dihadapi. Sasaran juga mengindikasikan lokasi-lokasi yang harus diprioritaskan karena memiliki risiko tinggi terhadap suatu ancaman bencana. Lokasi-lokasi ini merupakan hasil dari analisis risiko bencanadengan mempertimbangkan bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu keterlibatan berbagai OPD sebagai instansi utama dan instansi terkait. Instansi utama merupakan instansi yang mempunyai peran utama dan mengkoordinasi instansi terkait. Sedangkan instansi

terkait berperan sebagai instansi penunjang yang membantu instansi utama dalam mencapai sasaran. Instansi utama dalam program yang sifatnya generik/umum berlaku pada semua jenis perwujudan Pasal 13 huruf b UU No. 24 Tahun 2007 bahwaBPBD mempunyai fungsi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Hal yang paling penting dalam melaksanakan program-program RPBD Kabupaten adalah kesepakatan dan keterlibatan seluruh instansi, sehinggadalam penyusunan RPBD Kabupaten, masing-masing instansi mempunyai peranan penting. Semangat bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama dituangkan dalam penyusunan RPBD Kabupaten, sehingga RPBD Kabupaten adalah wujud kesepakatan bersama dalam mencapai sasarann yang diinginkan sesuai tahapan tiap tahunnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana kerja tahun yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi BPBD dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja)BPBDini,selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023, rencana kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan bidang dan seluruh staf BPBD,sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa
datang.

Renja BPBD Kabupaten Morowali merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah dan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan Daerah. Keberhasilan pembangunan Daerah akan sangat ditentukan oleh keberhasilan upaya penanggulangan bencana. Dengan demikian sudah semestinya apabila rencana pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang juga memperhatikan dan memuat pertimbangan akan upaya penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Morowali.

Renja BPBD Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah juga disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. Ada tiga hal penting terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu:

1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen bencana
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat

   Mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga dari ancaman bencana,. Oleh karena itulah, Renja BPBD Kabupaten Morowaliini disusun dengan melibatkan seluruh komponen dalam BPBD.

   Renja BPBD Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah berisi gambaran Rencana Kerja satu tahun kedepan guna pencapaian target kinerja sesuai Renstra yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Akhirnya Rencana kerja BPBD Kabupaten Morowali tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

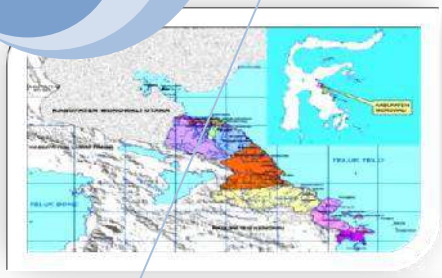


ILHAM, SH.I.MM
Pembina, IV/a
NIP. 197004021994081001

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

RENCANA KERJA ANGGARAN (RENJA)

TAHUN 2024











DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI

Jl. TRANS SULAWESI KOMPLEX PERKANTORAN BUMI FONUASINGKO, BUNGKU

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran pertahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan RENJA DLHD Kabupaten Morowali, saya ucapkan terima kasih.

Bungku, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN MOROWALI



ELYTA GAWI, S.T., M.T
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19761222 200212 2 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR..... iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1 Pengertian Renja..... 2
1.1.2 Proses Penyusunan Renja..... 3
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 7
1.2. Landasan Hukum 8
1.3. Maksud dan Tujuan 15
1. Maksud..... 15
2. Tujuan..... 15
1.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 35
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 51
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 54
3.3. Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 70

BAB V PENUTUP..... 90

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Morowali..... 21

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali..... 32

Tabel 2.3 Matriks SWOT..... 37

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Morowali..... 41

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Morowali..... 50

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2019 - 2023..... 52

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... 54

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Morowali..... 60

Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Morowali..... 72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota..... 4
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran..... 6
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Daerah..... 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan Renja Opd merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Kepmendagri Nomor 900.115.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Lingkungan Hidup Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Morowali.

Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis

lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup sesuai Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

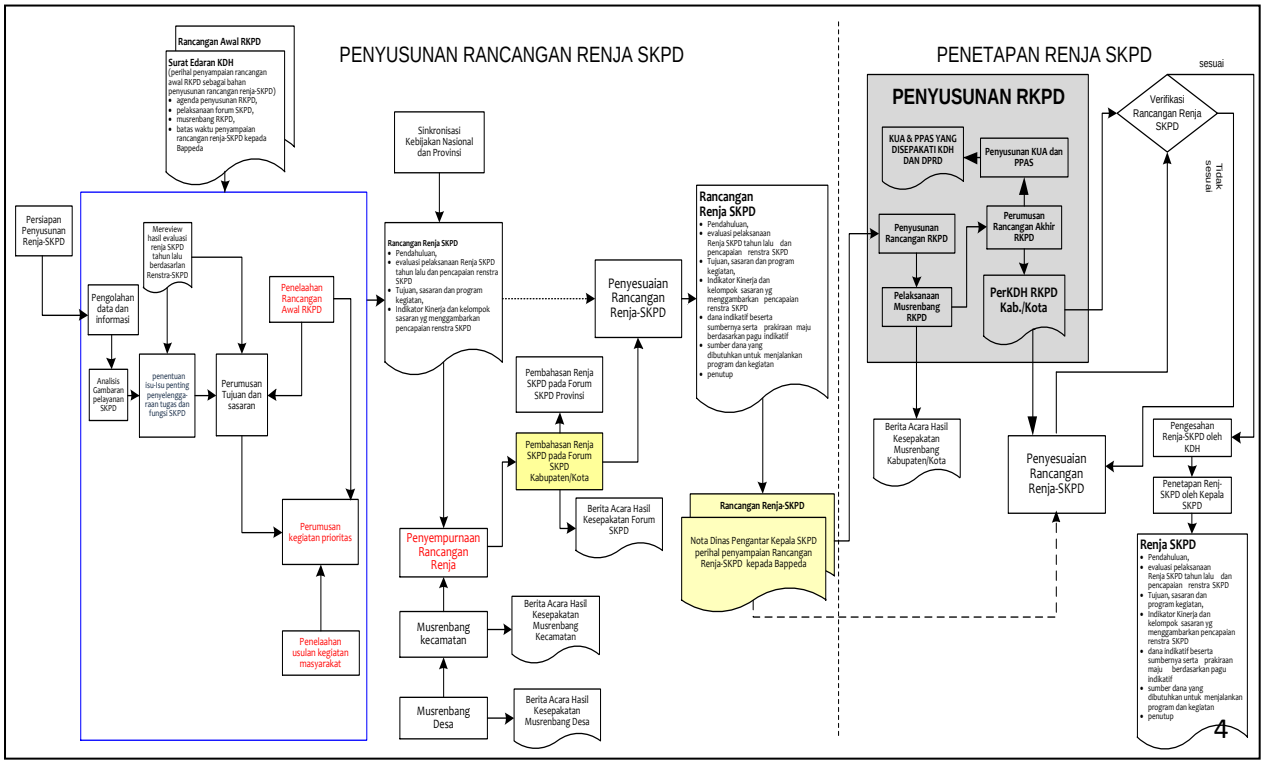
1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di

lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- ❖ Pembentukan Tim Penyusun Renja
- ❖ Orientasi mengenai Renja
- ❖ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- ❖ Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- ❖ Pengolahan data dan informasi;
- ❖ Analisis gambaran pelayanan OPD;
- ❖ Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- ❖ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- ❖ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- ❖ Perumusan tujuan dan sasaran;
- ❖ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

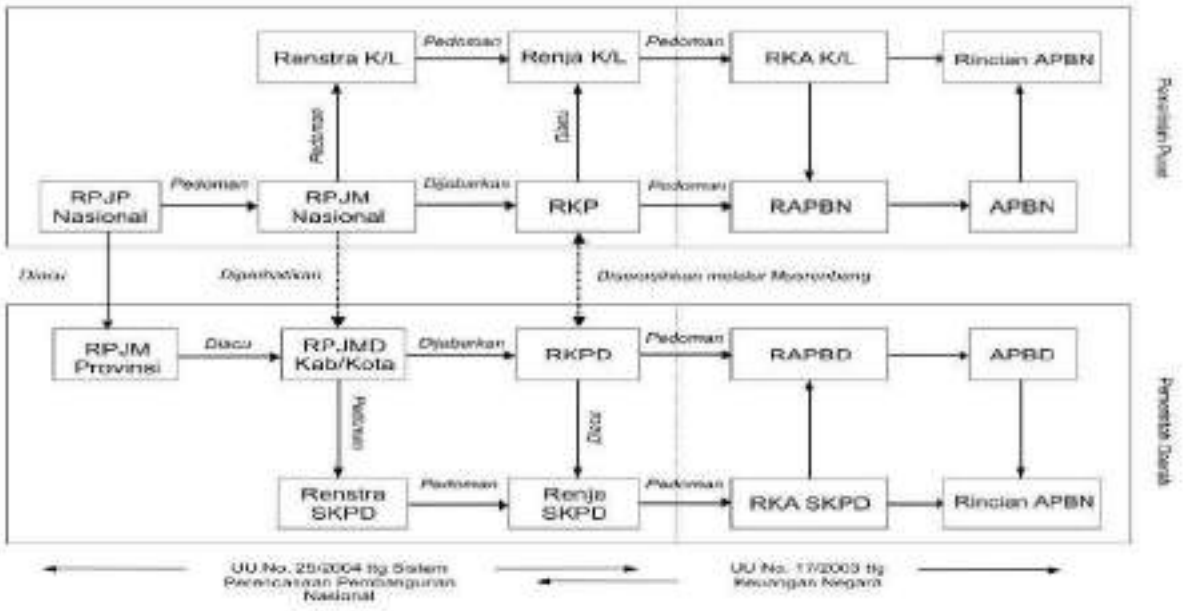
- ❖ Perumusan kegiatan prioritas;
- ❖ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- ❖ Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- ❖ Pembahasan forum OPD; dan
- ❖ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

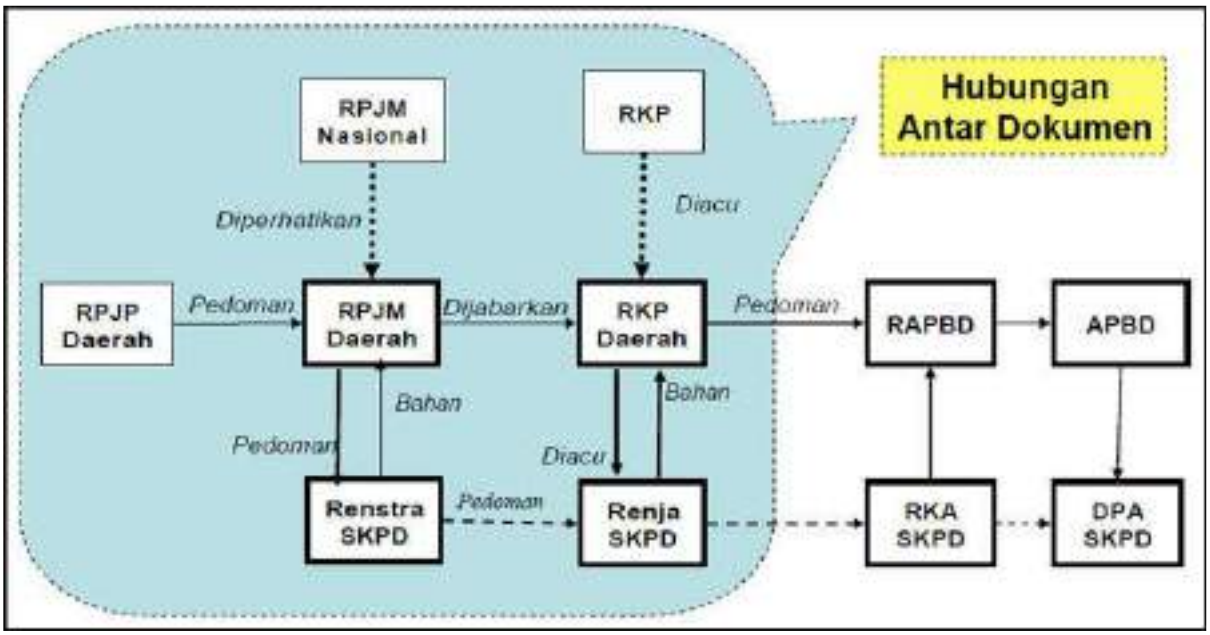
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan mengacu pada:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Kepmendagri Nomor 900.115.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
11. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
13. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
50. Peraturan Bupati Morowali Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali yaitu:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213) yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai bagian:
- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 memperhatikan hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024; dan
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali menurut DPPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp.16.054.390.346 dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 8 program,

13 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2023 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali menurut DPA 2023 adalah sebesar Rp. 17.688.508.540,00 yang terdiri dari 8 Program, 15 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 1 **(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2022 telah melaksanakan 8 (delapan) program utama yang tercantum dalam penetapan Kinerja. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 (n-2) dapat digambarkan pada penjelasan di bawah ini :

a. Dari 8 program, 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan realiasi dari target yang telah ditetapkan adalah sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,98%.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya

2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali yaitu :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Kasubag Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengatur kembali teknis pencairan dana sesuai aliran kas yang tersedia;
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.

Hasil prakiraan evaluasi capaian pelaksanaan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel

Kabupaten Morowali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (t-n)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Urusan					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
Bidang					**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**									
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2	**11**	**01**	**2.01**		***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***								
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0.00
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	**11**	**01**	**2.02**		***Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan Administrasi keuangan OPD***								
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	26	32	32	1.00	32	90	300.00

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28	428	24	26	1.08	26	480	1714.29
2	**11**	**01**	**2.03**		***Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah***								
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	12	0	0	0	0	0	0.00
2	**11**	**01**	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD***								
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	0	0	0	0	4	4	66.67
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	**11**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum***								
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	10	5	6	6	1.00	5	16	160.00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	33	12	20	20	1.00	6	38	115.15
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	22	12	12	12	1.00	12	36	163.64
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	18	100	100	1.00	14	132	1320

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**11**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah***								
2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	3	0	0	0	0	6	6	200
2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	0	38	38	0	0	38	1900
2	**11**	**02**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan***							0	
2	11	02	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	1.00	12	36	300.00
2	11	02	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	12	12	12	1.00	3	27	675.00
2	11	02	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	12	12	12	12	1.00	12	36	300.00
2	11	02	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12	12	12	12	1.00	12	36	300.00

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**11**	**02**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjaang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah***								
2	11	02	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	22	25	25	1.00	28	75	174.42
2	11	02	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	1	0	0	0	1	2	200.00
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**							0	
2	**11**	**02**	**2.01**		*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*								
2	11	02	2.01	0001	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH	1	0	0	0	0	0	0	0
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/ Kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH Kabupaten/ Kota	0	2	0	0	0	0	2	0
2	**11**	**02**	**2.02**		*Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota*									
2	11	02	2.01	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	0	1	1	1	0	0	2	0
2	11	02	2.01	0006	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1	0	0	0	0	1	1	100
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang di Kendalikan**								
2	**11**	**03**	**2.01**		***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan***								
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, udara dan laut	2	45	45	45	1.00	2	92	0
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi Investigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1	0	0	0	0	0	0	0
2	**11**	**03**	**2.02**		***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***								
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1	30	30	30	1.00	2	62	6200
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	2	1430	1430	1430	1.00	1	2861	143050
2	**11**	**03**	**2.03**		***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***								
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintan dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang dilaksanakan	1	0	0	0	0.00	0	0	0
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan Dampak di Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*	0	0	0	0	0	0	0	0

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**								
2	**11**	**04**	**2.01**		*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	*Persentase Ruang Terbuka Hijau(%)*								
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Jumlah Dokumen Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1	0	0	0	0.00	0	0	0
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	0	0	0.00	0	12	100
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkata Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0	0	0	0.00	0	0	0
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	0	0	0	0	0.00	0	0	0
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22.5	60	0	0	0.00	1	61	271.11
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Presentase Pengelolaan Limbah B3**								
2	**11**	**05**	**2.01**		***Penyimpanan Sementara Limbah B3***	***Persentase Perusahaan Yang Mengelola Limbah B3***								
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35	0	1	1	1.00	1	2	5.71
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	0	0	0	0	0	0	0

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai*	2	0	0	0	0	0	0	0
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi**								
2	**11**	**06**	**2.01**		*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi*								
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	0	0	100	100	1.00	1	101	0.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perubahan urusan Dinas Lingkungan Hidup Daerah dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar menjadi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar belum diikuti dengan perubahan SPM.

SPM Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Morowali Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali maka Dinas Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dengan fungsi yang melekat yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan fungsi lain terkait Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan oleh Bupati.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali. Keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022-2025
KABUPATEN MOROWALI

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
2	***Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***											
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	0	0	1	0	0	0	1	
4	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0	0	0	2	0	0	0	2	
5	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0	0	1	2	0	0	1	2	
6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	2	0	0	0	2	
7	***Persentase pemenuhan Administrasi keuangan OPD***											
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32	32	30	32	32	32	30	32	
9	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			24	26	28	29	24	26	28	29	
10	***Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah***											
11	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	0	0	0	0	0	0	
12	***Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD***											
13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0	4	6	11	0	4	6	11	

14	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan			0	0	0	5	0	0	0	5	
15	***Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum***											
16	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan			6	5	10	13	6	5	10	13	
17	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan			20	6	33	20	20	6	33	20	
18	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan			12	12	22	12	12	12	22	12	
19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	14	10	10	100	14	10	10	
20	***Jumlah Barang Milik Daerah***											
21	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan			0	6	3	3	0	6	3	3	
22	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			0	0	0	1	0	0	0	1	
23	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			38	0	2	2	38	0	2	2	
24	***Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***											
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	12	12	12	12	12	12	12	
26	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	3	4	4	12	3	4	4	
27	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
28	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
29	***Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah***											
30	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25	28	43	9	25	28	43	9	
31	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			0	1	1	1	0	1	1	1	
32	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											
33	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*											

34	Jumlah Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH			0	0	1	1	0	0	1	1	
35	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/ Kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH Kabupaten/ Kota			0	0	0	1	0	0	0	1	
36							**70**				**70**	
37	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun			0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun			1	0	0	1	1	0	0	1	
39	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun			0	1	1	1	0	1	1	1	
40	**Persentase Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang di Kendalikan**											
41	***Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan***											
42	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, udara dan laut			45	2	2	2	45	2	2	2	
43	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi Investigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan			0	0	1	1	0	0	1	1	
44	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***											
45	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			30	2	1	1	30	2	1	1	
46	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan			1430	1	2	2	1430	1	2	2	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan Internal

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 pada analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: (1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS); (2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB); (3) Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB); dan (4) Indikator yang datanya belum tersedia (N/A).

Terdapat 11 (sebelas) Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan analisis capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Morowali yang telah telah melaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) salah satunya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Salah satu permasalahan tidak tercapai target nasional dapat dilihat dari kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Kinerja pelayanan jika dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minuman (SPM) untuk Kabupaten/Kota, masih ditemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi, factor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan antara lain dapat dilihat pada tabel 2.3

Adapun faktor yang mempengaruhi secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pengolahan sampah dengan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace);
2. Terbatasnya tenaga yang mempunyai skill dibidang persampahan dan pengelolaan lingkungan;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana di TPA, pelayanan pemantauan dan kebersihan;
4. Belum berfungsinya laboratorium lingkungan;

Permasalahan Ekternal

1. Ketersediaan SDA yang telah diolah;
2. Beroperasinya kawasan industry nikel;
3. Tingkat kepedulian dan pemahaman terhadap lingkungan masih rendah;
4. Jumlah timbulan sampah yang meningkat berbanding lurus dengan jumlah penduduk;
5. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktifitas penambangan;
6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat bahwa pentingnya laporan terhadap permasalahan/kasus lingkungan yang terjadi.

Untuk mendukung implementasi strategi dan kebijakan umum , perlu dirumuskan strategi pendukung (*supporting strategies*) dengan menggunakan teknik analisis SWOT (***S****trength*-***W****eakness*-***O****pportunity*-***T****hreat*) sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
MATRIKS SWOT

MISI DAN PROGRAM		INTERNAL			
KDH DAN WAKIL KDH		**KEKUATAN/STRENGTHS (S)**		**KELEMAHAN/WEAKNESS (W)**	
	Program : 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; 3) Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B); 4) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH; 5) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 6) Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; 7) Pengelolaan Persampahan	S1	Adanya komitmen dari Misi KDH dan Wakil KDH	W1	Belum maksimalnya pengolahan sampah dengan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace)
		S2	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH	W2	Terbatasnya sarana dan prasarana di TPA, pelayanan pemantauan dan kebersihan;
		S3	Belum difungsikan laboratorium lingkungan;	W3	Terbatasnya tenaga yang mempunyai skill dibidang persampahan dan pengelolaan lingkungan
EKSTERNAL		S - O		W-O	
PELUANG/OPPORTUNITIES (O)					
O1	Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Sampah	SO1	Maksimalkan proses pemilahan sampah dengan sistem 4R	WO1	Tingkatkan pembinaan SDM yang ada dalam pengelolaan persampahan
O2	Sumber Daya Alam (SDA) yang telah dikelola	SO2	Optimalkan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan penambangan dan industri	WO2	Penyediaan dana untuk sarana dan prasarana pelayanan pemantauan
O3	Adanya Kawasan Industri Nikel	SO3	Proses legalitas laboratoriun	WO3	Mempersiapkan SDM laboratorium dan Peralatan Lab.
O4	Laboratorium Lingkungan				
ANCAMAN/THREATS (T)		S-T		W-T	
T1	Jumlah timbulan sampah yang meningkat berbanding lurus dengan jumlah penduduk	ST1	Optimalkan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang bebas dari sampah	WT1	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan/desa dengan pemerintah daerah untuk penanganan sampah
T2	Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktifitas penambangan	ST2	Menegakkan hukum lingkungan lewat pengawasan rutin	WT2	Menyediakan tenaga/pejabat pengawasan lingkungan hidup (PPLH)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan RKPD. RKPD Tahun 2023 berpedoman pada revisi RPJMD 2019-2023 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Morowali tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Pada Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Morowali ini, diperlukan :

1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Morowali

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30**	**7,712,606,851**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30**	**6,821,955,223**	
2	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**30**	**20,000,000**	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**30**	20,000,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLHD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLHD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLHD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLHD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLHD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLHD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20,000,000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLHD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLHD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan Administrasi keuangan OPD*		**4,070,698,140**	*Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Persentase pemenuhan Administrasi keuangan OPD*		5,004,723,074	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3,385,858,140	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	4,308,483,074	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLHD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28	684,840,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLHD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28	696,240,000	
7	*Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah*		*Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah*		-	*Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah*		*Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah*		-	
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	
9	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD*	**40.6**	**400,000,000**	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD*	**40.6**	104,040,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palu, Makassar, Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	350,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palu, Makassar, Jakarta dan Daerah Lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	104,040,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DLHD	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	5	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DLHD	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	0	-	
10	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	DLHD	*Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum*	**30%**	**1,064,417,342**	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	DLHD	*Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum*	**20%**	625,523,422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	5	253,008,711	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	10	144,015,340	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLHD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	20	471,408,631	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLHD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	33	143,608,830	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	12	40,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	22	55,615,252	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Morowali, Palu, Makassar, Jakarta dan Derah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Morowali, Palu, Makassar, Jakarta dan Derah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	282,284,000	
15	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Barang Milik Daerah*		**1,273,591,369**	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Barang Milik Daerah*		133,542,390	
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	DLHD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	3	90,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	DLHD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	3	78,159,500	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLHD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1,133,591,369	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLHD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	-	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLHD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLHD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	55,382,890	
25	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		**83,900,000**	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		56,990,037	
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3,600,000	
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	30,000,037	
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	12	40,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	12	22,490,000	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12	900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12	900,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjaang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah*		**800,000,000**	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjaang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah*		877,136,300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	750,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	589,440,500	
30	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLHD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	50,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLHD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	287,695,800	
31	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**30**	**1,175,000,000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	30	661,332,000	
32	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*		*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	**30**	**225,000,000**	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*		*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	30	341,382,000	
33	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH	1	150,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH	1	341,382,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen RPPLH diKabupaten/ Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota	1	75,000,000	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen RPPLH diKabupaten/ Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota	0	-	
34	*Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota*			**30**	**950,000,000**	*Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota*				319,950,000	
35	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1	100,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	0	-	
36	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1	400,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	0	-	
37	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1	450,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1	319,950,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang di Kendalikan**		**2,989,610,304**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang di Kendalikan**	1	394,000,140	
38	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		*Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan*		**2,290,000,000**	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		*Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan*		186,005,000	
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, udara dan laut	2	2,140,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, udara dan laut	2	110,029,000	
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi Investigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1	150,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi Investigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1	75,976,000	
41	*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		**199,610,304**	*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		138,009,140	
42	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1	149,610,304	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1	87,429,140	
43	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	2	50,000,000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	2	50,580,000	
44	*Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		*Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*		**500,000,000.00**	*Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*		*Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	0	69,986,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintan dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang dilaksanakan	1	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintan dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang dilaksanakan	1	69,986,000	
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan Dampak di Kabupaten/Kota	1	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan Dampak di Kabupaten/Kota	0	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Morowali	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*	1	350,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Morowali	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*	0	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**12 Ha**	**359,056,193**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	12 Ha	767,898,604	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		*Persentase Ruang Terbuka Hijau(%)*	**20%**	**50,000,000**	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*		*Persentase Ruang Terbuka Hijau(%)*	40%	767,898,604	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1	319,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1	319,200,000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Morowali	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12	50,000,000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Morowali	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12	370,440,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Meningkata Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5	50,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Meningkata Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	-	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	2	100,000,000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	0	-	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Morowali	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22.5	150,000,000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kab. Morowali	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22.5	78,258,604	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		**Presentase Pengelolaan Limbah B3**	**30**	**285,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Presentase Pengelolaan Limbah B3**	**30**	**283,475,830**	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3		*Persentase Perusahaan Yang Mengelola Limbah B3*	**30**	**285,000,000**	*Penyimpanan Sementara Limbah B3*		*Persentase Perusahaan Yang Mengelola Limbah B3*	30	184,435,830	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan	Kab. Morowali	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	35	235,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Kab. Morowali	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	35	133,995,830	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	50,000,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	50,440,000	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**150,000,000**	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5	99,040,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Morowali	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	50,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Morowali	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	49,980,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Kab. Morowali	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan*	2	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Kab. Morowali	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan*	2	49,060,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi**	**30**	**148,419,864**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi**	9	60,980,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi*	**30**	**148,419,864**	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi*		60,980,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Morowali	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	2	60,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Morowali	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	1	20,200,000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	5	58,419,864	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	0	-	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan Kapasitasnya	4	30,000,000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan Kapasitasnya	3	40,780,000	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		**Terwujudnya kearifan lokal di masyarakat terhadap PPLH**	**30**	**120,810,037**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		**Terwujudnya kearifan lokal di masyarakat terhadap PPLH**		-	
	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		Jumlah Hak MHA yang diakui dan Kearifan Lokal Serta Pengetahuan Tradisional yang Terkait PPLH		**60,810,037**	*Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH*		Jumlah Hak MHA yang diakui dan Kearifan Lokal Serta Pengetahuan Tradisional yang Terkait PPLH		-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	9	60,810,037	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH		*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		**60,000,000**	*Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH*		*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	14.3	-	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Morowali	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	2	60,000,000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Morowali	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	0	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup**		**90,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup**	1	55,292,000	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah		Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota		**90,000,000**	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah*		Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	1	55,292,000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2	20,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	0	-	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	40	50,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	0	-	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Morowali	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitas dan kompetensinya Terkait PPLH	10	20,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Morowali	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitas dan kompetensinya Terkait PPLH	10	55,292,000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan dan Lembaga Masyarakat**	**100**	**50,000,000**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan dan Lembaga Masyarakat**		94,502,000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup*	**1**	**50,000,000**	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup*		94,502,000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	1	50,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	1	94,502,000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan**	**30**	**120,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan**	2.20	160,063,000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		*Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan*	**30**	**120,000,000**	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*		*Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan*	1	160,063,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	30,000,000	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	26,200,000	
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Morowali	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3	60,000,000	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Morowali	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3	57,440,000	
	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Penerapan Sanksi Administratif yang dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat dan Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3	30,000,000	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Penerapan Sanksi Administratif yang dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat dan Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	76,423,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentasetimbulan sampah yang tertangani di Wilayah kota	**18**	**30,386,516,600**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		Persentasetimbulan sampah yang tertangani di Wilayah kota	4	28,681,681,957	
	Pengelolaan Sampah		Persentase Sampah Yang terkelola Berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada wilayah layanan	**2.20**	**30,211,516,600**	*Pengelolaan Sampah*		Persentase Sampah Yang terkelola Berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada wilayah layanan	17	28,630,571,957	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	450,000,000.00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Morowali	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	75,008,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan persampahan	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi Maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu Pada Jakstrada	17	3,300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan persampahan	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi Maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu Pada Jakstrada	1	698,436,782	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengunpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	3	3,400,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengunpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	72	16,187,277,589	
	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	1	450,000,000	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	1	152,180,000	
	Penanganan sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Kab. Morowali	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	2.50	12,000,000,000	Penanganan sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Kab. Morowali	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	2.20	11,436,711,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	Kab. Morowali	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	4,935.0	10,441,516,600	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	Kab. Morowali	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	0	-	
	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	724	170,000,000	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	1	80,958,086	
	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang diselenggarakan oleh swasta		*Persentase Pelaku Usaha Yang bergerak dalam pengelolan sampah*	**30**	**75,000,000**	*Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang diselenggarakan oleh swasta*		*Persentase Pelaku Usaha Yang bergerak dalam pengelolan sampah*		51,110,000	
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Kab. Morowali	Jumlah Rekomendasi dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang difasilitasi	5	75,000,000	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Kab. Morowali	Jumlah Rekomendasi dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang difasilitasi	5	51,110,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Oleh Pihak Swasta		*Persentase Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Sampah*	**30**	**100,000,000**	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Oleh Pihak Swasta*		*Persentase Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Sampah*		-	
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2	100,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	-	
Total					**43,437,019,849**					**37,981,180,754**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Morowali

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Sampah Yang Tertangani		
	Pengelolaan Sampah		Persentase Sampah Yang Terkelola berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		
1	Pengadaan Gerobak Motor	Desa Wata Kec. Bungku Barat			
2	Pengadaan Gerobak Motor	Desa Bahomoahi Kec. Bungku Timur			
3	Pembangunan Bak Sampah	Desa Nambo Kec. Bungku Timur			
4	Pembangunan TPST	Desa Jawi-jawi Kec. Bungku Selatan			
5	Pembangunan TPST	Desa Ululere Kec. Bungku Timur			

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Morowali

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Sampah Yang Tertangani		
	Pengelolaan Sampah		Persentase Sampah Yang Terkelola berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		
1	Pengadaan Motor Roda Tiga	Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah		2	
2	Pengadaan Kontener Sampah	Kel. Marsaoleh Kec. Bungku Tengah		1	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah juga disertai dengan uraian arah dan kebijakan dijabarkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	4	9
1	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Daerah	A
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Diinas Lingkungan Hidup Daerah	A
2	Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,54-81,00
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	69,89
		Indeks Kualitas Udara	87,00
		Indeks Kualitas Lahan	66,23
	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan Kota Bungku	Cakupan Pelayanan Persampahan Kota	31.867,59

Melihat dari Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Daerah Kabupaten Morowali Yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan untuk menciptakan Kabupaten Morowali bersih, asri dan nyaman;

2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dan dokumen lainnya;
4. Meningkatkan pelestarian dan konservasi wilayah rawan bencana dan sumber air;
5. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan penegakan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan sampah;
2. Meningkatnya kesedaran masyarakat akan dampak lingkungan;
3. Meningkat kesadaran pemrakarsa usaha / kegitan terhadap AMDAL;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat, pemrakarsa usaha / kegiatan dan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan;
6. Terjaganya kelestarian MHA dan kearifan local.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Daerah Kabupaten Morowali merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali yang direncanakan untuk periode Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan Dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	4	9
1	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Daerah	A
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Diinas Lingkungan Hidup Daerah	A
2	Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan berkurangnya Resiko Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,54-81,00
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	69.89
		Indeks Kualitas Udara	87,00
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	66.23

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Morowali

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Urusan					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
Bidang					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**30**	**7,712,606,851**			**30**	**8,039,933,899**
2	**11**	**01**	**2.01**		***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**30**	**20,000,000**			**30**	**20,000,000**
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLHD	1	5,000,000	APBD		1	5,000,000
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLHD	2	5,000,000	APBD		2	5,000,000
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLHD	2	5,000,000	APBD		2	5,000,000
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLHD	2	5,000,000	APBD		2	5,000,000
2	**11**	**01**	**2.02**		***Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan Administrasi keuangan OPD***			**4,070,698,140**			**100**	**4,206,698,140**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLHD	32	3,385,858,140	APBD		32	3,485,858,140
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLHD	28	684,840,000	APBD		29	720,840,000
2	**11**	**01**	**2.03**		***Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah***			-				-
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0.00	APBD		0	0.00
2	**11**	**01**	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD***		**40.6**	**400,000,000**			**34.38**	**405,000,000**
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palu, Makassar, Jakarta dan Daerah Lainnya	13	350,000,000	APBD		11	350,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	DLHD	5	50,000,000	APBD		5	55,000,000
2	**11**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum***	**DLHD**	**30%**	**1,064,417,342**			**30%**	**709,335,759**
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	DLHD	5	253,008,711	APBD		13	284,335,759

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Palu, Jakarta, Makassar	20	471,408,631	APBD		20	60,000,000
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	DLHD	12	40,000,000	APBD		12	45,000,000
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Morowali, Palu, Makassar, Jakarta dan Derah Lainnya	10	300,000,000	APBD		10	320,000,000
2	**11**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah***			**1,273,591,369**				**1,750,000,000**
2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	DLHD	3	90,000,000	APBD		3	100,000,000
2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DLHD	1	1,133,591,369	APBD		1	1,600,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DLHD	2	50,000,000	APBD		2	50,000,000
2	**11**	**02**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***			**83,900,000**				**98,900,000**
2	11	02	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHD	12	3,000,000	APBD		12	3,000,000
2	11	02	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHD	4	40,000,000	APBD		4	40,000,000
2	11	02	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	DLHD	12	40,000,000	APBD		12	55,000,000
2	11	02	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	DLHD	12	900,000	APBD		12	900,000
2	**11**	**02**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjaang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah***			**800,000,000**				**850,000,000**
2	11	02	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DLHD	9	750,000,000	APBD		9	800,000,000
2	11	02	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	DLHD	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**30**	**1,175,000,000**			**70**	**485,000,000**
2	**11**	**02**	**2.01**		***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***		**30**	**225,000,000**			**70**	**285,000,000**
2	11	02	2.01	0001	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH	Kab. Morowali	1	150,000,000	APBD		1	85,000,000
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH diKabupaten/ Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	1	75,000,000	APBD		1	200,000,000
2	**11**	**02**	**2.02**		***Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota***			**30**	**950,000,000**			**70**	**200,000,000**
2	11	02	2.01	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	Kab. Morowali	1	100,000,000	APBD		0	0
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	Kab. Morowali	1	400,000,000	APBD		1	100,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	02	2.01	0006	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	Kab. Morowali	1	450,000,000	APBD		1	100,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang di Kendalikan**			**2,989,610,304**				**2,455,405,977**
2	**11**	**03**	**2.01**		***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan***			**2,290,000,000**				**2,240,000,000**
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, udara dan laut		2	2,140,000,000	APBD		2	2,140,000,000
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi Investigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		1	150,000,000	APBD		1	100,000,000
2	**11**	**03**	**2.02**		***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***			**199,610,304**				**215,405,977**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		1	149,610,304	APBD		1	165,405,977
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan		2	50,000,000	APBD		2	50,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**11**	**03**	**2.03**		***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***			**500,000,000.00**				**500,000,000.00**
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintan dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang dilaksanakan	Kab. Morowali	1	75,000,000	APBD		1	75,000,000
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan Dampak di Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	1	75,000,000	APBD		1	75,000,000
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*	Kab. Morowali	1	350,000,000	APBD		1	350,000,000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**		**12 Ha**	**359,056,193**			**12 Ha**	**1,020,000,000**
2	**11**	**04**	**2.01**		***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	***Persentase Ruang Terbuka Hijau(%)***		**20%**	**50,000,000**			**40%**	**1,020,000,000**
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	Kab. Morowali	1	319,000,000	APBD		1	770,000,000
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	12	50,000,000	APBD		12	50,000,000
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkata Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	5	50,000,000	APBD		5	50,000,000
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Kab. Morowali	2	100,000,000	APBD		2	100,000,000
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	22.5	150,000,000	APBD		22.5	50,000,000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Presentase Pengelolaan Limbah B3**		**30**	**285,000,000**				**390,000,000**
2	**11**	**05**	**2.01**		***Penyimpanan Sementara Limbah B3***	***Persentase Perusahaan Yang Mengelola Limbah B3***		**30**	**285,000,000**				**240,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Morowali	35	235,000,000	APBD		55	180,000,000
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Morowali	10	50,000,000	APBD		10	60,000,000
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**150,000,000**				**150,000,000**
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Morowali	2	50,000,000	APBD		2	50,000,000
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya*	Kab. Morowali	2	100,000,000	APBD		2	100,000,000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi**		**30**	**148,419,864**			**30**	**223,612,546**
2	**11**	**06**	**2.01**		***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi***		**30**	**148,419,864**			**30**	**223,612,546**
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	Kab. Morowali	2	60,000,000	APBD		2	60,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Kab. Morowali	5	58,419,864	APBD		5	67,183,493
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Morowali	4	30,000,000	APBD		4	30,000,000
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Terwujudnya kearifan lokal di masyarakat terhadap PPLH**		**30**	**120,810,037**			**30**	**126,429,053**
2	**11**	**07**	**2.01**		***Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH***	**Jumlah Hak MHA yang diakui dan Kearifan Lokal Serta Pengetahuan Tradisional yang Terkait PPLH**			**60,810,037**				**66,429,053**
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Kab. Morowali	9	60,810,037	APBD		9	66,429,053
2	**11**	**07**	**2.02**		***Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH***	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***			**60,000,000**				**60,000,000**
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	Kab. Morowali	2	60,000,000	APBD		2	60,000,000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup**			**90,000,000**				**90,000,000**
2	**11**	**08**	**2.01**		***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota**			**90,000,000**				**90,000,000**
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Kab. Morowali	2	20,000,000	APBD		3	20,000,000
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Kab. Morowali	40	50,000,000	APBD		40	50,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitas dan kompetensinya Terkait PPLH	Kab. Morowali	10	20,000,000	APBD		10	20,000,000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan dan Lembaga Masyarakat**		**100**	**50,000,000**			**100**	**50,000,000**
2	**11**	**09**	**2.01**		***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup***		**1**	**50,000,000**			**1**	**50,000,000**
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	Kab. Morowali	1	50,000,000			1	50,000,000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan**		**30**	**120,000,000**			**70**	**120,000,000**
2	**11**	**10**	**2.01**		***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota***	***Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan***		**30**	**120,000,000**			**70**	**120,000,000**
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Morowali	10	30,000,000	APBD		10	30,000,000
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Morowali	3	60,000,000	APBD		3	60,000,000
2	11	10	2.01	0006	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Sanksi Administratif yang dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat dan Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	3	30,000,000	APBD		3	30,000,000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentasetimbulan sampah yang tertangani di Wilayah kota**		**18**	**30,386,516,600**			**20.7**	**35,419,516,600**
2	**11**	**11**	**2.01**		***Pengelolaan Sampah***	**Persentase Sampah Yang terkelola Berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada wilayah layanan**		**2.20**	**30,211,516,600**			**2.41**	**35,219,516,600**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Morowali	4	450,000,000.00	APBD		5	310,000,000.00
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi Maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu Pada Jakstrada	Kab. Morowali	17	3,300,000,000	APBD		17	5,300,000,000
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengunpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Kab. Morowali	3	3,400,000,000	APBD		3	18,500,000,000
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	Kab. Morowali	1	450,000,000	APBD		1	450,000,000
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Kab. Morowali	2.50	12,000,000,000	APBD		2.50	12,000,000,000
2	11	11	2.01	0017	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA, PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	Kab. Morowali	4,935.0	10,441,516,600	APBD		5,971.8	10,589,516,600
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Kab. Morowali	724	170,000,000	APBD		810	70,000,000
2	**11**	**11**	**2.02**		***Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang diselenggarakan oleh swasta***	***Persentase Pelaku Usaha Yang bergerak dalam pengelolan sampah***		**30**	**75,000,000**			**30**	**100,000,000**
2	11	11	2.02	0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang difasilitasi	Kab. Morowali	5	75,000,000	APBD		10	100,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**11**	**11**	**2.03**		***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Oleh Pihak Swasta***	***Persentase Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Sampah***		**30**	**100,000,000**			**30**	**100,000,000**
2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	2	100,000,000	APBD		2	100,000,000
Total									**43,437,019,849**				**48,419,898,075**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Morowali

OPD : Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**30**	**7,712,606,851**		
2	**11**	**01**	**2.01**		*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		30	20,000,000		
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLHD	1	5,000,000	APBD	
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLHD	2	5,000,000	APBD	
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLHD	2	5,000,000	APBD	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLHD	2	5,000,000	APBD	
2	**11**	**01**	**2.02**		*Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan Administrasi keuangan OPD*			4,070,698,140		
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLHD	32	3,385,858,140	APBD	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLHD	28	684,840,000	APBD	
2	**11**	**01**	**2.03**		*Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah*			-		
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0.00	APBD	
2	**11**	**01**	**2.05**		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang*		40.6	400,000,000		
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palu, Makassar, Jakarta dan Daerah Lainnya	13	350,000,000	APBD	
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan	DLHD	5	50,000,000	APBD	

1					2	3	4	5	6	7	8
2	**11**	**01**	**2.06**		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum*	DLHD	30%	1,064,417,342		
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	DLHD	5	253,008,711	APBD	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Palu, Jakarta, Makassar	20	471,408,631	APBD	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan		12	40,000,000	APBD	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Morowali, Palu, Makassar, Jakarta dan Derah Lainnya	10	300,000,000	APBD	
2	**11**	**01**	**2.07**		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah*			1,273,591,369		
2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan	DLHD	3	90,000,000	APBD	
2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DLHD	1	1,133,591,369	APBD	
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DLHD	2	50,000,000	APBD	
2	**11**	**02**	**2.08**		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*			83,900,000		
2	11	02	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHD	12	3,000,000	APBD	
2	11	02	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHD	4	40,000,000	APBD	
2	11	02	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	DLHD	12	40,000,000	APBD	
2	11	02	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	DLHD	12	900,000	APBD	
2	**11**	**02**	**2.09**		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjaang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah*			800,000,000		
2	11	02	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DLHD	9	750,000,000	APBD	

1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	02	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	DLHD	1	50,000,000	APBD	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		30	1,175,000,000		
2	**11**	**02**	**2.01**		*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*		30	225,000,000		
2	11	02	2.01	0001	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kesesuaian Pelaksanaan Dokumen RPPLH	Kab. Morowali	1	150,000,000	APBD	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH diKabupaten/ Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	1	75,000,000	APBD	
2	**11**	**02**	**2.02**		*Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota*			30	950,000,000		
2	11	02	2.01	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	Kab. Morowali	1	100,000,000	APBD	
2	11	02	2.02	0005	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	Kab. Morowali	1	400,000,000	APBD	
2	11	02	2.01	0006	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	Kab. Morowali	1	450,000,000	APBD	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang di Kendalikan**		1	2,989,610,304	APBD	
2	**11**	**03**	**2.01**		*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan*			2,290,000,000		
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, udara dan laut		2	2,140,000,000		
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi Investigasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		1	150,000,000	APBD	
2	**11**	**03**	**2.02**		*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*			199,610,304		

1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		1	149,610,304	APBD	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan		2	50,000,000	APBD	
2	**11**	**03**	**2.03**		*Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*			500,000,000.00		
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintan dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang dilaksanakan	Kab. Morowali	1	75,000,000	APBD	
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan Dampak di Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	1	75,000,000	APBD	
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan*	Kab. Morowali	1	350,000,000	APBD	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**		12 Ha	359,056,193		
2	11	04	2.01		*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	*Persentase Ruang Terbuka Hijau(%)*		40%	50,000,000		
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	Kab. Morowali	1	319,000,000	APBD	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	12	50,000,000	APBD	
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkata Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Morowali	5	50,000,000	APBD	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Kab. Morowali	2	100,000,000	APBD	
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	22.5	150,000,000	APBD	

1					2	3	4	5	6	7	8
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Presentase Pengelolaan Limbah B3**		30	285,000,000		
2	**11**	**05**	**2.01**		*Penyimpanan Sementara Limbah B3*	*Persentase Perusahaan Yang Mengelola Limbah B3*		30	285,000,000		
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Morowali	35	235,000,000	APBD	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Morowali	10	50,000,000	APBD	
2	**11**	**05**	**2.02**		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5	150,000,000		
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Morowali	2	50,000,000	APBD	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya*	Kab. Morowali	2	100,000,000	APBD	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi**		30	148,419,864		
2	**11**	**06**	**2.01**		*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi*		30	148,419,864		
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	Kab. Morowali	2	60,000,000	APBD	

1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Kab. Morowali	5	58,419,864	APBD	
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Morowali	4	30,000,000	APBD	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Terwujudnya kearifan lokal di masyarakat terhadap PPLH**		30	120,810,037		
2	**11**	**07**	**2.01**		*Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH*	Jumlah Hak MHA yang diakui dan Kearifan Lokal Serta Pengetahuan Tradisional yang Terkait PPLH			60,810,037		
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Kab. Morowali	9	60,810,037	APBD	
2	**11**	**07**	**2.02**		*Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH*	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*			60,000,000		
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	Kab. Morowali	2	60,000,000	APBD	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup**			90,000,000		
2	**11**	**08**	**2.01**		*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota			90,000,000		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Kab. Morowali	2	20,000,000	APBD	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Kab. Morowali	40	50,000,000	APBD	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitas dan kompetensinya Terkait PPLH	Kab. Morowali	10	20,000,000	APBD	

1					2	3	4	5	6	7	8
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan dan Lembaga Masyarakat**		100	50,000,000		
2	**11**	**09**	**2.01**		*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup*		1	50,000,000		
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	Kab. Morowali	1	50,000,000		
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan**		30	120,000,000		
2	**11**	**10**	**2.01**		*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	*Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan*		30	120,000,000		
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Morowali	10	30,000,000	APBD	
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Morowali	3	60,000,000	APBD	
2	11	10	2.01	0006	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Sanksi Administratif yang dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan yang Tidak Taat dan Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	3	30,000,000	APBD	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentasetimbulan sampah yang tertangani di Wilayah kota		**18**	**30,386,516,600**		
2	**11**	**11**	**2.01**		*Pengelolaan Sampah*	Persentase Sampah Yang terkelola Berdasarkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada wilayah layanan		**2.20**	**30,211,516,600**		
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Morowali	4	450,000,000.00	APBD	

1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi Maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu Pada Jakstrada	Kab. Morowali	17	3,300,000,000	APBD	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengunpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Kab. Morowali	3	3,400,000,000	APBD	
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	Kab. Morowali	1	450,000,000	APBD	
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Kab. Morowali	2.50	12,000,000,000	APBD	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan	Kab. Morowali	4,935.0	10,441,516,600	APBD	
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Kab. Morowali	724	170,000,000	APBD	
2	**11**	**11**	**2.02**		*Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang diselenggarakan oleh swasta*	*Persentase Pelaku Usaha Yang bergerak dalam pengelolan sampah*		30	75,000,000		

1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	11	2.02	0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang difasilitasi	Kab. Morowali	5	75,000,000	APBD	
2	**11**	**11**	**2.03**		*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan Oleh Pihak Swasta*	*Persentase Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Sampah*		30	100,000,000		
2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	2	100,000,000	APBD	
Total									**43,437,019,849**		

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Morowali. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2024 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Tahun 2024 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana

capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan Tugas fungsi pokok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja OPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Morowali 2024 khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Morowali menjadi lebih baik. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

a) Sinergi Regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang- undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali 2024 meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
b) Sinergi Perencanaan dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Tahun 2024 harus bersinergi dengan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehinggah terwujud sinkronisasai antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi.

Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali tidak mencukupi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program,

kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Tahun 2024

b. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja DLHD Tahun 2024.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good govermance.

Bungku, 8 Januari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Morowali



ELYTA GAWI, S.T., M.T
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19761222 200212 2 006

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

RENCANA KERJA TAHUN 2024
(RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nyalah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dapat menyusun Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan pedoman dalam pelakanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini diharapkan sebagai sarana sosialisasi lintas Dinas / Instansi maupun bagi *stakeholder* guna menunjang kebutuhan informasi program / pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan keluarga yang setinggi-tingginya, meningkatkan harkat, martabat dan kualitas kehidupannya dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan kesejahteraan pada umumnya.

Diharapkan saran dan kritik yang kontruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali.

Bungku, 21 Januari 2024
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali,

Dra. ROSNAWATI MUSTAPA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19650825 199002200

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 4

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 39

3.3 Program dan Kegiatan 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 51

BAB V PENUTUP 57

5.1 Kesimpulan 57

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 57

5.3 Rencana Tindak Lanjut 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023 dan Prakiraan 2024-2026**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali 24

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali 36

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran merupakan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (Satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah,Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal . Dari komponen vertikal, dapat digunakan sebagai acuan adalah Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Dari sisi horisontal, Rencana Kerjaini pun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali diawali dengan

proses penyampaian usulan masing-masing bidang, selanjunya dilakukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja. Setelah melalui berbagai masukan dilanjutlkan dengan proses penetapan sebagai dokumen Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali yang berpedoman pada berbagai peraturan terkait.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tahun sebelumnya, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 3 (Tiga) tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Morowali Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowalidalam kurun waktu 1 (Satu) tahun, memuat usulan program dan kegiatanyang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024, ditetapkan dengan maksud :

1. Memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi dari program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali.
2. Memuat rencana kinerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah :

1) Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024.

2) Sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun 2024.

3) Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai.

4) Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2024.

5) Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOROWALI;

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : P E N U T U P;

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian RENSTRA

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024 tidak lepas dari Rencana Startegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2024 – 2026 dalam mencapai Visi dan Misi RPJPD

Sebagai bentuk komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali terhadap tercapainya Misi RPJPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam menetapkan prioritas program/kegiatan sebagaimana apa yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untukmewujudkan penataan administrasi kependudukan digambarkan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah

Tahun 2004

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	**02**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Nilai SAKIP	BB (>70-80)	80	80			BB (>70-80)		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	90	75	75			90		
2	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja yang tersedia	20	20	20			320		
2	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	3	3	
2	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	0	-	76	NA	
2	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	0	-	76	NA	
2	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	0	-	76	NA	
2	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	0	-	76	NA	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	0	-	1	NA	
2	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	9	Na	Na	Na	12	NA	
2	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**54**	54	**54**	1,00	**60**	**54**	
2	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	24	24	24	1,00	24	24	
2	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31	30	30	30	1,00	31	30	
2	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1,00	1	1	
2	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Truwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	4	4	12	12	1,00	4	12	
2	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**9**	**9**	100	**100**	1,00	**9**	**100**	
2	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	NA	154	0	-	1	NA	
2	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	NA	33	0	-	1	NA	
2	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	NA	1	0	-	1	NA	
2	02	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	NA	1	0	-	1	NA	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	1	154	0	-	3	NA	
2	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	NA	154	0	-	1	NA	
2	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	NA	1	0	-	1	NA	
2	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**97**	**100**	100	**100**	100%	**97**	**100**	
2	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	2	NA	53	0	-	2	NA	
2	02	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55	NA	50	0	-	55	NA	
2	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	NA	Na	Na		6	NA	
2	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	1	NA	Na	Na		1	NA	
2	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	NA	Na	Na		24	NA	
2	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	NA	NA	Na		1	NA	
2	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4	9	NA	Na		4	NA	
2	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	4	NA	8	8	100%	4	8	
2	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Peragkat Daerah**	**Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10 Paket**	**100%**	100	**99**	99%	**10 Paket**	**99**	
2	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	3	3	0	-	3	NA	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 10	12	20	20	100%	2 10	20	
2	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	33 155 20	15	4	4	100%	33 155 20	4	
2	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	15426	15426	15219	99%	4	15219	
2	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54	16	37	37	100%	54	37	
2	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31	31	31	0	-	31	NA	
2	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Yang tersedia**	**87**	**NA**	59	0	-	**87**	NA	
2	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	2	**NA**	Na	0	Na	2	NA	
2	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1	**NA**	Na	0	Na	1	NA	
2	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Lemari)	Na	**NA**	59	59	100%	Na	59	
						Jumlah Pengadaan Mebel (Meja)	35	**NA**				35		
						Jumlah Pengadaan Mebel (Kursi)	35	**NA**				35		
2	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin	1	**NA**	Na	NA	NA	1	NA	
2	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung kantor	1	**NA**	1	0	-	1	NA	
2	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor	12	**NA**	12	0	-	12	NA	
2	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**91**	91%	**100**	**91**	
2	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	100	40	40	40	100%	100	40	
2	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah jasa Listrik yang dibayarkan	36000	11000	11000	11000	100%	36000	11000	
2	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan	38	2	22	22	100%	38	22	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
						Perlengkapan kantor								
2	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	12	2	8	8	100%	12	8	
2	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**152**	**NA**	1	**1**	100%	**152**	**1**	
2	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8	NA	1	0	0%	8	0	
2	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1	NA	1	0	0%	1	0	
2	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Lemari)	20	NA	Na	Na	Na	20	0	
						Jumlah Pemeliharaan Mebel (Meja)	19	NA	15	0	0%	19	0	
						Jumlah Pemeliharaan Mebel (Kursi)	101	NA	Na	Na	Na	101	0	
2	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemelihaaan peralatan dan mesin lainnya	2	NA	Na	Na	Na	2	0	
2	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	1	NA	1	1	100%	1	1	
2	**12**	**02**			**PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	100%	**1.00**	**1.00**	
						Cakupan penerbitan KTP-el	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	
						Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**17.241**	**214.403**	100	**99**	**99%**	**17.241**	**99**	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	233	2262	NA	NA	**Na**	233	NA	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	3.824	7.023	2155	2155	**100%**	3.824	2155	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftran Penduduk	56,815	62.348	7.654	0	**0%**	56,815	0	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	72	20783	62.840	0	**0%**	72	0	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.820	21783	20946	0	**0%**	8.820	0	
2	12	02	2.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan	1.101	1978	20946	0	**0%**	1.101	0	
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.060	7276	20946	0	**0%**	3.060	0	
2	12	02	2,01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	6	7276	7169	0	**0%**	6	0	
2	12	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan penerbitan KTP-el**	**12**	26	7169	7169	**100%**	**12**	7169	
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	6	28.437	26	0	**0%**	6	0	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir,dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	6	550	28.437	0	**0%**	6	0	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase anak memiliki KIA per satuan anak**	**100**	26	750	0	**0%**	**100**	0	
2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	26	26	0	**0%**	5	0	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	133	NA	26	0	**0%**	133	0	
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	36	36	5	0	**0%**	36	0	
2	12	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	3	3	3	0	**0%**	3	0	
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	10	10	10	0	**0%**	10	0	
2	12	02	2.03	06	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	12	12	12	0	**0%**	12	0	
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	15	15	15	0	**0%**	15	0	
2	12	02	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	178.935	178.935	178.935	0	**0%**	178.935	0	
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kelurahan dan desa sasaran pembinaan dan pengawasan**	**100**	**100**	**100**	0	**0%**	**100**	0	
2	12	02	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8	8	8	0	**0%**	8	0	
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	133	133	133	0	**0%**	133	0	
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan bimbingan tekhnis terkait pendaftaran penduduk	5	5	5	0	**0%**	5	0	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	1,00	1,00	1,00		**100,00**	1,00		
						Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	**0,89**	**0,89**	**0,89**	**0,89**	**100,00**	**0,89**	**0,89**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
						Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	**100%**	**100%**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	**49.506**	**49.506**	**49.506**	0		**49.506**	0	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	24.711	403	24.711	0		24.711	0	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	72	67	72	0		72	0	
2	12	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil	24.711	Na	24.711	0		24.711	0	
2	12	03	2.01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	8	168	8	0		8	0	
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	4	Na	4	0		4	0	
2	**12**	**03**	**2.02**		**KEGIATAN : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Rasio bayi ber-Akta Kelahiran**	**83**	1,00	1,00	1,00		**83**	1,00	
2	12	03	2.02	01	Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Jumlah Laporan Hasil Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	4	15.972	4	0		4	0	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	12	03	2.02	02	koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	4	5	4	0		4	0	
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	4	37	4	0		4	0	
2	12	03	2.02	04	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	8	8	8	0		8	0	
2	12	03	2.02	**06**	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitas pencatatan sipil	8	8	8	8		8	8	
2	12	03	2.02	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatn Sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	10	5	10	10		10	10	
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	10	37	37	37		10	37	
2	12	03	2.02	09	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	Jumlah Dokumen hasil Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	12	12	12	0		12	0	
2	12	03	2.02	10	Sub Keg : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan sipil	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang menerima komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencatatan sipil	15	15	15	0		15	0	
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	8	8	8	0		8	0	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran**	**47**	100	100	0		**47**	0	
2	12	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	5	NA	NA	0		5	0	
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	37	26	26	0		37	0	
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan tekhnis terkait pencatatan sipil	5	NA	2	0		5	0	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**555**	**555**	**555**	**555**		**555**	**555**	
						Penerapan KTP-el berbasis NIK								
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**97**	9	9	**9**		**97**	**9**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang dioleh dan disajikan	23	20	2	2		23	2	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	10	5	5	0		10	0	
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	64	30.189	25.650	0		64	0	
2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP-el berbasis NIK**	**5**	30.189	18.868	18.868		**5**	18.868	
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5	1	9	9		5	9	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah lembaga pemerintah/non pemerintah memiliki hak akses data kependudukan**	**253**	1	11	**11**		**253**	**11**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil loordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	NA	NA	0		4	0	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10	5	5	0		10	0	
	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10	133	NA	0		10	0	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	133	NA	NA	0		133	0	
2	12	04	2.03	06	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	2	NA	3	0		2	0	
2	12	04	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	30	NA	3	0		30	0	
2	12	04	2,03	08	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	64	64	2	2		64	2	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Tenaga Teknis Ahli PIAK**	**8**	**8**	**8**			**8**		
2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pemngelolaan informasi administrasi kependudukan	4	4	4	0		4	0	
2	12	04	2,04	02	Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	Jumlah dokumen Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	1	1	1	0		1	0	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3	3	3	0		3	0	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase data kependudukan**	**3.265**	2	2	**2**		**3.265**	**2**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Cakupan penyusunan Profil Kependudukan**	**65**	2	2	**2**		**65**	**2**	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	64	1	1	1		64	1	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.	1	1	1	1		1	1	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari:

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
3. Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah
4. Rasio Bayi Berakte Kelahiran
5. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
6. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi.
7. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Nasional Berbasis NIK.

Selain,Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tersebut diatas, ***ditetapkan pula 2 (Dua) Indikator dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2024 Kabupaten Morowali***, yakni:

1. Nilai SAKIP Dinas, dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	9	10	15	16	
1	Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk	√	√	1,00	1,00	0,99	1,00	1,03	1,00	1,00	1,00	
2	Rasio bayi berakte kelahiran	√	√	1,00	1,00	0,91	1,00	1,03	1,00	0,89	0,89	
3	Rasio pasangan berakte Nikah	√	√	1,00	0,98	0,98	0,98	1,03	0,980	1,00	1,00	
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	√	√	100,00	100,00	100,00	100,00	1,03	100,00	1,00	1,00	
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	√	√	100,00	100,00	100,00	100,00	1,03	100,00	1,00	1,00	
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	√	√	100,00	100,00	100,00	100,00	103	100,00	100,00	1,00	
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	√	√	100,00	100,00	100,00	100,00	103	100,00	100,00	1,00	
8	Rasio Anak memiliki KIA persatuan anak	√	√	1,00	1,00	1,37	85	103	100,00	100,00	1,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel 2.2 diatas tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami peningkatan capaian kinerja pelayanan sesuai Indikator Sasaranpada angka capaian Indikator Kinerja Kunci dari tahun ke tahun, walaupun hal kritis terkait dengan pelayanan menjadi permasalahan dan hambatan sekaligus tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, seperti : terbatasnya kapasitas sarana/prasarana, Sumber Daya Aparatur dan akses pelayanan. Hal kritis yang menjadi permasalahan dan hambatan sekaligus tantangan tersebut diatas, memberi dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali serta capaian program nasional bila tidak menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kebijakan pengalokasian anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun dari Bupati dan Wakil Bupati Morowali merupakan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

Formulasi isu-isu penting dari uraian diatas dijadikan dasar perumusan program dan kegiatan prioritas perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kapasitas Sumber Daya Aparatur pelayanan.
- Ketersediaan akses pelayanan.

Perumusan isu strategis tersebut dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengoptimalkan kineja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiluntuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerahmengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahun dalam dokumen Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tahun 2024 – 2026, kemudian dilakukan proses analisis kebutuhan program dan kegiatan.

Proses analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui urgensi program dan kegiatan dengan dinamika sosial pada saat pelaksanaannya. Hasil dari analisis kebutuhan pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah terdapat program yang kegiatannya ditambah, program yang kegiatannya diganti, program yang kegiatannya tetap sub kegiatannya ditambah dan program yang kegiatannya tetap sub kegiatannya diganti dengan sub kegiatan baru yang relevan dan kontekstual. Hal lain, adanya kegiatan baru dalam program yang sama dengan rancangan awal sebagai skala prioritas. Selain itu pula pagu anggaran yang diberikan disesuaikan besarannya pada setiap program dan kegiatan.

Besaran anggaran untuk setiap program dan kegiatan prioritas didasarkan pada target kinerja yang ingi dicapai.

Berikut ini adalah review terhadap rancangan awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD), digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									**7.656.898.996**
Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			BB (>70-80)	**7.681.898.997**				BB (>70-80)	
Indeks Kepuasan Masyarakat									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai SAKIP	BB (>70-80)		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		Nilai SAKIP	BB (>70-80)	**6.526.524.653**
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	**6.526.524.653**			Indeks Kepuasan Masyarakat	90	
				6.526.524.653					
				0					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dkcs**	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja yang tersedia	20	13.450.000	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dkcs**	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja yang tersedia	20	**11.400.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS dan BAPPEDA**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS dan BAPPEDA**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	5.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	**(Makn**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1	5.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	**(Makn**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1	0

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dkcs**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**3.588.927.690**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dkcs**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**3.599.290.442**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Dkcs**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2.883.607.690	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Dkcs**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2.941.570.442	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Dkcs**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31	703.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Dkcs**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31	657.720.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**(Makn minum/ATK) DKCS**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**(Makn minum/ATK) DKCS**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Truwulanan/Semesteran SKPD	**(Makn minum/ATK) DKCS**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	4	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Truwulanan/Semesteran SKPD	**(Makn minum/ATK) DKCS**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	4	0	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Dkcs**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**9**	**7.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Dkcs**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**9**	0	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	**ATK/Dkcs**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	**ATK/Dkcs**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**Jaldis/Dkcs**	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**Jaldis/Dkcs**	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	1.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	0	
Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	**Label Aset/ Dkcs**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.000.000	Sub Keg : Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	**Label Aset/ Dkcs**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	
Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	**ATK/Dkcs**	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah	**Dkcs**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**97**	**141.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah**	**Dkcs**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**97**	**159.934.211**	
Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	**Alat Finger Print/Dkcs**	Jumlah unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	2	2.500.000	Sub Keg : Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	**Alat Finger Print/Dkcs**	Jumlah unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	2	0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Bahan & jahit**	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Bahan & jahit**	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55	45.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**ATK/Dkcs**	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	3.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**ATK/Dkcs**	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	0	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	**ATK/Dkcs**	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	1	1.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	**ATK/Dkcs**	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	1	39.934.211	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Makan Minum/Dkcs**	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	1.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Makan Minum/Dkcs**	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Diklat Struktural/Luar daerah**	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Diklat Struktural/Luar daerah**	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	**Sos UU Kepeg/Luar Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4	0	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	**Sos UU Kepeg/Luar Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	**Bimtek Kepeg/Luar daerah**	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	4	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	**Bimtek Kepeg/Luar daerah**	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	4	75.000.000	
Administrasi Umum Peragkat Daerah		**Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**363**	**1.385.746.963**	**Administrasi Umum Peragkat Daerah**		**Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**363**	**1.735.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	**DKCS**	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	**DKCS**	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	**Alat Pelynan UPT Menkep, Busel, Busir**	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	**Alat Pelynan UPT Menkep, Busel, Busir**	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2	760.000.000	
	Dkcs		10	82.121.963		**Dkcs**		10	85.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Dkcs**	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	33	78.625.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Dkcs**	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	33	75.000.000	
	Dkcs		155	300.000.000		**Dkcs**		155	200.000.000	
	Dkcs		20	10.000.000		**Dkcs**		20	15.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	**Dkcs**	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	**Dkcs**	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Dkcs**	Jumlah Laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Dkcs**	Jumlah Laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54	25.000.000	
	Luar Daerah		51	375.000.000		**Luar Daerah**		51	400.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Dkcs**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Dkcs**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31	100.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Kendaraan Dinas Yang tersedia**	**87**	**1.117.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Kendaraan Dinas Yang tersedia**	**87**	**833.000.000**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Dkcs**	Jumlah Kendaraan Dinas	2	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Dkcs**	Jumlah Kendaraan Dinas	2	50.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dkcs**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dkcs**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1	500.000.000	
Pengadaan Mebel	**Dkcs**	Jumlah Pengadaan Mebel (Lemari)	Na	Na	Pengadaan Mebel	**Dkcs**	Jumlah Pengadaan Mebel (Lemari)	Na	Na	
	Dkcs	Jumlah Pengadaan Mebel (Meja)	35	42.000.000		**Dkcs**	Jumlah Pengadaan Mebel (Meja)	35	63.000.000	
	Dkcs	Jumlah Pengadaan Mebel (Kursi)	35	50.000.000		**Dkcs**	Jumlah Pengadaan Mebel (Kursi)	35	25.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Dkcs**	Jumlah Peralatan Mesin	1	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Dkcs**	Jumlah Peralatan Mesin	1	75.000.000	
Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	**UPT Menkep, Busel, Busir**	Jumlah Bangunan Gedung kantor	1	300.000.000	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	**UPT Menkep, Busel, Busir**	Jumlah Bangunan Gedung kantor	1		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	**Sapras UPT Menkep, Busel, Busir**	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor	12	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	**Sapras UPT Menkep, Busel, Busir**	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor	12	120.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**85.900.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**85.900.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Dkcs**	Jumlah Materai	100	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Dkcs**	Jumlah Materai	100	1.200.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	**Dkcs**	Jumlah jasa Listrik yang dibayarkan	36000	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	**Dkcs**	Jumlah jasa Listrik yang dibayarkan	36000	55.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Dkcs**	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	38	28.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Dkcs**	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	38	28.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Dkcs**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	12	1.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Dkcs**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	12	1.200.000	
Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**152**	**187.000.000**	**Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**152**	**102.000.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8	30.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1	12.000.000	
Pemeliharaan Mebel	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Lemari)	20	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Lemari)	20	0	
	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Meja)	19	7.000.000		DKCS	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Meja)	19	0	
	DKCS	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Kursi)	101	15.000.000		DKCS	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Kursi)	101	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKCS	Jumlah Pemelihaaan peralatan dan mesin lainnya	2	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKCS	Jumlah Pemelihaaan peralatan dan mesin lainnya	2	10.000.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dkcs	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	1	100.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dkcs	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	1	50.000.000	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**1.00**	**576.738.058**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**1.00**	**576.738.058**	
		Cakupan penerbitan KTP-el	**100%**				**Cakupan penerbitan KTP-el**	**100%**		
		Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	**100%**				**Persentase anak memiliki KIA per satuan anak**	**100%**		
KEGIATAN : Pelayanan Pendaftaran Penduduk		**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**17.241**	**265.500.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**17.241**	**236.738.058**	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah DUK Non Permenan 661, Pendataan 133 Desa/Kel & ATK Formulir	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	233	23.000.000	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah DUK Non Permenan 661, Pendataan 133 Desa/Kel & ATK Formulir	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	233	0	
Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Wajib KTP-el 8638, Anak Belum Ber-KIA 2798, Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK/Formulir Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	3.824	150.000.000	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Wajib KTP-el 8638, Anak Belum Ber-KIA 2798, Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK/Formulir Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	3.824	50.000.000	
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Update Data Ekstra Time/Formuli DKCS	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftran Penduduk	56,815	10.000.000	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Update Data Ekstra Time/Formuli DKCS	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftran Penduduk	56,815	0	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	72	50.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	72	156.738.058	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa kependudukan	Formulir/ATK, DKCS	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.820		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa kependudukan	Formulir/ATK, DKCS	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.820	0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa kependudukan	Formulir/ATK, DKCS	Jumlah Laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan	1.101	0	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa kependudukan	Formulir/ATK, DKCS	Jumlah Laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan	1.101	0	
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK Dokumen /Formulir	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.060	30.000.000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK Dokumen /Formulir	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.060	30.000.000	
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	DKCS	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	6	2.500.000	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	DKCS	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	6	0	
KEGIATAN : Penataan Pendaftaran Penduduk	**DKCS**	**Cakupan penerbitan KTP-el**	**12**	**152.000.000**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**DKCS**	**Cakupan penerbitan KTP-el**	**12**	**200.000.000**	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang	6	2.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang	6	0	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir,dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	DKCS	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	6	150.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir,dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	DKCS	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	6	200.000.000	
KEGIATAN : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**Persentase anak memiliki KIA per satuan anak**	**100**	**104.238.058**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**Persentase anak memiliki KIA per satuan anak**	**100**	**105.000.000**	
Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	0	Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	0	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	133	50.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	133	50.000.000	
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	36	0	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	36	0	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	3	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	3	0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10 Kec	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	10	54.238.058	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10 Kec	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	10	55.000.000	
Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	10 PKS PKK Desa & 2 PKS PT	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	12	0	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	10 PKS PKK Desa & 2 PKS PT	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	12	0	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	10 PKS DW Desa, 5 PKS Lembaga Keagamaan	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	15	0	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	10 PKS DW Desa, 5 PKS Lembaga Keagamaan	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	15	0	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	178.935	0	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	178.935	0	
KEGIATAN : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**Persentase kelurahan dan desa sasaran pembinaan dan pengawasan**	**100**	**55.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**Persentase kelurahan dan desa sasaran pembinaan dan pengawasan**	**100**	**35.000.000**	
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran	8	5.000.000	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DKCS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran	8	0	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	133 Desa/ Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	133	0	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	133 Desa/ Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	133	0	
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Palu & Jakarta	Jumlah laporan bimbingan tekhnis terkait pendaftaran penduduk	5	50.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Palu & Jakarta	Jumlah laporan bimbingan tekhnis terkait pendaftaran penduduk	5	35.000.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	1,00	**252.878.060,31**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	1,00	**252.878.060**	
		Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	**0,89**				**Rasio bayi ber-Akta Kelahiran**	**0,89**		
		Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	**100%**				**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran**	**100%**		
Pelayanan Pencatatan Sipil		**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	**49.506**	**75.000.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	**49.506**	**147.878.060**	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	(Formulir & ATK), DKCS	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	24.711	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	(Formulir & ATK), DKCS	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	24.711	0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	72	75.000.000	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	72	147.878.060	
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	(Makan/Minum & ATK), DKCS	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil	24.711	0	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	(Makan/Minum & ATK), DKCS	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil	24.711	0	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	DKCS	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	8	0	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	DKCS	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	8	0	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	4	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	4	0	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		**Rasio bayi ber-Akta Kelahiran**	**83**	**115.878.060**	**KEGIATAN : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Rasio bayi ber-Akta Kelahiran**	**83**	**70.000.000**	
Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	DKCS	Jumlah Laporan Hasil Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	4	0	Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	DKCS	Jumlah Laporan Hasil Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	4	0	
Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	DKCS	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	4	5.878.060	koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	DKCS	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	4	0	
Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	DKCS	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	4	0	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	DKCS	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	4	0	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	8	20.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	8	20.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	DKCS	Jumlah laporan hasil fasilitas pencatatan sipil	8	0	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	DKCS	Jumlah laporan hasil fasilitas pencatatan sipil	8	0	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatn Sipil	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	10	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatn Sipil	10 Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	10	0	
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	10	50.000.000	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	10 Kecamatan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	10	50.000.000	
Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	10 PKS PKK Desa & 2 PKS PT	Jumlah Dokumen hasil Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	12	40.000.000	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	10 PKS PKK Desa & 2 PKS PT	Jumlah Dokumen hasil Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	12	0	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan sipil	10 PKS DW Desa, 5 PKS Lembaga Keagamaan	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang menerima komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencatatan sipil	15	0	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan sipil	10 PKS DW Desa, 5 PKS Lembaga Keagamaan	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang menerima komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencatatan sipil	15	0	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	DKCS	Jumlah laporan hasil Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	8	0	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	DKCS	Jumlah laporan hasil Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	8	0	
KEGIATAN : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran**	**47**	**62.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran**	**47**	**35.000.000**	
Sub Keg : Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	DKCS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	5	2.000.000	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	DKCS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	5	0	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	133 Desa/ Kelurahan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	37	30.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	133 Desa/ Kelurahan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	37	0	
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Palu & Jakarta	Jumlah laporan hasil bimbingan tekhnis terkait pencatatan sipil	5	30.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Palu & Jakarta	Jumlah laporan hasil bimbingan tekhnis terkait pencatatan sipil	5	35.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi** **Penerapan KTP-el berbasis NIK**	**555**	**191.659.083,94**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi** **Penerapan KTP-el berbasis NIK**	**555**	**166.659.083**	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**97**	**60.000.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**97**	**76.659.083**	
Pengolahan dan Penyajian Database Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen data kependudukan yang dioleh dan	23	30.000.000	Pengolahan dan Penyajian Database Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen data kependudukan yang dioleh dan	23	0	
Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	10	30.000.000	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	10	76.659.083	
Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	DKCS	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	64	0	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	DKCS	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	64	0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**Penerapan KTP-el berbasis NIK**	**5**	0	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Penerapan KTP-el berbasis NIK**	**5**	0	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5	0	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5	0	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**Jumlah lembaga pemerintah/non pemerintah memiliki hak akses data kependudukan**	**253**	**85.999.999**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah lembaga pemerintah/non pemerintah memiliki hak akses data kependudukan**	**253**	**70.000.000**	
Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DKCS	Jumlah laporan hasil loordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	0	Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DKCS	Jumlah laporan hasil loordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	0	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Palu & Jakarta	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10	25.999.999	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Palu & Jakarta	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10	0	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10	25.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10	60.000.000	
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan	Desa/Kel	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	133	25.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan	Desa/Kel	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	133	0	
Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Kecamatan	Jumlah dokumen kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	2	0	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Kecamatan	Jumlah dokumen kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	2	0	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	10 Kec	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	30	0	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	10 Kec	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	30	0	
Sub Keg :Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	DKCS	jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	64	10.000.000	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	DKCS	jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	64	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET / LOKASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**Jumlah Tenaga Teknis Ahli PIAK**	**8**	**45.659.084**	**Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah Tenaga Teknis Ahli PIAK**	**8**	**20.000.000**	
Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	133 Desa/Kel	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pemngelolaan informasi administrasi kependudukan	4	20.000.000	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	133 Desa/Kel	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pemngelolaan informasi administrasi kependudukan	4	20.000.000	
Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data	1	0	Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	DKCS	Jumlah dokumen Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data	1	0	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Palu & Jakarta	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3	25.659.084	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Palu & Jakarta	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DKCS	**Persentase data kependudukan**	**3.265**	**134.099.141,59**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	DKCS	**Persentase data kependudukan**	**3.265**	**134.099.141,59**	
Penysusunan Profil Kependudukan	DKCS	**Cakupan penyusunan Profil Kependudukan**	**65**	**134.099.141,59**	**Penysusunan Profil Kependudukan**	DKCS	**Cakupan penyusunan Profil Kependudukan**	**65**	**134.099.141,59**	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	DKCS	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	64	134.099.142	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	DKCS	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	64	134.099.142	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DKCS	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.	1		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DKCS	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.	1		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat Musrembang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan pertemuan Forum SKPD sebelum dilakukannya Musrembang Kabupaten, adanya usulan dari para pemangku kepentingan bersifat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam bentuk pembentukkan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tingkat kecamatan. Usulan dari para pemangku kepentingan ini, sangat sesuai dengan isu-isu strategis dan kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kesesuaian tersebut dapat lihat dari aspek pelaksanaan pelayanan publik dokumen kependudukan yang tersentralisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan belum tersedianya akses layanan pada tingkat kecamatan, sehingga birokasi pelayanan cukup menyulitkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas telahan usulan program dan kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tahun 2024 , tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Besaran/ Volume	Catatan
-	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyesuaikan pembangunan daerahnya dalam rangka mencapai sasaran nasional. Kabupaten Morowali telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPJPN 2005-2025 dan masing-masing Perangkat Daerahdilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali khususnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowalitelah menyusun Rencana Startegis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 yang mengelaborasi arah kebijakan nasional pada RPJPN 2005 – 2025, RENSTRA Kementerian Dalam Negeri RI dan RPD 2024-2026 Kabupaten Morowali. Sehinnga dengan demikian, kebijakan pembangunan tingkat nasional setiap tahun menjadi arah kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Telaahan Arah Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Prioritas				
RPJPN 2005-2025	RENSTRA KEMENDAGRI	RPD 2024-2026	Rencana Strategis Dukcapil	Rencana Kerja Dukcapil
		Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan publik	Nilai SAKIP
Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk			Indeks Kepuasan Masyarakat
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk			
Rasio anak memiliki KIA	Rasio anak memiliki KIA			
Rasio Bayi berakte kelahiran	Rasio Bayi berakte kelahiran			
Rasio Pasangan berakte Nikah	Rasio Pasangan berakte Nikah			
Cakupan penerbitan akta Kelahiran	Cakupan penerbitan akta Kelahiran			
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi			
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.			

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali sebagai salah satu Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan pemerintahan dalam urusan kependudukan dan pencatatan Sipil, berupaya sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali bertanggungjawab terhadap suksesnya pelaksanaan amanat pada

Adapun Tujuan Renstra , Sasaran Renstra yang sesuai dengan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Target Kinerja 2024
Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan	Nilai SAKIP
		Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program ditetapkan satu atau beberapa kegiatan,bahkan sub kegiatan dengan mempertimbangkan factor-faktor, sebagaiamana tabel dibawah ini:

1. Faktot-aktor pertimbangan rumusan program dan kegiatan

Program	Kegiatan	Faktor – Factor Pertmbangan					
		Pencapaian Visi & Misi	Pencapain SDGs	Pengentasan Kemiskinan	Pencapaian NSPK & SPM	Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah	Pengembangan Daerah Terisolir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Pelayanan Publik yang cepat dan Prima.	Pengndalian pertumbuhan penduduk	Terhindarnya masyarakat dari ekonomi biaya tinggi dalam pelayanan public	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	Pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis data kependudukan	Mendekatkan akses layanan public
	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						
	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah						
	KEGIATAN: Administrasi Umum Peragkat Daerah						
	KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	KEGIATAN : Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
	KEGIATAN : Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
	KEGIATAN : Penataan Pendaftaran Penduduk						
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						
	KEGIATAN : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						

PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
	KEGIATAN : Pelayanan Pencatatan Sipil						
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
	KEGIATAN : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
	KEGIATAN : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
	KEGIATAN : Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	KEGIATAN : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
	KEGIATAN : Penysusunan Profil Kependudukan						

Tabel .3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
Kabupaten Morowali dan Prakiraan Maju Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
											2024		2025		2026					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												**7.681.898.997**		**8.039.193.122**		**8.090.770.111**				
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik																	BB/80			
	Indikator Sasaran							*Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*		B (>60-70)	BB (>70-80)		A (>80-90)		A (>80-90)		BB/80			
								Indeks Kepuasan Masyarakat		85	90		95		95					
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	**2**	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Nilai SAKIP	B (>60-70)	BB (>70-80)	**6.526.524.653**	A (>80-90)	**6.830.080.963**	A (>80-90)	**6.873.900.661**	80	20.230.506.277,47		
		2	**02**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja yang tersedia	20 Dok	20	12.450.000	20	13.450.000	20	13.450.000	60	39.350.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	9	7.500.000	DKCS - Kesekretariatan	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS dan BAPPEDA**
		2	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1	500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	2.500.000	DKCS - Kesekretariatan	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**
		2	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1	500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	2.500.000	DKCS - Kesekretariatan	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**
		2	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**
		2	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**
		2	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	5.750.000	1	5.750.000	1	5.750.000	3	17.250.000	DKCS - Kesekretariatan	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS dan INSPEKTORAT**
		2	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	36	3.600.000	DKCS - Kesekretariatan	**Rapat Evaluasi / Dkcs**
		2	**02**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**60 Laporan**	**60**	**3.588.927.690**	**60**	**3.591.927.690**	**60**	**3.591.927.690**	**180**	**10.772.783.070**	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	24	2.883.607.690	24	2.883.607.690	24	2.883.607.690	72	8.650.823.070	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Orang	31	703.320.000	31	703.320.000	31	703.320.000	93	2.109.960.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	3	6.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**(Makn minum/ATK) DKCS**

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	**02**	**01**	**2.03**				**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**9 Laporan**	**9**	**7.000.000**	**9**	**7.000.000**	**9**	**7.000.000**	**27**	**21.000.000**	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.03	01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**ATK/Dkcs**
		2	02	01	2.03	02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**ATK/Dkcs**
		2	02	01	2.03	03			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Jaldis/Dkcs**
		2	02	01	2,03	04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Na	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**ATK/Dkcs**
		2	02	01	2.03	05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	9	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**ATK/Dkcs**
		2	02	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Label Aset/ Dkcs**
		2	02	01	2.03	07			Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**ATK/Dkcs**
		2	**02**	**01**	**2.05**				**Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**97 Laporan**	**97**	**142.500.000**	**98**	**142.000.000**	**96**	**92.000.000**	**291**	**375.500.000**	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.05	01			Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	8.500.000	DKCS - Kesekretariatan	**Alat Finger Print/Dkcs**
		2	02	01	2,05	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55 Paket	55	35.000.000	55	35.000.000	55	35.000.000	165	105.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Bahan & jahit**
		2	02	01	2.05	03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dok	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	18	9.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**ATK/Dkcs**
		2	02	01	2.05	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**ATK/Dkcs**
		2	02	01	2.05	05			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dok	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	72	3.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Makan Minum/Dkcs**
		2	02	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 ASN	1	50.000.000	2	50.000.000	0	0	3	100.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Diklat Struktural/Luar daerah**
		2	02	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	4	0	4	0	4	0	12	0	DKCS - Kesekretariatan	**Sos UU Kepeg/Luar Daerah**
		2	02	01	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	4 Orang	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Bimtek Kepeg/Luar daerah**

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	**02**	**01**	**2.06**				**Administrasi Umum Peragkat Daerah**	**Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10 Paket**	**363**	**1.385.746.963**	**366**	**1.960.803.273**	**368**	**2.029.622.971**	**1.097**	**5.376.173.207**	DKCS - Kesekretariatan	
		2	02	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Fase	3	50.000.000	6	100.000.000	8	100.000.000	17	250.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**DKCS**
		2	02	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit(22 alat), 1 server	2	400.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	6	1.400.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Alat Pelynan UPT Menkep, Busel, Busir**
											90 Buah	10	82.121.963	10	100.000.000	10	100.000.000	30	282.121.963	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	ATK Adm Perkntoran 33 Jenis	33	78.625.000	33	80.000.000	33	100.000.000	99	258.625.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
											ATK Adm Pelay 3 Jenis 155 Buah	155	300.000.000	155	518.867.273	155	567.686.971	465	1.386.554.244	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
											Alat Kebersihan kntor 20 Jenis	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	60	30.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis, 48 Buah	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	12	45.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum 54 Org	54	25.000.000	54	36.936.000	54	36.936.000	162	98.872.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
											Jaldis 51 Laporan	51	375.000.000	51	500.000.000	51	500.000.000	153	1.375.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Luar Daerah**
		2	02	01	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31 Dok SPBE	31	50.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	93	250.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	**02**	**01**	**2.07**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Yang tersedia**	**152 laporan**	**87**	**1.117.000.000**	**86**	**687.000.000**	**87**	**712.000.000**	**260**	**2.516.000.000**	DKCS - Kesekretariatan	
		2	02	01	2.07	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Buah (2 Randis R4, 6 Randis R2)	2	50.000.000	3	75.000.000	4	100.000.000	9	225.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Na	1	500.000.000					1	500.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Lemari)	20 Buah	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
										Jumlah Pengadaan Mebel (Meja)	19 Buah	35	42.000.000	35	42.000.000	35	42.000.000	105	126.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
										Jumlah Pengadaan Mebel (Kursi)	101 Buah	35	50.000.000	35	70.000.000	35	70.000.000	105	190.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin	1	1	75.000.000					1	75.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.07	09			Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung kantor	3 Gedung	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	900.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**UPT Menkep, Busel, Busir**
		2	02	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor	Na Buah	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	36	500.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Sapras UPT Menkep, Busel, Busir**
		2	**02**	**01**	**2.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**85.900.000**	**100**	**85.900.000**	**100**	**85.900.000**	300	257.700.000	DKCS - Kesekretariatan	
		2	02	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	82 Lembar	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.200.000	300	3.600.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah jasa Listrik yang dibayarkan	36000 Kwh	36000	55.000.000	36000	55.000.000	36000	55.000.000	108000	165.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	14 Buah	38	28.500.000	38	28.500.000	48	28.500.000	124	85.500.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	02	01	2.08	04			Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	1	1.200.000	25	3.600.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	**02**	**01**	**2.09**				**Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**10**	**152**	**187.000.000**	**152**	**342.000.000**	**154**	**342.000.000**	**458**	**871.000.000**	DKCS - Kesekretariatan	
		2	02	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8	8	30.000.000	8	85.000.000	10	85.000.000	26	200.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**DKCS**
		2	02	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Na	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**DKCS**
		2	02	01	2.09	05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Lemari)	Na	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	60	15.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**DKCS**
										Jumlah Pemeliharaan Mebel (Meja)	Na	19	7.000.000	19	7.000.000	19	7.000.000	57	21.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**DKCS**
										Jumlah Pemeliharaan Mebel (Kursi)	Na	101	15.000.000	101	15.000.000	101	15.000.000	303	45.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**DKCS**
		2	02	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemelihaaan peralatan dan mesin lainnya	1	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**DKCS**
		2	02	01	2.09	09			Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	1 Gedung	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	500.000.000	DKCS - Kesekretariatan	**Dkcs**
		2	**12**	**02**					**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**1.00**	**100**	**576.738.058**	**100**	**603.562.821**	**100**	**607.435.094**	**100**	**1.787.735.973**	**DKCS**	
										Cakupan penerbitan KTP-el	**100%**										
										Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	**100%**										
		2	**12**	**02**	**2.01**				**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**DUK Wajib KTP-el 126.854, DUK Ber-KTP-el 162.854**	**17.241**	**265.500.000**	**7.348**	**311.562.821**	**7.809**	**320.500.000**	**22.477**	**897.562.821**	DKCS - Bidang Dafduk	
		2	12	02	2.01	01			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	DUK Non Permanen 457	233	23.000.000	142	23.000.000	286	23.000.000	661	69.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	Jumlah DUK Non Permenan 661, Pendataan 133 Desa/Kel & ATK Formulir
		2	12	02	2.01	02			Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	DUK Ber-KTP-el 126.854, Pasangan Nikah Ber-KK 63.964, Anak Ber-KIA 36.777	3.824	150.000.000	3882	150.000.000	3731	150.000.000	11437	450.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	Wajib KTP-el 8638, Anak Belum Ber-KIA 2798, Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK/Formulir Dokumen
		2	12	02	2.01	03			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftran Penduduk	Jml DUK terupdated 170.415	56,815	10.000.000	56,815	15.000.000	56,815	15.000.000	170,445	40.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	Update Data Ekstra Time/Formuli DKCS
		2	12	02	2.01	04			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sel sel aktif 133 Desa/Kelurahan,	72	50.000.000	72	88.562.821	72	100.000.000	216,000	238.562.821	DKCS - Bidang Dafduk	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan
		2	12	02	2.01	05			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7.560 Peristiwa DUK	8.820	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Dafduk	Formulir/ATK, DKCS
		2	12	02	2.01	06			Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan	957 DUK Pindah Keluar	1.101	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Dafduk	Formulir/ATK, DKCS
		2	12	02	2.01	07			Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2661 DUK Pindah Datang	3.060	30.000.000	3120	30.000.000	3588	30.000.000	9.768,000	90.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK Dokumen /Formulir
		2	12	02	2,01	08			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	6 Dokumen	6	2.500.000	6	5.000.000	6	2.500.000	18,000	10.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	DKCS

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	12	02	2.02				**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan penerbitan KTP-el**	**DUK Ber-KTP-el 126.854**	**12**	**152.000.000**	**15**	**152.000.000**	**15**	**152.000.000**	**42,000**	**456.000.000**	DKCS - Bidang Dafduk	**DKCS**
		2	12	02	2.02	01			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	6 Dokumen	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	18,000	6.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	DKCS
		2	12	02	2.02	02			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir,dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	9 Lap	6	150.000.000	9	150.000.000	9	150.000.000	24,000	450.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	DKCS
		2	**12**	**02**	**2.03**				**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase anak memiliki KIA per satuan anak**	**Anak Ber-KIA 36.777**	**100**	**104.238.058**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**304.238.058**	DKCS - Bidang Dafduk	
		2	12	02	2.03	01			Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	5	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Dafduk	Kecamatan
		2	12	02	2.03	02			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Tselsel Aktif 133 Desa/kelurahan	133	50.000.000	133	50.000.000	133	50.000.000	133	150.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	10 Kecamatan
		2	12	02	2.03	03			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	36 Laporan	36	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Dafduk	DKCS
		2	12	02	2.03	04			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	KK& KTP	3	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Dafduk	DKCS
		2	12	02	2.03	05			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	9 Laporan Kecamatan	10	54.238.058	10	50.000.000	10	50.000.000	10	154.238.058	DKCS - Bidang Dafduk	10 Kec
		2	12	02	2.03	06			Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	9 PKS PKK Kec	12	0	0	0	0	0	0	-	DKCS - Bidang Dafduk	10 PKS PKK Desa & 2 PKS PT
		2	12	02	2.03	07			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	9 Dasa Wisma Kec	15	0	0	0	0	0	0	-	DKCS - Bidang Dafduk	10 PKS DW Desa, 5 PKS Lembaga Keagamaan
		2	12	02	2.03	08			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	JML DUK 170.415	178.935	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Dafduk	DKCS

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2 12 02 2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kelurahan dan desa sasaran pembinaan dan pengawasan**	**8 Buku Data DUK, 133 laporan pengawasan & 133 laporan Bintek**	**100**	**55.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**34.935.094**	**100**	**129.935.094**	DKCS - Bidang Dafduk	
		2 12 02 2.04 01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8 Buku Data DUK	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	24	15.000.000	DKCS - Bidang Dafduk	DKCS
		2 12 02 2.04 **02**	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	133 Laporan Pengawasan	133	0	0	0	0	0	0	-	DKCS - Bidang Dafduk	133 Desa/ Kelurahan
		2 12 02 2.04 03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan bimbingan tekhnis terkait pendaftaran penduduk	3 Laporan Bimtek	5	50.000.000	3	35.000.000	3	29.935.094	11	114.935.094	DKCS - Bidang Dafduk	Palu & Jakarta
		2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	**1.00**	**1.00**		**1.00**		**1.00**		**1.00**			
				Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	**0,89**	**0,89**	**252.878.060**	**0,89**	**264.639.715**	**0,89**	**266.337.562**	**0,89**	**783.855.337**	DKCS - Bidang Capil	
				Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	**100%**	**54.356**		**4.875**		**4.875**		**64.105**			
		2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	**Akta Nikah 789**	**49.506**	**75.000.000**	**72**	**75.000.000**	**72**	**75.000.000**	**49.650**	**225.000.000**	DKCS - Bidang Capil	
		2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	JML DUK 170.415, Ber-Akta Lahir 98.197, Akta Nikah 789, Akta Mati 4.103	24.711	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	(Formulir & ATK), DKCS
		2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Sel sel aktif 133 Desa/Kelurahan,	72	75.000.000	72	75.000.000	72	75.000.000	216,000	**225.000.000**	DKCS - Bidang Capil	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan
		2 12 03 2.01 03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil	JML DUK Ber- Akta Lahir 98.197, Akta Nikah 789, Akta Mati 4.103	24.711	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	(Makan/Minum & ATK), DKCS
		2 12 03 2.01 04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	8 Dokumen	8	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	DKCS
		2 12 03 2.01 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	4 Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	**12**	**03**	**2.02**				**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Rasio bayi ber-Akta Kelahiran**	**DUK Ber- Akta Lahir 98.197**	**83**	**115.878.060**	**36**	**127.639.715**	**36**	**129.337.562**	155	372.855.337	DKCS - Bidang Capil	
		2	12	03	2.02	01			Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Jumlah Laporan Hasil Kordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	4 Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	DKCS
		2	12	03	2.02	02			koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	4 Laporan	4	5.878.060	4	17.639.715	4	19.337.562	4	42.855.337	DKCS - Bidang Capil	DKCS
		2	12	03	2.02	03			Sub Keg : Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	4 Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	DKCS
		2	12	03	2.02	04			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	8 Laporan	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	36	60.000.000	DKCS - Bidang Capil	10 Kecamatan
		2	12	03	2.02	**06**			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitas pencatatan sipil	8 Laporan	8	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	DKCS
		2	12	03	2.02	07			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatn Sipil	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	8 Dokumen	10	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	10 Kecamatan
		2	12	03	2.02	08			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	9 Laporan Kecamatan	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	150.000.000	DKCS - Bidang Capil	10 Kecamatan
		2	12	03	2.02	09			Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	Jumlah Dokumen hasil Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	9 PKS PKK Kec	12	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	32	120.000.000	DKCS - Bidang Capil	10 PKS PKK Desa & 2 PKS PT
		2	12	03	2.02	10			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan sipil	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang menerima komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencatatan sipil	9 Dasa Wisma Kec	15	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	10 PKS DW Desa, 5 PKS Lembaga Keagamaan
		2	12	03	2.02	11			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan terkait Pencatatan sipil	8 Jenis Data	8	0	0	0	0	0	0	0	DKCS - Bidang Capil	DKCS

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	**12**	**03**	**2.03**				**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran**	**DUK Ber- Akta Lahir 98.197**	**143**	**62.000.000**	**143**	**62.000.000**	**143**	**62.000.000**	**429**	**186.000.000**	DKCS - Bidang Capil	
		2	12	03	2.03	01			Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	15	6.000.000	DKCS - Bidang Capil	DKCS
		2	12	03	2.03	02			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	133 Laporan Pengawasan	133	30.000.000	133	30.000.000	133	30.000.000	133	90.000.000	DKCS - Bidang Capil	133 Desa/ Kelurahan
		2	12	03	2.03	04			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan tekhnis terkait pencatatan sipil	3 Laporan Bimtek	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	15	90.000.000	DKCS - Bidang Capil	Palu & Jakarta
		2	**12**	**04**					**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**100,00%**	**555**	**191.659.083,94**	**558**	**200.573.372,55**	**563**	**201.860.189,59**	1676	**594.092.646,09**	PIAK	
										Penerapan KTP-el berbasis NIK	**100,00%**										
		2	**12**	**04**	**2.01**				**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**23 Dok+4 PKS+64 Lap Data**	**97**	**30.000.000**	**97**	**6.000.000**	**97**	**6.000.000**	291	**42.000.000**	PIAK	
		2	12	04	2.01	01			Pengolahan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang dioleh dan disajikan	23 Dokumen	23	30.000.000	23	3.000.000	23	3.000.000	69	36.000.000	PIAK	DKCS
		2	12	04	2.01	02			Sub Keg : Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	4 Perjanjian Kerja Sama	10	30.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	30	36.000.000	PIAK	DKCS
		2	12	04	2.01	03			Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	64 laporan Data	64	0	64	0	64	0	192	-	PIAK	DKCS
		2	**12**	**04**	**2.02**				**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penerapan KTP-el berbasis NIK**	**5 Dokumen**	**5**	0	**5**	0	**5**	0	15	-	PIAK	
		2	12	04	2.02	01			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5 Dokumen	5	0	5	0	5	0	15	-	PIAK	DKCS
		2	**12**	**04**	**2.03**				**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah lembaga pemerintah/non pemerintah memiliki hak akses data kependudukan**	**4 Dok Lap + 4 Dok + 64 Data**	**253**	**140.000.000**	**256**	**148.914.289**	**261**	**150.201.106**	770	**439.115.395**	PIAK	
		2	12	04	2.03	01			Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil loordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 Dokumen Laporan	4	0	4	0	4	0	12	0	PIAK	DKCS
		2	12	04	2.03	03			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	NA	10	50.000.000	10	58.914.289	10	60.201.106	30	169.115.395	PIAK	Palu & Jakarta
			12	04	2.03	04			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	4 Dokumen	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	30	90.000.000	PIAK	DKCS
		2	12	04	2.03	05			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	NA	133	50.000.000	133	50.000.000	133	50.000.000	399	150.000.000	PIAK	Desa/Kel

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung Jawab	KET / LOKASI
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
												TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		2	12	04	2.03	06			Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	NA	2	0	5	0	10	0	17	0	PIAK	Kecamatan
		2	12	04	2,03	07			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	NA	30	0	30	0	30	0	90	0	PIAK	10 Kec
		2	12	04	2,03	08			Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	64 Data	64	10.000.000	64	10.000.000	64	10.000.000	192	30.000.000	PIAK	DKCS
		2	**12**	**04**	**2.04**				**Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Tenaga Teknis Ahli PIAK**	**5 D0k + 12 Dok Lap**	**8**	**45.659.084**	**8**	**45.659.084**	**8**	**45.659.084**	24	**136.977.252**	PIAK	
		2	12	04	2,04	01			Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pemngelolaan informasi administrasi kependudukan	4 Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	12	60.000.000	PIAK	133 Desa/Kel
		2	12	04	2,04	02			Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	Jumlah dokumen Supervisi bersama dengan kantor kementrian yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kotadan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	1 Dokumen	1	0	1	0	1	0	3	-	PIAK	DKCS
		2	12	04	2.04	03			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12 Dokumen Laparan	3	25.659.084	3	25.659.084	3	25.659.084	9	76.977.252	PIAK	Palu & Jakarta
		2	**12**	**05**					**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase data kependudukan**	**100%**	**3.265**	**134.099.141,59**	**3.265**	**140.336.249,82**	**3.265**	**141.236.604,02**	**9.795**	**18.660.003**	PIAK	DKCS
		2	**12**	**05**	**2.01**				**Penysusunan Profil Kependudukan**	**Cakupan penyusunan Profil Kependudukan**	**64 Data + 1 Dokumen**	**65**	**18.660.000**	**65**	**18.660.000**	**65**	**18.660.000**	**195**	**55.980.000**	PIAK	DKCS
		2	12	05	2.01	01			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	64 Data	64		64		64		192		PIAK	DKCS
		2	12	05	2.01	02			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.	1 Dokumen	1	18.660.000	1	18.660.000	1	18.660.000	3	55.980.000	PIAK	DKCS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan periodesasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan adanya pendanaan program dan kegiatan diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabelberikut.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TERGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET/LOKASI
											2024			
											TARGET	RP		
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												7.681.898.997		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	*Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik*													
	Indikator Sasaran							*Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*		B (>60-70)	BB (>70-80)			
								Indeks Kepuasan Masyarakat						
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	**2**	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Nilai SAKIP	B (>60-70)	BB (>70-80)	**6.526.524.654**	DKCS	
									Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90			
		2	**02**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja yang tersedia	320 Dok	79	**11.400.000**	DKCS	**Dkcs**
		2	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3	5.700.000	DKCS	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS dan BAPPEDA**
		2	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	76 Dok	76	5.700.000	DKCS	**(Makn minum/ATK/Jaldis) DKCS, BAPPEDA,BPKAD dan DPR**
		2	**02**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**60 Laporan**	**55**	**3.599.290.442**	DKCS	**Dkcs**
		2	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	24	2.941.570.442	DKCS	**Dkcs**
		2	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Orang	31	657.720.000	DKCS	**Dkcs**
		2	**02**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**97 Laporan**	**60**	**195.000.000**	DKCS	**Dkcs**
		2	02	01	2,05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55 Paket	55	50.000.000	DKCS	**Bahan & jahit**
		2	02	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	70.000.000	DKCS	**ATK/Dkcs**
		2	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	4 Orang	4	75.000.000	DKCS	**Bimtek Kepeg/Luar daerah**
		2	**02**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Peragkat Daerah**	**Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10 Paket**	**363**	**1.699.934.212**	DKCS	
		2	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Fase	3	50.000.000	DKCS	**DKCS**

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TERGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET/LOKASI
												2024			
												TARGET	RP		
		2	02	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit(22 alat), 1 server	2	734.934.212	DKCS	Alat Pelyhan UPT Menkep, Busel, Busir
											90 Buah	10	75.000.000	DKCS	Dkcs
		2	02	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	ATK Adm Perkntoran 33 Jenis	33	75.000.000	DKCS	Dkcs
											ATK Adm Pelay 3 Jenis 155 Buah	155	200.000.000	DKCS	Dkcs
											Alat Kebersihan kntor 20 Jenis	20	15.000.000	DKCS	Dkcs
		2	02	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis, 48 Buah	4	25.000.000	DKCS	Dkcs
		2	02	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum 54 Org	54	25.000.000	DKCS	Dkcs
											Jaldis 51 Laporan	51	400.000.000	DKCS	Luar Daerah
		2	02	01	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31 Dok SPBE	31	100.000.000	DKCS	Dkcs
		2	**02**	**01**	**2.07**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Yang tersedia**	**152 laporan**	**74**	**833.000.000**	DKCS	
		2	02	01	2.07	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Buah (2 Randis R4, 6 Randis R2)	2	50.000.000	DKCS	Dkcs
		2	02	01	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Na	1	500.000.000	DKCS	Dkcs
										Jumlah Pengadaan Mebel (Meja)	19 Buah	35	63.000.000	DKCS	Dkcs
										Jumlah Pengadaan Mebel (Kursi)	101 Buah	35	25.000.000	DKCS	Dkcs
		2	02	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin	1	1	75.000.000	DKCS	Dkcs
		2	02	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor	Na Buah	12	120.000.000	DKCS	Sapras UPT Menkep, Busel, Busir

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TERGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET/LOKASI
												2024			
												TARGET	RP		
		2	**02**	**01**	**2.08**				**KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**85.900.000**	DKCS	
		2	02	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	82 Lembar	100	1.200.000	DKCS	**Dkcs**
		2	02	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah jasa Listrik yang dibayarkan	36000 Kwh	36000	55.000.000	DKCS	**Dkcs**
		2	02	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	14 Buah	38	28.500.000	DKCS	**Dkcs**
		2	02	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Bulan	12	1.200.000	DKCS	**Dkcs**
		2	**02**	**01**	**2.09**				**Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**10**	**12**	**102.000.000**	DKCS	
		2	02	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8	8	30.000.000	DKCS	**DKCS**
		2	02	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Na	1	12.000.000	DKCS	**DKCS**
		2	02	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemelihaaan peralatan dan mesin lainnya	1	2	10.000.000	DKCS	**DKCS**
		2	02	01	2.09	09			Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	1 Gedung	1	50.000.000	DKCS	**Dkcs**
		2	**12**	**02**					**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**1.00**	**1.00**		DKCS	
										Cakupan penerbitan KTP-el	**100%**	**100%**	**576.738.058**	DKCS	
										Persentase anak memiliki KIA per satuan anak	**100%**	**100%**		DKCS	
		2	**12**	**02**	**2.01**				**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk**	**DUK Wajib KTP-el 126.854, DUK Ber-KTP-el 162.854**	**#REF!**	**236.738.058**	DKCS	
		2	12	02	2.01	02			Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	DUK Ber-KTP-el 126.854, Pasangan Nikah Ber-KK 63.964, Anak Ber-KIA 36.777	3.824	50.000.000	DKCS	Wajib KTP-el 8638, Anak Belum Ber-KIA 2798, Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK/Formulir Dokumen
		2	12	02	2.01	04			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sel sel aktif 133 Desa/Kelurahan,	72	156.738.058	DKCS	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan
		2	12	02	2.01	07			Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2661 DUK Pindah Datang	3.060	30.000.000	DKCS	Pelayanan 133 Desa/Kel & ATK Dokumen /Formulir

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TERGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET/LOKASI
												2024			
												TARGET	RP		
		2	12	**02**	**2.02**				**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan penerbitan KTP-el**	**DUK Ber-KTP-el 126.854**	**6**	**200.000.000**	DKCS	**DKCS**
		2	12	02	2.02	02			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir,dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	9 Lap	6	200.000.000	DKCS	DKCS
		2	**12**	**02**	**2.03**				**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase anak memiliki KIA per satuan anak**	**Anak Ber-KIA 36.777**	**100**	**105.000.000**	DKCS	
		2	12	02	2.03	02			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Tselsel Aktif 133 Desa/kelurahan	133	50.000.000	DKCS	10 Kecamatan
		2	12	02	2.03	05			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	9 Laporan Kecamatan	10	55.000.000	DKCS	10 Kec
		2	**12**	**02**	**2.04**				**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kelurahan dan desa sasaran pembinaan dan pengawasan**	**8 Buku Data DUK, 133 laporan pengawasan & 133 laporan Bintek**	**100**	**35.000.000**	DKCS	
		2	12	02	2.04	03			Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan bimbingan tekhnis terkait pendaftaran penduduk	3 Laporan Bimtek	5	35.000.000	DKCS	Palu & Jakarta
		2	**12**	**03**					**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	**1.00**	1,00		DKCS	
										Rasio bayi ber-Akta Kelahiran	**0,89**	**0,89**	**252.878.060**	DKCS	
										Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	**100%**	**100%**		DKCS	
		2	**12**	**03**	**2.01**				**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rasio pasangan nikah ber-Akta Nikah**	**Akta Nikah 789**	**#REF!**	**147.878.060**	DKCS	
		2	12	03	2.01	02			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Sel sel aktif 133 Desa/Kelurahan,	72	147.878.060	DKCS	Inovasi Pelayanan Kunjungan Pasar Desa/ 10 Kecamatan
		2	**12**	**03**	**2.02**				**KEGIATAN : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Rasio bayi ber-Akta Kelahiran**	**DUK Ber- Akta Lahir 98.197**	**#REF!**	**70.000.000**	DKCS	
		2	12	03	2.02	04			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	8 Laporan	8	20.000.000	DKCS	10 Kecamatan
		2	12	03	2.02	08			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	9 Laporan Kecamatan	10	50.000.000	DKCS	10 Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	KODE							PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2023)	TERGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET/LOKASI
												2024			
												TARGET	RP		
		2	**12**	**03**	**2.03**				**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran**	**DUK Ber- Akta Lahir 98.197**	**#REF!**	**35.000.000**	DKCS	
		2	12	03	2.03	04			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan tekhnis terkait pencatatan sipil	3 Laporan Bimtek	5	35.000.000	DKCS	Palu & Jakarta
		2	**12**	**04**					**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**100,00%**	**555**	**191.659.083**	DKCS	
										Penerapan KTP-el berbasis NIK	**100,00%**			DKCS	
		2	**12**	**04**	**2.01**				**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi**	**23 Dok+4 PKS+64 Lap Data**	**97**	**76.659.083**	DKCS	
		2	12	04	2.01	02			Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	4 Perjanjian Kerja Sama	10	76.659.083	DKCS	DKCS
		2	**12**	**04**	**2.03**				**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah lembaga pemerintah/non pemerintah memiliki hak akses data kependudukan**	**4 Dok Lap + 4 Dok + 64 Data**	**253**	**95.000.000**	DKCS	
			12	04	2.03	04			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	4 Dokumen	10	60.000.000	DKCS	DKCS
		2	12	04	2,03	08			Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	64 Data	64	35.000.000	DKCS	DKCS
		2	**12**	**04**	**2.04**				**Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Tenaga Teknis Ahli PIAK**	**5 D0k + 12 Dok Lap**	**8**	**20.000.000**	DKCS	
		2	12	04	2,04	01			Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pemngelolaan informasi administrasi kependudukan	4 Dokumen	4	20.000.000	DKCS	133 Desa/Kel
		2	**12**	**05**					**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase data kependudukan**	**100%**	**3.265**	**134.099.142**	DKCS	DKCS
		2	**12**	**05**	**2.01**				**Penysusunan Profil Kependudukan**	**Cakupan penyusunan Profil Kependudukan**	**64 Data + 1 Dokumen**	**65**	**134.099.142**	DKCS	DKCS
		2	12	05	2.01	01			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	64 Data	64	134.099.142	DKCS	DKCS
		2	12	05	2.01	02			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.	1 Dokumen	1		DKCS	DKCS

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang efektif dan optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) ini menjelaskan :

1.Tujuan dan sasaranpenetapan program /kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah terbentuknya UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggara Administrasi Kependudukan pada Kecamatan Menui Kepeulauan dan Bungku Selatan. Seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan untuk terbentuknya 2 (Dua) UPT, dapat dilakukan 1 (Satu) UPT dengan skala prioritas Kecamatan Menui Kepulauan sesuai syarat dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut;

1. Sekretariat dan Bidang-bidang dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekewajiban untuk melaksanakan program - program Rencana Kerja (RENJA) dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam menyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun selanjutnyadalam mengupayakan keterpaduan,

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Sekretariat maupun BidangDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja setiap tahun.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Kode			Program dan Kegiatan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab
2	**12**	**01**	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Januari s/d Desember 2024	Kepala Disdukcapail Kab. Morowali
2	12	2.01	Perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah		
2	12	2.02	Adminstrasi Keuangan		
2	12	2.03	Administrasi Umum		
2	**12**	**02**	**Pendaftaran Penduduk**		
2	12	2.01	Pelayanan pendaftaran penduduk		
2	**12**	**03**	**Pencatatan Sipil**		
2	12	2.01	Pelayanan pencatatan sipil		
2	**12**	**04**	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	12	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan serta Penyajian Data Base Kependudukan		
2	12	2.02	Penataan Administrasi Kependudukan		
2	12	2.03	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		
2	12	2.04	Pembinaan dan pengawasan penyelenggara administrasi kependudukan		

Bungku, Januari 2024
Mengetahui,
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali,

Dra. ROSNAWATI MUSTAPA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19650825 1990022001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL I
KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL..... ... IV

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMDP3A TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemdes P3A Tahun 2021 dan Capaian Renstra ... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemdes P3A 18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32
3.3. Progam dan Kegiatan 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45

BAB V PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29 Rekapan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 10
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja 19
Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan 24
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025 38
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Balakang

Rencana kerja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun–tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari RPD dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah :

1. Mempelajari Kebijakan dan Program Perioritas dalam RPD dan Renstra
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD tahun 2024-2026.
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja (**RENJA**) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara 3900);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Kabupaten morowali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, Pelayanan, dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 00187);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 tahun 2022 tentang kedudukan dan Susunan organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali tahun 2022 Nomor 041).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah agar dapat menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali.
2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Tahun 2024, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja DPMDP3A

3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesua degan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMDP3A TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMDP3A

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali dapat dilihat sebagai berikut Tabel T.C-29 berikut ini :

Tabel T-C. 29
Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	12	12	100%	100%	**1400%**	**1400%**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Kegiatan ASN	100%	16	12	12	100%	100%	**2900%**	**2900%**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Administrasi Umum dalam 1 tahun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**300%**	**300%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**300%**	**300%**

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**300%**	**300%**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	**300%**	**300%**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam setahun**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**300%**	**300%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor dalam setahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	**300%**	**300%**

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	4	100%	100%	100%	100%	**600%**	**600%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara dalam setahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	3	100%	100%	100%	100%	**500%**	**500%**
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Persentase Penataan Desa**	**0%**	**0%**	**38%**	**38%**	**100%**	**0%**	**38%**	**#DIV/0!**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	**0%**	**0%**	**38%**	**38%**	**100%**	**0%**	**38%**	**#DIV/0!**
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Regulasi Tata Wilayah Desa	0%	0%	38%	38%	100%	0%	**38%**	**#DIV/0!**
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang memiliki Perdes Kewenangan Lokal berskala desa	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	29%	20	20	20	100%	29%	**4029%**	**13893%**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	29%	0%	20	20	100%	29%	**2029%**	**6997%**
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pembinaan pengembangan kawasan perdesaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**

	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggaran administasi Pemerintahan Desa yang baik	100%	0%	100%	100%	100%	100%	**200%**	**200%**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah regulasi yang di fasiltasi	100%	0%	100%	100%	100%	100%	**200%**	**200%**
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RPJMDes/RKPDes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistim keuangan desa	100%	126	126	126	100%	100%	**25300%**	**25300%**
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dilatih	100%	252	0%	0%	0%	100%	**25300%**	**25300%**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah desa	0%	0%	100%	100%	100%	0%	**100%**	**#DIV/0!**
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi pelaksanaan APB Desa	100%	0%	100%	100%	100%	100%	**200%**	**200%**
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Bumdes yang dibina	100%	42	42	42	100%	100%	**8500%**	**8500%**
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES	100%	38	0%	0%	0%	100%	**3900%**	**3900%**
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	10	10	10	100%	100%	**2100%**	**2100%**
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mengupdate profil desa, epdeskel dan pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM)	100%	126	126	126	100%	100%	**25300%**	**25300%**
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi Sipades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**

	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang menyampaikan LPJ Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah yang mengikuti lomba desa dan kelurahan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang membentuk Lembaga Adat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga yang terbentuk di Desa/Kelurahan	0%	0%	100%	100%	100%	0%	**100%**	**#DIV/0!**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan peningkatan kapasitas	100%	133	100%	100%	100%	100%	**13500%**	**13500%**
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Unit Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan kembangkan di desa dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	90	100%	100%	100%	100%	**9200%**	**9200%**
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	100%	75%	100%	100%	100%	100%	**275%**	**275%**

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang telah melaksanakan 10 program PKK	100%	0%	100%	100%	100%	100%	**200%**	**200%**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase Partisipasi Perempuan**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase OPD dan Satuan Kerja lintas sektor yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Regulasi pelaksanaan PUG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD/satuan kerja yang melaksanakan PUG termasuk PPRG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**300%**	**300%**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang telah dilatih**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga penyedia layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE yang dilaksanakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Data anak Dan Gender**	**100%**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**100%**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pendamping	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/sosialisasi kegiatan peningkatan kualitas masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dibentuk	50%	50%	50%	50%	100%	50%	**150%**	**300%**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek/pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**

	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Presentase Data anak Dan Gender**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Data Gender dan Anak	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama	100%	0%	100%	100%	100%	100%	**200%**	**200%**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**300%**	**300%**

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang dirujuk	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyedia layanan yang memenuhi standar**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek/pelatihan peningkatan SDM tenaga pendamping	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak**	**0%**	**46%**	**46%**	**46%**	**100%**	**0%**	**92%**	**#DIV/0!**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan ramah anak**	**0%**	**46%**	**46%**	**46%**	**100%**	**0%**	**92%**	**#DIV/0!**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga	0%	46%	46%	46%	100%	0%	**92%**	**#DIV/0!**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan ramah anak**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**persentase korban yang mendapatkan layanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**persentase anak yang mendapatkan perlindungan kekerasan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**300%**	**300%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat	46%	0%	0%	0%	0%	46%	**46%**	**100%**
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana layanan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Workshop	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**0%**	**#DIV/0!**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemdes P3A

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali yang berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan isian amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut disajikan Tabel T.C-30 mengenai capaian kinerja dan pelayanan sebagai berikut :

Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Penguatan Bumdes dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat			126	126	126	126	126	126	126	126	
2	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) - Desa Mandiri - Desa Maju - Desa Berkembang - Desa Tertinggal - Desa Sangat Tertinggal			 1 36 44 43 1	 5 36 45 40 0	 7 40 49 30 0	 8 45 50 23 0	 3 36 44 43 0	 5 36 45 40 0	 7 40 49 30 0	 8 45 50 23 0	
3	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak			21	15	15	10	21	15	15	10	
4	Jumlah Kasus KDRT			7	10	8	8	7	10	8	8	
5	Terpenuhinya 24 indikator Kabupaten Layak Anak			5	10	20	24	5	10	20	24	

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kamampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan Renstra pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Terdapat beberapa isu strategi yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pmberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali :

1. Dukungan IT dan system informasi bagi perkembangan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Morowali
2. Optimalisasi Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi
3. Kualitas Penginputan Data yang Akurat
4. Kemudahan Pelayanan Rekomendasi Pencairan
5. Kompetensi SDM Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pmberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali
6. Potensi perkembangan Pemerintah Desa dan P3A yang Kondusif

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait Tugas dan Fungsi Dinas. Adapun tantangan di Bidang Pemerintahan Desa

1. Kekuatan (Strengths)
   - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
   - Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pmberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali
   - Peraturan Daerah Kabupaten morowali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, Pelayanan, dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

2. Kelemahan (Weaknesses)
   - Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali
   - Belum adanya standart pelayanan minimal dalam pembinaan Desa
   - Kurangnya Data terpilah dalam melaksanakan kegiatan di pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Peluang (Opportunitis)
   - Tolak ukur capaian sasaran seluruh aparatur pemerintah Desa memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya yaitu Pelatihan Aparatur Desa dan Fasilitasi Pendamping Desa
   - Adanya Kesadaran masyarakat membangun desa dalam melestarikan budaya di desa
   - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kerja Teknologi Tepat Guna
   - Terbukanya Pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang terdampak korban

4. Ancaman (Threats)
   - Banyaknya Korban Kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan
   - Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada
   - Banyaknya pelaporan yang masuk pada Bidang Pemerintahan Desa
   - Masih besarnya angka kemiskinan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representase tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok Indikator Kinerja dan Rencana capaiannya. Melalui Dokumen Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Morowali.

Berikut disajikan Tabel T-C. 31 yang menyajikan Review terhadap Rancangan Awal RPD yang memuat hasil analisis kebutuhan dan juga rumusan Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Morowali	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	**100**	**6,041,072,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab Morowali	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	**100**	**6,041,072,000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Morowali	**Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**5,088,490,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab Morowali	**Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**4,988,490,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	4,750,570,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	4,650,570,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Morowali	Jumlah Pelaksana Kegiatan ASN	16	337,920,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Morowali	Jumlah Pelaksana Kegiatan ASN	16	337,920,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Morowali	**Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	**100**	**150,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab Morowali	**Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	**100**	**150,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Morowali	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Morowali	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	150,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Morowali	**Persentase Administrasi Administrasi Umum dalam 1 tahun**	**100**	**441,932,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab Morowali	**Persentase Administrasi Administrasi Umum dalam 1 tahun**	**100**	**541,932,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Morowali	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Morowali	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	30,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Morowali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	54,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Morowali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	54,500,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	60,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	60,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	57,432,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	57,432,000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Morowali	Jumlah Kunjungan Tamu	10	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Morowali	Jumlah Kunjungan Tamu	10	15,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	225,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	325,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Morowali	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam setahun**	**100**	**70,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab Morowali	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam setahun**	**100**	**70,000,000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	40,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	40,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Morowali	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	1	30,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Morowali	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	1	30,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Morowali	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah**		**55,900,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Morowali	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah**		**55,900,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Morowali	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor dalam setahun	5	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Morowali	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor dalam setahun	5	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Morowali	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Morowali	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	900,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Morowali	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**234,750,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Morowali	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**234,750,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Morowali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	59,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Morowali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	59,750,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Morowali	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara dalam setahun	10	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Morowali	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara dalam setahun	10	25,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Morowali	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Morowali	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	150,000,000	

	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab Morowali	**Persentase Penataan Desa**	**100**	**78,000,000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Kab Morowali	**Persentase Penataan Desa**	**100**	**78,000,000**	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab Morowali	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	**100**	**78,000,000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Kab Morowali	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	**100**	**78,000,000**	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Morowali	Jumlah Regulasi Tata Wilayah Desa	2	61,000,000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Morowali	Jumlah Regulasi Tata Wilayah Desa	2	61,000,000	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang memiliki Perdes Kewenangan Lokal berskala desa	42	17,000,000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang memiliki Perdes Kewenangan Lokal berskala desa	42	17,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab Morowali	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	**84.9**	**160,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Kab Morowali	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	**84.9**	**160,000,000**	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab Morowali	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	**84.9**	**160,000,000**	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Kab Morowali	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	**84.9**	**160,000,000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab Morowali	jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	5	50,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab Morowali	jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	5	50,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	5	70,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	5	70,000,000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab Morowali	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pembinaan pengembangan kawasan perdesaan	7	40,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab Morowali	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pembinaan pengembangan kawasan perdesaan	7	40,000,000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Morowali	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100**	**1,298,500,000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Kab Morowali	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100**	**1,298,500,000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Morowali	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100**	**1,298,500,000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab Morowali	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100**	**1,298,500,000**	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang menyelenggaran administasi Pemerintahan Desa yang baik	42	50,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang menyelenggaran administasi Pemerintahan Desa yang baik	42	50,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab Morowali	Jumlah regulasi yang di fasiltasi	5	110,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab Morowali	Jumlah regulasi yang di fasiltasi	5	110,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Morowali	Jumlah RPJMDes/RKPDes	126	22,200,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Morowali	Jumlah RPJMDes/RKPDes	126	22,200,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistim keuangan desa	126	90,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistim keuangan desa	126	90,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Morowali	Jumlah Desa yang dilatih	126	61,200,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Morowali	Jumlah Desa yang dilatih	126	61,200,000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah desa	126	43,200,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah desa	126	43,200,000	

	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab Morowali	Jumlah Desa yang di evaluasi pelaksanaan APB Desa	126	110,700,000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab Morowali	Jumlah Desa yang di evaluasi pelaksanaan APB Desa	126	110,700,000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab Morowali	Jumlah Bumdes yang dibina	126	130,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab Morowali	Jumlah Bumdes yang dibina	126	130,000,000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES	126	70,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES	126	70,000,000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Morowali	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	35,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Morowali	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	35,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang mengupdate profil desa, epdeskel dan pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM)	126	90,200,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang mengupdate profil desa, epdeskel dan pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM)	126	90,200,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi Sipades	126	55,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Morowali	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi Sipades	126	55,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Morowali	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas	126	175,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Morowali	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas	126	175,000,000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Morowali	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa	42	35,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Morowali	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa	42	35,000,000	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Morowali	Jumlah Kepala Desa yang menyampaikan LPJ Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan	126	20,000,000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Morowali	Jumlah Kepala Desa yang menyampaikan LPJ Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan	126	20,000,000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Morowali	Jumlah yang mengikuti lomba desa dan kelurahan	10	201,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Morowali	Jumlah yang mengikuti lomba desa dan kelurahan	10	201,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Morowali	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**77**	**1,710,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Kab Morowali	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**77**	**1,710,000,000**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**77**	**1,710,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**77**	**1,710,000,000**	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah Desa yang membentuk Lembaga Adat	5	30,000,000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah Desa yang membentuk Lembaga Adat	5	30,000,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah Lembaga yang terbentuk di Desa/Kelurahan	30	120,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah Lembaga yang terbentuk di Desa/Kelurahan	30	120,000,000	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan peningkatan kapasitas	126	190,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan peningkatan kapasitas	126	190,000,000	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah sarana dan prasarana lembaga	126	50,000,000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Morowali	Jumlah sarana dan prasarana lembaga	126	50,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Morowali	Jumlah Unit Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan kembangkan di desa dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20	200,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Morowali	Jumlah Unit Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan kembangkan di desa dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20	200,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Morowali	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	5	120,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Morowali	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	5	120,000,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Morowali	Jumlah Desa yang telah melaksanakan 10 program PKK	12	1,000,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Morowali	Jumlah Desa yang telah melaksanakan 10 program PKK	12	1,000,000,000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab Morowali	**Persentase Partisipasi Perempuan**	**100**	**500,000,000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Kab Morowali	**Persentase Partisipasi Perempuan**	**100**	**500,000,000**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase OPD dan Satuan Kerja lintas sektor yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender**	**75%**	**145,000,000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase OPD dan Satuan Kerja lintas sektor yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender**	**75%**	**145,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab Morowali	Jumlah Regulasi pelaksanaan PUG	1	40,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab Morowali	Jumlah Regulasi pelaksanaan PUG	1	40,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan	40%	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan	40%	50,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Morowali	Jumlah OPD/satuan kerja yang melaksanakan PUG termasuk PPRG	15%	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Morowali	Jumlah OPD/satuan kerja yang melaksanakan PUG termasuk PPRG	15%	25,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab Morowali	Jumlah Sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15%	30,000,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab Morowali	Jumlah Sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15%	30,000,000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**80**	**205,000,000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**80**	**205,000,000**	

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab Morowali	Jumlah kelompok perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50	150,000,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab Morowali	Jumlah kelompok perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50	150,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab Morowali	Jumlah perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50	55,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab Morowali	Jumlah perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50	55,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang telah dilatih**	**50**	**150,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang telah dilatih**	**50**	**150,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga penyedia layanan	12	50,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga penyedia layanan	12	50,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	2	50,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	2	50,000,000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah KIE yang dilaksanakan	10	50,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah KIE yang dilaksanakan	10	50,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab Morowali	**Persentase Data anak Dan Gender**	**100**	**250,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Kab Morowali	**Persentase Data anak Dan Gender**	**100**	**250,000,000**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**100**	**150,000,000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**100**	**150,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah kelompok pendamping	1	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah kelompok pendamping	1	25,000,000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah pelatihan/sosialisasi kegiatan peningkatan kualitas masyarakat	1	75,000,000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah pelatihan/sosialisasi kegiatan peningkatan kualitas masyarakat	1	75,000,000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dibentuk	1	50,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dibentuk	1	50,000,000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**100**	**50,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**100**	**50,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah regulasi	1	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah regulasi	1	25,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah bimtek/pelatihan	1	25,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah bimtek/pelatihan	1	25,000,000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**100**	**50,000,000**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**100**	**50,000,000**	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Layanan	1	50,000,000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Layanan	1	50,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab Morowali	**Presentase Data anak Dan Gender**	**100**	**50,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Kab Morowali	**Presentase Data anak Dan Gender**	**100**	**50,000,000**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	**100**	**50,000,000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	**100**	**50,000,000**	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah data gender dan anak	1	25,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah data gender dan anak	1	25,000,000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Buku Profil Data Gender dan Anak	1	25,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Buku Profil Data Gender dan Anak	1	25,000,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab Morowali	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	**100**	**400,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kab Morowali	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	**100**	**400,000,000**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat**	**100**	**100,000,000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat**	**100**	**100,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama	10	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama	10	50,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah sosialisasi kebijakan	1	50,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah sosialisasi kebijakan	1	50,000,000	

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	**38**	**100,000,000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	**38**	**100,000,000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Korban yang dirujuk	10	50,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Korban yang dirujuk	10	50,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	38	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	38	50,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Jumlah penyedia layanan yang memenuhi standar**	**100**	**200,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Jumlah penyedia layanan yang memenuhi standar**	**100**	**200,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah sarana prasarana	4	50,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah sarana prasarana	4	50,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah bimtek/pelatihan peningkatan SDM tenaga pendamping	30	50,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah bimtek/pelatihan peningkatan SDM tenaga pendamping	30	50,000,000	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik	38	50,000,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik	38	50,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	5	50,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	5	50,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab Morowali	**Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak**	**100**	**200,000,000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Kab Morowali	**Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak**	**100**	**200,000,000**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase pelayanan ramah anak**	**100**	**125,000,000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase pelayanan ramah anak**	**100**	**125,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah dokumen kebijakan	1	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah dokumen kebijakan	1	25,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga	1	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga	1	100,000,000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase pelayanan ramah anak**	**100**	**75,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase pelayanan ramah anak**	**100**	**75,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor	5	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor	5	75,000,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab Morowali	**persentase korban yang mendapatkan layanan**	**100**	**375,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Kab Morowali	**persentase korban yang mendapatkan layanan**	**100**	**375,000,000**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**persentase anak yang mendapatkan perlindungan kekerasan**	**100**	**100,000,000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**persentase anak yang mendapatkan perlindungan kekerasan**	**100**	**100,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Kebijakan	1	25,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Kebijakan	1	25,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat	13	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat	13	75,000,000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase sarana layanan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus**	**100**	**125,000,000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase sarana layanan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus**	**100**	**125,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	38	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	38	50,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Workshop	1	75,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Workshop	1	75,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100**	**150,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Morowali	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100**	**150,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Sarana Prasarana	7	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Sarana Prasarana	7	50,000,000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	1	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	1	50,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	3	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Morowali	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	3	50,000,000	
				TOTAL	**11,062,572,000**					**11,062,572,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrembang kabupaten tahun 2024 untuk program dan kegiatan yang menjadi Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali tidak terdapat **Usulan dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel T-C. 32 berikut ini :**

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;

4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Agenda Prioritas Nasional, terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkannya yaitu :

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui :
    a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
    b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ;
    c. Peningkatan kapasitaspemerintah dan masyarakat desa.
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar diperdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat;
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu :

a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Dinas Usaha Milik Desa.
e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Berdasarkan RPJM Nasional tercantum tiga agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan dan menata perekonomian tertuang dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan disertai pemerataan atau grow with equity. Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat karena pertumbuhan saja tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan yang dicapai harus memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Prioritas Kemandirian Desa dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif Dalam Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya. Untuk mendukung Tujuan umum, dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali, ditetapkan 5 (lima) Tujuan khusus yaitu:

1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan ekonomi desa.
5. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien serta pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- **Tujuan adalah sebagai Berikut :**

Tujuan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali adalah :

1. Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin
2. Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis

- **Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :**

Sasaran pemberdayaan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali selama masa periode RPD (2024-2026), adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja pemerintah desa
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lembaga ekonomi desa
3. Meningkatkan pemanfaatan penerapan teknologi tepat guna sesuai potensi lokal

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
5. Meningkatkan Penjangkauan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Terpenuhinya hak-hak anak

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan Tujuan, Sasaran.

Berikut ini disajikan secara rinci Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2024
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	100 %
Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Mengoptimalkan kinerja pemerintah desa	Cakupan Penguatan Bumdes dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) - Desa Mandiri - Desa Maju - Desa Berkembang - Desa Tertinggal - Desa Sangat Tertinggal	126 Desa 7 40 49 30 0
Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan Meningkatkan Penjangkauan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak Terpenuhinya hak-hak anak	Persentase kesetaraan gender Jumlah Kasus KDRT Terpenuhinya 24 indikator Kabupaten Layak Anak	 23 Kasus 20 Indikator KLA

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Program prioritas yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian pembangunan dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna, pemberdayaan adat dan kelembagaan serta peran serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam mengatasi kekerasan perempun dan anak. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021 tentang rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun Anggaran 2024 dan perkiraan maju tahun 2024 pada Tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**6,041,072,000**	ABPD		**100%**	**6,046,072,000**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**5,088,490,000**	ABPD		**100%**	**5,088,490,000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	31	Orang	4,750,570,000	ABPD		31	3,347,650,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Kegiatan ASN	Kab. Morowali	16	Orang	337,920,000	ABPD		16	1,740,840,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**150,000,000**	ABPD		**100%**	**150,000,000**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Morowali	4	Orang	150,000,000	ABPD		4	150,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Administrasi Umum dalam 1 tahun**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**441,932,000**	ABPD		**100%**	**446,932,000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali	1	Unit	30,000,000	ABPD		1	30,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	13	Unit	54,500,000	ABPD		13	54,500,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	2	Paket	60,000,000	ABPD		2	60,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	12	Paket	57,432,000	ABPD		12	57,432,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	10	Orang	15,000,000	ABPD		10	15,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	10	Laporan	225,000,000	ABPD		10	230,000,000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam setahun**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**70,000,000**	ABPD		**100**	**70,000,000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Morowali	2	Unit	40,000,000	ABPD		2	40,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Kab. Morowali	1	Unit	30,000,000	ABPD		1	30,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah**	Kab. Morowali		**%**	**55,900,000**	ABPD		**100**	**55,900,000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	12	Laporan	50,000,000	ABPD		12	50,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor dalam setahun	Kab. Morowali	5	Paket	5,000,000	ABPD		5	5,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	12	Bulan	900,000	ABPD		12	900,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**234,750,000**	ABPD		**100**	**234,750,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Morowali	4	Unit	59,750,000	ABPD		4	59,750,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara dalam setahun	Kab. Morowali	10	Unit	25,000,000	ABPD		10	25,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	1	Unit	150,000,000	ABPD		1	150,000,000
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Persentase Penataan Desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**78,000,000**	ABPD		**100**	**78,000,000**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**78,000,000**	ABPD		**100**	**78,000,000**
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Regulasi Tata Wilayah Desa	Kab. Morowali	2	Dokumen	61,000,000	ABPD		2	61,000,000
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang memiliki Perdes Kewenangan Lokal berskala desa	Kab. Morowali	42	Dokumen	17,000,000	ABPD		42	17,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	Kab. Morowali	**84.9**	**%**	**160,000,000**	ABPD		**98.4**	**160,000,000**
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	Kab. Morowali	**84.9**	%	**160,000,000**	ABPD		98.4	**160,000,000**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Kab. Morowali	5	Desa	50,000,000	ABPD		5	50,000,000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	Kab. Morowali	5	Desa	70,000,000	ABPD		5	70,000,000
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pembinaan pengembangan kawasan perdesaan	Kab. Morowali	7	Desa	40,000,000	ABPD		7	40,000,000

	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**1,298,500,000**	ABPD		**100**	**2,152,500,000**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**1,298,500,000**	ABPD		**100**	**2,152,500,000**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggaran administasi Pemerintahan Desa yang baik	Kab. Morowali	42	Desa	50,000,000	ABPD		42	50,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah regulasi yang di fasiltasi	Kab. Morowali	5	dokumen	110,000,000	ABPD		6	110,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RPJMDes/RKPDes	Kab. Morowali	126	dokumen	22,200,000	ABPD		126	22,200,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistim keuangan desa	Kab. Morowali	126	Desa	90,000,000	ABPD		126	90,000,000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dilatih	Kab. Morowali	126	Orang	61,200,000	ABPD		126	61,200,000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah desa	Kab. Morowali	126	Desa	43,200,000	ABPD		126	43,200,000
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi pelaksanaan APB Desa	Kab. Morowali	126	Desa	110,700,000	ABPD		126	105,700,000
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Bumdes yang dibina	Kab. Morowali	126	Bumdes	130,000,000	ABPD		126	130,000,000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES	Kab. Morowali	126	Desa	70,000,000	ABPD		48	800,000,000
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Morowali	12	Desa	35,000,000	ABPD		13	50,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mengupdate profil desa, epdeskel dan pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM)	Kab. Morowali	126	Desa	90,200,000	ABPD		126	90,200,000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi Sipades	Kab. Morowali	126	Desa	55,000,000	ABPD		126	55,000,000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas	Kab. Morowali	126	Orang	175,000,000	ABPD		126	175,000,000
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Morowali	42	Desa	35,000,000	ABPD		42	55,000,000
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang menyampaikan LPJ Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan	Kab. Morowali	126	Orang	20,000,000	ABPD		126	75,000,000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah yang mengikuti lomba desa dan kelurahan	Kab. Morowali	10	Desa	201,000,000	ABPD		15	240,000,000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	Kab. Morowali	**77**	**%**	**1,710,000,000**	ABPD		**89**	**1,710,000,000**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	Kab. Morowali	**77**	**%**	**1,710,000,000**	ABPD		**89**	**1,710,000,000**
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang membentuk Lembaga Adat	Kab. Morowali	5	Lembaga	30,000,000	ABPD		5	30,000,000
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga yang terbentuk di Desa/Kelurahan	Kab. Morowali	30	Lembaga	120,000,000	ABPD		30	120,000,000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan peningkatan kapasitas	Kab. Morowali	126	Kegiatan	190,000,000	ABPD		126	190,000,000
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga	Kab. Morowali	126	Unit	50,000,000	ABPD		126	50,000,000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Unit Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan kembangkan di desa dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Morowali	20	Unit	200,000,000	ABPD		20	200,000,000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Kab. Morowali	5	Desa	120,000,000	ABPD		5	120,000,000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang telah melaksanakan 10 program PKK	Kab. Morowali	12	Kegiatan	1,000,000,000	ABPD		12	1,000,000,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase Partisipasi Perempuan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**500,000,000**	ABPD		**100**	**500,000,000**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase OPD dan Satuan Kerja lintas sektor yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender**	Kab. Morowali	**75%**	**%**	**145,000,000**	ABPD		**85%**	**145,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Regulasi pelaksanaan PUG	Kab. Morowali	1	Dokumen	40,000,000	ABPD		1	40,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Morowali	40%	Kegiatan	50,000,000	ABPD		45%	50,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD/satuan kerja yang melaksanakan PUG termasuk PPRG	Kab. Morowali	15%	Kegiatan	25,000,000	ABPD		20%	25,000,000
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Morowali	15%	Kegiatan	30,000,000	ABPD		20%	30,000,000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	Kab. Morowali	**80**	**Orang**	**205,000,000**	ABPD		**100**	**205,000,000**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Morowali	50	Kelompok	150,000,000	ABPD		100	150,000,000

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Morowali	50	Orang	55,000,000	ABPD		100	55,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang telah dilatih**	Kab. Morowali	**50**	**Orang**	**150,000,000**	ABPD		**100**	**150,000,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga penyedia layanan	Kab. Morowali	12	Kegiatan	50,000,000	ABPD		12	50,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	Kab. Morowali	2	Kegiatan	50,000,000	ABPD		2	50,000,000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE yang dilaksanakan	Kab. Morowali	10	Kegiatan	50,000,000	ABPD		10	50,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Data anak Dan Gender**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**250,000,000**	ABPD		**100**	**300,000,000**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**150,000,000**	ABPD		**100**	**150,000,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pendamping	Kab. Morowali	1	Kelompok	25,000,000	ABPD		1	25,000,000
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/sosialisasi kegiatan peningkatan kualitas masyarakat	Kab. Morowali	1	Kelompok	75,000,000	ABPD		1	75,000,000
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dibentuk	Kab. Morowali	1	Kegiatan	50,000,000	ABPD		1	50,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD		**100**	**100,000,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD		1	50,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek/pelatihan	Kab. Morowali	1	Kegiatan	25,000,000	ABPD		1	50,000,000
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD		**100**	**50,000,000**
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan	Kab. Morowali	1	Unit	50,000,000	ABPD		1	50,000,000

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Presentase Data anak Dan Gender**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD		**100**	**50,000,000**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD		**100**	**50,000,000**
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD		1	25,000,000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Data Gender dan Anak	Kab. Morowali	1	Buku	25,000,000	ABPD		1	25,000,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**400,000,000**	ABPD		**100**	**400,000,000**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**100,000,000**	ABPD		**100**	**100,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama	Kab. Morowali	10	Kegiatan	50,000,000	ABPD		10	50,000,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan	Kab. Morowali	1	Kegiatan	50,000,000	ABPD		1	50,000,000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	Kab. Morowali	**38**	**Korban**	**100,000,000**	ABPD		**38**	**100,000,000**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang dirujuk	Kab. Morowali	10	Korban	50,000,000	ABPD		10	50,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	Kab. Morowali	38	Korban	50,000,000	ABPD		38	50,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyedia layanan yang memenuhi standar**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**200,000,000**	ABPD		**100**	**200,000,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana	Kab. Morowali	4	Unit	50,000,000	ABPD		3	50,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek/pelatihan peningkatan SDM tenaga pendamping	Kab. Morowali	30	Orang	50,000,000	ABPD		30	50,000,000
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik	Kab. Morowali	38	Paket	50,000,000	ABPD		38	50,000,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	Kab. Morowali	5	Kegiatan	50,000,000	ABPD		5	50,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**200,000,000**	ABPD		**100**	**200,000,000**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan ramah anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**125,000,000**	ABPD		**100**	**125,000,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD		1	25,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga	Kab. Morowali	1	Kegiatan	100,000,000	ABPD		1	100,000,000

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan ramah anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**75,000,000**	ABPD		**100**	**75,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor	Kab. Morowali	5	Kegiatan	75,000,000	ABPD		5	75,000,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**persentase korban yang mendapatkan layanan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**375,000,000**	ABPD		**100**	**375,000,000**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**persentase anak yang mendapatkan perlindungan kekerasan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**100,000,000**	ABPD		**100**	**100,000,000**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD		5	25,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat	Kab. Morowali	13	Kegiatan	75,000,000	ABPD		13	75,000,000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana layanan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**125,000,000**	ABPD		**100**	**125,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	Kab. Morowali	38	Korban	50,000,000	ABPD		38	50,000,000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Workshop	Kab. Morowali	1	Kegiatan	75,000,000	ABPD		1	75,000,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**150,000,000**	ABPD		**100**	**150,000,000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana	Kab. Morowali	7	Unit	50,000,000	ABPD		7	50,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	Kab. Morowali	1	Kegiatan	50,000,000	ABPD		1	50,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	Kab. Morowali	3	Kegiatan	50,000,000	ABPD		3	50,000,000
TOTAL						**11,062,572,000**				**11,971,572,000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Perencanaan Program dan Kegiatan Dalam Renja Tahun 2024 telah disesuai dengan RPD Kabupaten sehingga tidak terdapat perbedaan antara Renja SKPD dengan RKPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah . Selain itu terdapat beberapa kebutuhan tambahan hasil dari Analisa kebutuhan untuk Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

TABEL
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**6,041,072,000**	ABPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**5,088,490,000**	ABPD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	31	Orang	4,750,570,000	ABPD	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Kegiatan ASN	Kab. Morowali	16	Orang	337,920,000	ABPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**150,000,000**	ABPD	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Morowali	4	Orang	150,000,000	ABPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Administrasi Umum dalam 1 tahun**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**441,932,000**	ABPD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali	1	Unit	30,000,000	ABPD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	13	Unit	54,500,000	ABPD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	2	Paket	60,000,000	ABPD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	12	Paket	57,432,000	ABPD	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	10	Orang	15,000,000	ABPD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	10	Laporan	225,000,000	ABPD	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam setahun**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**70,000,000**	ABPD	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Morowali	2	Unit	40,000,000	ABPD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Kab. Morowali	1	Unit	30,000,000	ABPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah**	Kab. Morowali		**%**	**55,900,000**	ABPD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	12	Laporan	50,000,000	ABPD	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor dalam setahun	Kab. Morowali	5	Paket	5,000,000	ABPD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	12	Bulan	900,000	ABPD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**234,750,000**	ABPD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Morowali	4	Unit	59,750,000	ABPD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara dalam setahun	Kab. Morowali	10	Unit	25,000,000	ABPD	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	1	Unit	150,000,000	ABPD	
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Persentase Penataan Desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**78,000,000**	ABPD	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**78,000,000**	ABPD	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Regulasi Tata Wilayah Desa	Kab. Morowali	2	Dokumen	61,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang memiliki Perdes Kewenangan Lokal berskala desa	Kab. Morowali	42	Dokumen	17,000,000	ABPD	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	Kab. Morowali	**84.9**	**%**	**160,000,000**	ABPD	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama**	Kab. Morowali	**84.9**	%	**160,000,000**	ABPD	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Kab. Morowali	5	Desa	50,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	Kab. Morowali	5	Desa	70,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pembinaan pengembangan kawasan perdesaan	Kab. Morowali	7	Desa	40,000,000	ABPD	

	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**1,298,500,000**	ABPD	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**1,298,500,000**	ABPD	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggaran administasi Pemerintahan Desa yang baik	Kab. Morowali	42	Desa	50,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah regulasi yang di fasiltasi	Kab. Morowali	5	dokumen	110,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RPJMDes/RKPDes	Kab. Morowali	126	dokumen	22,200,000	ABPD	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi sistim keuangan desa	Kab. Morowali	126	Desa	90,000,000	ABPD	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dilatih	Kab. Morowali	126	Orang	61,200,000	ABPD	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah desa	Kab. Morowali	126	Desa	43,200,000	ABPD	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi pelaksanaan APB Desa	Kab. Morowali	126	Desa	110,700,000	ABPD	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Bumdes yang dibina	Kab. Morowali	126	Bumdes	130,000,000	ABPD	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADES	Kab. Morowali	126	Desa	70,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Morowali	12	Desa	35,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mengupdate profil desa, epdeskel dan pemuktahiran Indeks Desa Membangun (IDM)	Kab. Morowali	126	Desa	90,200,000	ABPD	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang menggunakan aplikasi Sipades	Kab. Morowali	126	Desa	55,000,000	ABPD	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas	Kab. Morowali	126	Orang	175,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Morowali	42	Desa	35,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang menyampaikan LPJ Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan	Kab. Morowali	126	Orang	20,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah yang mengikuti lomba desa dan kelurahan	Kab. Morowali	10	Desa	201,000,000	ABPD	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	Kab. Morowali	**77**	**%**	**1,710,000,000**	ABPD	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	Kab. Morowali	**77**	**%**	**1,710,000,000**	ABPD	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang membentuk Lembaga Adat	Kab. Morowali	5	Lembaga	30,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga yang terbentuk di Desa/Kelurahan	Kab. Morowali	30	Lembaga	120,000,000	ABPD	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan peningkatan kapasitas	Kab. Morowali	126	Kegiatan	190,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga	Kab. Morowali	126	Unit	50,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Unit Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan kembangkan di desa dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Morowali	20	Unit	200,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Kab. Morowali	5	Desa	120,000,000	ABPD	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa yang telah melaksanakan 10 program PKK	Kab. Morowali	12	Kegiatan	1,000,000,000	ABPD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase Partisipasi Perempuan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**500,000,000**	ABPD	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase OPD dan Satuan Kerja lintas sektor yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender**	Kab. Morowali	**75%**	**%**	**145,000,000**	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Regulasi pelaksanaan PUG	Kab. Morowali	1	Dokumen	40,000,000	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Morowali	40%	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD/satuan kerja yang melaksanakan PUG termasuk PPRG	Kab. Morowali	15%	Kegiatan	25,000,000	ABPD	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Morowali	15%	Kegiatan	30,000,000	ABPD	

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	Kab. Morowali	**80**	**Orang**	**205,000,000**	ABPD	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Morowali	50	Kelompok	150,000,000	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang diedukasi untuk berpartisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Morowali	50	Orang	55,000,000	ABPD	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang telah dilatih**	Kab. Morowali	**50**	**Orang**	**150,000,000**	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga penyedia layanan	Kab. Morowali	12	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	Kab. Morowali	2	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE yang dilaksanakan	Kab. Morowali	10	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Data anak Dan Gender**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**250,000,000**	ABPD	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**150,000,000**	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pendamping	Kab. Morowali	1	Kelompok	25,000,000	ABPD	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/sosialisasi kegiatan peningkatan kualitas masyarakat	Kab. Morowali	1	Kelompok	75,000,000	ABPD	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dibentuk	Kab. Morowali	1	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek/pelatihan	Kab. Morowali	1	Kegiatan	25,000,000	ABPD	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan	Kab. Morowali	1	Unit	50,000,000	ABPD	

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Presentase Data anak Dan Gender**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**50,000,000**	ABPD	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Data Gender dan Anak	Kab. Morowali	1	Buku	25,000,000	ABPD	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**400,000,000**	ABPD	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**100,000,000**	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama	Kab. Morowali	10	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan	Kab. Morowali	1	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan**	Kab. Morowali	**38**	**Korban**	**100,000,000**	ABPD	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang dirujuk	Kab. Morowali	10	Korban	50,000,000	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	Kab. Morowali	38	Korban	50,000,000	ABPD	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyedia layanan yang memenuhi standar**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**200,000,000**	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana	Kab. Morowali	4	Unit	50,000,000	ABPD	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek/pelatihan peningkatan SDM tenaga pendamping	Kab. Morowali	30	Orang	50,000,000	ABPD	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan kebutuhan spesifik	Kab. Morowali	38	Paket	50,000,000	ABPD	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	Kab. Morowali	5	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase capaian klaster Kabupaten Layak Anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**200,000,000**	ABPD	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan ramah anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**125,000,000**	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lembaga	Kab. Morowali	1	Kegiatan	100,000,000	ABPD	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan ramah anak**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**75,000,000**	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor	Kab. Morowali	5	Kegiatan	75,000,000	ABPD	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**persentase korban yang mendapatkan layanan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**375,000,000**	ABPD	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**persentase anak yang mendapatkan perlindungan kekerasan**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**100,000,000**	ABPD	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan	Kab. Morowali	1	Dokumen	25,000,000	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama lintas sektor, pelaksanaan KIE, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat	Kab. Morowali	13	Kegiatan	75,000,000	ABPD	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana layanan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**125,000,000**	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan, penjangkauan dan pemulihan korban	Kab. Morowali	38	Korban	50,000,000	ABPD	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Workshop	Kab. Morowali	1	Kegiatan	75,000,000	ABPD	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	Kab. Morowali	**100**	**%**	**150,000,000**	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana	Kab. Morowali	7	Unit	50,000,000	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Pelatihan SDM tenaga pendamping	Kab. Morowali	1	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/kerjasama antar lembaga	Kab. Morowali	3	Kegiatan	50,000,000	ABPD	
					TOTAL	11.062.572.000	ABPD	

RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)



DISKOMINFO

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali

TAHUN 2024

Jalan Trans Sulawesi
Kompleks Perkantoran Fonuasingko

BAB I
PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi RKT OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RKT OPD memuat hasil evaluasi RKT tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Tahuan OPD, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta anggaran yang diperlukan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Bidang kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Ononom baru (DOB).

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. RKT OPD Juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2024 untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah (DKISP) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 202, meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

   1.1 Latar Belakang

   1.2 Landasan Hukum

   1.3 Maksud dan Tunjuan

   1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

   Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

   2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

   2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

   2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

   3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

   3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

   3.3 Program dan Kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5. BAB V PENUTUP

   Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Opd Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerjaprogram dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi di dasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan RenjaOPD tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan.Adanya beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2021 ketahun 2022 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - AdministrasiUmumPerangkat Daerah
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya
        - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
   - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
     - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
     - Pelayanan Informasi Publik
     - Layanan Hubungan Media
3. Program Aplikasi Informatika
   - Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota
     - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
     - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
   - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
     - Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
     - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
     - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
     - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian output/hasil dari Program Administrasi Perkantoran sebesar 100% karena kegiatan-kegiatan tersebut mampu mendukung kelancaran administrasi perkantoran dengan baik.

Tabel T-C. 29

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2024

Laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1.	**Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah**									
1.1	**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**									
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
2.16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**									
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2.16.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***									
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	- Dok	- Dok	- Dok	0%	1 Dok	- Dok	0%
2.16.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Jumlah ASN yang dibayarkan Gajinya dan Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan jasanya								
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	- Bulan	- Bulan	- Bulan	0%	12 Bulan	- Bulan	0%
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	36 Bulan	- Bulan	- Bulan	- Bulan	0%	12 Bulan	- Bulan	0%
2.16.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Yang Cepat dan Efisien								
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Yang Cepat dan Efisien	3 Paket	- Paket	- Paket	- Paket		1 Paket	1 Paket	33%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor	3 Paket	- Paket	- Paket	- Paket		1 Tahun	1 Paket	33%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya belanja penggandaan	3 Paket	- Tahun	- Paket	- Paket		1 Tahun	1 Tahun	33%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaran rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rakor dan konsultasi	3 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan		1 Laporan	1 Tahun	33%
2.16.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dar	9 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan		3 Laporan	3 Laporan	33%

1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin Operasional Dinas	12 Unit	- Unit	- Unit	- Unit		4 Unit	4 Unit	33%
2.16.02	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**									
2.16.02.2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Tersedianya Informasi yang akurat dan akuntabel tentang pembangunan daerah								
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	perumusan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	12 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		5 Dokumen	5 %	42%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		10 Dokumen	10 %	40%
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi	300 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		144 Dokumen	144 Dokumen	48%
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	45 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	33%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	180 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		69 Dokumen	69 Dokumen	38%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	15 Layanan	- Layanan	- Layanan	- Layanan		5 Layanan	5 Layanan	33%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	36 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33%
2.16.02.2.01.09	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	- Orang	- Orang	- Orang		9 Orang	9 Orang	45%
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	3 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	3 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33%

1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	- Unit	- Unit	- Unit		1 Unit	1 Unit	100%
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**									
2.16.03.2.01	***Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali***									
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan Informasi dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelengaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penatalaksanaan Informasi dan Pengawasan Nama	3 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daearah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daearah	8 Unit	- Unit	- Unit	- Unit		2 Unit	2 Unit	25%
2.16.03.2.02	***Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat data Pemerintah Daerah yang dikelola	3 Unit	- Unit	- Unit	- Unit		1 Unit	1 Unit	33%
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya perangkat pendukung sistem komunikasi Pemda	6 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33%
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	3 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33%
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Layanan	- Layanan	- Layanan	- Layanan		4 Layanan	4 Layanan	33%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33%

1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**									
2.20.02.2.01	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***									
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	12 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	33%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	9 Orang	- Orang	- Orang	- Orang		4 Orang	4 Orang	44%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	30 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	33%
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	60 Orang	- Orang	- Orang	- Orang		30 Orang	30 Orang	50%
2.20.02.2.01.03	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	15 Unit	- Unit	- Unit	- Unit		5 Unit	5 Unit	33%
2.20.02.2.01.06	Penyelengaaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	300 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	33%
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**									
2.21.02.2.01	***Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***									
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	42%
2.21.02.2.02	***Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota***									
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah	- Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	50%

2.2. Analisis Kinerja PelayananPerangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Daerah sebagai unsure pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di bidang komunikasi dan informatika mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan komunikasi dan informatika;
2. Penyelenggaraan urusan umum dan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
5. Pelaksanaan pengasawan,pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Daerah mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public semakin tinggi. Pelayanan yang bersifat pasti dalam persyaratan,waktu,beaya serta akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu di wujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;.
2. Daya kirtis masyarakat bertambah dan akses terhadap media semakin luas dengan berbagai pilihan dan kemudahan.Oleh karena itu,Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dituntut untuk melakukan pemilihan media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan dan meningkatkan kualitas isi pesan yang diproduksi;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) dalam pelayanan masyarakat belum optimal dan masih harus ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam penguasaan teknologi informasi, profesionalisme dan kepribadian SDM;
4. Pengamanan terhadap sumber-sumber informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang harus senantiasa ditingkatkan demi keamanan informasi.

Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali adalah sebagaiberikut:

1. Semua OPD terjangkau system informasi dan terlaksananya pemanfaatan TI dalam segala bidang pembangunan di Kabupaten Morowali;
2. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran serta terbentuk kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui berbagai media termasuk media baru (internet);
3. Masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui media yang efektif;
4. Semua mekanisme kerja pada Dinas dalam Standar Operasional Prosedur(SOP)yang baku;
5. Tersedianya data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan di Daerah;.
6. Keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi			Catatan Analisis
					2024	2025	2023	2024	2025	2026	2022	2025	20	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola				65%	70%	75%							
2.	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				43,99%	46,24%	48,49%							
3.	Indeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh Kempan-RB				2,20%	2,40%	2,50%							
4.	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				30%	40%	60%							
5.	Persentase Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				80%	85%	95%							

6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				36%	46%	54%							
7.	Presentase Perangkat daerah yang Menyelenggarakan Satistik Sektoral				36%	54%	71%							
8.	Indeks SPBE Kabupaten Morowali pada Domain Manajemen SPBE				1%	2%	3%							
9.	Persentase Jumlah Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Morowali				5%	10%	15%							
10.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Pola Hubungan Sandi				15%	25%	30%							

2.3. Isu-isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Daerah (DKISP).

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali merupakan SKPD Kabupaten Morowali yang baru terbentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun2016. Berdasarkan hal tersebut Diskominfo Kabupaten Morowali melanjutkan program/kegiatan yang sudah terbentuk, sehingga program/kegiatan tidak dapat disesuaikan dengan kondisi ideal.

2.3.2 Permasalahandan Hambatan

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP), maka dapat diidentifikasi beberapa perrnasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa local maupun jaringan nasional;
2. Jejaring informasi antar OPD Kabupaten Morowali khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negative belum optimal;
3. Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elekronik, maupun sosial;
4. Pelaksanaan sosialisasi hasil pembangunan melalui A< Metra belum optimal;
5. Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok lnformasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
6. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok lnformasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
7. Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku jurnalistik;
8. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Program Kehumasan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Perlunya peningkatan jejaring komunikasi antara petugas kehumasan melalui Bakohumas;
10. Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi;
11. Lemahnya kesadaran masyarakat dalarn pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keter bukaan informasi publik;

12. Validasi, pemanfaatan, pengefolaan dan pengintegrasian data statistik;
13. Pembangunan aplikasi dengan platform dan struktur berbeda;
14. Pengelolaan pusat application protocol interface belum optimal;
15. Telah tersedia Rencana Induk TIK Morowali, namun tidak selaras dengan Program Kinerja OPD;
16. Data centre belum optimal;
17. Pengelolaan jaringan internet dan intranet diKabupatenMorowali belum optimal;
18. Belum tersedianyasarana dan prasarana penunjang Morowali TV;
19. Kurangnya pedoman teknis terkait e-Government;
20. Sertifikasi keamanan informasi standar internasional belum terlaksana;
21. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian;
22. Belum optimalnya penggunaan Sertifikat Elektronik/Digital pada proses Pengadaan Secara Elektronik;
23. Belum optimalnya pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan, keamanan informasi dan kapasitaslayanan LPSE;
24. Sarana dan Prasarana penunjang Smart City yang kurang memadai;
25. SDM yang memiliki sertifikat keahlian Persandian dan Keamanan Informasi yang belum tersedia;
26. Penyediaan Aplikasi Publik (*e-hibah*)untuk mendukung fungsi control bantuan APBN dan APBD.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP)dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembanguna nantara lain:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SPM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Masi adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/seksi/subbagian;
3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai;
4. Keselarasan dan sinergi program/kegiatanbelum optimal.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Terhadap Capaian Nasional/Internasional.Perumusan indicator pembangunan yang menjadi

tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali pada dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2021-2022 belum dapat memberikan dampak yang diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota.

2.3.4.Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluangyang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan
   a. Kesenjangan informasi dimasyarakat Morowali;
   b. Pesatnya perkembangan TIK;
   c. Ketersediaan lnfrastruktur TIK yang belum merata diMorowali;
   d. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Morowali terhadap TIK;
   e. Tuntutan keterbukaan data daninformasi;

   Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pernerintah Kabupaten Morowali melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.
2. Peluang
   a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public Morowali berbasis teknologi informasi;
   b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di KabupatenMorowali;
   c. Kesadaran masyarakat Morowali akan pentingnya data informasi dan komunikasi;
   d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Morowali berbasis elektronik;
   e. Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai bagian mitra kerja.

2.3.5.Isu-IsuPenting

lsu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Morowali dapat tergambarkan melalui isu strategis yaltu kondisi atau hal yang harus

diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. isu strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Morowali yaitu:

1. Belum optirnalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data ststistik sektoral;
4. Masih rendahnya diserninasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.4.1. Identifikasi Program/Kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Hasil identifikasi dari program/kegiatan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP)Kabupaten Morowali semua telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

2.4.2. Perbandingan RancanganAwal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Dari hasil pencermatan internal terdepan adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD. Walaupun adanya efisiensi anggaran tetapi tidak mengurangi target berdasarkan hasil pembahasan perencanaan kerja.

2.4.3. Catatan Penting.

Beberapa kegiatan KPID akandi identifikasikan terkait rencana pelepasan struktur organisasi KPID dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Morowali. Identifikasi ini adalah terhadap rancangan awal RKPD, sehingga masih ada pergeseran pada saat rancangan akhir RKPD.

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Morowali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Morowali

NO	Rancangan Awal RKPD										Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Diskominfo**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**		**4.239.081.310**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Diskominfo**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**		**4.197.856.729**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Diskominfo**	**Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang cepat dan efisien**	**100%**	**2.615.753.276**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Diskominfo**	**Persentase peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang cepat dan efisien**	**100%**	**2.615.753.276**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.860.673.276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.860.673.276	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	755.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	755.080.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Diskominfo**	**Persentase Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**100%**	**1.533.958.034**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Diskominfo**	**Persentase Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**100%**	**1.499.150.853**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Diskominfo	Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	13.024.800		Diskominfo	Persentase Ketersediaan kompenen instalasi listrik	1 Paket	12.030.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan	2 Paket	853.121.344	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Meningkatnya Pelayanan Administrasi yang cepat dan efisien	2 Paket	842.249.606	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	2 Paket	24.011.680	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Terpenuhinya belanja alat tulis kantor	2 Paket	24.011.640	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	1 Paket	472.917.210	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan	1 Paket	450.055.157	
	Penyelenggaran rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	12 Bulan	170.883.000	Penyelenggaran rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	12 Bulan	170.803.850	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Diskominfo**	**Persentase Terpenuhinya jasa pelayanan kantor**	**100%**	**63.620.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Diskominfo**	**Persentase Terpenuhinya jasa pelayanan kantor**	**100%**	**59.864.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Terlaksananya surat menyurat dengan baik	100%	1.596.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Terlaksananya surat menyurat dengan baik	100%	1.596.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Tersedianya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	62.024.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Tersedianya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	58.268.000	

NO	Rancangan Awal RKPD										Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Diskominfo**	**Terlaksananya pemeliharaan rutin operasional dinas**	**3 Unit**	**25.750.000**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Diskominfo**	**Terlaksananya pemeliharaan rutin operasional dinas**	**3 Unit**	**23.088.600**	
2	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Tersebar**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan offline**	**100%**	**653.753.000**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Tersebar**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan offline**	**100%**	**653.753.000**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	**Tersebar**	**Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**816.265.224**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah**	**Tersebar**	**Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**814.993.330**	
	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersebar	Persentase Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	196.178.000	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersebar	Cakupan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	195.584.730	
	Pelayanan Informasi Publik	Tersebar	Persentase publikasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Online dan Offline	100%	220.423.224	Pelayanan Informasi Publik	Tersebar	Persentase publikasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Online dan Offline	100%	220.000.100	
	Layanan Hubungan Media	Tersebar	Jumlah Hubungan Media untuk Publikasi kegiatan Pemerintah Daerah	3 Layanan	399.664.000	Layanan Hubungan Media	Tersebar	Jumlah Hubungan Media untuk Publikasi kegiatan Pemerintah Daerah	3 Layanan	399.408.500	
3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Tersebar**	**Jumlah Aplikasi Informatika**	**100%**	**2.774.021.160**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Tersebar**	**Jumlah Aplikasi Informatika**	**100%**	**2.551.839.727**	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali	**Tersebar**	**Persentase OPD yang menerapkan e-Government**	**100%**	**1.894.699.560**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali**	**Tersebar**	**Persentase OPD yang menerapkan e-Government**	**100%**	**1.881.558.727**	
	Penatalaksanaan Informasi dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelengaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kab/Kota	100%	65.100.000	Penatalaksanaan Informasi dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelengaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kab/Kota	100%	64.844.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersebar	Cakupan Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100%	1.829.599.560	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersebar	Cakupan Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100%	1.816.714.727	
	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Semakin kuatnya kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government	100%	879.321.600	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Semakin kuatnya kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government	100%	670.281.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Persentase Penatalaksanaan dan Pengawasan akses internet di OPD dan di Desa	100%	41.735.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	Persentase Penatalaksanaan dan Pengawasan akses internet di OPD dan di Desa	100%	41.680.000	
	Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah	Tersebar	Persentase Penyediaan Perangkat Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	100%	19.875.000	Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah	Tersebar	Persentase Pemenuhan Perangkat Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	100%	19.875.000	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersebar	Persentase Penyediaan perangkat jaringan OPD	100%	81.699.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersebar	Persentase Penyediaan perangkat jaringan OPD	100%	82.343.536	

NO	Rancangan Awal RKPD										Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	130.712.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersebar	Jumlah Aplikasi Informatika dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	130.703.000	
3.1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersebar	Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Aplikasi	605.300.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersebar	Profil statistik yang dipublikasikan	7 Aplikasi	603.956.560	
	JUMLAH				**7.666.855.470**	**JUMLAH**				**7.403.449.456**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat Dilihat Pada Tabel T-C.32. Dibawah Ini :

***Tabel T-C.32.**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah	A
2		Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Layanan Informasi Publik	Indeks SPBE Kabupaten Morowali Hasil Evaluasi dan Pemantauan tahun Oleh Kempan-RB	2,2 dari Skala 5
			Persentase informasi dan komunikasi Publik yang dikelola	65%
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	36%
			Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen SPBE	25%

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat guna penyediaan data untuk pembangunan. Pelaksanaan program diprioritaskan pula untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Tengah yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Membangun pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, komunikasi dan penyebarluasan informasi yang efektif untuk mendukung terwujudnya ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

   Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali Tahun 2023-2026 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023;
c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali;
e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali.

2. Sasaran

Pelaksanaan e-Government deseminasi Informasi, ketersediaan data dan keamanan informasi yang maksimal.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government;
2. Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing Bidang;
b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maupun Pemerintah Kabupaten Morowali.

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali, dirancang program- program sebagai berikut:

Tabel T-C.33

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Morowali
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah**								
1.1	**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**								
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**				**14.069.414.637**				**14.069.414.637**
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan		100%	**6.488.938.122**			100%	**6.488.938.122**
2.16.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo Morowali	100%	**20.000.000**			100%	**20.000.000**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	20.000.000	DBH		1 Dokumen	20.000.000
2.16.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo Morowali	66%	**4.113.745.132**			66%	**4.113.745.132**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan/20 Orang	2.745.505.132	DAU		12 Bulan/20 Orang	2.745.505.132
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1.368.240.000	DBH		1 Dokumen	1.368.240.000
2.16.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo Morowali	100%	**2.128.393.230**			100%	**2.128.393.230**
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	1.425.381.047	DBH		1 Paket	1.425.381.047
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	263.972.483	DBH		1 Paket	263.972.483
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	267.924.700	DBH		1 Paket	267.924.700
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaran rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaran rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	171.115.000	DBH		1 Laporan	171.115.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Morowali	100%	**170.299.760**			100%	**170.299.760**
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan hasil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	107.939.760	DBH		1 Laporan	107.939.760
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		3 Laporan	62.360.000	DBH		3 Laporan	62.360.000
2.16.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Morowali	100%	**56.500.000**			100%	**56.500.000**
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		4 Unit	56.500.000	DBH		4 Unit	56.500.000
2.16.02	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola		65%	**2.085.797.395**			65%	**2.085.797.395**
2.16.02.2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	43,99%	**2.085.797.395**			43,99%	**2.085.797.395**
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		5 Dokumen	74.926.000	DBH		5 Dokumen	74.926.000
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		10 Dokumen	24.980.000	DBH		10 Dokumen	24.980.000
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		144 Dokumen	149.934.750	DBH		144 Dokumen	149.934.750
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		15 Dokumen	227.339.000	DBH		15 Dokumen	227.339.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik		69 Dokumen	39.995.000	DBH		69 Dokumen	39.995.000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		5 Layanan	978.354.000	DBH		5 Layanan	978.354.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		12 Dokumen	50.024.500	DBH		12 Dokumen	50.024.500
2.16.02.2.01.09	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya		9 Orang	45.192.915	DBH		9 Orang	45.192.915
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		1 Dokumen	49.609.000	DBH		1 Dokumen	49.609.000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi		1 Dokumen	14.880.000	DBH		1 Dokumen	14.880.000
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	430.562.230	DBH		1 Unit	430.562.230
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	Morowali hasil Evaluasi Kementerian PANRB		2,2 skala 5	**4.217.598.150**			2,2 skala 5	**4.217.598.150**
2.16.03.2.01	***Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali***	Persentasi Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali	30%	**3.748.731.150**			30%	**3.748.731.150**
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan Informasi dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelengaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen enatalaksanaan Informasi dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelengaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	65.100.000	DBH		1 Dokumen	65.100.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daearah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh		2 Unit	3.683.631.150	DBH		2 Unit	3.683.631.150
2.16.03.2.02	***Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Persentase Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Morowali	80%	**468.867.000**			80%	**468.867.000**
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	39.560.000	DBH		1 Dokumen	39.560.000
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat data Pemerintah Daerah yang dikelola		1 Unit	58.972.000	DBH		1 Unit	58.972.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya perangkat pendukung sistem komunikasi Pemda		2 Dokumen	37.911.000	DBH		2 Dokumen	37.911.000
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		1 Dokumen	148.766.000	DBH		1 Dokumen	148.766.000
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan Publik yang terhubung dengan Sistem		4 Layanan	41.558.000	DBH		4 Layanan	41.558.000
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City		1 Dokumen	17.100.000	DBH		1 Dokumen	17.100.000
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	125.000.000	DBH		1 Dokumen	125.000.000
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Statistik Sektoral		36%	**755.547.700**			36%	**755.547.700**
2.20.02.2.01	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	36%	**755.547.700**			36%	**755.547.700**
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik		4 Dokumen	424.604.740	DBH		4 Dokumen	424.604.740
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		4 Orang	71.128.000	DBH		4 Orang	71.128.000
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun		10 Dokumen	133.770.960	DBH		10 Dokumen	133.770.960
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		30 Orang	15.000.000	DBH		30 Orang	15.000.000
2.20.02.2.01.03	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		5 Unit	64.344.000	DBH		5 Unit	64.344.000
2.20.02.2.01.06	Penyelengaaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun		100 Dokumen	46.700.000	DBH		100 Dokumen	46.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Morowali		5%	**521.533.270**			5%	**521.533.270**
2.21.02.2.01	***Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	100%	**499.933.270**			100%	**499.933.270**
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	125.274.870	DBH		1 Dokumen	125.274.870
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi		1 Laporan	55.256.000	DBH		1 Laporan	55.256.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis		2 Laporan	107.602.400	DBH		2 Laporan	107.602.400
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi		5 Perangkat Daerah	211.800.000	DBH		5 Perangkat Daerah	211.800.000
2.21.02.2.02	***Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota***	Persentase Perangkat Daerah terhubung dengan Pola Hubungan Sandi	Tersebar	15%	**21.600.000**			15%	**21.600.000**
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi		5 Perangkat Daerah	21.600.000	DBH		5 Perangkat Daerah	21.600.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Adapun Rencana Kerja dan Pendaanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 seperti pada Tabel 4. 1 Dibawah ini :

RRENCANA PROGRAM	PENDANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah	**13.440.353.600**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.059.506.000**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.182.120.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.182.120.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**196.200.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.200.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.205.500.000**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000
Belanja makan minum Rapat	30.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.500.000
Penyediaan Barang Cetakan	

		dan Penggandaan	650.000.000
		Penyelenggaran rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**280.000.000**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100.186.000**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.036.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**95.500.000**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	60.000.000

	Lainnya	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**4.233.000.000,00**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**4.233.000.000,00**
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	375.000.000,00
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	150.000.000,00
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	170.000.000,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.100.000.000,00
	Pelayanan Informasi Publik	675.000.000,00
	Layanan Hubungan Media	750.000.000,00
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	213.000.000,00
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	213.000.000,00
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	74.290.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	50.000.000,00
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		**4.245.000.000**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**3.065.000.000**
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.000.000.000
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	1.180.000.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	250.000.000

	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	360.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	20.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	200.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		**1.112.847.600**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kota	1.112.847.600
	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dimensi Statistik Sektoral	826.601.600
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	73.296.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	50.400.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	96.000.000
	Pengembangan Infrastrukrur	38.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	28.550.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		**790.000.000**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	250.000.000
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	250.000.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja OPD Tahunan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan tata kelola.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap Bidang dan Seksi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat;
3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Bungku, 03 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Daerah
Kabupaten Morowali



BADIUZ ZAMAN, ST, MT

NIP. 197307272000121006





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

RENCANA KERJA 2024



DINAS KOPERASI UMK

pngtree.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Rencana Kerja Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2024.

Buku Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali Tahun 2024. Besar harapan kami supaya dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali.

Bungku, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Morowali,

Dr. Hj. ST. ASMA UL HUSNA SYAH, S.E., M.M., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670202 200001 2 002

DAFTAR ISI

Sampul 1

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 14

1.4 Sistematika Penulisan 15

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 22

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 22

3.3 Program dan Kegiatan..... 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 28

BAB V PENUTUP 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya, Hasil Evaluasi Renja Tahun Berjalan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan Renja

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali ini akan dijadikan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahun.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

1.1.2 Tahapan Penyusunan Renja

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja
    1. Pembentukan Tim Penyusunan Renja
    2. Orientasi mengenai Renja
    3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
    4. Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Dinas koperasi, Usaha mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali berdasarkan Renstra Dinas
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujan dan sasaran
7. Penelahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat daerah
10. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
11. Pembahasan forum Perangkat Daerah dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

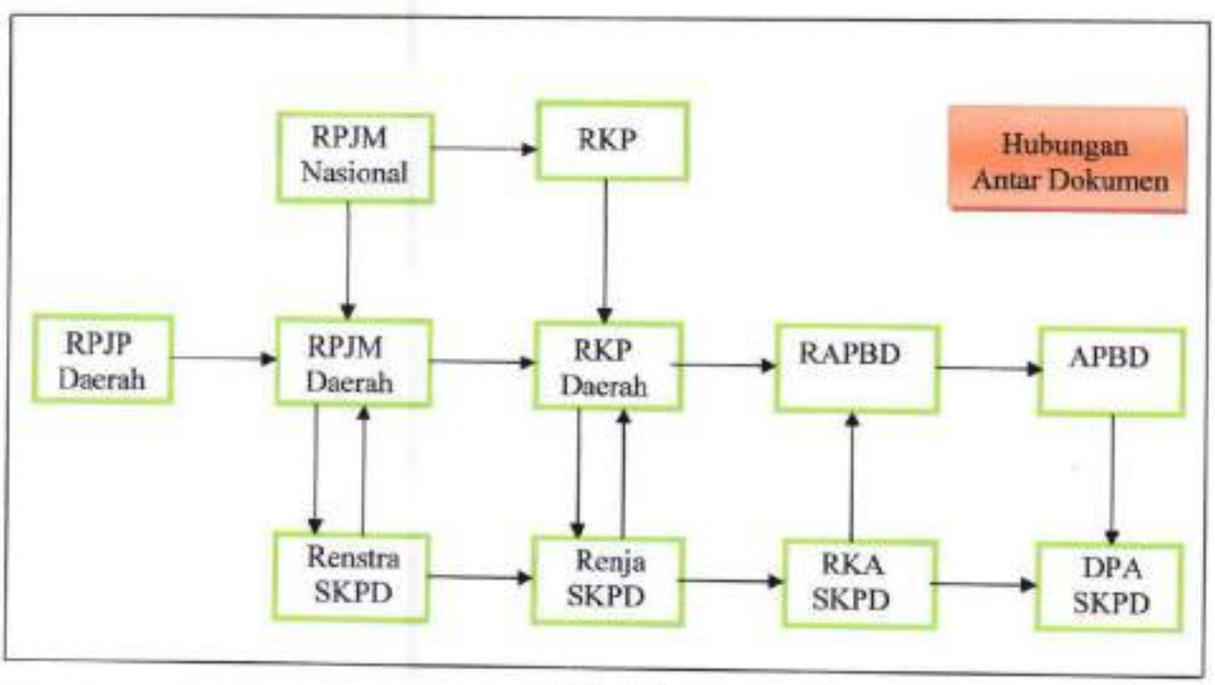
d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena system perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 07 /Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
23. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);
24. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2017 tentang Pengembangan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor);
26. Peraturan Bupati Morowali No. 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No. 17 Tahun 2017 tentang pengembangan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro;
27. Peraturan Bupati Morowali No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggangaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungajawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
28. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
29. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah untuk perencanaan pengembangan penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama satu tahun serta mengukur kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan

evaluasi kinerja sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai bagian:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menguraikan bagian:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan bagian:

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP, memberikan penjelasan secara ringkas mengenai pelaksanaan, kecukupan anggaran atau tidak, kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, dan informasi nama perangkat daerah dan pengesahan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang dimaksud.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali untuk tahun anggaran 2024 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 22.002.160.182.-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 6 (enam) program, 12 (duabelas) kegiatan & 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Dapat dilihat padaTabel. 2.1 dan 2.2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali sebagai berikut:

1. Kelembagaan dan Manajemen Koperasi dan UMKM.

   Kelembagaan dan manajemen menjadi perhatian serius bagi Koperasi dan UMKM dalam upaya pembangunan jangka menengah di Kabupaten Morowali. Berdasarkan hasil evaluasi masih banyak Koperasi yang belum melakukan RAT, masih ditemukan

Tabel 7.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

"Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah" Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 11/4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan (%)**	**100%**	**93,27%**	**100%**	**70.7%**	**0.71**	**100%**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	**0%**	**0%**	**0%**	**0.00%**	**0%**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**0.68**	**100%**		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	0	19%	0%	0.00%	0%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penujang Administrasi Umum	100%	**95,23%**	**100%**	**72,35%**	0.72	**100%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Barang milik Daerah yang menjadi kebutuhan	100%	99,81%	100%	99,04%	0.99	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100%	42,37%	100%	31,28%	0.31	100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketersediaan anggaran barang milik daerah yang dipelihara	100%	82,31%	100%	95,39%	0.95	100%		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Presentase koperasi yang aktif (%)**	**32,50%**	**0.00%**	**36.36%**	**60%**	1.65	**36,36%**		
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Koperasi yang melaksanakan RAT	16,67%	**0%**	**36,36%**	**60%**	1.65	38,02%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Presentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**4,38%**	**98,43%**	**33.00%**	**60%**	1.82	**35.00%**		
					Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	17,31%	98,43%	45,45%	60%	1.32	50%		
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Presentase Pengurus Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)**	**70%**	**96,21%**	**100%**	**11,12%**	0.11	**100%**		
					Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)	7,05%	96,21%	100%	13,33%	0.13	100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Presentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)**	**6,41%**	**42,71%**	**41,3%**	**6,6%**	0.16	**41,3%**		
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Koperasi yang mendapatkan bantuan modal (%)	0,64	42,71	4,13%	9,09%	2.20	2,48%		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)	**Presentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**	**1,46%**	**86,28%**	**83,33%**	**8,3%**	0.10	**6.00%**		
					Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan (%)	3,76%	**86,28%**	**4,93%**	**3,89%**	0.79	**6.00%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Reaja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	**Presentase Usaha Miro yang menjadi Usaha Kecil (%)**	**1,25%**	**98,46%**	**49,8%**	**8,3%**	0.17	**6%**		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Presentase Pelaku UMKM yang difasilitasi bantuan permodalan	0,87%	98,46	4,98%	8,3%	1.67	6%		

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah "Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah"
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	11	12	12	13
1	Persentase koperasi aktif			37,33%	38,00%	36,67%	37,33%	60.00%	40,12%	36,67%	37,33%	
2	Jumlah Koperasi yang RAT			15	16	14	15	13	14	14	15	
3	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah			5500	6000	5216	5500	5280	5355	5216	5500	

Koperasi dengan kriteria tidak sehat dan belum berkualitas. Disisi lain, juga belum optimalnya pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM akibat dari terbatasnya jangkauan pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi karena keterbatasan jumlah tenaga PPKL dan tenaga Pendamping UMKM dilapangan belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Tata Kelola Koperasi dan UMKM

Perkembangannya Koperasi maupun UMKM masih melakukan pengelolaan usaha secara konvensional dan belum dikelola secara professional baik dalam hal manajemen usaha maupun manajemen keuangan. Memperhitungkan potensi dan resiko dalam berusaha belum menjadi perhatian utama dalam pegelolaan usahanya.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan masalah yang cukup dilematis baik dari pelaku Koperasi maupun pelaku UMKM. Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil dan koperasi akibat dari tingkat pendidikan yang masih rendah serta *soft skill* yang belum mumpuni.

4. Produktifitas

Nilai Tambah dan Daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Rendahnya produktivitas dan daya saing masih menjadi problem klasik yang mengganjal perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali keterbatasan jumlah tenaga terampil berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan.

5. Akses Pembiayaan/Permodalan, Kemitraan dan Pemasaran Koperasi dan UMKM.

Permasalahan Koperasi dan UMKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pelaku usaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk

b. Pendorong

1. Akses untuk pembentukan koperasi semakin mudah;
2. Terbukanya akses kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan para stakeholder/pihak lain (perusahaan);
3. Tingginya akses masyarakat untuk bekerja disektor usaha mikro;
4. Iklim investasi yang kondusif, sehingga banyak investor masuk menanamkan investasi baik asing maupun domestik sehingga diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian yang mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM;
5. Akses permodalan semakin mudah dengan hadirnya dunia perbankan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali, dapat dilihat pada Tabel. 2.3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan koperasi, pelaku usaha mikro,

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Perangkat Daerah Dinas koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : **Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
Periode / Tahun : **2023**

No	Rancangan Awal RKPD (2023/Penetapan)					Hasil Analisis Kebutuhan (2024)				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan (%)**	**100%**	**4,480,510,156**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan (%)**	**100%**	**14,116,262,551**
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintah yang di laksanakan**	100%	**15,360,000**
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	7,680,000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	7,680,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase capaian Realisasi Keuangan Dinas Kopumkm (%)**	**100%**	**3,200,652,085**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**3,951,914,744**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	2,614,572,085	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	22	3,207,539,744
	Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah yang dibayarkan honornya (bulan)	26	586,080,000	Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Gaji Non ASN (orang/bulan)	26	661,200,000

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	2	83,175,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ASN Dinas KOPUMKM yang mengikuti Diklat (%)**	**0**	0	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan**	**100%**	**131,985,500**
						Peningkatan Sarana dan Prasaran Disiplin Pegawai	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	2	6,957,500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah yang mengikuti Diklat (orang)	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3	66,500,000
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan (orang)	3	58,528,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum Dinas Kopumkm (%)**	**100%**	**1,083,047,621**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**851,696,149**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	20	183,287,890	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	12	71,929,815
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan (paket)	15	416,408,631	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	12	169,796,334
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan (lembar)	8512	44,976,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)	70,550	61,919,500

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	34	438,374,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (laporan)	20	548,050,500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah (%)**	**100%**	**117,988,450**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**9,079,615,710**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	**0**	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (unit)	4	734,652,450
	Pengadaan Mebel	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	25	117,988,450	Pengadaan Mebel	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	10	275,723,452
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	1	8,069,239,808
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**100%**	**42,822,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**44,690,448**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (bulan)	12	41,922,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	12	43,790,448
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	12	900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	900,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintah (%)**	**100%**	**36,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**41,000,000**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	4	36,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	2	41,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	0	0					
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Presentase koperasi yang aktif (%)**	**38%**	**76,525,000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Persentase Koperasi Yang Aktif**	**32,50%**	**109,938,500**
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Meningkatnya Koperasi Yang Berkwalitas (%)**	**38%**	**76,525,000**	**Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT**	**32,50%**	**109,938,500**
	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandiriaan, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah koperasi yang bersertifikat NIK (unit)	55	48,729,000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (unit usaha)	5	109,938,500
	Pemerikasaan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Koperasi RAT (kelompok)	15	27,796,000					
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**Presentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**72,29%**	**29,919,500**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERSI**		**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4,38%**	**119,979,500**

	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Presentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)**	**50%**	**29,919,500**	**Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT**	**4,38%**	**119,979,500**
	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (unit)	10	29,919,500	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (unit usaha)	27	99,989,500
						Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan (unit usaha)	3	19,990,000
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Presentase Pengurus Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)**	**100%**	**510,785,400**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**100%**	**177,997,790**
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Presentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)**	**100%**	**510,785,400**	**Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan**	**70,00%**	**177,997,790**
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompentensi SDM Koperasi	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	40	510,785,400	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompentensi SDM Koperasi	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	35	177,997,790

5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Presentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)**	**2%**	**5,248,141,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**6,41%**	**149,938,000**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Presentase Koperasi yang mendapatkan bantuan modal (%)**	**2%**	**5,248,141,000**	**Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Persentase Koperasi yang mendapatkan bantuan modal**	**6,41%**	**149,938,000**
	Pemberdayaan Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah koperasi yang dibina (unit)	3	5,248,141,000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (unit usaha)	30	149,938,000
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)**		**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)**	**6.00%**	**1,267,678,190**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM**		**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha**	**1,46%**	**7,328,043,841**
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Persentase usaha mikro yang diberdayakan (%)**	**6.00%**	**1,267,678,190**	**Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan**	**1,46%**	**7,328,043,841**

	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha mikro yang dibina yang menyampaikan laporan perkembangan usaha (unit usaha)	200	194,144,400					
						Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan uasaha mikro (unit usaha)	4	6,626,427,331
	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha mikro yang bermitra (unit usaha)	20	66,152,500	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan (unit usaha)	50	51,029,900
	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha mikro yang memiliki izin (unit usaha)	275	56,951,200	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangaan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang telah menrima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (unit usaha)	50	600,630,610
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangaan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan (orang)	40	881,674,090	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro (orang)	5	49,956,000
	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah temu koordinasi yang dilaksanakan (kegiatan)	5	68,756,000					

7	**PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**		**Presentase Usaha Miro yang menjadi Usaha Kecil (%)**	**6.00%**	**3,772,251,127**					
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**Presentase Pelaku Usaha Mikro yang Naik Kelas (%)**	**6.00%**	**3,772,251,127**					
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi (Unit)	10	3,772,251,127					
					15,385,810,373.00					**22,002,160,182**

masyarakat serta organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan usulan dan sasaran program atau kegiatan dari para stakeholders.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan diperoleh melalui penelitian dan pengamatan lapangan, kunjungan kerja Kepala Daerah, pelaksanaan musrenbang kecamatan/kabupaten serta melalui proses pembahasan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20/2008 tentang UMKM. RPJPN menekankan bahwa kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam guna meningkatkan PAD, peningkatan taraf hidup masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pelibatan UMKM dan Koperasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi hak-hak pekerja serta tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

3.2.1 Tujuan

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik ;

3.2.2 Sasaran

a. Meningkatkan koperasi yang berkualitas;

b. Meningkatnya volume usaha UMKM

c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas koperasi dan UMKM daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 3.1

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Periode 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2024	
			Target	Rp
1	2	5	7	8
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Pendapatan Perkapita	400,10-420,00	**7,885,897,631**
	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas	9,6%	
	Meningkatnya volume usaha UMKM	Rata - rata omzet usaha UMKM	2.000.000	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Sakip	B	**14,116,262,551**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM	Nilai Sakip Dinas Koperasi dan UMKM	B	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah OPD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Berikut rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2024 terdiri atas ;

Jumlah Program	: 6
Jumlah Kegiatan	: 12
Jumlah Sub Kegiatan	: 27
Belanja Operasi	: Rp. 12.807.080.317
Belanja Modal	: Rp. 9.195.079.865

Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali :

a. Program Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

   Kegiatan :

   a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      - Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

   Kegiatan :

   a. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP, USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

   Kegiatan :

   a. Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompentensi SDM Koperasi

4. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi

   Kegiatan :

   a. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

   Kegiatan :

   a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

      Sub Kegiatan :

      - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
      - Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro
      - Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangaan usaha mikro
      - Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

a. Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Morowali terlampir.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat "Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah" Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : **Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**			**14,116,262,551**				**5,389,063,347**
	Perencanaan penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Persentasi Administrasi Keuangan Daerah**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**15,360,000**	**DTU,DBH**		**100%**	**20,000,000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	7,680,000	DTU, DBH		2	10,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	7,680,000	DTU, DBH		2	10,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**3,951,914,744**	**DTU, DAU, PAD**		**100%**	**3,951,914,744**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	22	3,207,539,744	DTU, DAU, PAD		22	3,207,539,744
	Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN (orang/bulan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	26	661,200,000	PAD		26	661,200,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	83,175,000	DTU, DBH		2	83,175,000

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**131,985,500**	**DTU, DBH**		**100%**	**156,500,000**
					Peningkatan Sarana dan Prasaran Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	6,957,500	DTU, DBH		2	6,957,500
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	3	66,300,000	DTU, DBH		0	0
					Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP/LAKIP	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP/LAKIP	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan					2	12,972,500
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	3	58,528,000	DTU, DBH		6	136,570,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**851,696,149**	**DTU, DBH**		**100%**	**475,000,000**
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	71,929,815	DTU, DBH		14	85,000,000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	169,796,334	DTU, DBH		5	65,000,000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	70,550	61,919,500	DTU, DBH		55	55,000,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	20	548,050,500	DTU, DBH		10	270,000,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**9,079,615,710**	**DTU, DBH**		**100%**	**702,748,603**
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	4	734,652,450	DTU, DBH		5	672,748,603

					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	10	275,723,452	DTU, DBH		2	30,000,000
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	8,069,239,808	PAD, DTU, DBH		-	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**44,690,448**	**PAD, DTU, DBH**		**100%**	**40,900,000**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	43,790,448	DTU, DBH		12	40,000,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	900,000	DBH		12	900,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**		**100%**	**41,000,000**	**DTU, DBH**		**100%**	**42,000,000**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	41,000,000	DTU, DBH		2	42,000,000
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Yang Aktif**		**32,50%**	**189,938,500**			**35,00%**	**129,343,821**
					Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**32,50%**	**189,938,500**	**DTU, DBH, PAD**		**18,59%**	**129,343,821**

					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	5	109,938,500	PAD		6	129,343,821
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERSI	**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**4,38%**	**119,979,500**			**6,88%**	**36,335,085**
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**4,38%**	**119,979,500**	**DTU, DBH, PAD**		**19,23%**	**36,335,085**
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	27	99,989,500	DTU, DBH		32	20,000,000
					Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	3	19,990,000	PAD		4	16,335,085
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**		**70,00%**	**177,997,790**			**72,50%**	**507,963,822**
					Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**70,00%**	**177,997,790**	**DTU, DBH**		**72,50%**	**507,963,822**
					Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	35	177,997,790	DTU, DBH		33	507,963,822

					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**6,41%**	**149,938,000**			**7,91%**	**615,381,482**
					Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang mendapatkan bantuan modal**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**6,41%**	**149,938,000**	**PAD**		**7,91%**	**615,381,482**
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	30	149,938,000	PAD		35	615,381,482
					PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha**		**1,46%**	**7,328,043,841**			**1,96%**	**1,430,715,837**
					Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pemlatnan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	**Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**1,46%**	**7,328,043,841**			**1,96%**	**1,430,715,837**
					Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	4	6,626,427,331	DTU, DBH		5	325,715,837
					Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	50	51,029,900	DTU, DBH		55	135,000,000
					Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	50	600,630,610	DTU, DBH		55	750,000,000
					Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	5	49,956,000	DTU, DBH		10	220,000,000
									22,002,160,182				***8,108,803,394***

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah kabupaten Morowali meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.680.000,-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di alokasikan anggaran sebesar Rp. 7.680.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.207.539.744,-
- Penyediaan Administarsi Pelaksaan Tugas ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp. 661.200.000,-
- Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 83.175.000,-

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.957.500,-
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 66.500.000,-
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang – Undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 58.528.000,-

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 71.929.815,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 169.796.334,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.919.500,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 548.050.500,-

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 734.652.450,-
- Pengadaan Mebel dialokasikan anggaran sebesar Rp. 275.723.452,-
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.069.239.808,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.790.448,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 900.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.000.000,-

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pnjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/ kota

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 109.938.500,-

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

a. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi kewenangan Kabupaten/Kota

Tabel 3.5

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
3	4	5	10	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**			**14,116,262,551**		
	Perencanaan penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Persentasi Administrasi Keuangan Daerah**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**15,360,000**	**DTU,DBH**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	7,680,000	DTU, DBH	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	7,680,000	DTU, DBH	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**3,951,914,744**	**DTU, DAU, PAD**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	22	3,207,539,744	DTU, DAU, PAD	

					Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Non ASN (orang/bulan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	26	661,200,000	PAD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	83,175,000	DTU, DBH	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**131,985,500**	DTU, DBH	
					Peningkatan Sarana dan Prasaran Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	6,957,500	DTU, DBH	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	3	66,500,000	DTU, DBH	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	3	58,528,000	DTU, DBH	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**851,696,149**	**DTU, DBH**	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	71,929,815	DTU, DBH	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	169,796,334	DTU, DBH	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	70,550	61,919,500	DTU, DBH	

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	20	548,050,500	DTU, DBH	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**9,079,615,710**	**DTU, DBH**	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	4	734,652,450	DTU, DBH	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	10	275,723,452	DTU, DBH	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	1	8,069,239,808	PAD, DTU, DBH	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**100%**	**44,690,448**	**PAD, DTU, DBH**	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	43,790,448	DTU, DBH	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	12	900,000	DBH	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**		**100%**	**41,000,000**	**DTU, DBH**	

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	2	41,000,000	DTU, DBH	
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Yang Aktif**			**109,938,500**		
					Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**32,50%**	**109,938,500**	**DTU, DBH, PAD**	
					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	5	109,938,500	PAD	
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERSI	**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**119,979,500**		
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**4,38%**	**119,979,500**	**DTU, DBH, PAD**	
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	27	99,989,500	DTU, DBH	

					Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	3	19,990,000	PAD	
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Presentase pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**			**177,997,790**		
					Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**70,00%**	**177,997,790**	**DTU, DBH**	
					Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompentensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	35	177,997,790	DTU, DBH	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**149,938,000**		
					Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang mendapatkan bantuan modal**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**6,41%**	**149,938,000**	**PAD**	
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	30	149,938,000	PAD	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha**			**7,328,043,841**		

	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	**Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan**	**Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan**	**1,46%**	**7,328,043,841**		
	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan uasaha mikro (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	4	6,626,427,331	DTU, DBH	
	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	50	51,029,900	DTU, DBH	
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangaan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menrima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (unit usaha)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	50	600,630,610	DTU, DBH	
	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro (orang)	Kab. Morowali, semua kecamatan, semua kelurahan	5	49,956,000	DTU, DBH	
					22,002,160,182		

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Morowali

DR. Hj. ST. ASMA UL HUSNA SYAH, SE.,M.M.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19670202 200012 2 002

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 99.989.500,-
- Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 19.990.000,-

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

a. Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompentensi SDM Koperasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 177.997.790,-

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

a. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 149.938.000,-

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

a. Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan , kemudahan, perizinan dan Penguatan kelembagan dan koordinasi dengan pemangku kegiatan

- Pemberdayaan melalui kemitaraan usaha mikro dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.626.427.331,-
- Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro dialokasikan anggaran sebesar Rp. 51.029.900,-
- Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangaan usaha mikro dialokasikan anggaran sebesar Rp. 600.630.610,-
- Koordinsi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dialokasikan anggaran sebesar Rp. 49.956.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 3.3

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Morowali ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, tata laksana, dan sumber pendanaan serta komitmen semua pihak. Perlu disampaikan bahwa Rencana Kerja ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Kerja membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali periode 2024-2026 ini menjadi acuan kerja bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, semua sumber daya yang ada, harus turut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan akuntabel serta mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UMKM, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan, khususnya seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali.

Dokumen Rencana Kerja secara normatif memuat program-program atau rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi kerja Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Morowali dan diharapkan dapat meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam menciptakan iklim kewirausahaan mandiri.

Demikian Rencana Kerja ini kami sajikan, jika terjadi perubahan situasi/kondisi akibat kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atas Rencana Kerja Dinas ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Bungku, Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Morowali,

Dr. Hj. ST. ASMA UL HUSNA SYAH, S.E., M.M., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670202 200001 2 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MOROWALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**7.692.343.773,00**	**9.714.097.437,00**	**10.271.176.627,00**	**-7.692.343.773,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi*				100 Persen	100 Persen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.117.900.075,00	5.003.092.239,00	5.484.035.929,00	1.366.135.854,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.059.140.075,00	3.811.372.239,00	4.013.005.929,00	953.865.854,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	40 Dokumen	1.058.760.000,00	1.191.720.000,00	1.471.030.000,00	412.270.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah potensi Bangunan yang belum memiliki PBG*				95 Persen	95 Persen	60.264.000,00	103.304.000,00	229.824.000,00	169.560.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Potensi PAD		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.264.000,00	103.304.000,00	229.824.000,00	169.560.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persetnase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	108.973.000,00	125.623.000,00	189.161.000,00	80.188.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	6 Orang	40.173.000,00	56.823.000,00	92.761.000,00	52.588.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	7 Orang	68.800.000,00	68.800.000,00	96.400.000,00	27.600.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.506.975.810,00	2.553.847.310,00	2.833.765.698,00	1.326.789.888,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	764.918.015,00	1.234.866.832,00	0,00	-764.918.015,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**NON URUSAN**							**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	12 Paket	204.065.545,00	218.997.138,00	284.573.020,00	80.507.475,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.816.250,00	14.816.250,00	14.816.250,00	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	523.176.000,00	1.085.167.090,00	1.322.097.090,00	798.921.090,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.347.750.888,00	1.047.750.888,00	1.013.910.000,00	-333.840.888,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.347.750.888,00	1.047.750.888,00	1.013.910.000,00	-333.840.888,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	497.480.000,00	827.480.000,00	467.480.000,00	-30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	430.000.000,00	430.000.000,00	70.000.000,00	-360.000.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	66.580.000,00	96.580.000,00	96.580.000,00	30.000.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	900.000,00	300.900.000,00	300.900.000,00	300.000.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*				100 Persen	100 Persen	50.600.000,00	50.600.000,00	50.600.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	ASET DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	50.600.000,00	50.600.000,00	50.600.000,00	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase PMDN yang mendapat kemudahan investasi capaian pemberian insentif dan kemudahan berusaha**				**85 85.00 % %**	**85 85.00 % %**	**358.199.000,00**	**327.000.000,00**	**139.470.500,00**	**-358.199.000,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentse peningkatan pemberian fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal*				30 Persen	30 Persen	102.635.000,00	127.000.000,00	139.470.500,00	36.835.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	PMA DAN PMDN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				3 Dokumen	3 Dokumen	51.810.000,00	28.570.000,00	28.570.000,00	-23.240.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.825.000,00	98.430.000,00	110.900.500,00	60.075.500,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase titik potensi investasi daerah yang terinput dalam peta digital*				100 Persen	100 Persen	255.564.000,00	200.000.000,00	0,00	-255.564.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	PMA DAN PMDN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	255.564.000,00	200.000.000,00	0,00	-255.564.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota**				**5.00 %**	**5.00 %**	**520.338.650,00**	**506.338.650,00**	**619.388.650,00**	**-520.338.650,00**							**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PMA / PMDN baru berinvestasi*				100 Persen	100 Persen	520.338.650,00	506.338.650,00	619.388.650,00	99.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	PMA DAN PMDN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	520.338.650,00	506.338.650,00	619.388.650,00	99.050.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**623.936.000,00**	**358.733.500,00**	**358.733.500,00**	**-623.936.000,00**							**0,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP yang menjadi kewenangan daerah*				100 Persen	100 Persen	623.936.000,00	358.733.500,00	358.733.500,00	-265.202.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	274.060.500,00	107.564.500,00	107.564.500,00	-166.496.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	200.063.000,00	141.917.000,00	141.917.000,00	-58.146.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	149.812.500,00	109.252.000,00	109.252.000,00	-40.560.500,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi Investasi Daerah**				**65-70 Triliun**	**65-70 Triliun**	**274.792.000,00**	**479.384.000,00**	**478.318.000,00**	**-274.792.000,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen berusaha*				30-70 Nilai	30-70 Nilai	274.792.000,00	479.384.000,00	478.318.000,00	203.526.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	8 Kegiatan Usaha.	0,00	61.748.000,00	68.710.000,00	68.710.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				-	234 Pelaku Usaha	0,00	230.846.000,00	226.540.000,00	226.540.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				150 Kegiatan Usaha	81 Kegiatan Usaha	274.792.000,00	186.790.000,00	183.068.000,00	-91.724.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Kesempatan Kerja			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)**				**100 %**	**100 %**	**85.306.000,00**	**85.306.000,00**	**85.306.000,00**	**-85.306.000,00**							**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan dokumen data perijinan dan non perijinan*				100 Persen	100 Persen	85.306.000,00	85.306.000,00	85.306.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00	85.306.000,00	85.306.000,00	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J U M L A H									**9.554.915.423,00**	**11.470.859.587,00**	**11.952.393.277,00**	**2.397.477.854,00**							**0,00**	

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat-nya sehingga Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja ini disusun untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, Program yang hendak dicapai tahun anggaran 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja BPKAD menuju *Good Governance.* Secara Konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Kerja bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Jangka 1 Tahun, yang disertai dengan program prioritas BPKAD Kabupaten Morowali. Adapun pedoman yang dipakai adalah Renstra BPKAD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Rencana Kerja ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi dalam bentuk program dan Kegiatan beserta kerangka pendanaannya pada tahun 2024.

Rencana Kinerja ini terdiri dari pendahulan, Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan dan sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasaalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Morowali, 23 Februari 2024

Kepala Badan

ALAMSYAH., S.STP, M.Ec.Des

Nip. 19820130 200112 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD PADA TAHUN LALU (TAHUN 2023) 5

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Pada Tahun Laulu dan Capaian Renstra BPKAD 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD 10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD 15

2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja BPKAD 15

2.5 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan Kewenangan BPKAD 27

2.6 Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan OPD 27

2.7 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan Yang Startegis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIAT 29

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD 30

3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

BAB V PENUTUP 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen perencanaan yang hendak dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Tahun 2024 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini dilakukan dengan melibatkan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan dokumen lainnya, dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja telah disinkronkan dengan rancangan awal, Renstra dan dokumen lainnya.

Selanjutnya RKPD Tahun 2024 nantinya sebagai tindak lanjut dan akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU RI No. 1 Tahun. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
6. Undang –undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonseia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali;
17. Peraturan Bupati Morowali Nomor … Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Morowali;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja tahun 2024 adalah untuk memperoleh gambaran target dan prioritas program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja tahun 2024 adalah;

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran dalam membiayai Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024.
3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 yang merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan Perencanaan dan Penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD PADA TAHUN LALU (TAHUN 2022)

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja BPKAD

2.5 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan Kewenangan BPKAD

2.6 Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan OPD

2.7 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan Yang Startegis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD PADA TAHUN LALU (TAHUN 2022)

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencan Kerja BPKAD Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD

Pada tahun 2022 BPKAD Kabupaten Morowali memperoleh Anggaran Belanja sebesar Rp. 249.637.961.526,- yang digunakan untuk belanja Program Kegiatan dengan realisasi anggaran sebasar Rp. 214.304.852.565,- atau (85,85%) yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 17.732.685.158.- dengan realisasi anggaran 13.163.877.096.- program pengelolaan keuangan daerah sebesar 228.696.245.758 dengan realisasi 198.134.135.165.- dan program pengelolaan barang milik daerah 3.209.030.610.- dengan realisasi 3.006.840.304.-.

Rekapitulasi hasil Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Perangkat daerah dan pencapaian Perangkat daerah sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Morowali

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcomes***)/ Kegiatan (***output***)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan									
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah									
4.04.4.04.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	100 persen		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4.04.4.04.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	17 Dokumen	85
4.04.4.04.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	8 Orang	11 Orang	11 Orang	100	11 Orang	19 Orang	63
4.04.4.04.05.01.10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcomes***)/ Kegiatan (***output***)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
4.04.4.04.05.01.11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	38 Unit	27 Unit	11 Unit	11Unit	100	11 Unit	27 Unit	71
4.04.4.04.05.01.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	40 Bulan	67
4.04.4.04.05.01.18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional	45 Keg	17 Keg	14 Keg	14 Keg	100	14 Keg	31 Keg	69
4.04.4.04.05.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**	1	1,17	1	4,20	95,80	1	4,20	95,80
		Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya	0	5,5	0	14.32	85,58	0	85,58	85,58
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	10	10	10	10	100	10	10	100
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	60	60,99	60,00	60,99	101,65	60,00	60,99	101,65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcomes***)/ Kegiatan (***output***)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04.05.06	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah yang tersusun dan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
4.04.4.04.05.06.01	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
4.04.4.04.05.17.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksan dengan baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
4.04.4.04.05.17.03	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
4.04.4.04.05.06	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik	100 persen	75 persen	100 persen	75 persen	75	100 Persen	75 Persen	75
4.04.4.04.05.06.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang terkelolah secara tertib	30 Dokumen	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	24 Dokumen	80

Dari Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan dana, terdapat beberapa program dan kegiatan baik dana maupun fisik yang tidak memenuhi target yang direncanakan serta faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

   Program penunjang urusan pemerintahan daerah dari evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan untuk realisasi fisik memenuhi target yang ditetapkan dan realisasi anggaran dimana ada penghematan anggaran sebesar 25,76 persen. Ini disebabkan karena ada penghematan logistik kantor sebesar 41,35 persen, Pembanguan Gedung Kantor sebesar 7,07 persen dan adanya penundaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 11, 74 persen.

2. Program pengelolaan keuangan daerah

   Program pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran daerah, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan untuk realisasi fisik memenuhi target yang ditetapkan dan realisasi anggaran dimana ada penghematan anggaran sebesar 13,36 persen. Ini disebabkan karena ada penghematan pada kegiatan penganggaran yaitu pada Sub Kegiata penyusunan APBD sebesar 17,20 persen dan Sub Kegiata penyusunan APBD-P sebesar 32,60 persen.

3. Program pengelolaan barang milik daerah

   Program pengelolaan barang milik daerah dari evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan untuk realisasi fisik sebesar 75 persen, dan realisasi keuangan sebesar 93,70 persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Dari Indikator Target Kinerja BPKAD dapat dijelaskan hasil analisis terhadap kinerja pelayana Tahun lalu sebagai berikut:

a. Opini untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja pada indikator ini dihitung (100%) apabila Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2022 mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Dalam laporan ini opini yang dapat ditampilkan adalah opini BPK terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang berpredikat WTP.
b. Peningkatan Nilai Aset adalah merupakan Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 100 % Kesesuaian Pencatatan Neraca dan Ketersediaan Barang, kedepan juga dikembangkan melalui pengembangan sistim jaringan yang berbasis Online yang diharapkan akan mampu mengatur manajemen penatausahaan Barang Milik Daerah, hal ini mengharuskan BPKAD untuk terus berbenah dan mengembangkan proses Penatausahaan Aset Daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.

Untuk meningkatkan tujuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana yang telah ditetapkan dimana Indikator Tujuan dalam renstra BPKAD periode 2024-2026 terdiri dari 6 dimensi sasaran yang hendak dicapai meliputi:

1. Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dengan Melakukan kontrol yang kuat agar selarasnya antara perencanaan dan pengaggran;
2. Memperhatikan Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang bersifat mandatory;
3. Melakukan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan ketepatan waktu terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah daerah serta keteraksesan keuangan daerah yang dapat di unduh secara

umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

4. Memaksimalkan Penyerapan Anggaran Belanja dengan Mendorong perangkat daerah untuk merealisasikan anggaran yang cepat, tepat dan transparan disesuaikan dengan struktur anggaran dalam APBD;
5. Memperhatikan dan Menggali Potensi Penerimaan Daerah sehingga Stabilitas keuangan daerah menjadi lebih terjaga;
6. Mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan Melakukan pengendalian dan evaluasi secara kontinyu terhadap proses belanja dalam APBD.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disajikan dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke					Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali				B	B	B	B	B	C	C	C	C	CC	100	100	100	100	100	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keuangan				100	100	100	100	100	85	86	86	87	88	85	86	86	87	88	
3	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**			100	100	100	100	100	88	94	91	94	96	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan			NA	5	11	11	11	NA	NA	NA	11	NA	0	0	0	100	0	
7	Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/ Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor			5	5	11	11	11	0	0	0	11	0	0	0	0	100	0	

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke					Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional			NA	7	8	2	14					14	NA	0	0	0	100	
Opini BPK atas LHP				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meniunggu Opini BPK	100	100	100	100	100	
Indeks Pengelolalan Keuangan Daerah				60	65	70	75	80	25,89	30,96	60,97	60,97	Menunggu Hasil Penilaian dari Provinsi	43,15	47,63	87,1	81,29	0	
13	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**			NA	8,81	6,1	1,17	1,17	NA	8,81	6,1	1,17	Menunggu Hasil Rekonsiliasi belanja OPD	NA	100	100	100	0	
14	**Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya**			NA	0,63	1,62	5,5	14,32	NA	0,63	1,62	5,5	14.32	NA	100	100	100	0	
15	**Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan**			NA	15,26	16,15	10,18	10,00	NA	15,26	16,15	10,18	Menunggu Hasil Rekonsiliasi belanja OPD	NA	100	100	100	0	
16	**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)**			NA	60,00	60,00	60,00	60,00	NA	57,88	58,47	60,99	Menunggu Hasil Rekonsiliasi belanja OPD	NA	96,4667	97,45	101,65	0	
17	Presentase Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah yang tersusun dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke					Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase Jumlah koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD			100	100	100	100	100											
Indeks Manajemen Aset				100	100	100	100	100	54	65	75	75	75	54	65	75	75	75	
22	Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik			100	100	100	100	100	54	65	75	75	75	54	65	75	75	75	
23	Jumlah dokumen BMD yang terkelolah secara tertib			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Isu terkait kinerja pelayanan BPKAD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan yakni dengan meningkatkan pelayanan dan pembinaan, konsultasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan BPKAD dalam pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan ditetapkan dengan program kerja Pengelolaan Keuangan Tahunan, dan untuk tahun 2024 direncanakan 3 Fokus yang terdiri dari:

1. Penganggaran yang Efektif dan Efisien;
2. Memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan;
3. Mengoptimalkan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.4. Review terhadap rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Penyusunan Rencana Kerja adalah Perbandingan antara rancangan awal yang disusun berdasarkan Renstra BPKAD dengan hasil Analisis Kebutuhan perlu adanya penambahan Pagu Anggaran mengingat adanya regulasi baru tentang sistim pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan Pertanggungjawaban Keungan.

Kerangka Pendanaan yang diharapkan oleh Badan Pengelolaan keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Morowali

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**Bpkad**	**Persentase Urusan Penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**12.584.530.701**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Bpkad**	**Persentase Urusan Penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**12.584.530.701**	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Bpkad**	**Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban**	**4**	**41.504.500**	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpkad**	**Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban**	**4**	**41.504.500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Bpkad**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	31.875.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Bpkad**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	31.875.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bpkad	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	9.629.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bpkad	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	9.629.500	
	Administrasi Keuangan	**Bpkad**	**Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan**	**100%**	**8.369.876.993**	**Administrasi Keuangan**	**Bpkad**	**Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan**	**100%**	**8.369.876.993**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpkad	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	2.636.195.393	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpkad	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	2.636.195.393	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bpkad	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium	91 Orang	5.733.681.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bpkad	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium	91 Orang	5.733.681.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Bpkad**	**Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan**	**10 Orang**	**127.300.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bpkad**	**Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan**	**10 Orang**	**127.300.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpkad	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpkad	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000	
	Bimbingan Teknik Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	102.300.000	Bimbingan Teknik Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	102.300.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bpkad	**Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	100%	**2.454.618.630**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bpkad	**Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	100%	**2.454.618.630**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpkad	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36942410	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpkad	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.942.410	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpkad	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	25 Unit	1571535750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpkad	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	25 Unit	1.571.535.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpkad	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Jenis	226.051.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpkad	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Jenis	226.051.250	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpkad	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	57.339.220	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpkad	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	57.339.220	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpkad	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	210.672.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpkad	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	210.672.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpkad	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Kegiatan	352.078.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpkad	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Kegiatan	352.078.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bpkad	**Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor**	5 Unit	**665.298.720**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Bpkad	**Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor**	5 Unit	**665.298.720**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bpkad	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	665.298.720	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bpkad	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	665.298.720	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpkad	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 Bulan	**202.954.158**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bpkad	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 Bulan	**202.954.158**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpkad	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.994.158	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpkad	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.994.158	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpkad	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	26.320.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpkad	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	26.320.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Bpkad	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	56.640.000	Penyediaan Jasa Pelayanan	Bpkad	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	56.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bpkad	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	18 Unit	**722.977.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bpkad	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	18 Unit	**722.977.700**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpkad	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	578.658.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpkad	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	578.658.700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpkad	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diservice	2 Unit	43.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpkad	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diservice	2 Unit	43.960.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpkad	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.359.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpkad	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.359.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bpkad	Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	**4 Point**	**265.170.512.590**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Bpkad	Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	**4 Point**	**355.170.512.590**	
		Bpkad	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory	**4 Point**			Bpkad	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory	**4 Point**		
		Bpkad	Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD	**2 Point**			Bpkad	Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD	**2 Point**		
		Bpkad	Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas	**4 Point**			Bpkad	Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas	**4 Point**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Bpkad	Sovabilitas	**4 Point**			Bpkad	Sovabilitas	**4 Point**		
		Bpkad	Opini BPK	**15 Indeks**			Bpkad	Opini BPK	**15 Indeks**		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bpkad	**Persentasi Kesesuaian nomenklatur program RKPD, KUA-PPAS dan APBD**	**100 Persen**	**1,842,301,060**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Bpkad	**Persentasi Kesesuaian nomenklatur program RKPD, KUA-PPAS dan APBD**	**100 Persen**	**1,842,301,060**	
		Bpkad	**Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Pendidikan**	**20 Persen**			Bpkad	**Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Pendidikan**	**20 Persen**		
		Bpkad	**Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Kesehatan**	**10 Persen**			Bpkad	**Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Kesehatan**	**10 Persen**		
		Bpkad	**Persentasi Penyediaan Anggaran Belanja Untuk Infrastruktur**	**25 Persen**			Bpkad	**Persentasi Penyediaan Anggaran Belanja Untuk Infrastruktur**	**25 Persen**		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bpkad	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu	1 Dokumen	79528000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bpkad	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu	1 Dokumen	79.528.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bpkad	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu	1 Dokumen	64903000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bpkad	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu	1 Dokumen	64.903.000	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA SKPD	Bpkad	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65685000	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA SKPD	Bpkad	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65.685.000	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Bpkad	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65685000	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Bpkad	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	65.685.000	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA SKPD	Bpkad	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	85814850	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA SKPD	Bpkad	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	85.814.850	
	Koordinasi,	Bpkad	Jumlah Perubahan	65 Dokumen	85217300	Koordinasi,	Bpkad	Jumlah	65 Dokumen	85.217.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD		DPA-SKPD yang Diverifikasi			Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD		Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bpkad	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	394182000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bpkad	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	394.182.000	
	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Bpkad	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	345065000	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Bpkad	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	345.065.000	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	640740000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	640.740.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Operasional**	**81 Persen**	**673.105.340**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Operasional**	**81 Persen**	**673.105.340**	
		Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal**	**81 Persen**			Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal**	**81 Persen**		
		Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Tidak terduga**	**81 Persen**			Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Tidak terduga**	**81 Persen**		
		Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Transfer**	**81 Persen**			Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Transfer**	**81 Persen**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	67201440	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	67.201.440	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	39394250	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	39.394.250	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	279926400	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	279.926.400	
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi non Tuani dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	123995000	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi non Tuani dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	123.995.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	Bpkad	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan	1 laporan	45224250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/	Bpkad	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	1 laporan	45.224.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /kota	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	117364000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /kota	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	117.364.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bpkad	**Kemandirian Keuangan**	**1 Point**	**1.084.304.000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Bpkad	**Kemandirian Keuangan**	**1 Point**	**1.084.304.000**	
		Bpkad	**Fleksibilitas Keuangan**	**1 Point**			Bpkad	**Fleksibilitas Keuangan**	**1 Point**		
		Bpkad	**Sovabilitas**	**4 Point**			Bpkad	**Sovabilitas**	**4 Point**		
		Bpkad	**Opini BPK**	**15 Persen**			Bpkad	**Opini BPK**	**15 Persen**		
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Bpkad	Jumlah dokumen Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah	65 Dokumen	438427000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Bpkad	Jumlah dokumen Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah	65 Dokumen	438.427.000	
	Rekonsiliasi dan Verivikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan	65 Dokumen	121301000	Rekonsiliasi dan Verivikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	65 Dokumen	121.301.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Beban			Pendapatan-LO dan Beban		Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan,Triwulan dan Semesteran	Bpkad	Jumlah laporan Pertanggungjawaban pelaksanaa APBD bulanan,triwulan dan semester yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen	355840000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan,Triwulan dan Semesteran	Bpkad	Jumlah laporan Pertanggungjawaban pelaksanaa APBD bulanan,triwulan dan semester yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen	355.840.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Bpkad	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasiterpros es dengan baik	1 Dokumen	89036000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Bpkad	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasiter proses dengan baik	1 Dokumen	89.036.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Darah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Bpkad	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	79700000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Darah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Bpkad	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	79.700.000	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	65 Dokumen	438.427.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	65 Dokumen	438.427.000	
	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan	10 Orang	121301000	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	10 Orang	121.301.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah /kota		dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Pertanggungjawaban Pemerintah /kota		Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD**	**100 Persen**	**261.586.283.100**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Bpkad	**Persentase Penyerapan Anggaran Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD**	**100 Persen**	**351.586.283.100**	
	Analis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.600.000.000	Analis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.600.000.000	
	Analisi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	136 Laporan	204.682.383.100	Analisi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	136 Laporan	294.682.383.100	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	25.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	25.000.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.303.900.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.303.900.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bpkad	**Indeks Manajemen Pengelolaan Aset**	**67 Persen**	**1.799.824.800**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Bpkad	**Indeks Manajemen Pengelolaan Aset**	**67 Persen**	**1.870.124.800**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bpkad	**Jumlah dokumen BMD yang terkelolah secara tertib**	**6 Dokumen**	**1.799.824.800**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Bpkad	**Jumlah dokumen BMD yang terkelolah secara tertib**	**6 Dokumen**	**1.870.124.800**	
	Penyusunan Standar Harga	Bpkad	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	114911700	Penyusunan Standar Harga	Bpkad	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	114.911.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	28344000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	28.344.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	262518030	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	262.518.030	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	610624900	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	610.624.900	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	625011170	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	625.011.170	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	78715000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bpkad	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	78.715.000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	79700000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bpkad	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 orang	150.000.000	
JUMLAH					**279.554.868.091**					**369.625.168.091**	

2.5 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan Kewenangan BPKAD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD menemukan beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya:

1) Pengurusan dan pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal dalam pengoperasian aplikasi.
2) Kemapuan Sumber Daya Aparatur belum sepenuhnya memahami sistim Pengelolaan Keuangan mulai dari sitim penganggaran, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3) Optimalisasi Aset *(Aset idle)* pada SKPD belum optimal.
4) Pengadaan Barang belum mengacu pada Kebutuhan Barang Milik Daerah, pemeliharaan belum mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
5) Sistem Pengelolaan Anggaran, Penatausahaan dan pertanggungjawaban perlu terus penyesuaian sesuai dengan e-government.

2.6 Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan OPD.

Adapun Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Tantangan
    a. Belum Optimalnya penyediaan instrument Penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel;
    b. Akurasi data dan ketepatan waktu pencapaian anggaran kegiatan;
    c. Masih adanya aset pemda yang belum bersertifikat;
    d. Masih adanya aset yang masih dikuasai pihak lain;
    e. Profesionalisme dan kopetensi SDM pengelola keuangan aset;
    f. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
    g. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
2) Peluang
    a. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan Barang Milik Daerah;

b. Adanya website sebagai media informasi publik, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
c. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelolaan keuangan dan aset masih bias dikembangkan;
d. Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sementara dalam proses pengembangan oleh pemerintah pusat.
e. Dorongan Pemerintah Pusat dan Daerah agar Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah terintegrasi.

2.6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari hal diatas, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
3. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan Aset;
4. Peningkatan Perbaikan Kinerja Aparatur dan Kopetensi SDM.
5. Pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang diminta dalam bagian ini, yakni penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan OPD.

Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPKAD telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan pembinaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan urusan Penatausahaan Keuangan dan Aset dan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan untuk menciptakan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, BPKAD telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada OPD.

Ada 6 arah kebijakan yang ditetapkan BPKAD Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan daerah
2. Koordinasi dan Komunikasi yang intens sesama stakeholder agar pengalokasian belanja yang bersifat mandatory dapat terpenuhi
3. Mengexpose dokumen keuangan untuk memenuhi asas transparansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Mendorong perangkat daerah untuk merealisasikan anggaran yang cepat, tepat dan transparan
5. Menggali potensi Daerah Unituk ketersediaan Keuangan
6. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara kontinyu terhadap proses belanja dalam APBD
7. Mengoptimalkan Database barang milik daerah
8. Menyusun Perda dan Perbub tentang pengelolaan barang milik daerah
9. Melakukan Kerja Sama dengan lembaga terkait untuk persertifikatan aset pemerintah daerah

Dengan telah diluncurkannya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) Online diseluruh Kementrian/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) dan Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMP-RB secara online, maka kepada Pemerintah Daerah diwajibkan melaporkan hasil PMP-RB paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terhadap capaian program nasional, seperti Sumber Daya Manusia dan SDGs tidak terlalu berpengaruh karena program ini tidak menyentuh secara langsung. Pada sub bab ini tidak ada yang perlu dijelaskan karena program nasional atau internasional, seperti Sumber Daya Alam dan SDGs tidak ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Terkait dengan pelaksanaan PMP-RB peran BPKAD dalam hal ini adalah sebagai Pengelolah Keuangan dan Aset pada Pemerintah Kabupaten Morowali, dengan tugas sebagi berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
b. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset.
c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra), tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) BPKAD Daerah adalah:

3.2.1. Tujuan:

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel

3.2.2. Sasaran:

Tersedianya sumber daya dan fasilitas penunjang pengelolaan keuangan Daerah

Tabel : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja
	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel			**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**
		1.1 Tersedianya sumber daya dan fasilitas penunjang pengelolaan keuangan Daerah		**Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**
				Indeks Pengalokasian Anggaran dalam APBD
				Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah
				Indeks Penyerapan Anggaran
				Indeks Kondisi Keuangan Daerah
				Indeks Opini BPK atas LKPD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Urusan Penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**
				Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan** - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Honorarium - Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan **Jumlah kendaraan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja
				dinas operasional yang diservice - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/ Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** - Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor** - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan **Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja
				yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan **Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diservice - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD**
				Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory
				Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD
				Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas
				Sovabilitas
				Opini BPK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja
				Persentasi Kesesuaian nomenklatur program RKPD, KUA-PPAS dan APBD **Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Pendidikan** **Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Kesehatan** **Persentasi Penyediaan Anggaran Belanja Untuk Infrastruktur** - Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu - Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu - Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi - Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi - Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi - Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi - Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota - **Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Operasional** **Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Operasional** **Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal** **Persentase Penyerapan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja
				Anggaran Belanja Tidak terduga **Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Transfer** - Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja
				Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota **Kemandirian Keuangan** **Fleksibilitas Keuangan** **Sovabilitas** **Opini BPK** - Jumlah dokumen Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah - Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban - Jumlah laporan Pertanggungjawaban pelaksanaa APBD bulanan,triwulan dan semester yang tersusun tepat waktu - Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasiterpros es dengan baik - Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota **Persentase Penyerapan Anggaran Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja
				Belanja APBD - Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Indeks Manajemen Pengelolaan Aset**
				Jumlah dokumen BMD yang terkelolah secara tertib - Jumlah Standar Harga yang Disusun - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah - Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah - Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah - Jumlah Sertifikat Tanah Pemda - Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu anggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebanyak 3 (Tiga) Program, 12 (Kegiatan) kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan dana sebesar Rp. 369.625.168.091,00-

Adapun program dan kegiatan beserta kebutuhan dananya adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	31.875.000,00
b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	9.629.500,00

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	2.636.195.393,00
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	5.733.681.600,00

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	25.000.000,00
b) Bimbingan Teknik Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Rp.	102.300.000,00

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	36.942.410,00
b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	1.571.535.750,00
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	226.051.250,00
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	57.339.220,00
e) Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.	210.672.000,00
f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	352.078.000,00

   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor Atau bangunan Lainnya	Rp.	665.298.720,00

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 119.994.158,00

b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 26.320.000,00

c) Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor Rp. 56.640.000,00

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Rp. 578.658.700,00

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 43.960.000,00

c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 100.359.000,00

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp. 79.528.000,00

b) Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp. 64.903.000,00

c) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD Rp. 65.685.000,00

d) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD Rp. 65.685.000,00

e) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD Rp. 85.814.850,00

f) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD Rp. 85.217.300,00

g) Penyusunan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rp. 394.182.000,00

h) Penyusunan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp. 345.065.000,00

i) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 640.740.000,00

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a) Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Rp. 67.201.440,00

b) Penatausahaan Pembiayaan Daerah Rp. 39.394.250,00

c) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rp. 279.926.400,00

d) Koordinasi, Pelaksanaan Kejasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Rp. 123.995.000,00

e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp. 45.224.250,00

f) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /kota Rp. 117.364.000,00

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rp. 438.427.000,00

b) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan Belanja, Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban Rp. 121.301.000,00

c) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan,Triwulan dan Semesteran Rp. 355.840.000,00

d) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA Rp. 89.036.000,00

e) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rp. 79.700.000,00

f) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp. 438.427.000,00

g) Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah /kota Rp. 121.301.000,00

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Analis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Rp. 1.600.000.000,00

b)	Analisi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp.	294.682.383.100,00
c)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp.	25.000.000.000,00
d)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Rp.	30.303.900.000,00

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

a)	Penyusunan Standar Harga	Rp.	114.911.700,00
b)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp.	28.344.000,00
c)	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.	262.518.030,00
d)	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp.	610.624.900,00
e)	Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	625.011.170,00
f)	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp.	78.715.000,00
g)	Pembinaan Pengendalian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	Rp.	150.000.000,00

BAB IV

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun
Kabupaten Morowali

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Pagu	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**369.625.168.091**				**279.554.868.091**
5	**02**				**KEUANGAN**					**369.625.168.091**				**279.554.868.091**
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	Persen	Morowali	**100**	**12.584.530.701**	-	-	**100**	**12.584.530.701**
5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban**	Dokumen	Morowali	**4**	**41.504.500**	-	-	**4**	**41.504.500**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Morowali	4	31.875.000			4	31.875.000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Morowali	5	9.629.500	-	-	5	9.629.500
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan**	**Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan**	Persen	Morowali	**100**	**8.369.876.993**	-	-	**100**	**8.369.876.993**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Morowali	33	2.636.195.393	-	-	33	2.636.195.393

5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium	Orang	Morowali	91	5.733.681.600	-	-	91	5.733.681.600
5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan**	orang	Morowali	**10**	**127.300.000**	**-**	**-**	**10**	**127.300.000**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Morowali	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknik Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Morowali	10	102.300.000	-	-	10	102.300.000
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Layanan Kepada Masyarakat/Steckholder Terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	100 %	Morowali	**100**	**2.454.618.630**	-	-	**100 %**	**2.454.618.630**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Morowali	11	36.942.410	-	-	11	36.942.410
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Unit	Morowali	25	1.571.535.750	-	-	25	1.571.535.750
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Morowali	36	226.051.250	-	-	36	226.051.250
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Morowali	15	57.339.220	-	-	15	57.339.220
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Morowali	12	210.672.000	-	-	12	210.672.000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	Morowali	31	352.078.000	-	-	31	352.078.000
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor**	Unit	Morowali	**5**	**665.298.720**	-	-	**5**	**665.298.720**

5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Morowali	3	665.298.720	-	-	3	665.298.720
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	Morowali	**12**	**202.954.158**	-	-	**12**	**202.954.158**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Morowali	12	119.994.158	-	-	12	119.994.158
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Morowali	4	26.320.000	-	-	4	26.320.000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Morowali	12	56.640.000	-	-	12	56.640.000
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	Morowali	**18**	**722.977.700**	-	-	**18**	**722.977.700**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Morowali	15	578.658.700	-	-	15	578.658.700
5	02	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diservice	Unit	Morowali	2	43960000	-	-	2	43.960.000
5	02	01	2.09	03	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Morowali	1	100359000	-	-	1	100.359.000
5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	**Point**	Morowali	**4**	**355.170.512.590**	-	-	**4**	**265.170.512.590**
						Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD yang bersifat Mandatory	**Point**	Morowali	**4**				**4**	
						Penyerapan Anggaran Belanja dalam APBD	**Point**	Morowali	**4**				**4**	
						Kemandirian Keuangan & Fleksibilitas	**Point**	Morowali	**2**				**2**	
						Sovabilitas	**Point**	Morowali	**4**				**4**	
						Opini BPK	**Indeks**	Morowali	**15**				**15**	

5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentasi Kesesuaian nomenklatur program RKPD, KUA-PPAS dan APBD**	**Persen**	Morowali	**100**		-	-	**100**	
						Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Pendidikan	**Persem**	Morowali	**20**				**20**	
						Persentasi Penyediaan Anggaran Fungsi Kesehatan	**Persen**	Morowali	**10**	**1,842,301,060**			**10**	**1,842,301,060**
						Persentasi Penyediaan Anggaran Belanja Untuk Infrastruktur	**Persen**	Morowali	**25**				**25**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu	Dokumen	Morowali	1	79.528.000	-	-	1	79.528.000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun dan tepat waktu	Dokumen	Morowali	1	64.903.000	-	-	1	64.903.000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Morowali	65	65.685.000	-	-	65	65.685.000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Morowali	65	65.685.000	-	-	65	65.685.000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Morowali	65	85.814.850	-	-	65	85.814.850
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Morowali	65	85.217.300	-	-	65	85.217.300
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Morowali	2	394.182.000	-	-	2	394.182.000
5	02	02	2.01	08	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Morowali	2	345.065.000	-	-	2	345.065.000

					APBD									
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Morowali	43	640.740.000	-	-	43	640.740.000
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Operasional**	**Persen**	Morowali	**81**	**673.105.340**	-	-	**81**	**673.105.340**
						Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal	**Persen**	Morowali	**81**				**81**	
						Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Tidak terduga	**Persen**	Morowali	**81**				**81**	
						Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Transfer	**Persen**	Morowali	**81**				**81**	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Morowali	1	67.201.440	-	-	1	67.201.440
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	Morowali	1	39.394.250	-	-	1	39.394.250
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Morowali	1	279.926.400	-	-	1	279.926.400
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi non Tuani dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Morowali	1	123.995.000	-	-	1	123.995.000

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	Morowali	1	45.224.250	-	-	1	45.224.250
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Morowali	10	117.364.000	-	-	10	117.364.000
5	02	02	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kemandirian Keuangan**	**Point**	Morowali	**1**	**1.084.304.000**	-	-	**1**	**1.084.304.000**
						Fleksibilitas Keuangan	**Point**	Morowali	**1**					
						Sovabilitas	**Point**	Morowali	**4**					
						Opini BPK	**Persen**	Morowali	**15**					
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah dokumen Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah	Dokumen	Morowali	65	438.427.000	-	-	65	438.427.000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verivikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Morowali	65	121.301.000	-	-	65	121.301.000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan,Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban pelaksanaa APBD bulanan,triwulan dan semester yang tersusun tepat waktu	Dokumen	Morowali	2	355.840.000	-	-	2	355.840.000

5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasiterproses dengan baik	Dokumen	Morowali	1	89.036.000	-	-	1	89.036.000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Darah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Morowali	5	79.700.000	-	-	5	79.700.000
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	**Persen**	Morowali	65	438.427.000	-	-	65	438.427.000
5	02	02	2.03	10	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah /kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	Morowali	10	121.301.000	-	-	10	121.301.000
5	02	02	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyerapan Anggaran Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja APBD**	Laporan	Morowali	**100**	**351.586.283.100**	-	-	**100**	**261.586.283.100**
5	02	02	2.04	04	Analis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	Morowali	1	1.600.000.000	-	-	1	1.600.000.000
5	02	02	2.04	08	Analisi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Morowali	136	294.682.383.100	-	-	136	294.682.383.100
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	**Persen**	Morowali	1	25.000.000.000	-	-	1	25.000.000.000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	**Dokumen**	Morowali	1	30.303.900.000	-	-	1	30.303.900.000

5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indeks Manajemen Pengelolaan Aset**	**Persen**	Morowali	**67**	**1.870.124.800**	-	-	**75**	**1.799.824.800**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah dokumen BMD yang terkelolah secara tertib**	**Dokumen**	Morowali	**6**	**1.870.124.800**	-	-	**6**	**1.799.824.800**
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Morowali	1	114.911.700	-	-	1	114.911.700
5	02	03	2.01	05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Morowali	2	28.344.000	-	-	2	28.344.000
5	02	03	2.01	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Morowali	6	262.518.030	-	-	6	262.518.030
5	02	03	2.01	08	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	Morowali	1	610.624.900	-	-	1	610.624.900
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	Morowali	2	625.011.170	-	-	2	625.011.170
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Morowali	1	78.715.000			1	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	Morowali	20	150.000.000			10	79.700.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tugas, fungsi dan kewenangan BPKAD sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi BPKAD.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap aparatur BPKAD yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dam kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.
2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas-tugas terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset.
3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walau dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan.
4. Perlunya peningkatan wawasan Pengelola Keuangan dan Aset dalam peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah.
5. Akan melakukan pengendalian terhadap Bentuk Pertanggungjwaban program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 BPKAD Daerah Kabupaten Morowali ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Morowali, 23 Februari 2024

Kepala Badan
Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Morowali



ALAMSYAH., S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19680312 198603 1 045

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Renja Dinas Perikanan Daerah Tahun 2024 ini dapat disusun. Sesuai Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program. Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) dipakai acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dipakai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Daerah ini masih terdapat kekurangan untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan Renja yang akan datang.

Semoga dokumen Renja tahun 2024 dapat berguna dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program kerja khususnya dibidang perikanan.

Bungku, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Perikanan Daerah
Kabupaten Morowali

Drs. F A J A R

Nip. 19700228 199103 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATAPENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang. 1

1.2 Landasan Hukum. 2

1.3 Maksud dan Tujuan. 4

1.4 Sistematika Penulisan. 4

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah 7

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fugsi Perangkat Daerah, ... 8

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD. 10

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 11

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 12

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. 14

3.3 Program dan Kegiatan. 15

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

BAB. V PENUTUP 18

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra.....

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,.....

Tabel T-C.31 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan,.....

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025,.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rancangan Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada rencana strategis OPD.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Morowali periode tahun 2024 - 2026. Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 merupakan rencana tahunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Daerah Perikanan Kabupaten Morowali tahun 2024 - 2026. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun - tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan di dalamnya memuat kebijakan

pembangunan daerah tahun anggaran 2024. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 di susun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Morowali tahun 2024 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Morowali tahun 2024, khususnya pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali. Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran - sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
38. Inmendagri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen RPD;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 yaitu : untuk menselaraskan antara prioritas kegiatan Pembangunan pada Recana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali tahun 2024 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2024.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Daerah yaitu :

1. Acuan pelaksanaan target kinerja tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN :

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN DAERAH :

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan

Daerah; BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Daerah Tahun 2022

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja 2024 Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali merupakan periode kesatu dari pembangunan 3 (tiga) tahun periode 2024 – 2026.

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang telah disusun dan dapat dilihat pada Tabel. T-C.29.

Tabel. T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n- 2	Realisasi Renja Pearangkat Daerah tahun n- 2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25	**Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan**									
3.25.01.2.02	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerinta Daerah**	**100%**	-	-	-	-	100%		
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**							
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang ada	35.00 Orang	39.00	35.00	32.00	0.91	39.00	110.00	3.14
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan Jasanya	50.00 Orang	50.00	47.00	47.00	1.00	50.00	147.00	2.94
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**							
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12.00 Bulan	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	36.00	3.00
3.25.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.00 Jenis	6.00	8.00	8.00	1.00	10.00	24.00	2.40
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4.00 Jenis	-	-	-	-	4.00	4.00	1.00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	160,034 Lembar	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	1.87
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu kegiatan rapat koordinasi (dalam daerah dan luar daerah)	12.00 Bulan	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	36.00	3.00
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan**								
3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6.00 Unit	-	1.00	1.00	1.00	7.00	8.00	1.33
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Angkut Sampah**	**12.00 Bulan**							
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Bulan	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	36.00	3.00
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**23.00 Unit**							
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	25.00 Unit	23.00	23.00	23.00	1.00	25.00	71.00	2.84
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**38,000.00 Ton**	**33,264.30**	**36,000.00**	**33,420.80**	**0.93**	**33,420.00**	**100,105.10**	**2.63**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100.00 %	92.51	100.00	97.77	0.98	100.00	290.28	2.90
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terbina**	**127.00 KUB**							
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana perikanan tangkap	300.00 KUB	127.00	127.00	127.00	1.00	182.00	436.00	1.45
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang Terbentuk	100.00 KUB	30.00	35.00	45.00	1.29	55.00	130.00	1.30

3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan Penerima Bantuan Pembiayaan	9,000.00 RTP	8,000.00	8,000.00	9,000.00	1.13	9,000.00	26,000.00	2.89
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (**	**30,000.00 Ton**	**61,393.00**	**61,446.00**	**48,175.00**	**0.78**	**48,175.00**	**157,743.00**	**5.26**
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras**	**80.00 Persen**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**1.00**	**75.00**	**215.00**	**2.69**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n- 2	Realisasi Renja Pearangkat Daerah tahun n- 2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Statistik Pembudidaya Ikan	100.00 Persen	80.00	100.00	85.00	0.85	100.00	265.00	2.65
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya	30.00 Pokdakan	22.00	35.00	30.00	0.86	28.00	80.00	2.67
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	155 Ha	3,000.00	4,500.00	4,500.00	1.00	5,052.00	12,552.00	80.98
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang diuji kesehatan ikan dan lingkungannya	600 RTP	45.00	50.00	50.00	1.00	30.00	125.00	0.21
3.25.05	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Jumlah kasus Ilegal Fishing**	**14.00 Kasus**	**8.00**	**7.00**	**7.00**	**1.00**	**20.00**	**35.00**	**2.50**
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus Penangkapan Ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan bahan kimia**	**14.00 Kasus**							
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ilegal Fishing	14.00 Kasus	8.00	7.00	7.00	1.00	6.00	21.00	1.50
3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan**	**6,878.00 Ton**	**2,500.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**1.00**	**7,240.00**	**12,740.00**	**1.85**
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran**	**44.00 Poklahsar**	**20.00**	**25.00**	**25.00**	**1.00**	**20.00**	**65.00**	**1.48**
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	44.00 Poklahsar	20.00	25.00	25.00	1.00	40.00	85.00	1.93
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan**	**14,278.00 Ton**	**10,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**1.00**	**13,540.00**	**38,540.00**	**2.70**
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	14,278.00 Ton	10,000.00	15,000.00	15,000.00	1.00	13,540.00	38,540.00	2.70
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklahsar yang difasilitasi	119.00 Poklahsar	51.00	17.00	17.00	1.00	150.00	218.00	1.83

Tabel. T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n- 2	Realisasi Renja Pearangkat Daerah tahun n- 2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25	**Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan**									
3.25.01.2.02	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerinta Daerah**	**100%**	-	-	-	-	100%		
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**							
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang ada	35.00 Orang	39.00	35.00	32.00	0.91	39.00	110.00	3.14
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan Jasanya	50.00 Orang	50.00	47.00	47.00	1.00	50.00	147.00	2.94
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.00 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**							
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12.00 Bulan	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	36.00	3.00
3.25.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.00 Jenis	6.00	8.00	8.00	1.00	10.00	24.00	2.40
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4.00 Jenis	-	-	-	-	4.00	4.00	1.00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	160,034 Lembar	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	1.87
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu kegiatan rapat koordinasi (dalam daerah dan luar daerah)	12.00 Bulan	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	36.00	3.00
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan**								
3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6.00 Unit	-	1.00	1.00	1.00	7.00	8.00	1.33
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Angkut Sampah**	**12.00 Bulan**							
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Bulan	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	36.00	3.00
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**23.00 Unit**							
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	25.00 Unit	23.00	23.00	23.00	1.00	25.00	71.00	2.84
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**38,000.00 Ton**	**33,264.30**	**36,000.00**	**33,420.80**	**0.93**	**33,420.00**	**100,105.10**	**2.63**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100.00 %	92.51	100.00	97.77	0.98	100.00	290.28	2.90
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terbina**	**127.00 KUB**							
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana perikanan tangkap	300.00 KUB	127.00	127.00	127.00	1.00	182.00	436.00	1.45
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang Terbentuk	100.00 KUB	30.00	35.00	45.00	1.29	55.00	130.00	1.30

3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan Penerima Bantuan Pembiayaan	9,000.00	RTP	8,000.00	8,000.00	9,000.00	1.13	9,000.00	26,000.00	2.89
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (**	**30,000.00**	**Ton**	**61,393.00**	**61,446.00**	**48,175.00**	**0.78**	**48,175.00**	**157,743.00**	**5.26**
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras**	**80.00**	**Persen**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**1.00**	**75.00**	**215.00**	**2.69**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n- 2	Realisasi Renja Pearangkat Daerah tahun n- 2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Statistik Pembudidaya Ikan	100.00 Persen	80.00	100.00	85.00	0.85	100.00	265.00	2.65
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya	30.00 Pokdakan	22.00	35.00	30.00	0.86	28.00	80.00	2.67
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	155 Ha	3,000.00	4,500.00	4,500.00	1.00	5,052.00	12,552.00	80.98
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang diuji kesehatan ikan dan lingkungannya	600 RTP	45.00	50.00	50.00	1.00	30.00	125.00	0.21
3.25.05	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Jumlah kasus Ilegal Fishing**	**14.00 Kasus**	**8.00**	**7.00**	**7.00**	**1.00**	**20.00**	**35.00**	**2.50**
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus Penangkapan Ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan bahan kimia**	**14.00 Kasus**							
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ilegal Fishing	14.00 Kasus	8.00	7.00	7.00	1.00	6.00	21.00	1.50
3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan**	**6,878.00 Ton**	**2,500.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**1.00**	**7,240.00**	**12,740.00**	**1.85**
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran**	**44.00 Poklahsar**	**20.00**	**25.00**	**25.00**	**1.00**	**20.00**	**65.00**	**1.48**
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	44.00 Poklahsar	20.00	25.00	25.00	1.00	40.00	85.00	1.93
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan**	**14,278.00 Ton**	**10,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**1.00**	**13,540.00**	**38,540.00**	**2.70**
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	14,278.00 Ton	10,000.00	15,000.00	15,000.00	1.00	13,540.00	38,540.00	2.70
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklahsar yang difasilitasi	119.00 Poklahsar	51.00	17.00	17.00	1.00	150.00	218.00	1.83

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali.

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisa kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis Standar Kebutuhan Pelayanan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perikanan Daerah dapat di lihat pada Tabel di bawah T-C. 30.

Tabel. T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Daerah
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peoduksi Perikanan (ton) :													
	Produksi perikanan laut (ton)			32,203.20	35,045.07	36,000.00	40,728.82	31,323.00	33,264.30	33,420.80	37,784.50	38,000.00	39,000.00	
	Produksi perikanan Budidaya (ton)			18,260.00	18,913.50	61,446.00	20,220.51	5,653.00	61,393.00	48,175.00	34,291.30	30,000.00	32,000.00	
	Konsumsi ikan perkapita			51.00	51.44	59.53	52.33	51.00	48.73	52.73	68.05	70.04	72.14	
	Nilai tukar nelayan			72.21	74.00	75.00	76.00	75.00	85.00	80.00	100.00	>100	>100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Daerah

Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang perikanan serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adapun fungsi Dinas Perikanan Daerah meliputi :

(1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Perikanan;
(2) Pemberian dukungan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan;
(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan;
(4) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
(5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2022 susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah, terdiri atas:

(1) Kepala Dinas.
(2) Sekretariat, membawahi:
    a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    c. Kelompok Jabatan dan Jabatan Pelaksana.
(3) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
(4) Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
(5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
(6) Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Pengawasan Perizinan;
(7) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
(8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun permasalahan yang meliputi :

1. Asset Dinas Perikanan berupa Excavator mengalami kerusakan dan tidak tersedia biaya perbaikan.
2. Tunggakan listrik/PLN terhadap pengelola TPI.
3. SDM Aparatur belum sesuai Kompetensi.
4. Kendaraan Oprasional Laut Petugas Pemungut Retribusi terbatas.
5. Asset berupa Kendaraan Roda dua dan komputer/laptop masih dikuasai oleh pengguna yang telah berpindah pada kantor lain.
6. Maraknya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari sulawesi tenggara (Tanpa Izin Wilayah Sulawesi Tengah)

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu :

1. Menyelesaikan tunggakan listrik/PLN dan Berkoordinasi dengan Penyewa.
2. Menempatkan Aparatur Sipil Negara sesuai Kompetensinya
3. Mengalokasi/menganggarkan pengadaan kendaraan operasional laut bagi petugas pemungut retribusi
4. Melakukan penarikan Asset dan berkoordinasi dengan Bidang Asset.
5. Berkoordinasi dengan PSDKP KKP RI Satker bitung pengawasan wilayah Pengelola perikanan, penertiban kapal – kapal yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Serta menyarankan agar Kapal – Kapal yang akan beroprasi di Wil. Sul Teng (Kab. Morowali) agar memiliki Izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka proses pembangunan Kabupaten Morowali pada tahun 2022 penentuan prioritas pembangunan Dinas Perikanan Daerah yang menjadi priotitas pada Tabel T-C.31

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Morowali

Perangkat daerah : **Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**7,805,886,456**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah**		**8,887,296,456**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**426,846,500**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**426,846,500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	426,846,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali		1.00	426,846,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**6,456,566,275**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Morowali**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**6,456,566,275**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai yang ada	39.00 Org	5,223,966,275	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai yang ada	39.00	5,223,966,275	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan Jasanya	50.00 Org	1,212,600,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan Jasanya	50.00	1,212,600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Lporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.00 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Lporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.00	20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**644,904,848**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**		**957,854,648**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.00 Unit	15,675,750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.00	328,625,550	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4.00 Jenis	216,663,448	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	216,663,448	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	150,000 Lembar	73,834,650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	150,000	73,834,650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Jumlah waktu kegiatan rapat koordinasi (dalam daerah dan luar daerah)	12 Bulan	338,731,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Jumlah waktu kegiatan rapat koordinasi (dalam daerah dan	12.00	338,731,000	

								luar daerah)			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Morowali	**Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan**	**6.00 Unit**	**768,460,200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan**		**768,460,200**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6.00 Unit	768,460,200	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6.00	768,460,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Morowali**	**Tersedianya Jasa Angkut Sampah**	**12.00 Bulan**	**68,398,833**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Morowali**	Tersedianya Jasa Angkut Sampah		**68,398,833**	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Bulan	68,398,833	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	68,398,833	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**25.00 Unit**	**209,170,000**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**209,170,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	25.00 Unit	209,170,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	25.00	209,170,000	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**38,000 Ton**	**33,422,667,775**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**38,000**	**33,422,667,775**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Morowali**			**124,258,500**					**124,258,500**	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Morowali	Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100 %	124,258,500	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100%	124,258,500	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya**	**300 Orang**	**33,298,409,275**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya**	**300**	**33,298,409,275**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah sarana perikanan tangkap	120.00 Unit	31,237,727,275	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah sarana perikanan tangkap	120.00	31,237,727,275	
	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah KUB yang Terbentuk	100.00 KUB	72,330,000	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan BPJS	100.00	72,330,000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Morowali	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan BPJS	9,000.00 RTP	1,988,352,000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Morowali	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan BPJS	9,000.00	1,988,352,000	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**30,000 Ton**	**2,510,124,313**					**2,510,124,313**	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Morowali**	**Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras**	**80%**	**2,510,124,313**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Morowali**	**Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras**	**80%**	**2,510,124,313**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Persentase pemenuhan data statistik pembudidaya ikan	100 %	49,976,500	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Persentase pemenuhan data statistik pembudidaya ikan	100.00	49,976,500	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras	30.00 Pokdakan	2,209,749,263	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras	30.00	2,209,749,263	

	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kelompok pembudidaya yang diuji kesehatan ikan dan lingkungannya	600.00 RTP	122,113,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kelompok pembudidaya yang diuji kesehatan ikan dan lingkungannya	600.00	122,113,000	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Morowali	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	155.00 Ha	128,285,550	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Morowali	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	155.00	128,285,550	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Kab. Morowali**	**Jumlah kasus Ilegal Fishing**	**14.00 Kasus**	**597,060,533**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Kab. Morowali**	**Jumlah kasus Ilegal Fishing**		**581,279,700**	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kasus Penangkapan Ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan bahan kimia**	**14.00 Kasus**	**597,060,533**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kasus Penangkapan Ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan bahan kimia**		**581,279,700**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kasus hasil pengawasan perikanan tangkap	10.00 Kasus	581,279,700	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kasus hasil pengawasan perikanan tangkap	10.00	581,279,700	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kasus hasil pengawasan perikanan pembudidaya	4.00 Kasus	15,780,833	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kasus hasil pengawasan perikanan pembudidaya	-	-	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan**	**6878 Ton**	**2,824,404,049**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan**		**2,824,404,049**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Morowali**	**Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran**	**44 Poklahsar**	**280,636,040**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran**	**0.44**	**280,636,040**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	34.00 Klp	280,636,040	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	34.00	280,636,040	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan**	**14278 Ton**	**2,543,768,009**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan**	**14,278**	**2,543,768,009**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	14,278 Ton	119,002,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	14,278.00	119,002,000	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang difasilitasi	119.00 Klp	2,424,766,009	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang difasilitasi	119.00	2,424,766,009	

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Morowali

Perangkat daerah : **Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**7,805,886,456**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah**		**8,887,296,456**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**426,846,500**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**426,846,500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	426,846,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali		1.00	426,846,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**6,456,566,275**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Morowali**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**6,456,566,275**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai yang ada	39.00 Org	5,223,966,275	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai yang ada	39.00	5,223,966,275	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan Jasanya	50.00 Org	1,212,600,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan Jasanya	50.00	1,212,600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Lporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.00 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Lporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.00	20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**644,904,848**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**		**957,854,648**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.00 Unit	15,675,750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.00	328,625,550	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4.00 Jenis	216,663,448	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	216,663,448	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	150,000 Lembar	73,834,650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	150,000	73,834,650	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Jumlah waktu kegiatan rapat koordinasi (dalam daerah dan luar daerah)	12 Bulan	338,731,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Jumlah waktu kegiatan rapat koordinasi (dalam daerah dan luar daerah)	12.00	338,731,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Morowali	**Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan**	**6.00 Unit**	**768,460,200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan**		**768,460,200**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6.00 Unit	768,460,200	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6.00	768,460,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Morowali**	**Tersedianya Jasa Angkut Sampah**	**12.00 Bulan**	**68,398,833**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Morowali**	Tersedianya Jasa Angkut Sampah		**68,398,833**	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Bulan	68,398,833	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	68,398,833	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**25.00 Unit**	**209,170,000**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**209,170,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	25.00 Unit	209,170,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	25.00	209,170,000	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**38,000 Ton**	**33,422,667,775**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**38,000**	**33,422,667,775**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Morowali**			**124,258,500**					**124,258,500**	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Morowali	Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100 %	124,258,500	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100%	124,258,500	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya**	**300 Orang**	**33,298,409,275**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya**	**300**	**33,298,409,275**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah sarana perikanan tangkap	120.00 Unit	31,237,727,275	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah sarana perikanan tangkap	120.00	31,237,727,275	
	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah KUB yang Terbentuk	100.00 KUB	72,330,000	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan BPJS	100.00	72,330,000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Morowali	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan BPJS	9,000.00 RTP	1,988,352,000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Morowali	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan BPJS	9,000.00	1,988,352,000	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**30,000 Ton**	**2,510,124,313**					**2,510,124,313**	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Morowali**	**Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras**	**80%**	**2,510,124,313**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Morowali**	**Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras**	**80%**	**2,510,124,313**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Persentase pemenuhan data statistik pembudidaya ikan	100 %	49,976,500	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Persentase pemenuhan data statistik pembudidaya ikan	100.00	49,976,500	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras	30.00 Pokdakan	2,209,749,263	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras	30.00	2,209,749,263	

	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kelompok pembudidaya yang diuji kesehatan ikan dan lingkungannya	600.00 RTP	122,113,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kelompok pembudidaya yang diuji kesehatan ikan dan lingkungannya	600.00	122,113,000	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Morowali	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	155.00 Ha	128,285,550	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Morowali	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	155.00	128,285,550	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Kab. Morowali**	**Jumlah kasus Ilegal Fishing**	**14.00 Kasus**	**597,060,533**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Kab. Morowali**	**Jumlah kasus Ilegal Fishing**		**581,279,700**	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indi
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kasus Penangkapan Ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan bahan kimia**	**14.00 Kasus**	**597,060,533**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Penangka menggun peledak, kimia**
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kasus hasil pengawasan perikanan tangkap	10.00 Kasus	581,279,700	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah ka pengawas tangkap
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kasus hasil pengawasan perikanan pembudidaya	4.00 Kasus	15,780,833	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah ka pengawas pembudid
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan**	**6878 Ton**	**2,824,404,049**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Olahan hasil peri**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Morowali**	**Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran**	**44 Poklahsar**	**280,636,040**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Morowali**	**Jumlah mendapa dan pe pada usa dan pemasara**
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	34.00 Klp	280,636,040	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah mendapat pelatihan pengolaha
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan**	**14278 Ton**	**2,543,768,009**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali**	**Jumlah penyalura Pengolah**
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	14,278 Ton	119,002,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah n Keters Konsumsi Pengolaha
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang difasilitasi	119.00 Klp	2,424,766,009	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah difasilitasi

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan oleh masyarakat melalui mekanisme Musrembang Kecamatan dalam forum OPD tahun 2023, maka

yang dapat kami masukkan dalam kerangka pendanaan Renstra OPD dapat dilihat pada Tabel. T-C.32

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023
Kabupaten Morowali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Capaian Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerinta Daerah**	**0%**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**100%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Morowali	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai yang ada	39 Orang	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan Jasanya	50 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Morowali**	**Prensentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan**	0%	
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98 Unit	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Persentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000 Lembar	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Persentase waktu kegiatan rapat koordinasi (dalam daerah dan luar daerah)	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kendaraan Dinas Penunjang Urusan**	**6 Unit**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Morowali**	**Tersedianya Jasa Angkut Sampah**	**12 Bulan**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Morowali**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**25 Unit**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	25 Unit	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**38.000 Ton**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Morowali**			
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Morowali	Persentase pemenuhan data statistik perikanan tangkap	100%	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terbina**	**300 Orang**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah sarana perikanan tangkap	120 Unit	
	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah KUB yang Terbentuk	100 KUB	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Morowali	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan bantuan BPJS	9000 RTP	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**30.000 Ton**	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Morowali**	**Persentase Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras**	**0%**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Persentase Pemenuhan Data Statistik Pembudidaya Ikan	100.00%	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Pokdakan Penerima Bantuan Sarpras	30 Pokdakan	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah kelompok pembudidaya yang diuji kesehatan ikan dan lingkungannya	600 RTP	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Morowali	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	155 Ha	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Kab. Morowali**	**Jumlah kasus Ilegal Fishing**	**14 Kasus**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kasus Penangkapan Ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan bahan kimia**	**14 Kasus**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Kasus Ilegal Fishing	10 Kasus	

	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Kab. Morowali**	**Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan**	**6.878 Ton**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Morowali**	**Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran**	**44 Poklahsar**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran	44 Kelompok	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali**	**Jumlah penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan**	**14.278 Ton**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	14278 Ton	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Poklahsar yang difasilitasi	119 Kelompok	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok pendukung lain berupa : Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan program dan kegiata, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan. Berikut adalah program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari Dinas Perikanan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Dalam mendukung terwujudnya RPD 2024 – 2026 Kabupaten Morowali, melalui Program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang ditetapkan adalah

:

>> Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan <<

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran Dinas Perikanan Daerah adalah : >> Meningkatkan produksi perikanan <<

3.3 Program dan Kegiatan

Menindaklanjuti rencana strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
   - Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
   - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatanpada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali, maka dibutuhkan dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Metode program, kegiatan, indikator dan hasil indikatif, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali dijabarkan lebih rinci dalam bentuk, program, kegiatan yang harus di laksanakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu sebagaimana Tabel T- C.33

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 - 2026. Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 merupakan rencana tahunan pertama dalam pelaksanaan RPD Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 - 2026. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun - tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali tahun 2023 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan di dalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2024.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan tidak hanya di tentukan dengan adanya dokumen Renja melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pada umumnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat terwujud.

Semoga dokumen Renja dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024.

Kepala Dinas Perikanan Daera
Kabupaten Morowali

Drs. FAISAR
Nip. 19700228 199103 1 008











RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN MOROWALI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2024.

Buku Rancangan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali Tahun 2024. Besar harapan kami supaya dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali.

Bungku, 3 Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Morowali,

H. ZAINAL, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650306 198903 1 018

DAFTAR ISI

			Halaman
DAFTAR ISI			i
DAFTAR TABEL			ii
BAB I	Pendahuluan		I - 1
	1.1	Latar Belakang	I - 1
	1.2	Landasan Hukum	I - 2
	1.3	Maksud dan Tujuan	I - 4
	1.4	Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Dinas Perangkat Daerah		II - 1
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 1
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 2
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 4
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 4
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah		III - 1
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 2
	3.3	Program dan Kegiatan	III - 2
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		IV - 1
BAB V	Penutup		V - 1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C. 29	II - 5
Tabel T-C. 30	II - 16
Tabel T-C. 31	II - 17
Tabel T-C. 32	II - 21
Tabel T-C. 33	III – 3
Tabel T-C. 42	IV - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang penting dari kerangka pembangunan daerah, selain implementasi pembangunan serta evaluasi pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, untukmengimplementasikan rencana pembangunan lima tahunan dalam RPD, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (RENSTRA PD). Sedangkan untuk pelaksanaan rencana pembangununan setiap tahun, maka PD merancangRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD).

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengamanatkan adanya keterkaitan antar perencanaan pembangunan. Sehingga RENJA PD dalam sebuah kabupaten/kota harus memperhatikan serta menjadi bagian dari RKPD, RENSTRA PD, RPD dan RPJPD.

Recana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali harus terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali, mulai dari RPJPD, RPD, serta RENSTRA PD.

RENJA PD Kabupaten Morowali harus memperhatikan RPJPD 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah Terwujudnya Kabupaten Morowali.

Dalam RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026, mengamanatkan bahwa misi RPD Kabupaten Morowali adalah mewujudkan :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Hukum;
4. Melaksanakan Penataan Wilayah;
5. Meningkatkan Stabiitas Keamanan;

Kesemua misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan setiap tahunnya.

Dengan demikian berpedoman pada misiRencana Pembangunan Daerah (RPD) maka diperlukan penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapatdiselaraskan keterkaitan antara misi kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. RENSTRA PD Tahun 2024-2026 inilah yang akan dijabarkan ke dalam RENJA PD tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali di tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian danPerdagangan

Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1). Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali pada tahun 2024 dengan berdasarkan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024;
2). Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
3). Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupten Morowali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBAB

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat:

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2.Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupten Morowali Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupten Morowali adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali tersaji dalam Tabel T-C.29 (Lampiran).

Tabel 2.9

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

"Dinas Perdagangan dan Perindustrian" Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)		Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN**	**100%**	**95%**	**100.00%**	**94.00%**	**0,94**	**100.00%**	**289.00%**	**2.89**
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100.00%**	**100.00%**	**0%**	**0%**	**0**	**0%**	**100%**	**1.00**
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja (buah)	2	0	0	0	0	0	0	-
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan musrenbang yang diikuti (kegiatan)	10	9	0	0	0	0	9	0.90
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Dagperin**	**100.00%**	**95.00%**	**100%**	**100%**	**1**	**100%**	**295%**	**2.95**

			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12	12	12	12	1	12	36	3.00
			Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang dibayarkan honornya (orang)	28	26	26	26	1	26	78	2.79
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase PNS Dinas Dagperin yang mengikuti Diklat**	**100.00%**	**0.00%**	**100%**	**100%**	**1**	**0%**	**100%**	**1.00**
			Sub Kegiatan : Penddidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat (orang)	2	0	1	1	1	0	1	0.50
			Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek (orang)	2	0	0	0	0	0	0	-
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum Dinas Dagperin**	**100%**	**99.00%**	**100%**	**64.00%**	**0.64**	**100%**	**3**	**2.63**
			Sub Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (dos)	119	0	0	0	0	473	473	3.97
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	9	10	9	0.9	5	23	1.53
			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (jenis)	12	15	13	14	1.07	13	42	3.50
			Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggaandaan yang tersedia (lembar)	85000	70000	95000	95000	1	21750	186750	2.20
			Sub Kegiatan : Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah (kegiatan)	18	13	16	16	1	3	32	1.78
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100.00%**	**40.48%**	**99%**	**2,64**	**100%**	**299%**	2.99
			Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	2	0	0	0	0	3	3	1.50

					Sub Kegiatan : Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (buah)	15	8	6	7	1	0	15	3.28
					Sub Kegiatan : Pengadaan mesin absensi dan kartu	Jumlah mesin absensi dan kartu yang diadakan (buah)	1	0	0	0	0	0	0	-
					Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya (buah)	52	0	0	0	0	52	52	1.00
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**98.00%**	**100.00%**	**98.00%**	**0,98**	**100.00%**	296.00%	2.96
					Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (lembar)	12	12	12	12	1	12	36	3.00
					Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	12	12	12	12	1	12	36	3.00
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**1**	**100.00%**	**200.00%**	2.00
					Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	8	0	0	0	0	10	10	1.25
					Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	5	0	1	1	1	7	8	1.60
					Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	1	0	0	0	0	2	2	2.00
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**28%**	**0.00%**	**100.00%**	**79%**	**0,79**	**26%**	**1**	**3.75**
					Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase Pelaku Usaha Toko Modern/Pusat Perbelanjaan/ Pasar Rakyat yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Usaha**	**25%**	**0.00%**	**100%**	**79%**	**0,79**	**95%**	**2**	**6.96**
					Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Toko/Swalayan)	7	0	10	0	0	15	15	2.14

				Sub Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang, Fasilitasi Tanda Daftar Gudang yang dilaksankan (Pelaku Usaha)	12	0	0	0	0	0	0	-
				Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Persentase Eksportir yang ditertibitkan Surat Keterangan Asal Barang**	**22%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	-
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	-
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**30.00%**	**99.00%**	**20%**	**98%**	**4,92**	**29%**	**226.00%**	**7.53**
				Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase Pasar Yang ditingkatkan Sarana dan Pra Sarananya**	**1.45%**	**99.00%**	**20%**	**98%**	**4,92**	**20%**	**2**	**149.66**
				Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (sarana/ pra sarana) (unit)	12	2	1	1	1	6	9	0.75
				Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	**Persentase Pengelola Pasar yang di Bina**	**20%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0**	**0**	**0**	-
				Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	-
					Jumlah Pengelola Sarana dan Distribusi Perdagangan yang di Bina (orang)	10	0	0	0	0	0	0	-
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten**	**35%**	**98.00%**	**3.88%**	**3.88%**	**1**	**33.00%**	**134.88%**	3.85
				Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**28,21%**	**98.00%**	**15%**	**16%**	**1%**	**20%**	**1**	**#VALUE!**
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	1	0	4	5	6	5	10	10.00
					Jumlah regulasi yang dikeluarkan (regulasi)	1	0	0	0	0	0	0	-

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	0	2	5	5	1	3	10	-
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah kegiatan pelatihan (kegiatan)	4	5	1	1	1	2	8	2.00
						Jumlah Pelaku IKM yang dilatih (orang)	80	40	60	60	1	25	125	1.56
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	0	3	14	14	1	0	17	-
						Jumlah Sarana dan Pra Sarana Industri yang dibangun (unit)	1	10	14	14	1	0	24	24.00
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	0	0	21	21	1	3	24	-
						Jumlah Produk IKM yang di Promosi Produknya (jenis)	70	0	120	120	1	0	120	1.71
						Jumlah IKM yang fasilitasi Sarana dan Pra Sarananya (unit)	7	0	2	2	1	11	13	1.86
					Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	0	0	1	1	1	0	1	-
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi dan dipantau**	**25%**	**0.00%**	**20%**	**35%**	**1.75**	**20%**	**0.55**	**2.20**
					Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Penertiban Izin Usaha (IUI) Kecil dan IUI Menengah**	**28,21%**	**0.00%**	**20%**	**35%**	**1.75**	**20%**	**0.55**	**#VALUE!**
					Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (dokumen)	25	0	2	2	1	24	26	1.04

				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah IKM yang diawasi pemenuhan komitmen perizinan (unit)	35	0	45	300	6.66	400	700	20.00
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini**	**37,80%**	**0.00%**	**100%**	**100%**	**1**	**37%**	**1.37**	**#VALUE!**
				Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah IKM yang teregistrasi dan melapor pada aplikasi SIINAS**	**10 IKM**	**0.00%**	**20%**	**20%**	**1**	**50%**	**0.7**	**#VALUE!**
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (kegiatan)	1	0	9	9	1	0	9	9.00
					Jumlah IKM yang terigistrasi dan melapor pada aplikasi SIINAS (unit)	10	0	50	43	0.86	0	43	4.30
				Sub Kegiatan : Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)	1	0	1	1	1	2	3	3.00
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100%**	**100.00%**	**70%**	**97.00%**	**1.38**	**27%**	**2.24**	**2.24**
				Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100%**	**100.00%**	**70%**	**97.00%**	**1.38**	**20%**	**2.17**	**2.17**
				Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	10	13	10	0.76	12	32	2.67
					Peresentase Laporan Harian (Hari Kerja) dalam Setahun (laporan)	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0	100%	1	1.00
				Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	10	9	9	9	1	10	28	2.80
					Jumlah kegiatan pasar murah (kegiatan)	10	9	9	9	1	3	21	2.10
				Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**100%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0**	**27%**	**0.27**	**0.27**

		Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	6	0	0	0	0	12	12	2.00
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase alat UTTP yang tera ulang**	**55%**	**99.00%**	**30**	**87**	**2.9**	**16%**	**8815.00%**	**160.27**
		Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal dan UTTP**	**30%**	**99.00%**	**60%**	**87%**	**1.45**	**20%**	**206.00%**	**6.87**
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP) (jenis)	50	3	2	2	1	80	85	1.70
		Sub Kegiatan : Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	100	25	25	30	1.2	37	92	0.92
		Sub Kegiatan : Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dokumen)	12	0	2	2	1	0	2	0.17
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**PERSENTASE PRODUK LOKAL YANG DI PROMOSIKAN**	**33,50%**	**99.00%**	**30%**	**99%**	**3.3**	**33%**	**231.00%**	**#VALUE!**
		Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase Produk Lokal yang di Promosikan**	**24.00%**	**99.00%**	**60%**	**99%**	**1.65**	**60%**	**258.00%**	**10.75**
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12	10	25	20	0.8	6	36	3.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi penyelenggaraan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan
2. Hasil Kinerja

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali telah melaksanakan kegiatan utama dalam menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang , perindustrian dan perdagangan
3. Sumber Daya Manusia

   Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia yang masih terbatas jumlah dalam kapasitas maupun kapabilitasnya.

Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan DinasPerdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali tersaji dalam Tabel T-C.30 (Lampiran).

Tabel 3.0

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah "Dinas Perdagangan dan Perindustrian"

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
A.	**URUSAN PENUNJANG**											
1	Jumlah layanan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	_	_	12	26	12	12	24	2	_	_	
2	Jumlah PHL yang dibayarkan honornya (orang)	_	_	27	27	25	28	27	0	_	_	
3	Jumlah orang yang mengikuti Diklat (orang)	_	_	_	_	2	2	_	0	_	_	
4	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya (buah)	_	_	50	52	52	52	51	0	_	_	
5	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	_	_	1	50	2	2	0	0	_	_	
6	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (jenis)	_	_	21	13	15	15	13	8	_	_	
7	Jumlah Cetakan dan Penggaandaan yang tersedia (lembar)	_	_	27957	21700	85000	85000	21700	1000	_	_	
8	Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah (kegiatan)	_	_	23	70	18	23	60	1	_	_	
9	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	_	_	_	7	15	15	7	0	_	_	
10	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	_	_	_	3	2	2	3	0	_	_	
11	Jumlah Pengadaan Mebeleur (buah)	_	_	15	_	15	15	_	0	_	_	
12	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (lembar)	_	_	12	12	12	12	12	1	_	_	
13	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	_	_	12	12	12	12	12	0	_	_	
14	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	_	_	_	7	8	8	10	5	_	_	
15	Jumlah jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	_	_	2	10	5	5	7	0	_	_	
16	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	_	_	_	2	1	1	2	_	_	_	

B.	**URUSAN PERDAGANGAN**											
1	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	_	_	9	15	7	7	25	1	_	_	
2	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang Fasilitasi Tanda Daftar Gudang yang dilaksanakan	_	_	_	_	12	12	_	0	_	_	
3	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	_	_	_	_	10	10	_	_	_	_	
4	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (sarana/ pra sarana)	_	_	4	6	12	12	13	0	_	_	
5	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	_	_	_	_	10	10	_	1	_	_	
6	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	_	_	12	12	12	12	12	0	_	_	
7	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	_	_	3	10	10	10	10	0	_	_	
8	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	_	_	50%	12	6	6	12	0	_	_	
9	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP)	_	_	40	80	50	100	124	0	_	_	
10	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	_	_	_	2	100	100	2	_	_	_	
11	Jumlah Dokumen Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dokumen)	_	_	_	_	12	12	_	1	_	_	
12	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	_	_	12	10	12	15	13	0	_	_	

C.	**URUSAN PERINDUSTRIAN**											
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	_	_	_	1	1	3	0	1	_	_	
2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	_	_	25	70	80	3	55	0	_	_	
3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	_	_	33	_	1	1	_	_	_	_	
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	_	_	15	11	2	2	50	_	_	_	
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	_	_	12	_	0	1	_	_	_	_	
6	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	_	_	14	24	25	25	6	0	_	_	
7	Jumlah usaha industri yang diawasi (IKM)	_	_	_	_	35	35	_	_	_	_	
8	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	_	_	_	_	1	2	_	0	_	_	
9	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri	_	_	12	12	1	2	2	0	_	_	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Morowali, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan urusan perindustrian dan perdagangan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupten Morowali mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pembinaan, dan pengendalian dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud diatas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupten Morowali mempunyai fungsi :

1. Perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan yang meliputiperindustrian dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, metrologi, legalitas usaha indutri, informasi industri dan pengawasan industri;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup perindustrian dan perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup perindustrian dan perdagangan;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD adalah :

1. Personil yang tersedia masih kurang dalam jumlah dan kualitas SDMnya terutama dilevel staff;
2. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan muncul isu–isu masalah perekonomian yang harus direspon tetapi belum ada di Renja;
3. Pola berpikir masyarakat sasaran pembinaan perlu dirubah.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Misi RPD.

Pencapaian kinerja program yang ada selalu ditingkatkan dan disinkronkan dengan misi RPD dan Program Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali dalam pelaksanaannya

masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan antara lain :

- Belum adanya ketentuan peraturan tentang keberadaan kelompok jabatan fungsional di bidang Industri dan Perdagangan, kedepandiperlukan peraturan yang mendukung kelompok jabatan fungsional.
- Koordinasi dengan Instansi / Institusi terkait belum optimal.
- Profesionalisme aparat pembina masih terbatas.
- Data base tentang potensi industri dan perdagangan masih kurang cukuptersedia (kurang mutakhir).
- Adanya tumpang tindih pembinaan dengan Unit Kerja lain.
- Terbatasnya kemampuan usaha kecil menengah dalam pengelolaan usahanya meliputi lemahnya kemampuan sumber daya manusia, pemasaran, produksi, manajemen dan permodalan dimana kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha nonformal sehingga mereka seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program penguatan ekonomi rakyat lainnyfa yang membutuhkan aspek legal formal, padahal sektor ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Morowali.
- Hasil industri yang diekspor dan pangsa/segmentasi pasar di berbagai negara tujuan ekspor serta kemampuan ekspor secara langsung sangat terbatas.
- Masih lemahnya koordinasi antara instansi terkait di dalam menangani ekspor.
- Kesempatan untuk mengetahui Perkembangan Industri dan Perdagangan Internasional terbatas.
- Kurang optimalnya fungsi asosiasi-asosiasi di bidang industri maupun perdagangan.
- Wilayah Kabupaten Morowali terbatas untuk pemukiman tidak memungkinkan investor yang bergerak di bidang industri yang berpolusi.
- Koordinasi internal antar bidang terkadang masih terkendala kepentingansektoral partial job, belum mengarah pada kesatuan tugas, pokok, fungsi lembaga.

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pembinaan belum mencapai kebutuhan maksimal dalam pembinaan teknis peran sehingga berdampak pada berbagai persoalan.
- Partisipasi stake holder dalam merespon pembinaan masih sangat rendah sehingga hubungan antara instansi pembinaan dengan stake holder baik horisontal maupun vertikal masih tersendat.
- Koordinasi antar instansi terkait masih terkendala kepentingan sektoral khususnya berhubungan dengan stake holder yang sama dan timbul over laping di tata pelaksanaan.
- Terbatasnya penguasaan teknologi informasi berdampak pada rendahnya efisiensi pelaporan dan pelaksanaan program.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pembuatan program dan kegiatan pembinaan, pengembangan, Perindustrian, Perdagangan dan UPTD Pasar sudah masuk dalam rancangan awal RKPD sudah cukup memadai. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sudah ada dari usulan RKPD tinggal menyesuaikan kondisikeuangan daerah untuk kegiatan tersebut. Review terhadap rancangan awal RKPD tersaji dalam Tabel T-C.31 (Lampiran).

Tabel 3.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Perangkat Daerah "Dinas Perdagangan dan Perindustrian" Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Periode / Tahun : 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN**	**100%**	**5,470,726,487.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN**	**100%**	**5,450,290,000.00**	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**18,000,000.00**	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**20,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja (buah)	2	3,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja (buah)	2	5,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah kegiatan musrenbang yang diikuti (kegiatan)	10	15,000,000.00	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah kegiatan musrenbang yang diikuti (kegiatan)	10	15,000,000.00	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Dagperin**	**100%**	**3,748,000,000.00**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Dagperin**	**100%**	**4,150,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah layanan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12	3,055,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah layanan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12	3,500,000,000.00	

	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah PHL yang dibayarkan honornya (orang)	29	693,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah PHL yang dibayarkan honornya (orang)	29	650,000,000.00	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase PNS Dinas Dagperin yang mengikuti Diklat**	**100%**	**130,000,000.00**	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase PNS Dinas Dagperin yang mengikuti Diklat**	**100%**	**120,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Penddidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah orang yang mengikuti Diklat (orang)	2	55,000,000.00	Sub Kegiatan : Penddidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah orang yang mengikuti Diklat (orang)	2	60,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek (orang)	3	75,000,000.00	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek (orang)	3	60,000,000.00	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum Dinas Dagperin**	**100%**	**655,000,000.00**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum Dinas Dagperin**	**100%**	**300,790,000.00**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman rapat	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (dos)	200	20,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman rapat	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (dos)	200	7,790,000.00	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	195,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	130,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (jenis)	15	45,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (jenis)	15	30,000,000.00	

	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Cetakan dan Penggaandaan yang tersedia (lembar)	85000	30,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Cetakan dan Penggaandaan yang tersedia (lembar)	85000	13,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah (kegiatan)	20	365,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah (kegiatan)	20	120,000,000.00	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**583,226,487.00**	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**536,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	3	475,000,000.00	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	3	400,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Meubel	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Pengadaan Mebeleur (buah)	7	50,000,000.00	Sub Kegiatan : Pengadaan Meubel	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Pengadaan Mebeleur (buah)	7	110,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Pengadaan mesin absensi dan kartu	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah mesin absensi dan kartu yang diadakan (buah)	53	23,226,487.00	Sub Kegiatan : Pengadaan mesin absensi dan kartu	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah mesin absensi dan kartu yang diadakan (buah)	53	3,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya (buah)	53	35,000,000.00	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya (buah)	53	23,000,000.00	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**41,500,000.00**	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**35,500,000.00**	

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (lembar)	1	40,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (lembar)	1	34,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	12	1,500,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	12	1,500,000.00	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**295,000,000.00**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**Persentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**	**288,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jasa perbaikan peralatan kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	20	12,000,000.00	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jasa perbaikan peralatan kantor	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	20	8,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	5	85,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	5	30,000,000.00	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	1	198,000,000.00	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	1	250,000,000.00	
	PERDAGANGAN										
2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**28%**	**134,150,632.00**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**28%**	**130,000,000.00**	

	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pelaku Usaha Toko Modern/Pusat Perbelanjaan/ Pasar Rakyat yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Usaha**	**25%**	**104,150,632.00**	**Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pelaku Usaha Toko Modern/Pusat Perbelanjaan/ Pasar Rakyat yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Usaha**	**25%**	**100,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Toko/Swalayan)	6	44,150,632.00	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Toko/Swalayan)	6	40,000,000.00	
	Sub Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang, Fasilitasi Tanda Daftar Gudang yang dilaksankan (Pelaku Usaha)	10	60,000,000.00	Sub Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang, Fasilitasi Tanda Daftar Gudang yang dilaksankan (Pelaku Usaha)	10	60,000,000.00	
	Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Eksportir yang ditertibitkan Surat Keterangan Asal Barang**	**22%**	**30,000,000.00**	**Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Eksportir yang ditertibitkan Surat Keterangan Asal Barang**	**22%**	**30,000,000.00**	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (dokumen)	10	30,000,000.00	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (dokumen)	10	30,000,000.00	

3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**30.00%**	**1,900,000,000.00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**30.00%**	**2,550,000,000.00**	
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pasar Yang ditingkatkan Sarana dan Pra Sarananya**	**1.45%**	**1,900,000,000.00**	**Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pasar Yang ditingkatkan Sarana dan Pra Sarananya**	**1.45%**	**2,000,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (sarana/ pra sarana) (unit)	12	1,900,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (sarana/ pra sarana) (unit)	12	2,000,000,000.00	
	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pengelola Pasar yang di Bina**	**20%**		**Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pengelola Pasar yang di Bina**	**20%**	**550,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi (dokumen)	10		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi (dokumen)	10	550,000,000.00	
			Jumlah Pengelola Sarana dan Distribusi Perdagangan yang di Bina (orang)	10				Jumlah Pengelola Sarana dan Distribusi Perdagangan yang di Bina (orang)	10		
	INDUSTRI										
4	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN**	**35.00%**	**1,838,025,347.00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN**	**35.00%**	**1,810,447,407.00**	

	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**28,21%**	**1,838,025,347.00**	**Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**28,21%**	**1,810,447,407.00**	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	1		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	1	25,000,000.00	
			Jumlah regulasi yang dikeluarkan (regulasi)	1				Jumlah regulasi yang dikeluarkan (regulasi)	1		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	0	1,017,577,940.00	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	0	1,000,000,000.00	
			Jumlah kegiatan pelatihan (kegiatan)	3				Jumlah kegiatan pelatihan (kegiatan)	3		
			Jumlah Pelaku IKM yang dilatih (orang)	40				Jumlah Pelaku IKM yang dilatih (orang)	40		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	0	235,000,000.00	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	0	200,000,000.00	
			Jumlah Sarana dan Pra Sarana Industri yang dibangun (unit)	1				Jumlah Sarana dan Pra Sarana Industri yang dibangun (unit)	1		

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	0	585,447,407.00	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	0	585,447,407.00	
			Jumlah Produk IKM yang di Promosi Produknya (jenis)	45				Jumlah Produk IKM yang di Promosi Produknya (jenis)	45		
			Jumlah IKM yang fasilitasi Sarana dan Pra Sarananya (unit)	5				Jumlah IKM yang fasilitasi Sarana dan Pra Sarananya (unit)	5		
	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	0		Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	0		
5	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DIAWASI DAN DIPANTAU**	**22%**	**67,920,913.00**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DIAWASI DAN DIPANTAU**	**22%**	**67,920,913.00**	
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Penertiban Izin Usaha (IUI) Kecil dan IUI Menengah**	**28,21%**	**67,920,913.00**	**Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Penertiban Izin Usaha (IUI) Kecil dan IUI Menengah**	**28,21%**	**67,920,913.00**	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (dokumen)	15	30,000,000.00	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (dokumen)	15	30,000,000.00	

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	**Kabupaten Morowali**	Jumlah IKM yang diawasi pemenuhan komitmen perizinan (unit)	40	37,920,913.00	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	**Kabupaten Morowali**	Jumlah IKM yang diawasi pemenuhan komitmen perizinan (unit)	40	37,920,913.00	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI**	**37,80%**	**135,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI**	**37,80%**	**135,000,000.00**	
	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	**Jumlah IKM yang teregistrasi dan mealpor pada aplikasi SIINAS**	**10 IKM**	**135,000,000.00**	**Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Morowali**	**Jumlah IKM yang teregistrasi dan mealpor pada aplikasi SIINAS**	**10 IKM**	**135,000,000.00**	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (kegiatan)	1	75,000,000.00	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (kegiatan)	1	75,000,000.00	
			Jumlah IKM yang terigistrasi dan melapor pada aplikasi SIINAS (unit)	10				Jumlah IKM yang terigistrasi dan melapor pada aplikasi SIINAS (unit)	10		
	Sub Kegiatan : Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)	1	60,000,000.00	Sub Kegiatan : Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)	1	60,000,000.00	

	LINKOS										
7	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**100%**	**705,132,729.00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**100%**	**734,359,216.00**	
	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100%**	**675,132,729.00**	**Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100%**	**704,359,216.00**	
	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	150,000,000.00	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	179,226,487.00	
			Peresentase Laporan Harian (Hari Kerja) dalam Setahun (laporan)	100%				Peresentase Laporan Harian (Hari Kerja) dalam Setahun (laporan)	100%		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	10	525,132,729.00	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	10	525,132,729.00	
			Jumlah kegiatan pasar murah (kegiatan)	10				Jumlah kegiatan pasar murah (kegiatan)	10		
	Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**100%**	**30,000,000.00**	**Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**100%**	**30,000,000.00**	

	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	6	30,000,000.00	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	6	30,000,000.00	
8	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE ALAT UTTP YANG TERA ULANG**	**55%**	**755,361,400.00**	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE ALAT UTTP YANG TERA ULANG**	**55%**	**815,361,400.00**	
	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal dan UTTP**	**30%**	**755,361,400.00**	**Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal dan UTTP**	**30%**	**815,361,400.00**	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP) (jenis)	45	500,657,400.00	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP) (jenis)	45	560,657,400.00	
	Sub Kegiatan : Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	50	134,704,000.00	Sub Kegiatan : Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	50	134,704,000.00	
	Sub Kegiatan : Penyidikan Metrologi Legal	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dokumen)	12	120,000,000.00	Sub Kegiatan : Penyidikan Metrologi Legal	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dokumen)	12	120,000,000.00	
9	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PRODUK LOKAL YANG DI PROMOSIKAN**	**33,50%**	**127,466,000.00**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kabupaten Morowali**	**PERSENTASE PRODUK LOKAL YANG DI PROMOSIKAN**	**33,50%**	**157,466,000.00**	

	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Produk Lokal yang di Promosikan**	**24.00%**	**127,466,000.00**	**Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kabupaten Morowali**	**Persentase Produk Lokal yang di Promosikan**	**24.00%**	**157,466,000.00**	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Produk Lokal yang di Promosikan (jenis)	12	127,466,000.00	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	**Kabupaten Morowali**	Jumlah Produk Lokal yang di Promosikan (jenis)	12	157,466,000.00	
					11,133,783,508.00					**11,850,844,936.00**	

	INDUSTRI	Rp	2,040,946,260								
	LINKOS	Rp	1,587,960,129								
	BELUM TERINPUT	**Rp**	**-**		Rp	750,000,000		Rp	750,000,000		
									Rp500,000,000		
	DIKURANGI		**-**					Rp	1,250,000,000		
								Rp	625,000,000		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan. Untuk hasil musrenbang kelurahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel T-C.32 (Lampiran). Selain itu ada juga Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan DPRD Kfabupten Morowali.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustian

Periode 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2024	
			Target	Rp
1	2	5	7	8
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik Dinas Dagperin**	**PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN**	**100%**	**5,450,290,000.00**
		Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	**100%**	**20,000,000.00**
		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja (buah)	2	5,000,000.00
		Jumlah kegiatan musrenbang yang diikuti (kegiatan)	10	15,000,000.00
		Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Dagperin	**100%**	**4,150,000,000.00**
		Jumlah layanan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12	3,500,000,000.00
		Jumlah PHL yang dibayarkan honornya (orang)	29	650,000,000.00
		Persentase PNS Dinas Dagperin yang mengikuti Diklat	**100%**	**120,000,000.00**
		Jumlah orang yang mengikuti Diklat (orang)	2	60,000,000.00
		Jumlah orang yang mengikuti Bimtek (orang)	3	60,000,000.00
		Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum Dinas Dagperin	**100%**	**300,790,000.00**
		Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (dos)	200	7,790,000.00
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15	130,000,000.00
		Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (jenis)	15	30,000,000.00

		Jumlah Cetakan dan Penggaandaan yang tersedia (lembar)	85000	13,000,000.00
		Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah (kegiatan)	20	120,000,000.00
		Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah	**100%**	**536,000,000.00**
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	3	400,000,000.00
		Jumlah Pengadaan Mebeleur (buah)	7	110,000,000.00
		Jumlah mesin absensi dan kartu yang diadakan (buah)	53	3,000,000.00
		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya (buah)	53	23,000,000.00
		Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	**100%**	**35,500,000.00**
		Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (lembar)	1	34,000,000.00
		Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	12	1,500,000.00
		Persentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintah	**100%**	**288,000,000.00**
		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	20	8,000,000.00
		Jumlah jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	5	30,000,000.00
		Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	1	250,000,000.00

	Meningkatnya konribusi sektor perdagangan yang kondusif	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**28%**	**130,000,000.00**
		Persentase Pelaku Usaha Toko Modern/Pusat Perbelanjaan/ Pasar Rakyat yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Usaha	**25%**	**100,000,000.00**
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Toko/Swalayan)	6	40,000,000.00
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang, Fasilitasi Tanda Daftar Gudang yang dilaksankan (Pelaku Usaha)	10	60,000,000.00
		Persentase Eksportir yang ditertibitkan Surat Keterangan Asal Barang	**22%**	**30,000,000.00**
		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (dokumen)	10	30,000,000.00
		PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**30.00%**	**2,550,000,000.00**
		Persentase Pasar Yang ditingkatkan Sarana dan Pra Saranannya	**1.45%**	**2,000,000,000.00**
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (sarana/ pra sarana) (unit)	12	2,000,000,000.00
		Persentase Pengelola Pasar yang di Bina	**20%**	**550,000,000.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi (dokumen)	10	550,000,000.00
		Jumlah Pengelola Sarana dan Distribusi Perdagangan yang di Bina (orang)	10	

	Meningkatkan Peran Perindustrian sebagai Pendukung Peningkatan Ekonomi Daerah	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN**	**35.00%**	**1,810,447,407.00**
		Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	**28,21%**	**1,810,447,407.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	1	25,000,000.00
		Jumlah regulasi yang dikeluarkan (regulasi)	1	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	0	1,000,000,000.00
		Jumlah kegiatan pelatihan (kegiatan)	3	
		Jumlah Pelaku IKM yang dilatih (orang)	40	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	0	200,000,000.00
		Jumlah Sarana dan Pra Sarana Industri yang dibangun (unit)	1	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	0	585,447,407.00
		Jumlah Produk IKM yang di Promosi Produknya (jenis)	45	
		Jumlah IKM yang fasilitasi Sarana dan Pra Sarananya (unit)	5	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	0	
		PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DIAWASI DAN DIPANTAU	**22%**	**67,920,913.00**

		Persentase Penertiban Izin Usaha (IUI) Kecil dan IUI Menengah	**28,21%**	**67,920,913.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (dokumen)	15	30,000,000.00
		Jumlah IKM yang diawasi pemenuhan komitmen perizinan (unit)	40	37,920,913.00
		PERSENTASE KETERSEDIAAN INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	**37,80%**	**135,000,000.00**
		Jumlah IKM yang teregistrasi dan mealpor pada aplikasi SIINAS	**10 IKM**	**135,000,000.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (kegiatan)	1	75,000,000.00
		Jumlah IKM yang terigistrasi dan melapor pada aplikasi SIINAS (unit)	10	
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)	1	60,000,000.00
	Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya (Bahan Pokok Penting)	**PERSENTASE PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**100%**	**734,359,216.00**
		Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**100%**	**704,359,216.00**
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	179,226,487.00
		Peresentase Laporan Harian (Hari Kerja) dalam Setahun (laporan)	100%	

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	10	525,132,729.00
		Jumlah kegiatan pasar murah (kegiatan)	10	
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	**100%**	**30,000,000.00**
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	6	30,000,000.00
		PERSENTASE ALAT UTTP YANG TERA ULANG	**55%**	**815,361,400.00**
		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal dan UTTP	**30%**	**815,361,400.00**
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP) (jenis)	45	560,657,400.00
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	50	134,704,000.00
		Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dokumen)	12	120,000,000.00
		PERSENTASE PRODUK LOKAL YANG DI PROMOSIKAN	**33,50%**	**157,466,000.00**
		Persentase Produk Lokal yang di Promosikan	**24.00%**	**157,466,000.00**
		Jumlah Produk Lokal yang di Promosikan (jenis)	12	157,466,000.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik dan berkualitas.

Prioritas Pembangunan nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu:

a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
b. Pembangunan Sektor Unggulan;
c. Pemerataan dan Kewilayahan;
d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
e. Pembangunan Ekonomi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional juga harus sejalan dengan tema dan priorotas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Morowali untuk tahun 2024 yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Insfrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Agar tercapai sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Morowali yaitu

sama dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan

diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Kabupaten Morowali diantaranya Meningkatnya Kontribusi Sektor-sektor Unggulan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali, yaitu:

a. Meningkatnya usaha di sektor perdagangan;
b. Meningkatnya usaha di sektor industri pengolahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung Misi II Kabupaten Morowali (RPD), tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali adalah Meningkatnya Kontribusi Sektor-Sektor Unggulan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan di atas kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata;
5. Menciptakan Tatanan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dari Misi yang telah dibuat untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Morowali selama 3 tahun ke depan, maka PD sebagai pelaksana Misi tersebut tentunya akan menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdangan dan Perindustrian Kabupten Morowali yang tertuang dalam rencana kerja adalah merupakan perwujudan dari isu-isu pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yang pengacu pada pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali dalam menunjang misi RPD. Bentuk program dan kegiatan tersebut tersaji dalam Tabel T-C.33 (Lampiran).

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat "Dinas Perdagangan dan Perindustrian" Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Periode / Tahun : 2024
Prakiraan Maju : 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**5,450,290,000.00**	PAD		**100%**	**5,517,000,000.00**
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**20,000,000.00**	PAD		**100.00%**	**20,000,000.00**
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	2	5,000,000.00	PAD		2	5,000,000.00
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan musrenbang yang diikuti (kegiatan)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	10	15,000,000.00	PAD		10	15,000,000.00
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Dagperin**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**4,150,000,000.00**	PAD		**100.00%**	**4,150,000,000.00**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	12	3,500,000,000.00	PAD		12	3,500,000,000.00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang dibayarkan honornya (orang)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	29	650,000,000.00	PAD		28	650,000,000.00
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase PNS Dinas Dagperin yang mengikuti Diklat**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**120,000,000.00**	PAD		**100.00%**	**120,000,000.00**

					Sub Kegiatan : Penddidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat (orang)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	2	60,000,000.00	PAD		2	60,000,000.00
					Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek (orang)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	3	60,000,000.00	PAD		2	60,000,000.00
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum Dinas Dagperin**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**300,790,000.00**	PAD		**100%**	**360,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman kegiatan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (dos)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	200	7,790,000.00	PAD		120	12,000,000.00
					Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	15	130,000,000.00	PAD		15	130,000,000.00
					Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (jenis)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	15	30,000,000.00	PAD		12	35,000,000.00
					Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggaandaan yang tersedia (lembar)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	85000	13,000,000.00	PAD		85000	13,000,000.00
					Sub Kegiatan : Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah (kegiatan)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	20	120,000,000.00	PAD		23	170,000,000.00
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**536,000,000.00**	PAD		**100%**	**536,500,000.00**
					Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	3	400,000,000.00	PAD		2	400,000,000.00

	Sub Kegiatan : Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	7	110,000,000.00	PAD		15	110,000,000.00
	Sub Kegiatan : Pengadaan mesin absensi dan kartu	Jumlah mesin absensi dan kartu yang diadakan (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	53	3,000,000.00	PAD		1	3,000,000.00
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	53	23,000,000.00	PAD		52	23,500,000.00
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**35,500,000.00**	PAD		**100%**	**37,500,000.00**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (lembar)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	1	34,000,000.00	PAD		1	36,000,000.00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	12	1,500,000.00	PAD		12	1,500,000.00
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Persentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang**	**Dinas Perdagangan dan**	**100%**	**288,000,000.00**	PAD		**100%**	**293,000,000.00**
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	20	8,000,000.00	PAD		8	8,000,000.00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	5	30,000,000.00	PAD		5	35,000,000.00
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	1	250,000,000.00	PAD		1	250,000,000.00

					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**Kabupaten Morowali**	**28%**	**130,000,000.00**	PAD		**30%**	**160,000,000.00**
					Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase Pelaku Usaha Toko Modern/Pusat Perbelanjaan/ Pasar Rakyat yang memperoleh**	**Kabupaten Morowali**	**25%**	**100,000,000.00**	PAD		**27%**	**120,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	**Kabupaten Morowali**	6	40,000,000.00	PAD		7	50,000,000.00
					Sub Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang, Fasilitasi Tanda Daftar Gudang yang dilaksankan (Pelaku Usaha)	**Kabupaten Morowali**	10	60,000,000.00	PAD		12	70,000,000.00
					Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Persentase Eksportir yang ditertibitkan Surat Keterangan Asal Barang**	**Kabupaten Morowali**	**22%**	**30,000,000.00**	PAD		**27%**	**40,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	10	30,000,000.00	PAD		10	40,000,000.00
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI**	**Kabupaten Morowali**	**30.00%**	**2,550,000,000.00**	PAD		**32,50%**	**2,600,000,000.00**

					Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase Pasar Yang ditingkatkan Sarana dan Pra Sarananya**	**Kabupaten Morowali**	**1.45%**	**2,000,000,000.00**	PAD		**2.55%**	**2,100,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (sarana/ pra sarana) (unit)	**Kabupaten Morowali**	12	2,000,000,000.00	PAD		12	2,100,000,000.00
					Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	**Persentase Pengelola Pasar yang di Bina**	**Kabupaten Morowali**	**20%**	**550,000,000.00**	PAD		**35%**	**500,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	10	550,000,000.00	PAD		10	500,000,000.00
						Jumlah Pengelola Sarana dan Distribusi Perdagangan yang di Bina (orang)		10		PAD		10	
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN**	**Kabupaten Morowali**	**35.00%**	**1,810,447,407.00**	PAD		**37,50%**	**1,870,000,000.00**
					Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**Kabupaten Morowali**	**28,21%**	**1,810,447,407.00**	PAD		**29.93%**	**1,870,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	1	25,000,000.00	PAD		3	30,000,000.00
						Jumlah regulasi yang dikeluarkan (regulasi)		1				1	
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	0	1,000,000,000.00	PAD		3	1,000,000,000.00
						Jumlah kegiatan pelatihan (kegiatan)		3				4	
						Jumlah Pelaku IKM yang dilatih (orang)		40				80	

					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	0	200,000,000.00	PAD		1	200,000,000.00
						Jumlah Sarana dan Pra Sarana Industri yang dibangun (unit)		1				1	
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	0	585,447,407.00	PAD		2	600,000,000.00
						Jumlah Produk IKM yang di Promosi Produknya (jenis)		45				75	
						Jumlah IKM yang fasilitasi Sarana dan Pra Sarananya (unit)		5				10	
					Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	0	-	PAD		1	40,000,000.00
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DIAWASI DAN DIPANTAU**	**Kabupaten Morowali**	**22%**	**67,920,913.00**	PAD		**24%**	**81,000,000.00**
					Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Penertiban Izin Usaha (IUI) Kecil dan IUI Menengah**	**Kabupaten Morowali**	**28,21%**	**67,920,913.00**	PAD		**29,93%**	**81,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	15	30,000,000.00	PAD		25	40,000,000.00

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah IKM yang diawasi pemenuhan komitmen perizinan (unit)	**Kabupaten Morowali**	40	37,920,913.00	PAD		35	41,000,000.00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**PERSENTASE KETERSEDIAAN INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI**	**Kabupaten Morowali**	**37,80%**	**135,000,000.00**	PAD		**38,60%**	**157,000,000.00**
	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah IKM yang teregistrasi dan mealpor pada aplikasi SIINAS**	**Kabupaten Morowali**	**10 IKM**	**135,000,000.00**	PAD		**15 IKM**	**157,000,000.00**
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	**Kabupaten Morowali**	1	75,000,000.00	PAD		2	77,000,000.00
		Jumlah IKM yang terigistrasi dan melapor pada aplikasi SIINAS (unit)		10				15	
	Sub Kegiatan : Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	1	60,000,000.00	PAD		2	80,000,000.00

					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**PERSENTASE PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**734,359,216.00**	DAU		**100%**	**830,000,000.00**
					Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**704,359,216.00**	PAD		**100%**	**800,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1	**Kabupaten Morowali**	12	179,226,487.00	PAD		12	200,000,000.00
						Peresentase Laporan Harian (Hari Kerja) dalam Setahun		100%				100%	
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	**Kabupaten Morowali**	10	525,132,729.00	PAD		10	600,000,000.00
						Jumlah kegiatan pasar murah (kegiatan)		10				10	
					Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**30,000,000.00**	PAD		**100%**	**30,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	**Kabupaten Morowali**	6	30,000,000.00	PAD		6	30,000,000.00
					PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**PERSENTASE ALAT UTTP YANG TERA ULANG**	**Kabupaten Morowali**	**55%**	**815,361,400.00**	PAD		**60%**	**1,620,000,000.00**
					Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal dan UTTP**	**Kabupaten Morowali**	**30%**	**815,361,400.00**	PAD		**45%**	**1,620,000,000.00**

					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP) (jenis)	**Kabupaten Morowali**	45	560,657,400.00	PAD		100	1,200,000,000.00
					Sub Kegiatan : Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	**Kabupaten Morowali**	50	134,704,000.00	PAD		100	300,000,000.00
					Sub Kegiatan : Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dokumen)	**Kabupaten Morowali**	12	120,000,000.00	PAD		12	120,000,000.00
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**PERSENTASE PRODUK LOKAL YANG DI PROMOSIKAN**	**Kabupaten Morowali**	**33,50%**	**157,466,000.00**	PAD		**34%**	**160,000,000.00**
					Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase Produk Lokal yang di Promosikan**	**Kabupaten Morowali**	**24.00%**	**157,466,000.00**	PAD		**50%**	**160,000,000.00**
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Lokal yang di Promosikan (jenis)	**Kabupaten Morowali**	12	157,466,000.00	PAD		15	160,000,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya akan digunakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Rumusan rencana program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2023 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang perindustrian dan perdagangan, reviuw atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah maupun daerah. Rencana kerja dan pendanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali tahun anggaran 2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**PERSENTASE URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**5,450,290,000.00**	PAD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**20,000,000.00**	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	2	5,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan musrenbang yang diikuti (kegiatan)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	10	15,000,000.00	PAD	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas Dagperin**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**4,150,000,000.00**	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	12	3,500,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang dibayarkan honornya (orang)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	29	650,000,000.00	PAD	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase PNS Dinas Dagperin yang mengikuti Diklat**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**120,000,000.00**	PAD	
	Sub Kegiatan : Penddidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat (orang)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	2	60,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek (orang)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	3	60,000,000.00	PAD	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Realisasi Target Administrasi Umum Dinas Dagperin**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**300,790,000.00**	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman kegiatan	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (dos)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	200	7,790,000.00	PAD	

	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	15	130,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (jenis)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	15	30,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggaandaan yang tersedia (lembar)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	85000	13,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Luar dan Dalam Daerah (kegiatan)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	20	120,000,000.00	PAD	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Target Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**536,000,000.00**	PAD	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	3	400,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	7	110,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Pengadaan mesin absensi dan kartu	Jumlah mesin absensi dan kartu yang diadakan (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	53	3,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya (buah)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	53	23,000,000.00	PAD	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Target Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**35,500,000.00**	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran Rekening (lembar)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	1	34,000,000.00	PAD	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Kantor (bulan)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	12	1,500,000.00	PAD	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Capaian Target Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintah**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**100%**	**288,000,000.00**	PAD	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	20	8,000,000.00	PAD	

					Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa Kendaraan Dinas yang di Pelihara	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	5	30,000,000.00	PAD	
					Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	1	250,000,000.00	PAD	
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat**	**Kabupaten Morowali**	**28%**	**130,000,000.00**	PAD	
					Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase Pelaku Usaha Toko Modern/Pusat Perbelanjaan/ Pasar Rakyat yang memperoleh Rekomendasi Perizinan Usaha**	**Kabupaten Morowali**	**25%**	**100,000,000.00**	PAD	
					Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Toko/Swalayan)	**Kabupaten Morowali**	6	40,000,000.00	PAD	
					Sub Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang, Fasilitasi Tanda Daftar Gudang yang dilaksankan (Pelaku Usaha)	**Kabupaten Morowali**	10	60,000,000.00	PAD	
					Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Persentase Eksportir yang ditertibitkan Surat Keterangan Asal Barang**	**Kabupaten Morowali**	**22%**	**30,000,000.00**	PAD	
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	10	30,000,000.00	PAD	
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI**	**Kabupaten Morowali**	**30.00%**	**2,550,000,000.00**	PAD	
					Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase Pasar Yang ditingkatkan Sarana dan Pra Sarananya**	**Kabupaten Morowali**	**1.45%**	**2,000,000,000.00**	PAD	
					Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (sarana/ pra sarana) (unit)	**Kabupaten Morowali**	12	2,000,000,000.00	PAD	
					Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di	**Persentase Pengelola Pasar yang di Bina**	**Kabupaten Morowali**	**20%**	**550,000,000.00**	PAD	

| | | |

					Sub Kegiatan : Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)	**Kabupaten Morowali**	1	60,000,000.00	PAD	
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**PERSENTASE PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**734,359,216.00**	DAU	
					Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**704,359,216.00**	PAD	
					Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	**Kabupaten Morowali**	12	179,226,487.00	PAD	
						Peresentase Laporan Harian (Hari Kerja) dalam Setahun (laporan)		100%			
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	**Kabupaten Morowali**	10	525,132,729.00	PAD	
						Jumlah kegiatan pasar murah (kegiatan)		10			
					Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**30,000,000.00**	PAD	
					Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	**Kabupaten Morowali**	6	30,000,000.00	PAD	
					PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**PERSENTASE ALAT UTTP YANG TERA ULANG**	**Kabupaten Morowali**	**55%**	**815,361,400.00**	PAD	
					Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal dan UTTP**	**Kabupaten Morowali**	**30%**	**815,361,400.00**	PAD	
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP) (jenis)	**Kabupaten Morowali**	45	560,657,400.00	PAD	
					Sub Kegiatan : Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	**Kabupaten Morowali**	50	134,704,000.00	PAD	
					Sub Kegiatan : Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dokumen)	**Kabupaten Morowali**	12	120,000,000.00	PAD	
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**PERSENTASE PRODUK LOKAL YANG DI PROMOSIKAN**	**Kabupaten Morowali**	**33,50%**	**157,466,000.00**	PAD	
					Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	**Persentase Produk Lokal yang di Promosikan**	**Kabupaten Morowali**	**24.00%**	**157,466,000.00**	PAD	
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Lokal yang di Promosikan (jenis)	**Kabupaten Morowali**	12	157,466,000.00	PAD	

BAB V
PENUTUP

Pembinaan dan pengembangan Perdagangan dan Perindustrian sangat kompleks karena jumlahnya yang besar dan tersebar di seluruh wilayah dengan tingkat kemajuan yang beraneka ragam dan dihadapkan pada masalah dalam berbagai aspek. Untuk mensukseskan pembinaan dan pengembangan perlu difokuskan pada jejaring kerjasama yang saling mendukung antar instansi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat Perdagangan dan Perindustrian harus aktif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan usaha yang ada. Reorientasi pembinaan dengan pendekatan sosial ke arah prinsip bisnis dan kemandirian, lembaga-lembaga pembina baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat perlu meningkatkan profesionalisme dan kemandirian. Dalam kenyataannya sektor Perdagangan dan Perindustrian memiliki banyak peluang untuk berkembang karena memiliki banyak potensi yang mendukung, baik dari sisi SDM, sumberdaya alam maupun produk-produk lokal yang memiliki daya saing dan juga keunggulan komparatif. Namun potensi tersebut belum dapat digali dan dipromosikan secara optimal serta belum difasilitasi secara maksimal oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan sarana-prasarana dan juga dana, serta belum didukung jiwa *entrepreneurship* masyarakat. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu antara lain melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan serta bantuan usaha. Program pembinaan dan pengembangan Perdagangan dan Perindustrian ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali tahun 2024-2026, yang berfungsi untuk memberikan gambaran ke depan tentang arah pembangunan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Morowali dalam periode satu tahun.

Rencana Kerja

(RENJA) 2024

BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat-nya sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja ini disusun untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, Program yang hendak dicapai Tahun Anggaran 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menuju *Good Governance.* Secara Konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Kerja bertujuan untuk menterjemahkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Jangka 1 Tahun, yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali. Adapun pedoman yang dipakai adalah Renstra BPPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Rencana Kerja ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi dalam bentuk program dan Kegiatan beserta kerangka pendanaannya pada tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Bungku, 02 Januari 2024

Kepala Badan



Drs. HARSONO LAMUSA

NIP. 196405021990031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPPD PADA TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BPPD Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPD .....

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPD...14

2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja BPPD 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 21

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencan Kerja BPP 26

3.3 Program dan Kegiatan 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 31

BAB V PENUTUP 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali (RPD Kabupaten Morowali) Tahun 2024 – 2026. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota sebagai pemerintahan daerah merupakan bagian dari daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara

adil dan selaras. RPD tersebut memuat evaluasi dan capaian kinerja tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RPD merupakan dasar / pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Undang-undang seperti dijelaskan di atas memberikan peluang yang seluas- luasnya bagi Kabupaten Morowali untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembangunan untuk mewujudkan Terwujudnya Masyarakat Morowali Yang Sejahtera Bersama. Pembangunan Kabupaten Morowali dengan menggunakan prinsip- prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Morowali secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah mempertemukan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip dasar agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Melibatkan semua pelaku pembangunan;
2. Mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memaksimumkan penggunaan sumber daya lokal;
4. Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang baik pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan KabupatenMorowali dan penjabaran tahun Pertama dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Morowali.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 831);
31. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Ononom baru (DOB);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
40. Peraturan Bupati Morowali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah;
41. Peraturan Bupati Morowali Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disusun sebagai upaya untuk membuat pedoman dan arahan penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan bidang keuangan untuk periode 1 tahun berdasarkan rencana strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Morowali sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai perumusan dari Renstra BPPD dan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan program dan kegiatan yang direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai bagian:

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3 Program dan Kegiatan..

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH :

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah "Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali".

BAB V PENUTUP,

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasar dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 yang berorientasi pada Urusan Wajib Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, Tahun 2023 rata-rata adalah 121,31 %.

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daeah Kabupaten Morowali memperoleh dana sebesar Rp. ***Rp. 29.374.626.866,00*** yang digunakan untuk membiayai dua program yang dilaksanakan di BPPD, yakni Program penunnjang urusan pemerintah daerah dan program pengelolaan pendapatan daerah. Dari anggaran tersebut diatas dapat direalisasikan sebesar **95,96 %** atau sebesar Rp. ***28.189.209.137,00***.

Rekapitulasi hasil Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Perangkat daerah dan pencapaian Perangkat daerah sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Badan Pengelolaan Penapatan Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Rasio Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**24.947.455.867**	**100**	**24.429.502.308**	**100%**	**97,92%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**22.111.054.522**	**100**	**21.913.275.094**	**100%**	**99,11%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/ bulan*	*30*	*20.365.214.522*	*30*	*20.179.387.994*	*100%*	*99,09%*
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya*	*Orang*	*65*	*1.745.840.000*	*65*	*1.733.887.100*	*100%*	*99,32%*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persetase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	***165.510.000***	**100**	***40.677.229***	**100%**	**24,58%**

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*%*	*100*	*165.510.000*	*100*	*40.677.229*	*100%*	*24,58%*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	***2.518.296.165***	**100**	**2.349.911.574**	**100%**	**93,31%**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di butuhkan*	*%*	*100*	*686.153.460*	*100*	*649.693.400*	*100%*	*94,69%*
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan*	*%*	*100*	*418.739.120*	*100*	*336.335.395*	*100%*	*80,32%*
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan*	*%*	*100*	*332.040.585*	*100*	*327.340.850*	*100%*	*98,58%*
		Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan*	*%*	*100*	*1.081.363.000*	*100*	*1.036.541.929*	*100%*	*95,86%*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	***152.595.180***	**100**	**125.638.411**	**100%**	**82,33%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*%*	*100*	*51.485.680*	*100*	*51.392.276*	*100%*	*99,82%*

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*%*	*100*	*101.109.500*	*100*	*74.246.135*	*100%*	*73,43%*
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN			**Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah**	**%**	**95**	**4.427.170.999**	**137,48**	**3.759.706.830**	**144,72%**	**84,92%**
			Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total PAD	**%**	**85**		**85,94**		**101,10%**	
			Persentase potensi PAD yang ditetapkan sebagai objek penerimaan daerah	**%**	**80**		**80**		**100%**	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		**Presentase Realisasi Pajak Daerah**	**%**	**100**	***4.427.170.999***	***160,85***	**3.759.706.830**	***160,85%***	**84,92%**
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*1*	*130.140.249*	*1*	*59.250.000*	*100%*	*45,53%*
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	*Laporan*	*1*	*98.079.000*	*1*	*40.705.793*	*100%*	*41,50%*
		Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	*Unit*	*4*	*3.203.588.750*	*4*	*2.751.080.420*	*100%*	*85,87%*

		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	*Laporan*	*9*	*260.000.000*	*9*	*258.040.114*	*100%*	*99,25%*
		Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaopran Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Laporan*	*1*	*54.000.000*			*100%*	*0,00%*
		Penilaian Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	*Objek*	*80000*	*258.593.000*	*80000*	*243.922.852*	*100%*	*94,33%*
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*9*	*84.000.000*	*9*	*83.805.500*	*100%*	*99,77%*
		Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	*Data*	*9*	*20.520.000*	*9*	*20.278.000*	*100%*	*98,82%*
		Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*9*	*168.600.000*	*9*	*168.582.950*	*100%*	*99,99%*
		Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*	*Laporan*	*1*	*57.000.000*	*1*	*56.982.550*	*100%*	*99,97%*

		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Dokumen*	*9*	*34.890.000*	*9*	*33.727.000*	*100%*	*96,67%*
		Pembinaan dan Pegawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Laporan*	*1*	*57.760.000*	*1*	*43.331.650*	*100%*	*75,02%*
						29.374.626.866		**28.189.209.138**		**95,96%**

Tabel 2.2

Tabel Realisai pelaksanaan Anggaran BPPD Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Penetapan 2023	Pagu Pergeseran 2023	Bertambah / Berkurang	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
	TOTAL	***22.497.997.767***	***29.374.626.866***	***6.876.629.099***	***28.189.209.137***	**95,96%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**18.300.657.017**	**24.947.455.867**	**6.646.798.850**	**24.429.502.308**	**97,92%**
01.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.344.338.162**	**22.111.054.522**	**5.766.716.360**	**21.913.275.094**	**99,11%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (	*14.663.498.162*	*20.365.214.522*	*5.701.716.360*	*20.179.387.994*	*99,09%*
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*1.680.840.000*	*1.745.840.000*	*65.000.000*	*1.733.887.100*	*99,32%*
01.02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***165.510.000***	***165.510.000***	**-**	***40.677.229***	**24,58%**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*165.510.000*	*165.510.000*	*-*	*40.677.229*	*24,58%*
01.03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.643.093.675**	**2.518.296.165**	**875.202.490**	**2.349.911.574**	**93,31%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*90.039.750*	*686.153.460*	*596.113.710*	*649.693.400*	*94,69%*

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*293.741.440*	*418.739.120*	*124.997.680*	*336.335.395*	*80,32%*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*280.061.235*	*332.040.585*	*51.979.350*	*327.340.850*	*98,58%*
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*979.251.250*	*1.081.363.000*	*102.111.750*	*1.036.541.929*	*95,86%*
01.04	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.715.180**	**152.595.180**	**4.880.000**	**125.638.411**	**82,33%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*51.485.680*	*51.485.680*	*-*	*51.392.276*	*99,82%*
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*96.229.500*	*101.109.500*	*4.880.000*	*74.246.135*	*73,43%*
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***4.197.340.750***	**4.427.170.999**	**229.830.249**	**3.759.706.829**	**84,92%**
02.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**4.197.340.750**	**4.427.170.999**	**229.830.249**	**3.759.706.829**	**84,92%**
02.01.02	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*-*	*130.140.249*	*130.140.249*	*59.250.000*	*45,53%*
02.01.03	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	*161.535.000*	*98.079.000*	*- 63.456.000*	*40.705.793*	*41,50%*
02.01.04	*Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Pajak Daerah*	*3.036.992.750*	*3.203.588.750*	*166.596.000*	*2.751.080.420*	*85,87%*
02.01.05	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*199.200.000*	*260.000.000*	*60.800.000*	*258.040.114*	*99,25%*
02.01.06	*Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaopran Basis Data Pajak Daerah*	*179.000.000*	*54.000.000*	*- 125.000.000*	*-*	*0,00%*

02.01.07	*Penilaian Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)*	*215.253.000*	*258.593.000*	*43.340.000*	*243.922.852*	*94,33%*
02.01.08	*Penetapan Wajib Pajak Daerah*	*55.800.000*	*84.000.000*	*28.200.000*	*83.805.500*	*99,77%*
02.01.10	*Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah*	*20.520.000*	*20.520.000*	*-*	*20.278.000*	*98,82%*
02.01.11	*Penagihan Pajak Daerah*	*118.860.000*	*168.600.000*	*49.740.000*	*168.582.950*	*99,99%*
02.01.12	*Penyelesaian Keberatan Pajak daerah*	*57.000.000*	*57.000.000*	*-*	*56.982.550*	*99,97%*
02.01.13	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*85.500.000*	*34.890.000*	*- 50.610.000*	*33.727.000*	*96,67%*
02.01.14	*Pembinaan dan Pegawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*67.680.000*	*57.760.000*	*- 9.920.000*	*43.331.650*	*75,02%*

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali diukur sebagaimana yang telah ditetapkan pada Indikator Sasaran Kinerja Kunci yaitu Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disajikan dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Morowali

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	**KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**																		
	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan		X		19,04	23,99	23,46	24,5	25	19,04	23,99	23,46	26,8	30,66	100	100	100	109,39	122,64

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Isu terkait kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan yakni dengan meningkatkan pelayanan dan pembinaan, konsultasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan Daerah. Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Pendapatan ditetapkan dengan program kerja Pengelolaan Keuangan Tahunan, dan untuk tahun 2023 direncanakan 2 Fokus yang terdiri dari:

1. Optimalisasi Kinerja BPPD
2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan Kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pertumbuhan Rasio Pendapatan Asli Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Morowali	Belum Optimalnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belum Optimalnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

		Belum Optimlanya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Belum Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4. Review terhadap rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun perbandingan antara Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Morowali

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**	**19.740.489.594**	**ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100%**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	**16.716.244.744**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		*Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya*	*31*	*15.094.444.744*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS*		*Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya*	*31*		
	Penyediaan Administrasi		*Jumlah Tenaga Kontrak/PHL*	*67*	1.621.800.000	*Penyediaan Administrasi*		*Jumlah Tenaga Kontrak/PHL*	*67*		

	Pelaksanaan Tugas ASN		*yang dibayarkan gajinya*			*Pelaksanaan Tugas ASN*		*yang dibayarkan gajinya*			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persetase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100%**	***45.000.000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persetase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100%**		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		*jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*10*	*45.000.000*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*		*jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*10*		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.181.281.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*100%*	*200.000.000*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		*Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*100%*		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		*Ketersediaan Bahan Logistik Kantor*	*100%*	*250.000.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*		*Ketersediaan Bahan Logistik Kantor*	*100%*		
	Penyediaan Barang Cetakan		*ketersdiaan Barang Cetakan*	*100%*	400.000.000	*Penyediaan Barang Cetakan*		*ketersdiaan Barang Cetakan*	*100%*		

	dan Penggandaan		*dan Penggandaan*			*dan Penggandaan*		*dan Penggandaan*			
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*100%*	331.281.000	*Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*100%*		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.797.963.850**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*100%*	*52.500.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*		*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*100%*		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD**	**0,8**	1.745.463.850	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD**	**0,8**		
		BPPD	**Presentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**100%**			BPPD	**Presentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**100%**		
		BPPD	**Presentase Jenis Pajak Daerah yang dikelola**	**81,82%**			BPPD	**Presentase Jenis Pajak Daerah yang dikelola**	**81,82%**		

	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BPPD	**Presentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola BPPD**	**100%**	1.745.463.850,00	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	BPPD	**Presentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola BPPD**	**100%**		
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPPD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak*	*9*	34.375.000	*Perencanaan pengelolaan pajak daerah*	BPPD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak*	*9*		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BPPD	*Jumlah Regulasi Yang dibuat tentang pajak dan retribusi daerah*	*5*	112.940.950	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.*	BPPD	*Jumlah Regulasi Yang dibuat tentang pajak dan retribusi daerah*	*5*		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah Regulasi Pajak dan Retribusi yang terssosialisasikan*	*5*	74.585.000	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah Regulasi Pajak dan Retribusi yang terssosialisasikan*	*5*		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah alat Perekam Pajak yang terpasang*	*30*	300.000.000	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah alat Perekam Pajak yang terpasang*	*35*		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah Data Potensi Pajak Yang teridetifikasi*	*10*	200.000.000	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah Data Potensi Pajak Yang teridetifikasi*	*9*		
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	BPPD	*Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara*	*3*	150.000.000	*Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan*	BPPD	*Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara*	*3*		

	Basis Data Pajak Daerah					*Basis Data Pajak Daerah*					
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPPD	*Jumlah potensi PBB P2 yang terdata*	*78100*	200.000.000	*Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*	BPPD	*Jumlah potensi PBB P2 yang terdata*	*80000*		
		BPPD	*Jumlah Potensi BPHTB yang ditetapkan*	*1.700*			BPPD	*Jumlah Potensi BPHTB yang ditetapkan*	*2.000*		
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah potensi pajak yang menjadi ketetapan*	*6.870*	56.320.000	*Penetapan Wajib Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah potensi pajak yang menjadi ketetapan*	*7.012*		
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah Jenis pajak yang terlayani*	*10*	150.000.000	*Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah Jenis pajak yang terlayani*	*10*		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah Laporan penerimaan Pajak*	*10*	27.360.000	*Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah Laporan penerimaan Pajak*	*10*		
	Penagihan Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah Pajak daerah*	########	100.000.000	*Penagihan Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah Pajak daerah*	#######		

	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPPD	*Presentase keberatan pajak yang terselesaikan*	*100%*	65.480.000	*Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*	BPPD	*Presentase keberatan pajak yang terselesaikan*	*100%*		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*9,00*	221.237.800	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	BPPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	*9,00*		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*12*	53.165.100	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	BPPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*12*		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang diminta dalam bagian ini, yakni penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan OPD.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2024-2025 ditetapkan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, maka Indikator Kinerja yang dapat dijadikan ukuran keberhasikan organisasi ini adalah pencapaian target penerimaan daerah dari Pajak Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra), tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah:

3.2.1. Tujuan:

1. Meningkatkan Invwstasi dan Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik

3.2.2. Sasaran:

1. Meningkatnya Rasio Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu anggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebanyak 2 (Dua) Program, 5 (Kegiatan) Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan .

Adapun program dan kegiatan beserta kebutuhan dananya adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
   - ***a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
     a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - ***b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
     a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - ***c. Administrasi Umum Perangkat Daerah***
     a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     d) Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD
   - ***d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
     a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
     b) Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
   a. ***Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah***
     a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
     b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
     c) Penyuluhan dana Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
e) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah
f) Pengolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
g) Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
j) Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah
k) Penagihan Pajak Daerah
l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendaan perangkat daerah disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan periode Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali

Tahun 2024

Kode	Program Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Cacatan Penting
				Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)		
I	*II*	*III*	*IV*	*V*		*VI*	*VII*
05.02.01	***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Persentase peningkatan potensi pajak***		***5,21***	***4.328.340.602***		
		Persentase objek pajak yang ditetapkan berdasarkan potensi pajak		***100***			
		Persentase objek pajak yang tertagih		***100***			
		Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih		***91,50***			
5.02.04.2.01	***Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Presentase Realisasi Pajak Daerah***		***100***	***4.328.340.602***		
5.02.04.02.1.02	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*		*9*	*127.846.488*		
5.02.04.02.1.03	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*			*178.000.000*		

5.02.04.02.1.04	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*		*5*	*2.449.647.614*		
5.02.04.02.1.05	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*		*12*	*365.280.000*		
5.02.04.02.1.06	*Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*		*9*	*250.000.000*		
5.02.04.02.1.07	*Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*		*76.000*	*346.106.500*		
5.02.04.02.1.08	*Penetapan Wajib Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*		*9*	*177.120.000*		
5.02.04.02.1.09	*Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*		*9*	-		
5.02.04.02.1.10	*Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah*	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*		*9*	*27.360.000*		
5.02.04.02.1.11	*Penagihan Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*		*9*	201.600.000		

5.02.04.02.1.12	*Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*		*9*	*68.400.000*		
5.02.04.02.1.13	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*		*9*	*58.500.000*		
5.02.04.02.1.14	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*		*12*	78.480.000		
05.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan**		**100**	***28.956.951.657***		
05.02.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***100***	***27.040.244.300,24***		
05.02.01.2.02	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS*	*Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya*		*31*	*27.197.071.657*		
05.02.01.2.02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Tenaga Kontrak/PHL yang dibayarkan gajinya*		*65*	*1.739.880.000*		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun*		*1*	*20.000.000*		
05.02.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persetase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah***		***100***	***104.700.000***		

05.02.01.2.05	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*		*10*	*104.700.000*		
05.02.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah***		***100***	***2.600.757.438***		
05.02.01.2.06	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		*100*	*743.421.450*		
05.02.01.2.06	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Ketersediaan Bahan Logistik Kantor*		*100*	*330.993.298*		
05.02.01.2.06	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Ketersdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan*		*100*	*319.604.690*		
05.02.01.2.06	*Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*100*	*1.206.738.000*		
05.02.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Ketersediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah***		***100***	***238.909.000***		
05.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*		*100*	*105.879.000*		
05.02.01.2.08	*Penyeediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		*100*	*133.030.000*		
					36.229.658.697		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan telah berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dam kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.
2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas-tugas terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walau dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan.
4. Perlunya peningkatan wawasan Pengelola Pendapatan Daerah dalam upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah.
5. Akan melakukan pengendalian terhadap Bentuk Pertanggungjwaban program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 BPPD Daerah Kabupaten Morowali ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Bungku, 02 Januari 2024

Kepala Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Morowali

Drs. HARSONO LAMUSA

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640502199000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

RENCANA KERJA

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Keraja (Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran PERANGKAT DAERAH. Kami sangat mengharapkan masukan maupun saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat serta dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini.

Bungku, 13 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN MOROWALI



ALWAN HI. ABUBAKAR, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199503 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……. I

Daftar Isi …… ii

Daftar Tabel ……..... iii

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum ……... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……..... 6

1.4 Sistematika Penulisan ……..... 7

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra ……..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……..... 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …… 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …… 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 30

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……... 36

3.1 Tujuan dan Sasaran ...…… 36

3.2 Program dan Kegiatan ...…… 37

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ……. 46

BAB IV Penutup

DAFTAR TABEL

			Halaman
-	Table 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……...	9
-	Table 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ….....	16
-	Table 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……...	21
-	Table 2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……...	30
-	Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran ……..	37
-	Table 3.3	Program dan Kegiatan ……...	38
-	Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan …….	46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada setiap perangkat daerah membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) PERANGKAT DAERAH, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra PERANGKAT DAERAH dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja PERANGKAT DAERAH juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PERANGKAT DAERAH sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu Renja PERANGKAT DAERAH juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.

Dari uraian arti strategis mengenai Renja di atas, maka disusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang secara substansial merupakan terjemahan dari tujuan, sasaran dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PERANGKAT DAERAH serta juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai tahun 2022 yang telah dilaksanakan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali sebagai Bagian terintegrasi dari Pemerintah Daerah menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dalam sebuah Rencana Kerja, Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengemukakan bahwa Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana fungsi Renja PERANGKAT DAERAH menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam Program dan Kegiatan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PERANGKAT DAERAH secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA PERANGKAT DAERAH serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali adalah:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Morowali Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali ini adalah menyediakan tolak ukur pelaksanaan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2024, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Daerah Kabupaten Morowali.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 kedalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAH tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MOROWALI

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali

Rencana kerja merupakan rencana tahunan dari rencana strategis, adapun maksud dari penyusunan rencana kerja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam pelaporan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja tahun 2021, pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukan belanja pegawai, untuk belanja langsung yang terdiri belanja langsung Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan (Program). Sesuai RPJMD Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018–2023, Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali menyelenggarakan 3 (tiga) program pembangunan,setiap program disusun kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali sebagai satuan kerja perangkat daerah Daerah Kabupaten Morowali.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja, Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tabel 2.1 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2023.

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2023	
										Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	03	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Presentase Capaian Kinerja BKPSDMD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**3,00**	**3**
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	31	39	32	32	100%	31	102	3
5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah PHL yang dibayarkan gajinya	27	19	19	19	100%	27	65	2
5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi Kepegawaian perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00	3
5	03	01	2	06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah OPD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	4	2	50%	2	6	3
5	03	01	2	07	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	150	0	150	150	100%	150	300	2

5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00	3
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	100%	12	36	3
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan Penggandaan Tersedia	12	12	12	12	100%	12	36	3
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12	12	12	12	100%	12	36	3
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi konsultasi SKPD	12	-	-	-	-	12	-	-
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	100%	100%	100%	0	1,00	1
5	03	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	1	0	1	1	100%	1	2	2
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00	3
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12	12	12	12	100%	12	36	3
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan keberishan lingkungan kantor	12	12	12	12	100%	12	36	3
5	03	01	2	08	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00	3

5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	2	2	2	2	100%	2	6	3
5	03	01	2	08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30	20	20	15	75%	30	65	2
5	03	02				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**10%**	**6%**	**6%**	**6%**	**100%**	**6%**	**0,18**	**2**
							Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**65%**	**60%**	**64%**	**64%**	**100%**	**65%**	**1,90**	**3**
							Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**47%**	**32%**	**46%**	**46%**	**100%**	**47%**	**1,25**	**3**
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	12	0	12	12	100%	12	24	2
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah formasi penerimaan CPNS dan PPPK	250	770	250	1367	547%	250	2387	10
							Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional	164	110	164	84	51%	164	358	2

5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang lulus CPNS dan PPPK	250	210	110	108	98%	250	568	2
							Jumlah CPNS yang difasilitasi penetapan NIP	250	210	108	85	79%	250	545	2
5	03	02	2	01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian	Jumlah yang terlayani pengurusan taspen, karpeg, karis/karsu	120	210	110	120	109%	120	450	4
							Jumlah yang akan memasuki batas usia pensiun	45	32	50	82	164%	45	159	4
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem In Kepegawaian	Jumlah yang di mutahirkan datanya	3500	3060	3240	3240	100%	3500	9800	3
							Persentase yang difasilitasi dari kelembagaan KORPRI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00	3
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi	Jumlah Mutasi dan Promosi yang diproses	200	211	211	96	45%	200	507	3
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi	Jumlah yang mutasi, promosi, pindah keluar masuk yang di proses	200	133	200	75	38%	200	408	2
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah yang pindah golongan	700	674	700	795	114%	700	2169	3
5	03	02	2	02		Pengembangan Kompetensi	Presentase yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur	90%	90%	90%	90%	100%	90%	2,70	3
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur	68	48	68	108	159%	68	224	3

5	03	02	2	02	03	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan	Jumlah yang mengikuti UPI dan UD	75	90	70	129	184%	75	294	4
5	03	02	2	02	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Jumlah yang mengikuti tugas belajar	5	1	3	3	100%	5	9	2
5	03	02	2	02	04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Disiplin	100%	100%	100%	99%	99%	100%	2,99	3
5	03	02	2	02	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	588	588	588	588	100%	588	1764	3
5	03	02	2	02	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Aparatur yang menerima penghargaan	75	70	75	77	103%	75	222	3
5	03	02	2	02	07	Pembinaan Disiplin	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan	15	9	15	8	53%	15	32	2
5	03	02	2	02	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	30	45	45	49	109%	30	124	4
5	04	02				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**82%**	65%	74%	74%	100%	**82%**	2,21	3
							Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	**67%**	57%	67%	67%	100%	**67%**	1,91	3
							Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	**36%**	26%	36%	36%	100%	**36%**	0,98	3

5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase yang mengikuti diklat	100%	114%	100%	34,85%	35%	100%	2,49	2
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Kepemimpinan Tingkat II	3	6	3	0	0%	3	9	3
							Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Administator	15	30	15	30	200%	15	75	5
							Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Pengawas	40	40	40	30	75%	40	110	3
							Jumlah yang Mengikuti Diklat Fungsional	20	0	0	0		20	20	1
							Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	250	110	110	84	76%	250	444	2
							Jumlah pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT	26	3	26	41	158%	26	70	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Morowali

Kajian pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Morowali kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali. Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pegawai sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali.

Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program- program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel 2.2. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan (n-2) Analisis
				(n-2) 2022	(n-1) 2023	(n) 2024	(n+1) 2025	(n-2) 2022	(n-1) 2023	(n) 2024	(n+1) 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan			31 orang	31 Orang	31 orang	31 Orang	31 orang	31 Orang	31 orang	31 orang	
2	Jumlah PHL yang dibayarkan gajinya			27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	
3	Jumlah ASN OPD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	
4	Jumlah yang mengikuti sosialisasi			-	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	
5	Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
6	Jumlah barang cetak dan Penggandaan Tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
7	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
8	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi konsultasi SKPD			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
9	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang di adakan			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	
10	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan			1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	
11	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

12	Cakupan keberishan lingkungan kantor			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
13	Jumlah jasa pemeliharaaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
14	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Unit)			5 unit	10 Unit	5 unit	10 Unit	10 unit	10 Unit	10 unit	10 unit	
15	Jumlah formasi penerimaan CPNS dan PPPK		✓	250 formasi	350 Formasi	250 formasi	250 formasi	770 formasi	350 Formasi	250 formasi	250 formasi	
16	Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional		✓	289 orang	101 Orang	289 orang	164 orang	289 orang	101 Orang	289 orang	164 orang	
17	Jumlah Peserta yang lulus CPNS dan PPPK			350 orang	350 Formasi	350 Formasi	350 Formasi	1367 orang	350 Formasi	350 orang	350 orang	
18	Jumlah CPNS yang difasilitasi penetapan NIP			84 orang	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	
19	Jumlah ASN yang terlayani pengurusan taspen, karpeg, karis/karsu			120 orang	110 orang	110 orang	110 orang	110 kartu	110 orang	110 kartu	110 orang	
20	Jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun			50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	82 orang	50 orang	50 orang	50 orang	
21	Jumlah ASN yang di mutahirkan datanya		✓	3249 Orang	3500 orang	3500 orang	3500 orang	3249 Orang	3500 orang	3500 orang	3500 orang	
22	Persentase ASN yang difasilitasi dari kelembagaan KORPRI			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Jumlah ASN yang mutasi, promosi, pindah keluar masuk yang di proses		✓	200 orang	211 orang	200 orang	220 orang	200 orang	211 orang	200 orang	230 orang	
24	Jumlah ASN yang pindah golongan			500 orang	850 orang	500 orang	750 orang	500 orang	850 orang	500 orang	500 orang	
25	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur		✓	20 orang	60 ASN	20 orang	20 Orang	20 Orang	60 ASN	20 Orang	20 orang	

26	Jumlah ASN yang mengikuti UPI dan UD		✓	50 orang	75 orang	50 orang	50 orang	50 orang	75 orang	50 orang	50 orang	
27	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar		✓	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	
28	Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja			558 Dokumen	558 Dokumen	558 Dokumen	558 Dokumen	558 Dokumen	558 Dokumen	558 Dokumen	558 Dokumen	
29	Jumlah Aparatur yang menerima penghargaan			75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	77 orang	75 orang	75 orang	75 orang	
30	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan			15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	8 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	
31	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani			45 orang	30 orang	30 orang	30 orang	49 orang	30 orang	30 orang	30 orang	
32	Jumlah Kepemimpinan Tingkat II		✓	-	3 orang	3 orang	3 orang	-	3 orang	3 orang	3 orang	
33	Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Administator		✓	15 Orang	15 orang	15 orang	15 Orang	22 orang	15 orang	15 orang	15 Orang	
34	Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Pengawas		✓	40 orang	40 orang	40 orang	10 orang	1 Orang	40 orang	40 orang	40 orang	
35	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional		✓	-	30 orang	30 orang	30 orang	-	30 orang	30 orang	30 orang	
36	Jumlah CPNS dan PPPK yang mengikuti diklat prajabatan			110 Orang	110 orang	110 orang	110 orang	84 Orang	110 orang	110 orang	110 orang	
37	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT		✓	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	41 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan;
3. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
4. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan sistem reward and punishment yang lebih tegas belum terlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah;
5. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem layanan informasi manajemen kepegawaian;
6. Belum tegasnya dalam menempatkan pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi;
7. Kebijakan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar lebih disiplin dan profesional.

Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah pelayanan publik bidang kepegawaian yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih *(clean governance)* melalui penataan pegawai yang profesional dan proforsional, dengan dukungan sarana prasarana yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan tidak mengurangi pelayanan dibidang kepegawaian di daerah, sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang ada di daerah dan terus dilakukan pembinaan pengawasan agar Pegawai Negeri Sipil di daerah mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik dibidang kepegawaian,oleh karena itu isu-isu penting diatas yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan adalah :

1. Perubahan peraturan dibidang pemerintahan daerah berdampak pada tuntutan perbaikan kinerja pegawai di bidang pelayanan kepegawaian yang membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada

analisis beban kerja setiap unit kerja;

2. Komposisi pegawai yang ada harus sesuai dengan kebutuhan terutama dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi;
3. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat, tepat dan transparan sebagai perwujudan *good governance*;
4. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur yang terstruktur agar PNS lebih disiplin dan profesional.

2.4. ReviewTerhadap (Rancangan Awal) RKPD

Penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PERANGKAT DAERAH, evaluasi pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAH tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali, dengan arahan Bupati Morowali terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PERANGKAT DAERAH berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali.

Tabel 2.4 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Morowali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kabupaten Morowali	**Presentase capaian kinerja BKPSDMD**	**100%**	**5.124.115.418**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kabupaten Morowali	**Presentase capaian kinerja BKPSDMD**	**100%**	**5.124.115.418**	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.950.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.950.000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase pelayanan Administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	3.693.975.418	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase pelayanan Administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	3.693.975.418	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.054.735.418	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.054.735.418	

6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah PHL yang dibayarkan jasanya	27 Orang	639.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah PHL yang dibayarkan jasanya	27 Orang	639.240.000	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	100%	365.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	100%	365.000.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000	
9	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja aparatur	28 Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja aparatur	28 Dokumen	5.000.000	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Morowali	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Morowali	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100.000.000	
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150.000.000	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paraturan perundang-undangan	3 Orang	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paraturan perundang-undangan	3 Orang	60.000.000	

13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	635.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	635.000.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	250.000.000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	140.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	140.000.000	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	115.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	115.000.000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000	
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	60.000.000	
19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	60.000.000	

20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Morowali	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	61.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Morowali	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	61.200.000	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.500.000	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.800.000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900.000	
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Morowali	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	285.990.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Morowali	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	285.990.000	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Morowali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Morowali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	65.000.000	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	20.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	20.990.000	

27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	200.000.000	
28	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Kabupaten Morowali	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**9,94%**	**2.475.072.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Kabupaten Morowali	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**9,94%**	**2.475.072.000**	
		Kabupaten Morowali	**Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**46,76%**			Kabupaten Morowali	**Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**46,76%**		
		Kabupaten Morowali	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**77,82%**			Kabupaten Morowali	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**77,82%**		
29	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Morowali	Persentase Layanan ASN	80%	868.811.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Morowali	Persentase Layanan ASN	80%	868.811.000	
30	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen		

31	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12 Dokumen	120.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12 Dokumen	120.000.000	
32	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	75 Dokumen	345.606.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	75 Dokumen	345.606.000	
33	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	60 Dokumen	181.562.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	60 Dokumen	181.562.000	
34	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	76.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	76.000.000	
35	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	72.821.500	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	72.821.500	
36	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	72.821.500	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	200 Dokumen	72.821.500	
37	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Morowali	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi	24,75%	278.363.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Morowali	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi	24,75%	278.363.000	

38	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	20 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	20 Dokumen	100.000.000	
39	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	740 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	740 Dokumen	100.000.000	
40	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	23 Dokumen	78.363.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	23 Dokumen	78.363.000	
41	Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Morowali	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	30%	882.898.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Morowali	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	30%	882.898.000	
42	Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	21 Dokumen	260.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	21 Dokumen	260.000.000	
43	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	15 Dokumen	-	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	15 Dokumen	-	
44	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 Orang	230.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 Orang	230.000.000	
45	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	129 Orang	112.898.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	129 Orang	112.898.000	

46	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30 Orang	280.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30 Orang	280.000.000	
47	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Presentase Kualitas Kedisiplinan ASN	100%	445.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Presentase Kualitas Kedisiplinan ASN	100%	445.000.000	
48	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	*50.000.000*	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	*50.000.000*	
49	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	504 Dokumen	*170.000.000*	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	504 Dokumen	*170.000.000*	
50	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bag Pegawai	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	80 Orang	*75.000.000*	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bag Pegawai	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	80 Orang	*75.000.000*	
51	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	*65.000.000*	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	*65.000.000*	
52	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	*65.000.000*	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	*65.000.000*	
53	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	*20.000.000*	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Morowali	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	*20.000.000*	

54	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Kabupaten Morowali	**Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**88%**	**2.400.812.582**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Kabupaten Morowali	**Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**88%**	**2.400.812.582**	
		Kabupaten Morowali	**Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**73,83%**			Kabupaten Morowali	**Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**73,83%**		
		Kabupaten Morowali	**Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**37%**			Kabupaten Morowali	**Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**37%**		
55	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Morowali	Presentase ASN yang lulus ujian kompetensi	100%	500.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Morowali	Presentase ASN yang lulus ujian kompetensi	100%	500.000.000	
56	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	500.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	500.000.000	

57	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Morowali	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	1.900.812.582	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Morowali	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	1.900.812.582	
58	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	1.900.812.582	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Morowali	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	1.900.812.582	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Morowali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Kabupaten Morowali	Presentase Capaian Kinerja BKPSDMD	1.290.000.000	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA PERANGKAT DAERAH dan DPA	60.000.000	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	-	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan		
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah PHL yang dibayarkan gajinya		

03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	15.000.000	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Morowali	Jumlah BMD OPD yang terkelola	15.000.000	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase pelayanan administrasi Kepegawaian perkantoran	200.000.000	
01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN OPD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80.000.000	
02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	120.000.000	
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	565.000.000	
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	150.000.000	
02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Morowali	Jumlah barang cetak dan Penggandaan Tersedia	117.000.000	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	178.000.000	
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Morowali	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi konsultasi PERANGKAT DAERAH	120.000.000	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Morowali	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang di adakan	-	

02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	-	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000	
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Morowali	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	53.000.000	
02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Morowali	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	-	
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Morowali	Cakupan keberishan lingkungan kantor	-	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali	Presentase barang milik daerah yang dipelihara	397.000.000	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Morowali	Jumlah jasa pemeliharaaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	35.000.000	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Unit)	40.000.000	
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	200.000.000	
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Morowali	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara / rehabilitasi	122.000.000	
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kabupaten Morowali	Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	2.210.000.000	

		Kabupaten Morowali	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
		Kabupaten Morowali	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
		Kabupaten Morowali	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabupaten Morowali	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	1.190.000.000	
01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah formasi penerimaan CPNS dan PPPK	360.000.000	
		Kabupaten Morowali	Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional		
02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Morowali	Jumlah Peserta yang lulus CPNS dan PPPK	500.000.000	
		Kabupaten Morowali	Jumlah CPNS yang difasilitasi penetapan NIP		
03	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang terlayani pengurusan taspen, karpeg, karis/karsu	180.000.000	
		Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun		
04	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang di mutahirkan datanya	150.000.000	
		Kabupaten Morowali	Persentase ASN yang difasilitasi dari kelembagaan KORPRI		

02	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah Mutasi dan Promosi yang diproses	220.000.000	
01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang mutasi, promosi, pindah keluar masuk yang di proses	100.000.000	
02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang pindah golongan	120.000.000	
03	Pengembangan Kompetensi ASN	Kabupaten Morowali	Presentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur	470.000.000	
01	Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur	283.000.000	
02	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang mengikuti UPI dan UD	118.000.000	
03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	69.000.000	
04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Presentase Disiplin ASN	330.000.000	
01	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja	150.000.000	
02	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Morowali	Jumlah Aparatur yang menerima penghargaan	80.000.000	
03	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan	50.000.000	
04	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	50.000.000	
03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Morowali	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	2.500.000.000	
		Kabupaten Morowali	Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM		

		Kabupaten Morowali	Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM		
01	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Morowali	Presentase ASN yang mengikuti diklat	2.500.000.000	
01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Morowali	Jumlah Kepemimpinan Tingkat II	2.500.000.000	
		Kabupaten Morowali	Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Administator		
		Kabupaten Morowali	Jumlah Pendidikan Kepemimpinan Pengawas		
		Kabupaten Morowali	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional		
		Kabupaten Morowali	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan		
		Kabupaten Morowali	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti seleksi JPT		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan dari Badan Kepegawaian Negara

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, Visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 adalah melaksanakan visi Presiden nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan melaksanakan arahan Presiden Nomor 4 (empat) yaitu penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan Nomor 7 (tujuh) memperkuat stabilitas polhumham dan transformasi pelayanan public dengan ***"mewujudkan pengelola ASN yang professional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".***

3.1.2 Telaahan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memilki komitmen yang dituangkan dalam visi 2019-2024 yaitu :

"Mewujudkan apartur negara yang professional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden:'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong".

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa BKPSDMD Kabupaten Morowali telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Sakip	Nilai	B	B	B
			Indeks profesionalitas ASN	Persen	70	75	80
		Meningkatkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dalam menjalankan jabatan	Presentase Kualifikasi jabatan ASN	Persen	100	100	100
			Presentase standar Komptensi ASN	Persen	75	80	85
			Presentase disiplin ASN	Persen	24	18	15

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali tersusun sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Presentase capaian kinerja BKPSDMD**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**4.934.115.418**			**100%**	**5.019.987.180**
5	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	6 Dokumen	22.950.000			6 Dokumen	22.950.000
5	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	6 Dokumen	22.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	22.950.000
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan Administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Kabupaten Morowali	100%	3.693.975.418			100%	3.769.937.180
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali	30 Orang	3.054.735.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	3.130.697.180
5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang dibayarkan jasanya	Kabupaten Morowali	27 Orang	639.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27 Orang	639.240.000

5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kabupaten Morowali	100%	345.000.000			100%	345.000.000
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Morowali	2 Paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	50.000.000
5	03	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja aparatur	Kabupaten Morowali	28 Dokumen	5.000.000			30 Dokumen	5.000.000
5	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Morowali	4 Orang	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Orang	80.000.000
5	03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali	100 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	150.000.000
5	03	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paraturan perundang-undangan	Kabupaten Morowali	3 Orang	60.000.000			3 Orang	60.000.000
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kabupaten Morowali	100%	565.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	572.000.000
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Morowali	4 Paket	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	200.000.000
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Paket	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	135.000.000

5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Paket	115.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	117.000.000
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Morowali	10 Laporan	120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	120.000.000
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali	3 Unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	60.000.000
5	03	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Morowali	3 Unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	60.000.000
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	Kabupaten Morowali	100%	61.200.000			100%	61.200.000
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Morowali	12 Laporan	8.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	8.500.000
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Laporan	51.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	51.800.000
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Laporan	900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	900.000
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	Kabupaten Morowali	100%	185.990.000			100%	188.900.000

5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Morowali	7 Unit	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Unit	65.000.000
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Morowali	31 Unit	20.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33 Unit	23.900.000
5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Morowali	1 Gedung	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Gedung	100.000.000
5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**Kabupaten Morowali**	**9,94%**	**2.414.072.000**			**9,94%**	**2.336.439.000**
							Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Kabupaten Morowali**	**46,76%**				**46,76%**	
							Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Kabupaten Morowali**	**160,50%**				**161,17%**	
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan ASN	Kabupaten Morowali	80%	868.811.000			85%	748.811.000
5	03	02	2	01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	3 Dokumen				3 Dokumen	

5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	12 Dokumen	120.000.000			12 Dokumen	-
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Morowali	75 Dokumen	345.606.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150 Dokumen	345.606.000
5	03	02	2	01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kabupaten Morowali	60 Dokumen	181.562.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 Dokumen	181.562.000
5	03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kabupaten Morowali	1 Lembaga	76.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Lembaga	76.000.000
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Morowali	12 Dokumen	72.821.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	72.821.500
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Morowali	200 Dokumen	72.821.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Dokumen	72.821.500
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi	Kabupaten Morowali	24,75%	278.363.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26%	302.730.000
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Kabupaten Morowali	20 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Dokumen	110.000.000

5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Morowali	740 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		740 Dokumen	110.430.000
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Morowali	23 Dokumen	78.363.000			25 Dokumen	82.300.000
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kabupaten Morowali	30%	821.898.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34%	839.898.000
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Morowali	21 Dokumen	265.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Dokumen	267.000.000
5	03	02	2	03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kabupaten Morowali	15 Dokumen	-			17 Dokumen	-
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Morowali	8 Orang	184.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Orang	230.000.000
5	03	02	2	03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kabupaten Morowali	129 Orang	112.898.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130 Orang	112.898.000
5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Morowali	27 Orang	260.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	230.000.000
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Kualitas Kedisiplinan ASN	Kabupaten Morowali	100%	445.000.000			100%	445.000.000

5	03	02	2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	1 Dokumen	*50.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	*50.000.000*
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	504 Dokumen	*170.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		504 Dokumen	*170.000.000*
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bag Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Morowali	80 Orang	*75.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 Orang	*75.000.000*
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Morowali	5 Orang	*65.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Orang	*65.000.000*
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	8 Laporan	*65.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	*65.000.000*
5	03	02	2	04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kabupaten Morowali	10 Dokumen	*20.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	*20.000.000*
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**Kabupaten Morowali**	**88%**	**2.350.000.000**			**91%**	**2.353.540.000**
							Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	**Kabupaten Morowali**	**73,83%**				**80,54%**	
							Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	**Kabupaten Morowali**	**37%**				**39,60%**	

5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang lulus ujian kompetensi	Kabupaten Morowali	100%	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	500.000.000
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Morowali	15 Orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Orang	500.000.000
5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Morowali	100%	1.850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.853.540.000
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Morowali	6 Laporan	1.850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	1.853.540.000
							Jumlah			**9.698.187.418**				**9.709.966.180**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan dan Pendanaan BKPSDMD

Kode						Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
						URUSAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
5	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Presentase capaian kinerja BKPSDMD**	**Kabupaten Morowali**	**100%**	**4.934.115.418**		
5	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	6 Dokumen	22.950.000		
5	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali	6 Dokumen	22.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan Administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Kabupaten Morowali	100%	3.693.975.418		
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali	30 Orang	3.054.735.418		
5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PHL yang dibayarkan jasanya	Kabupaten Morowali	27 Orang	639.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Kabupaten Morowali	100%	345.000.000		
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Morowali	2 Paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja aparatur	Kabupaten Morowali	28 Dokumen	5.000.000		
5	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Morowali	4 Orang	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali	100 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paraturan perundang-undangan	Kabupaten Morowali	3 Orang	60.000.000		
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kabupaten Morowali	100%	565.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Morowali	4 Paket	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Paket	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Paket	115.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Morowali	10 Laporan	120.000.000		

5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali	3 Unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Morowali	3 Unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	Kabupaten Morowali	100%	61.200.000		
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Morowali	12 Laporan	8.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Laporan	51.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Morowali	12 Laporan	900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	Kabupaten Morowali	100%	185.990.000		
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Morowali	7 Unit	65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Morowali	31 Unit	20.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Morowali	1 Gedung	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**Kabupaten Morowali**	**9,94%**	**2.414.072.000**		
							Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Kabupaten Morowali**	**46,76%**			
							Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Kabupaten Morowali**	**160,50%**			
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan ASN	Kabupaten Morowali	80%	868.811.000		
5	03	02	2	01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	3 Dokumen			
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Morowali	12 Dokumen	120.000.000		
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Morowali	75 Dokumen	345.606.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kabupaten Morowali	60 Dokumen	181.562.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kabupaten Morowali	1 Lembaga	76.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Morowali	12 Dokumen	72.821.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Morowali	200 Dokumen	72.821.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang di mutasi dan di promosi	Kabupaten Morowali	24,75%	278.363.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Kabupaten Morowali	20 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Morowali	740 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Morowali	23 Dokumen	78.363.000		
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kabupaten Morowali	30%	821.898.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Morowali	21 Dokumen	265.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kabupaten Morowali	15 Dokumen	-		
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Morowali	8 Orang	184.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kabupaten Morowali	129 Orang	112.898.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Morowali	27 Orang	260.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Kualitas Kedisiplinan ASN	Kabupaten Morowali	100%	445.000.000		
5	03	02	2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	1 Dokumen	*50.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Morowali	504 Dokumen	*170.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bag Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Morowali	80 Orang	*75.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Morowali	5 Orang	*65.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Morowali	8 Laporan	*65.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	03	02	2	04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kabupaten Morowali	10 Dokumen	*20.000.000*	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM**	**Kabupaten Morowali**	**88%**	**2.350.000.000**		
							Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	**Kabupaten Morowali**	**73,83%**			
							Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	**Kabupaten Morowali**	**37%**			

5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang lulus ujian kompetensi	Kabupaten Morowali	100%	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Morowali	15 Orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Morowali	100%	1.850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Morowali	6 Laporan	1.850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
							Jumlah			**9.698.187.418**		

BAB V
PENUTUP

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali membutuhkan ketersediaan yang cukup besar, dikarenakan hampir 75% kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan SDM Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali termasuk fasilitas organisasi profesi ASN, dalam penyediaan dana untuk kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali selama ini dana yang dialokasikan sangat terbatas, sehingga setiap rencana kerja yang akan dilaksanakan banyak yang tidak tercapai dikarenakan dana yang sangat terbatas.

Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan SDM Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai sentral pelayanan seluruh Administrasi Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali.

Kami menyadari bahwa Renja ini belumlah sempurna namun dokumen ini dapat memenuhi harapan dari para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen perencanaan. Untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan guna penyempurnaan Dokumen Renja ini.

Tingkat perhatian tersebut dapat diwujudkan dalam pemberian sumbangan pikiran atau saran dalam perumusannya maupun turut membantu dalam memperbaiki dan memperlancar pelaksanaannya, dengan maksud agar rencana kerja yang telah dirumuskan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – PERANGKAT DAERAH) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semoga dapat memberikan suatu hal yang berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali.

RENJA TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

aI.

Alamat :Jl.Perkantoran Bumi Fonuansingko

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraaan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR …….

Bab 1 PENDAHULUAN .....

1.1 LATAR BELAKANG .....

1.2 LANDASAN HUKUM.....

1.3. Maksud dan Tujuan ……..

1.4. Sistematika Penulisan ……..

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……..

1.2. Landasan Hukum ……..

1.3. Maksud dan Tujuan ……..

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan. ……
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ……..
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ……

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. ……

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

3.3 Program dan Kegiatan ……..

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ……

BAB 5 PENUTUP …….....

Bab 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Profinsi Sulawesi Tengan Indonesia. Kabupaten ini memiliki Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah termasuk Tambang, nikel, Perkebunan dan kelapa sawit. Selain itu Kabupaten Morowali juga memiliki keaneka ragaman budaya dan etnis yang kaya

Sebagai Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Morowali tugas utama nya adalah menjaga dan memperkuat Kesatuan dan Kerukunan Antar Warga serta memfasilitasi berbagai kegiatan Politik yang terletak di Kabupaten Morowali. Kesbangpol juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi.

Namun dalam beberapa tahun terakhir , Kabupaten Morowali menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Perkembangan dan ekonomi social dan politik di daerah ini telah membawa dampak yang beragam termasuk meningkatnya kebutuhan akan pemahaman dan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kehidupan politik.

Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan) mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 didasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2024 Perubahan Kabupaten Morowali dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya RPJPD dan Renstra.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Renja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10. Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfilk Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

13. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomot 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-undang;
15. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan melakukan kegiatan penelitiandan pengembangan bagi pergurua tinggi asing,lembaga penelitai dan pengembangan asing badan usaha asing,dan orang asing;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
22. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
25. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keungan Kepada Partai Politik;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
34. Peraturan Bersama Mentri agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 garing nomor 8 tahun 2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah wakil kepala daerah dalam pemeliharan kerukunan umat beragama,pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;
35. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang asing dan organisasi Masyarakat asing di daerah;

36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di daerah;
37. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah;
38. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai – nilai pancasila;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
41. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah;
42. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
50. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomo 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0142);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
52. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat;
53. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Tujuan ……

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB 5 PENUTUP

5.1 Catatan Penting terhadap Pelaksanaan Ketersediaan Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana tindak lanjut

Bab 2

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja langsung sebesar Rp. 6.689.325.778,- dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 9 kegiatan dan 22 jenis Sub kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali. Secara umum pencapaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali untuk realisasi keuangan sebesar 95.18 % dan realisasi fisik sebesar 92, 87 %.

a. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan Tahun 2022 Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melebihi target kinerja yang telah direncanakan . Dari 6 Program dan 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berikut ini capaian kinerja tahun 2022 meliput:

   - ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Sebesar 91,62 %
   - ✓ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sebesar 97,18 %
   - ✓ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melakui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Sebesar 99, 49 %
   - ✓ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sebesar 99, 55 %

- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebesar 97,34
- ✓ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Sebesar 98,62 %

Perkiraan capaian tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95,18 % sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2022.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tercapainya Target sesuai dengan Program Kegiatan yang telah direncanakan disebabkan antara lain karena adanya Program/Kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan dapat dilihat pada table berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/ Kegiatan Output	Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10= (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja akuntabilitas Dinas Sosial**	100%	100	100	100	1	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	100	100	100	1	100	100	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Aparatur Sipil Negara dalam 1 tahun*	20	20	20	20	1	20	20	1
	Penyedian Administrasi Pelaksana Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	11	11	11	11	1	11	33	3

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	1	**100**	**100**	1
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2	0	2	2	1	2	4	2
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	0	3	2	1,16	3	5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	1	1	1	1	1	1	1

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	3	3	3	3	3	3	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	4	4	4	4	4	4	4
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		4	4	4	4	4	4	4	4

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi									

	Kemasyarakatan									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	1	1	1	1	1	1	1

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65	65	65	65	65	65	65	65
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65	65	65	65	65	65	65	65
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	37	37	37	37	37	37	37	37

	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	serta Penanganan Konflik di Daerah								
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16	16	16	16	16	16	16	16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali tahun 2022 melampaui target, Hal ini di sebabkan ada beberapa kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran APBD

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam capaian indikator kinerja, capaian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Morowali 2023

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**%**	**95**	**3,991,811,007**	**58,34**	**3.519581425**	**88,17 %**	88.17%
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN**	**Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan**	**%**	**95**	**1.990.062.350, 00**	**44,72**	**1.943.282.994, 00**	**97,64 %**	**97,65%**

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
	KARAKTER KEBANGSAAN	**Bela Negara**							
		Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	**%**	**90**		**0,169**		**98,91%**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**	**%**	**50**	**24.959.828.020,00**	**2,55**	**24.881.381.254,00**	**99,69**	**99,69%**

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	%	78	273.817.300,00	29,53	259.671.413,00	37,86%	94,83%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	%	0,33	686.765.350,00	17,15	641.066.755,00	5196,97%	93,35%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	%	88	621.239.000,00	11,7	556.491.000,00	13,3%	89,58%
		Persentase Daerah Rawan Konflik	%	88		11,71		13,31%	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Morowali

2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kestabilan politik;

b. Meningkatnya Ketahanan bangsa.

Pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah akan melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan.

2.3.2. Permasalahan yang Dihadapi Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah :

1. **Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:**
   a. **Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;**
   b. **Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;**
   c. **Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan.**

2. **Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama dan Ormas:**
   a. **Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;**
   b. **Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilainilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;**
   c. **Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan;**
   d. **Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;**

3. **Bidang Politik Dalam Negeri :**
   a. **Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;**
   b. **Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat yang belum optimal;**
   c. **Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;**

2.3.3. Tantangan dan Peluang Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;

b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;

c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;

d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.

f. Masih adanya aksi dan kegiatan atau kekerasan.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;

b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawsan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;

c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;

d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;

e. Stabilnya sistem politik sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

2.3.4. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di diperlukan solusi atau rekomendasi unuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. **Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.**

2. **Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat. 16**
3. **Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.**
4. **Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;**
5. **Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.**
6. **Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;**
7. **Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024;**
8. **Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money polic;**
9. **Koordinasi antara Badan Penyelengara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.**
10. **Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;**
13. **Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;**
14. **Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi.**
15. **Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas.**
16. **Melakukan sosialisasi P4GN dan PN**

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesbangpol Daerah;

1. Meningkatkan fungsi parpol dalam pendidikan politik bagi parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa badan kesbangpol kab morowali sebagai lembaga teknis di bidang politik dalam negeri untuk menyelenggarakan mediasi fasilitasi dan komunikasi bagi institusi, masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penyaluuran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat (civil society) dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan untuk masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, ketahanan budaya sumber daya alam dan ekonomi di Kabupaten Morowali, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuda.
3. Terselenggaranya pengembangan Ideologi bangsa wawasan kebangsaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Morowali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bergangsa dan bernegara.
4. Terciptanya Kewaspadaan Nasional dan Penanaganan Konflik yang meliputi kerjasama intelijen, pemnatauan orang asing dan organisasi asing, batas wilayah serta penanganan konflik. Sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kab. Morowali.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2022 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 TC 31

REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
2	3	5	6	7	8	9	10
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**12.828.968.601**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**			**5.095.289.409**			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**			**3.231.267.379**			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	25 Orang/bulan	2.952.747.379			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	12 Orang/Bulan	278.520.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**%**	**43.000.000**			

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Morowali	2 Orang	43.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**%**	**1.289.782.030**			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	Paket	394.891.015			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	Kab. Morowali	100 %	100.000.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	Paket	194.891.015			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	600.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**102.400.000**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Laporan	1.500.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	100.000.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Laporan	900.000			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan pemerintahan Daerah**		**%**	**428.840.000**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Morowali	Unit	28.840.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Morowali	Unit	400.000.000			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**		**%**	**392.231.683**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase ASN Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara		**%**	**392.231.683**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	22.231.683			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	200.000.000			

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	170.000.000			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**		**%**	**4.602.831.062**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik**		**%**	**4.602.831.062**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	2.983.790.540			

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	1.619.040.522			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Presentase Pengurus Ormas yang Aktif**		**%**	**527.895.013**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing**		**%**	**527.895.013**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	275.000.000			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	252.895.013			

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan Pelestarian budaya di 10 kecamatan**			**1.135.699.901**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 10 kecamatan**			**1.135.699.901**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	250.000.000			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	350.000.000			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	535.699.901			

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Daerah Rawan Konflik**			**1.075.021.533**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda**			**1.075.021.533**			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	375.500.000			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	450.000.000			

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	249.521.533			



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dalam konteks perencanaan pembangunan, Badan Kesbangpol Kabupaten Morowali dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Proses Penyusunan Renja Tahun 2024 didasarkan kepada RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan seperti pada Table dibawah.

Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**12.828.968.601**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**5.095.289.409**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**3.231.267.379**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.952.747.379	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	278.520.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**43.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	43.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1.289.782.030**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	394.891.015	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.891.015	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi, Pusat dan Kab	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	600.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**102.400.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.500.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan pemerintahan Daerah**	900.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**428.840.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28.840.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	**Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	400.000.000	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		Presentase ASN Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	**392.231.683**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	**392.231.683**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	22.231.683	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**	170.000.000	

3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik**	**4.602.831.062**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**4.602.831.062**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.983.790.540	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	**Presentase Pengurus Ormas yang Aktif**	1.619.040.522	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing**	**527.895.013**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	**527.895.013**	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	275.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	**Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan Pelestarian budaya di 10 kecamatan**	252.895.013	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 10 kecamatan**	**1.135.699.901**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	**1.135.699.901**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	**Persentase Daerah Rawan Konflik**	535.699.901	

6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda**	**1.075.021.533**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**1.075.021.533**	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	375.500.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	249.521.533	

Bab 3
TUJUAN dan SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pokok-pokok kebijakan program nasional yang terkait dengan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi arah kebijakan daerah.

Beberapa Pokok-pokok Kebijakan program nasional Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali, yaitu :

1. Arah Kebijakan dalam mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya;
   b. Mantapnya kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat;
   c. Menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berbudaya;
   d. Mempertahankan kerukunan antar umat beragama dan menjaga serta mempertahankan keragaman budaya daerah.
2. Arah Kebijakan Politik dan Kewaspadaan Nasional;
   a. Peningkatan kualitas pemberian informasi dalam pemahaman terhadap Politik dan Kewaspadaan Nasional dalam masyarakat;
   b. Mengembangkan penyelenggaraan mediasi dan fasilitasi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
   c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pembinaan Politik dan Kewaspadaan Nasional;
   d. Pembukuan dalam sebuah dokumen Data Base Parpol;

Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme;
2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat;
3. Meningkatkan peran serta perempuan dalam berdemokrasi;
4. Meningkatkan kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih Unggul (revolusi mental);
5. Mengembalikan semangat gotong royong;

6. Menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali adalah isi dari Visi pada Misi kesatu dan ketujuh Bupati Morowali yaitu *Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan Nilai-nilai kebenaran dan keadilan* dan *Mendorong kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama, sarana dan prasana tempat ibadah sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama*.

3.2.1 Tujuan

1. Sebagai acuan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024;
2. Sebagai pedoman pengambilan kebijakan pimpinan daerah untuk melanjutkan program dan kegiatan tahun berikutnya;
3. Sebagai dasar pijakan untuk menyusun strategis kebijakan dalam menyusun program sinergitas antara pemeritah dan pemerintah daerah;

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan tersebut diatas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
2. Menurunya Konflik SARA;
3. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama.

Untuk uraian lebih lengkap mengenai Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 3.2**

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023
Tujuan 1; Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai LAKIP Badan Kesbangpol	
Sasaran 1.1; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP	
Tujuan 2; Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	

beragama Kab Morowali		
Sasaran 2.1 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Demokrasi Daerah	Indeks Demokrasi	
Tujuan 3; Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Angka Kriminalitas	
Sasaran 3.1 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Demokrasi Daerah	Presentase Jumlah Konflik yang Terpetakan	

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bersumber dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Morowali, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023; Menetapkan visi Kabupaten Morowali "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Yang Sejahtera Bersama*" yang memuat misi Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Govermance) melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan nilai nilai kebenaran dan keadilan;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan pendapatan asli daerah dengan melibatkan usaha kecil/menengah local dan koprasi agar lebih bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja local dengan tetap menjaga iklim investasi yang baik dan kelestarian alam;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pembiayaan pendidikan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif inovatif dan bertaqwa;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan gratis, penngkatan kuantitas dan kualitas kesehatan, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasanan sehat dan nyaman;
5. Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengembangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan kelautan yang didukung oleh kemudahan modal usaha dan tehnologi tepat guna agar tercipta kepastian harga dan pasar;
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, listrik, fasilitas olahraga, perumahan, objek wisata, serta seni dan



budaya sehingga tercipta kehidupan masyaraat yang harmonis dan bahagia;

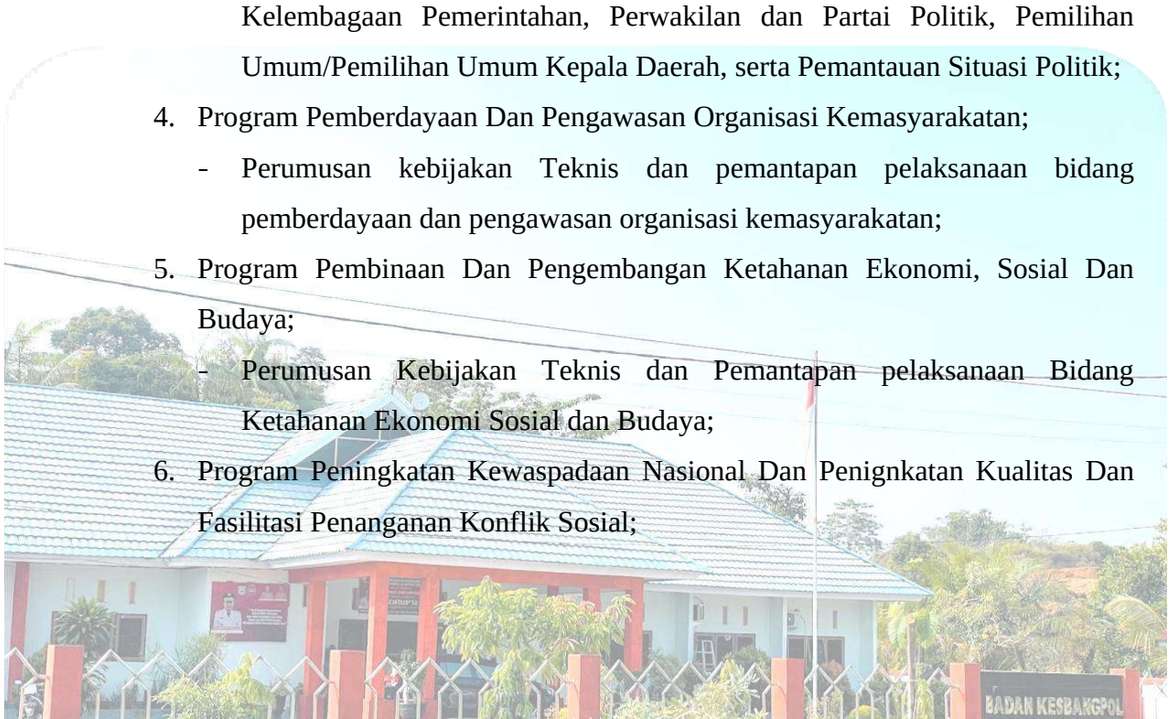
7. Mendorong masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama, sarana dan prasarana tempat ibadah sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat Bergama.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah **Misi 1**"*Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan* **Misi 3**. *Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis berdasarkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama* ".

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

Sesuai uraian misi yang menjadi sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dikembangkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
   - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengambangan Etika Serta Budaya Politik;
   - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
   - Perumusan kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
   - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Penignkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;



- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dapat dijelaskan bahwa rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD begitupula program dan kegiatan kecuali pagu indikatif yang dimasukan dalam RKPD tidak sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan mengacu kepada ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.

c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**12.828.968.601**					**12.828.968.601**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.095.289.409**					**5.095.289.409**
8	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.231.267.379**					**3.231.267.379**
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	25 Orang/bulan	12 Bulan	2.952.747.379	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	2.952.747.379
8	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	12 Orang/Bulan	12 Bulan	278.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	278.520.000
8	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**43.000.000**					**43.000.000**

8	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Diklat Kepemimpinan (PIM IV)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	2 Orang	43.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	43.000.000
8	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.289.782.030**					**1.289.782.030**
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Paket	100 %	394.891.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	394.891.015
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100.000.000
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Paket	100 %	194.891.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	194.891.015
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	600.000.000
8	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**102.400.000**					**102.400.000**

8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	1.500.000
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100.000.000
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	900.000
8	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**428.840.000**					**428.840.000**
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya servis / jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Unit	100 %	28.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	28.840.000
8	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya servis / jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Unit	100 %	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	400.000.000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**392.231.683**					**410.474.839**
8	**01**	**02**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**392.231.683**					**410.474.839**

8	01	02	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Presentase ASN dan Pelajar Kaum Milenial yang mengikuti Pembinaan Wawaasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	22.231.683	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	40.474.839
8	01	02	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Presentase ASN dan Pelajar Kaum Milenial yang mengikuti Pembinaan Wawaasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	200.000.000
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN dan Pelajar Kaum Milenial yang mengikuti Pembinaan Wawaasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	100 %	170.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	170.000.000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**4.602.831.062**					**4.816.914.129**
8	**01**	**03**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**4.602.831.062**					**4.816.914.129**

8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tercapainya Parpol yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	2.983.790.540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	100 %	3.983.790.540
8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tercapainya Parpol yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	1.619.040.522	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	100 %	833.123.589
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**527.895.013**					**555.992.365**
8	**01**	**04**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**527.895.013**					**555.992.365**

8	01	04	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Terlaksananya ASN yang mendapatkan pendidikan pelatihan bela negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	275.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	100 %	303.097.352
8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya ASN yang mendapatkan pendidikan pelatihan bela negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	252.895.013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	100 %	252.895.013
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**1.135.699.901**					**1.196.147.830**
8	**01**	**05**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**1.135.699.901**					**1.196.147.830**
8	01	05	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	fasilitasi pencegahan NARKOBA, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	Kegiatan	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	100 %	270.000.000

8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	fasilitasi pencegahan NARKOBA, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	Kegiatan	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	100 %	370.000.000
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	fasilitasi pencegahan NARKOBA, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	Kegiatan	535.699.901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	100 %	556.147.830
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**1.075.021.533**					**1.106.184.844**
8	**01**	**06**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**1.075.021.533**					**1.106.184.844**

8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Daerah Rawan Konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya Hasil Rakor Forkopimda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	100 %	375.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rawan Konflik	100 %	385.500.000
8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Daerah Rawan Konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya Hasil Rakor Forkopimda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rawan Konflik	100 %	455.500.000
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Rawan Konflik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Hasil Rakor Forkopimda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	249.521.533	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rawan Konflik	100 %	265.184.844
												TOTAL	**12.828.968.601**					**12.828.968.601**

Bab 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor–Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan merujuk pada RPD Tahun 2024-2026, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD yang mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan didaerah yang berkelanjutan".

Program/kegiatan Renja Tahun 2024 meliputi sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
   2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
   3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
   1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
   2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/Kegiatan Output	Satuan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							
8	01				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**12.828.968.601**		
8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**%**			**5.095.289.409**		
8	01	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**%**			**3.231.267.379**		
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kab. Morowali	25 Orang/bulan	2.952.747.379	APBD	
8	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/Bulan	Kab. Morowali	12 Orang/Bulan	278.520.000	APBD	
8	01	01	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**43.000.000**		

8	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kab. Morowali	2 Orang	43.000.000	APBD	
8	01	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**1.289.782.030**		
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Morowali	Paket	394.891.015	APBD	
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	100 %	Kab. Morowali	100 %	100.000.000	APBD	
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Morowali	Paket	194.891.015	APBD	
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	600.000.000	APBD	
8	01	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**%**	**102.400.000**		
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Morowali	Laporan	1.500.000	APBD	
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Morowali	Laporan	100.000.000	APBD	
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kab. Morowali	Laporan	900.000	APBD	
8	01	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan pemerintahan Daerah**	**%**		**%**	**428.840.000**		

8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab. Morowali	Unit	28.840.000	APBD	
8	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Morowali	Unit	400.000.000	APBD	
8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**%**		**%**	**392.231.683**		
8	01	02	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Presentase ASN Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	**%**		**%**	**392.231.683**		
8	01	02	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	22.231.683	APBD	
8	01	02	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	200.000.000	APBD	
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	170.000.000	APBD	

8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**	**%**		**%**	**4.602.831.062**		
8	**01**	**03**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik**	**%**		**%**	**4.602.831.062**		
8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	2.983.790.540	APBD	
8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	1.619.040.522	APBD	

8	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presentase Pengurus Ormas yang Aktif**	**%**		**%**	**527.895.013**		
8	01	04	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing**	**%**		**%**	**527.895.013**		
8	01	04	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	275.000.000	APBD	
8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	252.895.013	APBD	
8	01	05			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan Pelestarian budaya di 10 kecamatan**				**1.135.699.901**		
8	01	05	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 10 kecamatan**				**1.135.699.901**		
8	01	05	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	250.000.000	APBD	

						Disusun							
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	350.000.000	APBD	
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	535.699.901	APBD	
8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Daerah Rawan Konflik**				**1.075.021.533**		
8	01	06	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda**				**1.075.021.533**		
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	375.500.000	APBD	

					Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	450.000.000	APBD	
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	249.521.533	APBD	


BADAN KESBANGPOL
MOROWALI

Bab 5
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, sekaligus berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesbangpol, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar terlaksana keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum OPD di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

1. Rencana kerja (Renja) Badan Kesbangpol tahun 2024 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra OPD).
2. Dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Kesbangpol tahun 2024 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita

mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Demikian Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun anggaran 2024.

Bungku,

Kepala Badan ;

Kepala Badan,

Drs. BAMBANG S. SOEROJO, M. Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19671007 199203 1 006

RENJA TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

aI.

Alamat :Jl.Perkantoran Bumi Fonuansingko

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraaan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR …….

Bab 1 PENDAHULUAN .....

1.1 LATAR BELAKANG .....

1.2 LANDASAN HUKUM.....

1.3. Maksud dan Tujuan ……..

1.4. Sistematika Penulisan ……..

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……..

1.2. Landasan Hukum ……..

1.3. Maksud dan Tujuan ……..

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan. ……
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ……..
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ……

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. ……

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

3.3 Program dan Kegiatan ……..

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ……

BAB 5 PENUTUP …….....

Bab 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Profinsi Sulawesi Tengan Indonesia. Kabupaten ini memiliki Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah termasuk Tambang, nikel, Perkebunan dan kelapa sawit. Selain itu Kabupaten Morowali juga memiliki keaneka ragaman budaya dan etnis yang kaya

Sebagai Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Morowali tugas utama nya adalah menjaga dan memperkuat Kesatuan dan Kerukunan Antar Warga serta memfasilitasi berbagai kegiatan Politik yang terletak di Kabupaten Morowali. Kesbangpol juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi.

Namun dalam beberapa tahun terakhir , Kabupaten Morowali menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Perkembangan dan ekonomi social dan politik di daerah ini telah membawa dampak yang beragam termasuk meningkatnya kebutuhan akan pemahaman dan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kehidupan politik.

Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan.

Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan) mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 didasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2024 Perubahan Kabupaten Morowali dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya RPJPD dan Renstra.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Renja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10. Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfilk Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

13. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomot 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-undang;
15. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan melakukan kegiatan penelitiandan pengembangan bagi pergurua tinggi asing,lembaga penelitai dan pengembangan asing badan usaha asing,dan orang asing;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
22. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
25. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keungan Kepada Partai Politik;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
34. Peraturan Bersama Mentri agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 garing nomor 8 tahun 2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah wakil kepala daerah dalam pemeliharan kerukunan umat beragama,pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;
35. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang asing dan organisasi Masyarakat asing di daerah;

36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di daerah;
37. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah;
38. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai – nilai pancasila;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
41. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah;
42. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
50. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomo 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0142);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
52. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat;
53. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Tujuan ……

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB 5 PENUTUP

5.1 Catatan Penting terhadap Pelaksanaan Ketersediaan Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana tindak lanjut

Bab 2

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Capaian Kinerja Pembangunan tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja langsung sebesar Rp. 6.689.325.778,- dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 9 kegiatan dan 22 jenis Sub kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali. Secara umum pencapaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali untuk realisasi keuangan sebesar 95.18 % dan realisasi fisik sebesar 92, 87 %.

a. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan Tahun 2022 Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melebihi target kinerja yang telah direncanakan . Dari 6 Program dan 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berikut ini capaian kinerja tahun 2022 meliput:

   - ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Sebesar 91,62 %
   - ✓ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sebesar 97,18 %
   - ✓ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melakui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Sebesar 99, 49 %
   - ✓ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sebesar 99, 55 %

- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebesar 97,34
- ✓ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Sebesar 98,62 %

Perkiraan capaian tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95,18 % sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2022.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tercapainya Target sesuai dengan Program Kegiatan yang telah direncanakan disebabkan antara lain karena adanya Program/Kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan dapat dilihat pada table berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/ Kegiatan Output	Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10= (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja akuntabilitas Dinas Sosial**	100%	100	100	100	1	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	100	100	100	1	100	100	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Aparatur Sipil Negara dalam 1 tahun*	20	20	20	20	1	20	20	1
	Penyedian Administrasi Pelaksana Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	11	11	11	11	1	11	33	3

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	1	**100**	**100**	1
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2	0	2	2	1	2	4	2
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	0	3	2	1,16	3	5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker	1 Paker
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	1	1	1	1	1	1	1

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	3	3	3	3	3	3	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	4	4	4	4	4	4	4
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		4	4	4	4	4	4	4	4

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi									

	Kemasyarakatan									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	1	1	1	1	1	1	1

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65	65	65	65	65	65	65	65
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65	65	65	65	65	65	65	65
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	37	37	37	37	37	37	37	37

	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	serta Penanganan Konflik di Daerah								
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16	16	16	16	16	16	16	16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali tahun 2022 melampaui target, Hal ini di sebabkan ada beberapa kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran APBD

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam capaian indikator kinerja, capaian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Morowali 2023

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**%**	**95**	**3,991,811,007**	**58,34**	**3.519581425**	**88,17 %**	88.17%
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN**	**Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan**	**%**	**95**	**1.990.062.350, 00**	**44,72**	**1.943.282.994, 00**	**97,64 %**	**97,65%**

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
	KARAKTER KEBANGSAAN	**Bela Negara**							
		Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	**%**	**90**		**0,169**		**98,91%**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**	**%**	**50**	**24.959.828.020,00**	**2,55**	**24.881.381.254,00**	**99,69**	**99,69%**

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	%	78	273.817.300,00	29,53	259.671.413,00	37,86%	94,83%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	%	0,33	686.765.350,00	17,15	641.066.755,00	5196,97%	93,35%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	%	88	621.239.000,00	11,7	556.491.000,00	13,3%	89,58%
		Persentase Daerah Rawan Konflik	%	88		11,71		13,31%	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Morowali

2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kestabilan politik;

b. Meningkatnya Ketahanan bangsa.

Pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah akan melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan.

2.3.2. Permasalahan yang Dihadapi Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah :

1. **Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:**
   a. **Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;**
   b. **Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;**
   c. **Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan.**

2. **Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama dan Ormas:**
   a. **Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;**
   b. **Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilainilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;**
   c. **Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan;**
   d. **Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;**

3. **Bidang Politik Dalam Negeri :**
   a. **Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;**
   b. **Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat yang belum optimal;**
   c. **Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;**

2.3.3. Tantangan dan Peluang Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;

b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;

c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;

d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.

f. Masih adanya aksi dan kegiatan atau kekerasan.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;

b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawsan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;

c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;

d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;

e. Stabilnya sistem politik sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

2.3.4. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di diperlukan solusi atau rekomendasi unuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. **Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.**

2. **Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat. 16**
3. **Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.**
4. **Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;**
5. **Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.**
6. **Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;**
7. **Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024;**
8. **Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money polic;**
9. **Koordinasi antara Badan Penyelengara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.**
10. **Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;**
13. **Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;**
14. **Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi.**
15. **Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas.**
16. **Melakukan sosialisasi P4GN dan PN**

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesbangpol Daerah;

1. Meningkatkan fungsi parpol dalam pendidikan politik bagi parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa badan kesbangpol kab morowali sebagai lembaga teknis di bidang politik dalam negeri untuk menyelenggarakan mediasi fasilitasi dan komunikasi bagi institusi, masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penyaluuran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat (civil society) dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan untuk masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, ketahanan budaya sumber daya alam dan ekonomi di Kabupaten Morowali, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuda.
3. Terselenggaranya pengembangan Ideologi bangsa wawasan kebangsaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Morowali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bergangsa dan bernegara.
4. Terciptanya Kewaspadaan Nasional dan Penanaganan Konflik yang meliputi kerjasama intelijen, pemnatauan orang asing dan organisasi asing, batas wilayah serta penanganan konflik. Sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kab. Morowali.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2022 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 TC 31

REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan		
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
2	3	5	6	7	8	9	10
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**12.828.968.601**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**			**5.095.289.409**			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**			**3.231.267.379**			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	25 Orang/bulan	2.952.747.379			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	12 Orang/Bulan	278.520.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**%**	**43.000.000**			

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Morowali	2 Orang	43.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**%**	**1.289.782.030**			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali	Paket	394.891.015			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	Kab. Morowali	100 %	100.000.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali	Paket	194.891.015			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	600.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**102.400.000**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Laporan	1.500.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Morowali	Laporan	100.000.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Laporan	900.000			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan pemerintahan Daerah**		**%**	**428.840.000**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Morowali	Unit	28.840.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Morowali	Unit	400.000.000			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**		**%**	**392.231.683**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase ASN Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara		**%**	**392.231.683**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	22.231.683			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	200.000.000			

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	170.000.000			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**		**%**	**4.602.831.062**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik**		**%**	**4.602.831.062**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	2.983.790.540			

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	1.619.040.522			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Presentase Pengurus Ormas yang Aktif**		**%**	**527.895.013**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing**		**%**	**527.895.013**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	275.000.000			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	252.895.013			

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan Pelestarian budaya di 10 kecamatan**			**1.135.699.901**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 10 kecamatan**			**1.135.699.901**			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	250.000.000			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	350.000.000			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	535.699.901			

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Daerah Rawan Konflik**			**1.075.021.533**			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda**			**1.075.021.533**			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	375.500.000			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	450.000.000			

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	249.521.533			



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dalam konteks perencanaan pembangunan, Badan Kesbangpol Kabupaten Morowali dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Proses Penyusunan Renja Tahun 2024 didasarkan kepada RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan seperti pada Table dibawah.

Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**12.828.968.601**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**5.095.289.409**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**3.231.267.379**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.952.747.379	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	278.520.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**43.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Morowali	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	43.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1.289.782.030**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	394.891.015	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.891.015	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi, Pusat dan Kab	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	600.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**102.400.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.500.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan pemerintahan Daerah**	900.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**428.840.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28.840.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	**Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	400.000.000	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		Presentase ASN Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	**392.231.683**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	**392.231.683**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	22.231.683	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi, Pusat dan Kab	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**	170.000.000	

3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik**	**4.602.831.062**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**4.602.831.062**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.983.790.540	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	**Presentase Pengurus Ormas yang Aktif**	1.619.040.522	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing**	**527.895.013**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	**527.895.013**	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	275.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	**Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan Pelestarian budaya di 10 kecamatan**	252.895.013	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 10 kecamatan**	**1.135.699.901**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	**1.135.699.901**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	**Persentase Daerah Rawan Konflik**	535.699.901	

6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda**	**1.075.021.533**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**1.075.021.533**	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	375.500.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi, Pusat dan Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	249.521.533	

Bab 3
TUJUAN dan SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pokok-pokok kebijakan program nasional yang terkait dengan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi arah kebijakan daerah.

Beberapa Pokok-pokok Kebijakan program nasional Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali, yaitu :

1. Arah Kebijakan dalam mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya;
   b. Mantapnya kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat;
   c. Menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berbudaya;
   d. Mempertahankan kerukunan antar umat beragama dan menjaga serta mempertahankan keragaman budaya daerah.
2. Arah Kebijakan Politik dan Kewaspadaan Nasional;
   a. Peningkatan kualitas pemberian informasi dalam pemahaman terhadap Politik dan Kewaspadaan Nasional dalam masyarakat;
   b. Mengembangkan penyelenggaraan mediasi dan fasilitasi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
   c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pembinaan Politik dan Kewaspadaan Nasional;
   d. Pembukuan dalam sebuah dokumen Data Base Parpol;

Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme;
2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat;
3. Meningkatkan peran serta perempuan dalam berdemokrasi;
4. Meningkatkan kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih Unggul (revolusi mental);
5. Mengembalikan semangat gotong royong;

6. Menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali adalah isi dari Visi pada Misi kesatu dan ketujuh Bupati Morowali yaitu *Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan Nilai-nilai kebenaran dan keadilan* dan *Mendorong kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama, sarana dan prasana tempat ibadah sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama*.

3.2.1 Tujuan

1. Sebagai acuan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024;
2. Sebagai pedoman pengambilan kebijakan pimpinan daerah untuk melanjutkan program dan kegiatan tahun berikutnya;
3. Sebagai dasar pijakan untuk menyusun strategis kebijakan dalam menyusun program sinergitas antara pemeritah dan pemerintah daerah;

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan tersebut diatas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
2. Menurunya Konflik SARA;
3. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama.

Untuk uraian lebih lengkap mengenai Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 3.2**

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023
Tujuan 1; Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai LAKIP Badan Kesbangpol	
Sasaran 1.1; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP	
Tujuan 2; Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	

beragama Kab Morowali		
Sasaran 2.1 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Demokrasi Daerah	Indeks Demokrasi	
Tujuan 3; Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Angka Kriminalitas	
Sasaran 3.1 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Demokrasi Daerah	Presentase Jumlah Konflik yang Terpetakan	

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bersumber dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Morowali, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023; Menetapkan visi Kabupaten Morowali "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Yang Sejahtera Bersama*" yang memuat misi Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Govermance) melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan nilai nilai kebenaran dan keadilan;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan pendapatan asli daerah dengan melibatkan usaha kecil/menengah local dan koprasi agar lebih bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja local dengan tetap menjaga iklim investasi yang baik dan kelestarian alam;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pembiayaan pendidikan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif inovatif dan bertaqwa;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan gratis, penngkatan kuantitas dan kualitas kesehatan, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasanan sehat dan nyaman;
5. Meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan dan pengembangan bidang infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan kelautan yang didukung oleh kemudahan modal usaha dan tehnologi tepat guna agar tercipta kepastian harga dan pasar;
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, listrik, fasilitas olahraga, perumahan, objek wisata, serta seni dan



budaya sehingga tercipta kehidupan masyaraat yang harmonis dan bahagia;

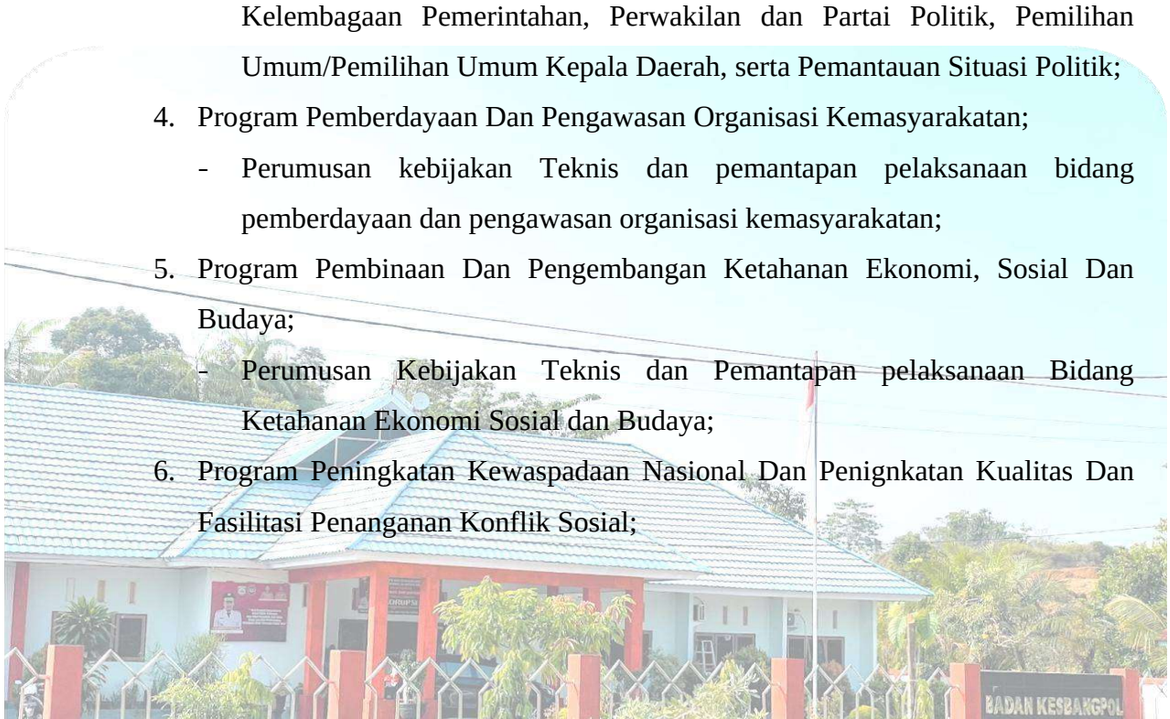
7. Mendorong masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama, sarana dan prasarana tempat ibadah sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat Bergama.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah **Misi 1**"*Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan* **Misi 3**. *Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis berdasarkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama* ".

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

Sesuai uraian misi yang menjadi sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dikembangkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
   - Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengambangan Etika Serta Budaya Politik;
   - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
   - Perumusan kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
   - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Penignkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;



- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dapat dijelaskan bahwa rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD begitupula program dan kegiatan kecuali pagu indikatif yang dimasukan dalam RKPD tidak sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan mengacu kepada ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.

c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**12.828.968.601**					**12.828.968.601**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.095.289.409**					**5.095.289.409**
8	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.231.267.379**					**3.231.267.379**
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	25 Orang/bulan	12 Bulan	2.952.747.379	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	2.952.747.379
8	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	12 Orang/Bulan	12 Bulan	278.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	278.520.000
8	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**43.000.000**					**43.000.000**

8	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Diklat Kepemimpinan (PIM IV)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	2 Orang	43.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	43.000.000
8	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.289.782.030**					**1.289.782.030**
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Paket	100 %	394.891.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	394.891.015
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100.000.000
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Paket	100 %	194.891.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	194.891.015
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	600.000.000
8	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**102.400.000**					**102.400.000**

8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	1.500.000
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100.000.000
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	900.000
8	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**428.840.000**					**428.840.000**
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya servis / jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Unit	100 %	28.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	28.840.000
8	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya servis / jasa pemeliharaan barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Unit	100 %	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	400.000.000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**392.231.683**					**410.474.839**
8	**01**	**02**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**392.231.683**					**410.474.839**

8	01	02	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Presentase ASN dan Pelajar Kaum Milenial yang mengikuti Pembinaan Wawaasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	22.231.683	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	40.474.839
8	01	02	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Presentase ASN dan Pelajar Kaum Milenial yang mengikuti Pembinaan Wawaasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	200.000.000
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase ASN dan Pelajar Kaum Milenial yang mengikuti Pembinaan Wawaasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	100 %	170.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	170.000.000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**4.602.831.062**					**4.816.914.129**
8	**01**	**03**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**4.602.831.062**					**4.816.914.129**

8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tercapainya Parpol yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	2.983.790.540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	100 %	3.983.790.540
8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tercapainya Parpol yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	1.619.040.522	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	100 %	833.123.589
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**527.895.013**					**555.992.365**
8	**01**	**04**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**527.895.013**					**555.992.365**

8	01	04	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Terlaksananya ASN yang mendapatkan pendidikan pelatihan bela negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	275.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	100 %	303.097.352
8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya ASN yang mendapatkan pendidikan pelatihan bela negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	252.895.013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	100 %	252.895.013
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**1.135.699.901**					**1.196.147.830**
8	**01**	**05**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**1.135.699.901**					**1.196.147.830**
8	01	05	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	fasilitasi pencegahan NARKOBA, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	Kegiatan	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	100 %	270.000.000

8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	fasilitasi pencegahan NARKOBA, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	Kegiatan	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	100 %	370.000.000
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	fasilitasi pencegahan NARKOBA, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	Kegiatan	535.699.901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	100 %	556.147.830
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**1.075.021.533**					**1.106.184.844**
8	**01**	**06**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**1.075.021.533**					**1.106.184.844**

8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Daerah Rawan Konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya Hasil Rakor Forkopimda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Orang	100 %	375.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rawan Konflik	100 %	385.500.000
8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Daerah Rawan Konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya Hasil Rakor Forkopimda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rawan Konflik	100 %	455.500.000
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Rawan Konflik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Hasil Rakor Forkopimda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	100 %	249.521.533	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Daerah Rawan Konflik	100 %	265.184.844
												TOTAL	**12.828.968.601**					**12.828.968.601**

Bab 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor–Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan merujuk pada RPD Tahun 2024-2026, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD yang mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan didaerah yang berkelanjutan".

Program/kegiatan Renja Tahun 2024 meliputi sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
   2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
   3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
   1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
   2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/Kegiatan Output	Satuan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							
8	01				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**12.828.968.601**		
8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan**	**%**			**5.095.289.409**		
8	01	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prersentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**%**			**3.231.267.379**		
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kab. Morowali	25 Orang/bulan	2.952.747.379	APBD	
8	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/Bulan	Kab. Morowali	12 Orang/Bulan	278.520.000	APBD	
8	01	01	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**43.000.000**		

8	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kab. Morowali	2 Orang	43.000.000	APBD	
8	01	01	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**1.289.782.030**		
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Morowali	Paket	394.891.015	APBD	
8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	100 %	Kab. Morowali	100 %	100.000.000	APBD	
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Morowali	Paket	194.891.015	APBD	
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	600.000.000	APBD	
8	01	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**%**	**102.400.000**		
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Morowali	Laporan	1.500.000	APBD	
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Morowali	Laporan	100.000.000	APBD	
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kab. Morowali	Laporan	900.000	APBD	
8	01	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan pemerintahan Daerah**	**%**		**%**	**428.840.000**		

8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab. Morowali	Unit	28.840.000	APBD	
8	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Morowali	Unit	400.000.000	APBD	
8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**%**		**%**	**392.231.683**		
8	01	02	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Presentase ASN Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	**%**		**%**	**392.231.683**		
8	01	02	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	22.231.683	APBD	
8	01	02	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	200.000.000	APBD	
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	170.000.000	APBD	

8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik**	**%**		**%**	**4.602.831.062**		
8	**01**	**03**	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik**	**%**		**%**	**4.602.831.062**		
8	01	03	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	2.983.790.540	APBD	
8	01	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	1.619.040.522	APBD	

8	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presentase Pengurus Ormas yang Aktif**	**%**		**%**	**527.895.013**		
8	01	04	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase pelaksanaan koordinasi pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas dan ormas asing**	**%**		**%**	**527.895.013**		
8	01	04	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	275.000.000	APBD	
8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	252.895.013	APBD	
8	01	05			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan Pelestarian budaya di 10 kecamatan**				**1.135.699.901**		
8	01	05	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 10 kecamatan**				**1.135.699.901**		
8	01	05	2,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	250.000.000	APBD	

						Disusun							
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	350.000.000	APBD	
8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	535.699.901	APBD	
8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Daerah Rawan Konflik**				**1.075.021.533**		
8	01	06	2,01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda**				**1.075.021.533**		
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Orang	Provinsi, Pusat dan Kab	Orang	375.500.000	APBD	

					Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
8	01	06	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Provinsi, Pusat dan Kab	Laporan	450.000.000	APBD	
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Provinsi, Pusat dan Kab	Dokumen	249.521.533	APBD	


BADAN KESBANGPOL
MOROWALI

Bab 5
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, sekaligus berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesbangpol, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar terlaksana keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum OPD di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

1. Rencana kerja (Renja) Badan Kesbangpol tahun 2024 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra OPD).
2. Dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Kesbangpol tahun 2024 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita

mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Demikian Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun anggaran 2024.

Bungku, 03 Juli 2024

Kepala Badan ;

Kepala Badan,

Drs. BAMBANG S. SOEKOJO, M. Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19671007 199203 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

TA.2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RidhoNya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Daerah Pangan Kabupaten Morowali 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu dan melanjutkan dari Rentra 2024-2026 berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi daerah dan sektoral.

Rencana Kinerja ini berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Daerah Kabupaten Morowali yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi. Dengan Rencana Kinerja ini diharapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali mampu mewujudkan kinerja yang diharapkan. RKT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali memuat sasaran yang hendak dicapai Tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dengan target capaian Tahun 2024.

Kami berharap semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dan bahan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali.

Bungku. 02 Januari 2024

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

ANDI IRMAN, S.STP. MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19771211219961210 01

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Struktur Organisasi 1

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH4

A. Tujuan 4

B. Sasaran 5

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN 14

A. Rencana Strategis..... 14

B. Indikator Kinerja Utama..... 15

BAB IV PENUTUP 25

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. RKT menggambarkan rancangan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain: sasaran yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan targetnya; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya; serta keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatanyang dilaksanakanoleh instansi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali dalam menyusun rencana anggaran OPD.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Daerah Kabupaten Morowali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

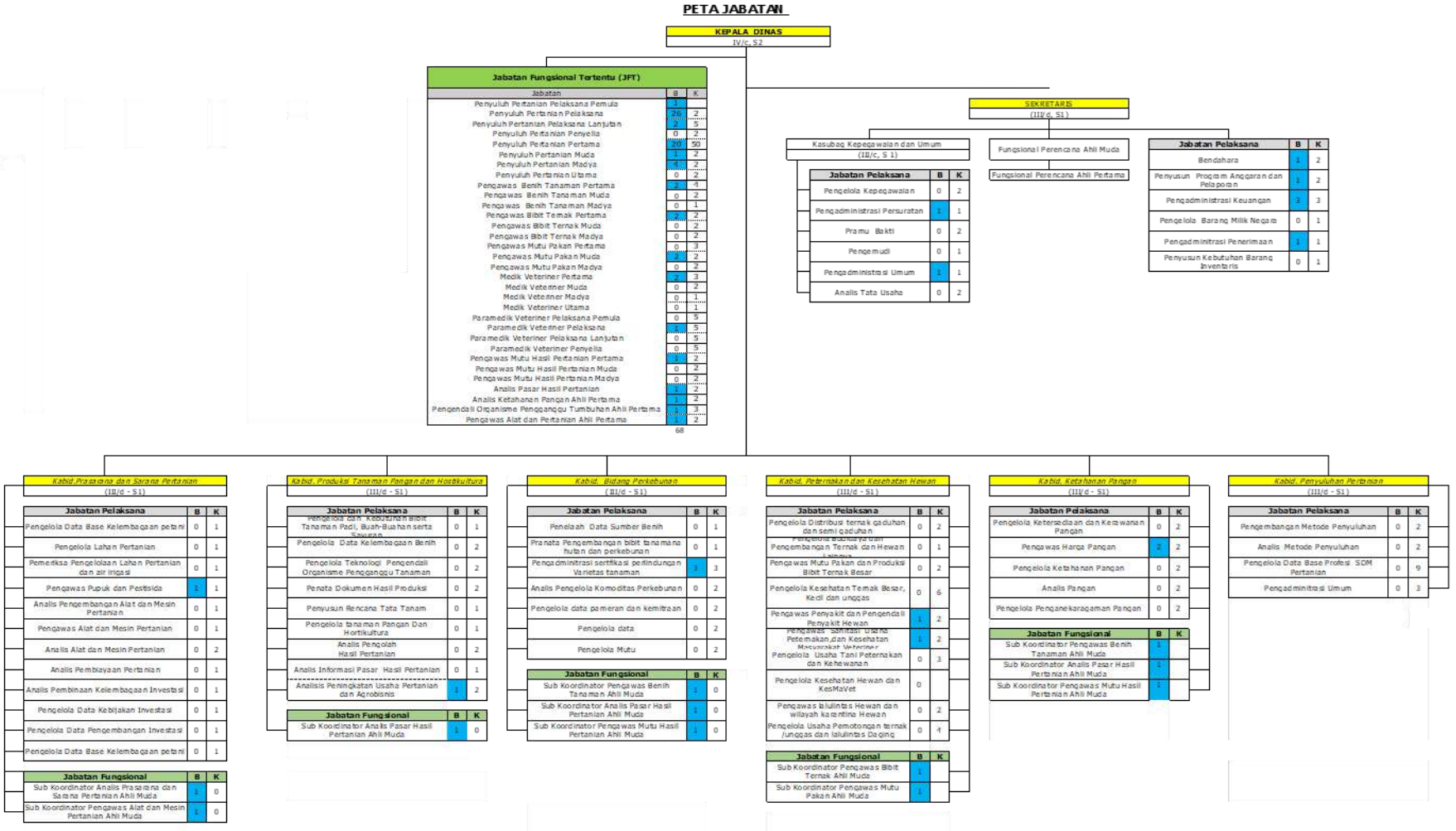
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pertanian Daerah;\
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pertanian Daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pertanian Daerah;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pertanian Daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah terdiri atas:

(1) Kepala Dinas.
(2) Sekretaris, membawahi :
    a. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum dan Umum;
    b. dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
(4) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
(5) Bidang Perkebunan;
(6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(7) Bidang Ketahanan Pangan;
(8) Bidang Penyuluhan Pertanian;
(9) Kelompok Jabatan Fungsional;
(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas;

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MOROWALI



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah telah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali untuk periode 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali adalah gambaran dari arah pembangunan atau kondisi masa depan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Sektor Pertanian dan ketahanan Pangan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun yang akan datang. Renstra menunjukkan apa yang menjadi Prioritas Program Pembangunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali baik dalam upaya mewujudkan dukungan penuh maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan dalam upaya pencapaian RPD Kabupaten Morowali.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 - 2026 adalah :

a. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
b. Pertumbuhan Sektor Pertanian;
c. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerntahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (specific), terukur(measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 - 2026 adalah :

a. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
b. Meningkatkan Kesejahteraan Petani
c. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah;

Rincian Indikator Kinerja yang termuat dalam RPD Kabupaten Morowali 2024-2026 dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Eselon II :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR /TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-			Kondisi Kinerja Pada akhir periode
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Meningkatkan Ketersediaan Pangan**		Capaian Skor Pola Pangan Harapan	Poin	80,4	81	82	82
		Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Pangan	Tersedianya energi dan Protein Perkapita	Kall	80,4	81	82	82
2	**Meningktakan Kesejahteraan Petani**	Meningkatnya kesesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	103	104	105	105
			Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	3,25	3,5	3,75	3,75
		Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian Optimalisasi Kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani	Produksi Hasil Pertanian penyuluhan pertanian	Ton Kegiatan	52500 4	53450 4	54500 4	54500 4
			Produktivtas Pertanian	Ton/Ha	5,2	5,3	5,4	5,4

		Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan	%	90	95	100	100
3.	**Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerntahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel**	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Penilaian LKIP	NIlai	B	BB	A	A
		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Peanilaian SAKIP	Nilai	B	BB	A	A

Eselon III :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1.	Meningkatnya kesesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	103	104	105	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN	
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	3,25%	3,5%	3,75%		
2.	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Produktivitas Pertanian	5.2 Ton/Ha	5,3 Ton/Ha	5,3 Ton/Ha	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan	90%	95%	100%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	

		Persentase pengendalian dan penangulangan bencana pertanian	100%	100%	100%	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
		Optimalisasi Kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani	100%	100%	100%	'PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
3.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persetase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan rakyat	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
		Persetase Peningkatan diversifikasai dan ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	100%	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100%	100%	100%	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

Eselon IV :

No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Sasaran**	**Target Kinerja Tujuan/Sasaran**			**Program**	**Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Anggaran**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun , di rehabilitasi dan di pelihara	80	60	60	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
2	Pembangunan DAM parit	Jumlah DAM Parit yang di bangun , di rehabilitasi dan di pelihara	10	10	10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang	20	21t	22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA	Pembangunan, Rehabilitasi dan	

						PERTANIAN	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
1.	Pembangunan Prasaran pertanian pendukung yang di bangun	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang di bangun , di rehabilitasi dan di pelihara	4	4	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
5	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang di laksanakan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	12	12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
6	pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang di laksanakan	Jumlah pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	12	12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
7	Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	800	900	1000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
6	Pengingkatan Pengendalian Benih/bibit ternak	jumlah Benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1	1	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian Penyediaan Benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	
9	penanganan Penyakit Hewan Menular dalam 1 tahun	Jumlah Wilayah yang mengalamai penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam saru daerah Kabupaten/kota	9	9	9	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
10	Penanggulangan Penyakit hewan menular dalam 1 tahun	Jumlah Daerah terdampak wabah yang terkendali	9	9	9	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	

11	Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium Penyakit hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12	12	12	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
12	Peningkatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (GPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengggganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan yang di kendalikan	1000	1000	100	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (GPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di tingkatkan Kapasitasnya	8	8	8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
13	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang di tingkatkan Kapasitasnya	12	12	12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
14	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertaniaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8	8	8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
15	Bertambahnya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4	4	4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
16	Peningkatan penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang Tersedia	2	3	4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	
17	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur lantai jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang tersedia	2	3	4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur lantai jemur	
18	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per tahun	Konsumsi Pangan Pewrkapita Pertahun	81	81	81	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	

19	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan berbasis pangan lokal	5	5	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber daya lokal	
20	Terlaksanaya Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Komsumsi Pangan Per tahun	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Komsumsi Pertahun	3	3	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Komsumsi Pangan Perkapita/Tahun	
21	Tersedianya Cadangan Pangan dan Pemeliharaan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30	30	30	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengadaan Cadangan Pangan dan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
22	Tersedianya informasi Harga pangan dan neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan makanan	3	3	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan informasi Harga pangan dan neraca Bahan Makanan	
23	Terlaksananya Pemantauan Stok,Pasokan dan harga Pangan	Pemantauan Stock, Pasokan dan harga	9	9	9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemantauan Stok,Pasokan dan harga Pangan lainnya	
24	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	270	270	270	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	eningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
25	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dalam 1 tahun	Peta dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di mutahirkan	1	1	1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
26	Terlaksanya Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada daerah rawanPangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah Kabupaten	6	6	6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	

27	PeningkatanPenguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah kabupaten/Kota yang di bina	9	9	9	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	
28	Terlaksananya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar dalam 1 tahun	Jumlah Setifikasi Keamanan Pangan Segar Daerah	2	3	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) Daerah Kabupaten/Kota	
29	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
30	Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	6	6	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
31	Terbayarnya Gaji ASN dan Honorer	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan honorer	12	12	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
32	Terlaksanya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai structural dan fungsional	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	6	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
33	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan Dokumenter - Jumlah Peralatan Komputer	6	6	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
34	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
35	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	72.779	103164	103164	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
36	terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti dan dilaksanakan	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

37	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
39	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
40	TersedianyaJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	

BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tetang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, dan daerah Otonom baru (DOB).

Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 periode ini bukan merupakan operasionalisasi dari visi dan misi kepada Daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan bupati Morowali pada tahun 2023.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2024 – 2026 memiliki peran dan fungsi yaitu memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja, target dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali dalam menjalankan fungsi dan manajemen koordinasi dan tugas teknis lainnya secara tahunan dalam periode pembangunan tahun 2024 – 2026. Fungsi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).

Tabel. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali
Periode 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya ekonomi, diversifikasi, penangann dan pengawasan daerah rawan Pangan pangan	Meningkatkan Pengelolaan Sumber daya ekonomi Untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas Pangan sehingga terjadi Penganekaragaman komsumsi Pangan Masyarakat
2.	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Meningkatkan Produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan penggunaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Meningkatkan Ketersediaan sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit ternak dan tanaman Peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Optimalisasi Kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam melaksanakan dan mewujudkan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 maka telah disusun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pada Tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2025

No.	Angka Produksi	Kondisi Kinerja Awal Periode 2023 (*)	Target Capaian (Tahunan)			pada Akhir periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	NTP		101,49	101,65	101,80	**101,80**
2	Produktivitas Pertanian (ton		5,65	5,65	5,65	5,66
3	Presentase Jumlah Kasus penyakit hewan		85	90	95	100
4	Pertase Wilayah yang terkena kasus bencana Pertanian		85	90	95	100
5	Jumlah Rekomendasi teknis Usaha Pertanian		34	35	36	36
6	Presentase Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan		50	60	70	100
7	Jumlah Keg. Penyuluh Tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten		16	18	20	20
8	Presentase Desa Mandiri Pangan		80	85	90	100
9	Ketersediaan energi dan protein per kapita		32	33	34	34
10	Persentase daerah rawan pangan tertangani		85	90	95	100
11	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dan diuji		75	80	85	100

Tabel. 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR /TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Meningkatkan Ketersediaan Pangan**		Capaian Skor Pola Pangan Harapan	Poin	81
		Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Pangan	Tersedianya energi dan Protein Perkapita	Kall	81
2	**Meningktakan Kesejahteraan Petani**	Meningkatnya kesesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	104
			Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	3,5
		Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian Optimalisasi Kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani	Produksi Hasil Pertanian penyuluhan pertanian	Ton Kegiatan	53450 4
			Produktivtas Pertanian	Ton/Ha	5,3

		Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan	%	95
3.	**Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerntahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel**	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Penilaian LKIP	NIlai	BB
		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP	Nilai	BB

C. Rencana Kerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan Indikator Utama Tahun 2025, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali merancang Program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun Tabel rencana kerja dapat dilihat pada Tabel berikut :

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan									Rp112.102.263.003,00	Rp1.000.152.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.102.415.383,00	Rp104.412.853.404,00	Rp1.486.569.674,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.899.423.078,00	(Rp7.202.992.305,00)	(6.80)	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp210.791.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.791.900,00	Rp1.384.724.900,00	Rp115.215.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.499.940.050,00	Rp1.289.148.150,00	85.95	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				Rp210.791.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.791.900,00	Rp1.384.724.900,00	Rp115.215.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.499.940.050,00	Rp1.289.148.150,00	85.95	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.215.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.215.150,00	Rp115.215.150,00	100.00	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.215.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.215.150,00	Rp115.215.150,00	100.00	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.215.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.215.150,00	Rp115.215.150,00	100.00	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				Rp157.374.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.374.450,00	Rp1.331.307.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.331.307.450,00	Rp1.173.933.000,00	88.18	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**				Rp129.710.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.710.200,00	Rp758.607.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp758.607.200,00	Rp628.897.000,00	82.90	
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.055.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.055.000,00	Rp427.055.000,00	100.00	
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp129.710.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.710.200,00	Rp129.710.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.710.200,00	Rp0,00	0.00	
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.842.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.842.000,00	Rp201.842.000,00	100.00	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp545.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp545.036.000,00	Rp545.036.000,00	100.00	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Morowali, Semua Kecamatan,		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp545.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp545.036.000,00	Rp545.036.000,00	100.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kelurahan/Desa														
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				Rp27.664.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.664.250,00	Rp27.664.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.664.250,00	Rp0,00	0.00	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.664.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.664.250,00	Rp27.664.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.664.250,00	Rp0,00	0.00	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				Rp26.929.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.929.850,00	Rp26.929.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.929.850,00	Rp0,00	0.00	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**				Rp26.929.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.929.850,00	Rp26.929.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.929.850,00	Rp0,00	0.00	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.929.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.929.850,00	Rp26.929.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.929.850,00	Rp0,00	0.00	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				Rp26.487.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.487.600,00	Rp26.487.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.487.600,00	Rp0,00	0.00	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**				Rp26.487.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.487.600,00	Rp26.487.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.487.600,00	Rp0,00	0.00	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.487.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.487.600,00	Rp26.487.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.487.600,00	Rp0,00	0.00	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp111.891.471.103,00	Rp1.000.152.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.891.623.483,00	Rp103.028.128.504,00	Rp1.371.354.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.399.483.028,00	(Rp8.492.140.455,00)	(8.13)	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				Rp111.891.471.103,00	Rp1.000.152.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.891.623.483,00	Rp103.028.128.504,00	Rp1.371.354.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.399.483.028,00	(Rp8.492.140.455,00)	(8.13)	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp19.761.339.587,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.761.339.587,00	Rp22.383.909.060,00	Rp650.695.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.034.604.780,00	Rp3.273.265.193,00	14.21	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp19.051.563.457,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.051.563.457,00	Rp19.843.842.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.843.842.930,00	Rp792.279.473,00	3.99	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.577.083.457,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.577.083.457,00	Rp16.157.682.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.157.682.930,00	Rp580.599.473,00	3.59	
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.474.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.474.480.000,00	Rp3.686.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.686.160.000,00	Rp211.680.000,00	5.74	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp112.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.600.000,00	Rp1.827.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.827.770.000,00	Rp1.715.170.000,00	93.84	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp112.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.600.000,00	Rp1.827.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.827.770.000,00	Rp1.715.170.000,00	93.84	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp439.874.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.874.130,00	Rp482.994.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp482.994.130,00	Rp43.120.000,00	8.93	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.579.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.579.930,00	Rp88.579.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.579.930,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.053.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.053.200,00	Rp57.053.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.053.200,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp294.241.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp294.241.000,00	Rp337.361.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp337.361.000,00	Rp43.120.000,00	12.78	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.695.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.695.720,00	Rp650.695.720,00	100.00	
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.695.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.695.720,00	Rp650.695.720,00	100.00	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp49.302.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.302.000,00	Rp49.302.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.302.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.402.000,00	Rp48.402.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.402.000,00	Rp0,00	0.00	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp108.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp72.000.000,00	40.00	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp108.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp72.000.000,00	40.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								T-1	Sebelum					Setelah						T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				Rp69.480.491.298,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.480.491.298,00	Rp46.423.334.742,00	Rp714.158.804,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.137.493.546,00	(Rp22.342.997.752,00)	(47.40)	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				Rp26.692.740.385,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.692.740.385,00	Rp37.162.181.253,00	Rp675.908.804,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.838.090.057,00	Rp11.145.349.672,00	29.46	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.913.038.385,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.913.038.385,00	Rp34.602.310.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.602.310.059,00	Rp9.689.271.674,00	28.00	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.779.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.779.702.000,00	Rp2.559.871.194,00	Rp675.908.804,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.235.779.998,00	Rp1.456.077.998,00	45.00	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**				Rp42.787.750.913,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.787.750.913,00	Rp9.261.153.489,00	Rp38.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.299.403.489,00	(Rp33.488.347.424,00)	(360.11)	
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.787.750.913,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.787.750.913,00	Rp9.261.153.489,00	Rp38.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.299.403.489,00	(Rp33.488.347.424,00)	(360.11)	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				Rp16.813.606.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.813.606.500,00	Rp30.077.189.804,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.077.189.804,00	Rp13.263.583.304,00	44.10	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.294.104.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.294.104.600,00	Rp3.294.104.600,00	100.00	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.294.104.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.294.104.600,00	Rp3.294.104.600,00	100.00	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**				Rp16.813.606.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.813.606.500,00	Rp26.783.085.204,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.783.085.204,00	Rp9.969.478.704,00	37.22	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.803.306.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.803.306.500,00	Rp26.423.578.004,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.423.578.004,00	Rp9.620.271.504,00	36.41	

Januari	Rp1.439.461.664,00
Februari	Rp1.486.811.664,00
Maret	Rp2.561.790.495,00
April	Rp14.302.705.390,00
Mei	Rp2.297.472.410,00
Juni	Rp2.591.317.230,00
Juli	Rp1.110.324.518,00
Agustus	Rp1.325.744.459,00
September	Rp1.500.077.177,00
Oktober	Rp32.037.326.342,00
November	Rp25.939.420.167,00
Desember	Rp19.306.971.562,00
Jumlah	**Rp105.899.423.078,00**

AIRMAN, S.STP, MM
NIP. 197712121996121001

Mengesahkan,
PPKD

ALAMSYAH, S.STP,M.Ec.Dev
NIP. 198201302001121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	CHAIRUL FARDHAN, S.STP, M. Adm. Pemb	198608242004121002	KETUA	
2.	EDIYANTO ABD. SALAM, SE	197812092007011006	ANGGOTA	
3.	LILIANI NANTE, SE	198005282011012001	ANGGOTA	

*) Sesuai periodisasi SPD

3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian; DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp410.942.616,00	Rp993.652.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.404.594.996,00	Rp1.404.594.996,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.404.594.996,00	Rp0,00	0.00	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.170.684.402,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.170.684.402,00	Rp2.171.522.402,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.171.522.402,00	(Rp2.999.162.000,00)	(138.11)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Bungku, Tanggal 28 Oktober 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali untuk tahun yang bersangkutan. RKT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali memuat sasaran dan pencapaian target indikator kinerja utama Tahun 2024. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun dapat menjadi panduan yang baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali dapat tercapai.

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN MOROWALI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat Rahmat dan Ridho–Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja ini, tidak terlepas dari bantuan moril dan kerjasama seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan dan menyelaraskan program perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali. Olehnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan sampai penyusunan Rencana Kerja ini.

Disadari bahwa penyususnan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai perbaikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik.

Semoga Rencana ini dapat bermanfaat bagi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali maupun pihak yang terkait serta menjadi bahan informasi dan evaluasi.

Tanggal 2 Februari 2024
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI NAKERTRANS

SHAHAD, ST
NIP 19790528200[illegible]9041004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TRANMIGRASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2022 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra..... 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 13
2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD 13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 20
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasioan 20
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 20
3.3. Program dan Kegiatan..... 21
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis 54

BAB IV PENUTUP..... 28
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja..... 28
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 28
5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 29

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Dasar Pengukuran Kinerja Sasaran yang Telah Dicapai Tahun 2022 5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali 10
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 14
Tabel 2.4 Telaahan Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ... 19
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 20
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui kebijakan umum Anggaran Priorotas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan rencana kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Morowali.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Daerah Kabupaten Morowali secara substansif tidak berdiri sendiri, dokumen ini berkait dengan keberadan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana kerja ini, memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, RPJM Provinsi Sulawesi Tengah, Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024, diarahkan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan rencana program kerja tahunan selama tahun 2024.

Sedangkan fungsinya dalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Morowali.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 No.22);
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penampatan Tenaga Kerja;
9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dimaksudkan untuk mementukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sector Tenga Kerja dan Transmigrasi tahun berjalan.

Rencana Kerja OPD tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi OPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi OPD saat ini, serta estimiasi yang akan datang, sedangkan tujuan penyusunan renja adalah :

1) Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja penyusunan rencana program kegiatan.
2) Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3) Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Tahunan ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja pada Tahun 2022 dan Capaiannya
- 2.2. Analis Kinerja Pelayanan pada Tahun 2022
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Reviuw Terhadap Rancangan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1. Telaahan dan Sasaran Renja OPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 4.1. Rencana Program dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pimpinan Kementrian/ Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing – masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Rencana kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai Tahun 2022.

Tabel 2.1
Dasar Pengukuran Kinerja Sasaran yang telah Dicapai Tahun 2022

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcames)*/Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun….	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegaiatan (Renja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honor Tenaga Administrasi dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi/Unit	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlegkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	4. Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcames)*/Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun….	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegaiatan (Renja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		dalam 1 Tahun								
	7. Pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	8. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	9. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	10. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	11. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	12. Kegiatan Mengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcames)*/Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun….	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegaiatan (Renja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional dalam 1 Tahun	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100	12 Bln	12 Bln	100
	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja									
	1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan dalam 1 Tahun	32 Orang	92 Orang	32 Orang	92 Orang	288	48 Orang	232 Orang	5.800
	2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaha Swasta yang Dibina dalam 1 Tahun	32 Lembaga	80 Lembaga	32 Lembaga	80 Lembaga	250	30 Lembaga	190 Lembaga	594
	Program Penempatan Tenaga Kerja									
	1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data IPK secara Online dalam 1 Tahun	5.000 Calon TK	9.534 Calon TK	5.000 Calon TK	9.534 Calon TK	191	9.534 Calon TK	28.602 Orang	572
	2. Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang Mengkuti Job Fair/Bursa Kerja dalam 1 Tahun	20 Perusahaan	0	20 Perusahaan	35 Perusahaan	175	0	35 Perusahaan	175
	3. Penerbitan perpanjangan IMTA lokasi kerja dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah TKA dalam Perpanjangan IMTA dalam 1 Tahun	4.112 TKA	4.035 TKA	5.410 TKA	4.758 TKA	88	4.580 TKA	13.373 TKA	325
	Program Hubungan Industrial									

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcames)*/Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun….	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegaiatan (Renja Perangkat Daerah (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan	32 PP	32 PP	32 PP	17 PP	53	5 PP	54 PP	169
	2. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	32 PKB	1 PKB	32 PKB	1 PKB	3,1	2 PKB	4 PKB	12,5
	3. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI	Jumlah Perselisihan yang Terselesaikan	32 Kasus	18 Kasus	32 Kasus	6 Kasus	19	85 Kasus	109 Kasus	341
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi									
	1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Unit Transmigrasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100	1 Lokasi	1 Lokasi	100
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi									
	1. Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasal Daerah/Kota	Jumlah Unit Transmigrasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100	1 Lokasi	1 Lokasi	100
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi									
	1. Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigrasi yang Terbina	325 KK	0	174 KK	15 KK	100	175 KK	349 KK	107

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian indikator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali tidak sesuai dengan target, dimana ada beberapa indikator yang tidak dilaksnakan dalam program dan kegiatan. Ada pula indikator yang melebihi dari target Renstra yang telah ditetapkan. Termasuk ada kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBN.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun ….. (thn n-2)	Tahun ….. (thn n-1)	Tahun ….. (thn n)	Tahun ….. (thn n+1)	Tahun ….. (thn n-2)	Tahun ….. (thn n-1)	Tahun ….. (thn n)	Tahun ….. (thn n + 1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase penduduk miskin di lokasi transmigrasi	Cakupan Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	174 KK	175 KK	75 KK	50 KK	15 KK	50 KK	75 KK	50 KK	
		Cakupan Lahan Pemukiman yang Tersertifikasi	Jumlah Lahan Pemukiman yang Tersertifikasi	1.050 Bidang	450 Bidang	700 Bidang	800 Bidang	1.509 Bidang	450 Bidang	700 Bidang	800 Bidang	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Cakupan Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Na	36 Perusahaan	40 Perusahaan	43 Persusahaan	35 Perusahaan	36 Perusahaan	40 Perusahaan	43 Persusahaan	
		Cakupan Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	128 Orang	112 Orang	180 Orang	190 Orang	164 Orang	112 Orang	180 Orang	190 Orang	
		Cakupan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	
		Cakupan Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1.500 Orang	2.000 Orang	2.300 Orang	2.350 Orang	2.335 Orang	2.500 Orang	2.300 Orang	2.350 Orang	
		Cakupan LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun ….. (thn n-2)	Tahun ….. (thn n-1)	Tahun ….. (thn n)	Tahun ….. (thn n+1)	Tahun ….. (thn n-2)	Tahun ….. (thn n-1)	Tahun ….. (thn n)	Tahun ….. (thn n + 1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Cakupan Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5.000 Orang	9.534 Orang	10.800 Orang	11.200 Orang	9.534 Orang	9.534 Orang	10.800 Orang	11.200 Orang	
		Cakupan Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	300 Orang	Na	100 Orang	110 Orang	72 Orang	Na	100 Orang	110 Orang	
		Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	5.410 TKA	4.580 TKA	5.555 TKA	5.620 TKA	5.250 TKA	4.580 TKA	5.555 TKA	5.620 TKA	
		Cakupan Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	17 Perusahaan	17 Perusahaan	18 Perusahaan	18 Perusahaan	17 Perusahaan	17 Perusahaan	18 Perusahaan	18 Perusahaan	
		Cakupan Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	1 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	2 Perusahaan	
		Cakupan Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Perusahaa	45 Perusahaan	65 Perusahaan	69 Perusahaan	63 Perusahaan	60 Perusahaan	65 Perusahaan	69 Perusahaan	
		Cakupan Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	48 Kasus	15 Kasus	10 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	15 Kasus	10 Kasus	17 Kasus	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun ….. (thn n-2)	Tahun ….. (thn n-1)	Tahun ….. (thn n)	Tahun ….. (thn n+1)	Tahun ….. (thn n-2)	Tahun ….. (thn n-1)	Tahun ….. (thn n)	Tahun ….. (thn n + 1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Cakupan Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	32 Kasus	85 Kasus	15 Kasus	18 Kasus	6 Kasus	85 Kasus	15 Kasus	18 Kasus	
		Cakupan Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Serikat	15 Serikat	18 Serikat	21 Serikat	16 Serikat	15 Serikat	18 Serikat	21 Serikat	
		Cakupan LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melakasnakan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali, diperlukan penanganan yang khusus mengenai permasalahan Tenaga Kerja, dimana terkait dengan Keterampilan tenaga kerja (skill), perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, dan permasalahan tumpang tindih lahan Transmigrasi.

Permasalahan Tenaga kerja saat ini menjadi primadona diKabupaten Morowali, dimana Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang terampil, yang memiliki skill dan keahlian, unuk memenuhi hal tersebut diperlukannya pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja, sehingga kedepan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Morowali memiliki keahlian dibidangnya masing masing.

Dengan adanya Perusahaan yang memepekerjakan tenga kerja, tentu banyak permasalahan hukum ketenagakerjaan yang terjadi, hal ini perlu antisipasi dan penanganan khusus agar permasalah dimaksud dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian pula dengan adanya permasalahan Transmigrasi, dimana masalah lahan terjadinya tumpang tindih lahan, perlu adanya penanganan khusus unuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana hak kepemilikan lahan transmigrasi bagi warga transmigrasi perlu dibuatkan sertifikasi.

2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2024 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah			**Nilai AKIP Dinas Transnaker**	**B**					
Meningkatknya Kinerja Dinas Transnaker			Persentase Hasil Kinerja Dinas Transnaker	80					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (%)**	**100**	**1,049,123,900.00**				
a. Administrasi Umum									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah jasa sumber air dan listrik dalam 1 tahun	12	94,000,000.00				
2	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan		Jumlah honor tenaga administrasi dalam 1 tahun	12	550,000,000.00				
3	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		Jumlah iuran kebersihan kantor dalam 1 tahun	12	7,500,000.00				
4	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja		Jumlah perbaikan peralatan kerja dalam 1 tahun	12	60,000,000.00				
5	Penyediaan jasa Peayanan Umum Kantor		Jumlah Pelayanan Umum dalam 1 tahun	12	65,000,0000.00				
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ATK dalam 1 tahun	12	90,000,000.00				
7	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	12	100,000,000.00				
8	Penyediaan bahan logistik kantor		Jujamlah logistik dalam 1 tahun	12	75,000,000.00				
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12	75,000,000.00				
10	Penyediaan Makanan dan minuman		Jumlah makan dan minum dalam 1 tahun	12	80,000,000.00				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah dalam 1 tahun	12	400,000,000.00				
12	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan operasional dinas dalam 1 tahun	3	125,000,000.00				
13	Pengadaan mebel		Jumlah mebuler dalam 1 tahun	12	200,000,000.00				
14	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun	12	95,000,000.00				
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlegkapan kantor		Jumlah jasa peraltan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	12	60,000,000.00				
16	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	76.9	110,000,000.00				
17	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah Aparatur Si[pil Nagara yang mengikuti PIM	4	110,000,000.00				
Menurunkan penduduk miskin di lokasi transmigrasi			**Persentase penduduk miskin di lokasi transmigrasi**	**8**					
Meningkatnya pendapatan perkapita warga transmigrasi			***Rata-rata pendapatan perkapita warga transmigrasi pertahun***						
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			**Indeks pengembangan satuan pemukiman**	**12.4**	**511,395,648.17**				
a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			Indeks pengembangan satuan pemukiman	12.4	511,395,648.17				
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang	75	266,395,684.17				
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Lahan Pemukiman yang Tersertifikasi	700	245,000,000.00				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dipasar Kerja			**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**3.5**					
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Lokal			***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***						
Program Perencanaan Tenaga Kerja			**Persentase Perusahaan yang Menysun RTK**	**63.5**	**110,327,322.20**				
a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Persentase Perusahaan yang Menysun RTK	63.5	110,327,322.20				
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	40	110,327,322.20				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			**Indeks Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**51.0**	**1,489,050,472.95**				
a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.0	1,414,050,472,95				
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	180	1,414,050,472,95				
b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100	75,000,000.00				
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4	75,000,000.00				
Program Penempatan Tenaga Kerja			**Indeks Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**62.2**	**930,327,322.20**				
a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	24.12	150,000,000.00				
1	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan	2,300	150,000,000.00				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Kerja						
b.	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah		Persentase LPTKS yang memiliki Izin	100	35,000,000.00				
1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4	35,000,000.00				
c.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Indeks Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online serta yang ditempatkan melalui Job Fair	74.32	285,000,000.00				
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem	10,800	85,000,000.00				
2	Job Fair /Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100	200,000,000.00				
d.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase TKA dalam perpanjangan RPTKA	50.5	350,000,000.00				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	5,555	350,000,000.00				
Program Hubungan Industrial			**Indeks Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan**	**71.8**	**643,778,266.15**				
a.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Morowali	43.6	340,000,000.00				
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	18	30,000,000.00				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online						
2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	30,000,000.00				
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	65	280,000,000.00				
b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Tripartit	100	303,778,266.15				
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10	118,000,000.00				
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15	92,000,000.00				
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18	48,000,000.00				
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	45,778,266.15				

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal penelaahan usulan program dan kegiatan tahun 2024, dimana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak menerima usulan baik dari masyarakat ataupun lembaga lainnya tentang program dan kegiatan yang akan disesuaikan dengan program dan kegiatan tahun 2024, sehingga Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hanya menelaah berdasarkan isu-isu penting , diperlukan penelaahan lebih lanjut, dimana dengan target yang direncanakan maka Program dan kegiatan dimaksud sebagian akan diusahakan melalui dana APBN, agar target yang telah ditentukan dapat tercapai. Kegiatan dimaksud adalah Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Tabel 2.4
Telaahan Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**		**Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi**		
	▪ Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	LLK	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi (jenis kompetensi)	80 orang	Dana APBN

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas percepatan penurunan angka kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai OPD yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPD sebagai berikut:

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
2) Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
3) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Dari Program tersebut di atas akan disesuaikan dengan program-program kementerian terkait.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai Dinas Transmigrasi dan Teanaga Kerja Kabupaten Morowali adalah meningkatkan Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPD dan Renstra sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2024
Menurunkan penduduk miskin di lokasi transmigrasi	Meningkatnya pendapatan perkapita warga transmigrasi	Persentase penduduk miskin di lokasi transmigrasi	8,0%
		Rata-rata pendapatan perkapita warga transmigrasi pertahun	Rp. 34.200.000,00
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dipasar Kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,02%

3.3. Program dan Kegiatan

Peran dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk teruitama pencari kerja. Hal ini dilandasi dengan tersedianya lapangan kerja di Kabupaten Morowali.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tujuan yang akan dicapai Dinas Transigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani transmigrasi.

Adapun rumusan rencana Program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
    a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
    a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
    a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
    b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
    a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
    b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah
    c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
    d. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Hubungan Industrial
    a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Dari Program dan kegiatan di atas, ada kegiatan dilaksanakan di LLK, UPT dan lain lain, dimana pagu yang dibutuhkan dalam pelaksnaan program dan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 4.734.002.931,67 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		**100%**	**4.734.002.931,67**	APBD II			**4.711.406.273,54**
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100**	**1,049,123,900.00**	APBD II			**862,000,000.00**
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Dinas Transnaker	12	94,000,000.00	APBD II		12	94,000,000.00
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Dinas Transnaker	12	550,000,000.00	APBD II		12	550,000,000.00
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Dinas Transnaker	12	7,500,000.00	APBD II		12	10,000,000.00
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Dinas Transnaker	12	60,000,000.00	APBD II		12	60,000,000.00
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan jasa Peayanan Umum Kantor	Dinas Transnaker	12	65,000,0000.00	APBD II		12	65,000,0000.00
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Transnaker	12	90,000,000.00	APBD II		12	90,000,000.00
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Dinas Transnaker	12	100,000,000.00	APBD II		12	100,000,000.00
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Transnaker	12	75,000,000.00	APBD II		12	75,000,000.00
X.XX.01.2.03.18	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Transnaker	12	75,000,000.00	APBD II		12	75,000,000.00
X.XX.01.2.03.20	Penyediaan Makanan dan minuman	Dinas Transnaker	12	80,000,000.00	APBD II		12	80,000,000.00
X.XX.01.2.0.25	Rapat-Rapat Kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Transnaker	12	400,000,000.00	APBD II		12	400,000,000.00
X.XX.01.2.03.30	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Transnaker	3	125,000,000.00	APBD II		3	125,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
X.XX.01.2.03.02	Pengadaan mebel	Dinas Transnaker	12	200,000,000.00	APBD II			
X.XX.01.2.03.02	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Dinas Transnaker	12	95,000,000.00	APBD II		12	95,000,000.00
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlegkapan kantor	Dinas Transnaker	12	60,000,000.00	APBD II		12	60,000,000.00
X.XX.01.2.03.02	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Transnaker	76.9	110,000,000.00	APBD II		92.3	110,000,000.00
X.XX.01.2.03.02	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Transnaker	4	110,000,000.00	APBD II		4	110,000,000.00
	Menurunkan penduduk miskin di lokasi transmigrasi ***Meningkatnya pendapatan perkapita warga transmigrasi***		**8**				**10**	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		**12.4**	**511,395,648.17**	APBD II		**12.7**	**535,181,296.77**
X.XX.01.2.03.02	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Morowali	12.4	511,395,648.17	APBD II		12.7	535,181,296.77
	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dipasar Kerja ***Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Lokal***		**3.5**				**3.35**	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja		**63.5**	**110,327,322.20**	APBD II		**68.3**	**108,597,936.24**
X.XX.01.2.03.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Morowali	63.5	110,327,322.20	APBD II		68.3	108,597,936.24
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		**51.0**	**1,489,050,472.95**	APBD II		**51.1**	**1,558,307,955.52**
X.XX.01.2.03.02	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	LLK	2.0	1,414,050,472,95	APBD II		2.1	1,458,307,955,52
X.XX.01.2.03.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Morowali	100	75,000,000.00	APBD II		100	100,000,000.00
	Program Penempatan Tenaga Kerja		**62.2**	**930,327,322.20**	APBD II		**62.5**	**973,597,936.24**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
X.XX.01.2.03.02	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Morowali, Palu	24.12	150,000,000.00	APBD II		24,65	165.000.000.00
X.XX.01.2.03.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah	Morowali, Palu	100	35,000,000.00	APBD II		100	35,000,000.00
X.XX.01.2.03.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Bungku, Palu, Jakarta	74.32	285,000,000.00	APBD II		74.34	300,000,000.00
X.XX.01.2.03.02	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bungku, Palu, Luwuk, Jakarta	50.5	350,000,000.00	APBD II		51.1	365,000,000.00
	Program Hubungan Industrial		**71.8**	**643,778,266.15**	APBD II		**71.7**	**673,721,147.77**
X.XX.01.2.03.02	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bungku, Palu ,Jakarta	43.6	340,000,000.00	APBD II		43.5	350,000,000.00
X.XX.01.2.03.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Bungku, Palu	100	303,778,266.15	APBD II		100	323,721,147.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor–Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan merujuk pada RPJMD Tahun 2022-2023, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD yang mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan didaerah yang berkelanjutan".

Program/kegiatan Renja Tahun 2024 meliputi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik
b) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
c) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
d) Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
e) Penyediaan jasa Peayanan Umum Kantor
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
g) Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
h) Penyediaan bahan logistic kantor
i) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
j) Penyediaan Makanan dan minuman
k) Rapat-Rapat Kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
l) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
m) Pengadaan mebel
n) Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas
o) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlegkapan kantor
p) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
q) Pendidikan dan pelatihan formal

2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
   a) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
3. Program Perencanaan Tenaga Kerja
   a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

5. Program Penempatan Tenaga Kerja
   a) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
   b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah
   c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   d) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Hubungan Industrial
   a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2023. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 tersebut, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2) Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3) Penyusunan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.
4) Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5) Rencana Kerja (RENJA) OPD, didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPD, RPJPD Provinsi, RPJP, RKPD Provinsi, RPD Kabupaten Morowali dan Renstra Dinas).
6) RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2) Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4) Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5) Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6) Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7) Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8) Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9) Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Bungku, 12 Februari 2024
Kepala Dinas

[illegible]MAD, ST
NIP. [illegible]7905282009041004

PEMERINTAH DAERAH
KAB. MOROWALI
SULAWESI TENGAH

RENCANA KERJA
RENJA
2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. Morowali

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko 94973

Made with PosterMyWall.com

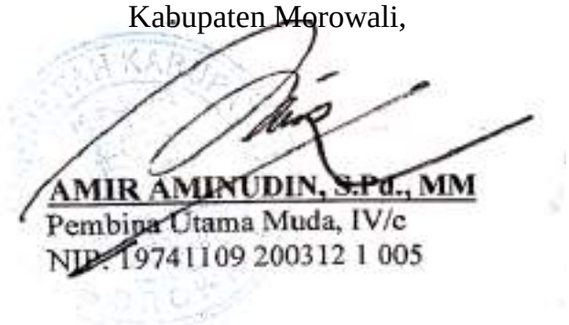
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah selesai disusun. Sesuai Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program. Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) dipakai acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dipakai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat disusun, dan merupakan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di sektor Pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Aaamiin

Bungku, 21 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kabupaten Morowali,



AMIR AMINUDIN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19741109 200312 1 005

DAFTAR ISI

Hal

KATAPENGANTAR..... i

DAFTARISI..... ii

BAB. I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 DASAR HUKUM..... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 3

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN…..…..... 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 …… 5

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 ... 5

2.2 ANIALISIS KERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 5

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 10

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 18

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 ... 33

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 33

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA 2024 34

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN OPD..... 36

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 45

BAB. VI PENUTUP..... 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan suatu perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan komprehensif. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan arah pembangunan baik dalam skala daerah maupun nasional. Sistem perencanaan nasional dan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua aturan tersebut mengemukakan bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu dokumen perencanaan adalah menyusun rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) wajib membuat Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mewujudkan *Good Governance*. Pelaksanaan pembangunan dan penerapan program yang terencana, tepat sasaran, jelas dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diukur sejauhmana keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024- 2026, yang tidak terlepas dari keterkaitan dengan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Tahun 2024 berisi tentang hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya,program dan kegiatan yang belum dicapai saat itu disempurnakan dalam rencana kerja tahun berikutnya. Hasil evaluasi dari program dan kegiatan tersebut dianalisa tingkat ketercapaiannya dengan sasaran yang akan dituju, melalui indikator yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis maupun tingkat capaian kinerja program dan kegiatan dari tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi kewenangan oleh Bupati Morowali untuk mengelola Pendidikan dan Kebudayaan maka dalam pelaksanaannya akan memperhatikan renja yang substansinya linear dengan visi dan misi kepala daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Morowali Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Morowali Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali.
2. Sebagai salah satu dokumen pendukung untuk bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektororal dan lintas tingkatan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi) baik dari segi pembiayaan maupun pengambilan kebijakan.
3. Sebagai salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan tahunan bidang pendidikan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Morowali, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sebagai salah satu pendukung yang menjabarkan rencana pencapaian pembangunan khususnya pada bidang pendidikan baik yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Morowali.
5. Sebagai pemenuhan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini berisi tentang rencana kerja serta pendanaan tahun 2024 sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali merupakan periode pertama dari pembangunan 3 tahun periode 2024 – 2026. Seiring Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024, rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali sangat didominasi dengan peningkatan Pendidikan.

Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan Pendidikan Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Terlampir)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2024

Perangkat Daerah : **Dinas Pendidikan Daerah dan Kebudayaan Kabupaten Morowali**
Periode / Tahun : **2023**
Prakiraan Maju : **2024**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

							(Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kab. Morowali) Tahun 2024	Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Wajib									
1	01	1			Bidang Urusan Pendidikan									
1					**Urusan Wajib**									
1	01	1			**Bidang Urusan Pendidikan**									
1	01	02			**PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN**	**Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan**		**91,17%**	58,13%	58,13%	**100%**	78,15%		
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar		89,54%	46,48%	46,48%	**100%**	74,64%		
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	26	20	17	85%	20	63	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16	30	2	2	100%	1	33	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	6	7	7	100%	1	14	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6	1	3	6	100%	1	8	

1	01	02	2.01	06		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	16	9	9	100%	1	26	
1	01	02	2.01	07		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6	11	0	0	0	9	20	
1	01	02	2.01	08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	8	10	43	43	100%	7	60	
1	01	02	2.01	09		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	0	0		10	10	
1	01	02	2.01	014		Pengadaan mebel sekolahg	Jumlah mebel sekolah yang tersedia		3169	-	-		20	3189	
1	01	02	2.01	16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23	0	197	197	100%		197	
1	01	02	2.01	17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2300	0	0	0	0	2000	2000	
1	01	02	2.01	23		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	184	143	146	146	100%	184	473	
1	01	02	2.01	25		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250	0	125	125	100%	250	375	
1	01	02	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	386	401	554	554	100%	554	1509	

1	01	02	2.01	27	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	184	0	90	90	100%	184	274	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	144	143	146	146	100%	144	433	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0	143	146	0	100%	140	283	
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140	429	438	438	100%	140	1007	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		92,82%	79,35%	79,35%	100%	86,83%	259%	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	28	11	3	3	100%	10	24	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	2	6	6	100%	10	18	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	6	0	0	0%	10	16	
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3	4	0	0	0%	5	9	

1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	4	3	3	100%	10	17	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	9	13	13	100%	1	23	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1	2724	3024	3024	100%	3214	5749	
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8	600	197	197	100%	5	802	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1000	1858	1858	1858	100%	1000	4716	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	0	115	115	100%	150	265	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350	428	414	414	100%	414	1192	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0	36	36	36	100%	45	117	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100	0	0	0	0%	100	100	
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		93,17%	58,23%	58,23%		63,98%		

1	01	02	2.03	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	13	10	1	1	100%	1	12	
1	01	02	2.03	11		Penyediaan Biaya Personil Perserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1889	1052	8773	8773	100%	1889	11714	
1	01	02	2.03	14		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	70	243	243	243	100%	70	556	
1	01	02	2.03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	176	144	178	178	100%	380	498	
1	01	02	2.03	16		Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	176	75	100	100	100%	176	351	
1	01	02	2.03	17		Pembinaan Kelembangan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	176	243	243	243	100%	176	662	
1	01	02	2.03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)	176	0	243	0	0%	176	662	
1	01	02	2.03	19		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1750	0	243	243	100%	1750	2236	
1	01	02	2.04			**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		90%	100%	23,88%		100%		

1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100	1452	1511	1511	100%	100	3063	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)	0	0	10	10	100%	10	30	
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan		97,47%	98%	98%	100%	99%		
1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar**	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar		95%	100%	98%	99%	100%		
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	0	0	0	0%	1	1	
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1	180	174	174	100%	360	355	
1	01	03			**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal**	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal		98,3%	100%	0%	0%	100%		
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2	2	0	0	0%	2	4	
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik**		99,82%	5,56%	84,77%	100%	5,56%		

1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan**			85,77%	100%	84,77%	90%	78,77%		
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5	4	4	4	100%	5	13	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							100%		
2	22				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							100%		
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			95%	100%	95%	99%	100%		
2	22	02	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			99,12%	100%	90%	98%	100%		

2	22	02	2.02	01		Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6	15	15	15	100%	10	31	
2	22	02	2.02	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber DayaManusia, Lembaga, dan Pranata adat yang dibina	10	12	2	2	100%	10	220	
2	22	02	2.02	03		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	4	0	0	0	0%	0	0	
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Presentase Cagar Budaya Yang di Lestarikan**		0	0%	0%	0%	100%		
2	22	05	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	0	0	0	0%	1	0	
2	22	05	2.01	02		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang ditetapkan	14	0	0	0	0%	1	1	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026, draft Rencana Strategis 2024-2026 dan hasil evaluasi indikator kinerja yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali sampai dengan Tahun 2022, diketahui bahwa beberapa indikator dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Penilaian capaian target tersebut juga dilakukan terhadap beberapa capaian indikator yang belum masuk dalam Renstra. Secara lebih jelas indikator-indikator dimaksud dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Daerah

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2024-2025

No	Indikator SPM	Jenjang	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1	A. 1 Skor Kemampuan Literasi	SD	42,86	45,36	47,44	49,81	52,05	52,18	55,60
2	A. 1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	54,89	57,39	58,65	61,58	62,01	64,52	68,08
3	A. 2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	31,87	35,17	35,83	37,26	40,98	38,70	42,74
4	A. 2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	54,89	55,99	58,65	61	56,33	61,00	63,50
5	B. 10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	85,7	100	79	100	63,21	100,00	100,00
6	B. 13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	SD/SMP	97,22	100	96,33	100	96,19	100,00	100,00
7	B. 15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Kesetaraan	22,97	100	24,4	100	35,13	100,00	100,00
8	B. 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	54,55	54,58	51,11	51,14	55,70	51,17	55,76
9	C. 1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	32,58	34,46	33,46	34,66	41,24	36,16	43,44
10	D. 10 Iklim Inkluivitas	SD	53,47	55,57	55,47	58,57	53,01	61,67	62,87

11	D. 10 Iklim Inkluivitas	SMP	53,47	56,47	54,84	57,94	56,60	61,04	63,33
12	D.4 Iklim Keamanan	SD	66,75	68,29	66,49	70,03	70,49	73,57	76,21
13	D.4 Iklim Keamanan	SMP	66,75	67,75	65,23	68,57	69,43	71,91	73,99
14	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	59,03	61,53	66,24	68,93	71,44	71,42	76,39
15	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	59,03	61,24	65,37	67,58	73,93	69,79	78,21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitanya dengan keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Batam mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian untuk lebih di tingkatkan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Akses dan pemerataan Pendidikan;

2) Peningkatan mutu Pendidikan;

3) Peningkatan relevansi Pendidikan;

4) Peningkatan Efesiensi pendidikan.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali memiliki beberapa strategi untuk meminimalisir permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut :

a) Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
b) Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
c) Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
d) Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kempetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
e) Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan;
f) Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan prestasi

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Peluang bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali untuk mengatasi tantangan di atas, antara lain : (1) Kesiapan Pemerintah untuk membantu memperluas layanan pendidikan melalui program DAK dan dana block grant serta melalui program Rehab Nasional untuk membangun RKB, ruang penunjang, ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kapasitas SDM, penyaluran biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD dan SMP dan lain sebagainya (2) Komitmen pimpinan daerah Propinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali yang menempatkan pendidikan ke dalam skala prioritas program pembangunan, (3) Kemajuan teknologi IT yang memungkinkan proses managemen penyelenggaraan pendidikan lebih efektif khususnya terkait akses layanan data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan program - program pendidikan di setiap level penyelenggara sesuai ketentuan dan kewenangan

Berdasarkan tantangan dan peluang di atas dalam konteks layanan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Morowali, catatan penting yang harus diperhatikan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendidikan yang berkualitas tetap harus menjadi prioritas dan bahkan ditingkatkan volume sasarannya seperti kegiatan perluasan daya tampung melalui pembangunan GSB, RKB, Pemberdayaan sekolah-sekolah swasta, penyediaan beasiswa atau Bantuan Pendidikan untuk siswa dalam mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah dan pencapaian SPM
b) Layanan PAUD perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang memiliki kantong-kantong pemukiman yang belum tersedia layanan PAUD, baik formal maupun nonformal
c) Kegiatan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan untuk aspek PTK, seperti pemenuhan kualifikasi akademik, kepemilikan sertifikat pendidik, keikutsertaan dalam program diklat berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian

2.3.4 Isu – Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka isu - isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut :

- Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan: (1) Banyak gedung sekolah yang rusak, (2) Terbatasnya fasilitas penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang efektif, (3) Tingkat profesionalitas tenaga pendidik yang belum merata antar jenis dan satuan pendidikan, (4) Kurang optimalnya pemahaman tenaga pendidik terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berdampak pada lemahnya implementasi Kurikulum dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, (5) Terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran yang dialami warga belajar.

Isu-isu penting di atas, bila tidak segera diantisipasi dalam proses perencanaan pembangunan akan berdampak pada pencapaian visi misi Kepala Daerah, serta berdampak pada capaian program nasional pendidikan. Oleh karena pertimbangan di atas, maka tantangan ke depan bagi Dinas Pendidikan adalah :

1) Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru serta penyediaan sarana prasarana Pendidikan.

2) Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, yaitu menyiapkan sarana fisik dan non fisik untuk kegiatan pelayanan pendidikan yang berkualitas

3) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, khusus terkait kompetensi managerial, kurikulum, profesional dan kompetensi social yang sejauh ini masih belum merata antar satuan/program dan jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian keluaran dan hasil program kegiatan dimaksud.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 setelah dibandingkan dengan analisis kebutuhan yang dirasakan perlu segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti kami sajikan dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROALI

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Terget Capaian	Pagu Indikator(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Terget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatat Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN	Kab. Morowali	**Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan**	96%	**87,524,830,094.92**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Morowali	**Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan**	96%	96,277,313,104.50	
	Pengelolan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar**	94%	**33,753,000,636.00**	**Pengelolan Pendidikan Sekolah Dasar**	Kab. Morowali	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar**	94%	**37,128,300,699.60**	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	36 Unit	9,462,010,477.00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	36 Unit	10,408,211,524.70	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang	4,880,962,106.00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang	5,369,058,316.60	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	1,987,321,890.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	2,186,054,079.00	

	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	1,296,992,788.00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	1,426,692,066.80	
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			DAK FISIK
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	1,497,680,238.00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	1,647,448,261.80	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Runag Kelas	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1,502,897,223.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Runag Kelas	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1,653,186,945.30	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	29,987,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	32,985,700.00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23 Paket	350,570,201.00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	23 Paket	385,627,221.10	

	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2300 Set	320,980,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2300 Set	353,078,000.00	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Kab. Morowali	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	184 Satuan Pendidikan	234,874,580.00	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Kab. Morowali	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	184 Satuan Pendidikan	258,362,038.00	
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	385,290,853.00	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	423,819,938.30	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	386 Orang	9,470,160,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	386 Orang	10,417,176,000.00	

	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	184 Orang	1,890,685,490.00	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	184 Orang	2,079,754,039.00	
	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	144 Satuan Pendidikan	239,870,210.00	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	144 Satuan Pendidikan	263,857,231.00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		-	DAK NONFISIK

	Peningkatan Kapasitas Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140 Orang	202,717,580.00	Peningkatan Kapasitas Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140 Orang	222,989,338.00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96%	**45,905,042,410.00**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Kab. Morowali	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96%	**50,495,546,651.00**	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	28 Unit	11,460,674,818.00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	28 Unit	12,606,742,299.80	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3Ruang	976,895,280.00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3Ruang	1,074,584,808.00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	927,509,806.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Morowali	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	1,020,260,786.60	

	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	585,433,108.00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	643,976,418.80	
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			DAK FISIK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	132,831,888.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Morowali	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	146,115,076.80	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	19,963,173,400	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	21,959,490,740.00	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	3,990,733,700.00	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	4,389,807,070.00	

	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Morowali	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1000 Peserta Didik	293,240,350.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Morowali	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1000 Peserta Didik	322,564,385.00	
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	288,576,510.00	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Morowali	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	317,434,161.00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350 Orang	7,094,925,440	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350 Orang	7,804,417,984.00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		-	DAK NONFISIK
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	191,048,110	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	210,152,921.00	

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Morowali	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	96%	**6,732,129,815.00**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Kab. Morowali	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	96%	**7,405,342,796.50**	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	2,447,335,745.00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	13 Unit	2,692,069,319.50	
	Penyediaan Biaya Personil Perserta Didik PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1889 Peserta Didik	1,820,000,000	Penyediaan Biaya Personil Perserta Didik PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1889 Peserta Didik	2,002,000,000.00	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Morowali	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	70 Satuan Pendidikan	163,592,770	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Morowali	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	70 Satuan Pendidikan	179,952,047.00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	176 Orang	1,878,560,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	176 Orang	2,066,416,000.00	

	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	176 Orang	139,659,070	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	176 Orang	153,624,977.00	
	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen PAUD	Kab. Morowali	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	176 Satuan Pendidikan	122,337,650	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen PAUD	Kab. Morowali	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	176 Satuan Pendidikan	134,571,415.00	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Morowali	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Morowali	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)		-	DAK NONFISIK

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1750 Orang	160,644,580	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Morowali	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1750 Orang	176,709,038.00	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	96%	**1,134,657,234.00**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Kab. Morowali	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	96%	**1,248,122,957.40**	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	1,134,657,234.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	1,248,122,957.40	
	Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)			Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)			DAK NONFISIK
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kab. Morowali	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	98%	**175,808,369.09**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Kab. Morowali	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	98%		

	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar	97%	**120,868,253.75**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar	97%	**132,955,079.13**	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	87,904,184.55	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	96,694,603.01	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1 Orang	32,964,069.20	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1 Orang	36,260,476.12	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	Kab. Morowali	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	98%	**54,940,115.34**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal**	Kab. Morowali	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	98%	**60,434,126.87**	

	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Morowali	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2 Dokumen	54,940,115.34	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Morowali	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2 Dokumen	60,434,126.87	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kab. Morowali	**Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik**	98%	**5,052,758,961.84**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Kab. Morowali	**Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik**	98%		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali		98%	**5,052,758,961.84**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan**	Kab. Morowali		98%	5,400,343,931.58	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	3,938,789,935.00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	4,332,668,928.50	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kab. Morowali	**Presentase Kebudayaan Yang Dikembangkan**	100%	**980,761,525**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Kab. Morowali	**Presentase Kebudayaan Yang Dikembangkan**	100%	**356,969,030.00**	
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali		100%	**980,761,525**				100%		
	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Tradisi Budaya	Kab. Morowali	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	324,517,300.00	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Tradisi Budaya	Kab. Morowali	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	356,969,030.00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Kab. Morowali	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata adat yang dibina	10 Orang	216,839,285.00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Kab. Morowali	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata adat yang dibina	10 Orang	238,523,213.50	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Morowali	Jumlah lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	4 Unit	439,404,940.40	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Morowali	Jumlah lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	4 Unit	483,345,434.44	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kab. Morowali	**Presentase Cagar Budaya Yang di Lestarikan**	97%	**1,098,750,281.16**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Kab. Morowali	**Presentase Cagar Budaya Yang di Lestarikan**	97%	**1,208,625,309.28**	

	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 objek	**646,096,339.16**	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 objek	710,705,973.08	
	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Kab. Morowali	Jumlah cagar budaya yang didaftar	14 Objek	203,374,354.16	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Kab. Morowali	Jumlah cagar budaya yang didaftar	14 Objek	223,711,789.58	
	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Morowali	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	14 Objek	442,721,985.00	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Morowali	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	14 Objek	486,994,183.50	
	Pengeloaan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Kab. Morowali			**452,653,942.00**	**Pengeloaan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota**	Kab. Morowali			**497,919,336.20**	
	Pengembangan cagar budaya	Kab. Morowali	jumlah cagar budaya yang di kembangkan	6 objek	241,326,971.00	Pengembangan cagar budaya	Kab. Morowali	jumlah cagar budaya yang di kembangkan	6 objek	265,459,668.10	
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kab. Morowali	jumlah cagar budaya yang di kembangkan	6 objek	241,326,971.00	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kab. Morowali	jumlah cagar budaya yang di kembangkan	6 objek	265,459,668.10	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kab. Morowali	**Presentase Museum yang di Kelola**	75%	**863,417,444.34**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Kab. Morowali	**Presentase Museum yang di Kelola**	75%	**949,759,188.77**	
	Pengelolaan Museum kabupaten/Kota	Kab. Morowali	**Presentase Museum yang dikelola di kabupaten**	1 Unit	**863,417,444.34**	**Pengelolaan Museum kabupaten/Kota**	Kab. Morowali	Presentase museum di kelola di kabupaten/kota	1 Unit	949,759,188.77	
	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Morowali	Jumlah museum yang dibina	10 orang	260,898,116.22	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Morowali	Jumlah museum yang dibina	10 orang	286,987,927.84	
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permuseuman	Kab. Morowali	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan dipelihara	1 unit	602,519,328.12	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permuseuman	Kab. Morowali	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan dipelihara	1 unit	662,771,260.93	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2024

3.1 TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok pendukung lain berupa : Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan program dan kegiata, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan. Berikut adalah program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan program-program tersebut diatas tentu kegiatan-kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari kebijakan percepatan peningkatan Pendidikan dan pengembangan dibidang Pendidikan.

Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2019–2023 Kabupaten Morowali, melalui Program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pusat Kementrian Pendidikan yang sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional yang akan dilaksanakan di daerah dengan pendekatan tugas dan fungsi Kementrian Pendidikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
    a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Program Pengembangan Kurikulum
   a. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
   a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan pembangunan nasional merupakan perencanaan pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang di tetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan pembangunan daerahnya dalam rangka mencapai sasaran Nasional. Urusan Pendidikan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, bersama-sama dengan urusan bidang infrastruktur lainnya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 2024

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Tahun 2024 - 2026. Tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah "***Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan***". Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan Mutu dan Layanan Pendidikan.
   - ❖ Indikator Sasaran :
     a. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
     b. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
     c. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
     d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

2. Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan

- ❖ Indikator Sasaran : Terlestarikannya Cagar Budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi
3.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	3.1.1 Meningkatkan Mutu dan Layanan Pendidikan 3.1.2 Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan	3.1.1.1Meningkatkan pengelolaan pendidikan pada semua jenjang secara merata 3.1.2.2 Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

3 . 3 PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

Menindaklanjuti rencana strategis pembangunan Pendidikan khususnya dalam jangka pendek, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024. Langkah langkah pelaksanaan kegiatan diatas merupakan rincian tahapan kegiatan, sehingga dapat dicapai impact yang bermanfaat bagi masyarakat tani pada khususnya. Adapun sasaran kegiatan yang diingin dicapai pada tahun 2024, dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Tahun 2024. Tabel. 3.1

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat "Dinas Pendidikan Daerah " Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Daerah dan Kebudayaan Kabupaten Morowali
Periode / Tahun : 2024
Prakiraan Maju : 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	I+J9:J11ndikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
1					Urusan Wajib								
1	01	1			Bidang Urusan Pendidikan								
1					**Urusan Wajib**								

1	01	1			**Bidang Urusan Pendidikan**								
1	01	02			**PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN**	**Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan**	Kab. Morowali	96%	**87,524,830,095.00**	DAU		96%	**96,277,313,105**
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar**	Kab. Morowali	94%	**33,753,000,636.00**	DAU		94%	**37,128,300,700**
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	36 Unit	9,462,010,477.00	DAU		36 Unit	10,408,211,525
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Morowali	16 Ruang	4,880,962,106.00	DAU		16 Ruang	5,369,058,317
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	4 Ruang	1,987,321,890.00	DAU		4 Ruang	2,186,054,079
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	6 Ruang	1,296,992,788.00	DAU		6 Ruang	1,426,692,067
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali			DAK FISIK			-
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	6 Unit	1,497,680,238.00	DAU		6 Unit	1,647,448,262
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Morowali	8 Ruang	1,502,897,223.00	DAU		8 Ruang	1,653,186,945
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Morowali	1 Ruang	29,987,000.00	DAU		1 Ruang	32,985,700

1	01	02	2.01	16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Morowali	23 Paket	350,570,201.00	DAU		23 Paket	385,627,221
1	01	02	2.01	17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Morowali	2300 Set	320,980,000.00	DAU		2300 Set	353,078,000
1	01	02	2.01	23		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Morowali	184 Satuan Pendidikan	234,874,580.00	DAU		184 Satuan Pendidikan	258,362,038
1	01	02	2.01	25		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Morowali	250 Peserta Didik	385,290,853.00	DAU		250 Peserta Didik	423,819,938
1	01	02	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	386 Orang	9,470,160,000	DAU		386 Orang	10,417,176,000
1	01	02	2.01	27		Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Morowali	184 Orang	1,890,685,490.00	DAU		184 Orang	2,079,754,039
1	01	02	2.01	28		Pembinaan Kelembangan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Morowali	144 Satuan Pendidikan	239,870,210.00	DAU		144 Satuan Pendidikan	263,857,231
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Morowali			DAK NONFISIK			-
1	01	02	2.01	30		Peningkatan Kapasitas Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Morowali	140 Orang	202,717,580.00	DAU		140 Orang	222,989,338

1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Kab. Morowali	96%	**45,905,042,410.00**	DAU		96%	**50,495,546,651**
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	28 Unit	11,460,674,818.00	DAU		28 Unit	12,606,742,300
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Morowali	3Ruang	976,895,280.00	DAU		3Ruang	1,074,584,808
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	4 Ruang	927,509,806.00	DAU		4 Ruang	1,020,260,787
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	3 Unit	585,433,108.00	DAU		3 Unit	643,976,419
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali						-
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Morowali	1 Ruang	132,831,888.00	DAU		1 Ruang	146,115,077
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Kab. Morowali	1 Paket	19,963,173,400	DAU		1 Paket	21,959,490,740
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Morowali	8 Paket	3,990,733,700.00	DAU		8 Paket	4,389,807,070
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Morowali	1000 Peserta Didik	293,240,350.00	DAU		1000 Peserta Didik	322,564,385

1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Morowali	150 Peserta Didik	288,576,510.00	DAU		150 Peserta Didik	317,434,161
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	350 Orang	7,094,925,440	DAU		350 Orang	7,804,417,984
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Morowali			DAK NONFISIK			-
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	100 Orang	191,048,110	DAU		100 Orang	210,152,921
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Kab. Morowali	96%	**6,732,129,815.00**	DAU		96%	**7,405,342,797**
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	13 Unit	2,447,335,745.00	DAU		13 Unit	2,692,069,320
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Perserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Morowali	1889 Peserta Didik	1,820,000,000	DAU		1889 Peserta Didik	2,002,000,000
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Morowali	70 Satuan Pendidikan	163,592,770	DAU		70 Satuan Pendidikan	179,952,047
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Morowali	176 Orang	1,878,560,000	DAU		176 Orang	2,066,416,000
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	Kab. Morowali	176 Orang	139,659,070	DAU		176 Orang	153,624,977

						Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Morowali	176 Satuan Pendidikan	122,337,650	DAU		176 Satuan Pendidikan	134,571,415
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Morowali			DAK NONFISIK			-
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Morowali	1750 Orang	160,644,580	DAU		1750 Orang	176,709,038
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Kab. Morowali	96%	**1,134,657,234.00**	DAU		96%	**1,248,122,957**
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Morowali	100 Peserta Didik	1,134,657,234.00	DAU		100 Peserta Didik	1,248,122,957
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Morowali			DAK NONFISIK			-
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Presentase Kurikulum Yang dikembangkan**	Kab. Morowali	98%	**175,808,369.09**	DAU		98%	**193,389,206**
1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar**	**Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar**	Kab. Morowali	97%	**120,868,253.75**	DAU		97%	**132,955,079**
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Morowali	1 Dokumen	87,904,184.55	DAU		1 Dokumen	96,694,603

1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Morowali	1 Orang	32,964,069.20	DAU		1 Orang	36,260,476
1	01	03			**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal**	**Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal**	Kab. Morowali	98%	**54,940,115.34**	DAU		98%	**60,434,127**
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Kab. Morowali	2 Dokumen	54,940,115.34	DAU		2 Dokumen	60,434,127
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik**	Kab. Morowali	98%	**5,052,758,961.84**	DAU		98%	**5,558,034,858**
1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan**		Kab. Morowali	98%	**5,052,758,961.84**	DAU		98%	**5,558,034,858**
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Morowali	5 Laporan	3,938,789,935.00	DAU		5 Laporan	4,332,668,929
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-

2	22				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								-
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase Kebudayaan Yang Dikembangkan**	Kab. Morowali	100%	**980,761,525**	DAU		100%	**1,078,837,678**
2	22	02	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Morowali	100%	**980,761,525**	DAU		100%	1,078,837,678
2	22	02	2.02	01	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Morowali	6 Objek	324,517,300.00	DAU		6 Objek	356,969,030
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Morowali	10 Orang	216,839,285.00	DAU		10 Orang	238,523,214
2	22	02	2.02	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Presentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten	Kab. Morowali	4 Unit	439,404,940.40	DAU		4 Unit	483,345,434
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Presentase Cagar Budaya Yang di Lestarikan**	Kab. Morowali	97%	**1,098,750,281.16**	DAU		97%	**1,208,625,309**
2	22	05	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Morowali	1 objek	**646,096,339.16**	DAU		1 objek	710,705,973
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang didaftar	Kab. Morowali	14 Objek	203,374,354.16	DAU		14 Objek	223,711,790

2	22	05	2.01	02		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Morowali	14 Objek	442,721,985.00	DAU		14 Objek	486,994,184
					Pengeloaan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota			Kab. Morowali		**452,653,942.00**	DAU			**497,919,336**
						Pengembangan cagar budaya	jumlah cagar budaya yang di kembangkan	Kab. Morowali	6 objek	241,326,971.00	DAU		6 objek	265,459,668
						Pemanfaatan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang di manfaatkan	Kab. Morowali	6 objek	241,326,971.00	DAU		6 objek	265,459,668
					Program Pengelolaaan Permuseuman		**Presentase Museum yang di Kelola**	Kab. Morowali	75%	**863,417,444.34**	DAU		75%	**949,759,189**
					Pengelolaan Museum kabupaten/Kota		**Presentase Museum yang dikelola di kabupaten**	Kab. Morowali	1 Unit	**863,417,444.34**	DAU		1 Unit	949,759,189
						Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah museum yang dibina	Kab. Morowali	10 orang	260,898,116.22	DAU		10 orang	286,987,928
						Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan dipelihara	Kab. Morowali	1 unit	602,519,328.12	DAU		1 unit	662,771,261

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut. Adapun Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 selengkapnya akan di tampilkan pada table 4.1 berikut ini:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Daerah dan Kebudayaan Kabupaten Morowali

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	I+J9:J11ndikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
1					Urusan Wajib						
1	01	1			Bidang Urusan Pendidikan						
1					**Urusan Wajib**						
1	01	1			**Bidang Urusan Pendidikan**						
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan**	Kab. Morowali	96%	**87,524,830,094.92**	DAU	
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	94%	**33,753,000,636.00**	DAU	
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	36 Unit	9,462,010,477.00	DAU	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Morowali	16 Ruang	4,880,962,106.00	DAU	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	4 Ruang	1,987,321,890.00	DAU	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	6 Ruang	1,296,992,788.00	DAU	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali			DAK fisik	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	6 Unit	1,497,680,238.00	DAU	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Morowali	8 Ruang	1,502,897,223.00	DAU	

1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Morowali	1 Ruang	29,987,000.00	DAU	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Morowali	23 Paket	350,570,201.00	DAU	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Morowali	2300 Set	320,980,000.00	DAU	
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Morowali	184 Satuan Pendidikan	234,874,580.00	DAU	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Morowali	250 Peserta Didik	385,290,853.00	DAU	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Morowali	386 Orang	9,470,160,000	DAU	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Morowali	184 Orang	1,890,685,490.00	DAU	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Morowali	144 Satuan Pendidikan	239,870,210.00	DAU	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Morowali			DAK non fisik	
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Morowali	140 Orang	202,717,580.00	DAU	
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	96%	**45,905,042,410.00**	DAU	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	28 Unit	11,460,674,818.00	DAU	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Morowali	3Ruang	976,895,280.00	DAU	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	4 Ruang	927,509,806.00	DAU	
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	3 Unit	585,433,108.00	DAU	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Morowali			DAK fisik	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Morowali	1 Ruang	132,831,888.00	DAU	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Kab. Morowali	1 Paket	19,963,173,400	DAU	
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Morowali	8 Paket	3,990,733,700.00	DAU	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Morowali	1000 Peserta Didik	293,240,350.00	DAU	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Morowali	150 Peserta Didik	288,576,510.00	DAU	

1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	350 Orang	7,094,925,440	DAU	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Morowali			DAK non fisik	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Morowali	100 Orang	191,048,110	DAU	
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Morowali	96%	**6,732,129,815.00**	DAU	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Morowali	13 Unit	2,447,335,745.00	DAU	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Perserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Morowali	1889 Peserta Didik	1,820,000,000	DAU	
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Morowali	70 Satuan Pendidikan	163,592,770	DAU	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Morowali	176 Orang	1,878,560,000	DAU	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Morowali	176 Orang	139,659,070	DAU	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembangan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Morowali	176 Satuan Pendidikan	122,337,650	DAU	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)	Kab. Morowali			DAK non fisik	
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Morowali	1750 Orang	160,644,580	DAU	
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Morowali	96%	**1,134,657,234.00**	DAU	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Morowali	100 Peserta Didik	1,134,657,234.00	DAU	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (DAK non fisik)	Kab. Morowali			DAK non fisik	
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	Kab. Morowali	98%	**175,808,369.09**	DAU	
1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar**	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	97%	**120,868,253.75**	DAU	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Morowali	1 Dokumen	87,904,184.55	DAU	

1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Morowali	1 Orang	32,964,069.20	DAU	
1	01	03			**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal**	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	Kab. Morowali	98%	**54,940,115.34**	DAU	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Kab. Morowali	2 Dokumen	54,940,115.34	DAU	
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik**	Kab. Morowali	98%	**5,052,758,961.84**	DAU	
1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan**		Kab. Morowali	98%	**5,052,758,961.84**	DAU	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Morowali	5 Laporan	3,938,789,935.00	DAU	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					DAU	
2	22				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					DAU	
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase Kebudayaan Yang Dikembangkan**	Kab. Morowali	100%	**980,761,525**	DAU	
2	22	02	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Morowali	100%	**980,761,525**	DAU	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Morowali	6 Objek	324,517,300.00	DAU	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata adat yang dibina	Kab. Morowali	10 Orang	216,839,285.00	DAU	
2	22	02	2.02	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	Kab. Morowali	4 Unit	439,404,940.40	DAU	
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Presentase Cagar Budaya Yang di Lestarikan**	Kab. Morowali	97%	**1,098,750,281.16**	DAU	
2	22	05	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Morowali	1 objek	**646,096,339.16**	DAU	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang didaftar	Kab. Morowali	14 Objek	203,374,354.16	DAU	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Morowali	14 Objek	442,721,985.00	DAU	

					Pengeloaan Cagar budaya peringkat kabupaten/kota		Kab. Morowali		**452,653,942.00**	DAU	
					Pengembangan cagar budaya	jumlah cagar budaya yang di kembangkan	Kab. Morowali	6 objek	241,326,971.00	DAU	
					Pemanfaatan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang di manfaatkan	Kab. Morowali	6 objek	241,326,971.00	DAU	
					Program Pengelolaaan Permuseuman	**Presentase Museum yang di Kelola**	Kab. Morowali	75%	**863,417,444.34**	DAU	
					Pengelolaan Museum kabupaten/Kota	**Presentase Museum yang dikelola di kabupaten**	Kab. Morowali	1 Unit	**863,417,444.34**	DAU	
					Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah museum yang dibina	Kab. Morowali	10 orang	260,898,116.22	DAU	
					Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan dipelihara	Kab. Morowali	1 unit	602,519,328.12	DAU	

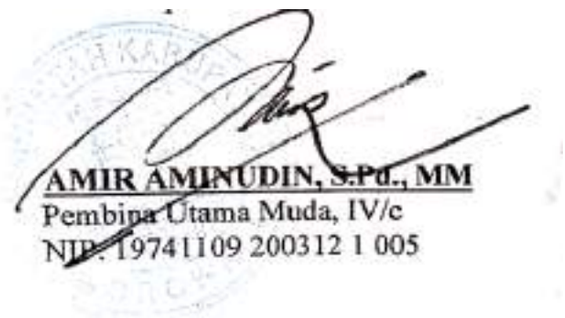
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali merupakan Rencana Jangka Pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan Program dan kegiatan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 yang akan direaliasikan dalam kurun satu tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali merupakan perwujudan dari Renstra PD Tahun 2024-2026 yang mengacu dari RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Penyusunan renja 2024 bersinergi dengan skala prioritas program Kabupaten Morowali dan isu-isu Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali ,sebagai pertimbangan penyusunan program / kegiatan adalah memperhatikan hasil evaluasi renja tahun sebelumnya dan hal-hal terkait dengan isu-isu Perangkat Daerah Tahun 2024. Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Morowali serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Bungku, 21 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kabupaten Morowali,



AMIR AMINUDIN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19741109 200312 1 005

RENCANA KERJA (RENJA) 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko
dishubmorowali@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Penjabaran Dinas Perhubungan Daerah Kab. Morowali. Penyusunan Rencana Kerja telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini juga disertakan dengan penguatan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Morowali dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Bungku, 05 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOROWALI

Drs. EMIL, M.Si
NIP. 19670402 198603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI DINAS PERHUBUNGAN 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 8
2.2. Analisa Pelayanan Dinas Perhubungan 13
2.3. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
2.6. Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN **25**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan 31
3.3. Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS DINAS PERHUBUNGAN 33

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Dan Pencapaian Renstra 6

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan 8

Tabel 2.3. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD 11

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 13

Tabel 3.1. Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 18

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 21

BAB I
PENDAHULUAN

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renja menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

Renja menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Ranwal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Ranwal Renja. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Renstra awal Tahun 2024-2026, dimana tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Maka, Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur pelaksana di bidang perhubungan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi Program Perhubungan;
b. Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana yang ditetapkan;
c. Melakukan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas, peraturan umum dibidang perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Morowali yang merupakan salah satu dari pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi

yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Morowali serta sumberdaya yang menanganinya masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain kurang tercukupinya fasilitas jalan seperti rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadai. Kondisi terminal yang belum memadai, belum adanya dan terminal pembantu dan halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepatuhan masyarakat dan pelaku angkutan terhadap Undang- undang Lalu Lintas belum membudaya, oleh sebab itu harus selalu dikembangkan dan diawasi. Jaringan transportasi belum dapat menjangkau daerah yang luas. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki basis pengetahuan dibidang transportasi dan kelalulintasan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Ranwal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8) Peraturan pemerintah No. 37 tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2012 Tentang Sumber daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10) Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11) Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 Tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12) Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
13) Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali, dengan harapan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Morowali.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali yaitu:

a. Untuk menjabarkan Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;

b. Untuk memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024;

c. Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali

Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Merupakan Penyelenggaran urusan bidang perhubungan didaerah yaitu Penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana perhubungan dalam lingkup Kabupaten. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku angkutan, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana perhubungan serta penataan perparkiran dari tahun ke tahun walaupun belum memadai.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali adalah penjabaran perencanaan tahunan, juga merupakan tolok ukur penilaian capaian program dan kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali. Pengukuran Kinerja dari apa yang telah dicapai dapat digambarkan pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020
Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Urusan Administrasi Perkantoran**									
2 15 01 1. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2 15 01 1. 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA OPD ke dalam RENSTRA OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2 15 01 1. 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA OPD ke dalam RENSTRA OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2 15 01 1. 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 15 01 1. 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase OPD yang menyusun Perencanaan Sesuai Standar	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
2 15 01 1. 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2 15 01 1. 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja OPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2 15 01 1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan									
2 15 01 1. 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rasio Gaji ASN dan Belanja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2 15 01 1. 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang Dibayarkan Jasanya	55 Orang	50 Orang	52 Orang	52 Orang	100%	55 Orang	55 Orang	55 Orang	100%
2 15 01 1. 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Keuangan Akhir Tahun (%) Persentase Realisasi Keuangan Sesuai Anggaran KAS (%)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2 15 01 1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah									
2 15 01 1. 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	6 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%
2 15 01 1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan									
2 15 01 1. 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (set)	0	15 Pasang	0	0	0%	88 Pasang	88 Pasang	88 Pasang	100%
2 15 01 1. 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN OPD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 Orang	2 Orang	2 Orang	0	0%	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%
2 15 01 1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum									
2 15 01 1. 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2 15 01 1. 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	7 Unit	32 Unit	11 Unit	13 Unit	118%	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
2 15 01 1. 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2 15 01 1. 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2 15 01 1. 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak (Dokumen)	30000 Lembar	23000 Lembar	20000 Lembar	32000 Lembar	160%	28400 Lembar	28400 Lembar	28400 Lembar	100%
2 15 01 1. 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%) Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (%)	48 Kegiatan	18 Kegiatan	48 Kegiatan	28 Kegiatan	58%	51 Kegiatan	51 Kegiatan	51 Kegiatan	100%
2 15 01 1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2 15 01 1. 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	0	0	4 Unit	0	0%	0	0	0	0%
2 15 01 1. 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Mebeleur	15 Unit	26 Unit	16 Unit	16 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%
2 15 01 1. 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2 15 01 1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2 15 01 1. 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2 15 01 1. 08 03	Penyedeiaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (%) Persentase Peralatan Kerja yang diperbaiki (%)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2 15 01 1. 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Kebersihan Lingkungan Kantor OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2 15 01 1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2 15 01 1. 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	12 Unit	1 Unit	14 Unit	11 Unit	79%	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%
2 15 01 1. 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)**									
2 15 02 2. 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan									
2 15 02 2. 01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ Yang ditetapkan dan disosialisasikan	2 Lisensi	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan LLAJ yang sesuai dengan rencana induk jaringan LLAJ	1 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali									
2 15 02 2. 02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan	0	1 Paket	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2 02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan	3 Paket					2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
2 15 02 2 02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terpelihara dan direhabilitasi	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	0	0	0	0%
2 15 02 2 02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi	1 Paket	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2 03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										
2 15 02 2 03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Penumpangn Tipe C	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
2 15 02 2 03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Bangunan Terminal untuk Pemenuhan Standar Tipe C	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
2 15 02 2 03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Paket	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2 03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal nyang Terpelihara dan direhabilitasi	1 Paket	0	0	0	0%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2 15 02 2 03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Terminal C	2 Orang	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2 04	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										
2 15 02 2 04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegritasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2 04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang diawasi	2 Kegiatan	0	0	0	0%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
2 15 02 2 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
2 15 02 2 05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen - Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%
2 15 02 2. 05 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Orang	0	2 Orang	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Wajib Uji Berkala	1 Kegiatan	0	0	0	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 15 02 2. 05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Slip dan Buku Keur (Buku Uji)	1 Kegiatan	0	0	0	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 15 02. 2. 05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di sosialisasikan	2 Kegiatan	0	0	0	0%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2 15 02. 2. 05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Dokumen Identifikasi Dan Analisis	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
2 15 02. 2. 05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasrana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0%	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
2 15 02. 2. 05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dikoordinasikan	2 Kegiatan	0	0	0	0%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2 15 02. 2. 05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	2 Kegiatan	0	0	0	0%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2 15 02. 2. 06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota										
2 15 02. 2. 06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Panjang Jalan di Kab. Morowali	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02. 2. 06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02. 2. 07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota										
2 15 02. 2. 07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Penilai Andalalin	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2 07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Penilaian Hasil	2 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang diawasi	1 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2 15 02 2. 09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang	8 Unit	10 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%
2 15 02 2. 09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dikendalikan dan diawasi	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiaan	67%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
2 15 02 2. 11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2 15 02 2. 11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 11 02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan jumlah kegiatan sosialisasi	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian (Penertiban Angkutan)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 02 2. 14	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2 15 02 2. 14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban	3 Kegiatan	0	0	0	0%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2 15 02 2. 16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2 15 02 2. 16 03	Pemgendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	2 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										
2 15 03 3 01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota										
2 15 03 3 01 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 15 03 3 02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2 15 03 3 02 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	1 Kegiatan	0	0	0	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 15 03 3 02 02	Koordinmasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Kegiatan	0	0	0	0%	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%
2 15 03 3 06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota										
2 15 03 3 06 01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lintas Penyeberangan Jumlah Dokumen PersetujuanPengoperasian Kapal	1 Kegiatan	0	0	0	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 15 03 3 08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal										
2 15 03 3 08 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	1 Kegiatan	0	0	0	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 15 03 3 08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	3 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 03 3 11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau										
2 15 03 3 11 01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Disusun	0	0	0	0	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 15 03 3 11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	3 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 03 3 12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal										
2 15 03 3 12 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	13 Paket	3 Paket	12 Paket	14 Paket	117%	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%
2 15 03 3 12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan dan Dermaga/Tambatan Perahu	2 Paket	1 Paket	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 03 3 19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal										
2 15 03 3 19 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	1 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%
2 15 03 3 19 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali menangani Urusan Wajib Perhubungan, untuk itu Dinas Perhubungan berkewajiban memenuhi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambaran Pecapaian Target Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali dapat dilihar pada Tabel TC.30.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2021-2022

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022 (Thn n-2)	2023 (Thn n-1)	2024 (Thn n)	2025 (Thn n+1)	2022 (Thn n-2)	2023 (Thn n-1)	2024 (Thn n)	2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	8				10		12		13
			Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut)	12000				11800	11500	12000		
			Jumlah kapal berangkat					425	460	480		
			Jumlah penumpang turun	6000				5900	5750	6000		
			Jumlah Penumpang naik	6000				5900	5750	6000		
			Jumlah barang bongkar (ton)	12000				10250	11500	12000		
			Jumklah barang muat (ton)	6000				5250	5750	6000		
			Rasio Ijin Trayek	6				10	5,75	6		
			Jumlah uji kir angkutan umum	3150				-	3000	3150		
			Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis	4				4	4	4		
			Persentase layanan angkutan darat	42%				40%	40%	42%		
			Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	3150				250	3000	3150		
			Pemasangan rambu-rambu	263				100	250	262,5		
			Rasio panjang jalan per jumlah kendarann	6				4	5,75	6,0375		
			Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	78489				7000	7475	78489		
			Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun									

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Masih kurangnya fasilitas kelengkapan jalan sebagai fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu, marka, guadrill dan PJU pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten;
2. Belum adanya angkutan umum yang melayani trayek perkotaan menyebabkan tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
3. Belum tersedianya regulasi/payung hukum terhadap pelaksanaan Analisa Dampak Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten;
4. Masih kurangnya dan belum optimalnya sarana dan prasarana di bidang angkutan perairan berupa rambu suar dan dermaga/tambatan perahu;
5. Masih kurang sarana transportasi perairan yang menghubungkan wilayah kepulauan untuk mengakses sentra-sentra produksi sehingga distribusi hasil-hasil terganggu;
6. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali yang telah mengikuti Diklat Teknis Perhubungan/Sertifikasi Teknis telah memadai, tetapi akibat dari pemekaran wilayah administratif, mengakibatkan perpindahan Sumber Daya Manusia. Kondisi SDM Dinas Perhubungan saat ini masih sangat minim;
7. Adanya Pembiayaan Tenaga Harian Lepas yang pelaksanaan tugas pada Kementerian Perhubungan sebagai AVSECT Bandara Morowali dan pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali.

8. Banyaknya Terminal Khusus eks. Perusahaan Tambang yang tidak beroperasi serta terdapat Terminal Khusus milik Perusahaan Pertambangan yang belum memiliki Izin dari Kementerian Perhubungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka proses Pembangunan Kabupaten Morowali pada tahun 2024, penentuan prioritas Pembangunan Dinas Perhubungan terdapat kegiatan urusan wajib yang menjadi prioritas yaitu pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C 3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023-2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali

Perangkat Daerah : **Dinas Perhubungan**
Periode / Tahun : **2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai SAKIB OPD**		**7.500.579.498**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai SAKIB OPD**		**7.270.551.354**	
-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.030.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.005.000	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	100 %	5.870.560.654	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	100 %	6.039.565.454	
-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah	100 %		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 %	50.000.000	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	100 %	101.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	116.400.000	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 %	181.719.510	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100 %	500.892.900	
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.170.546.250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dinas Perhubungan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	330.000.000	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	18.775.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	33.688.000	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	155.547.564	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	195.000.000	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)**		**2.857.366.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)		**1.520.800.000**	
-	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan	100 %	6.800.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan	100 %	184.400.000	
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	100 %	697.015.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	100 %	220.000.000	
-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Persentase Terminal yang terakreditasi Tipe C	100 %	-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	Persentase Terminal yang terakreditasi Tipe C	100 %	50.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	Presentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang di terbitkan	100 %	-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan	Presentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang di terbitkan	100 %	50.000.000	
-	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Persentase Jumlah Kendaraan Wajib Uji Keur	101 %	1.173.939.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Persentase Jumlah Kendaraan Wajib Uji Keur	100 %	221.400.000	
-	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	100 %	30.862.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	100 %	35.000.000	
-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Dinas Perhubungan	Persentase Rekomendasi/ Persetujuan Andalalin	100 %	-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Dinas Perhubungan	Persentase Rekomendasi/ Persetujuan Andalalin	100 %	50.000.000	
-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Presentase Ketersediaan Angkutan Orang dan/atau Barang	100 %	948.750.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Presentase Ketersediaan Angkutan Orang dan/atau Barang	100 %	300.000.000	
-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali	100 %	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali	100 %	350.000.000	
-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Kegiatan Penertiban	1 Thn	-	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Kegiatan Penertiban	1 Thn	30.000.000	
-	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	100 %	-	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	100 %	30.000.000	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		Persentase Pengelolaan Pelayaran			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		Persentase Pengelolaan Pelayaran		969.000.000	
-	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Memiliki Izin	1 Thn	-	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Memiliki Izin	1 Thn	50.000.000	
-	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Angkutan Laut (Orang Perorangan atau Badan Usaha) Yang Memiliki Izin	1 Thn	48.150.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Persentase Usaha Angkutan Laut (Orang Perorangan atau Badan Usaha) Yang Memiliki Izin	1 Thn	50.000.000	
-	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Lintas Penyeberangan yang Ditetapkan	100 %	-	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Lintas Penyeberangan yang Ditetapkan	100 %	52.000.000	
-	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Persentase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	12 Bln	-	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Dinas Perhubungan	Persentase Badan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Memiliki Izin Usaha	12 Bln	52.000.000	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		Persentase Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di Tetapkan	100 %	12.567.500	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di Tetapkan	100 %	55.000.000	
-	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan	100 %	-	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan	Persentase Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan	12 Bln	60.000.000	
-	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 Unit	2.166.478.084	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 Unit	650.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat Usulan Program dan Kegiatan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG Kecamatan dalam Forum OPD Tahun 2024, yang dapat di masukkan dalam kerangka Pendanaan Renstra OPD, disajikan pada Tabel T-C.32.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
Periode / Tahun : 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota				
1.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Prasarana Jalan		
	- Penerangan Jalan Umum (PJU)			1 Paket	
1.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Perlengkapan Jalan		
	- Marka Jalan			2500 M2	
	- Pita Penggaduh			1 Paket	
	- Traffic Light			8 Titik	
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Morowali	Jumlah Prasarana Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi		
	- Rambu-rambu Lalu Lintas			1 Paket	
1.1.5	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana		
	- Pembangunan Halte			2 Titik	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	- Pembangunan Tempat Parkir di Tepi Jalan Areal Terminal Bungku			1 Paket	
1.2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Jumlah Kendaraan Wajib Uji Keur		
1.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
	- Pembangunan Gedung Administrasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Lanjutan)	KTM Bungku Tengah		1 Bangunan	
	- Cat and Fill dan Timbunan Jalan Mauk Kompleks Pengujian Kendaraan Bermotor	KTM Bungku Tengah		1 Paket	
1.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Ketersediaan Angkutan Orang dan/atau Barang		
1.3.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang		
	- Pengadaan Angkutan Orang/Barang Desa Geresa	Desa Geresa, Kec. Bungku Timur		1 Unit	
	- Pengadaan Angkutan Orang/Barang Desa Wata	Desa Wata, Kec. Bungku Barat		1 Unit	
	-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Tanjung Harapan	Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan		1 Unit	
	-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Paku	Desa Paku Kec. Bungku Selatan		1 Unit	
	-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Bakala	Desa Bakala Kec. Bungku Selatan		1 Unit	
	-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Pulau Tengah	Desa Pulau Tengah Kec. Menui Kepulauan		1 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Poaro	Desa Poaro Kec. Bungku Selatan		1 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Pulau Tiga	Desa Pulau Tiga Kec. Menui Kepulauan		1 Unit	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				
2.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
2.1.1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	14 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Samarengga (Lanjutan)	Desa Samarengga		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Padei Laut (Lanjutan)	Desa Padei Laut		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Matarape (Lanjutan)	Desa Matarape		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pulau Tiga (Lanjutan)	Desa Pulau Tiga		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tanjung Tiram (Lanjutan)	Desa Tanjung Tiram		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tanjung Harapan (Lanjutan)	Desa Tanjung Harapan		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Unsongi (Lanjutan)	Desa Unsongi		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Topogaro (Lanjutan)	Desa Topogaro		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Umbele Kkec. Bumi Raya	Desa Umbele Kec. Bumi Raya		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Solonsa	Desa Solonsa		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Moahino (Lanjutan)	Desa Moahino		1 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Oneete (Lanjutan)	Desa Oneete		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pulau Bapa (Lanjutan)	Desa Pulau Bapa		1 Unit	
	- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Padabaho (Lanjutan)	Desa Padabaho		1 Unit	
	- Perencanaan Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	Kab. Morowali		1 Dokumen	
	- Pengawasan Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	Kab. Morowali		1 Dokumen	
2.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan dan Dermaga/Tambatan Perahu	2 Unit	
	- Rehabilitasi Pelabuhan Kaleroang	Desa Ulunambo, Kec. Menui Kepulauan		1 Unit	
	- Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Sainoa	Desa Puungkoelu, Kec. Bungku Tengah		1 Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
Periode / Tahun : 2024
Prakiraan Maju : 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Pemenuhan Urusan Administrasi Perkantoran			7.102.262.276				5.973.306.684
2 15 01 1. 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	100 %	5.448.800	DBH		100 %	2.500.000
2 15 01 1. 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA OPD ke dalam RENSTRA OPD	Dinas Perhubungan	100 %	2.199.800			100 %	750.000
2 15 01 1. 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA OPD ke dalam RENSTRA OPD	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	724.750			1 Dokumen	750.000
2 15 01 1. 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi OPD	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	724.750			1 Dokumen	500.000
2 15 01 1. 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase OPD yang menyusun Perencanaan Sesuai Standar	Dinas Perhubungan	100 %	899.750			100 %	500.000
2 15 01 1. 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja OPD	Dinas Perhubungan	100 %	899.750			100 %	
2 15 01 1. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	Dinas Perhubungan	100 %	5.871.953.176			100 %	4.647.047.634
2 15 01 1. 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rasio Gaji ASN dan Belanja	Dinas Perhubungan	1 Tahun	3.737.513.376			1 Tahun	3.180.431.634
2 15 01 1. 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang Dibayarkan Jasanya	Dinas Perhubungan	67 Org	2.113.440.000			67 Org	1.466.616.000
2 15 01 1. 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Keuangan Akhir Tahun (%) Persentase Realisasi Keuangan Sesuai Anggaran KAS (%)	Dinas Perhubungan	100 %	20.999.800			100 %	-
2 15 01 1. 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	100 %	50.000.000			100 %	50.000.000
2 15 01 1. 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Dinas Perhubungan	100 %	50.000.000			100 %	50.000.000
2 15 01 1. 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	Dinas Perhubungan	100 %	40.400.000				101.000.000
2 15 01 1. 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN OPD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perhubungan	2 Orang	40.400.000			5 Orang	101.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 01 1. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Administrasi Umum	Dinas Perhubungan	100 %	397.408.300			100 %	558.371.050
2 15 01 1. 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	1 Tahun	3.527.000			1 Tahun	5.000.000
2 15 01 1. 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	1 Tahun	27.343.750			1 Tahun	117.000.000
2 15 01 1. 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Alat Tuklis Kantor	Dinas Perhubungan	1 Tahun	34.983.160			1 Tahun	55.251.000
2 15 01 1. 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak (Dokumen)	Dinas Perhubungan	57314 Lbr	35.211.200			60343 Lbr	21.120.050
2 15 01 1. 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penyediaan fasilitas tamu	Dinas Perhubungan	1 Tahun	8.882.370			1 Tahun	60.000.000
2 15 01 1. 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%) Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (%)	Dalam dan Luar Daerah Kab. Morowali	1 Tahun	287.460.820			1 Tahun	300.000.000
2 15 01 1. 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	100 %	644.952.800				535.000.000
2 15 01 1. 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Dinas Perhubungan	1 Unit	585.981.900			2 Unit	350.000.000
2 15 01 1. 07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan mebel kantor	Dinas Perhubungan	100 %	34.359.450			100 %	65.000.000
2 15 01 1. 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinas Perhubungan	0 Unit	-			3 Unit	20.000.000
2 15 01 1. 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Mebeleur	Dinas Perhubungan	1 Tahun	24.611.450			1 Tahun	
2 15 01 1. 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	0 Tahun	-			1 Tahun	100.000.000
2 15 01 1. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	12 Bulan	27.212.000			12 Bulan	34.388.000
2 15 01 1. 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	1 Tahun	23.472.000			1 Tahun	23.488.000
2 15 01 1. 08 03	Penyedeiaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (%)	Dinas Perhubungan	100 %	2.840.000			100 %	10.000.000
2 15 01 1. 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Kebersihan Lingkungan Kantor OPD	Dinas Perhubungan	12 Bulan	900.000			12 Bulan	900.000
2 15 01 1. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	100 %	64.887.200				45.000.000
2 15 01 1. 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Dinas Perhubungan	6 Unit	54.850.000			6 Unit	45.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 01 1. 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	100 %	10.037.200			100 %	
2 15 01 1. 04 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan		-				
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	100 %	1.336.400.000				1.727.400.000
2 15 02 2. 01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan	Dinas Perhubungan	100 %					
2 15 02 2. 01 02	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ Yang ditetapkan dan disosialisasikan	Dinas Perhubungan	1 Tahun	184.400.000			1 Tahun	184.400.000
2 15 02 2. 02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	Dinas Perhubungan	100 %	220.000.000				585.000.000
2 15 02 2. 02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan	Kab. Morowali	1 Paket	150.000.000			1 Paket	200.000.000
2 15 02 2 02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan	Kab. Morowali	1 Paket				1 Paket	300.000.000
2 15 02 2 02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terpelihara dan direhabilitasi	Kab. Morowali	1 Paket	50.000.000			1 Paket	50.000.000
2 15 02 2 02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi	Kab. Morowali	1 Paket	20.000.000			1 Paket	35.000.000
2 15 02 2 03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Kec. Bungku Tengah**		50.000.000				50.000.000
2 15 02 2 03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Penumpangn Tipe C		1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	50.000.000
2 15 02 2 03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Bangunan Terminal untuk Pemenuhan Standar Tipe C							
2 15 02 2 03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana	Kec. Bungku Tengah						
2 15 02 2 03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal nyang Terpelihara dan direhabilitasi	Kec. Bungku Tengah						
2 15 02 2 03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Terminal C			-				
2 15 02 2 04	**Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		Dinas Perhubungan		50.000.000				50.000.000
2 15 02 2 04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegritasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan							
2 15 02 2 04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang diawasi	Dinas Perhubungan	3 Laporan	50.000.000			3 Laporan	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 02 2 05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				221.400.000				256.400.000
2 15 02 2 05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen - Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	1 Unit	100.000.000			1 Unit	120.000.000
2 15 02 2. 05 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2 Org	40.400.000			2 Org	40.400.000
2 15 02 2. 05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji BerkalaKendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Wajib Uji Berkala		100 %	5.000.000			100 %	5.000.000
2 15 02 2. 05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Slip dan Buku Keur (Buku Uji)		100 %	10.000.000			100 %	10.000.000
2 15 02. 2. 05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di sosialisasikan		1 Kegiatan	6.000.000			1 Kegiatan	6.000.000
2 15 02. 2. 05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Dokumen Identifikasi Dan Analisis	Dinas Perhubungan						
2 15 02. 2. 05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasrana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	Dinas Perhubungan						
2 15 02. 2. 05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dikoordinasikan	Dinas Perhubungan	5 Kegiatan	60.000.000			5 Kegiatan	75.000.000
2 15 02. 2. 05 10	Mo nito ring dan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Dinas Perhubungan						
2 15 02. 2. 06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota**		Dinas Perhubungan		35.000.000				39.000.000
2 15 02. 2. 06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Panjang Jalan di Kab. Morowali	Dinas Perhubungan	5 Dokumen	25.000.000			5 Dokumen	25.000.000
2 15 02. 2. 06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	5 Set	10.000.000			5 Set	14.000.000
2 15 02. 2. 07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		Dinas Perhubungan	5 Kegiatan	50.000.000			5 Kegiatan	50.000.000
2 15 02. 2. 07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin							
2 15 02 2. 07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Penilai Andalalin							
2 15 02 2 07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian HasilAndalalin	Jumlah Penilaian Hasil	Dinas Perhubungan	5 Kegiatan	50.000.000			5 Kegiatan	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 02 2. 07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang diawasi	Kab. Morowali						
2 15 02 2. 09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Dinas Perhubungan		300.000.000				550.000.000
2 15 02 2. 09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang	Kab. Morowali	10 Set	300.000.000			15 Set	550.000.000
2 15 02 2. 09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dikendalikan dan diawasi	Kab. Morowali						
2 15 02 2. 11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				350.000.000				87.000.000
2 15 02 2. 11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali		1 Dpkumen	350.000.000				
2 15 02 2. 11 02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan jumlah kegiatan sosialisasi						9 Kegiatan	50.000.000
2 15 02 2. 11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian (Penertiban Angkutan)						5 Kegiatan	37.000.000
2 15 02 2. 14	**Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Dinas Perhubungan	5 Kegiatan	30.000.000			5 Kegiatan	30.000.000
2 15 02 2. 14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban	Palu, Kab. Morowali	5 Kegiatan	30.000.000			5 Kegiatan	30.000.000
2 15 02 2. 16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			5 Kegiatan	30.000.000			5 Kegiatan	30.000.000
2 15 02 2. 16 03	Pemgendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif		5 Kegiatan	30.000.000			5 Kegiatan	30.000.000
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		Dinas Perhubungan		967.000.000				995.000.000
2 15 03 3 01	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**		Dinas Perhubungan		50.000.000				55.000.000
2 15 03 3 01 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	Dinas Perhubungan	1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 03 3 02	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Dinas Perhubungan		50.000.000				50.000.000
2 15 03 3 02 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	Dinas Perhubungan						
2 15 03 3 02 02	Koordinmasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Luar Daerah, Kab. Morowali	1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	50.000.000
2 15 03 3 06	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**				50.000.000				50.000.000
2 15 03 3 06 01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lintas Penyeberangan Jumlah Dokumen PersetujuanPengoperasian Kapal	Dinas Perhubungan	4 Kegiatan	50.000.000			4 Kegiatan	50.000.000
2 15 03 3 08	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**				52.000.000				60.000.000
2 15 03 3 08 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	Dinas Perhubungan						
2 15 03 3 08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Morowali	4 Kegiatan	52.000.000			4 Kegiatan	60.000.000
2 15 03 3 11	**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**			1200 Lembar	55.000.000			1200 Lembar	60.000.000
2 15 03 3 11 01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Disusun							
2 15 03 3 11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Morowali	4 Kegiatan	55.000.000			4 Kegiatan	60.000.000
2 15 03 3 12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**				650.000.000				660.000.000
2 15 03 3 12 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	Kab. Morowali	3 Unit	650.000.000			3 Unit	660.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 03 3 12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan dan Dermaga/Tambatan Perahu							
2 15 03 2. 10	**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**			1 Dokumen	60.000.000			1 Dokumen	60.000.000
2 15 03 2. 10 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan	Dinas Perhubungan						
2 15 03 2. 10 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		5 Laporan	60.000.000			5 Laporan	60.000.000

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali juga disertai dengan uraian arah dan kebijakan yang mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2019-2023 yang merupakan bukti komitmen dari Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali dalam pencaian visi Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019-2023 yang dijabarkan sebagai berikut

A. Tujuan

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Organisasi
- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan

B. Sasaran

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Organisasi
- Mewujudkan Dokumen Pelaporan yang berkualitas
- Mewujudkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Mewujudkan peningkatan kualitas Layanan Transportasi
- Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas

3.3. Program dan Kegiatan

a.

Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali melaksanakan Urusan Non Wajib dan Urusan Wajib Perhubungan yaitu :

1. Urusan Non Wajib Perhubungan
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Administrasi Keuangan
     - Administrasi Umum
     - Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Urusan Wajib Perhubungan
   - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
     - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
     - Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Program Pengelolaan Pelayaran
  - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah
  - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
  - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
  - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendaan perangkat daerah disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan periode Renjarencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	**2 15 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Pemenuhan Urusan Administrasi Perkantoran			**5.980.435.614**	**Dinas Perhubungan**	
		2 15 01 1. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.510.000		Kantor Dishub
		2 15 01 1. 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA OPD ke dalam RENSTRA OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	877.500		
			Foto Copy Dokumen Renja			1337 Lbr	468.000		
			Foto Copy Dokumen Renstra			1170 Lbr	409.500		
		2 15 01 1. 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA OPD ke dalam RENSTRA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	877.500		Kantor Dishub
			Foto Copy Dokumen Pra RKA-SKPD			1337 Lbr	468.000		
			Foto Copy Dokumen RKA-SKPD			1170 Lbr	409.500		
		2 15 01 1. 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	585.000		Kantor Dishub
			Foto Copy Dokumen RKA Perubahan-SKPD			1670 Lbr	585.000		
		2 15 01 1. 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase OPD yang menyusun Perencanaan Sesuai Standar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	585.000		Kantor Dishub
			Foto Copy Dokumen DPA-SKPD			1670 Lbr	585.000		
		2 15 01 1. 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja OPD	11 Dokumen	11 Dokumen	585.000		Kantor Dishub
			Foto Copy Dokumen SAKIP		1500 Lembar	1670 Lbr	585.000		
		2 15 01 1. 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja OPD	1 Tahun	1 Dokumen	-		Kantor Dishub
		2 15 01 1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	4.691.046.114		
		2 15 01 1. 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rasio Gaji ASN dan Belanja	12 Bulan	12 Bulan	3.180.431.634		Kantor Dishub
			- GAJI POKOK ASN				1.479.235.310		
			- TUNJANGAN KELUARGA PNS				155.263.556		
			- TUNJANGAN JABATAN				126.350.000		
			- TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM				62.637.750		
			- Tunjangan Beras				98.726.565		
			- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus				4.710.043		
			- Pembulatan Gaji				23.721		
			- Jaminan Kesehatan				72.135.929		
			- Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				14.200.760		
			- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				1.167.148.000		
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	2 15 01 1. 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang Dibayarkan Jasanya	52 Org	58 Orang	1.510.614.480		Kantor Dishub
			Honorarium Tenaga Adm. Kantor		12 Bulan	12 Bulan	298.617.600		
			Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		12 Bulan	12 Bulan	87.508.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Honorarium Tenaga Lapangan		12 Bulan	12 Bulan	1.108.444.800		
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		12 Bulan	12 Bulan	16.043.280		
		2 15 01 1. 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Keuangan Akhir Tahun (%) Persentase Realisasi Keuangan Sesuai Anggaran KAS (%)	12 Dokumen	12 Dokumen	-		Kantor Dishub
		2 15 01 1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	7.600.000		
		2 15 01 1. 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	2 Unit	6 Unit	7.600.000		Kantor Dishub
			- Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		1 Unit	2 Unit	6.400.000		
			- Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Roda 2		1 Unit	4 Unit	1.200.000		
		2 15 01 1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	12 Bulan	1 Tahun	88.000.000		
		2 15 01 1. 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (set)	15 Psg	88 Set	22.000.000		Kantor Dishub
			- Pengadaan Pakaian Dinas (PDL)		15 Psg	88 Set	22.000.000		
		2 15 01 1. 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN OPD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 Org	3 Org	66.000.000		Luar Daerah
			- Diklat PIM III		2 Org	1 Orang	22.000.000		
			- Diklat PIM IV		0	2 Orang	44.000.000		
		2 15 01 1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	12 Bulan	12 Blan	340.779.500		
		2 15 01 1. 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.197.500		Kantor Dishub
			- Belanja Alat Listrik		10 Unit	22 Unit	5.197.500		
		2 15 01 1. 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	24 Unit	8 Unit	61.200.000		Kantor Dishub
			- Pengadaan Alat Ukur		0	1 Unit	4.000.000		
			- Pengadaan GPS		0	2 Unit	30.000.000		
			- Pengadaan Printer		0	2 Unit	5.600.000		
			- Pengadaan Komputer PC		0	3 Unit	21.600.000		
		2 15 01 1. 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000		Kantor Dishub
			- Belanja Alat Kebersihan		12 Bulan	12 Bulan	6.500.000		
		2 15 01 1. 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Alat Tuklis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	22.682.000		Kantor Dishub
			- Belanja ATK		12 Bulan	12 Bulan	12.372.000		
			- Makanan dan Minuman Kantor		160 Dos	285 Doss	10.310.000		
		2 15 01 1. 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak (Dokumen)	25.000 Lbr	35.714 Lbr	12.500.000		
			- Cetak dan Penggandaan		25.000 Lbr	35.714 Lbr	12.500.000		Kantor Dishub

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	2 15 01 1. 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman (%) Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (%)	12 Bulan	12 Blan	232.700.000		
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		12 Bulan	12 Blan	89.700.000		Luar Daerah
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah		12 Bulan	12 Blan	143.000.000		Kab. Morowali
		2 15 01 1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30%	45%	636.600.000		
		2 15 01 1. 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi		3 Unit	5.100.000		Kantor Dishub
			- Pengadaan Finger Wajah		0	3 Unit	5.100.000		
		2 15 01 1. 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Mebeleur	24 Unit	13 Unit	57.500.000		Kantor Dishub
			- Pengadaan Meubelair		24 Unit	13 Unit	57.500.000		
		2 15 01 1. 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	5 Paket	574.000.000		Kantor Dishub
			- Pengadaan Tenda Besi		0	1 Set	24.000.000		
			- Pembangunan Parkir Kantor		0	1 Bangunan	200.000.000		
			- Paving Blok Halaman Belakang Kantor		0	1 Paket	150.000.000		
			- Pembangunan Gedung Kantor - Pos Kerja Pelabuhan Ulunambo		1 Bangunan	1 Bangunan	100.000.000		
			- Pembangunan Gedung Kantor - Pos Kerja Pelabuhan Kaleroang		1 Bangunan	1 Bangunan	100.000.000		
		2 15 01 1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	27.900.000		
		2 15 01 1. 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000		Kantor Dishub
			- Token Listrik Kantor		12 Bulan	12 Bulan	24.000.000		
		2 15 01 1. 08 03	Penyedeiaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (%) Persentase Peralatan Kerja yang diperbaiki (%)	15%	35%	3.000.000		Kantor Dishub
			- Servis Komputer dan Printer		5 Unit	7 Unit	3.000.000		
		2 15 01 1. 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Kebersihan Lingkungan Kantor OPD	12 Bulan	12 Bulan	900.000		Kantor Dishub
			- Jasa Angkut Sampah		12 Bulan	12 Bulan	900.000		
		2 15 01 1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	185.000.000		
		2 15 01 1. 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	30.000.000		Kantor Dishub
			- Servise Kendaraan Roda 4		1 Unit	1 Unit	22.500.000		
			- Service Kendaraan Roda 2		2 Unit	2 Unit	7.500.000		
		2 15 01 1. 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	1 Bangunan	5.000.000		Kantor Dishub
			- Belanja Bahan Bangunan Rehabilitasi Gedung Kantor		0	1 Bangunan	5.000.000		
		2 15 01 1. 04 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			150.000.000		Bungku Tengah
			- Rehabilitasi Pembangunan Pos Penagihan Retribusi Terminal Bungku 2 Unit		0	2 Bangunan	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	**2 15 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)**			4.258.500.000	**Dinas Perhubungan**	**DISHUB**
		2 15 02 2. 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang Ditetapkan	100%		-		
		2 15 02 2. 01 02	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ Yang ditetapkan dan disosialisasikan	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ Yang ditetapkan dan disosialisasikan	1 Dokumen		-		
		2 15 02 2. 01 03	Persentase kesesuaian rencana pembangunan LLAJ yang sesuai dengan rencana induk jaringan LLAJ	Persentase kesesuaian rencana pembangunan LLAJ yang sesuai dengan rencana induk jaringan LLAJ	30%		-		
		2 15 02 2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Jaringan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Prasarana pada Jaringan Jalan Di Kab. Morowali	0	5 Paket	1.350.000.000		Kab. Morowali
		2 15 02 2. 02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan			450.000.000		Kab. Morowali
			- Pengadaan dan Pemasangan PJU		0	1 Paket	450.000.000		
		2 15 02 2 02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan			750.000.000		Kab. Morowali
			- Marka Jalan		2500	2500 m2	200.000.000		
			- Pita Penggaduh			1 Paket	50.000.000		
			- Traffic Light		4 Titik	8 Titik	500.000.000		
		2 15 02 2 02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terpelihara dan direhabilitasi			150.000.000		Kab. Morowali
			- Rehabilitasi Alat Kelengkapan Jalan			1 Paket	150.000.000		
		2 15 02 2 02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang terpelihara dan direhabilitasi					Kab. Morowali
		2 15 02 2 03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			1 Dokumen	420.000.000		
		2 15 02 2 03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Penumpangn Tipe C	1 Dokumen		-		
		2 15 02 2 03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Bangunan Terminal untuk Pemenuhan Standar Tipe C	1 Bangunan		-		
		2 15 02 2 03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana		2 Unit	220.000.000		Kec. Bungku Tengah
			- Pembangunan Halte		0	2 Unit	120.000.000		
			- Pembangunan Tempat Parkir di Tepi Jalan Areal Terminal Bungku			1 Paket	100.000.000		
		2 15 02 2 03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal nyang Terpelihara dan direhabilitasi		1 Paket	200.000.000		Kec. Bungku Tengah
			- Pemasangan Paving Blok Pelataran Terminal Bungku		0	1 Paket	200.000.000		
		2 15 02 2 03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Terminal C			-		
		2 15 02 2 04	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				7.500.000		
		2 15 02 2 04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegritasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan			-		
		2 15 02 2 04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang diawasi	1 Bangunan	1 Bangunan	7.500.000		
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir		1 Kegiatan	3 Kegiatan	7.500.000		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	2 15 02 2 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 Gedung	1 Gedung	707.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Infrastruktur Layanan Dasar	kondisi baik	2 15 02 2 05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen - Pengujian Kendaraan Bermotor		1 Paket	652.000.000		KTM Bungku
			- Pembangunan Gedung Administrasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Lanjutan)		1 Bangunan	1 Bangunan	450.000.000		
			- Cat and Fill dan Timbunan Jalan Mauk Kompleks Pengujian Kendaraan Bermotor		0	1 Paket	200.000.000		
			- Pengadaan Kabel SR (300 Mtr)		0	300 Mtr	2.000.000		
		2 15 02 2. 05 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 Orang	25.000.000		Luar Daerah
			Diklat Pengujian Kendaraan Bbermotor		0	1 Orang	25.000.000		
		2 15 02 2. 05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji BerkalaKendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Wajib Uji Berkala			-		
		2 15 02 2. 05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Slip dan Buku Keur (Buku Uji)			-		
		2 15 02. 2. 05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di sosialisasikan			-		
		2 15 02. 2. 05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Dokumen Identifikasi Dan Analisis			-		
		2 15 02. 2. 05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasrana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara			-		
		2 15 02. 2. 05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dikoordinasikan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah-Palu			2 Kegiatan	25.500.000		Palu
		2 15 02. 2. 05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi			5.000.000		Kab. Morowali
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1 Kegiatan	5.000.000		
		2 15 02. 2. 06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota				-		
		2 15 02. 2. 06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Panjang Jalan di Kab. Morowali			-		
		2 15 02. 2. 06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			-		
		2 15 02. 2. 07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		0	1 Regulasi	6.500.000		
		2 15 02. 2. 07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin			-		
		2 15 02 2. 07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Penilai Andalalin			-		
		2 15 02 2 07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian HasilAndalalin	Jumlah Penilaian Hasil		1 Kegiatan	6.500.000		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.500.000		Palu
		2 15 02 2. 07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang diawasi			-		
		2 15 02 2. 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit	13 Unit	1.755.000.000		Kab. Morowali
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	2 15 02 2. 09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang	7 Unit	8 Unit	1.740.000.000		Kab. Morowali
			- Pengadaan Angkutan Orang/Barang Desa Geresa			1 Unit	570.000.000		Desa Geresa
			- Pengadaan Angkutan Orang/Barang Desa Uwedago			1 Unit	570.000.000		Desa Uwedago

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Tanjung Harapan			1 Unit	100.000.000		Desa Tanjung Harapan
			-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Paku			1 Unit	100.000.000		Desa Paku
			-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Bakala			1 Unit	100.000.000		Desa Bakala
			-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Pulau Tengah			1 Unit	100.000.000		Desa Pulau Tengah
			-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Poaro			1 Unit	100.000.000		Desa Poaro
			-Pengadaan Perahu Penyeberangan Desa Pulau Tiga			1 Unit	100.000.000		Desa Pulau Tiga
		2 15 02 2. 09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dikendalikan dan diawasi	2 Kegiatan	3 Kegiatan	15.000.000		DISHUB
			Perjalanan Dalam Daerah		2 Kegiatan	3 Kegiatan	15.000.000		Kab. Morowali
		2 15 02 2. 11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		
		2 15 02 2. 11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah di Kab. Morowali			-		
		2 15 02 2. 11 02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan jumlah kegiatan sosialisasi			-		
		2 15 02 2. 11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian (Penertiban Angkutan)			-		
		2 15 02 2. 14	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Kegiatan	12.500.000		
		2 15 02 2. 14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban		1 Kegiatan	12.500.000		Palu
			Perjalanan Luar Daerah - Palu			1 Kegiatan	12.500.000		
		2 15 02 2. 16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		
		2 15 02 2. 16 03	Pemgendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif			-		
		2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				6.470.900.000	**Dinas Perhubungan**	**DISHUB**
		2 15 03 3 01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			1200 Lbr	350.000		Kantor Dishub
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik		Cetak dan Penggandaan - Dokumen Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota			1200 Lbr	350.000		
		2 15 03 3 01 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan		1200 Lbr	350.000		Kantor Dishub
			Cetak dan Penggandaan - Dokumen Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut			1200 Lbr	350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 15 03 3 02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2 Kegiatan	54.350.000		
		2 15 03 3 02 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan		9 Kegiatan	350.000		
			Cetak dan Penggandaan Dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan			1200 Lembar	350.000		Kantor Dishub
		2 15 03 3 02 02	Koordinmasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		13 Kegiatan	54.000.000		
			Sosialisasi Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran			13 Kegiatan	54.000.000		Kab. Morowali
		2 15 03 3 06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			1200 Lbr	500.000		
		2 15 03 3 06 01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lintas Penyeberangan Jumlah Dokumen PersetujuanPengoperasian Kapal		2 Kegiatan	500.000		
			Belanja ATK Dalam Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah			1 Paket	300.000		Kantor Dishub
			Cetak dan Penggandaan - Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten			1000 Lembar	200.000		Kantor Dishub
		2 15 03 3 08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal			1200 Lbr	30.350.000		
		2 15 03 3 08 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan		6 Kegiatan	350.000		
			Cetak dan Penggandaan - Dokumen Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal			1200 Lembar	350.000		Kantor Dishub
		2 15 03 3 08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		3 Kegiatan	30.000.000		
			Perjalanan Dalam Daerah			2 Kegiatan	12.000.000		Kab. Morowali
			Perjalanan Luar Daerah - Palu			1 Kegiatan	18.000.000		Palu
		2 15 03 3 11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			4 Kegiatan	135.000.000		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	2 15 03 3 11 01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Disusun			-		
		2 15 03 3 11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Kegiatan	4 Kegiatan	135.000.000		
			- Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau			2 Kegiatan	135.000.000		Kec. Menui Kepulauan dan Bungku Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 15 03 3 12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				6.250.000.000		
		2 15 03 3 12 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu	1 Unit	14 Unit	5.500.000.000		
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Samarengga (Lanjutan)			1 Unit	500.000.000		Desa Samarengga
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Padei Laut (Lanjutan)			1 Unit	200.000.000		Desa Padei Laut
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Matarape (Lanjutan)			1 Unit	400.000.000		Desa Matarape
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pulau Tiga (Lanjutan)			1 Unit	200.000.000		Desa Pulau Tiga
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tanjung Tiram (Lanjutan)			1 Unit	200.000.000		Desa Tanjung Tiram
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tanjung Harapan (Lanjutan)			1 Unit	400.000.000		Desa Tanjung Harapan
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Unsongi (Lanjutan)			1 Unit	200.000.000		Desa Unsongi
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Topogaro (Lanjutan)			1 Unit	200.000.000		Desa Topogaro
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Umbele Kkec. Bumi Raya			1 Unit	450.000.000		Desa Umbele Kec. Bumi Raya
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Solonsa			1 Unit	200.000.000		Desa Solonsa
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Moahino (Lanjutan)			1 Unit	750.000.000		Desa Moahino
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Oneete (Lanjutan)			1 Unit	750.000.000		Desa Oneete
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pulau Bapa (Lanjutan)			1 Unit	150.000.000		Desa Pulau Bapa
			- Pembangunan Tambatan Perahu Desa Padabaho (Lanjutan)			1 Unit	750.000.000		Desa Padabaho
			- Perencanaan Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu			1 Dokumen	100.000.000		Kab. Morowali
			- Pengawasan Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu			1 Dokumen	50.000.000		Kab. Morowali
		2 15 03 3 12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan dan Dermaga/Tambatan Perahu	0	2 Unit	750.000.000		
			- Rehabilitasi Pelabuhan Kaleroang			1 Unit	550.000.000		Desa Kaleroang
			- Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Sainoa			1 Unit	200.000.000		Desa Sainoa
		2 15 03 3 19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal			1200 Lbr	350.000		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	2 15 03 3 19 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk penertiban perijinan dan non perijinan		6 Dokumen	350.000		
			Cetak dan Penggandaan Dokumen Persyaratan Perolehan Izin Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		0	1200 Lbr	350.000		Kantor Dishub
		2 15 03 3 19 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			-		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali yang didalamnya mencakup Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun setipa tahun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan.

Dengan adanya Rencana Kerja, diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali serta seluruh aparatur dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instasi terkait untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Morowali, 05 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOROWALI

Drs. EMIL, M.Si
NIP. 19670402 198603 1 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Rencana Kerja (RENJA) diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program dapat tercapai.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan dalam setiap kegiatan. Harapan kami Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali dapat diwujudkan.

Mengetahui: KEPALA DINAS,	Morowali, 03 Juli 2024 SEKRETARIS,
Drs. MOH. ADZAN DJIRIMU, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19710108 199009 1 001	**RIDWAN LASAMPE, S.Pd., M.Pd.** Pembina, Tkt I NIP. 19710929 199801 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud danTujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu-isu Penting Terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah..... 36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Kabupaten 45
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali..... 47
3.2 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali..... 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan da Pendanaan 58

BAB V PENUTUP……... 52

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ……..…….....	10
2.2	Data Kinerja Yang Mengacu Kerpada Tujuan dan Sasaran RPJM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata …….……..	21
2.3	Indentifikasi Permasalahan dan Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ……	21
2.4	Tantanagn dan Peluang Dalam Pengembangan Layanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata …	34
2.5	Reviu Terhadap Renstra Dinas Pemuda Olah dan Pariwisata …….……..	38
3.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan ……...	47
3.2	Rumusan Program dan Kegiataa Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Morowali dan Kinerja Pada Tahun 2024……..…	49
4.1	Program / Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Morowali TA 2024…	58

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menjadi tidak berlaku lagi, sehingga sebagai konsekuensi dari perubahan perubahan regulasi tersebut, maka Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) wajib untuk disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis, dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Rancangan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2024, adalah sebagai berikut.

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulwesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

9) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali.

11) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali;

12) Peraturan Bupati Morowali Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali ini disusun untuk :

a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah;

b. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;

c. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

a. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali selama satu tahun;

b. Menjadi sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja dan proses penyusunan Renja OPD,keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan RPJMD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-2, dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengacu pada hasil

laporan kinerja Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Pokok-pokok materinya, antara lain: 1). Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2). Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3). Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5). Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan 6). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Memuat isu-isu yang dipandang strategis mengenai pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Dalam hal ini perlu diuraikan gambaran mengenai: 1). Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi; 2). Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program daerah; 3). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan 4). Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, disertai dengan penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional / Kabupaten Morowali.

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional/Provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rumusan Rencana Kerja disertai dengan alokasi anggaran setiap program dan kegiatan OPD untuk tahun 2024.

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan rumusan program dan kegiatan OPD, beserta indikator kinerja pada Tahun 2024, serta perkiraan maju tahun 2025. Bagian ini juga berisikan: a). Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b). Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, (antara lain meliputi: jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya); c). Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4.2. Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan.

Memuat program/kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2024 serta perkiraan maju tahun 2025.

Bab V. Penutup

Memuat catatan-catatan penting dalam penyusunan Renja OPD yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali sangat berkaitan dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali. Setiap kajian evaluasi Renja Tahunan merupakan bagian dari capaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang mencakup rencana pembangunan dua tahunan.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 disajikan pada Tabel TC.29 sebagai berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali (s/d Tahun 2023)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Tingkat realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2022	2019	2020	2020	8 = (7/6)	2021	2021	11 = 5+7+10	12 = 11/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Lakip OPD**	**B**	**C**	**C**	**C**	**1.0**	**C**	**C**	**4**	**3.0**
2.19.01.2.01	**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2	1.0	2	2	6	3.0

2.19.01.2.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	34	34	34	34	1.0	34	34	102	3.0
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	34	345	34	34	1.0	34	34	102	3
2.19.01.2.05	**Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0
2.19.01.2.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3

2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Kebersihan KantoraPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	2	2	2	2	1.0	2	2	6	3
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	tersedianya peralatan dan perlengkapan ktr.	2	2	2	2	1.0	2	2	6	3
2.19.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**

2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan	12	12	12	12	1.0	12	12	36	3
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	1.0	4	4	12	3
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1	2	2	2	1.0	2	2	6	3

2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**3**	**2**	**3**	**3**	**1.0**	**5**	**5**	**8**	**3.0**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.02.2.01.02	Pembinaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha PemulaOrganisasi Kepemudaan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	105	3

2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3.0**
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	4	1	1	1	1.0	1	1	3	3
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Meningkatnya Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi**	**7**	**2**	**3**	**3**	**1.0**	**5**	**5**	**8**	**3**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3**
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	3	3	3	3	1.0	3	3	9	3

2.19.03.2.01.03	Pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12	12	12	12	1.0	12	12	36	3
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3**
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	3	3	3	1.0	3	3	7	3
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	97	50	50	50	1	50	50	3	3
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3**
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	48	15	15	15	1.0	15	15	78	3

2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif**	**100%**	**1**	**2**	**2**	**1.0**	**3**	**3**	**5**	**3**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3**
2.19.04.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	3	3	3	1.0	3	3	9	3
3.6.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Lama Tinggal WIsatawan (Leng of Stay)**	**5**	**3**	**3**	**3**	**1.0**	**5**	**5**	**9**	**3.0**
3.6.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3**
3.6.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	1	1	1	1.0	1	1	3	3

3.6.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7	5	5	5	1.0	5	5	15	2.1
3.6.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	2	2	1.0	2	2	6	3.0
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara**	**20**	**5**	**10**	**10**	**1.0**	**10**	**10**	**25**	**1.3**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3**
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	5	5	5	1.0	5	5	14	3

3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata**	**10**	**3**	**5**	**5**	**1.0**	**7**	**7**	**15**	**1.5**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.0**	**100**	**100**	**300**	**3**
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6	6	6	6	1.0	6	6	18	3
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	18	10	15	15	1.0	15	15	40	2.2

Berdasarkan Tabel 2.1, kinerja program/kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali pada periode sebelumnya telah dapat dicapai dengan baik, dimana capaian target program dan kegiatannya mencapai 100%. Demikian pula dengan pencapaian target Renstra.

Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali periode tahun 2024-2026, pada tahun 2023 menjadi Tahun pelaksanaan ke-lima, dan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini juga diharapkan menjadi patokan sehingga seluruh rencana kerja program kegiatan Tahun 2024 dapat dituntaskan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ukuran keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, sebagai wujud pelayanan perangkat daerah yang diemban ditunjukkan data kinerja yang menjadi target untuk tahun 2019 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Target Data Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kab. Morowali Tahun 2024-2026

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	3											
1	**Nilai Lakip OPD**			**C**	**C**	**B**	**B+**	**C**	**C**	**B**	**B+**	
2	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
3	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			6	6	6	6	6	6	6	6	
4	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

5	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan			35	35	35	35	35	35	35	35	
6	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan			35	35	35	35	35	35	35	35	
7	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
8	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan			0	2	3	3	0	2	3	3	
9	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
10	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	

12	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
13	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
14	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
15	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
16	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
17	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	

18	tersedianya peralatan dan perlengkapan ktr.			2	2	2	2	2	2	2	2	
19	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan			12	12	12	12	12	12	12	12	
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	

24	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
25	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
26	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
27	**Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**			**5**	**5**	**7**	**10**	**5**	**5**	**7**	**10**	
28	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

29	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			0	20	25	30	0	20	25	30	
30	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			35	35	36	37	38	39	40	41	
31	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
32	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan			1	1	1	1	1	1	1	1	
33	**Meningkatnya Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi**			**5**	**7**	**10**	**15**	**5**	**7**	**10**	**15**	
34	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	

35	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar			3	3	3	4	3	3	3	4	
36	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			15	15	17	20	15	15	17	20	
37	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
38	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			3	3	3	3	3	3	3	4	
39	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			50	50	55	60	50	50	55	60	
40	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

41	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			15	15	20	30	15	15	20	30	
42	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif**			**1**	**3**	**5**	**7**	**1**	**3**	**5**	**7**	
43	**Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
44	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			3	3	3	3	3	3	3	3	
45	**Lama Tinggal WIsatawan (Leng of Stay)**			3	5	**5**	**5**	3	5	**5**	**5**	
46	**Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
47	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			1	1	2	2	1	1	2	2	

48	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			5	7	10	15	5	7	10	15	
49	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2	2	3	5	2	2	3	5	
50	**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara**			**10**	**20**	**23**	**25**	**10**	**20**	**23**	**25**	
51	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
52	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			5	5	5	5	5	5	5	5	
53	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata**			**7**	**10**	**15**	**20**	**7**	**10**	**15**	**20**	

54	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
55	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			6	6	6	6	6	6	6	6	
56	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			15	18	25	35	15	18	25	35	

2.3 Isu-isu Penting Terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan factor penghambat dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan dan Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Terkait Dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

No	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Faktor Penghambat
1	*2*	*3*
1	Peningkatan kualitas partisipasi dan prestasi pemuda belum optimal	Masih rendahnya daya saing pemuda, terutama dalam pengembangan budaya kreatif, inovatif dan partisipasiyang berdampak pada rendahnya keterampilan kecakapan hidup (*life skill*)
		Kompleksnya masalah-masalah social di kalangan pemuda
2	Peningkatan kualitas dan prestasi olahraga belum optimal	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan intensitas pembinaan serta kemampuan bersaing baik bagi para pelatih maupun para atlit dan cabor-cabornya.
		Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi, serta manajemen pengelolaannya.
		Belum signifikannya dukungan dunia usaha di tingkat lokal yang mampu berkontribusi positif bagi pengembangan prestasi olahraga untuk menghasilkan atlit maupun pelatih yang professional.
3	Tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Belum optimalnya penataan dan pengelolaan titik-titik destinasi wisata yang tersebar dan potensial, baik menyangkut atraksi, aminitas, aksesibilitas, maupun ancelliary.
		Kualitas dan kapasitas ketersediaan hotel dan restaurant serta dukungan infrastruktur penunjang yang masih terbatas
4	Belum optimalnya kinerja layanan perkantoran	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan/dan layanan lainnya

2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 adalah**:**

***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI YANG SEJAHTERA BERSAMA BERKEADILAN DAN BERTAQWA"*,**

dengan kata kunci yaitu; Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan nilai-nilai kebenaran.
2. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dengan melibatkan Usaha Kecil Menengah dan dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap menjaga hak-hak pekerja, iklim infestasi yang baik dan kelestaria alam.
3. Menigkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga serta mengingkatkan kualitas kejuaraan olahraga daerah untuk mendorong prestasi olahraga daerah abik tingkat provinsi maupun nasional.
4. Menigkatkan partisipasi dan keikutsertaan pemuda dalam pembinaan karakter pemuda (Paskibraka) dan wirausaha muda serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan daerah untuk menciptakan organisasi kepramukaan daerah yang berdaya saing.

Berdasarkan visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih serta kata kunci dan uraiannya, serta misi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali memiliki peran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya. Mengingat eratnya kaitan antara Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2023 dengan Dokumen RPJMD 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan analisa terhadap RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 dan memperhatikan permasalahan serta faktor penghambat dalam pelayanan dan peningkatan kinerja Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali, terutama untuk mewujudkan dan mengoptimalkan pencapaian terhadap target kinerja dari 7 (Lima) Indikator Kinerja Utama sebagai fokus sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali, maka untuk pelaksanaan program dan kegiatan OPD di tahun 2023, segala permasalahan serta faktor penghambatnya harus dapat diminimalisir.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali, sebagai berikut.

Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang Dalam Pegembangan Layanan
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali

No	Bidang Urusan Sesuai Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	**2**	**3**	**4**
1	Pemuda	Menguatnya kebutuhan eksternal untuk peningkatan daya saing pemuda yang menuntut kemampuan kreatif, inovatif dan partisipasi pemuda di segala bidang pembangunan	Semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi melalui berbagai media serta makin tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih.
		Semakin kompleksnya masalah-masalah social di kalangan pemuda	Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah social pemuda diarahkan secara lintassektor melalui pelibatan berbagai pihak.
2	Olahraga	Makin tingginya standar prestasi olahraga menuntut peningkatan kualitas dan intensitas pembinaan serta kemampuan bersaing baik bagi para pelatih maupun para atlit dan cabor- cabornya.	Makin maraknya event-event olahraga di tingkat provinsi, nasional dan luar negeri yang berpeluang untuk diikuti oleh atlit- atlit daerah baik perorangan maupun club.
		Makin tingginya standar prestasi olahraga menuntut peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi, serta manajemen pengelolaannya.	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang banyak tersebar baik sebagai sarana dan prasarana public maupun milik swasta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga.
		Belum signifikannya perkembangan dunia usaha di tingkat lokal yang mampu berkontribusi positif bagi pengembangan prestasi olahraga untuk menghasilkan atlit maupun pelatih yang professional.	Semakin terbukanya kesempatan berkompetisi bagi para atlit professional di tingkat nasional dan dunia.

3	Pariwisata	Ketersediaan titik-titik destinasi wisata yang tersebar dan potensial untuk dikembangkan yang menuntut penataan dan pengelolaan secara profesional.	Sulawesi Tenggara (Labengki) merupakan pintu gerbang pariwisata nasional yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Morowali untuk menjadi daerah kunjungan wisata baik bagi mancanegara maupun lokal.
			Adanya kebijakan pemerintah untuk menjadikan kawasan Sambori dan sekitarnya sebagai KEK Pariwisata Nasional.
		Tumbuh dan berkembangnya secara pesat event dan atraksi wisata termasuk di dalamnya ekowisata, desa wisata, serta keberadaan kuliner khas daerah yang menuntut pemasaran secara luas dan menjangkau segmen-segmen pasar pariwisata secara efektif.	Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui system pemasaran pariwisata dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informatika semakin terbuka.
			Ketersediaan para pelaku pengembangan pariwisata yang selama ini beroperasi di Kabupaten Morowali dapat dimanfaatkan sebagai mitra pemerintah daerah.
		Kualitas dan kapasitas ketersediaan hotel dan restaurant serta dukungan infrastruktur penunjang yang masih terbatas menuntut keterlibatan banyak pihak termasuk pihak swasta untuk mampu mengejar ketertinggalan standarisasi layanan kepariwisataan.	Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui pelayanan perizinan serta penanaman modal semakin dipermudah.
4	Ekonomi Kreatif	Tidak tersedianya Pasar barang seni dan Produk kerajinan yang menjadi ciri khas Kabapaten Morowali.	Semakin meningkatnya tempat-tempat wisata yang menarik wisatwan baik wisatawan mancanegara maupun lokal.

2.3.4. Formulasi Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meskipun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi yang cukup memadai, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan. Beberapa isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ke depan, dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Partisipasi dan Prestasi Pemuda;
2. Prestasi olahraga;
3. Kualitas pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata;
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Sebagai langkah awal dilakukan analisis terhadap kebutuhan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang harus termuat di dalam dokumen Renja Tahun 2022, baik mengenai kesesuaian program dan kegiatan, penyesuaian indicator kinerja program dan kegiatan, maupun mengenai kebutuhan anggaran.

Dalam proses penyempurnaan, selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dari penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan layanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Proses tersebut telah menghasilkan rumusan-rumusan baru terhadap penempatan kegiatan dalam program, dengan penyesuaian indikator serta

anggaran indikatif, sehingga secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD, khususnya yang terkait dengan urusan yang diselenggarakan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali, dan program/kegiatan, serta indikator kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang menjadi cacatan untuk disesuaikan pada perencanaan tahun 2022, disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Reviu Terhadap Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Untuk Tahun 2023

No	Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Untuk Tahun Berkenaan (2023)					Hasil Analisis KebutuhanUntuk Renja Tahun 2023					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Kab. Morowali***	**Nilai LAKIP OPD**	**A**	**1.786.343.740**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Kab. Morowali***	**Nilai LAKIP OPD**	**A**	**1.416.000.000**	
2	- **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	**Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**50.000.000**	- **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	**Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**50.000.000**	
3	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	50.000.000	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	50.000.000	
4	- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	-	- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	-	
5	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	-	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 tahun	35	-	
6	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	-	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	-	
7	- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**50.000.000**	- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**50.000.000**	
8	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	50.000.000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	50.000.000	
9	- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase 'Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**376.343.740**	- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase 'Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**400.000.000**	

10	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	3.785.940	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	5.000.000	
11	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	25.000.000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	25.000.000	
12	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	52.460.800	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	55.000.000	
13	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	18.575.000	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	20.000.000	
14	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	14.000.000	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	15.000.000	
15	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	262.522.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	280.000.000	
16	- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**100%**	**1.130.000.000**	- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**100%**	**730.000.000**	
17	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	1.100.000.000	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	700.000.000	
18	- Pengadaan Mebel	Kab. Morowali	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	30.000.000	- Pengadaan Mebel	Kab. Morowali	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	30.000.000	
19	- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**54.000.000**	- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**60.000.000**	
20	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.000.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.000.000	

21	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.600.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	35.000.000	
22	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	8.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	
24	**- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**126.000.000**	**- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Kab. Morowali***	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**126.000.000**	
25	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	15.000.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	15.000.000	
26	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	111.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	111.000.000	
27	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Kab. Morowali***	**Tingkat partisipasi pemuda dalam pembinaan karakter pemuda**	**5%**	**1.300.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Kab. Morowali***	**Tingkat partisipasi pemuda dalam pembinaan karakter pemuda**	**5%**	**1.300.000.000**	
28	**- Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina**	**1**	**900.000.000**	**- Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina**	**100%**	**900.000.000**	
29	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Morowali	Jumlah wirausaha muda yang meningkat kapasitasnya	20	100.000.000	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Morowali	Jumlah wirausaha muda yang meningkat kapasitasnya	30	100.000.000	

30	- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Morowali	Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	33	800.000.000	- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Morowali	Jumlah pemuda pelopor	33	800.000.000	
31	**- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tinggkat Daerah Kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Persentase organisasi pemuda yang dibina**	**9%**	**400.000.000**	**- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tinggkat Daerah Kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Persentase organisasi pemuda yang dibina**	**9%**	**400.000.000**	
32	- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah Pemuda yang meningkat kapasitasnya	33	400.000.000	- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	33	400.000.000	
33	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada tingkat Provinsi**	**15**	**1.500.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada tingkat Provinsi**	**15**	**1.500.000.000**	
34	**- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**	Kab. Morowali	**Jumlah cabang olahraga pada jenjang pendidikan yang dibina**	**13**	**600.000.000**	**- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**	Kab. Morowali	**Jumlah cabang olahraga pada jenjang pendidikan yang dibina**	**13**	**600.000.000**	
35	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Morowali	Jumlah Kegiatan pengembangan Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan	2	100.000.000	- Jumlah Kegiatan pengembangan Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan	Kab. Morowali	Jumlah Event olahraga satuan pendidikan dasar yang dilaksanakan	2	100.000.000	
36	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	15	500.000.000	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	15	500.000.000	
37	**- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah Kabupaten**	***Kab. Morowali***	**Jumlah kejuaraan olahraga daerah yang diselenggarakan**	**3**	**750.000.000**	**- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah Kabupaten**	***Kab. Morowali***	**Jumlah kejuaraan olahraga daerah yang diselenggarakan**	**3**	**750.000.000**	
38	- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3	600.000.000	- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah kejuaraan cabang olahraga daerah yang dilaksanakan	3	600.000.000	

39	- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Morowali	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	50	150.000.000	- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Morowali	Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam kejuaraan	50	150.000.000	
40	**- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**	**Kab. Morowali**	**persentase Atlit berprestasi yang dibina**	**100%**	**150.000.000**	**- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**	**Kab. Morowali**	**persentase Atlit berprestasi yang dibina**	**100%**	**150.000.000**	
41	- Pemberian Penghargaan Olaraga Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	15	150.000.000	- Pemberian Penghargaan Olaraga Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah atlit dan pelatih berprestasi yang diberikan penghargaan	15	150.000.000	
42	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kab. Morowali**	**Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan**	**5**	**200.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**5**	**200.000.000**	
43	**- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Organisasi Pramuka yang dibina**	**5**	**200.000.000**	**- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Organisasi Pramuka yang dibina**	**5**	**200.000.000**	
44	- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	200.000.000	- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	200.000.000	
45	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Kab. Morowali***	**Lama Tinggal Wisatawan**	**5**	**700.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Kab. Morowali***	**Lama Tinggal Wisatawan**	**5**	**700.000.000**	
46	**- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola**	1	**700.000.000**	**- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola**	**2**	**700.000.000**	
47	- Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	100.000.000	- Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	100.000.000	
48	- Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	500.000.000	- Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	500.000.000	

49	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2	100.000.000	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2	100.000.000	
50	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kab. Morowali**	**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara**	**2%**	**300.000.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kab. Morowali**	**Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan**	**5%**	**300.000.000**	
51	**- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**5.490**	**300.000.000**	**- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten**	**Kab. Morowali**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**6.000**	**300.000.000**	
52	- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5	300.000.000	- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5	300.000.000	
53	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kab. Morowali**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata**	**10%**	**701.946.860**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kab. Morowali**	**Persentase Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif pendukung sektor pariwisata**	**10%**	**701.946.860**	
54	**- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	***Kab. Morowali***	**Persentase pelaku usaha yang dibina**	**100%**	**701.946.860**	**- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	***Kab. Morowali***	**Persentase pelaku usaha yang dibina**	**100%**	**701.946.860**	
55	- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6	200.150.000	- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6	200.150.000	
56	- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Morowali	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	18	501.796.860	- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Morowali	Jumlah pelaku usaha kreatif sektor pariwisata yang dilatih	18	501.796.860	

	JUMLAH	**6.488.290.600**	**JUMLAH**	**6.117.946.860**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali telah didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah dan Forum Gabungan Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Morowali.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menaikkan output potensial sehingga trajectory ekonomi dan mampu bangkit kembali secara berkelanjutan,".

Dalam pembangunan kepariwisataan, pemerintah merumuskan 9 strategi yang meliputi: 1). **Peningkatan kualitas dan akses destinasi pariwisata,** melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi dan kualitas amenitas (3A). didukung oleh penguatan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (2P)"; 2). **Penguatan data dan informasi,** melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan. Selain itu juga peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata; 3). **Peningkatan akses pembiayaan,** melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya; 4). **Intensifikasi layanan sistem pembayaran digital**, melalui langkah-langkah BI serta jajaran perbankan; 5). **Penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia;** 6). **Penguatan akses/konektivitas darat dan udara,** melalui percepatan pengembangan kapasitas Bandara, meningkatkan daya tampung penumpang dan penguatan prasarana pendukung navigasi untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke destinasi wisata, serta pembangunan aksesibilitas lainnya; 7). **Pengembangan atraksi yang terintegrasi**, melalui paket-paket wisata; 8). **Peningkatan amenitas**, melalui kampong- pampung / desa wisata, proses sertifikasi lahan untuk

pembangunan fasilitas pendukung destinasi, peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyedian fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata, dan 9). **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**, melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata.

Dalam pembangunan kepemudaan, Pemerintah menetapkan 13 prioritas nasional, yaitu ;1). Pemuda Relawan Antisipasi Bencana Alam; 2). Kota Layak Pemuda; 3). Pemuda Tani; 4). Pemuda Maritim; 5). Pemuda Pelopor; 6). Pemuda Kreatif; 7). Sarjana Penggerak Pedesaan; 8). Pemimpin Muda; 9). Wirausaha Muda; 10). Pemuda Relawan Anti Narkoba; 11). Pusat Pelatihan Pemuda; 12). Pemuda Cinta Damai Lintas Agama, dan 13). Bank Musik. Di sektor pembangunan keolahragaan, Pemerintah pada tahun 2023 tetap akan memprioritaskan pengembangan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas, serta meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Morowali

Untuk Tahun 2023, pembangunan Kabupaten Morowali dilaksanakan dengan tema “Memantapkan Kesejahteraan Bersama dengan memajukan Infrastruktur dan pelayanan Publik”. Pemerintah Kabupaten Morowali telah menetapkan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; (3) Percepatan Pengentasan Kemiskinan; (4) Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan; (5) Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Produksi Pangan; (6) Pengembangan PUD, dan Investasi; (7) Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Wilayah; (8) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan kearifan local, dan (9) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Titik tekan prioritas tersebut diarahkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu; aspek inovasi daerah, produk unggulan daerah, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Memperhatikan kebijakan-kebijakan tersebut, tergambar bahwa titik tekan pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2023 sangat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali, adalah dalam rangka mendukung kebijakan tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan, indikator tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasasan Strategis
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Nilai LAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.	Meningkatnya Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Meningkatkan Partisipasi pemuda dalam pembinaan Karakter Pemuda dan Prestasi Olahraga Daerah di tingkat Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembinaan Karakter Pemuda	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembinaan Karakter Pemuda dan Prestasi Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi
		Prestasi Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi	
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) Wisatawan	Mengingkatnya Lama Tinggal dan Kunjungan Wisatawan
		Kunjungan Wisatawan	

3.2.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai indikator sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

3.3 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas terdiri dari 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana Kabupaten Morowali sebesar Rp. 6.500.000.000,00.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat seperti yang tersaji pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel . 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah Kabupaten Morowali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Lakip OPD**		**A**	**1.786.343.740**	DAU		**A**	**1.416.000.000**
2.19.01.2.01	**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**50.000.000**	DAU		**100%**	**50.000.000**
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		6	50.000.000	DAU		6	50.000.000
2.19.01.2.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**-**	DAU		**100%**	**-**
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		35	-	DAU		35	-

2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		35	-	DAU		35	-
2.19.01.2.05	**Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**50.000.000**	DAU		**100%**	**50.000.000**
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		3	50.000.000	DAU		3	50.000.000
2.19.01.2.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**376.343.740**	DAU		**100%**	**400.000.000**
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		12	3.785.940	DAU		12	5.000.000
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		10	25.000.000	DAU		10	25.000.000
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan		12	52.460.800	DAU		12	55.000.000
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Kebersihan KantoraPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan		12	18.575.000	DAU		12	20.000.000

2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		12	14.000.000	DAU		12	15.000.000
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		12	262.522.000	DAU		12	280.000.000
2.19.01.2.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan**		**100%**	**1.130.000.000**	DAU		**100%**	**730.000.000**
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		2	1.100.000.000	DAU		2	700.000.000
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia		5	30.000.000	DAU		5	30.000.000
2.19.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**		**100%**	**54.000.000**	DAU		**100%**	**60.000.000**
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan		12	5.000.000	DAU		12	5.000.000

2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan		12	30.600.000	DAU		12	35.000.000
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan		4	10.000.000	DAU		4	10.000.000
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan		4	8.400.000	DAU		4	10.000.000
2.19.01.2.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**126.000.000**	DAU		**100%**	**126.000.000**
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		5	15.000.000	DAU		5	15.000.000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		1	111.000.000	DAU		1	111.000.000
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**		**5%**	**1.300.000.000**	DAU		**5%**	**1.300.000.000**

2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**1**	**900.000.000**	DAU		**100%**	**900.000.000**
2.19.02.2.01.02	Pembinaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha PemulaOrganisasi Kepemudaan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		20	100.000.000	DAU		30	100.000.000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		33	800.000.000	DAU		33	800.000.000
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**9%**	**400.000.000**	DAU		**9%**	**400.000.000**
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan		33	400.000.000	DAU		33	400.000.000

2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Meningkatnya Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi**		**15**	**1.500.000.000**	DAU		**15**	**1.500.000.000**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**13**	**600.000.000**	DAU		**13**	**600.000.000**
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		2	100.000.000	DAU		2	100.000.000
2.19.03.2.01.03	Pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		15	500.000.000	DAU		15	500.000.000
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**3**	**750.000.000**	DAU		**3**	**750.000.000**
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		3	600.000.000	DAU		3	600.000.000

2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		50	150.000.000	DAU		50	150.000.000
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan**		**100%**	**150.000.000**	DAU		**100%**	**150.000.000**
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		15	150.000.000	DAU		15	150.000.000
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif**		**5**	**200.000.000**	DAU		**5**	**200.000.000**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan**		**5**	**200.000.000**	DAU		**5**	**200.000.000**
2.19.04.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		3	200.000.000	DAU		3	200.000.000
3.6.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Lama Tinggal WIsatawan (Leng of Stay)**		**5**	**700.000.000**	DAU		**5**	**700.000.000**

3.6.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola**		1	**700.000.000**	DAU		**2**	**700.000.000**
3.6.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		1	100.000.000	DAU		1	100.000.000
3.6.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	500.000.000	DAU		1	500.000.000
3.6.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2	100.000.000	DAU		2	100.000.000
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara**		**2%**	**300.000.000**	DAU		**5%**	**300.000.000**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**5.490**	**300.000.000**	DAU		**6.000**	**300.000.000**

3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		5	300.000.000	DAU		5	300.000.000
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata**		**10%**	**701.946.860**	DAU		**10%**	**701.946.860**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan**		**100%**	**701.946.860**	DAU		**100%**	**701.946.860**
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		6	200.150.000	DAU		6	200.150.000
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		18	501.796.860	DAU		18	501.796.860

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program/kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2024, secara lengkap disajikan tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Lakip OPD**		**B+**	**1.786.343.740**	DAU	
2.19.01.2.01	**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**50.000.000**	DAU	
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		6	50.000.000	DAU	
2.19.01.2.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	-	DAU	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		35	-	DAU	

2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		35	-	DAU	
2.19.01.2.05	**Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**50.000.000**	DAU	
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		3	50.000.000	DAU	
2.19.01.2.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**376.343.740**	DAU	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		12	3.785.940	DAU	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		10	25.000.000	DAU	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan		12	52.460.800	DAU	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Kebersihan KantoraPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan		12	18.575.000	DAU	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		12	14.000.000	DAU	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		12	262.522.000	DAU	
2.19.01.2.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan**		**100%**	**1.130.000.000**	DAU	
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		2	1.100.000.000	DAU	

2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia		5	30.000.000	DAU	
2.19.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**		**100%**	**54.000.000**	DAU	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan		12	5.000.000	DAU	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan		12	30.600.000	DAU	
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan		4	10.000.000	DAU	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan		4	8.400.000	DAU	
2.19.01.2.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**126.000.000**	DAU	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		5	15.000.000	DAU	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		1	111.000.000	DAU	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**		**5%**	**1.300.000.000**	DAU	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**		**1**	**900.000.000**	DAU	

		Kabupaten/Kota yang dilaksanakan					
2.19.02.2.01.02	Pembinaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha PemulaOrganisasi Kepemudaan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		20	100.000.000	DAU	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		33	800.000.000	DAU	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**9%**	**400.000.000**	DAU	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan		33	400.000.000	DAU	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Meningkatnya Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi**		**15**	**1.500.000.000**	DAU	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**13**	**600.000.000**	DAU	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		2	100.000.000	DAU	
2.19.03.2.01.03	Pembangunan sarana dan prasarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		15	500.000.000	DAU	

2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**3**	**750.000.000**	DAU	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		3	600.000.000	DAU	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		50	150.000.000	DAU	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan**		**100%**	**150.000.000**	DAU	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		15	150.000.000	DAU	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif**		**5**	**200.000.000**	DAU	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan**		**5**	**200.000.000**	DAU	
2.19.04.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		3	200.000.000	DAU	
3.6.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Lama Tinggal WIsatawan (Leng of Stay)**		**5**	**700.000.000**	DAU	
3.6.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola**		1	**700.000.000**	DAU	
3.6.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		1	100.000.000	DAU	

3.6.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	500.000.000	DAU	
3.6.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2	100.000.000	DAU	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara**		**2%**	**300.000.000**	DAU	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**		**5.490**	**300.000.000**	DAU	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		5	300.000.000	DAU	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata**		**10%**	**701.946.860**	DAU	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan**		**100%**	**701.946.860**	DAU	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		6	200.150.000	DAU	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		18	501.796.860	DAU	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas provinsi maupun nasional.

Rencana tahunan ini akan menjadi pedoman/acuan bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali serta peran aktif para stakeholder.

Mengetahui:
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Drs. MOH. ADZAN DJIRIMU, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710108 199009 1 001

Morowali, 03 Juli 2024
SEKRETARIS,

RIDWAN LASAMPE, S.Pd., M.Pd.
Pembina, Tkt I
NIP. 19710929 199801 1 001

RENCANA KERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOROWALI



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat DPRD Sebagai bagian Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu OPD di wajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola Pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja OPD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan (Controling), fungsi penyusunan Peraturan Daerah (Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting).

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali merupakan arah dan pedoman bagi Sekretariat dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun.dengan penyusunan rencana

program dan kegiatan sesuai skala prioritas dalam 1 (stu) tahun perencanaan untuk menjamin adannya kesinambungan antara RPJMD, Renstra dan Renja OPD dan untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mengoperasinalkan kebijan-kebijakan tersebut, perlu diterapkan kedalam program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategis yang ditetapkan dapat diimplementasikan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

   Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

   Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

   Keuangan Daerah;

f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

G. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.

H. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali

k. Peraturan Bupati Morowali Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali

l. Peraturan Bupati Morowali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat Daerah

m. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan

dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali.

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali.
5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

BAB V P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali.

Capaian Kinerja Tahun Lalu pada table 2.1 sebagai berikut :

Nama OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali

Tabel. 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2023 Kabupaten Morowali

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2020	
				Target Renja OPD 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	**29.608.496.135**	**26.669.081.676**	**27.717.843.787**	**26.669.081.676**		**28.724.464.677**	97,01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20.320.000**	**159.960.000**	**160.000.000**	**159.960.000**		**20.320.000**	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.320.000	159.960.000	160.000.000	159.960.000		20.320.000	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.835.867.653**	**5.652.081.051**	**5.810.114.155**	**5.652.081.051**		**5.408.432.152**	92,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.580.907.653	3.182.062.451	3.313.594.155	3.182.062.451	96,03	3.234.695.252	90,33
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.254.960.000	2.470.018.600	2.496.520.000	2.470.018.600		2.173.736.900	96,40
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**16.800.000**	**16.760.000**	**16.800.000**	**16.760.000**		**16.800.000**	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000	16.760.000	16.800.000	16.760.000		16.800.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	393.654.000					391.958.556	99,57

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	393.654.000					Rp391.958.556	99,57
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan, Administrasi,Keuangan dan fasilitas Penunjang pekerjaan	**3.431.521.154**	**2.964.993.557**	**3.022.173.370**	**2.964.993.557**	98,11	**3.428.156.362**	99,90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.072.000	370.900.000	377.071.890	370.900.000	98,36	Rp155.000.000	99,31
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	584.246.120	57.624.280	57.777.210	57.624.280	99,74	Rp583.668.200	99,90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	747.296.884	1.013.151.799	1.061.989.470	1.013.151.799	95,40	Rp746.277.462	99,86
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	426.592.150	321.770.800	323.749.800	321.770.800	99,39	Rp425.969.130	99,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.517.314.000	1.201.546.678	1.201.585.000	1.201.546.678	100,00	Rp1.517.241.570	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	454.232.640					443.400.000	97,62

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	332.824.800					Rp326.600.000	98,13
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	121.407.840					Rp116.800.000	96,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.012.680.690**	**729.382.848**	**791.771.800**	**729.382.848**		**937.009.038**	92,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.600.000	6.600.000	6.600.000			#DIV/0!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	233.558.800	201.084.558	233.558.800	201.084.558		Rp196.111.538	83,97
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	179.870.000	164.850.000	167.310.000	164.850.000	98,53	Rp176.340.000	98,04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	599.251.890	356.848.290	384.303.000	356.848.290		Rp564.557.500	94,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4.411.400.920**	**3.998.118.938**	**4.447.520.684**	**3.998.118.938**	89,90	**4.370.825.819**	99,08

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	295.300.000	230.793.557	240.200.000	230.793.557		Rp290.266.401	98,30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.875.000.000	3.307.925.381	3.740.049.328	3.307.925.381		Rp3.839.580.500	99,09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.100.920	459.400.000	467.271.356	459.400.000	98,32	Rp240.978.918	99,95
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**11.618.315.478**	**11.730.559.282**	**11.985.815.478**	**11.730.559.282**		**11.361.538.957**	97,79
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	11.181.315.478	11.431.359.282	11.548.815.478	11.431.359.282		Rp11.050.258.157	98,83
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		274.500.000	273.200.000	274.500.000	273.200.000		Rp274.395.000	99,96
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		162.500.000	26.000.000	162.500.000	26.000.000		Rp36.885.800	22,70
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	**2.413.703.600**	**1.417.226.000**	**1.483.648.300**	**1.417.226.000**		**2.346.023.793**	97,20

Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	57.000.000	34.481.000	49.020.000	34.481.000		Rp42.610.000	74,75
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	658.300.000	47.745.000	97.320.000	47.745.000		Rp608.915.000	92,50
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1.698.403.600	1.335.000.000	1.337.308.300	1.335.000.000		Rp1.694.498.793	99,77
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**11.239.208.500**	**10.073.061.776**	**10.336.416.950**	**10.073.061.776**		**11.161.455.284**	99,31
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.891.475.000	**1.878.905.000,00**	**1.994.689.400,00**	**1.878.905.000,00**		1.883.908.200	99,60
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	291.475.000	311.005.000	394.155.000	311.005.000		Rp288.125.000	98,85
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tersedianya Kajoan Perundang-Undangan							
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1.600.000.000	1.567.900.000	1.600.534.400	1.567.900.000		Rp1.595.783.200	99,74

Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	370.280.000	**454.665.000**	**564.560.000**	**454.665.000**		356.553.000	96,29
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	49.080.000	86.650.000	93.000.000	86.650.000		Rp47.250.000	96,27
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	55.800.000	59.400.000	64.200.000	59.400.000	92,52	Rp50.150.000	89,87
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	108.200.000	115.590.000	157.200.000	115.590.000	73,53	Rp108.193.000	99,99
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	65.680.000	69.285.000	117.360.000	69.285.000		Rp61.820.000	94,12
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	91.520.000	123.740.000	132.800.000	123.740.000		Rp89.140.000	97,40
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	355.905.000	347.750.200	348.120.000	347.750.200	99,89	355.220.000	99,81
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	123.825.000	115.780.400	116.040.000	115.780.400		Rp123.140.000	99,45

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	116.040.000	115.980.400	116.040.000	115.980.400	99,95	Rp116.040.000	100,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	116.040.000	115.989.400	116.040.000	115.989.400		Rp116.040.000	100,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	1.806.098.000	1.609.035.071	1.609.248.000	1.609.035.071	99,99	1.775.839.647	98,32
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1.188.170.000	1.081.235.071	1.081.320.000	1.081.235.071		Rp1.188.139.647	100,00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000		Rp330.000.000	91,67
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000	252.000.000	252.000.000	252.000.000		Rp252.000.000	100,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5.928.000	5.800.000	5.928.000	5.800.000		Rp5.700.000	96,15
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.118.591.000	2.576.865.900	2.613.524.550	2.576.865.900		2.093.076.000	98,80

	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	622.714.000	399.609.900	399.760.200	399.609.900		Rp622.129.000	99,91
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	34.560.000	23.408.000	34.560.000	23.408.000		Rp33.840.000	97,92
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1.461.317.000	2.153.848.000	2.179.204.350	2.153.848.000		Rp1.437.107.000	98,34
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.696.859.500	3.205.840.605	3.206.275.000	3.205.840.605		4.696.858.437	100,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.696.859.500	3.205.840.605	3.206.275.000	3.205.840.605		4.696.858.437	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis masalah pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Morowali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD, dapat digambarkan dalam Tabel berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tabel . 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan 0PD Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	arget Renstra OPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023(Tahun n n-1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun)	
1	2	3	4	6	7		9	11	12	13
1	Jumlah Perda Inisiatif			16 Perda Inisiatif	16 Perda Inisiatif	16 Perda Inisiatif	7 Perda Inisiatif	16 Perda Inisiatif	16 Perda Inisiatif	
2	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan			2 40 hasil rapat	2 40 hasil rapat	2 40 hasil rapat	240 hasil rapat	2 40 hasil rapat	2 40 hasil rapat	
3	Jumlah aspirasi masyarakat / konstituen			250 Aspirasi	250 Aspirasi	250 Aspirasi	250 Aspirasi	250 Aspirasi	250 Aspirasi	
4	Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Training			30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	
5	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD			30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	

Sumber : Sekwan Kabupaten Morowali Tahun 2024, data diolah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
Plt, SEKRETARIS,

RUHBAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/ diwujudkan yaitu ” Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif ”

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu ”Mewujudkan penataan adminisrasi kesekretaritan dan keuangan dewan yang tertib dan lancar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel”.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu ”Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal” dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah beserta Perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.

3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.

   Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali.

5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	PROGRAM						**PROGRAM**				

	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangka	12 Laporan	**27.717.843.787** **160.000.000**		**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangka	12 Laporan	**27.717.843.787** **160.000.000**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				160.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				160.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**5.810.114.155**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.810.114.155**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ 14 Bulan	3.313.594.155		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ 14 Bulan	3.313.594.155
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.496.520.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.496.520.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			**16.800.000**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-			**16.800.000**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	16.800.000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	16.800.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**3.022.173.370**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.022.173.370**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	377.071.890		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	377.071.890
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	9 Buah	57.777.210		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	9 Buah	57.777.210

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersediaanya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	1.061.989.470		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersediaanya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	1.061.989.470
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan	80 Paket	323.749.800		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersediaanya Barang Cetakan dan Penggandaan	80 Paket	323.749.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.201.585.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.201.585.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			**791.771.800**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-			**791.771.800**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.600.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	233.558.800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	233.558.800
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediaanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	167.310.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediaanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	167.310.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	384.303.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	384.303.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			**4.447.520.684**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-			**4.447.520.684**

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	240.200.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	240.200.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 Unit	3.740.049.328			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 Unit	3.740.049.328
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	467.271.356			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	467.271.356
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					**11.985.815.478**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**					**11.985.815.478**
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Tersediannya Hak Keuangan Anggota DPRD	25 Orang 12 Bulan	11.548.815.478			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Tersediannya Hak Keuangan Anggota DPRD	25 Orang 12 Bulan	11.548.815.478
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Terlaksananya Penyediaan Pakaian	3 Paket	274.500.000			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Terlaksananya Penyediaan Pakaian	3 Paket	274.500.000

				Dinas dan Atribut DPRD								Dinas dan Atribut DPRD		
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	25 Orang	162.500.000		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	25 Orang	162.500.000
	Layanan Administrasi DPRD					**1.483.648.300**		**Layanan Administrasi DPRD**						**1.483.648.300**
	Fasilitasi Fraksi DPRD			Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Bulan	49.020.000		Fasilitasi Fraksi DPRD				Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Bulan	49.020.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Bulan	97.320.000		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Bulan	97.320.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Bulan	1.337.308.300		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Bulan	1.337.308.300
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					**10.336.416.950**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**10.336.416.950**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				**1.994.689.400,00**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	-					**1.994.689.400,00**
	Pembahasan Rancangan Perda			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	50 Keg	394.155.000		**Pembahasan Rancangan Perda**				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	50 Keg	394.155.000

		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	16 Dok	1.600.534.400			**Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik**		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	16 Dok	1.600.534.400
	<u>Pembahasan Kebijakan Anggaran</u>					**564.560.000**		**<u>Pembahasan Kebijakan Anggaran</u>**					**564.560.000**
		Pembahasan KUA dan PPAS		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	25 Dokumen	93.000.000			Pembahasan KUA dan PPAS		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	25 Dokumen	93.000.000
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20 Dokumen	64.200.000			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20 Dokumen	64.200.000
		Pembahasan APBD		Terlaksananya Pembahasan APBD	30 Dokumen	157.200.000			Pembahasan APBD		Terlaksananya Pembahasan APBD	30 Dokumen	157.200.000
		Pembahasan APBD Perubahan		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	20 Dokumen	117.360.000			Pembahasan APBD Perubahan		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	20 Dokumen	117.360.000
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10 Dok	132.800.000			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10 Dok	132.800.000
	<u>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</u>					348.120.000		**<u>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</u>**					348.120.000

	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Dok	116.040.000		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Dok	116.040.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Dok	116.040.000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Dok	116.040.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Dok	116.040.000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Dok	116.040.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD				1.609.248.000		**Peningkatan Kapasitas DPRD**				1.609.248.000
	Pendalaman Tugas DPRD		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	75 Dok	1.081.320.000		Pendalaman Tugas DPRD		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	75 Dok	1.081.320.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	270.000.000		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	270.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	252.000.000		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	252.000.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	1 Dok	5.928.000		Penyusunan Program Kerja DPRD		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	1 Dok	5.928.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			2.613.524.55		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	-			2.613.524.55

					0								0
	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	125 Dok	399.760.200		Kunjungan Kerja dalam Daerah		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	125 Dok	399.760.200
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dok	34.560.000		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dok	34.560.000
	Pelaksanaan Reses		Terlaksananya Reses	3 kali	2.179.204.350		Pelaksanaan Reses		Terlaksananya Reses	3 kali	2.179.204.350
	<u>Fasilitasi Tugas DPRD</u>				3.206.275.000		**<u>Fasilitasi Tugas DPRD</u>**				3.206.275.000
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	125 Dok	3.206.275.000		***Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD***		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	125 Dok	3.206.275.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024, ada 2 Program dan 15 Kegiatan dan 44 Sub kegiatan.

Kegiatan – kegiatan tersebut ada yang sifatnya sebagai penunjang operasional dan ada yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis seperti Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali

Nama PD : Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		Nilai Sakip	**30.548.251.062,21**	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**160.000.000,00**	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab.Morowali	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.807.640.364,00**	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.406.320.364,00	

6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.401.320.000,00	
7	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**16.800.000,00**	
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000,00	
9	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**822.904.000,00**	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	822.904.000,00	
11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali	Peningkatan Pelayanan, Administrasi,Keuangan dan fasilitas Penunjang pekerjaan	**1.383.745.144,00**	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.000.000,00	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Morowali	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000,00	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	598.127.144,00	
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	147.838.000,00	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.780.000,00	
17	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab.Morowali	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	**236.992.000,00**	
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	195.247.000,00	
19	Pengadaan Mebel	Kab.Morowali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41.745.000,00	

20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Morowali	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**253.219.200,00**	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.012.000,00	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	157.827.200,00	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24.380.000,00	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65.000.000,00	
25	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Morowali	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.362.502.076,21**	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Morowali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160.200.000,00	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Morowali	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.201.502.076,21	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Morowali	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000,00	
29	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Kab.Morowali	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**14.231.315.478,00**	
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	13.481.315.478,00	
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab.Morowali		587.500.000,00	
32	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab.Morowali		162.500.000,00	
33	**Layanan Administrasi DPRD**	Kab.Morowali	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	**1.273.132.800,00**	
34	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	34.200.000,00	

35	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	97.320.000,00	
36	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1.141.612.800,00	
37	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Kab.Morowali	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**8.431.342.859,39**	
38	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Kab.Morowali	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**1.585.810.000,00**	
39	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	285.810.000,00	
40	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1.300.000.000,00	
41	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Kab.Morowali	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	**848.160.000,00**	
42	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	175.200.000,00	
43	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	142.800.000,00	
44	Pembahasan APBD	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	187.200.000,00	
45	Pembahasan APBD Perubahan	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	157.360.000,00	
46	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	185.600.000,00	
47	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Kab.Morowali	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**468.570.000,00**	

48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	156.190.000,00	
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	156.190.000,00	
50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	156.190.000,00	
51	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Kab.Morowali	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	**1.438.808.000,00**	
52	Pendalaman Tugas DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	820.880.000,00	
53	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab.Morowali	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.000.000,00	
54	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab.Morowali	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000,00	
55	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5.928.000,00	
56	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Kab.Morowali	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	**1.900.209.850,00**	
57		Kab.Morowali	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
58	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab.Morowali	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	143.078.400,00	
59	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	34.560.000,00	
60	Pelaksanaan Reses	Kab.Morowali	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1.722.571.450,00	

61	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Kab.Morowali	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	**2.189.785.009,39**	
62	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab.Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.189.785.009,39	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemanjuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai salah satu SKPD yang salah satu tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan kegiatan DPRD dapat berjalan secara Optimal

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali , dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi daerah Kabupaten Morowali.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada factor factor kunci keberhasilan organisasi,selain itu karena tujuan dimksudkan untuk mempertajam focus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menun jukan kelangkah priorita dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut .

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Sekretariat DPRD DPRD ditetapkan 2 (DUA) tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARAT DPRD KABUPATEN MOROWALI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Nilai Lakip	BB
2	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	- Persentase Perda yang ditetapkan - Persentase Aduan masyarakat yang ditindaklanjut	100% 100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel . 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Morowali

Nama OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Program	Kegiatan	lokasi	Target Capaian Kinerja	KebutuhanDana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip				**27.717.843.787**			B	**30.548.251.062,21**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	**160.000.000**			100	**160.000.000,00**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				160.000.000			12	160.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**5.810.114.155**			100	**10.807.640.364,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/14 Bula	3.313.594.155			40	7.406.320.364,00

					n					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	2.496.520.000			12	3.401.320.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**16.800.000**			100	**16.800.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3 Laporan	16.800.000			4	16.800.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							100	**822.904.000,00**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							25	822.904.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan, Administrasi,Keuangan dan fasilitas Penunjang pekerjaan				**3.022.173.370**			100	**1.383.745.144,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3 Paket	377.071.890			4	167.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9 Buah	57.777.210			10	200.000.000,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Bulan	1.061.989.470			40	598.127.144,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			80 Paket	323.749.800			30	147.838.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Laporan	1.201.585.000			35	270.780.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD							100	**236.992.000,00**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							1	195.247.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							3	41.745.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**791.771.800**			100	**253.219.200,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	6.600.000			12	6.012.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	233.558.800			12	157.827.200,00

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	167.310.000			12	24.380.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	384.303.000			12	65.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**4.447.520.684**			100	**1.362.502.076,21**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	240.200.000			13	160.200.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7 Unit	3.740.049.328			4	1.201.502.076,21
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2 Unit	467.271.356			4	800.000,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				**11.985.815.478**			100	**14.231.315.478,00**
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			25 Orang 12 Bulan	11.548.815.478			25	13.481.315.478,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan				3 Paket	274.500.000			25	587.500.000,00

	Atribut DPRD									
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				25 Orang	162.500.000			25	162.500.000,00
	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				**1.483.648.300**			100	**1.273.132.800,00**
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			12 Bulan	49.020.000			24	34.200.000,00
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 Bulan	97.320.000			24	97.320.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			12 Bulan	1.337.308.300			50	1.141.612.800,00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				**10.336.416.950**			100	**8.431.342.859,39**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				**1.994.689.400,00**			100	**1.585.810.000,00**
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			50 Keg	394.155.000			20	285.810.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			16 Dok	1.600.534.400			25	1.300.000.000,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran				**564.560.000**			100	**848.160.000,00**

	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			25 Dokumen	93.000.000			28	175.200.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			20 Dokumen	64.200.000			28	142.800.000,00
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			30 Dokumen	157.200.000			28	187.200.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			20 Dokumen	117.360.000			28	157.360.000,00
	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			10 Dok	132.800.000			25	185.600.000,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				348.120.000			100	**468.570.000,00**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			12 Dok	116.040.000			20	156.190.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			12 Dok	116.040.000			20	156.190.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			12 Dok	116.040.000			20	156.190.000,00

	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD				1.609.248.000			100	**1.438.808.000,00**
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			75 Dok	1.081.320.000			80	820.880.000,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			3 Orang	270.000.000			4	360.000.000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			5 Orang	252.000.000			6	252.000.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			1 Dok	5.928.000			2	5.928.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				2.613.524.550			100	**1.900.209.850,00**
		Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							100	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			125 Dok	399.760.200			75	143.078.400,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1 Dok	34.560.000			25	34.560.000,00
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 kali	2.179.204.350			75	1.722.571.450,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3.206.275.000			100	**2.189.785.009,39**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			125 Dok	3.206.275.000			150	2.189.785.009,39

PENUTUP

RENJA – OPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategi (RENSTRA) OPD dan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD), sehingga dapat dijadikan arah dalam melaksanakan program kegiatan serta menjadi tolak ukur untuk pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali pada akhir perencanaan.

Dengan Demikian Renja SKPD tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja secretariat DPRD sehingga dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknnya, khususnnya dalam hal memberikan pelayanan prima kepada DPRD dapat terwujud secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel.

Morowali, 03 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
SEKRETARIS,

RUHBAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19701116 199702 1 003

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI

TAHUN 2024

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2024– 2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Stategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Bungku, 22 Maret 2024

KEPALA SATUAN POL-PP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

H. MUH.SYAHRUL AMIN,SE
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 197210182006041003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

Daftar Tabel 4

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 9

1.3 Maksud dan Tujuan 15

1.4 Sistematika Penyusunan 15

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN LALU

2.1 evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.....

2.2 Analisis Pelayanan Kinerja..... 22

2.3 Isu-Isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah..... 24

2.4 Revieu tahap Awal tahun 2024..... 27

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 37

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja..... 37

3.3 Program dan Kegiatan 38

BAB IV : PERENCANAAN KINERJA DAN PENDANAAN..... 42

BAB V : PENUTUP..... 46

DAFTAR TABEL

Tabel. TC 29 .....

Tabel .TC 30 .....

Tabel. TC 31 .....

Tabel TC 32 .....

Tabel TC 33 .....

Tabel Perencanaan dan Pendanaan.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan RPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kabupaten Morowali tahun 2024, sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya. Selain itu penyusunan RPD Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* serta politik

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RPD, orientasi mengenai RPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, Tim Penyusun di jajaran OPD adalah SDM yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024. Hal ini merupakan terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Proses penyusunan RPD diawali dengan perumusan Rancangan Awal RPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan

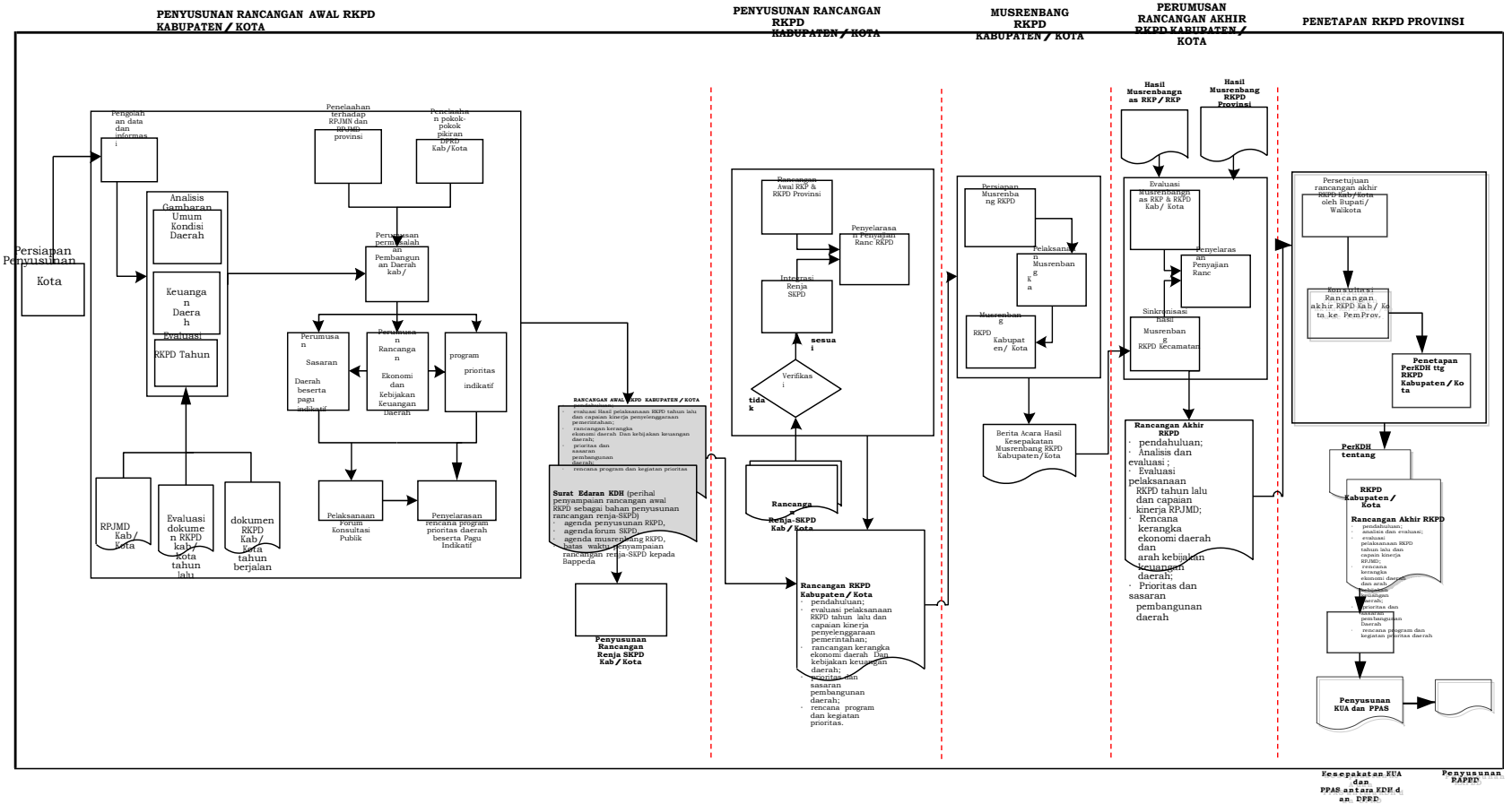
berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RPD merupakan tahapan selanjutnya. Perumusan Rancangan Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkan dengan kebijakan nasional/ provinsi. Dengan demikian, penyusunan rancangan RPD bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

Gambar I.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3966).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor5234);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor101tahun2018tentangStandar Teknis PelayananDasar pada standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 831);
33. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020

Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
36. Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun2016 Nomor90);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun2018-2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun2008-2028;
39. Peraturan Daerah kabupaten Morowali nOmor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Morowali;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
41. Peraturan daerah kebupaten Morowali Nomor..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten Morowali
42. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah;
43. Peraturan Bupati Morowali Nomor 17 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 tahun 2021 tentang P-RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2018-2023;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja POL-PP
2. Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten
3. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB 11 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. MOROWALI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satpol-PP
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali
- 2.4 Review terhadap Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat
BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI
BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pmaong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bahwa Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 pada umumnya sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKA- DPA Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali tahun 2023, serta evaluasi persiapan pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2024.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah KabupatenMorowali sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel T.C 29

Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2023 (Akhir Periode RENSTRA)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025(Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2022 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPDTahun Berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun Berjalan 2023	
					Target SKPD Tahun 2022(Tahun n-2)	Realisasi SKPD Tahun 2022(Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								2023	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	95%	**100%**	95%	95%	**100%**	**100%**	**100%**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	85%	**100%**	85%	85%	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	30	24 Orang	26 Orang/ Bulan	24 Orang	92%	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	**100%**

				Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga PHL yang menerima gaji	375	368 Orang	368 orang	368 Orang	100%	380 orang	380 orang	**100%**
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	100%	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut di adakan	1	4	-	-	-	3 Unit	3 Unit	**100%**
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tehnis	2	28	-	-	-	42 Paket	42 Paket	**100%**
				Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Laporan yang melaksanakan sosialisasi peraturan terundang undangan	0	-	-	-	-	3 Orang	3 Orang	**100%**
				ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	**Prsentase Administrasi Perangkat Daerah**		384 Orang	384 Orang	384 Orang	100%	406 Orang	406 Orang	**100%**
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**12**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	11 Paket	13 Paket	11 Paket	91%	13 Paket	13 Paket	**100%**

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	-	-	-	-	25 Paket	25 Paket	**100%**
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	24 Paket	25 Paket	24 Paket	95%	25 Paket	25 Paket	**100%**
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	-	-		5 Laporan	5 Laporan	**100%**
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prsentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	6 Laporan	10 Laporan	6 Laporan	60%	10 Laporan	10 Laporan	**100%**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-	-	-	-	100%	100%	**100%**
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	**100%**
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prsetase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	-	-	-	-	50 Laporan	50 Laporan	**100%**
				Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	**100%**
				Penyediaan Jasa Perlatan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 laporan	5 Laporan	5 laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	**100%**
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prsentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	5 Laporan	5 laporan	5 Laporan	5 laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	**100%**
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**100%**	-	**-**	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	12 Unit	**100%**
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**100%**	100%	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
					Persentase penyelessaian penanganan keindahan,ketentraman dan ketertiban (K3)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
					Prsenstase K3 Yang di selesaikan	10 Kasus	10 kasus	10 Kasus	10 kasus	100%	10 Kasus	10 Kasus	**100%**
				Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota	**Presentase Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota**	10 Kasus	10 kasus	10 Kasus	10 kasus	100%	10 Kasus	10 Kasus	**100%**

				Koordoinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabu/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	-	-	-	-	15 Dokumen	15 Dokumen	**100%**
				Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	-		-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	**100%**
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	291 Orang	-	-	-	-	291 Orang	291 Orang	**100%**

				Kerja sama antar lembaga dan kemitranaan dalam tekhnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Dokumen	9 dokumn	10 Dokumen	9 dokumn	90%	9 Dokumen	9 Dokumen	**100%**
				Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	**100%**	-	100%	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	18 Laporan	-	-	-	-	18 Laporan	18 Laporan	**100%**
				Penegakan PERDA Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	**Prsesentase penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota**	15 Laporan	15 Laporan	18 Laporan	15 Laporan	83%	15 Laporan	15 Laporan	**100%**
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	**100%**	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**100%**

				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/ peraturan Bupati	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	**100%**
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		**100%**	100%	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
					Persentase Pencegahan dan Penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran	**100%**	100%	100%	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
					Respons Time Rate	2 Dokumen	-	**-**	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	**100%**
				Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota**	10 Laporan	10 Laporan	**10 Laporan%**	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	**100%**

				Pencegahan Kebakaran Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	**100%**
				Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	80%	100%	80%	80%	**100%**	**100%**	**100%**
				Peyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	**133 Desa/Kel.**	-	-	-	-	**133 Desa/Kel.**	**133 Desa/Kel.**	**100%**
				Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	**Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**134 Desa/Kel.**	-	-	-	-	**133 Desa/Kel.**	**133 Desa/Kel.**	**200%**

		Pembentukan dan Pembinaan relawan Kebakaran	**Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya.**	**135 Desa/Kel.**	-	-	-	-	**133 Desa/Kel.**	**133 Desa/Kel.**	**300%**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, adapun dalam Peraturan Bupati Morowai Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja Tipe c Model A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran", Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam nya, SATPOL PP mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketetentraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketetentraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang

Penegakan Perundang- undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Satpol PP;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel T-C.30 Pencapaian Penerapan Pelayanan satuan polisi pamong praja daerah kabupaten morowali di bawah ini :

TABEL T-C.30

INDIKATOR KINERJA KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Indikator	SPM STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Realisasi				CAPAIAN				CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
I	**Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat**															
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	√	√	100	100	100	100	27,28	32,24	32,24	32,24	0,27	0,32	0,32	0,32	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		√	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**62,50**	**100**	**100**	**100**	**62,50**	**100**	**100**	
	Angka Kriminalitas		√	0	0	0	0	19,42	19,42	9,21	9,21	0	0	0	0	
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		√	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**62,50**	**100**	**100**	**100**	**62,50**	**100**	**100**	
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		√	**100**	**100**	**100**	**100**	**75**	**50**	**92,86**	**61,11**	**75**	**50**	**92,86**	**61,11**	

II	**Program Kebakaran**															
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		√	**100**	**100**	**100**	**100**	87,50	87,50	68,42	73,33	87,50	87,50	68,42	73,33	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		√	17	17	17	17	50	5	13	38	294,12	29,41	76,47	223,53	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		√	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**78,57**	**100**	**100**	**100**	**78,57**	**100**	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu strategis dikelompokkan ke dalam :

a) analisis yang berkaitan dengan keadaan dan perbaikan keadaan kelompok sasaran/objek pelayanan yang dibutuhkan ke depan, sesuai amanat politis Kepala Daerah maupun arahan RPJMD yang mengindikasikan capaian kinerja OPD yang diharapkan;

b) analisis untuk peningkatan kapasitas OPD, khususnya mengenai SDM dan kelembagaan secara umum agar mampu merespons tantangan ke depan serta mencapai kinerja yang diharapkan;

c) analisis merespons peluang-peluang maupun ancaman agar mampu menghadapi tantangan ke depan serta mencapai kinerja yang diharapkan. Berdasarkan gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan OPD, target yang diamanatkan oleh RPJMD, dan Ringkasan dari Kajian Dokumen Penunjang, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi isu-isu strategis OPD.

Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Kabupaten Morowali, dengan tabel pembagian identifikasi isu- isu strategis sebagai berikut:

IDENTIFIKASI ISU – ISU STRATEGIS
YANG MEMPENGARUHI KINERJA SKPD

Tingkat Nasional		**Tingkat Provinsi**		**Tingkat Kab/Kota**	
1	Peningkatan peran dan Fungsi Satpol PP dalam tramtibum dan kebakaran.	1	Peningkatan peran dan Fungsi Satpol PP dalam tramtibum dan kebakaran.	1.	Belum sebandingnya kemampuan dan kebutuhan PAM pada obyek Vital, dan aset milik daerah (kompleks Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, kompleks perkantoran ditingkat kabupaten maupun kecamatan serta kelurahan
2	Antisipasi Keamanan dan Ketertiban dari pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	2	Antisipasi Keamanan dan Ketertiban dari pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.	2	Semakin meningkatnya gangguan tibumtranmas yang diakibatkan oleh dinamika perkembangan sosial, ekonomi masyarakat,
				3	Meningkatnya kebutuhan PAM kegiatan Pemerintah Daerah (Penjagaan dan Pengawalan)
				4	Jumlah Perda dan Perkada yang mengandung sanksi yang MENJADI KEWAJIBAN Satpol PP untuk ditegakkan sejumlah 13 PERDA secara prioritas baru 9 yang dapat di tegakan.

				5	Rumitnya perizinan penambangan mineral batuan (Gol C) berdampak pada banyaknya penambang tanpa ijin yang cenderung merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik antar
				6	Belum terpenuhinya nilai SPM pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi : Cakupan waktu rentang layanan 15 (lima belas) menit , Cakupan Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, Cakupan Pemberdayaan masyarakat/relawan
				6	Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kegawat daruratan /SAR antara lain : Operasi

2.4 Review Tahapan Rancangan RKPD 2024

Dalam rancangan kerja satuan polisi pamong praja daerah kabupaten morowali melakukan reviw tahap awal berdasarkan rencana strategis yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C 31 Recview tahap Awal RKPD/Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali di bawah ini:

Tabel T-C.31

Review terhadap Awal RKPD/Renstra SKPD tahun 2024

	Rencana Awal /RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penting
No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-11	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA**	**Morowali**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**23.526.455.386**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA**	**Morowali**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**23.526.455.386**	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Morowali**	**Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**16.230.251.508**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Morowali**	**Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**16.230.251.508**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	30	4.729.971.508	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	30	4.729.971.508	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Morowali	Jumlah Tenaga PHL yang menerima gaji	330	11.500.280.000	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Morowali	Jumlah Tenaga PHL yang menerima gaji	330	11.500.280.000	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Morowali**	**Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**884.812.251**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Morowali**	**Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**884.812.251**	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Moro wali	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut di adakan	3	347.711.216	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Moro wali	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut di adakan	3	347.711.216	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi	Moro wali	Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tehnis	294	431.250.800	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi	Moro wali	Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tehnis	294	431.250.800	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Moro wali	Jumlah Laporan yang melaksanakan sosialisasi peraturan terundang undangan	1	105.850.235	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Moro wali	Jumlah Laporan yang melaksanakan sosialisasi peraturan terundang undangan	1	105.850.235	
	ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	**Moro wali**	**Prsentase Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**1.919.404.612**	**ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH**	**Moro wali**	**Prsentase Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**1.919.404.612**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Moro wali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	831.866.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Moro wali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	831.866.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Moro wali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	360.283.912	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Moro wali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	360.283.912	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Moro wali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	96.925.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Moro wali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4	96.925.700	

								Disediakan			
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Moro wali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	13.205.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Moro wali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	13.205.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Moro wali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	617.124.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Moro wali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	617.124.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Moro wali**	**Prsentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**3.088.759.380**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Moro wali**	**Prsentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**3.088.759.380**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Moro wali	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	2.473.936.350	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Moro wali	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	2.473.936.350	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Moro wali	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	417.235.030	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Moro wali	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	417.235.030	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Moro wali**	**Prsetase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100**	**99.244.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Moro wali**	**Prsetase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**99.244.000**	

			daerah					**Pemerintah daerah**			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan Listrik	Moro wali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	73.414.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan Listrik	Moro wali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	73.414.000	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Moro wali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24.930.000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Moro wali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24.930.000	
	Penyediaan Jasa Perlatan Umum Kantor	Moro wali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	900.000	Penyediaan Jasa Perlatan Umum Kantor	Moro wali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	900.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Moro wali**	**Prsentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**1.303.983.635**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Moro wali**	**Prsentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**1.303.983.635**	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Moro wali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	258.460.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Moro wali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	258.460.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Moro wali	jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1.045.523.635	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Moro wali	jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1.045.523.635	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**970.055.960**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**970.055.960**	
		Moro wali	**Persentase penyelessaian penanganan keindahan,ketentraman dan ketertiban (K3)**	**0**			**Moro wali**	**Persentase penyelessaian penanganan keindahan,ketentraman dan ketertiban (K3)**	**0**		
		Moro wali	**Prsenstase K3 Yang di selesaikan**	**85**			**Moro wali**	**Prsenstase K3 Yang di selesaikan**	**85**		

	Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota	**Moro wali**	**Presentase Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota**	**85**	**895.055 .960**	**Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota**	**Moro wali**	**Presentase Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota**	**85**	**895.055 .960**	
	Koordoinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabu/kota	Moro wali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	19.300.000	Koordoinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabu/kota	Moro wali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	19.300.000	
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Moro wali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	48.000.000	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Moro wali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	48.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Moro wali	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	25	225.600.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	Moro wali	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	25	225.600.000	

	Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya			Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya			
	Kerja sama antar lembaga dan kemitranaan dalam tekhnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Moro wali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	75.000.000	Kerja sama antar lembaga dan kemitranaan dalam tekhnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Moro wali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	75.000.000	
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Moro wali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	475.750.000	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Moro wali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	475.750.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Moro wali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	12	51.405.960	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Moro wali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	12	51.405.960	

	Rasa dan Kerusuhan Massa		Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			Rasa dan Kerusuhan Massa		Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
	Penegakan PERDA Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	**Moro wali**	**Prsesentase penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota**	**100**	**75.000. 000**	**Penegakan PERDA Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**	**Moro wali**	**Prsesentase penegakan PERDA Kabupaten/Kot a dan Peraturan Bupati/walikot a**	**100**	**75.000. 000**	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Moro wali	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	4	75.500.0 00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Moro wali	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	4	75.500.0 00	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/ peraturan Bupati	Moro wali	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2	-	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/ peraturan Bupati	Moro wali	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	2	-	

								Kota			
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Moro wali		**100**	**144.423 .948**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Moro wali		**100**	**144.423 .948**	
		Moro wali	**Persentase Pencegahan dan Penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran**	100			Moro wali	**Persentase Pencegahan dan Penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran**	100		
		Moro wali	**Respons Time Rate**	17 Menit			Moro wali	**Respons Time Rate**	17 Menit		
	Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota	**Moro wali**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota**	**100**	**82.172. 303**	**Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota**	**Moro wali**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota**	**100**	**82.172. 303**	

	Pencegahan Kebakaran Dalam Kabupaten/ Kota	Morowali	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2	29.970.282	Pencegahan Kebakaran Dalam Kabupaten/ Kota	Morowali	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2	29.970.282	
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	32.281.363	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	32.281.363	
	Peyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2	19.920.658	Peyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2	19.920.658	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Morowali	**Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan**	**100**	-	**Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	Morowali	**Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam**	**100**	-	

			kebakaran					**pencegahan kebakaran**		
	Pembentukan dan Pembinaan relawan Kebakaran	Morowali	**Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya.**	133	-	**Pembentukan dan Pembinaan relawan Kebakaran**	Morowali	**Jumlah Desa/Keluraha n yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya.**	133	-

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain permasalahan atau isu-isu strategi yang ada ditingkat internal dan eksternal Satpol PP Kabupaten Morowali, serta memperhatikan permasalahan serta program prioritas daerah, hal lain yang penting perlu diperhatikan sehubungan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di tingkat nasional dan Provinsi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Morowali, selain itu aspek tramtibum dan kebakaran maupun tentang program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh PD yang terkait dalam maksud pelaksanaan tugasnya.

Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan
dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Morowali

Tabel T-C.32					
Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2024					
satuan Polisi Pamong Praja daerah Kab.Morowali					
					Cat Penting
No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA**	**Morowali**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Morowali**	**Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Morowali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	30	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Morowali	Jumlah Tenaga PHL yang menerima gaji	330	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Morowali**	**Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Morowali	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut di adakan	3	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi	Morowali	Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tehnis	294	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Morowali	Jumlah Laporan yang melaksanakan sosialisasi peraturan terundang undangan	1	

	ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	**Morowali**	**Prsentase Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Morowali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Morowali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Morowali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Morowali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Morowali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Morowali**	**Prsentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Morowali	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Morowali	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Morowali**	**Prsetase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan Listrik	Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	

	Penyediaan Jasa Perlatan Umum Kantor	Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Morowali**	**Prsentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Morowali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Morowali	jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				
		Morowali	**Persentase penyelessaian penanganan keindahan,ketentraman dan ketertiban (K3)**	**0**	
		Morowali	**Prsenstase K3 Yang di selesaikan**	**85**	
	Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota	**Morowali**	**Presentase Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota**	**85**	
	Koordoinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabu/kota	Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Morowali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Morowali	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	25	
	Kerja sama antar lembaga dan kemitranaan dalam tekhnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Morowali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Morowali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	
	Penegakan PERDA Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	**Morowali**	**Prsesentase penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota**	**100**	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Morowali	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	4	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/ peraturan Bupati	Morowali	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2	

3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Morowali		**100**	
		Morowali	**Persentase Pencegahan dan Penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran**	100	
		Morowali	**Respons Time Rate**	17 Menit	
	Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota	**Morowali**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota**	**100**	
	Pencegahan Kebakaran Dalam Kabupaten/ Kota	Morowali	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2	
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Morowali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	
	Peyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Morowali	**Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**100**	
	Pembentukan dan Pembinaan relawan Kebakaran	Morowali	**Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya.**	133	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat". Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :

a. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
b. Menegakkan Peraturan Daerah

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan dan sasaran merupakan implementasi penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang. Dari misi yang telah ditetapkan maka tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Renja

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target tahun 2024
Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja POL-PP	Nilai SAKIP POL-PP	BB
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pol PP	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
Tujuan: Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten	7
Sasaran : Meningkatkan Kesiap siagaan penanggulangan bencana kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran	100%
Tujuan: Menurunnya gangguan ketentraman dan	Angka Kriminalitas	8-5

ketertiban		
Sasaran : Meningkatnya Penyelesaian Konflik sosial dimasyarakat	Persentase penyelessaian penanganan keindahan,ketentraman dan ketertiban (K3)	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 terdiri dari 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten/Kota
2. Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Non kebakaran.

Adapun rencana kegiatan satuan polisi pamong praja daerah kabupaten morowali tahun anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomro 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemuthairan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan /Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025.	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Morowali**	**100**	**23.526.455.386**			**100**	**23.526.455.386**
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Morowali**	**100**	**16.230.251.508**			**100**	**16.230.251.508**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	Morowali	30	4.729.971.508	DAU		30	4.729.971.508
				Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga PHL yang menerima gaji	Morowali	330	11.500.280.000	PAD		330	11.500.280.000

				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Moro wali**	**100**	**884.812.251**			**100**	**884.812.251**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut di adakan	Moro wali	3	347.711.216	PAD		3	347.711.216
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tehnis	Moro wali	294	431.250.800	PAD		294	431.250.800
				Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Laporan yang melaksanakan sosialisasi peraturan terundang undangan	Moro wali	1	105.850.235	PAD		1	105.850.235
				ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	**Prsentase Administrasi Perangkat Daerah**	**Moro wali**	**100**	**1.919.404.612**			**100**	**1.919.404.612**
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Moro wali	5	831.866.000	PAD		5	831.866.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Moro wali	4	360.283.912	PAD		4	360.283.912
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Moro wali	4	96.925.700	PAD		4	96.925.700

				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Moro wali	4	13.205.000	PAD		4	13.205.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Moro wali	12	617.124.000	PAD		12	617.124.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prsentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Moro wali**	**100**	**3.088.759.380**			**100**	**3.088.759.380**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Moro wali	3	2.473.936.350	PAD		3	2.473.936.350
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Moro wali	1	417.235.030	PAD		1	417.235.030
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prsetase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Moro wali**	**100**	**99.244.000**			**100**	**99.244.000**
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Moro wali	12	73.414.000	PAD		12	73.414.000

				Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Moro wali	12	24.930.000	PAD		12	24.930.000
				Penyediaan Jasa Perlatan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Moro wali	12	900.000	PAD		12	900.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prsentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Moro wali**	**100**	**1.303.983.635**			**100**	**1.303.983.635**
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Moro wali	10	258.460.000	PAD	-	10	258.460.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Moro wali	1	1.045.523.635	PAD		1	1.045.523.635
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**970.055.960**				**970.055.960**

					Persentase penyelessaian penanganan keindahan,ketentraman dan ketertiban (K3)	**Moro wali**	**0**		PAD		**0**	
					Prsenstase K3 Yang di selesaikan	**Moro wali**	**85**		PAD		**85**	
				Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota	**Presentase Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kab.Kota**	**Moro wali**	**85**	**895.055.960**			**85**	**895.055.960**
				Koordoinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabu/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Moro wali	1	19.300.000	PAD		1	19.300.000
				Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Moro wali	2	48.000.000	PAD		2	48.000.000

				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Moro wali	25	225.600.000	PAD		25	225.600.000
				Kerja sama antar lembaga dan kemitranaan dalam tekhnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Moro wali	2	75.000.000	PAD		2	75.000.000
				Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Moro wali	12	475.750.000	PAD		12	475.750.000

				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Moro wali	12	51.405.960	PAD		12	51.405.960
				Penegakan PERDA Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	**Prsesentase penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota**	**Moro wali**	**100**	**75.000.000**			**100**	**75.000.000**
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Moro wali	4	75.500.000	PAD		4	75.500.000
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/ peraturan Bupati	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Moro wali	2	-			2	-

				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Moro wali	**100**	**144.423.948**			**100**	**144.423.948**
					Persentase Pencegahan dan Penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Moro wali	100				100	
					Respons Time Rate	Moro wali	17 Menit				17 Menit	
				Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota**	**Moro wali**	**100**	**82.172.303**			**100**	**82.172.303**
				Pencegahan Kebakaran Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Moro wali	2	29.970.282	PAD		2	29.970.282

				Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Moro wali	2	32.281.363	PAD		2	32.281.363
				Peyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Moro wali	2	19.920.658	PAD		2	19.920.658
				Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	**Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	Moro wali	**100**	-			**100**	-
				Pembentukan dan Pembinaan relawan Kebakaran	**Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya.**	Moro wali	133	-			133	-

BAB IV

PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Stategis Tahun 2024 yang merupakan perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capain sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing bidang.

Rumusan perencanaan kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
				Satuan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu Indikatif	Sumber dana	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Morowali**	**%**	**100**	**23.526.455.386**		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Morowali**	**%**	**100**	**16.230.251.508**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	Morowali	Orang	30	4.729.971.508	DAU	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga PHL yang menerima gaji	Morowali	Orang	330	11.500.280.000	PAD	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Prsentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Morowali**	**%**	**100**	**884.812.251**		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut di adakan	Morowali	Paket	3	347.711.216	PAD	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tehnis	Morowali	Orang	294	431.250.800	PAD	

						Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Laporan yang melaksanakan sosialisasi peraturan terundang undangan	Morowali	Laporan	1	105.850.235	PAD	
						ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	**Prsentase Administrasi Perangkat Daerah**	**Morowali**	**%**	**100**	**1.919.404.612**		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Morowali	Paket	5	831.866.000	PAD	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Morowali	Paket	4	360.283.912	PAD	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Morowali	Paket	4	96.925.700	PAD	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Morowali	Laporan	4	13.205.000	PAD	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Morowali	Laporan	12	617.124.000	PAD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prsentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Morowali**	**%**	**100**	**3.088.759.380**		
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Morowali	Unit	3	2.473.936.350	PAD	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Morowali	Unit	1	417.235.030	PAD	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prsetase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Morowali**	**%**	**100**	**99.244.000**		

						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Morowali	Laporan	12	73.414.000	PAD	
						Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Morowali	Laporan	12	24.930.000	PAD	
						Penyediaan Jasa Perlatan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Morowali	Laporan	12	900.000	PAD	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prsentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Morowali**	**%**	**100**	**1.303.983.635**		
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Morowali	Unit	10	258.460.000	PAD	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Morowali	Unit	1	1.045.523.635	PAD	
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**970.055.960**		
							Persentase penyelessaian penanganan keindahan,ketentraman dan ketertiban (K3)	**Morowali**	**%**	**0**		PAD	
							Prsenstase K3 Yang di selesaikan	**Morowali**	**%**	**85**		PAD	
						Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	**Presentase Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1**	**Morowali**	**%**	**85**	**895.055.960**		

						kab.Kota	**(satu) Daerah kab.Kota**						
						Koordoinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabu/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Morowali	Dokumen	1	19.300.000	PAD	
						Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Morowali	Dokumen	2	48.000.000	PAD	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Morowali	Orang	25	225.600.000	PAD	
						Kerja sama antar lembaga dan kemitranaan dalam tekhnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Morowali	Dokumen	2	75.000.000	PAD	
						Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Morowali	Morowali	12	475.750.000	PAD	

						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Morowali	Morowali	12	51.405.960	PAD	
						Penegakan PERDA Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	**Prsesentase penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota**	**Morowali**	**%**	**100**	**75.000.000**		
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	Morowali	Laporan	4	75.500.000	PAD	
						Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah/ peraturan Bupati	jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Morowali	Laporan	2	-		
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Morowali	**%**	**100**	**144.423.948**		
							Persentase Pencegahan dan Penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Morowali	**%**	100			
							Respons Time Rate	Morowali	Waktu	17 Menit			

						Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan bahaya beracun Kebakaran dalam Kabupaten Kota**	**Morowali**	**%**	**100**	**82.172.303**		
						Pencegahan Kebakaran Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Morowali	Dokumen	2	29.970.282	PAD	
						Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Morowali	Laporan	2	32.281.363	PAD	
						Peyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Morowali	Dokumen	2	19.920.658	PAD	
						Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	**Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	Morowali	Morowali	**100%**	-		
						Pembentukan dan Pembinaan relawan Kebakaran	**Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap Tahunnya.**	Morowali	Desa/ Kel	133	-		

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 – 2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali tahun 2024.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

RENCANA KERJA (RENJA)
RSUD MOROWALI TAHUN 2024



BADAN LAYANAN UMUM (BLUD)
RSUD MOROWALI KABUPATEN MOROWALI

Alamat Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko-Bungku Tengah
Telp : 04092220087, 04092220085 - Fax : 04092220085

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Morowali Kabupaten Morowali tahun 2024.

Renja ini merupakan acuan bagi RSUD Morowali Kabupaten Morowali yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan tahunan yang disusun memiliki dasar penganggaran yang jelas dan terukur yang dialokasikan kesetiap program dan kegiatan.

Dengan menggunakan kaidah sistem pemerintah maka Renja menggunakan pendekatan rencana kinerja. Sistim ini mensyaratkan adanya dukungan data baik keuangan dan non keuangan. Inplementasi Renja ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan kepada unit-unit pelayanan yang ada, sehingga setiap unit pelayanan nanti dapat melakukan pemantauan secara periodik terhadap arah yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

Diharapkan Renja ini dipedomani dalam melaksanakan tugas pelayanan baik proses perencanaan, penganggaran tahun maupun dalam proses pertanggungjawaban program dan kegiatan.

Bungku, 27 Februari 2023
Direktur RSUD Morowali

dr. AGUS A.S. PARTANG, Sp. B
NIP. 19700816 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 7
2.1. Evaluasi Renja RSUD Morowali Tahun 2023 dan Capaian Restra RSUD Morowali 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Morowali 13
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 21
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 17
3.2. Tujuan dan Sasaran RSUD Morowali 17
3.3. Program dan Kegiatan 18
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN 22
BAB V PENUTUP 24
5.1. Catatan Penting 25
5.2. Kaidah Pelaksanaan 25
5.3. Rencana Tindak Lanjut 26

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29	Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 22 Rekapitilasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah	8
Tabel T-C. 30	Pencapaian Renstra Perangkat Daerah RSUD Morowali	13
Tabel T-C. 31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali	15
Tabel 3.2	Tabel Tujuan dan Sasaran	18
Tabel T-C. 33	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Sulaweis Tengah Kabupaten Morowali	19
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RPD). RPD selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Permasalahan capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali pada rancangan awal RPD 2024 yang berkaitan dengan Sosial Budaya dan merupakan permasalahan di RSUD Morowali antara lain tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan perorangan yang belum jelas penjamin pembayaran terhadap klaim pelayanan kesehatannya. Selain itu yang berpengaruh langsung pada tingkat kualitas pelayanan adalah kurangnya ketersediaan tenaga medis dan tenaga para medis, sarana dan prasarana di RSUD Morowali.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morowali yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan PD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra PD dan RPD pada tahun bersangkutan.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan PD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra PD maupun RPD.
3. Mengkaji rancangan awal RPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas PD sudah termuat

dalam rancangan awal RPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.

4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RPD yang bersifat lintas PD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD ke dalam rancangan Renja PD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja PD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari PD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan PD yang tertulis dalam RPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan PD yang tercantum dalam rancangan awal RPD.
7. Menyiapkan Forum PD atau Forum Gabungan PD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RPD bagi setiap PD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RPD yang sudah dirancang maka kepala PD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja PD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap PD yang ditentukan dalam rancangan awal RPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan PD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja PD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan PD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RPD. Format usulan memperhatikan format RKA PD.
9. Rancangan Renja PD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan PD Provinsi yang berasal dari RPD Propinsi dan/atau dari Renja PD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.
10. Tembusan rancangan Renja PD kabupaten/kota disampaikan kepada PD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatar belakangi penyusunan Renja RSUD Morowali tahun 2024, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar ada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan daerah Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Daerah Kabupaten Morowali;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
18. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Nomor 05 Tahun 2009 (lembar Daerah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Morowali;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali;
21. Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Morowali;

22. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Nomor ……..Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan (RPD) Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;
23. Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0034/RSUD/2014 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Kabupaten Morowali;

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau (Renja PD) RSUD Morowali Kabupaten Morowali tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Morowali tahun 2024-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024;
2. Menyediakan Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan yang jelas dan terarah sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Morowali tahun anggaran 2024;
3. Menyediakan media komunikasi antar pimpinan dan bidang RSUD Morowali dengan Dewan Pengawas RSUD Morowali maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja RSUD Morowali tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD YAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Renja RSUD Morowali Tahun 2024 dan Capaian Renstra RSUD Morowali
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Morowali

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Morowali
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran RSUD Morowali
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Morowali Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Morowali.

Dalam Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pimpinan Kementrian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Rencana kerja RSUD Morowali adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja. Terkait dengan hal tersebut RENJA RSUD Morowali menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai tahun 2023 berikut.

Tabel T-C 29
Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Reakapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Morowali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3) Tahun 2021	Target Dan Relaisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
1. 02.	**Urusan Kesehatan**									
1. 02. 1. 02. 03.	**Rumah Sakit Umum Daerah Morowali**									
1. 02. 1. 02. 03. 02.	**Rumah Sakit Umum Daerah Morowali (BLUD)**									
1. 02. 1. 02. 03. 02. 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3) Tahun 2021	Target Dan Relaisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1. 02. 1. 02. 03. 02. 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Kebutuhan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. 02. 1. 02. 03. 02. 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	Persentase Pegawai Yang melaksanakan Perjalan Dinas		0%	100%	0%	0%			
1. 02. 1. 02. 03. 02. 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Kedisiplinan Aparatur**	**100%**							
1. 02. 1. 02. 03. 02. 03 01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Persentase Kedisiplinan Aparatur	100%	0%	0%					
1. 02. 1. 02. 03. 02. 33	**Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**							
1. 02. 1. 02. 03. 02. 33 01	Pelayanan Kesehatan RSU (BLUD)		100%	94.09%	94%	100%	85.31%	85%	83%	83%
1. 02. 1. 02. 03. 02. 33 02	Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD (BLUD)		100%	58.83%	59%	100%	68.69%	69%	56,3%	56,3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3) Tahun 2021	Target Dan Relaisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1. 02. 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
1. 02. 01. 2. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran**								
1. 02. 01 2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. 02. 01 2. 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3) Tahun 2021	Target Dan Relaisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1. 02. 01. 2. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1. 02. 01 2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pegawai yang melakukan perjanan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
1. 02. 01. 2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan daerah**								
1. 02. 01 2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%						
1. 02. 02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Usia Harapan Hidup**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3) Tahun 2021	Target Dan Relaisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1. 02. 02 2. 01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1. 02. 02 2. 01. 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Prosentase rehabilitas dan pemeliharaan rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. 02. 02 2. 01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase pengadaan sarana fasilistas pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3) Tahun 2021	Target Dan Relaisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (N-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1. 02. 02 2. 01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bungku, 27 Februari 2023

Direktur RSUD Morowali



dr. AGUS AS. PARTANG, Sp.B

NIP. 197008162001121005

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan di RSUD Morowali pada tahun 2022, target capaian kinerja tahun 2023 serta target capaian kinerja pelayanan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	√		90%	90%	90%	90%	Survey IKM tidak terlaksana kan	83%	90%	90%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Morowali

Kinerja RSUD Morowali tahun 2023 secara umum baik memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik maupun kinerja keuangan, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Pengembangan pelayanan rumah sakit terkendala, sulitnya mencari dokter spesialis (misal : spesialis jantung).
2. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan/kedokteran rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun) belum mencapai target minimal 60%
4. Persentase SDM yang memiliki sertifikat keahlian di bidang tugasnya masih sangat rendah.
5. Penataan taman sebagai bagian dalam menciptakan nuansa asri bagi pasien, pengunjung dan petugas RSUD Morowali belum terkelola dengan baik.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan rujukan, beberapa hal yang menjadi peluang sekaligus strategi untuk mengatasi permasalahan atau upaya peningkatan pelayanan adalah :

1. Menyusun usulan perubahan tarif melalui Peraturan Bupati Morowali.
2. Menyusun usulan kebutuhan rekruitmen perawat dan tenaga kesehatan lainnya dan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga medis, perawat, bidan, penunjang medis dan tenaga lainnya.
3. Perbaikan infrastrukrur meliputi pemeliharaan rutin gedung, rerbaikan toilet dan saluran pembuangan air limbah, jaringan instalasi dan mesin oksigen sentral.
4. Mengajukan usulan sarana dan prasarana termasuk alat kesehatan/kedokteran rumah sakit ke pemerintah daerah dan pusat.
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
6. RSUD Morowali dapat menjadi pusat pelayanan gigi dan mulut ditunjang dengan bertambahnya dokter spesialis yang baru.
7. Ketersediaan dokter spesialis akan tercukupi, dengan selesainya utusan dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis ditahun 2024.

Beberapa permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam rencana kerja rumah sakit tahun 2024 sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Morowali tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat, relatif tidak memuat catatan penting rumusan program dan kegiatan pada RSUD Morowali, namun demikian, dalam persidangan anggaran tahun 2022, program dan kegiatan yang langsung mengenai pelayanan publik yang dirumuskan pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Tengan Kabupaten Morowali

Nama Perangkat Daerah : RSUD Morowali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**RSUD Morowali**	**Nilai SAKIP OPD**	**100%**	**92,744,998,068**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**RSUD Morowali**	**Nilai SAKIP OPD**	**100%**	**92,744,998,068**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**RSUD Morowali**	**Presentase Dokumen Keuangan yang tersusundan kegiatan yang terlaksana**	**100%**	**47.744.998.068**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**RSUD Morowali**	**Presentase Dokumen Keuangan yang tersusundan kegiatan yang terlaksana**	**100%**	**47.744.998.068**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Morowali	Persentase ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	100%	25.898.415.828	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Morowali	Persentase ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	100%	25.898.415.828	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RSUD Morowali	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Honorarium	100%	21.846.582.240	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RSUD Morowali	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Honorarium	100%	21.846.582.240	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**RSUD Morowali**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**45.000.0000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**RSUD Morowali**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**45.000.0000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program /Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD Morowali	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100%	45.000.0000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Morowali	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100%	45.000.0000.000	
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**RSUD Morowali**	**Usia harapan Hidup**	**100%**	**1.069.999.813**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**RSUD Morowali**	**Usia harapan Hidup**	**100%**	**1.069.999.813**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**RSUD Morowali**	**Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar**	**100%**	**1.069.999.813**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**RSUD Morowali**	**Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg memberikan pelayanan sesuai standar**	**100%**	**1.069.999.813**	
	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Morowali	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	100%	1.069.999.813	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Morowali	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	100%	1.069.999.813	
	JUMLAH				**93.814.997.881**	**JUMLAH**				**93.814.997.881**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Morowali

A. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan RPD Kabupaten Morowali, maka tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat”.

B. Sasaran

Berdasarkan makna penetapan tujuan tersebut, RSUD Morowali menetapkan sasaran yang disajikan pada tabel berikut:

3.2 Tabel Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2024
Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks kesehatan	
Sasaran : Menigkatkan pelayanan kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	72 Tahun
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan realisasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan pada tahun 2022, dan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran seperti dijabarkan di atas, rencana program dan kegiatan rumah sakit pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali

Nama Perangkat Daerah : RSUD Morowali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		**RSUD Morowali**		**139.672.362.812**	**Pajak Daerah**			**146.874.565.419**
1 2	**Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan**		**RSUD Morowali**		**133.611.568.768**	**Pajak Daerah**			**146.874.565.419**
1 2 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Sakip OPD**	**RSUD Morowali**	**BB**	**133.611.568.768**	**Pajak Daerah**		**BB**	**142.242.908.923**
1 2 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen keuangan yang tersusun dan kegiatan yang terlaksana**	**RSUD Morowali**	**100%**	**73.611.568.786**	**Pajak Daerah**		**100%**	**80.242.908.932**
1 2 1 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	RSUD Morowali	510 Orang	50.997.499.648	Pajak Daerah		561 Orang	54.284.188.062
1 2 1 2.02 02	Penyediaan administrasi pelakasaaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan tugas administrasi pelaksanaan tugas ASN	RSUD Morowali	485 Orang	22.614.069.120	Pajak Daerah		493 Orang	25.958.720.880

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**2.**	**1.**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	RSUD Morowali	**BB**	**60.000.000.000**	**BLUD**		**90%**	**65.000.000.000**
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang BLUD	RSUD Morowali	100%	60.000.000.000	BLUD		100%	62.000.000.000
1	**2**	**2**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Usia harapan hidup**	**RSUD Morowali**	**71 Tahun**	**6.060.758.045**			**72 Tahun**	**4.604.565.487**
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar**	**RSUD Morowali**	**100%**	**5.298.119.000**	Pajak Daerah		**100%**	**4.604.565.487**
1	2	2	2.01.	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan Pendukung Fasiltas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	RSUD Morowali	7 Unit	3.160.675.000	Pajak Daerah		8 Unit	3.737.090.806
1	2	2	2.01.	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD Morowali	84 Unit	2.900.083.044	Pajak Daerah		50 Unit	867.565.680

Sebagai perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Morowali mempunyai beberapa fleksibilitas berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang diperoleh dari pendapatan fungsional pelayanan. Fleksibilitas dimaksud berpedoman pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan fungsional rumah sakit yang diperoleh langsung dari pelayanan dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja pelayanan perangkat daerah. Pendapatan fungsional tersebut merupakan pendapatan pemerintah kabupaten yang secara pengelolaan oleh rumah sakit dan di simpan dalam kas rumah sakit.

BAB IV
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan RSUD Morowali tahun 2024 adalah turunan dari Perubahan Rencana Strategis dan sudah mengakomodir usulan dari setiap Bidang di RSUD Morowali. Rencana kerja dan pendanaan RSUD Morowali tahun 2024 terdiri dari 2 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan alokasi anggaran Rp 133.611.568.768, yang terdiri dari:
    a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
    b. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD dengan sub kegiatan pelayanan dan penunjang BLUD.
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan alokasi anggaran Rp 6.060.758.044,-. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota dengan sub kegiatan pengadaan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.

Pagu Indikatif RUSD Morowali tahun 2024 sebesar Rp 139.627.326.812,-. Secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Morowali Tahun 2024 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencna Kerja Dan Pendanaan Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**139.627.326.812**		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**139.627.326.812**		
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA**	**Nilai Sakip OPD**			**133.611.568.768**		
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Dokumen Keuangan yang tersusun dan kegiatan yang terlaksana**			**73.611.568.768**		
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	RSUD Morowali	510 Org	50.997.499.648	Pajak Daerah	
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan hasil penyediaan tugas administrasi pelaksanaan tugas ASN		485 Org	22.614.069.120		
1	**2**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			**60.000.000.000**		
1	2	01	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan	RSUD Morowali	1 Tahun	60,000,000,000	Pendapatan dari BLUD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						pelayanan dan penunjang BLUD					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**6.060.758.044,-**		
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**				**6.060.758.044,-**		
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD Morowali	15 Unit	3.160.675.000,-	Pajak Daerah	
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD Morowali	10 Unit	2,900,083,044,-	Pajak Daerah	

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Berlakukannya sistem jaminan kesehatan nasional dengan BPJS sebagai penyelenggaranya dan pemberlakuan pasar bebas Asia Pasifik tahun 2015 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka RSUD Morowali dengan sepenuh hati dan segenap kemampuan harus meningkatkan sumberdaya yang dimiliki dan selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan. Dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan rencana bisnis tahunan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan kewajiban rumah sakit untuk menyusun strategi dalam hal peningkatan pendapatan BLUD baik dari pendapatan fungsional maupun APBD/APBN, DAK dan hibah serta bantuan yang tidak mengikat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renja RSUD Morowali 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra RSUD Morowali Tahun 2024-2026. Kaidah pelaksanaan Renja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja RSUD Morowali tahun 2024 yang disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 202;
2. Rencana Kerja RSUD Morowali Tahun 2024 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja RSUD Morowali Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan. Semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja RSUD Morowali.

Bungku, 27 Februari 2023
Direktur RSUD Morowali



dr. AGUS A.S. PARTANG, Sp. B
NIP. 19700816 200112 1 005

RENCANA KERJA (RENJA)



RSUD SALABANGKPAKU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Salabangkapaku Kabupaten Morowali tahun 2024

Renja ini merupakan acuan bagi RSUD Salabangkapaku yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan tahunan yang disusun memiliki dasar penganggaran yang jelas dan terukur yang dialokasikan kesetiap program dan kegiatan.

Dengan menggunakan kaidah sistem pemerintahmaka Renja menggunakan pendekatan rencana kinerja. Sistem ini mensyaratkan adanya dukungan data baik keuangan dan non keuangan. Implementasi Renja ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan kepada unit-unit pelayanan yang ada, sehinggasetiap unit pelayanan nanti dapat melakukan pemantauan secara periodic terhadap arah yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

Diharapkan Renja ini dipedomani dalam melaksanakan tugas pelayanan baik proses perencanaan, penganggaran tahun maupun dalam proses pertanggung jawaban program dan kegiatan.

Lakombulo, 22 Maret 2023

Direktur

dr. AWALUDDIN

NIP 197807012009041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD SALABANGKAPAKU 7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN 15
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 25
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 25
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 32
3.1. ..... Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34
3.3. Program dan Kegiatan 34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41
BAB V PENUTUP 52
5.1. CATATAN PENTING 52
5.2. KAIDAH PELAKSANAAN 52
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT 52

DAFTAR TABEL

Tabel.T.C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 8

Tabel 2.2 Target Dan Capaian Kinerja Pelayanan 15

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 202..... 26

Tabel T-C 32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan..... 31

Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran 34

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 35

Tabel T-C.32 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Morowali pada rancangan awal RKPD 2024 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan merupakan permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku antara lain yang berpengaruh langsung pada tingkat kualitas pelayanan adalah masih kurangnya ketersediaan tenaga medis dan tenaga para medis, sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku.

Rumah Sakit Umum daerah Salabangkapaku yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja OPD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan OPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra OPD dan RPD pada tahun bersangkutan. Renja RSUD Salabangkapaku tahun 2022.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan OPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra OPD maupun RPD 2024-2026.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas OPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.

4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas OPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan OPD ke dalam rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja OPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari OPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrembang Kabupaten/Kota.

6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan OPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan OPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum OPD atau Forum Gabungan OPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap OPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala OPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja OPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap OPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja OPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan OPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA OPD.
9. Rancangan Renja OPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan OPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja OPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari perkiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.
10. Tembusan rancangan Renja OPD kabupaten/kota disampaikan kepada OPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/201 5 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 201 5-201 9;
15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 29/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembar Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 02150.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menenghah Daerah Kab. Morowali periode 2018-2023;

23. Peraturan Bupati Morowali Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku Kelas D Kabupaten Morowali.
24. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Nomor : 188.4.45 / Kep.45 SIO-RSUD/ DPM – PTSP /XII/ 2021 Tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku Kabupaten Morowali;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau (Renja OPD) Rumah Sakit Umum daerah Salabangkapaku Kabupaten Morowali tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku tahun 2024-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024;
2. Menyediakan Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan yang jelas dan terarah sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku tahun anggaran 2024;
3. Menyediakan media komunikasi antar pimpinan dan bidang Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA/AOPD TAHUN LALU
- 2.1 EvaluasiRenja Tahun 2022 dan Capaian Restra RSUD Salabangkapaku
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Salabangkapaku
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Salabangkapaku
- 2.4 ReviuTerhadap Rancangan Awal RSUD Salabangkapaku

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD SALABANGKAPAKU
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Salabangkapaku
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD SALABANGKAPAKU
Rencana Program danPendanaan
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD SALABANGKAPAKU

Dalam Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pimpinan Kementrian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Rencana kerja RSUD Salabangkapaku adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, Rencana kerja (RENJA) RSUD Salabangkapaku menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai tahun 2022 berikut.

TABEL.T.C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

RSUD SALABANGKAPAKU

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	02	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**		100%							
1	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD yang disusun	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-OPD	Jumlah Dokumen DPA-OPD yang disusun	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Rasio belanja Gaji dan Jasa ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pehawai PHL yang dibayarkan jasanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
1	02	01	2	03	06	Penyediaan Penatausahaan barang milik daerah pada OPD	Persentase kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara	100%	90%	90%	0	0	100%	0	0
1	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	0	0	0	0	0	0	**0**
1	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Pegawai dan atribut kelengkapannya	100%	0	0	0	0	0	0	**0**
1	02	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelattihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	0	0	0	0	0%	0	**0**

1	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Implemantasi Peraturan Perudang Undangan	100%	0	100%	99%	0	0%	0	**0**
1	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%							
1	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi / penerangan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	**100%**
1	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah tangga yang dibutuhkan			100%	100%	100%	100%	0%	**0%**
1	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pemenuhan alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**30%**	**100%**
1	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	**100%**
1	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah	100%	100%	100%	100%	95%	100%	15%	**100%**
1	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional / lapangan	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0	0%

1	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel yang dibutuhkan			100%	100%	100%	0%	0	0%
1	02	01	2	08		Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%							
1	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20	100%
1	02	01	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air.	Persentase ketersediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0	100%
1	02	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan kebersihan lingkungan kantor OPD	100%	95%	100%	95%	95%	0	0	100%
1	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Per Izinan Kendaraan Dinas Ops. atau Lapangan	Persentase ketersediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	0%	100%	100%	100%	100	0	100%
1	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Persentase ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100	0	100%

1	02	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	95%	100%	0%	0%	0	0	100%
1	02	02				**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota		100%							
1	02	02	2	01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan Fasilitas kesehatan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0	0%
1	02	02	2	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	100%	100%	0	0	0	100%	0	100%
1	02	02	2	01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kebutuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0	0%
1	02	02	2	01	13	Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase kebutuhan Prasarana Fasilitas pelayanan kesehatan	100%	95%	0%	0%	0%	100%	0	100%
1	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Persentase kebutuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik	100%	95%	100%	100%	100%	100%	50%	100%

						Fasilitas YANKES									
1	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase kebutuhan obat Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	100%
1	02	02	2	01	17	Pengadaaan Bahan Habis pakai	Persentase ketersediaan BHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
1	02	02	2	01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	Cakupan Alat Kesehatan di Fasyamkes sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kabupaten/Kota		100%							
1	02	02	2	02	32	Operasional pelayanan Rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	95%	100%	95%	95%	100%	30%	100%
1	02	03				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan**		100%							
1	02	02	2	02		Penyediaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusia		100%	0	0	0	0	-	-	

						kesehatan untuk UKp dan UKM di Wilayah kabupaten/Kota									
1	02	02	2	02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),pada tahun 2022 RSUD Salabangkapaku memperoleh dana sebesar **12.577.113.155,-** dengan Realisasi sebesar 99,81%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan di RSUD Salabangkapaku pada tahun 2022, target capaian kinerja tahun 2023 serta target capaian kinerja pelayanan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Target dan Capaian Kinerja Pelayanan 2022, Target Pelayanan 2023 dan 2024

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN 2021	TARGET	
			2022			2023	2024
1.	Rawat Jalan	Kunjungan	3600	3195		5760	7200
2.	Gawat Darurat	Kunjungan	600	558		600	700
3.	Rawat Inap	Kunjungan	600	682		1095	1825
4.	Operasi	Tindakan	12	27		120	120
5.	Kebidanan	Tindakan	120	93		180	204
6.	Laboratorium	pemeriksaan	2500	2021		3000	3500
7.	Radiologi	Foto	0	0		180	360
8.	Rehabilitasi medik	Tindakan	60	24		60	60
9.	Gizi	Porsi					

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*				
	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	**WTP**	***WTP***	***WTP***	-	-	-	-	-	-	
	Presentase Penempatan aparatur RSU Pratama Paku sesuai disiplin ilmu (%)	**100**	***100***	***100***	-	-	***85***	-	-	-	
	Ideks kepuasan Pelayanan RSU Pratama Paku (%)	**≥ 80**	**≥ *80***	**≥ 80**	-	-	***85***	-	-	-	
	Nilai laporan akuntabilitas kinerja RSU Pratama Paku	**Kategori**	***C***	***C***	***C***	***C***	***C***	***C***	***C***	***C***	
	Persentase Capaian Kinerja RSU Pratama Paku	**%**	-	-	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***	
	Persentase Peningkatan Pelayanan RSU Pratama Paku (%)	**%**	***80***	***80***	***80***	***85***	***80***	***80***	***80***	***85***	
1	**PELAYANAN GAWAT DARURAT**										
	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa di Gawat Darurat (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jam buka pelayanan Gawat Darurat (24 JAM)	Jam	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GEL/ALS (%)	%	100	100	100	100	50	50	100	100	

	Ketersediaan tim penanggulangan bencana (Tim)	Tim	1	1	1	1	0	0	1	1	
	Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat (≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang)	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat (≥ 70 %)	≥ 70 %	72	75	75	80	80	80	80	80	
	Kematian Pasien< 24 jam di Gawat Darurat (≤ 2/1000 (pindah kepelayanan rawat inap setelah 8 jam)	(≤ 2/1000 (pindah kepelayanan rawat inap setelah 8 jam	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	
	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	**PELAYANAN RAWAT JALAN**										
	Dokter Pemberi pelayanan di poliklinik spesialis (%)	%	50	50	100	100	50	50	100	100	
	Ketersediaan pelayanan rawat jalan										
	a. Poli Anak	ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	ada	
	b. Poli Penyakit dalam	ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	ada	
	c. Kebidanan	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada	ada	
	d. Poli Bedah	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada	ada	
	Jam buka pelayanan Rawat Jalan (08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Mulai Hari Senin Sampai Sabtu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Waktu tunggu di Rawat Jalan (≤ 60 menit)	≤ 60 menit	> 60	> 60	> 60	> 60	60 Menit	60 Menit	> 60	> 60	
	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan (≥ 90 %)	≥ 90 %	90%	93%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB (≥ 60 %)	≥ 60 %	60	65	65	70	65	65	65	70	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS (%)	%	60	65	65	70	95	95	65	70	
3	**PELAYANAN RAWAT INAP**										
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS (≥ 60 %)	≥ 60 %									
	Pemberi pelayanan di Rawat Inap										
	a. Dr. Spesialis	%	100	100	100	100	0	0	0	0	
	b. Perawat minimal pendidikan D3	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ketersediaan pelayanan rawat inap										
	a. Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	b. Penyakit dalam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	c. Kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	d. Bedah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jam visite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)	%									
	Kejadian infeksi pasca operasi (≤ 1,5 %)	≤ 1,5 %	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	0	0	≤ 1,5	≤ 1,5	
	Angka kejadian Infeksi Nosokomial (≤ 1,5 %)	≤ 1,5 %	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	0	0	≤ 1,5	≤ 1,5	
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kematian pasien > 48 jam (≤ 0,24%)	≤ 0,24%	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24	≤ 0,24	
	Kejadian pulang paksa (≤ 5 %)	≤ 5 %	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	3%	3%	≤ 5	≤ 5	
	Kepuasan pelanggan rawat inap (≥ 90 %)	≥ 90 %	90	93	95	95	95	95	95	95	

	Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS (100 %)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB (≥ 60 %)	≥ 60 %	< 60	< 60	< 60	< 60	60	60	< 60	< 60	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS (≥ 60 %)	≥ 60 %	< 60	< 60	< 60	< 60	60	60	< 60	< 60	
	Bed Occupancy Rate (BOR) (60-85%)	60-85%	65	65	65	75	25,85%	50 %	60	65	
	Bed Turn Over (BTO) (40-50 kali)	40-50 kali	40-50	40-50	40-50	40-50	28 Kali	14 Kali	40-50	40-50	
	Average Length of Stay (ALOS) (6-9 hari)	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	3 Hari	3 Hari	6-9 hari	6-9 hari	
	Turn Over Interval (TOI) (1-3 hari)	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	10 Hari	10 Hari	1-3 hari	1-3 hari	
	Net Death Rate (NDR) (< 25/1000)	< 25/1000	< 25/1000	< 25/1000	< 25/1000	< 25/1000	3,57%	7,35%	< 25/1000	< 25/1000	
	Gross Death Rate (GDR) (< 45/1000)	< 45/1000	< 45/1000	< 45/1000	< 45/1000	< 45/1000	< 45/1000	< 45/1000	< 45/1000	< 45/1000	
4	**BEDAH SENTRAL**										
	Waktu tunggu operasi efektif (≤ 2 hari)	≤ 2 hari	0	0	≤ 2	≤ 2	0	0	≤ 2	≤ 2	
	Kejadian kematian di meja operasi (≤ 1%)	≤ 1%	0	0	≤ 1	≤ 1	0	0	≤ 1	≤ 1	
	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi (%)	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang (%)	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada Operasi (%)	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuhpasien setelah operasi (%)	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
	Komplikasi anastesi karena overdosisi, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube (≤ 6 %)	≤ 6 %	0	0	≤ 6	≤ 6	0	0	≤ 6	≤ 6	
5	**PERSALINAN DAN PERINATOLOGI**										
	Kejadian kematian ibu karena persalinan										
	a. Pendarahan ≤ 1 %	%	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	0.5%	0.5%	≤ 1	≤ 1	

	b. Pre-eklampsia ≤ 30 %	%	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	20%	20%	≤ 30	≤ 30	
	c. Sepsis ≤ 0,2 %		≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	1	1	≤ 1	≤ 1	
	Pemberi pelayanan persalinan normal										
	a. Dokter Sp. OG	%	0	0	100	100	0	0	0	0	
	b. Dokter umum terlatih	%	0	0	0	0	50	50	50	50	
	c. Bidan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit										
	Tim PONEK yang terlatih	ada	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	Pemberi Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi										
	a. Dokter Sp. OG	%	100	100	100	100	0	0	100	100	
	b. Dokter Sp. A	%	100	100	100	100	0	0	100	100	
	c. Dokter Sp. An	%	100	100	100	100	0	0	100	100	
	Kemampuan menangani BBLR< 1500 gr - 2500 gr (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pertolongan persalinan melalui seksi ocesaria (≤ 20%)	≤ 20%	0	0	≤ 20	≤ 20	0	0	≤ 20	≤ 20	
	Keluarga Berencana										
	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten Dr. Sp. Og, Dr. Sp. B, Dr. Sp. U, Dr. umum terlatih (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kepuasan pelanggan (≥ 80%)	≥ 80%	80	85	85	90	90	90	85	90	
6	**PELAYANAN INTENSIF**										
	Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam (≤ 3 %)	≤ 3 %	0	0	< 2	< 2	0	0	< 2	< 2	

	Pemberi pelayanan unit intensif (Dr. Sp. Anesthesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara (D4))	%	0	0	60	75	0	0	60	75	
7	**RADIOLOGI**										
	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto (≤ 3 Jam)	≤ 3 Jam	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	0	0	≤ 3	≤ 3	
	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen (Dr. Sp. Rad)	Dr. Sp. Rad %	100	100	100	100	0	0	100	100	
	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (Kerusakanfoto ≤ 2%)	Kerusakanfoto ≤ 2%	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	0	0	≤ 2	≤ 2	
	Kepuasan pelanggan (≥ 80%)	≥ 80%	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	0	0	≥ 80	≥ 80	
8	**LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK**										
	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (≤ 140 menit kimia darah & darah rutin)	≤ 140 menit kimia darah & darah rutin	≤ 130	≤ 130	≤ 130	≤ 130	≤ 130	≤ 130	≤ 130	≤ 130	
	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium (Dr. Sp. PK)	Dr. Sp. PK %	100	100	100	100	0	0	100	100	
	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kepuasan pelanggan (≥ 80%)	≥ 80%	80	85	85	90	90	90	85	90	
9	**REHABILITASI MEDIK**										
	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan (≤ 50 %)	≤ 50 %	0	0	10	10	0	0	10	10	
	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik (%)	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
	Kepuasan pelanggan (≥ 80%)	≥ 80%	0	0	85	90	0	0	85	90	
10	**FARMASI**										
	Waktu tunggu pelayanan obat jadi (≤ 30 menit)	≤ 30 menit	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	

	Waktu tunggu pelayanan obat racikan (≤ 60 menit)	≤ 60 menit	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kepuasan pelanggan (≥ 80%)	≥ 80%	80	85	85	90	90	90	85	90	
	Penulisan resep sesuai formularium (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	**GIZI**										
	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥ 90%)	≥ 90%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien (≤ 20 %)	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	
	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	**TRANSFUSI DARAH**										
	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse (%)	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
	Kejadian reaksi transfuse (≤ 0,01 %)	≤ 0,01 %	0	0	≤ 0,01	≤ 0,01	0	0	≤ 0,01	≤ 0,01	
13	**PELAYANAN GAKIN**										
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datangke RS pada setiap unit pelayanan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	**REKAM MEDIK**										
	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan (≤ 10 menit)	≤ 10 menit	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap (≤ 15 menit)	≤ 15 menit	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	

15	**ADMINISTRASI dan MANAJEMEN**										
	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun (≥ 60%)	≥ 60%	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	
	Cost recovery (≥ 40%)	≥ 40%	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan (100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap (≤ 2 jam)	≤ 2 jam	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	
	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu (100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	**AMBULANCE/KERETA JENAZAH**										
	Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah (24 jam)	Jam	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit (≤ 230 menit)	≤ 230 menit	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	
	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 230 menit	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	< 230	
17	**PEMULASARAN JENAZAH**										
	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah (≤ 2 jam)	≤ 2 jam	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	
18	**PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT**										
	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat (≤ 80%)	≤ 80%	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat (100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi (100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	**PELAYANAN LAUNDRY**										
	Tidak adanya kejadian linen yang hilang (%)	%	90	100	100	100	100	100	100	100	
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap (%)	%	85	90	90	100	100	100	90	100	
	PENCEGAHAN dan PENGENDALIAN INFEKSI										
	Ada anggota tim PPI yang terlatih (75%)	%	75	80	85	90	75	75	85	90	
	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) di setiap instalasi (60%)	%	75	80	85	90	80	80	85	90	
	Terlaksananya kegiatan dan pencatatan pelaporan infeksinosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) (75 %)	%	75	80	85	90	75	75	85	90	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Kinerja RSUD Salabangkapaku tahun 2022 secara umum Masih kurang baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik maupun kinerja keuangan keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK).Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. terdapat beberapa fasilitas Sarana dan prasarana yang masih kurang
2. Rasio tenaga ahli dan pasien belum optimal terutama pada pelayanan khusus.
3. Masih ditemukan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami keberadaan fasiltas kesehatan untuk datang berkunjung. Anggaran yang tersedia baik dari subsidi maupun penerimaan rumah sakit belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan.
4. Belum adanya Kerjasama dengan BPJS .
5. Dukungan Akses Internet belum optimal.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan rujukan, beberapa hal yang menjadi peluang sekaligus strategi untuk mengatasi permasalahan atau upaya peningkatan pelayanan adalah :

1. Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan tunjangan khusus Kesehatan Baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan petugas kesehatan lainnya di daerah Terpencil/Kepulauan.
2. Mempercepat kerjasama BPJS
3. Mengajukan usulan sarana dan prasarana termasuk alat kesehatan/kedokteran rumah sakit ke Daerah dan Pusat.

Beberapa permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam rencana kerja rumah sakit tahun 2024 sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang diberikan Perangkat Daerah, dengan hasil analisis kebutuhan perlu adanya penambahan Pagu Anggaran dalam hal peningkatan mutu pelayanan yang berdampak positif bagi masyarakat kabupaten morowali:

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN MOROWALI

RSUD SALABANGKAPAKU

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	RSUD Salabangkapaku	Nilai Sakip	100%	**13.922.806.462**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	RSUD Salabangkapaku	Nilai Sakip	100%	**13.922.806.462**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluaasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Salabangkapaku		100%	**24,240,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluaasi Kinerja Perangkat Daerah**	RSUD Salabangkapaku	**24,240,000**	100%	**24,240,000**
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-OPD (RSUD Salabangkapaku)		Jumlah Dokumen RKA-OPD yang disusun	2 Dokumen	12,120,000	Koordinasi dan Penyusunan RKA-OPD (RSUD Salabangkapaku)	`	12,120,000	2 Dokumen	12,120,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD (RSUD Salabangkapaku)		Jumlah Dokumen DPA-OPD yang disusun	2 Dokumen	12,120,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD (RSUD Salabangkapaku)		12,120,000	2 Dokumen	12,120,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Salabangkapaku		100%	**11.527.040.767**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	RSUD Salabangkapaku		100%	**11.527.040.767**
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan PNS		Persentase Gaji Dan Tunjangan ASN	100%	1.601.561.497	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan PNS		Persentase Gaji Dan Tunjangan ASN	100%	1.601.561.497
	Penyediaan Administrasi Keuangan Pelaksanan Daerah		persentase jumlah pegawai Honorer	100%	9.925.479.270	Penyediaan Administrasi Keuangan Pelaksanan Daerah		persentase jumlah pegawai Honorer	100%	9.925.479.270
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Salabangkapaku		100%	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	RSUD Salabangkapaku		100%	**0**

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan		Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana		0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan		Persentase Kegiatan rutin yang terlaksana		0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Salabangkapaku		100%	**1.075.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	RSUD Salabangkapaku		100%	**1.075.000.000**
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsulatsi		300.000.000	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsulatsi		300.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan		500.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase Ketersedian Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan		500.000.000
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		25.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		25.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan		100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan		100.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Salabangkapaku		100%	**777.655.695**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	RSUD Salabangkapaku		100%	**777.655.695**

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		350.000.000
	Pengadaan Mobiler		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20.000.000	Pengadaan Mobiler		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		207.655.695	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		207.655.695
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung		100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung		100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Salabangkapaku		100%	**345.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	RSUD Salabangkapaku		100%	**345.000.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat		5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Ketersediaan jasa surat menyurat		5.000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		300.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		40.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		40.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Salabangkapaku		100%	**173.870.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	RSUD Salabangkapaku		100%	**173.870.000**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		124,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		124,400,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		24,470,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		24,470,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		25.000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		25.000,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Salabangkapaku	Angka Kematian Balita(AKB)	100%	**2.891.448.116**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	RSUD Salabangkapaku	Angka Kematian Balita(AKB)	100%	**2.891.448.116**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Morowali	RSUD Salabangkapaku	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar		**2.891.448.116**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Morowali**	RSUD Salabangkapaku	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar		**2.891.448.116**
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun		100.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun		100.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		50.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		50.000.000
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		100.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		100.000.000

	Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan		50.000.000	Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan		50.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		300.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		300.000.000
	Pengadaan Obat Vaksin		persentase kebutuhan obat rumah sakit		900,000,000	Pengadaan Obat Vaksin		persentase kebutuhan obat rumah sakit		900,000,000
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Pesentase Ketersediaan BHP		1.316.448.116	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Pesentase Ketersediaan BHP		1.316.448.116
	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Cakupan Alat Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar		75.000.000.	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Cakupan Alat Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar		75.000.000.
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Salabangkapaku		100%	259.047.431	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	RSUD Salabangkapaku		100%	259.047.431
	Pengembengan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Salabangkapaku		100%	259.047.431	**Pengembengan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	RSUD Salabangkapaku	359.047.431	100%	259.047.431
	Pengembengan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun		259.047.431	Pengembengan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun		259.047.431
	TOTAL				**17.073.302.009**	***TOTAL***				**17.073.302.009**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Salabangkapaku yang di jabarkan dalam program dan kegiatan.Usulan kegiatandan program disusun berdasarkan kebutuhan pasien/masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tercapainya pelayanan kesehatan yang prima.

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali

Nama Perangkat Daerah : RSUD Salabangkapaku

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	NIHIL	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan dan 9 (Sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan program NAWA CITA. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh program tersebut terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan dalam Resntra 2015-2019, yaitu : 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
   b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
   c. Meningkatnya persentase kab/kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya pengendalian penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
   b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
   c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
   d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤18 tahun sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.
   b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
   a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 90%.
   b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
   c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.
    b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
    c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.
    b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
    b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
    c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integritas perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
    b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
    b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
    c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian Negara ≤1% sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kementerian kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Meningkatnya persentase pejabat structural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
    b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
    a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
    b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Morowali, maka tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah "Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan".

B. Sasaran

Berdasarkan makna penetapan tujuan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku menetapkan sasaran yang disajikan pada tabel berikut:

3.2 Tabel Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2024
Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	
Sasaran :		
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan realisasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan pada tahun 2022, dan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran seperti dijabarkan di atas, rencana program dan kegiatan rumah sakit pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali

Nama Perangkat Daerah : RSUD Salabangkapaku

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1						*2*	*3*	*6*	*7*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	2	1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**		**RSUD SALABANGKAPAKU**	**100%**	**13.922.806.462**	**Pajak Daerah**		**100%**	**14.182.680.767**
1	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**24.240.000**	Pajak Daerah		100%	**26.240.000**
1	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD yang disusun		2 Dokumen	12.120.000			2 Dokumen	13.120.000
1	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-OPD	Jumlah Dokumen DPA-OPD yang disusun		2 Dokumen	12.120.000			2 Dokumen	13.120.000
1	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**11.527.040.767**	Pajak Daerah		100%	**11.527.040.767**
1	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Rasio belanja Gaji dan Jasa ASN			1.601.561.497				1.601.561.497

1	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan jasanya			9.925.479.270				9.925.479.270
1	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU			Pajak Daerah			
1	2	1	2	3	6	Penyediaan Penatausahaan barang milik daerah pada OPD	Persentase kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara							
1	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU		-	Pajak Daerah		100%	130.000.000,00
1	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Pegawai dan atribut kelengkapannya							
1	2	1	2	5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelattihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi							
1	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Implemantasi Peraturan Perudang Undangan							130.000.000
1	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**1.075.000.000**	Pajak Daerah		100%	**1.250.000.000**
1	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi / penerangan gedung kantor			25.000.000				30.000.000
1	2	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah tangga yang dibutuhkan			100.000.000				75.000.000

1	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pemenuhan alat tulis kantor			500.000.000				600.000.000
1	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			100.000.000				120.000.000
1	2	1	2	6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			25.000.000				30.000.000
1	2	1	2	6		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			25.000.000				45.000.000
1	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah			300.000.000				350.000.000
1	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	777.655.695	Pajak Daerah		100%	760.000.000
1	2	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional / lapangan			350.000.000				350.000.000
1	2	1	2	7		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			100.000.000				100.000.000
1	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel yang dibutuhkan			20.000.000				60.000.000
1	2	1	2	7		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			207.655.695				200.000.000

1	2	1	2	7		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Mebel yang dibutuhkan			100.000.000				50.000.000
1	2	1	2	8		Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	345.000.000	Pajak Daerah		100%	320.000.000
1	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000				5.000.000
1	2	1	2	8	2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air.	Persentase ketersediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik			300.000.000				300.000.000
1	2	1	2	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan kebersihan lingkungan kantor OPD			40.000.000				15.000.000
1	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	173.870.000	Pajak Daerah		100%	169.400.000
1	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Per Izinan Kendaraan Dinas Ops. atau Lapangan	Persentase ketersediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			124.400.000				124.400.000
1	2	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Persentase ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			24.470.000				25.000.000
1	2	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			25.000.000				20.000.000

1	2	2				**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		**RSUD SALABANGKAPAKU**	100%	**2.891.448.116**	**Pajak Daerah**		100%	**3.175.000.000**
1	2	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	2.891.448.116	Pajak Daerah		100%	3.175.000.000
1	2	2	2	1	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun			100.000.000				-
1	2	2	2	1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit			50.000.000				100.000.000
1	2	2	2	1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kebutuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan			100.000.000				65.000.000
1	2	2	2	1	13	Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase kebutuhan Prasarana Fasilitas pelayanan kesehatan			50.000.000				35.000.000
1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas YANKES	Persentase kebutuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik			300.000.000				500.000.000
1	2	2	2	1	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase kebutuhan obat Rumah Sakit			900.000.000				950.000.000
1	2	2	2	1	17	Pengadaaan Bahan Habis pakai	Persentase ketersediaan BHP			1.316.448.116				1.450.000.000

1	2	2	2	1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	Cakupan Alat Kesehatan di Fasyamkes sesuai standar			75.000.000				75.000.000
1	2	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kabupaten/Kota								
1	2	2	2	2	32	Operasional pelayanan Rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat							
1	2	3				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan**		**RSUD SALABANGKAPAKU**	100%	**259.047.431**	**Pajak Daerah**		100%	**350.000.000**
1	2	2	2	2		Penyediaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusia kesehatan untuk UKp dan UKM di Wilayah kabupaten/Kota		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	259.047.431	Pajak Daerah		100%	350.000.000
1	2	2	2	2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam satu tahun			259.047.431				350.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

RSUD Salabangkapaku dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi4 : Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Pembiayaan Kesehatan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, Kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman.

TABEL T-C.32
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MOROWALI

RSUD Salabangkapaku

KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1						*2*	*3*	*6*	*7*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	2	1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**		**RSUD SALABANGKAPAKU**	**100%**	**13.922.806.462**	**Pajak Daerah**		**100%**	**14.182.680.767**
1	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**24.240.000**	Pajak Daerah		100%	**26.240.000**
1	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	RSUD SALABANGKAPAKU	2 Dokumen	12.120.000	Pajak Daerah		2 Dokumen	13.120.000
1	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	RSUD SALABANGKAPAKU	2 Dokumen	12.120.000	Pajak Daerah		2 Dokumen	13.120.000

1	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**11.527.040.767**	Pajak Daerah		100%	**11.527.040.767**
1	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Rasio belanja Gaji dan Jasa ASN	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	1.601.561.497	Pajak Daerah		100%	1.601.561.497
1	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai PHL yang dibayarkan jasanya	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	9.925.479.270	Pajak Daerah		100%	9.925.479.270
1	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU						
1	2	1	2	3	6	Penyediaan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Persentase kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara	RSUD SALABANGKAPAKU						
1	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	-	Pajak Daerah		100%	130.000.000,00
1	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Pegawai dan atribut kelengkapannya	RSUD SALABANGKAPAKU						

1	2	1	2	5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelattihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	RSUD SALABANGKAPAKU						
1	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Implemantasi Peraturan Perudang Undangan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%		Pajak Daerah		100%	130.000.000
1	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**1.075.000.000**	Pajak Daerah		100%	**1.250.000.000**
1	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi / penerangan gedung kantor	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	25.000.000	Pajak Daerah		100%	30.000.000
1	2	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersedian Peralatan Rumah tangga yang dibutuhkan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	100.000.000	Pajak Daerah		100%	75.000.000

1	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pemenuhan alat tulis kantor	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	500.000.000	Pajak Daerah		100%	600.000.000
1	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	100.000.000	Pajak Daerah		100%	120.000.000
1	2	1	2	6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	25.000.000	Pajak Daerah		100%	30.000.000
1	2	1	2	6		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	25.000.000	Pajak Daerah		100%	45.000.000
1	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	300.000.000	Pajak Daerah		100%	350.000.000
1	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	777.655.695	Pajak Daerah		100%	760.000.000

1	2	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional / lapangan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	350.000.000	Pajak Daerah		100%	350.000.000
1	2	1	2	7		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	100.000.000	Pajak Daerah		100%	100.000.000
1	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel yang dibutuhkan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	20.000.000	Pajak Daerah		100%	60.000.000
1	2	1	2	7		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	207.655.695	Pajak Daerah		100%	200.000.000
1	2	1	2	7		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Mebel yang dibutuhkan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	100.000.000	Pajak Daerah		100%	50.000.000
1	2	1	2	8		Penyediaan Jasa penunjang urusan		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	345.000.000	Pajak Daerah		100%	320.000.000

						Pemerintah Daerah								
1	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	5.000.000	Pajak Daerah		100%	5.000.000
1	2	1	2	8	2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air.	Persentase ketersediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	300.000.000	Pajak Daerah		100%	300.000.000
1	2	1	2	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan kebersihan lingkungan kantor OPD	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	40.000.000	Pajak Daerah		100%	15.000.000
1	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	173.870.000	Pajak Daerah		100%	169.400.000

1	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Per Izinan Kendaraan Dinas Ops. atau Lapangan	Persentase ketersediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	124.400.000	Pajak Daerah		100%	124.400.000
1	2	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Persentase ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	24.470.000	Pajak Daerah		100%	25.000.000
1	2	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	25.000.000	Pajak Daerah		100%	20.000.000
1	2	2				**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**2.891.448.116**	Pajak Daerah		100%	**3.175.000.000**

1	2	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	2.891.448.116	Pajak Daerah		100%	3.175.000.000
1	2	2	2	1	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan Fasilitas kesehatan lainnya	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	100.000.000	Pajak Daerah			-
1	2	2	2	1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	50.000.000	Pajak Daerah		100%	100.000.000
1	2	2	2	1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase kebutuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	100.000.000	Pajak Daerah		100%	65.000.000
1	2	2	2	1	13	Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase kebutuhan Prasarana Fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	50.000.000	Pajak Daerah		100%	35.000.000

1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas YANKES	Persentase kebutuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	300.000.000	Pajak Daerah		100%	500.000.000
1	2	2	2	1	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase kebutuhan obat Rumah Sakit	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	900.000.000	Pajak Daerah		100%	950.000.000
1	2	2	2	1	17	Pengadaaan Bahan Habis pakai	Persentase ketersediaan BHP	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	1.316.448.116	Pajak Daerah		100%	1.450.000.000
1	2	2	2	1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	Cakupan Alat Kesehatan di Fasyamkes sesuai standar	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	75.000.000	Pajak Daerah		100%	75.000.000
1	2	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kabupaten/Kota		RSUD SALABANGKAPAKU						
1	2	2	2	2	32	Operasional pelayanan Rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	RSUD SALABANGKAPAKU						
1	2	3				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan**		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	**259.047.431**	Pajak Daerah		100%	**350.000.000**

1	2	2	2	2		Penyediaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusia kesehatan untuk UKp dan UKM di Wilayah kabupaten/Kota		RSUD SALABANGKAPAKU	100%	259.047.431	Pajak Daerah		100%	350.000.000
1	2	2	2	2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dalam satu tahun	RSUD SALABANGKAPAKU	100%	259.047.431	Pajak Daerah		100%	350.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Rancangan Renja RSUD Salabangkapaku Tahun 2024 merupakan hasil usaha para pemangku kepentingan. Rancangan Renja ini juga tidak luput dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2024. Penyusunan rancangan dapat tersusun hasil dari monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dari unit kerja dilingkungan RSUD Salabangkapaku.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja RSUD Salabangkapaku 2024 merupakan penjabaran tahun kedua dari Renstra RSUD Salabangkapaku Tahun 2024-2026. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja RSUD Salabangkapaku tahun 2024 yang disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024;
2. Rencana Kerja RSUD Salabangkapaku Tahun 2020 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2024.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja OPD RSUD Salabangkapaku Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan. Semoga Rencana Kerja OPD ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja RSUD Salabangkapaku.

Demikian Renja tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Khususnya masyarakat miskin dibidang pelayanan Kesehatan.

Lakombulo, 23 Maret 2023

DIREKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
RSUD SALABANGKAPAKU

dr. AWALUDDIN

NIP 197807012009041002

RENJA

KECAMATAN BUNGKU TENGAH 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bungku Tengah kabupaten Morowali 2024-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan Kecamatan Bungku Tengah selama periode 2014-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2023) Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Bungku Tengah pada akhir tahun anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja ini disusun.

Morowali, 03 Juli 2024

Camat Bungku Tengah

SUDARMIN LATUWO. SH. NIP.
19700921 200312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2021..... 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 15

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 24

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 24

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 25

3.3. Program dan Kegiatan 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 27

BAB V PENUTUP 31



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Bungku Tengah 2024-2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali ini diharapkan dapat terakomodasi dalam penetapan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

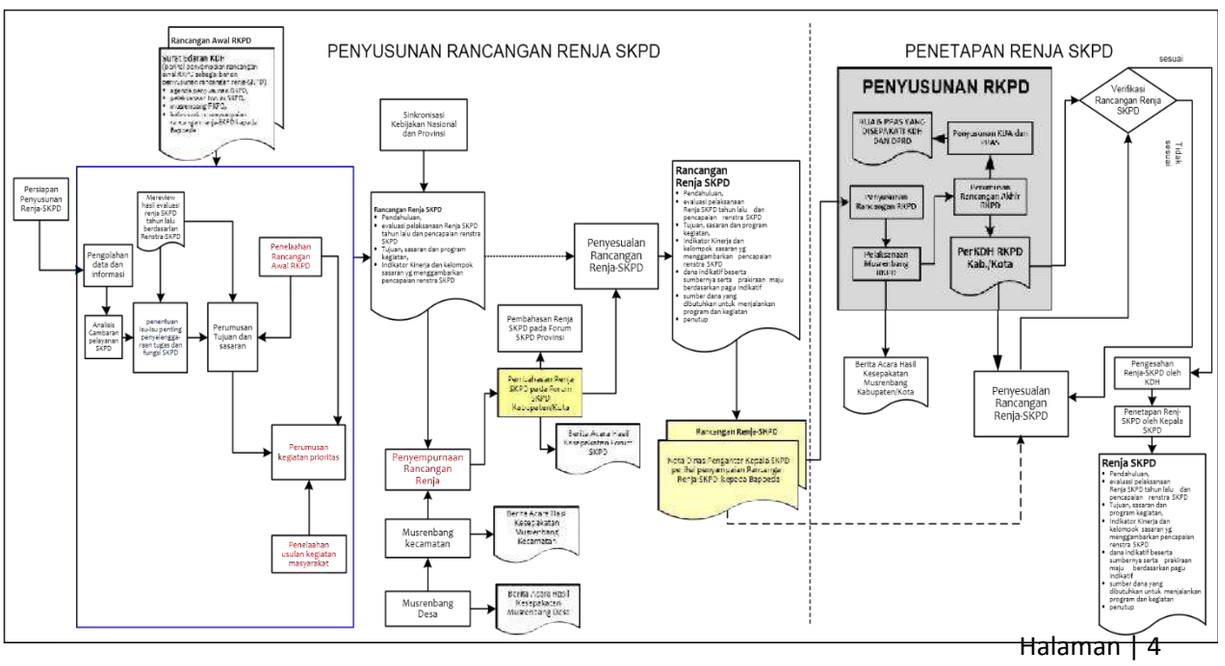
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

5.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

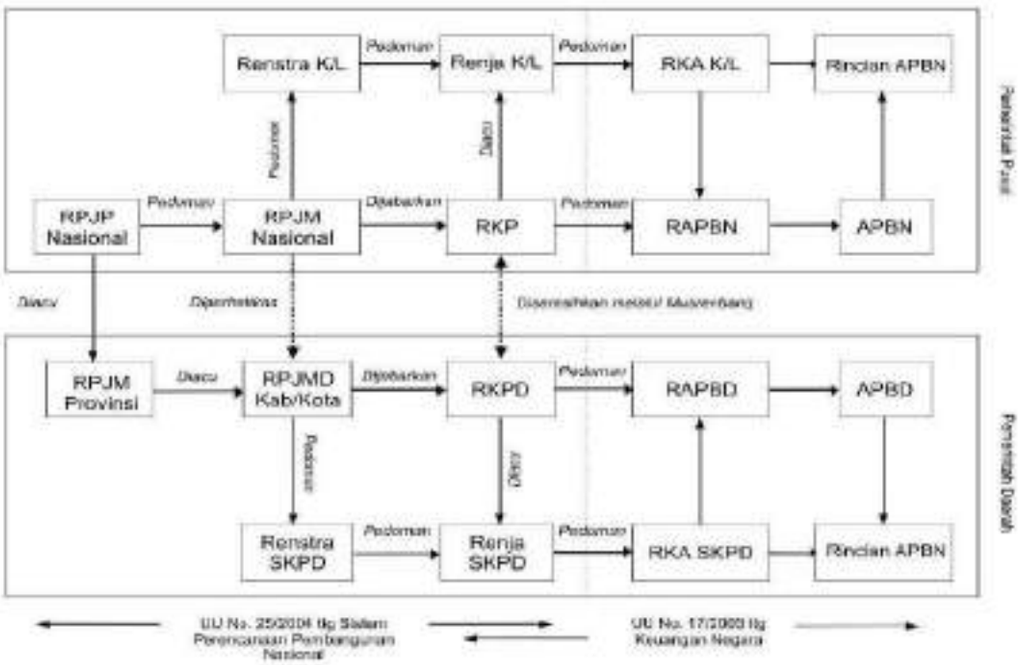
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan OPD;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
   - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran;
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   - Perumusan kegiatan prioritas;
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
   - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
   - Pembahasan forum OPD; dan
   - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

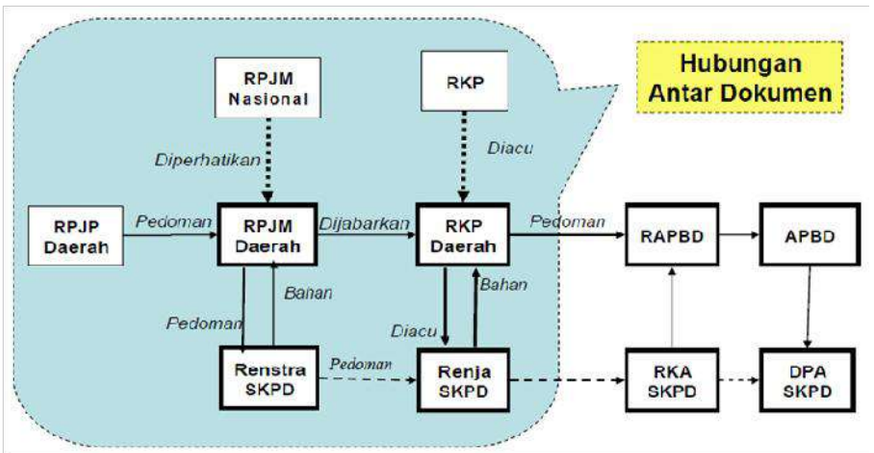
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Morowali nomor 36 tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi,Misi,Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra OPD 2024-2026.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024;

Bab III : Tujuan dan Sasaran OPD Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan PendanaanBerisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup



BAB. II HASIL EVALUASI RENJA 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2023 Kabupaten Morowali

Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program	Satuan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
						Target renja perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi renja perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalanan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase capaian KInerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**									
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	4	Dokumen	4	5	5	100%	4	13	3,25
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS,PPK dan Tenaga Kontrak	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	3
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	3
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	3
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program	Satuan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
						Target renja perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi renja perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalanan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**									
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	3
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah dokumen pelayanan terpadu kecamatan yang diterbitkan	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	3
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase APBDES/ APBD Kelurahan terhadap kegiatan Pemberdayaan**									
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana optimal	7	Kegiatan	7	8	8	100%	8	23	3,29
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	6	Kelurahan	6	6	6	100%	6	18	3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program	Satuan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
						Target renja perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi renja perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalanan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kasus Pelanggaran K3 tertangani Di Kecamatan**									
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penurunan kasus permasalahan trantib	100	%	100	100	100	100%	100	300	3
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah kasus yang dijatuhi sanksi sesuai perda dan perkada	5	%	5	4	4	100%	4	13	2,6
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di laksanakan**									
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100	%	100	100	100	100%	100	300	3
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa / Kelurahan Tertib administrasi**									
06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa berstatus IDM desa mandiri	3	Desa	3	4	4	100%	4	11	3,67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bungku Tengah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T- C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

NO.	INDIKATOR	SPM/	IKK	TARGET renstra perangkat daerah			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		standar nasional		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			80	85	90	80	80	85	95	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan PNS, PPK dan Tenaga Kontrak			100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
3	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
4	Jumlah Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70	75	80	70	70	75	85	90	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
5	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi			93	95	97	93	93	95	99	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
6	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan			90	93	95	90	90	93	98	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
7	Jumlah Dokumen Pelayanan Terpadu Kecamatan yang diterbitkan			70	75	80	70	70	75	85	90	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
8	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksanan dengan Optimal			95	96	97	95	95	96	98	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
9	Jumlah Kelurahan yang Berstatus Kelurahan Cepat Berkembang			80	85	90	80	80	85	95	100	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

NO.	INDIKATOR	SPM/	IKK	TARGET renstra perangkat daerah			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		standar nasional		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	
10	Jumlah Penurunan Kasus Permasalahan Trantib			100	0	0	100	100	0	0	0	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
11	Jumlah Kasus yang dijatuhi Sanksi sesuai Perda dan Perkada			1	1	1	1	1	1	1	1	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
12	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan			19	19	19	19	19	19	19	19	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
13	Jumlah Desa Berstatus IDM Desa Mandiri			13	13	13	13	13	13	13	13	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan
   a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;
   b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;
   c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
   c. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
   d. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD, P3BK);
   e. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

3. Seksi Ekonomi Pembangunan
   a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
   b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
   c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
   e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
   b. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
   c. Data intervensi kemiskinan belum terpadu;
   d. Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan layak Anak (KLA) dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PATP2A);
   e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
   g. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
   h. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.
5. Seksi Pendapatan
   a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan Aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dengan mengirim diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa/kelurahan dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Bungku Tengah

KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Bungku Tengah			**3.120.083.081**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.218.972.521**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	100%	60.890.915	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS,PPK dan Tenaga Kontrak	100%	8.422.437.969	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS,PPK dan Tenaga Kontrak	12 Bln	8.422.437.969	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	578.608.341	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 jenis	530.462.440	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	150.000.000	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		159.822.112	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi	100%	81.955.939	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi	12 Bln	100.750.000	
No	**Rancangan Awal RKPD**							**Hasil Analisis Kebutuhan**			**Catatan Penting**

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PUBLIK**				**493.216.903**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PUBLIK**		**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**		**73.818.900**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Bungku Tengah	Jumlah Rekomendasi hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	100%	453.288.003	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Bungku Tengah	Jumlah Rekomendasi hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	36 Rekomendasi	33.890.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah dokumen pelayanan terpadu kecamatan yang diterbitkan	100%	39.928.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		Jumlah dokumen pelayanan terpadu kecamatan yang diterbitkan	300 Dokumen	39.928.900	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**10.011.543.350**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kantor Camat Bungku Tengah	**Persentase APBDES/ APBD Kelurahan terhadap kegiatan Pemberdayaan**		**1.011.543.350**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana optimal		1.011.543.350	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana optimal		1.011.543.350	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	6 Kelurahan	9.000.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Camat Bungku Tengah	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	6 Kelurahan	0	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di laksanakan**		**734.277.115**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di laksanakan**		**0**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	47 jenis	734.277.115	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Kantor Camat Bungku Tengah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	12 jenis	0	

6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Desa / Kelurahan Tertib administrasi**		**256.435.475**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Desa / Kelurahan Tertib administrasi**		**0**	
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Bungku Tengah	Jumlah desa berstatus IDM desa mandiri	100%	256.435.475	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Bungku Tengah	Jumlah desa berstatus IDM desa mandiri	12 Bln	0	
	JUMLAH				**14.615.555.924**					**10.304.334.771**	

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa , BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Bungku Tengah terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Daftar rencana kegiatan prioritas kecamatan Bungku Tengah tahun 2024 bisa dilihat di dalam Tabel T.C-32.

Tabel T-C.32.

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021 KABUPATEN MOROWALI

Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**Pengembangan Infrastruktur/Prasarana Kelurahan/Desa**	Kelurahan Tofoiso	Pembangunan Jaringan Air Bersih	300 Meter	Rehap
		Kelurahan Tofoiso	Pemelihraan Jalan Pemukiman	100 Meter	Rehap
		Kelurahan Tofoiso	Pembangunan dan Pemeliharaan drainase dan selokan	300 Meter	Rehap
		Kelurahan Marsaoleh	Rehab Drainase	1 km	Rehap
		Kelurahan Marsaoleh	Pembangunan duiker (gorong-gorong)	1 Paket	Rehap Total
		Kelurahan Lamberea	Pembuatan Saluran Limbah Masyarakat	500 Meter	
		Kelurahan Lamberea	Perbaikan Jaringan Air Bersih	1000 Meter	
		Kelurahan Matano	Pembangunan Kantor Lurah	1 Paket	
		Kelurahan Matano	Pembangunan Drainase	600 M	
		Kelurahan Mendui	Lanjutan Pembangunan Draenase	300 M	
		Kelurahan Mendui	Penambahan Tanggul Limbosu	200 M	
		Kelurahan Mendui	Kelanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan	1 Paket	
		Desa Bente	Pembangunan Saluran Drainase	3000 M	
		Desa Bente	Pembangunan Pelindung Tambatan Perahu	500 M	
		Desa Bahontobungku	Lanjutan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (Batu Gajah)	100 Meter	
		Desa Ipi	Drainase	500 Meter	
		Desa Ipi	Selokan/ Spal	380 Meter	
		Desa Ipi	Jalan Lingkungan	550 Meter	
		Desa Ipi	Pembuatan Plat Dekker	20 Meter	
		Desa Matansala	Pembangunan Jalan Konsulidasi	1000 Meter	
		Desa Matansala	Pembangunan Jalan Batas Bahoruru -Matansala	300 Meter	
		Desa Matansala	Peningkatan Lapangan Sepak Bola	1.Paket	
		Desa Bahomoleo	Pembangunan Jalan Wisata/Permandian	3 Km	
		Desa Bahomoleo	Pembangunan Jembatan	2 Bh	
		Desa Bahomoleo	Pembukaan Jalan Tani	2 Km	
		Desa Bahomoleo	Beronjong	250 Meter	
		Desa Bahoruru	Pengaspalan Jalan PLN	1000 M	
		Desa Bahoruru	Peningkatan Jalan Tani Jalan	2000 M	

			Produksi Dusun 4		
		Desa Bahoruru	Drainase Kiri & Kanan Jalan Larino Dusun 4, RT 9	400 M	
		Desa Bahoruru	Pembuatan Jembatan Penghubung Dusun 3 Ke Dusun 4	8x12 M	
		Desa Bahoruru	Pembangunan Tanggul Sungai Dusun 1	800 M	
		Desa Tofuti	Pemecah Ombak	1200 M	
	LAYANAN DASAR (PENDIDIKAN/KESEHATAN)	Desa Bahomoleo	Pembangunan Ruang Baru Sd Dusun Lala	3 Paket	
		Desa Puungkoilu	Pembangunan Gedung	2 Unit	
		Desa Bente	PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH	100 METER	
		Desa Bente	REHAB LANTAI RUANG BELAJAR	56 M2	
		Desa Bente	PEMBANGUNAN GEDUNG POLINDES	1 UNIT	
		Desa Tudua	Penambahan Gedung SDN T2	4 Unit	
		Kelurahan Lamberea	Pembangunan Gedung Kantor SDN 4	1 Unir	
		Kelurahan Lamberea	Penimbunan Halaman Sekolah	450 M2	
		Kelurahan Lamberea	Pembangunan POLINDES	1 Unir	
		Desa Bahoruru	Pembangunan paving blok SDN BAHORURU	180 M2	
		Kelurahan Matano	pembangunan Gedung TPA	1 Unit	
	SOSIAL DAN LAINNYA	Desa Matansala	Peningkatan Saran Wisata Mangrove	1 Paket	
		Desa Bente	Paping Blok Masjid Bente	1200m2	
		Desa Sakita	Pengadaan Lahan Pemakaman Umum	1 Ha	
		Desa Bahomohoni	Pengadaan Lokasi Pekuburan Desa Bahomohoni	1 Ha	
	EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Desa Bahoruru	Pengadaan Katinting	12 unit	
		Desa Bahoruru	pengadaan alat-alat perbengkelan	5 Paket	



BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Bungku Tengah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungku Tengah Tahun 2021. Rencana Kerja Kecamatan Bungku Tengah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2021, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis *(strategis goal)* organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan

suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja *(performance indicator)* yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Bungku Tengah adalah :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi.
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan Dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi.
3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan Dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bungku Tengah dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah;
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.



BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Bungku Tengah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bungku Tengah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Bungku Tengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bungku Tengah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bungku Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Morowali

Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

Kode	Program/Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	***2***	***3***	*4*	*5*	***6***	*7*	*8*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai AKIP**			**9.218.972.521**		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Kec. Bungku Tengah	4 Dokumen	5.500.000	APBD II	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan PNS,PPK dan Tenaga Kontrak	Kec. Bungku Tengah	12 Bln	8.422.437.969	APBD I dan II	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bungku Tengah	12 jenis	530.462.440	APBD II	
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bungku Tengah	100%	159.822.112	APBD II	
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kec. Bungku Tengah	12 Bln	100.750.000	APBD II	

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)**			**73.818.900**		
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kec. Bungku Tengah	36 Rekomendasi	33.890.000	APBD II	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah dokumen pelayanan terpadu kecamatan yang diterbitkan	Kec. Bungku Tengah	300 Dokumen	39.928.900	APBD II	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase APBDES/ APBD Kelurahan terhadap kegiatan Pemberdayaan**			**1.011.543.350**		
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana optimal	Kec. Bungku Tengah	8 Kegiatan	1.011.543.350	APBD II	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase status kelurahan yang berstatus kelurahan cepat berkembang	6 Kelurahan	6 Kelurahan	0		
Jumlah					**10.304.334.771**		

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Tengah merupakan implementasi dari visi dan misi Kantor Kecamatan Bungku Tengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungku Tengah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Tengah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Morowali, 03 Juli 2024
Camat Bungku Tengah

SUDARMIN LATUWO. SH.
NIP. 19700921 200312 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN BUNGKU TENGAH
Jl. Ki Hajar Dewantara No.10, Kec.Bungku Tengah
KAB. MOROWALI,
Email: bungkutengah11@gmail.com

RENCANA KERJA TAHUNAN

(RKT) 2024



KECAMATAN BUNGKU BARAT

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Disusun : Maret Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali 2024 - 2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan Program bagi Pembangunan Kecamatan Bungku Barat selama periode 2024-2026 yang menjadi tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2024). Demikian pula Indikator Pencapaian Kinerja dan Sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian Akuntabilitas Kinerja **Kecamatan Bungku Barat** pada akhir tahun Anggaran 2024.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini disusun.

Wosu, 7 Maret 2023

Camat Bungku Barat,

JALALUDDIN ISMAIL, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19690920 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2022 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2022 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas 17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 33

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 33

3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 41

BAB V PENUTUP 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi (Renja-PD) adalah dokumen Perencanaan Organisasi untuk periode1 (satu) tahun.

Renja Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024, merupakan dokumen Perencanaan yang berisi Rencana Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali merupakan implementasi dari Visi dan Misi Strategis (Renstra) Kecamatan Bungku Barat 2024-2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali disusun berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis gunamencapai tujuan pembangunan Daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan Perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali ini diharapkan dapat terakomodasi dalam penetapan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renncana Kerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

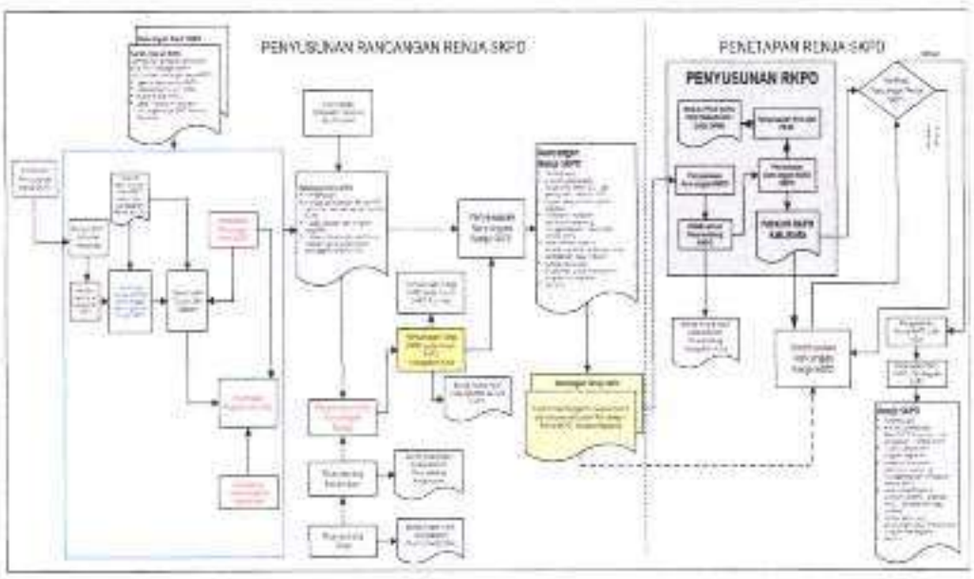
Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PERANGKAT DAERAH pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Rencana Kerja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

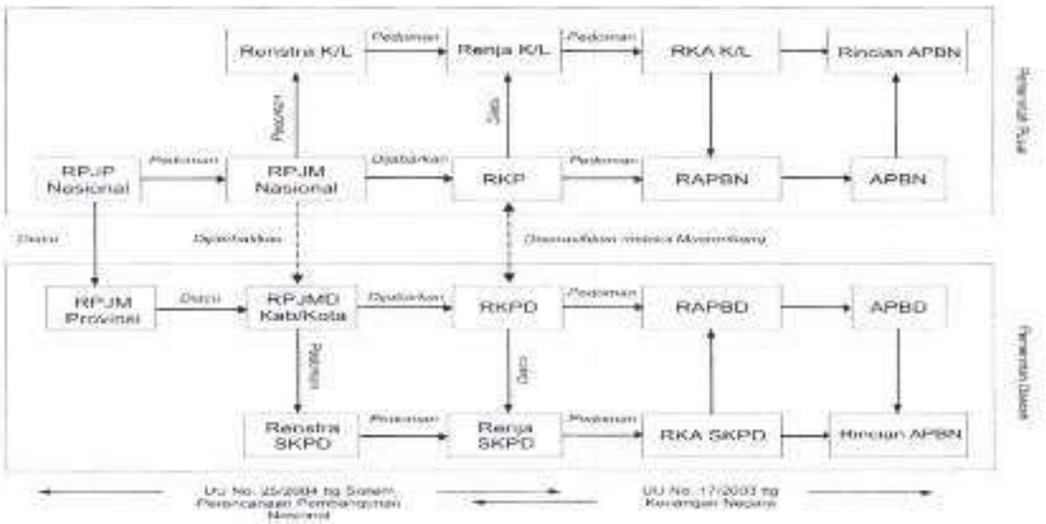
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan PD:
   - Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
   - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran;
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   - Perumusan kegiatan prioritas;
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
   - Penyempurnaan rancangan kerja PD;
   - Pembahasan forum PD; dan
   - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

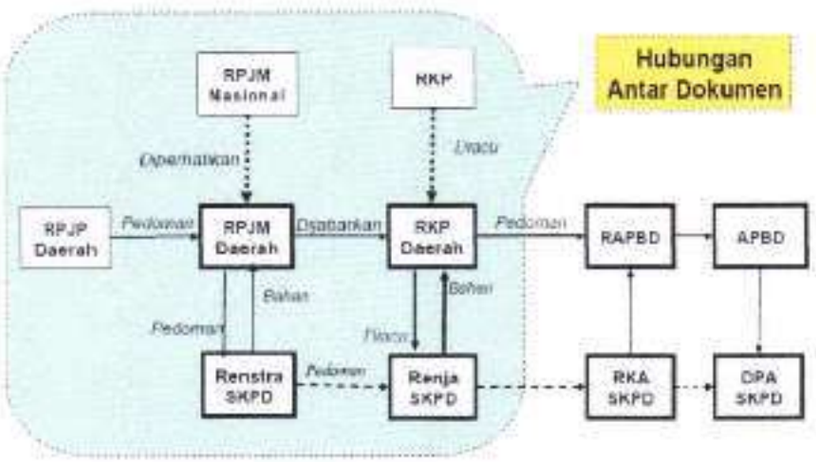
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
10. Peraturan Bupati Morowali nomor 02 tahun 2023 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra PD 2024-2026.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja Tahunan PD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bungku BaratKabupaten Morowali terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan PD, landasan hukum, serta sistematika penulisan ;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023;

Bab III : Tujuan dan Sasaran PD

Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan ;

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

: Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2022

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023). mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program/Kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Turunan Rencana Kerja Tahunan PD Tahun 2022 yang tercalisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Anggaranm Rp. 5.609.205.174,- dan Realisasi Rp 4.878.103.167,- dengan Capaian : 86,97 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik : Anggaran Rp. 95.467.240,- dan realisasi Rp. 75 907 430,- dengan capaian : 79, 51 %
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan : Anggaran Rp 328.282.250,- dan realisasi 293.510.450,- dengan capaian : 97, 20 %

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Anggaran Rp 4.959.000,- dan realisasi 0,- dengan capaian : 0 %
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Anggaran Rp. 9.975.000,- realisasi Rp. 0,- dengan capaian 0 %
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa : Anggaran Rp. 57.334.350,- realisasi Rp. 25.584.350,- dengan capaian 44,62 %

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali

Kecamatan Bungku Barat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	Target Kinerja Capaian Program (lima/ra perangkat daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja) PD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalanan (2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**Urusan Pemerintahan Daerah**									
7.01	**Bidang Urusan**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	100	93	100	93	0.93	100	286	2.86
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi.***	***0***	***5***	***166***	***0***	***0***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	2	2	100	2	4	4
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Terwujudnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD.	0	0	0	0	0	0	0	1
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	0	0	2	2	100	2	4	4
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100***	***100***	***90***	***100***	***1.11***	***99***	***299***	***2.9***
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	42	3
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	0	0	12	12	100	18	30	30

7.01.01.2.05	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah***		***0***	***100***	***8***	***0.08***	***100***	***100***	***200***
7.01.01.2.05.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	0	0	0	12	12	12
7.01.01.2.05.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	7	7	7	1.00	0	7	7
7.01.01.2.07	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100***	***98***	***100***	***98***	***0.98***	***100***	***286***	***3.0***
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	0	0	0	0	0	31	31	31
7.01.01.2.07.19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	2	2	2	1	0	2	2
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100***	***98***	***100***	***98***	***0.98***	***100***	***286***	***3.0***
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	24	24	24
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	26	26	23	23	1.00	25	34	2.85
7.01.01.2.06.03	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0	0	23	23	1.00	25	48	4.8
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (jenis)	25	28	26	23	0.9	23	34	2.6
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	24.000	24.000	23.850	25.848	1.08	23.850	71699	3.0
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu (kegiatan)	11	11	0	0	0.0	0	11	1
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	6	3	6	4.0	0.7	8	18	2.5
7.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintah Daerah.***	***Persentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***55***	***83***	***90***	***83***	***0.92***	***90***	***256***	***2.7***
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga dan untuk pengadaan surat-menyurat (kantor)	50	25	170	170	1.00	0	0	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	8	12	12	1.00	12	32	2.67
7.01.01.2.08.05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	6	13	15	1.15	8	25	4.17
7.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0.00***	***100***	***100***	***100.0***
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	1	1	1.00	1	3	3

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	102	**100.0**
7.01.02.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Persentase Pelayanan Pemerintahan dilimpahkan ke Kecamatan***	***0***	***0***	*4*	***0***	***0***	*4*	*4*	*4.0*
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	52	44	44	44	48	48
7.01.02.2.02	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*5*	*5*	*4.0*
7.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN)	0	0	0	0	0	5	5	4.0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Barat**	**100**	**85.71**	**100**	**85.71**	**0.86**	**100**	**271**	**2.7**
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Ke Desa***	***90***	***85.7***	***90.0***	***85.7***	***0***	***90.0***	*261*	*2.9*
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	0	0	#DIV/0!	10	20	2
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	6	9	6	0.67	6	18	2.57
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Barat**	**NA**	**0**	**100**	**85.71**	**0.86**	**100**	**186**	**186.0**
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	Prentase kasus kriminal yang ditangkanani	**NA**	**0.0**	90.0	**85.7**	**0**	90.0	*176*	*176.0*
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rangkaian Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	0	0	0	0.00	10	10	10

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat**	**NA**	**0**	**8**	**0**	**0.00**	**100%**	**8**	**80%**
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tetuai Penugasan Kepala Daerah***	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***NA***	***0***	***8***	***0***	***0.00***	***85%***	***8***	***0***
7.01.05.2.01.06	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	NA	0	0	0	0.00	1	0	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASI DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN**	**NA**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**96,99**	**96,99**
06.A.01.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Persentase Desa / Kelurahan Yang Dibina***	***NA***	***0***	***99***	***88***	***1***	***99***	***34***	***34***
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Desa (Musrenbang Kecamatan)	1	1	0	1	0.00	1	1	100
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.	5	5	10	12	1.2	10	10	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Kecamatan Bungku Barat yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel **T-C.30 sebagai berikut :**

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	12	13
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	0	0	2	1	0	1	1	2	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
2	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
3	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			0	0	100	239	2	0	0	1	239	2	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
4	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			0	14	14	14	14	0	14	14	14	14	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
5	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN			0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
6	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD			0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Terwakili Sekretariat SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terwakilinya Sekretariat SKPD			0	0	0	10	0	0	0	1	9	0	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
8	Terlaksananya rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
9	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
10	Tersedianya laporan pengelolaan Retribusi Daerah retribusi daerah			0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target

11	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya			0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
12	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
13	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0	0	0	74	0	0	0	0	26	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
14	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			11	17	26	25	1	0	17	26	25	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
15	Tersedianya Perabotan Rumah Tangga			0	0	0	25	1	0	0	0	25	0	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
16	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (jenis)			26	28	29	27	23	17	18	26	23	31	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
17	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			32.000	20,000	24,000	23.851	44,106	32,000	20,000	24,000	23,850	37,200	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
18	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu (kegiatan)			0	3	11	3	3	3	3	11	0	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
19	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sosialisasi SKPD			85	410	901	8	107	86	380	280	7	115	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
20	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan			0	3	0	3	2	3	0	0	0	2	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
21	Tersedianya Mebel			0	3	0	5	4	3	3	0	5	4	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
22	Pemeliharaan peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	3	0	0	100	0	3	0	0	83,72	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
23	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			20	100	100	170	0	20	50	100	170	0	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
24	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12	12	12	12	12	9	9	12	12	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
25	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4	5	5	17	8	3	5	4	10	8	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
26	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
27	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal lainnya			0	0	0	4	4	0	0	0	3	1	133	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target

28	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN)			0	3	0	3	2	3	0	0	0	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
29	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			0	10	10	10	10	0	10	10	100	10	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
30	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6	8	7	6	8	6	7	6	7	6	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
31	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
32	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan intrasuku, Umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
33	Jumlah Dokumen yang diverifikasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
34	Terwujudnya Penyimpanan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0		100	100	0	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
35	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan)			10	10	10	10	1	10	10	10	10	1	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
36	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pengawasannya Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target
37	Jumlah koordinasi pengampingan desa di wilayahnya			0	0	0	10	10	0	0	0	6	10	100	Realisasi 2020 dan proyeksi 2021-2022 memakai angka target

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Indikator Kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai Indikator Kinerja maka diperlukan data-data yang dapat mere presentasikan nilai dari Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai Capaian Kinerja dari setiap Indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan pada setiap Indikator Sasaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungku Barat :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 :

1. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

   Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan Sebagian tugas Camat.

   2.1. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kecamatan.
3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
6. Bupati adalah Bupati Morowali.
7. Wakil Kepala Daerah adalalt Wakil Bupati Morowali.

   Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

   1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sesuai Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koorinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
4. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kecamatan Menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi pemberdayaan masyarakat;
b. Ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
e. Membina pemerintahan Desa/Kelurahan ; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

(1). Kecamatan terdiri dari :

a. Kecamatan Bungku Tengah ;
b. Kecamatan Bungku Barat ;
c. Kecamatan Bungku Timur ;
d. Kecamatan Bungku Pesisir ;

e. Kecamatan Bungku Selatan

f. Kecamatan Bahodopi ;

g. Kecamatan Witaponda ;

h. Kecamatan Bumi Raya ;

i. Kecamatan Menui Kepulauan ;

j. Kecamatan Sombori Kepulauan.

(2). Pada Kecamatan Bungku Tengah terdapat kelurahan :

a. Kelurahan Bungi ;

b. Kelurahan Matano ;

c. Keluarahan Lamberea ;

d. Kelurahan Marsaoleh ;

e. Kelurahan Mendui ; dan

f. Kelurahan Tofoiso.

(3). Pada Kecamatan Menui Kepulauan terdapat Kelurahan Ulunambo.

SUSUNAN ORGANISASI

(1). Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan membawahi :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ; dan

2. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset.

c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ;

d. Seksi Perekonomian ;

e. Seksi Pembangunan ;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;

g. Kelurahan ; dan

h. Kelompok Jabatan Fugsional ;

(2). Susunan organisasi Kelurahan pada ayat (2) huruf g terdiri dari:

a. Lurah ;

b. Sekretaris Kelurahan ;

c. Seksi Pemrintahan, Ketenteraman dan Ketertiban ;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT

(1) Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam kecamatan serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

(2) Camat sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat

(1) Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

b. Merumuskan Rencana Strategis serta kebijakan operasional Kecamatan dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

d. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI dan/atau TNI, Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama mengenai program dan kegiatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan ;

e. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;

f. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petinggi dan/atau Lurah, perangkat Kampung dan/atau Kelurahan serta pembinaan dan pengawasan terhadap tertib administrasi Pemerintahan Kampung dan/ atau Kelurahan

i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;

J. Melakukan Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan menilai pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan ;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS

(1). Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu camat menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum ;
2. Melaksanakan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum ;
3. Melaksanakan pembinaan teknis operasional pelayanan pengelolaan administrasi keuangan, aset Serta kepegawaian, rumah tangga, umum dan kehumasan ;
4. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Kecamatan, rencana kerja Kecamatan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan ;
5. Mengoordinasikan penyiapan bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Melaksanakan tugas penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga, korpri dan umum ;
7. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum ;
8. Melaksanakan Evaluasi Pengawasan, Pengumpulan,pengelolaan, analisis dan penyajian laporan basil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja ;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut basil pemeriksaan BPK RI, tindak lanjut basil pemeriksaan APIP, dan aparat pengawas lainnya ;
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan ;
11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan :

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kearsipan, tatalaksana, hukum dan kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum meliputi :

a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rencana kerja, persuratan, rumah tangga, umum, Korpri ;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/ pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/aset Kecamatan.
e. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri;
f. Menyelenggarakan pelayanan kebersihan, penyediaan listrik dan air serta pemeliharaan kantor dan fasilitas Kecamatan lainnya;
g. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, dokumentasi, arsip ;
h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan ;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

(1). Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan asset pada Kecamatan.

(2). Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, keuangan dan asset ;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program keuangan dan asset dengan unit kerja terkait ;
d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi ;
e. Melaksanakan penyusunan RENSTRA, RENJA, PROBIS, LAKIP, menyiapkan bahan, data LKPJ dan LPPD di lingkungan Dinas ;
f. Melakukan urusan perbendaharaan dan verifikasi keuangan ;
g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai :
h. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik daerah
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan dan Aset ;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam menyelenggarakan di bidang pelayanan dan pembinaan teknis administrasi pemerintahan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan rencara program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. Melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

Desa dan/ atau Kelurahan;

3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan Pemberian pelayanan umum dan teknis operasional dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ;
4. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan ;
5. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
6. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tiap-tiap Desa dan/atau Kelurahan dalam wilayah Kecamatan ;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait perihal penanganan masalah sosial dan bencana ;
8. Mengumpulkan dan menganalisis data bidang pemerintahan dan sosial politik di Kecamatan ;
9. Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ; dan
10. Melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada Pasal 13, Seksi Pendapatan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
c. Pemberian pelayanan umum dan teknis operasional dibidang Perekonomian dan Pendapatan kepada masyarakat ;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perekonomian dan Pendapatan;
e. Melaksanakan fasilitasi pendirian Koperasi dan Badan Usaha Milik Kampung dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan ;
f. Melaksanakan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam profesi sosial dan keterampilan ;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perekonomian; dan
h. Melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada Pasal 15, Seksi Ekonomi dan Penbangunan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
c. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
d. Mengoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ;
e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
f. Menfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang ;
g. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna ;
h. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan ;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Ekonomi dan Pembangunan ; dan
j. Melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan ;

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran operasional dibidang Kesejahteraan Sosial;
b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaran PAUD dan Pendidikan dasar ;
c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan Kesehatan masyarakat;
d. Melaksanakan program dan pembinaan kepemudaan dan olahraga, kepariwisataan, kebudayaan, Kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

e. Menghimpun dan mengolah data serta melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan;

f. Melaksanakan Pemberian pelayanan umum dan teknis operasional dibidang Kesejahteraan Sosial ;

g. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial ;

h. Melaksanakan koordinasi dengan puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan masaalah Kesehatan kepada masyarakat ;

i. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Kesejahteraan Sosial ; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjangjabatan fungsional.

(1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

(2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fugnsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

(3). Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

(4). Jenis Jabatan Fungsional dan Jumlah Pemegang Jabatan Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bungku Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 06 Tahun 2023 Tentang tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Kecamatan Bungku Barat.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel **T-C.31**. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Morowali

KECAMATAN BUNGKU BARAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KEWILAYAHAN				**Rp 4,507,477,990.00**					**Rp 4,507,477,990.00**	
	KECAMATAN				**Rp 4,507,477,990.00**					**Rp 4,507,477,990.00**	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Kecamatan Bungku Barat***	**Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan (%).**	**100%**	**Rp 3,877,943,090.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Kecamatan Bungku Barat***	**Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan (%).**	**100%**	**Rp 3,877,943,090.00**	
01.2.02	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	***Kecamatan Bungku Barat***	*Prosentase Ketepatan Waktu Perencanaan (%).*	*100%*	*Rp 10,000,000.00*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	***Kecamatan Bungku Barat***	*Prosentase Ketepatan Waktu Perencanaan (%).*	*100%*	*Rp 10,000,000.00*	
01.2.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bungku Barat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp 2,730,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bungku Barat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp 2,730,000.00	
01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	Rp 7,270,000.00	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	Rp 7,270,000.00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***Prosentase Layanan Administrasi Keuangan***	*100%*	***Rp 3,194,527,990.00***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***Prosentase Layanan Administrasi Keuangan***	*100%*	***Rp 3,194,527,990.00***	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	Rp 2,938,257,990.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	Rp 2,938,257,990.00	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	Rp 255,320,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	Rp 255,320,000.00	

03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Bl	Rp	25,490,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Bl	Rp	25,490,000.00	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Rp	7,360,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD/Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Rp	7,360,000.00	
01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah***	***100%***	***Rp***	***12,550,000.00***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah***	***100%***	***Rp***	***12,550,000.00***	
03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Persentase pelaksanaan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Rp	2,800,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Persentase pelaksanaan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Rp	2,800,000.00	
06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	100%	Rp	4,750,000.00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	100%	Rp	4,750,000.00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***Rp***	***393,060,814.00***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***Rp***	***393,060,814.00***	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	20 buah	Rp	2,406,600.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	20 buah	Rp	2,406,600.00	
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	Rp	52,510,652.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	Rp	52,510,652.00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (unit)	35 jenis	Rp	33,675,564.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (unit)	35 jenis	Rp	33,675,564.00	
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20494 lbr	Rp	10,247,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20494 lbr	Rp	10,247,000.00	
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Bungku Barat	Terlaksanannya Fasilitas Kunjungan Tamu (kegiatan)	5 keg	Rp	23,582,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Bungku Barat	Terlaksanannya Fasilitas Kunjungan Tamu (kegiatan)	5 keg	Rp	23,582,000.00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Rp	180,879,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Bungku Barat	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Rp	180,639,000.00	

01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah***	*100%*	*Rp*	*149,304,288.00*	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah***	*100%*	*Rp*	*149,304,288.00*
06	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Mebel	4 unit	Rp	51,042,750.00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Mebel	4 unit	Rp	51,042,750.00
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bungku Barat	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Rp	98,461,538.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bungku Barat	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Rp	98,461,538.00
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***Rp***	***58,552,000.00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***Rp***	***58,552,000.00***
06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	Rp	45,432,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	Rp	45,432,000.00
07	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	Rp	13,120,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bungku Barat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	Rp	13,120,000.00
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***100%***	***Rp***	***149,742,000.00***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***100%***	***Rp***	***149,742,000.00***
11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bungku Barat	Persentase Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Rp	149,742,000.00	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bungku Barat	Persentase Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Rp	149,742,000.00
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Bungku Barat	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**	75%	**Rp**	**315,821,650.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Bungku Barat	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**	75%	**Rp**	**315,821,650.00**
02.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Pelayanan Pemerintahan dilaksanakan ke Kecamatan yang dikoordinasikan***	***90%***	***Rp***	***82,586,600.00***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Pelayanan Pemerintahan dilaksanakan ke Kecamatan yang dikoordinasikan***	***90%***	***Rp***	***82,586,600.00***
2.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 keg	Rp	82,586,600.00	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 keg	Rp	82,586,600.00

02.2.02	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	*95%*	*Rp*	***233,435,050.00***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	*95%*	*Rp*	***233,435,050.00***	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN)	3 keg	Rp	233,435,050.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN)	3 keg	Rp	233,435,050.00	
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Bungku Barat	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan/APBD desa Kecamatan Bungku Barat**	**95%**	**Rp**	**149,897,750.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Bungku Barat	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan/APBD desa Kecamatan Bungku Barat**	**95%**	**Rp**	**149,897,750.00**	
05.3.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	*100%*	*Rp*	***149,897,750.00***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	*100%*	*Rp*	***149,897,750.00***	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	10 desa	Rp	16,903,100.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah Lembaga/Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	10 desa	Rp	16,903,100.00	
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 keg	Rp	133,394,750.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 keg	Rp	133,394,750.00	
06	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Bungku Barat	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat**	**100%**	**Rp**	**151,115,500.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Bungku Barat	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat**	**100%**	**Rp**	**151,115,500.00**	
5.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum untuk Pemegang Kepala Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Presentase Penyelenggaraan fourm komunikasi pimpinan di Kecamatan***	*85%*	*Rp*	***151,115,500.00***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum untuk Pemegang Kepala Daerah***	Kecamatan Bungku Barat	***Presentase Penyelenggaraan fourm komunikasi pimpinan di Kecamatan***	*85%*	*Rp*	***151,115,500.00***	
04	Pembinaan Ketahanan Antar Suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Antar Suku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 keg	Rp	151,115,500.00	Pembinaan Ketahanan Antar Suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Antar Suku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3 keg	Rp	151,115,500.00	

00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Bungku Barat	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	95%	Rp	12.700.000.00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Bungku Barat	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	95%	Rp	12.700.000.00	
0.02.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	95%	Rp	*12.700.000.00*	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	Kecamatan Bungku Barat	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	95%	Rp	*12.700.000.00*	
04	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan)	10 desa	Rp	560.000.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan)	10 desa	Rp	560.000.00	
17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (kegi	10 desa	Rp	12.140.000.00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Bungku Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (kegi	10 desa	Rp	12.140.000.00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Bungku Barat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bungku Barat Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Bungku Barat merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai Program Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2024 dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan Pembangunan Daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis *(strategis goal)* organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu1(satu) sampai 5 (lima) tahun.

Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki Indicator Kinerja *(performance indicator)* yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Adapun Tujuan Strategis Pemerintah Kecamatan Bungku Barat adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bungku Barat
2. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kemajuan Pembangunan Daerah
3. Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis

3.2.2 Sasaran

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungku Barat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa
4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis

TUJUAN DAN SASARAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bungku Barat		Terwujudnya Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan Bungku Barat	Nilai	BB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungku Barat.	Terwujudnya Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Bungku Barat	Nilai	BB
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bungku Barat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Terpadu Yang dilaksanakan	%	75.00
2.	Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kemajuan Pembangunan Daerah		Persentase Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kemajuan Pembangunan Daerah	Persen	10%
		Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun	Persentase Kemajuan Pembangunan Desa	Persen	10%
3.	Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis		Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Persen	95%
		Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Persen	95%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Bungku Barat dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

01.2.01. Perencanaan, Penaganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
03. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

01. Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN
02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

01.2.03.Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
08. Fasilitas Kunjungan Tamu.
09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

06. Pengadaan Meubel.

01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

02. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
03. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

02.201. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

02.202. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat.

03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.

***03.* PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.**

03.201. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
03. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

05.201. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

03. Pembinaan Kerukunan Antar Suku, dan Intra Suku, Umat Brragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Dan Nasional.

06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

04.201. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

09. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa.
17. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Uraian rumusan rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bungku Barat Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada **tabel T-C.33 berikut ini:**

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Morowali

Kecamatan Bungku Barat

Lembar

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**				**Rp 4,507,477,990.00**				**Rp 6,642,292,803.68**
7.01	**KECAMATAN**				**Rp 4,507,477,990.00**				**Rp 6,642,292,803.68**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan (%).**	**Kecamatan Bungku Barat**	**100%**	**3,877,943,090.00**	**APBD Kab.**		**100%**	**5,348,396,430.00**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Presentase Kompetensi Waktu Perencanaan (%).***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***10,000,000.00***	***APBD Kab.***		***100%***	***12,500,000.00***
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bungku Barat	1	2,730,000.00	APBD Kab		1	5,000,000.00
02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Bungku Barat	7	7,270,000.00	APBD Kab		7	7,500,000.00
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Presentase Layanan Administrasi Keuangan***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***3,194,527,990.00***	***APBD Kab***		***100%***	***3,194,527,990.00***
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Bungku Barat	14	2,908,357,990.00	APBD Kab		14	2,908,357,990.00
02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kecamatan Bungku Barat	12	253,320,000.00	APBD Kab		12	253,320,000.00
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bungku Barat	18	25,490,000.00	APBD Kab		18	25,490,000.00

07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Bungku Barat	12	7,360,000.00	APBD Kab		12	7,760,000.00
7.01.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***12,558,000.00***	***APBD Kab***		***100%***	***13,000,000.00***
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaksanaan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bungku Barat	100%	2,800,000.00	APBD Kab		100%	2,800,000.00
06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Kecamatan Bungku Barat	100%	9,750,000.00	APBD Kab		100%	10,000,000.00
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***303,000,814.00***	***APBD Kab***		***100%***	***354,766,400.00***
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Bungku Barat	20 Buah	2,606,950.00	APBD Kab		24	2,518,440.00
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bungku Barat	5 unit	52,210,650.00	APBD Kab		10	82,000,000.00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (jenis)	Kecamatan Bungku Barat	55 jenis	33,672,364.00	APBD Kab		29	35,000,000.00
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bungku Barat	20494 Ltr	10,247,000.00	APBD Kab		20494 ltr	10,247,000.00
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu (kegiatan)	Kecamatan Bungku Barat	5 keg	25,582,000.00	APBD Kab		5	25,000,000.00
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bungku Barat	100%	180,819,000.00	APBD Kab		100%	222,000,000.00
02.2.02	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***149,594,286.00***	***APBD Kab***		***100%***	***155,000,000.00***
06	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kecamatan Bungku Barat	6 unit	51,042,750.00	APBD Kab		30	45,000,000.00
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kecamatan Bungku Barat	100%	98,551,536.00	APBD Kab		100%	120,000,000.00

02.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	*100%*	***58,332,000.00***	***APBD Kab.***		*95%*	***56,000,000.00***
06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bungku Barat	12 bln	42,432,000.00	APBD Kab.		12	45,000,000.00
03	Penyediaan Jasa Penilaian dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Penilaian dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bungku Barat	4 unit	15,120,000.00	APBD Kab.		10	14,000,000.00
02.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	*100%*	***149,742,000.00***	***APBD Kab.***		*100%*	***149,742,000.00***
10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bungku Barat	100%	149,742,000.00	APBD Kab.		100%	149,742,000.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**	**Kecamatan Bungku Barat**	*75%*	***315,821,650.00***	***APBD Kab.***		***100%***	***331,358,421.58***
83.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Persentase Pelaporan Pemerintahan dilimpahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan***	***Kecamatan Bungku Barat***	*99%*	***82,386,600.58***	***APBD Kab.***		***80%***	***97,923,371.68***
01	Koordinasi Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bungku Barat	1 keg	82,386,600.00	APBD Kab.		4	97,923,371.58
83.2.02	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Kecamatan Bungku Barat***	*85%*	***233,435,050.00***	***APBD Kab.***		*85%*	***233,435,050.00***
05	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN)	Kecamatan Bungku Barat	3 keg	233,435,050.00	APBD Kab.		3	233,435,050.00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan/APBD desa Kecamatan Bungku Barat**	**Kecamatan Bungku Barat**	*95%*	***149,897,750.00***	***APBD Kab.***		***95%***	***149,897,750.00***
0.00	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Kecamatan Bungku Barat***	*100%*	***149,897,750.00***	***APBD Kab.***		***100%***	***149,897,750.00***
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Bungku Barat	10 desa	16,553,000.00	APBD Kab.		10 desa	16,500,000.00
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bungku Barat	3 keg	133,344,750.00	APBD Kab.		3 keg	133,396,750.00

5.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat**	**Kecamatan Bungku Barat**	**100%**	**151,315,500.00**	**APBD Kab.**		**100%**	**200,000,000.00**
5.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Prosentase Penyelenggaraan fasum kemasilkan pimpinan di Kecamatan***	***Kecamatan Bungku Barat***	***85%***	***151,315,500.00***	***APBD Kab.***		***85%***	***200,000,000.00***
05	Pemeliharaan Kerukunan Antar Suku dan Umat serta, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kerukunan Antar Suku dan Umat serta, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bungku Barat	3 keg	151,315,500.00	APBD Kab.		3	200,000,000.00
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	**Kecamatan Bungku Barat**	**95%**	**12,700,000.00**	**APBD Kab.**		**100%**	**12,700,000.00**
6.02.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Bungku Barat***	***95%***	***12,700,000.00***	***APBD Kab.***		***100%***	***12,700,000.00***
09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan)	Kecamatan Bungku Barat	10 desa	560,000.00	APBD Kab		10	560,000.00
17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (keg)	Kecamatan Bungku Barat	10 desa	12,140,000.00	APBD Kab		10	12,140,000.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Kecamatan Bungku Baratmerupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bungku Baratkedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Bungku Barat. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bungku Barat.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (out come) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Uraian rumusan rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bungku Barat Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada **tabel T-C.34 berikut ini:**

Tabel T-C.34

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Morowali

Kecamatan Bungku Barat Lembar

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**				**Rp 4,507,477,990.00**		
7.01	**KECAMATAN**				**Rp 4,507,477,990.00**		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan (%).**	**Kecamatan Bungku Barat**	**100%**	**3,877,943,090.00**	**APBD Kab.**	
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Prosentase Ketepatan Waktu Perencanaan (%).***	***Kecamatan Bungku Barat***	*100%*	*70,000,000.00*	***APBD Kab.***	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bungku Barat	2	2,735,000	APBD Kab	
02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA/SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD.	Kecamatan Bungku Barat	2	7,270,000	APBD Kab	
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Prosentase Layanan Administrasi Keuangan***	***Kecamatan Bungku Barat***	*100%*	*2,134,527,950*	***APBD Kab.***	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Bungku Barat	14	2,908,357,990	APBD Kab	
02	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Terealisasinya Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Kecamatan Bungku Barat	12	255,520,000	APBD Kab.	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD.	Kecamatan Bungku Barat	18	25,400,000	APBD Kab.	

17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/ SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Bungku Barat	12	7,200,000	APBD Kab	
7.01.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***12,350,000***	***APBD Kab***	
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaksanaan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bungku Barat	100%	2,800,000	APBD Kab	
06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Kecamatan Bungku Barat	100%	9,550,000	APBD Kab	
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***383,000,514***	***APBD Kab***	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Bungku Barat	20 kali	2,406,600	APBD Kab	
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bungku Barat	5 unit	82,910,650	APBD Kab	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (unit)	Kecamatan Bungku Barat	35 jenis	55,979,964	APBD Kab	
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bungku Barat	20494 lbr	10,247,000	APBD Kab	
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Fasilitas Kunjungan Tamu (kegiatan)	Kecamatan Bungku Barat	5 keg	23,582,000	APBD Kab	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Bungku Barat	100%	180,679,000	APBD Kab	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***149,304,286***	***APBD Kab***	
06	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kecamatan Bungku Barat	4 unit	51,042,750	APBD Kab	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bungku Barat	100%	98,461,536	APBD Kab	

01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***58,552,000***	***APBD Kab.***	
04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bungku Barat	12 bln	45,432,000	APBD Kab.	
13	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bungku Barat	4 unit	13,120,000	APBD Kab.	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***149,742,000***	***APBD Kab.***	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bungku Barat	100%	149,742,000	APBD Kab.	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**	**Kecamatan Bungku Barat**	**75%**	**315,823,650**	**APBD Kab.**	
82.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Persentase Pelayanan Pemerintahan dilengahkan ke Kecamatan yang dikoordinasikan***	***Kecamatan Bungku Barat***	***80%***	***82,386,600***	***APBD Kab.***	
01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bungku Barat	1 keg	82,386,600	APBD Kab.	
82.2.02	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Kecamatan Bungku Barat***	***95%***	***233,435,050***	***APBD Kab.***	
05	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN)	Kecamatan Bungku Barat	5 keg	233,435,050	APBD Kab.	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan/APBD desa Kecamatan Bungku Barat**	**Kecamatan Bungku Barat**	**95%**	**149,897,750**	**APBD Kab.**	
0.09	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Kecamatan Bungku Barat***	***100%***	***149,897,750***	***APBD Kab.***	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga/Masyarakat yang meningkat Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Bungku Barat	10 desa	16,513,000	APBD Kab.	
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bungku Barat	5 keg	133,384,750	APBD Kab.	

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat**	**Kecamatan Bungku Barat**	**100%**	**151,115,500**	**APBD Kab.**	
5.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum untuk Pemegang Kepala Daerah***	***Presentase Penyelenggaraan fasrah kemasukan pimpinan di Kecamatan***	***Kecamatan Bungku Barat***	**85%**	***151,115,500***	***APBD Kab.***	
04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bungku Barat	1 keg	151,115,500	APBD Kab	
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	**Kecamatan Bungku Barat**	**95%**	**12,700,000**	**APBD Kab.**	
8.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kecamatan Bungku Barat***	**85%**	***12,700,000***	***APBD Kab.***	
09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan)	Kecamatan Bungku Barat	16 dokumen	560,000	APBD Kab	
17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (keg)	Kecamatan Bungku Barat	16 desa	12,140,000	APBD Kab	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur Pencapaian Kinerja adalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Barat merupakan implementasi dari visi dan misi Kantor Kecamatan Bungku Barat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungku Barat sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Barat disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan PD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnyapenting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas danmeningkatkan kinerja PD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat sertasumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Wosu, 7 Maret 2023

Camat Bungku Barat,

JALALUDDIN ISMAIL, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19690920 200604 1 006

RENCANA KERJA

KANTOR KECAMATAN BUMI RAYA

KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

KECAMATAN BUMI RAYA, 2023

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Visi yang terdapat di dalam Renja merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh PD pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, PD menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan sertarencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, PD memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , dalam rangka melaksanakan prioritas segala bentuk program/kegiatan yang menuju kegiatan prioritas.Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Kecamatan Bumi Raya sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Bumi Raya dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai bentuk perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja). Penyusunan Renja PD Kecamatan Bumi Raya ini mengacu kepada Rencana Kerja Kabupaten Morowali. Perencanaan-perencanaan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.1 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang - Undang Nomor14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
22. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. PeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
39. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat.
40. Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 Tahun 2017 Tentang tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Rencana kerja PD Kecamatan Bumi Raya adalah :

- Merumuskan visi, misi, tujuan, Strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi kerja PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali
- Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur pemerintahan Kecamatan Bumi Raya dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 dapat tercapai.
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Kerja tahun 2024 PD Kecamatan Bumi Raya.
- Menjadi kerangka dasar bagi kerja PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dalam upaya Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosiala Kemasyarakatan di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Bumi Raya.
- Sebagai salah satu PD penyelenggara pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur kinerja PD Kecamatan Bumi Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

1.2.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana kerja PD Kecamatan Bumi Raya adalah :

- Menetapkan dokumen perencanaan kerja PD Kecamatan Bumi Raya sebagai salah satu PD penyelenggara Pemerintah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Sebagai acuan dan pedoman kerja PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali pada tahun 2024.

- Mengelola keberhasilan organisasis cara sistemik.
- Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai bagian:
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB.II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menguraikan bagian:
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB.IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menguraikan bagian:
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan..

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan bagian:
- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya

BAB.V PENUTUP

memberikan penjelasan secara ringkas mengenai pelaksanaan, kecukupan anggaran atau tidak, kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, dan informasi nama perangkat daerah dan pengesahan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang dimaksud.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk pencapaian Sasaran strategis Tahun 2024 PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali adalah diberdayakannya seluruh potensi sumber daya manusia dengan basis data yang akurat. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan dengan cakupan program dan kegiatan :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
  - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
  - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Tahun 2024 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian kinerja tahun sebelumnya. Renstra Kabupaten Morowali telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan renja dan capaian Renstra PD Kecamatan Bumi Raya dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PEPELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN BUMI RAYA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**1**				**KECAMATAN**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan Bumi Raya**	**BB**	**BB**						
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**%**						
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	3	*1*	*1*	*100*	*1*	*5*	*100*

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	3	*1*	*1*	*100*	*1*	*5*	*100*
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3	*1*	*1*	*100*	*1*	*5*	*100*
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					*0*			
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					*0*			

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**%**						
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	24	24	24	*100*	24	*24*	*100*
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	*100*	12	*12*	*100*
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	*100*	1	*1*	*100*
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**%**						
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian								

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Barang Milik Daerah SKPD								
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	*1*	*100*	1	*1*	*100*
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
7	**1**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah sesuai Kewenangan Perangkat Daerah**	**%**	**%**						
7	1	1	2.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	1	1	*1*	*100*	1	*1*	*100*
7	1	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah								

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**%**						
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	*100*	*100*	*100*	*1*	*1*	*100*
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**%**						

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100	98.50	*98.5*	1	*1*	*100*
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	100	99.65	*99.65*	7	*7*	*100*
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1						
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	100	99.60	*99.6*	10	10	*100*
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100	99.97	*99.97*	12	12	*100*
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	99.85	*99.85*	1	1	*100*
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	250	250	100	88.60	*88.6*	250	250	*100*

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**%**						
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**%**						
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	96.58	*96.58*	100	*12.00*	*100*
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**%**	**%**						

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintahan Daerah**								
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100	100	*100*	100	*4*	*100*
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara								
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase urusan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan**	**%**	**%**						
7	**1**	**2**	**2.04**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di koordinasikan**								
7	1	2	2.04	3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**%**	**%**						

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase aPBDes/APBD Kelurahan terhadap kegiatan pemberdayaan**	**%**	**%**						
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persenase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**%**						
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	13	13	*100*	13	*10*	*100*
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	*100*	1	*1*	*100*

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kasus K3 di kecamatan**	**%**	**%**						
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Kasus K3 tertangani di kecamatan**	**%**	**%**						
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	1	0	*0*	1	*0*	*0*
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**%**	**%**						
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase urusan pemerntahan umum sesuai penugasan**	**%**	**%**						
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional								

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	**%**	**%**						
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**%**						
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALANAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 2018 - 2023 PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali telah menyelenggarakan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembanguan serta Pelayanan Masyarakat secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil gunadimana evaluasi kinerja PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dapat dilihat pada Tabel excell berikut ini :

Tabel T- C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah "PD Kecamatan Bumi Raya"Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2018 - 2023 dan Prakiraan 2024 -2026

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2	2	2	1	2	2	2	1	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1				1	
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2	2	2	1	2	2	2	1	
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1				1	
6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1				1	
7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	24	24	26	26	24	24	26	
8	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	12	12	1	12	12	12	1	
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4	4	1		4	4	1	
10	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1				1	
11	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12	12	1		12	12	1	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12			1	12			1	
13	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data RetribusiDaerah				12	12	1		12	12	1	
14	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1				1	
15	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1	1			1	1	
16	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					24	26			24	26	
17	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						2				2	
18	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1		1		1		1	
19	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1	1	1	1	1	1	1	
20	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	1	7	1	1	1	7	
21	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1		1	1	1		1	1	
22	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	1	10	1	1	1	10	
23	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	1	1	12	1	1	1	12	
24	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	1	1	1	-	1	1	1	
25	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	1	1	250	1	1	1	250	
26	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		1	1	-		1	1	
27	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	1	2	-	-	1	2	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2				2	
29	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	-		1	1	-		1	
30	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-		1	-	-		1	
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-		1	-	-		1	
32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	1	1	12	1	1	1	12	
33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1				1	
34	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	-	-	1	-	-	-	1	
35	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	1	1	4	-	1	1	4	
36	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			-	-	-	4	-	-	-	4	
37	Jumlah Mebel yang Dipelihara						10				10	
38	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	-	2	-	-	-	2	
39	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
40	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1	1		29	1	1		29	
41	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1	1	1	29	1	1	1	29	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1			10	1			10	
43	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1		1	10	1		1	10	
44	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1	1	1		1	1	1	
45	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1	1	1		1	1	1	
46	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional					1	60			1	60	
47	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			13		13	13	13		13	13	
48	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			13		13	13	13		13	13	
49	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						13				13	
50	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			13		6	13	13		6	13	
51	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					13	13			13	13	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas PD Kecamatan Bumi Raya dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi pertama ““Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalisme, dan Keesejahteraan Aparatur Pemerintah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan.. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik di seluruh PD melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalisme, dan Keesejahteraan Aparatur Pemerintah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan.. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana kerja (renja) PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali yaitu:

- Keterbatasan Sarana dan Prasaran serta Anggaran Kantor Camat Bumi Raya;
- Masih Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan di Kecamamatan Bumi Raya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Perangkat Daerah "PD Kecamatan Bumi Raya" Kabupaten Morowali

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Morowali

KECAMATAN BUMI RAYA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
7 1	**KECAMATAN**				**8,488,858,328**	**KECAMATAN**				**8,488,858,328**	
7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Nilai SAKIP Kecamatan Bumi Raya**	**BB**	**7,010,117,027**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Nilai SAKIP Kecamatan Bumi Raya**	**BB**	**7,010,117,027**	
7 1 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97 %**	**51,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97 %**	**51,000,000**	
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000	
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000	
7 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5,000,000	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
7 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000	
7 1 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**3,371,240,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**3,371,240,000**	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang / bulan	3,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang / bulan	3,000,000,000	
7 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	366,240,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	366,240,000	
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	
7 1 1 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**97 %**	**33,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**97 %**	**33,000,000**	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 1 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	12,500,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	12,500,000	
7 1 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13,000,000	
7 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,500,000	
7 1 1 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah sesuai Kewenangan Perangkat Daerah**	**98 5**	**27,500,000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah sesuai Kewenangan Perangkat Daerah**	**98 5**	**27,500,000**	
7 1 1 2.04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	12,500,000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	12,500,000	
7 1 1 2.04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15,000,000	
7 1 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**90,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**90,000,000**	
7 1 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	40,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	40,000,000	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25,000,000	
7 1 1 2.05 #	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	25,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	25,000,000	
7 1 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 %**	**450,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 %**	**450,000,000**	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	120,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	120,000,000	
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	46,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	46,000,000	
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,000,000	
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	70,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	70,000,000	
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	140,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	140,000,000	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 1 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 %**	**2,858,857,027**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 %**	**2,858,857,027**	
7 1 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35,000,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13,000,000	
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20,000,000	
7 1 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,773,357,027	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,773,357,027	
7 1 1 2.07 #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17,500,000	
7 1 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 %**	**78,520,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 %**	**78,520,000**	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12,000,000	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,520,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21,520,000	
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20,000,000	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,000,000	
7 1 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98 %**	**50,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98 %**	**50,000,000**	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	25,000,000	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	10,000,000	
7 1 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000	
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10,000,000	
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	
7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase urusan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan**	**97 %**	**301,500,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase urusan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan**	**97 %**	**301,500,000**	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 1 2 2.04	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di koordinasikan**	**97 %**	**175,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di koordinasikan**	**97 %**	**175,000,000**	
7 1 2 2.04 3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29 Laporan	175,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29 Laporan	175,000,000	
7 1 2 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat**	**97 %**	**126,500,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat**	**97 %**	**126,500,000**	
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29 Dokumen	126,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**Kecamatan Bumi Raya**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29 Dokumen	126,500,000	
7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase aPBDes/APBD Kelurahan terhadap kegiatan pemberdayaan**	**70 %**	**775,800,374**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase aPBDes/APBD Kelurahan terhadap kegiatan pemberdayaan**	**70 %**	**775,800,374**	
7 1 3 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persenase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**95 %**	**775,800,374**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persenase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**95 %**	**775,800,374**	
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,800,374	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,800,374	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	650,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	650,000,000	
7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Kasus K3 di kecamatan**	**2 %**	**44,915,509**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Kasus K3 di kecamatan**	**2 %**	**44,915,509**	
7 1 4 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Kasus K3 tertangani di kecamatan**	**2 %**	**44,915,509**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Kasus K3 tertangani di kecamatan**	**2 %**	**44,915,509**	
7 1 4 2.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18,540,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18,540,000	
7 1 4 2.01 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	26,375,509	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	26,375,509	
7 1 5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Bumi Raya**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**97 %**	**150,239,817**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Bumi Raya**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**97 %**	**150,239,817**	
7 1 5 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase urusan pemerntahan umum sesuai penugasan**	**97 %**	**150,239,817**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase urusan pemerntahan umum sesuai penugasan**	**97 %**	**150,239,817**	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penugasan Kepala Daerah					**Penugasan Kepala Daerah**					
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	150,239,817	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	150,239,817	
7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	**98 %**	**206,285,601**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	**98 %**	**206,285,601**	
7 1 6 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**98 %**	**206,285,601**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Bumi Raya**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**98 %**	**206,285,601**	
7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	35,285,601	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	35,285,601	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	40,000,000	
7 1 6 2.01 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	25,000,000	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 1 6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 Dokumen	60,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 Dokumen	60,000,000	
7 1 6 2.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	46,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bumi Raya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	46,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Percepatan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki oleh masing-masing daerah, seyogyanya didukung oleh perencanaan yang sistematis dan terstruktur serta melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna.

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan. Visi merupakan tonggak tujuan yang memberi arah kepada semua pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatannya masing-masing. Dilain pihak, Misi merupakan cara bagaimana mewujudkan Visi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus realistis, disusun dan dirumuskan secara rinci disertai dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Perangkat Daerah "PD Kecamatan Bumi Raya"
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

KECAMATAN BUMI RAYA

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya	Pembangunan kantor kecamatan bumi raya	1 Paket	
			Rehab rumah jabatan camat	1 Paket	
			Pengadaan mobil dinas	1 Unit	
			Pagar keliling kantor camat bumi raya	! Paket	
			Mobiler rujab	1 Paket	
			Pembangunan tribun	1 Paket	
			Pembangunan MCK kantor pengurus KB KECAMATAN BUMI RAYA		
			Pembangunan jalan usaha tani	1 Km	
			Pembangunan RKB SDN 2 Bahonsuai	2 RKB	
			Pembangunan drainase JLN. Trans Sulawesi	3 Km	
			Pengadaan tenda besi karang taruna	1 Paket	
			Pengadaan perahu piber	20 Buah	
			Pembangunan talub penahan abrasi pantai	500 Meter	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Parilangke Kecamatan Bumi Raya	Lanjutan pembuatan dermaga	60 Meter	
			Peningkatan jalan tani	2 Km	
			Pembangunan jalan tani	500 Meter	
			Peningkatan jalan lingkungan	750 Meter	
			Normalisasi sungai parilangke	1 Km	
			Bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah	50 KK	
			Ambulance Jenasah	1 Unit	
			Jalan Lingkar Dalam Lokasi Puskesmas & Pintu Pagar Keluar	250 Meter	
			Saluran Pembuangan Air Limbah SPAL	200 Meter	
			Pembangunan Pos Securiti	1 Unit	
			Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	6 Buah	
			Pembangunan Koridor Penghubunng Rawat Jalan & Rawat Inap	50 Meter	
			Rehab Berat Rumah Kopel Paramedis	2 Paket	
			Pembangunan Gudang Umum	1 Paket	
			Meubiler Gedung Rawat Jalan	1 Paket	
			Meubiler Gedung Rawat Inap	1 Paket	
			Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 & Roda 4	1 Paket	
3	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Harapan Jaya Kecamatan Bumi Raya	Normalisasi sungai diwilayah pemukiman	6 Km	
			Rehab jembatan sungai polo	1 Paket	
			Perbaikan aspal jalan desa	2,5 Km	
			Pembangunan talut dan hamparan tpu	2 Km	
			Pengerasan jalan tani	1 Km	
			Pengerasan jalan usaha tani	1,2 Km	
			Bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS)	98 Unit	
			Rehab gedung, gazebo dan pengadaan perlengkapan perpustakaan Desa	1 Paket	
4	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Beringin Jaya Kecamatan Bumi Raya	Pembangunan talud	600 Meter	
			Peningkatan jalan penghubung (aspal) beringin jaya-lambelu	700 Meter	
			Pembangunan drainase	300 Meter	
			Pembangunan rumah tidak layak huni (pembangunan baru)	10 Unit	
			Peningkatan usaha tani poktan dewi sri jaya	1 Paket	
			Peningkatan sirtu jalan produksi perkebunan sawit	1 Km	
			Bantuan modal koperasi SERBA USAHA JAYA ABADI	1 Paket	
			Pembangunan pagar PAUD KB INDAH JAYA	100 Meter	
			Pembangunan pagar SDN I BERINGIN JAYA	500 Meter	
5	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya	Timbunan halaman SDN samarenda	1 Paket	
			Saluran drainase ± 150 M	150 Meter	
			Pembangunan jembatan penghubung jalan produksi	1 Paket	
			Penimbunan jalan tani simbarata (sawit)	1 Paket	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Normalisasi sungai perumahan masyarakat	1 Paket	
			Penimbunan jalan tani	1 Paket	
			Pembuatan jalan penghubung/koridor SDN SAMARENDA	1 Paket	
			Pengadaan sanggar tani	1 Paket	
			Pengadaan alat tangkap nelayan	1 Paket	
6	Pengembangan Infrastruktur/Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Limbo Makmur Kecamatan Bumi Raya	Pembuatan gudang/bangunan	1 Paket	
			Pembuatan pagar kantor BPP	1 Paket	
			Pembuatan tempat parkir	1 Paket	
			Pangadaan mobil Dinas	1 Unit	
			Pengaspalan Uedago-Emea	11 Km	
			Pengaspalan pebatae-Limbo Makmur	2,8 Km	
			Pengaspalan pebatae-Lambelu-Limbo Makmur	1,8 Km	
			Pengaspalan Limbo Makmur	5 Km	
			Penerangan Lampu Jalan	100 Titik	
			Penimbunan jalan Lingkup	3,5 Km	
			Pagar sekolah TK/PAUD ABA dan AL KHAIRAT	120 Meter	
			Mobil pelayanan kesehatan	1 Unit	
			Drainase	1000 Meter	
			Talut jalan	2000 Meter	
			Stadion Mini	35x18 Meter	
			Pemekaran Desa	Program	
			Penimbunan Lapangan	100x120 Meter	
			Rehab Berat Pustu Limbo Makmur	1 Paket	
7	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Pebotoa Kecamatan Bumi Raya	Pengembangan Desa Wisata di RT 3 Dusun II		
			Jembatan Penghubung Antar Desa	80 M	
			Tiang Lampu PLN (Tiang SUTR Beton)	32 Buah	
			Lampu Jalan	32 Buah	
			Perbaikan Lapangan Bola Kaki	10.000 M2	
			Penahan Aprasi Pantai (Batu Gajah)	100 M	
			Drainase	518 M	
			Lanjutan Pembangunan Pagar Masyarakat	270 Tiang	
			Rehab Bangunan TK	1 Unit	
			Jembatan Pekuburan	1 Unit	
			Jalan Tani	2 Km	
			Tapal Batas Desa, Dusun, RT	8 Buah	
			Pengadaan Air Bersih	1 Unit	
			Pengadaan Bibit Rumput Laut	60 Ton	
			Pengadaan Bibit Udang	700.000 Ekor	
			Pengadaan Bibit Bandeng	35.000 Ekor	
			Pengadaan Glacilaria	20 Ton	
			Pengadaan Keramba	6 Buah	
			Pengadaan Serok	9 Buah	
			Pengadaan Bagang Tancap	3 Buah	
			Pengadaan Baju Pelampung bagi Nelayan	100 Buah	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Prahu Panen Rumput Laut	5 Buah	
			Perbaikan Pematang	300 Jam	
			Pengadaan Bibit Klapa Sawit	4.500 Phn	
			Pengadaan Bibit Klapa Hibrida	4.000 Phn	
8	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Umbele Kecamatan Bumi Raya	Pembangunan pagar SD	400 Meter	
			Normalisasi/ restorasi sungai karaupa	4 Km	
			Rehabilitasi jalan usaha tani	2 Km	
			Pembangunan tanggul pengaman pemukiman	1 Km	
			Pembangunan jalan lingkungan	1,5 Km	
			Pembangunan dan penimbunan lapangan sepak bola	1 Paket	
			Pengadaan rumpon pinggir	2 Paket	
			Pengadaan perahu fiber, P 9M, L 1, 1M, T 0,65M+ mesin tempel 15 PK	20 Unit	
			Pembebasan lahan untuk jalan	1 Paket	
			Pengadaan hend traktor	2 Unit	
			Pengadaan alat kesehatan/fasilitas kesehatan (ambulance)	1 Unit	
			Pembangunan sarana prasarana pariwisata	1 Paket	
			Pengadaan mesin las 900 watt	2 Paket	
			Pembangunan sarana prasarana rumah singgah	1 Unit	
9	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Karaupa Kecamatan Bumi Raya	Rabat beton	2 Km	
			Normalisasi anak sungai	1,5 Km	
			Penimbunan lapangan bola kaki	120 M3	
			Pembangunan tribun bola kaki	1 Paket	
			Penimbunan jalan pemukiman	2 Km	
			Pengadaan lampu jalan	43 Buah	
			Pembangunan jembatan gantung	50 Meter	
			Pembangunan tanggul bronjongh	500 Meter	
			Replanting kebun kelapa sawit plasma	72 HA	
10	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Lasampi Kecamatan Bumi Raya	Rapat beton jalan kantong produksi, jembatan dan plat deker	1 Paket	
			Pembuatan saluran (SPAL)	200 Meter	
			Pembuatan tanggul (penahan air) sungai karaupa	3,5 Km	
			Pengadaan bantuan bibit sawit	4500 Pohon	
			Pembuatan jembatan Gantung	1 Paket	
			Perbaikan Lantai Puskesdes (Keramik)	1 Paket	
11	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya	Pengaspalan jalan lambelu - pebatae	1 Km	
			Pengaspalan jalan lambelu-atananga	2 Km	
			Pengadaan tiang listrik	500 Meter	
			Pembangunan drainase dusun I-III	1500 Meter	
			Pembangunan jembatan jalan tani	28 Meter	
			Pembangunan drainase dusun IV	1500 Meter	
			Peningkatan jalan tani	2 Km	
			normalisasi sungai dusun IV	1500 Meter	
			Rehab Sedang Pustu Lambelu	1 Paket	
12	Pengembangan Infrastruktur/	Desa Pebatae Kecamatan	Pembangunan drainase dusun II lorong pasar	600 Meter	
			Pembangunan drainase dusun IV	400 Meter	

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Prasarana Kelurahan/Desa	Bumi Raya	Pembangunan drainase dusun III	400 Meter	
			Pembangunan drainase lapangan sepak bola	400 Meter	
			Pembangunan tribun lapangan sepak bola	6 x 10 Meter	
			Pembangunan Gedung Serba Guna	1 Unit	
			Pembangunan jalan lingkar lapangan sepakbola	400 Meter	
			Pembentukan jalan tani	600 Meter	
			Rehab jalan-jalan tani produksi panjang	3000 Meter	
			Pengadaan mesin paras dorong	3 Buah	
			Pengadaan mesin blower untuk kelompok tani	1 Paket	
			Pengadaan treiser untuk kelompok tani	1 Paket	
			Pengadaan mesin ketinting untuk kelompok nelayan	10 Unit	
			Pembangunan jalan tani dusun III	800 Meter	
			Lanjutan pembangunan turap sungai pala-pala lokasi dusun I dan dusun II	100 Meter	
			Penimbunan halaman pekarangan SDN PEBATAE	1 Paket	
			Penimbunan halaman pekarangan YAYASAN AL-KHAIRAT PEBATAE	1 Paket	
			Pengadaan WIFI DESA	1 Buah	
			Pembangunan drainase dusun I	400 Meter	
13	Pengembangan Infrastruktur/ Prasarana Kelurahan/Desa	Desa Atananga Kecamatan Bumi Raya	Normalisasi sungai di wilayah pemukiman	300 Meter	
			Pengerasan jalan tani	6,5 Km	
			Rabat beton jalan lingkar desa	1 Paket	
			Pengadaan jhonder dan gleser	2 Unit	
			Pembuatan tanggul	1 Paket	
			Pembangunan jembatan	1 Paket	

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali

Tabel 2.6
Analisis SWOT OPD Kecamatan Bumi Raya

No	Pencermatan Lingkungan Internal (PLI)		Pencermatan Lingkungan Ekxternal (PLE)	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
1	2	3	4	5
1	Telah ditetapkannya reggulasi berupa Peraturan Daerah yakni Perda Kabupaten Morowali Nomor 43 Tahun 2017, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Morowali	- Belum adanya Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Morowali khususnya Perda tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Morowali	- Adanya komitmen pemerintah daerah kabupaten untuk mensosialisasikan Perda tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Morowali	Kurangnya kesadaran para Aparatur untuk belajar serta memahami Tugas, Fungsinya
2	Struktur Organisasi pada OPD Kecamatan Bumi Raya telah terisi pejabat yang mendukung tugas-tugas dan fungsi Kecamatan	- Masih kurangnnya Kemampuan Aparatur dalam memahami serta mengimplementasikan tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sesuai regulasi yang ada - Masih kurangnya disiplin Aparatur dalam menjalankan Tugas-tugasnya	Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga memberikan motifasi kerja kepada Staf yang dipimpinnya	Diperlukan kemauan serta kemampuan individu yang kuat bagi para aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Sumber Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur kecamatan	- Sarana dan Prasaran yang tersedia belum memadai - Masih minimnya dukungan anggaran untuk membiayai seluruh perencanaan kegiatan	Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten untuk menggenjot sumber-sumber pendapatan asi daerah sehingga dapat menaikan anggaran APBD setiap tahunnya	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan kewajibannya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 3 tahun (2024 - 2026) yang tertuang dalam RPJM nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Morowali dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional tiga tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan RKPD dan Renja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Morowali

KECAMATAN BUMI RAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**8,488,858,328**				**6,267,407,147**
7 1	**KECAMATAN**				**8,488,858,328**	**APBD Kab**			**6,267,407,147**
7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan Bumi Raya**	**Kecamatan Bumi Raya**	**BB**	**7,010,117,027**	**APBD Kab**		**BB**	**4,862,887,530**
7 1 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**97 %**	**51,000,000**	**APBD Kab**		**98 %**	**51,000,000**
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	15,000,000	APBD Kab		1 Dokumen	15,000,000
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	6,000,000	APBD Kab		1 Dokumen	6,000,000
7 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	5,000,000	APBD Kab		1 Dokumen	5,000,000

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	5,000,000	APBD Kab		1 Dokumen	5,000,000
7 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	5,000,000	APBD Kab		1 Dokumen	5,000,000
7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	15,000,000	APBD Kab		1 Dokumen	15,000,000
7 1 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**100 %**	**3,371,240,000**	**APBD Kab**		**100 %**	**3,621,240,000**
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bumi Raya	26 Orang / bulan	3,000,000,000	APBD Kab		26 Orang / bulan	3,250,000,000
7 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	366,240,000	APBD Kab		1 Dokumen	366,240,000
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	5,000,000	APBD Kab		1 Laporan	5,000,000
7 1 1 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**97 %**	**33,000,000**	**APBD Kab**		97 %	33,000,000
7 1 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	12,500,000	APBD Kab		1 Laporan	12,500,000

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	13,000,000	APBD Kab		1 Laporan	13,000,000
7 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	7,500,000	APBD Kab		1 Laporan	7,500,000
7 1 1 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah sesuai Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**98 5**	**27,500,000**	**APBD Kab**		**99 %**	**28,500,000**
7 1 1 2.04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	12,500,000	APBD Kab		1 Laporan	12,500,000
7 1 1 2.04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kecamatan Bumi Raya	1 Dokumen	15,000,000	APBD Kab		1 Dokumen	16,000,000
7 1 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**100 %**	**90,000,000**	**APBD Kab**		**100 %**	**100,000,000**
7 1 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Bumi Raya	1 Unit	-	APBD Kab		1 Unit	5,000,000
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bumi Raya	26 Paket	40,000,000	APBD Kab		26 Paket	45,000,000
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Bumi Raya	2 Orang	25,000,000	APBD Kab		2 Orang	30,000,000
7 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Bumi Raya	1 Orang	25,000,000	APBD Kab		1 Orang	20,000,000

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**95 %**	**450,000,000**	**APBD Kab**		**97 %**	**413,000,000**
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	1 Paket	4,000,000	APBD Kab		1 Paket	5,000,000
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	7 Paket	120,000,000	APBD Kab		8 Paket	78,000,000
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	1 Paket	50,000,000	APBD Kab		1 Paket	50,000,000
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	10 Paket	46,000,000	APBD Kab		10 Paket	47,000,000
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	12 Paket	20,000,000	APBD Kab		12 Paket	21,000,000
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	70,000,000	APBD Kab		1 Laporan	70,000,000
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bumi Raya	250 Laporan	140,000,000	APBD Kab		260 Laporan	142,000,000
7 1 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**95 %**	**2,858,857,027**	**APBD Kab**		**96 %**	**455,487,530**
7 1 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	1 Unit	35,000,000	APBD Kab		1 Unit	35,000,000

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	2 Unit	13,000,000	APBD Kab		3 Unit	15,000,000
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	2 Unit	20,000,000	APBD Kab		2 Unit	25,000,000
7 1 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	1 Unit	2,773,357,027	APBD Kab		1 Unit	380,487,530
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	1 Unit	17,500,000	APBD Kab			
7 1 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**95 %**	**78,520,000**	**APBD Kab**		**96 %**	**80,660,000**
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Bumi Raya**	1 Laporan	12,000,000	APBD Kab		1 Laporan	13,000,000
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bumi Raya	12 Laporan	21,520,000	APBD Kab		12 Laporan	22,660,000
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Kecamatan Bumi Raya**	1 Laporan	20,000,000	APBD Kab		1 Laporan	20,000,000
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Kecamatan Bumi Raya**	1 Laporan	25,000,000	APBD Kab		1 Laporan	25,000,000
7 1 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bumi Raya**	**98 %**	**50,000,000**	**APBD Kab**		**99 %**	**80,000,000**

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Bumi Raya	4 Unit	25,000,000	APBD Kab		5 Unit	25,000,000
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bumi Raya	4 Unit	10,000,000	APBD Kab		5 Unit	15,000,000
7 1 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Bumi Raya	10 Unit	5,000,000	APBD Kab		10 Unit	5,000,000
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Bumi Raya	2 Unit	10,000,000	APBD Kab		2 Unit	10,000,000
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bumi Raya		-	APBD Kab		1 Unit	25,000,000
7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase urusan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**97 %**	**301,500,000**	**APBD Kab**		97 %	302,500,000
7 1 2 2.04	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di koordinasikan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**97 %**	**175,000,000**	**APBD Kab**		**97 %**	**175,000,000**
7 1 2 2.04 3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bumi Raya	29 Laporan	175,000,000	APBD Kab		29 Laporan	175,000,000

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 2 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Bumi Raya**	**97 %**	**126,500,000**	**APBD Kab**		**97 %**	**127,500,000**
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Bumi Raya**	29 Dokumen	126,500,000	APBD Kab		29 Dokumen	127,500,000
7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase aPBDes/APBD Kelurahan terhadap kegiatan pemberdayaan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**70 %**	**775,800,374**	**APBD Kab**		75 %	775,628,095
7 1 3 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persenase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Bumi Raya**	**95 %**	**775,800,374**	**APBD Kab**		**97 %**	**775,628,095**
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bumi Raya	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,800,374	APBD Kab		10 Lembaga Kemasyarakatan	125,628,095
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bumi Raya	10 Laporan	650,000,000	APBD Kab		10 Laporan	650,000,000
7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kasus K3 di kecamatan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**2 %**	**44,915,509**	**APBD Kab**		2 %	35,609,247
7 1 4 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Kasus K3 tertangani di kecamatan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**2 %**	**44,915,509**	**APBD Kab**		**2 %**	**35,609,247**

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 4 2.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	18,540,000	APBD Kab		1 Laporan	8,540,000
7 1 4 2.01 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bumi Raya	1 Laporan	26,375,509	APBD Kab		1 Laporan	27,069,247
7 1 5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**Kecamatan Bumi Raya**	**97 %**	**150,239,817**	**APBD Kab**		99 %	158,622,982
7 1 5 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase urusan pemerntahan umum sesuai penugasan**	**Kecamatan Bumi Raya**	**97 %**	**150,239,817**	**APBD Kab**		**99 %**	**158,622,982**
7 1 5 2.01 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bumi Raya	60 Orang	150,239,817	APBD Kab		65 Orang	158,622,982
7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa/kelurahan tertib administrasi**	**Kecamatan Bumi Raya**	**98 %**	**206,285,601**	**APBD Kab**		99 %	132,159,293
7 1 6 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**	**Kecamatan Bumi Raya**	**98 %**	**206,285,601**	**APBD Kab**		**99 %**	**132,159,293**

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bumi Raya	13 Dokumen	35,285,601	APBD Kab		13 Dokumen	24,659,293
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bumi Raya	13 Dokumen	40,000,000	APBD Kab		13 Dokumen	45,000,000
7 1 6 2.01 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Bumi Raya	13 Dokumen	25,000,000	APBD Kab		13 Dokumen	12,500,000
7 1 6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bumi Raya	13 Dokumen	60,000,000	APBD Kab			
7 1 6 2.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bumi Raya	13 Dokumen	46,000,000	APBD Kab		13 Dokumen	50,000,000

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran ini maka PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis ini juga akan tercapai. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan PD Kecamatan Bumi Raya yang akan dicapai untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan
   1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan PD Kecamatan Bumi Raya.
   2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif di Lingkungan PD Kecamatan Bumi Raya.
   3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa di Kecamatan Bumi Raya.

b. Sasaran
   1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan PD Kecamatan Bumi Raya.
   2. Meningkatnya Kapabilitas professional Aparat di Lingkungan PD Kecamatan Bumi Raya.
   3. Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintah di Lingkungan PD Kecamatan Bumi Raya.
   4. Meningkatnya pelayanan Publik yang cepat dan Prima di Lingkungan PD Kecamatan Bumi Raya
   5. Meningkatkan pembinaan agama di Wilayah Kecamatan Bumi Raya

3.3 Program dan Kegiatan

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
  - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
  - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerint ahan dan Pelayana n Publik Kecamatan Bumi Raya.	1. Meningkatnya pelayanan terpadu	1. Persentase Pelayanan terpadu yang dilaksanakan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali merupakan program prioritas Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap tahun anggaran. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali pada Tahun 2022 dapat dilihat tabel exel Sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**8,488,858,328**
7 1	**KECAMATAN**	**8,488,858,328**
7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7,010,117,027**
7 1 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51,000,000**
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,000,000
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,000,000
7 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,000,000
7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,000,000
7 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5,000,000
7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000
7 1 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3,371,240,000**
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,000,000,000
7 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366,240,000
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000
7 1 1 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**33,000,000**
7 1 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12,500,000
7 1 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,000,000
7 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,000
7 1 1 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**27,500,000**
7 1 1 2.04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	12,500,000
7 1 1 2.04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15,000,000
7 1 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90,000,000**
7 1 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000
7 1 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000
7 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25,000,000
7 1 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**450,000,000**
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,000,000
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,000,000
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70,000,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,000,000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2,858,857,027**
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	13,000,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,773,357,027
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	17,500,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78,520,000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,520,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25,000,000
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50,000,000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	5,000,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**301,500,000**
7	**1**	**2**	**2.04**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**175,000,000**
7	1	2	2.04	3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	175,000,000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**126,500,000**
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	126,500,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**775,800,374**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**775,800,374**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	125,800,374
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	650,000,000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**44,915,509**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**44,915,509**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18,540,000
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	26,375,509
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**150,239,817**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**150,239,817**
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150,239,817
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**206,285,601**
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**206,285,601**
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35,285,601
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40,000,000

RENCANA KERJA KECAMATAN BUMI RAYA TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
7 1 6 2.01 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	25,000,000
7 1 6 2.01 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	60,000,000
7 1 6 2.01 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	46,000,000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pelaksanaan RPD, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya Tahun 2024 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2024 – 2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024 – 2026. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2024 – 2026 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2024.

Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya Tahun 2024 maka Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2024 – 2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renja Tahun 2024.

Bahonsuai, 23 Maret 2023

Camat Bumi Raya

ARMIN, S.E
Pembina, IV/a
NIP. 19720405 200801 1 015

RENJA KECAMATAN WITA PONDA

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Wita Ponda Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1(satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Wita Ponda Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Wita Ponda selanjutnya disebut Renja OPD Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2025 dan Renstra OPD Kecamatan Wita Ponda Tahun 2024-2026.

Untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan

perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja OPD Kecamatan Wita Ponda.

Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
39. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Wita Ponda yaitu :

1. Sebagai arah dan pedoman taktis dan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran.

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan.

Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Wita Ponda yaitu: adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai bagian:
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menguraikan bagian:
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN menguraikan bagian:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3 Program dan Kegiatan..

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan bagian:

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah "Kecamatan Wita Ponda".

BAB V PENUTUP, memberikan penjelasan secara ringkas mengenai pelaksanaan, kecukupan anggaran atau tidak, kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, dan informasi nama perangkat daerah dan pengesahan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang dimaksud.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA OPD KECAMATAN WITA PONDA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Wita Ponda Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Wita Ponda Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2024. Pada tahun 2024 OPD Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun anggaran tahun 2024 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar ***Rp. 5.670.867.767,-***

Dengan rincian program dan kegiatan diuraikan dalam Berukut :

1. ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.039.970.301
b) Administrasi Pendapatan Dearah Kewenangan Perangakat Daerah Rp. 17.280.000
c) kegiatan Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 271.380.841
d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 2.299.943.025
e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Sebesar Rp. 22.793.600
f) Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Sebesar Rp. 19.500.000

2. Program peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat Kecamatan Sebesar Rp. 232.492.697
b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Sebesar Rp. 507.344.900

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 63.022.500

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wita Ponda

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Wita Ponda

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Wita Ponda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Wita Ponda Kab. Morowali sebagai berikut.

1. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hokum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya

terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut seringkali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Disamping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Wita Ponda Kab. Morowali. Keberadaan sumber daya OPD Kecamatan Wita Ponda Kab.Morowali yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap OPD KecamatanWita Ponda Kab.Morowali :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Wita Ponda

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). Menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, OPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa

kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD Kecamatan Wita Ponda Tahun 2024–2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra OPD Kecamatan Wita Ponda Tahun 2024– 2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Penelahaan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Wita Ponda yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

DAFTAR PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
7	01	01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	Rp2.636.122.538,83	Rp. 5.670.867.767
7	01	02	***Program peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	Rp. 639.905.728,64	Rp. 830.837.597
7	01	06	***Program Pembinaandan***	-	Rp. 63.022.500

			PengawasanPemerintah Desa		
		JUMLAH		Rp. 3.276.028.267,47	Rp. 6.564.727.864

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 200..-20....dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN,yaitu: RPJMN pertama tahun 200...-200..,RPJMN kedua tahun 201..-201..,RPJMN ketiga Tahun 201..-201.., dan RPJMN keempat tahun 2025-2024. RKP 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN ketiga. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuangan dalam RKP 2021 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tema RKP Tahun 2017 adalah **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.** Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada RKPD Tahun 2025 adalah **"Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Kawasan StrategisTahun 2025".**

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka OPD Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Morowali secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Wita Ponda Morowali Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wita Ponda tahun 2025 adalah implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Wita Ponda merupakan salah satu Perangkat Daerah Wita Ponda (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Wita Ponda sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Wita Ponda diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Wita Ponda merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupti terpilih nantinya.

- Pemberantasan Kemiskinan

  Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

  Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Wita Ponda. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Wita Ponda. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun anggaran 2025 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan

pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

  Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Wita Ponda diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah

Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Wita Ponda merupakan sebuah wilayah yang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Wita Ponda. Potensi itu terutama terkait dengan Pertanian, Perkebunan dan Pertambangan. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Wita Ponda melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan, Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Wita Ponda Tahun 2025 adalah 6 Program dengan berbagai Kegiatan.

b) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan, Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Wita Ponda sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Wita Ponda dan melingkupi semua Desa.

c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan Rp. 4.897.127.637,98

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wita Ponda Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ***2024-2026*** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Wita Ponda Tahun 2019-2023. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari RPD yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Renja OPD Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Wita Ponda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran OPD Kecamatan Wita Ponda kabupaten Morowali.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh parapimpinan dan seluruh staf OPD Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali

Morowali, 03 Juli 2024

Camat Wita Ponda



NASRON, S.Sos

Nip. 19700310 199103 1 009

RENCANA KERJA (RENJA)

INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN

2024

KECAMATAN BUNGKU TIMUR

KABUPATEN MOROWALI

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka penyusunan Laporan "RENCANA KERJA" Kecamatan Bungku Timur dapat diselesaikan yang merupakan gambaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam satu tahun.

Rencana kerja merupakan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kecamatan Bungku Timur yang dibuat setiap tahun berjalan, mengacu pada periode RPJMD Kabupaten Morowali.

Penyusun Menyadari bahwa Rencana Kerja ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sumbang dan saran dari pihak untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terimakasih.

Kolonodale, Maret 2023

SUKMAN GAMAL, SP

NIP. 197407032006041031

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud Dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2022 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 14

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 21

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 22

3.3 Program dan Kegiatan 22

BAB IV RENCANA KERTJA DAN PENDANAAN 25

BAB V RENCANA KERTJA DAN PENDANAAN 31

Kolono, Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN

SUKMAN GAMAL, SP

Pembina

NIP. 197107032006041031

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi (Renja) adalah dokumen Perencanaan Organisasi untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi (Renja) Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang berisi Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali merupakan implementasi dari Visi dan Misi Strategis (Renstra) Kecamatan Bungku Timur 2021-2023 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali ini diharapkan dapat terakomodasi dalam penetapan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2024, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk mencapai sasaranyang telah ditetapkan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

Dipindai dengan CamScanner

dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

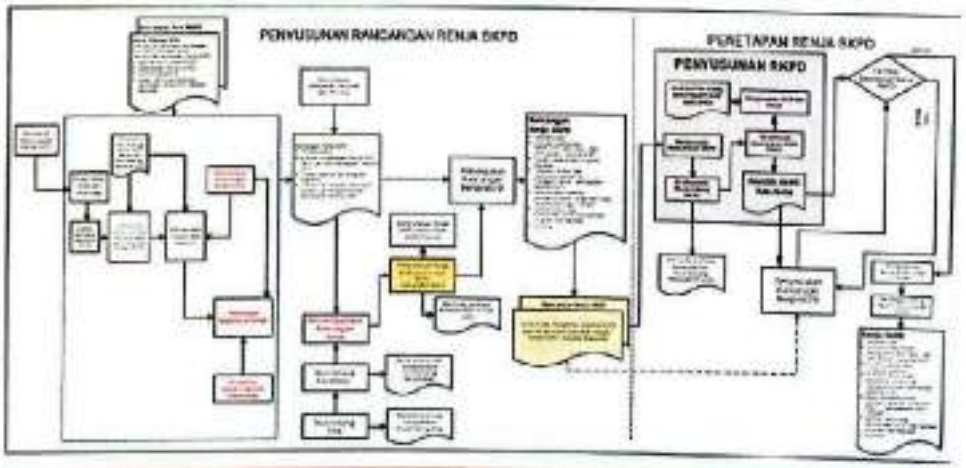
Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan PerangkatDaerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritasPERANGKAT DAERAHpada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting,Evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

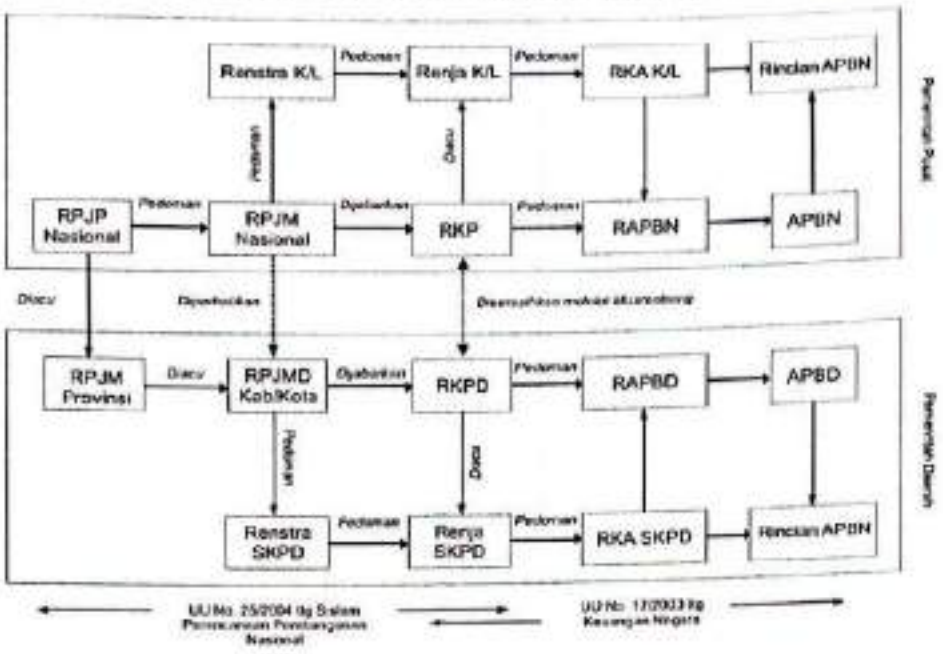
   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan PD;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
   - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran;
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   - Perumusan kegiatan prioritas;
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
   - Penyempurnaan rancangan kerja PD;
   - Pembahasan forum PD; dan
   - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja.

Dipindai dengan CamScanner

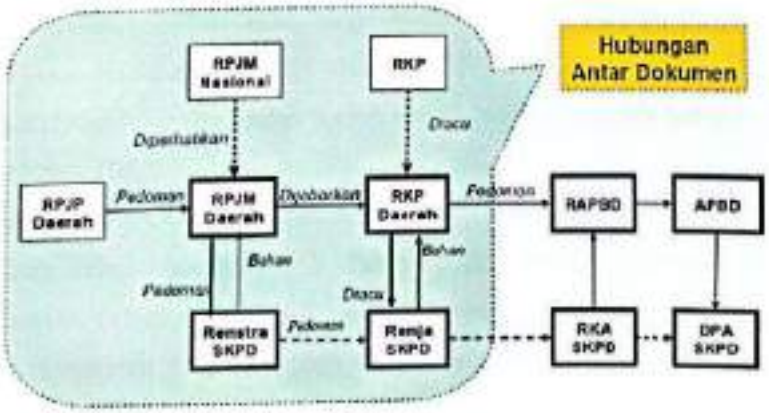
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Bupati Morowali nomor 36 tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra PD 2024-2026.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja PD ini adalah untuk memasukkan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan pada Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023;

Bab III : Tujuan dan Sasaran PD

Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab IV : Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2022

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, maka perlu adanya gambaran mengenai Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Turunan Renja PD Tahun 2022 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan Kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Bungku Timur untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Rasio realisasi
1	Gaji dan Tunjangan PNS	Rp. 1.631.380.479,-	Rp. 1.576.898.991,-	96 %
2	Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 545.795.335	Rp. 545.795.335	100 %

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2022 terdiri atas Program dan Kegiatan dengan Realisasi Anggaran masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Belanja Langsung	pagu	Realisasi	presentase
1	Belanja operasional	Rp. 605.956.030,-	Rp. 586. 772.030,-	96 %

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.

Kajian terhadap Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Bungku Timur dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026.

Dibawah ini disajikan tabel nalisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut

Dipindai dengan CamScanner

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUNGKU TIMUR

NO	PROG/KEG/SUB KEG	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018 (N-2)	TAHUN 2019 (N-1)	TAHUN 2020 (N)	INDIKATOR	TAHUN 2021(N + 1)	THN 2018 THN (N-2)	THN 2019 THN (N-1)	THN 2020 (N)	THN 2021(N + 1)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						**NILAI SAKIP**						
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-		Ketepatan waktu perecanaan						
01.	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perencanaan Renja SKPD			100	100	100	Jumlah Dokumen Perencanan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	2	95.29 %	93.44%	91.57%	100%	
02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			19	19	16	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	1					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD			100	100	100	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (Kegiatan)	1	69.86%	96.29	99.39%	100%	
01	Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah			100	100	100	Jumlah Koordinasi & Penyusunan capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi	2	65.12%	94.92%	99.58%	100%	

Dipindai dengan CamScanner

02	Koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja			100	100	100	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2	81.41%	100		100%		
05	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			13	13	15	Presentase capaian keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	91.67%	100%	92.99%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100	100		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17		100%		97.96%		
05	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100	100		Jumlah Pjumlah Honor Staf Teknis Admistrasi Kegiatan	16	58.18%	100%	99.20%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100	100		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (LAKIP, SAKIP LPPD dan LPKJ)	10	99.98%	100%	100%			
05.	Pengelolaan & Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan						Jumlah Pengelolaan bahan Tanggapan	1	54.88%	100%	"100%			
07	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulnan/Triwulan/semesteran			100	100		Jumlah Koordinasi & Penyusunan laporan Keuangan	12	63.66%	91.07%	99.30%			
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100	100		Presentase ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			91.06%				
01.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD						Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			99.88%	98.46%			
02.	***Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			100	100		***Presentase 'Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	98.70%		100%	98.12%			
09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1	1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			99.51%	98.64%			
11.	Bimbingan Teknik inplementasi Per aturan per Undang"ngan						Bimbingan Teknik Inplementasi Per aturan per Undang"ngan							

Dipindai dengan CamScanner

	Pengadaan Pakaian Hari" tertentu						Pengadaan Pakaian Hari" tertentu						
01	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***						***presentase cakupan keg Administrasi Umum Perangkat Daerah***						
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29					
04	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***						***Cakupan ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	2					
05	*Kendaraan Dinas Roda 4*						*Jumlah 'Kendaraan Dinas Roda 4*						
08	pengadaan sarana & prasarana gedung kantor & bangunan laiannnya						Jumlah pengadaan sarana & prasarana gedung kantor & bangunan laiannnya						
	Penyediaan jasa peralatan & Perlengkapan kantor dan mesin lalinya						Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
01.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***						***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***						

Dipindai dengan CamScanner

05.	*Pemeliharaan?rehabilitasi gedung kantor*						*Jumlah 'Pemeliharaan?rehabilitasi gedung kantor*										
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah 'Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional										
11.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**	100									
	Peningkatan Efektifitas Keglatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan						***Cakupan kegPeningkatan Efektifitas Keglatan Pemberdayaan Mesyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan***										
01.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**PRESENTASE KEGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2									
02.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Presentase keg pemberdayaan masyarakat pada APBD kel danAPBDES										
03.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**PRESENTASE KEG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										
04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																

Dipindai dengan CamScanner

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
01.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**													
09.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							100						

Dipindai dengan CamScanner

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Terdapatpermasalahan/kendalaatauisu-isuyangharusmendapatkan penanganan.Isu tersebutantara lain :

1. Sekretariat Kecamatan
   a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasukjuga aparatur di Desa dan Kelurahan;
   b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun ;
   c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah ;
   c. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah ;
   d. Fasilitasi Program dan Kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD,DD, P3BK) ;
   e. Pembinaan bidang Pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
3. Seksi Ekonomi Pembangunan
   a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah ;
   b. Minimnya dukungan Anggaran pemberdayaan masyarakat ;
   c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;
   d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan ;

Dipindai dengan CamScanner

e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;

b. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguranb;

c. Data intervensi kemiskinanbelum terpadu ;

d. Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan layak Anak (KLA) dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PATP2A) ;

e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program Kesejahteraan Sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH,BLSM,dll) ;

g. Penyusunan data base dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

h. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantrenyangada.

5. Seksi Pendapatan

a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB ;

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus

dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan Aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dengan mengirim diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan,Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa/kelurahan dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar PD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner

10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan Program/Kegiatan/Sub.kKgiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan,baik dari kelompok masyarakat desa,BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan Bungku Barat terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Daftar rencana kegiatan prioritas kecamatan Bungku Timur tahun 2024 bisa dilihat di dalam Tabel T.C-32.

Tabel T-C.32.

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN MOROWALI

Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan Infrastruktur/Prasarana Kelurahan/Desa	Kantor Camat	Pembangunan Gedung serbaguna Kantor Camat	1 Unit	
2			Pagar tembok halaman kantor camat	300 M	

Dipindai dengan CamScanner

3			Paving Blok halaman kantor		
4			Penambahan parkiran	72 M	
5			Pemeliharaan Rumah Ibadah (Musholah) Kantor Camat	1 Unit	
6			Timbunan	50 Ret	
7			Papan Nama Kantor Camat Bungku Timur		
8			Kendaraan Dinsa Roda empat (4)	1 Unit	
A	Sarana & Prasarana	Desa Lahuafu			
1.			Pembangunan Jaringan Air Bersih	5 Km	
1.			Peningkatan /penimbunan jalan Lingkungan	1 Km	
3			Pemecah Ombak /Batu Gajah	150 m	
4			Rehab Total SD Lahuafu	3 Lokal	
5			Rehab ruang wc SDN Lahuafu	2 Lokal	
6.			Rehab ruang wc SMP N 2 Lahuafu	7 Lokal	
7.			Pembangunan Lanjutan Perpustakaan SMPN2 Bungku Timur	1 Lokal	
8.			Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah SMPN 2 Bungku Timur	1 Unit	
9.			Rehab Rumah Dinas Guru SMP N 2 Bungku Timur	1 Unit	
10.			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	20 Unit	
B	Sarana & Prasarana	Desa Unsongi			
1.			Rehap dan Batu Gajah Dusun I dan Dusun II		
2.			Taluk Sungai Tempat Wisata		
3.			Taluk Pangempa (Sambungan)		
4.			Bronjong Pekuburan Kiri Kanan		
5.			Abrasi Pantai		
6.			Tambatan Perahu		
7.			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	50 Unit	
8.			Penimbunan Halaman Sekolah SDN	P. 35 M L. 20 M	
9.			Pagar Sekolah SDN	150 M	
10.			Pengadaan Lemari Kantor SDN	2 Buah	
11.			Pengadaan Lemari Kelas SDN	6 Buah	
12.			Paping Blok Halaman Sekolah SDN	P. 30 M L. 20 M	
13.			Buku - Buku Perpustakaan dan Buku Kegiatan anak TK/PAUD		

Dipindai dengan CamScanner

14			Alat Musik Drum Band Mini TK	1 Paket	
15			Alat Samra Mini	1 Paket	
C.	Sarana & prasarana	Desa Nomito			
1.			Peningkatan Produksi (Aspal)	3 km	
2.			Pembangunan Tanggul Penahan Tanah 150 M	150 M	
3.			Pembangunan Gedung PAUD KB	1 Unit	
4.			Pembangunan Gedung PAUD / TK	1 Unit	
5.			Pembangunan Gedung WC PAUD / TK	1 Unit	
6.			Pembangunan Gedung WC PAUD KB	1 Unit	
7.			Lanjutan Pembangunan PUSTU	1 Unit	
9.			Pembangunan Gedung Posyandu	1 Unit	
10.			Tambatan Perahu 50 M	1 Paket	
11.			Lapangan Olahraga	1 Paket	
12.			Pembangunan Pasar	1 Paket	
13.			Peningkatan Usaha Jin Tani	1 Paket	
14.			Pengadaan Mobiler SD	1 Paket	
15.			Pengadaan Baju Muslim SD (136 Pcs)	1 Paket	
16.			Pengadaan Motor Pengangkut Sampah	1 Unit	
17.			Drum Tempat Sampah untuk Rumah Tangga	276 Unit	
D.	Sarana & Prasarana	DESA LAROUE			
1.			Rehab total Polindes	1 Unit	
2.			Gedung Serbaguna	1 Unit	
3.			Batu gajah penahan ombak	150 M	
4.			Pengadaan bantuan mesin pemotong	20 Unit	
5.			Talud dibelakang SD	300 M	
6.			Pembangunan Pos Jaga/Pos Piket SATAP	1 Unit	
7.			Pembangunan Jalan Lingkungan	1500 M	
8.			Pagar TK	200 M	
9.			Eleiton	1 Unit	
10.			Pengadaan Perahu Fiber	10 Unit	
E.	Sarana & Prasarana	Desa Kolono			
1.			Pembangunan Pagar Tembok Sekolah	1 paket	

Dipindai dengan CamScanner

2			Pembangunan Pagar Tembok Sekolah	60 meter	
3.			Pengadaan Peralatan Drum Band	1 paket	
4.			Sambungan Pembangunan Pagar Tembok Sekolah	50 meter	
5.			Insentif untuk Tenaga Pengajar	1 paket	
6.			Pengadaan Mobiler MI	1 paket	
7.			Pengadaan WC/Toilet	1 paket	
8.			Pengadaan Musholla	1 paket	
9.			Pengadaan Gajebo	1 paket	
10			Pengadaan Meja dan Kursi Lipat	1 paket	
F	Sarana & Prasarana	Desa Ululere			
1.			Pembangunan Irigasiu & Saluran Pembuangan	500 M	
2.			Pembangunan Tribun	1 Unit	
3.			Sarana & Prasarana Inovasi desa /pembangunan tempat wisata	1 Unit	
4.			Pengadaan panel Surya	20 Unit	
5.			Peng aspalan	2 km	
6.			Pengadaan Bibit Ternak sapi	20 Ekor	
7.			Pembangunan Jembatan lofilanggro	1 Unit	
8.			Pengadaan Bibit Durian	100 Pohon	
9.			Tiang listrik	6 Tiang	
10			Pengadaan Tiang & kawat Duri pagar pemakaman	500 M	
11			Lampu Jalan	16 Titik	
12			Pembangunan jalan tani su,her rezeki	500 M	
13			Pembangunan Gedung Paud	1 Paket	
14			Pembangunan pagar SDN Ululere	300 M	
G	Sarana & Prasarana	Desa Bahomoahi			
1			Pengaspalan Jalan	1500 M	
2			Jembatan Jalan Poros Desa	30 x 9 M	
3			Sarana & sarana Bahobeach	1 Paket	
4			Plat deker poros desa	4 x 9 M	
5			Drainase Jalan Desa	2000 M	
5			Talud	2000 M	
6			Lampu Jalan	30 Tiang	
7			Gedung Sekolah SDN	4 Kelas	
8			Pagar sekolah SDN	400 M	

Dipindai dengan CamScanner

9			Irigasi Air dalam	50 M	1 paket
10			Pembangunan Jalan Usaha Tani	2000 M	
11			Rabat beton jalan lingkungan	2000 M	
12			Bibit Sapi	30 ekor	
13			Rompong	5 Paket	
II.	Sarana & Prasarana	Desa Bahomotefe			
			Pembuatan Drainase di Lapangan	400 M	
			Pembuatan Talud Arah Lapangan	2800 M	
			Garming GPS	20 Unit	
			Panel Tenga Surya	10 Paket	
			Peng aspalan jalan pemukiman RT 6	2,8 Km	
			Bibit Sapi	30 Ekor	
			Batu gajah (pemecah Ombak)	4000 M	
			Normalisasi	1500 M	
			Jalan Jalur Evakuasi	1 Km	
			Peningkatan jalan Lingkungan	700 Km	
I.	Sarana & Prasarana	Desa Onepute Jaya			
			Drainase Belakang SD 1 Oneputejaya	150 M	
			Penambahan Ruang Kelas & Perlengkapan Belajar	1 Paket	
			Pagar Belakang Sekolah	200 M	
			Pagar sekolah SD Onepute 2	200 M	
			Jembatan penghubung OPJ 1 & OPJ 2	1 Paket	
			Peng aspalan Jalan	2,5 Km	

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Bungku Barat telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungku Timur Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Bungku Timur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2024, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses tekno kratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat schingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagimasyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan Daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Tahun 2024, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Dipindai dengan CamScanner

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis *(strategisgoal)*organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Bungku Timur adalah :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi.
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan Dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi.
3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan Dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana

Dipindai dengan CamScanner

kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Bungku Timur dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

01.2.01. Perencanaan, Penaganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

04. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat daerah

01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

01.Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN

02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD.

01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

05.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasiSKPD.

01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Lainnya.

01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

01.Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

02.Penyediaan jasa Komunikasi,SumberDaya Airdan Listrik.

03. Penyediaan jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor.

01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

10.Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat (4) & Roda Dua (2).

02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

02.203. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

03.201. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

01.Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

03. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

04. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

06.201. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

01. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

17. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Kecamatan Bungku Timur merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bungku Timur ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Bungku Timur. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bungku Timur.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bungku Timur Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner

TABEL T-C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN MAJU 2025

KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI

KODE					Program/ Keg / Sub Keg.	Indikator Kinerja Program/ Keg / Sub Keg.	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
								Target	Rp	Target	Rp
Bungku Timur											
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**NILAI SAKIP**	%	100	*5.832.172.301,00*		5.265.172.375,00
7	*1*	*1*	*2.01*		*Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan serta Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah*	*Dok.*	*10*	*12.800.000,00*	*10*	*15.750.000,00*
7	1	1	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perencanaan Renja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Renja SKPD	Dok.	2	3.000.000,00	2	3.750.000,00
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok.	2	3.600.000,00	2	4.500.000,00
7	1	1	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (Kegiatan)	Dok.	2	2.000.000,00	2	2.500.000,00
					Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	laporan	2	2.200.000,00	2	2.500.000,00
7	1	1	2.01	06	Koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja	Imlh Koordinasi & Penyusunan lporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi	laporan	2	2.000.000,00	2	2.500.000,00

Dipindai dengan CamScanner

7	*1*	*1*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Presentase Capaian Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			*2.071.980.000,00*		*2.129.250.000,00*
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.700.000.000,00	14	1.750.000.000,00
7	1	1	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pjumlah Honor Staf Teknis Admistrasi Kegiatan	Bulan	12	363.480.000,00	12	370.000.000,00
7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (LAKIP, SAKIP LPPD dan LPKJ)	Dok	1	3.200.000,00	1	3.500.000,00
7	1	1	2.02	06	Pengelolaan & Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan	Jmlh dok Bahan tanggapan pemeriksaan& tindak lanjut pemeriksaan	Dok	1	1.800.000,00	1	2.250.000,00
7	1	1	2.02	07	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulnan/Triwulan/semesteran	Jmlh keg Deks Laporan realisasi keuangan (Tepra)	laporan	12	3.500.000,00	12	3.500.000,00
7	*1*	*1*	*2.03*		*Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	*Presentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tertib*			*2.300.000,00*		*2.875.000,00*
7	1	1	2.03	05	Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keg	1	2.300.000,00	1	2.875.000,00
7	*1*	*1*			Adminitrasi Pendapatan Perangkat Daerah	Rasio PAD					
					Pelaporan pengelolaan Retribusi Pajak Reklame	Jumlah 'Pelaporan pengelolaan Retribusi Pajak Reklame	laporan	13	35.820.000,00		35.820.000,00
7	*1*	*1*	*2.05*		***Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Presentase Adminstrasi Kepegawaian yang tertib***			*130.000.000,00*		*167.500.000,00*
7	1	1	2.05	09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Megikuti PIM	Org	3	90.000.000,00		112.500.000,00

Dipindai dengan CamScanner

	1	1	2.05		Bimbingan Teknik inplementasi Per aturan per Undang"ngan	Jmlh Bimtek yang dilaksankan	Org.	4	20.000.000,00		25.000.000,00
	1	1	2.05		Pengadaan Pakaian Hari" tertentu	Jmlh Pakaian Dinas yang tersedia	Paket	35	20.000.000,00		30.000.000,00
7	*1*	*1*	*2.06*		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Presentase capaian kegiatan Administrasi Umum***			***239.092.301,00***		***298.865.375,00***
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	5	50.000.000,00	2	62.500.000,00
7	1	1	02:06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kontor (ATK dan Makan Minum)	Tahun	1	65.092.301,00	1	81.365.376,00
7	1	1	2.06	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Tahun	1	124.000.000,00	1	155.000.000,00
7	*1*	*1*	*2.07*		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Presentase Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah***			***1.770.000.000,00***		***812.500.000,00***
7	1	1	2.07		*Kendaraan Dinas Roda 4*	*Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia*	unit	1	*400.000.000,00*		*350.000.000,00*
7	1	1	2.07	11.	pengadaan sarana & prasarana gedung kantor & bangunan lalannnya	Jumlah pengadaan sarana & prasarana gedung kantor & bangunan lalannnya	Paket	5	1.370.000.000,00	1	400.000.000,00
7	*1*	*1*	*2.08*		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***30.000.000,00***		***34.500.000,00***
		1	2.06	01	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	30.000.000,00	12	34.500.000,00

Dipindai dengan CamScanner

7	*1*	*1*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*			*127.000.000,00*		*156.875.000,00*
7	1	1	2.09		*Pemelihaaan?rehabilitasi gedung kantor*	*Jmlh Rumah ibadah yng akan di rehab*	*Unit*	*1*	*100.000.000,00*	*1*	*100.000.000,00*
7	1	1	2.09	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua /Roda Empat	unit	5	27.000.000,00	5	27.000.000,00
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan**			**700.000.000,00**		**805.000.000,00**
7	*1*	*2*	*2.01*	*02.*	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah di Tingkat Kecamatan*	*Jmlh Kegiatan peningktana Efektifitas keg pemerintahan di tingkat Kecamatan*	*Keg.*	*5*	*700.000.000,00*	*5*	*805.000.000,00*
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**%tase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa**			**97.180.000,00**		**117.157.000,00**
7	1	3	2.01	01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa	Desa	10	54.000.000,00	10	67.500.000,00
					Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	Keg.	4	43.180.000,00		49.657.000,00
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN**			**606.200.000,00**		**697.750.000,00**
7	1	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jmlh pembinaan kerukunan antar suku & intra suku umat beragama ras dan golongan (MTQ)	Keg.	1	600.000.000,00	1	690.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

7	1	5	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya forum pimpinan di Keamatan	Keg.	10	6.200.000,00		7.750.000,00
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN**			**45.620.000,00**		**57.025.000,00**
7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keg.	2	45.620.000,00	2	50.000.000,00
JUMLAH											**4.333.015.375,00**

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)
TAHUN 2024

KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
KABUPATEN MOROWALI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Tanjung Harapan, 3 Juli 2024

CAMAT MENUI KEPULAUAN

SUAIB AMJA, S.Pt.,M.Si
Pembina Tkt I, IV/b
Nip. 19750619 200312 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **Ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sombori Kepulauan Pada Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Sombori Kepulauan 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sombori Kepulauan 7

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 7

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 8

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 19

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 24

BAB V PENUTUP **41**

DAFTAR TABEL

NO.	NAMA TABEL	HAL.
2.4.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	9
3.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	20
3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	20
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sombori Kepulauan	24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen perencanaan yang hendak dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan ini indikator kinerja, atau program dan kegiatan serta pendanaannya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sombori Kepulauan Tahun 2024 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja Kecamatan Sombori Kepulauan ini dilakukan dengan melibatkan aparatur Kecamatan Sombori Kepulauan guna memperoleh masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. Tahapan penyusunan Renja Kecamatan Sombori Kepulauan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam membuat RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada visi misi Bupati Morowali, RPJMD, rancangan awal RKPD, Renstra Kecamatan Menui Kepulauan Tahun 2018 – 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatab Sombori Kepulauan Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintrah Daerah tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisaasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0247);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 26 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 01);
25. Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023.
26. RENSTRA Kecamatan Sombori Kepulauan Periode 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2023 adalah untuk memperoleh gambaran target kinerja program dan kegiatan Kecamatan Sombori Kepulauan Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
3. Sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
4. Sebagai bahan evaluasi tolak ukur kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2023 yang merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sombori Kepulauan Pada Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sombori Kepulauan

Kecamatan Sombori Kepulauan di mekarkan padatahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 01). Olehnya itu hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya belum ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sombori Kepulauan

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali sesuai dengan RENSTRA KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :
   - Bahwa kecamatan Sombori Kepulauan yang baru dimekarkan menjadi kesempatan untuk membangun dan membentuk kualitas dan karakter aparatur yang kompenten dan kompetitif. ungsinya.

b. Faktor Penghambat :
   - Belum memadainya kualitas aparatur yang memiliki kompentensi.
   - Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sombori Kepulauan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sombori Kepulauan Kabuapten Morowali tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali secara keseluruhan harus dibenahi. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan

diperkirakan akan berjalan lambat walaupun di tahun 2018 menunjukkan progres yang menggembirakan.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Morowali

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN				**5.692.352.644,00**	**KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN**				**5.692.352.644,00**	**5.692.352.644,00**
	UNSUR KEWILAYAHAN				**5.692.352.644,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**5.692.352.644,00**	
	KECAMATAN				**5.692.352.644,00**	**KECAMATAN**				**5.692.352.644,00**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**		**100 %**	**4.324.201.037,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**		**100 %**	**4.324.201.037,00**	Masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi terutama pemenuhan sara dan prasarana Kantor dan Rumah Jabatan 2. Masih Kurangnya Kapasitas Sumber daya Manusia sehingga perlu peningkatan kapasitanya
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		90 %	24.964.362,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		90 %	24.964.362,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.264.362,00		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.264.362,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.900.000,00		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.900.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.900.000,00		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.900.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.900.000,00		*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.900.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)*		97 %	568.523.865,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)*		97 %	568.523.865,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/bulan	277.267.632,00		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/bulan	277.267.632,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	251.760.000,00		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	251.760.000,00	
	NON URUSAN				**5.692.352.644,00**	**NON URUSAN**				**5.692.352.644,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				**5.692.352.644,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**5.692.352.644,00**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
	UNSUR KEWILAYAHAN				**5.692.352.644,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**5.692.352.644,00**	
	KECAMATAN				**5.692.352.644,00**	**KECAMATAN**				**5.692.352.644,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	39.496.233,00		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	39.496.233,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)*		90 %	37.476.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%*		90 %	37.476.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	37.476.000,00		*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	37.476.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)*		90 %	447.894.503,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)*		90 %	447.894.503,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	5.033.450,00		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	5.033.450,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	179.611.307,00		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	179.611.307,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	23.273.789,00		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	23.273.789,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	21.411.257,00		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	21.411.257,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	12.000.000,00		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	12.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	29.564.700,00		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	29.564.700,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	177.000.000,00		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	177.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase Ketrsediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*		100 %	3.200.064.892,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase Ketrsediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*		100 %	3.200.064.892,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	41.025.600,00		*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	41.025.600,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.075.520.249,00		*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.075.520.249,00	
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	179.574.300,00		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	179.574.300,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	16.451.400,00		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	16.451.400,00	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Pengadaan Aset Tetap Lainnya					
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	36.147.332,00		*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	36.147.332,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.780.265.662,00		*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.780.265.662,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	71.080.349,00		*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	71.080.349,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*		100 %	15.482.115,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*		100 %	15.482.115,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	15.482.115,00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	15.482.115,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*		90 %	29.795.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*		90 %	29.795.300,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	29.795.300,00		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	29.795.300,00	
1,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sombori Kepilauan**			**226.007.824,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sombori Kepilauan**			**226.007.824,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Pelayanan Terpadu Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)*		10 Laporan undefined undefined	147.857.824,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Pelayanan Terpadu Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)*		10 Laporan undefined undefined	147.857.824,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	147.857.824,00		*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	147.857.824,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		-	13.350.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		-	13.350.000,00	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	13.350.000,00		*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	13.350.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)*		10 %	64.800.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)*		10 %	64.800.000,00	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	64.800.000,00		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	64.800.000,00	
2,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**			**803.256.640,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**			**803.256.640,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kegiatan Pemberdayan Desa yang dikoordinasikan*		10 %	803.256.640,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan*		10 %	803.256.640,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	84.479.580,00		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	84.479.580,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	718.777.060,00		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	718.777.060,00	
3,	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**			**27.865.500,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**			**27.865.500,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)*		10 %	27.865.500,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)*		10 %	27.865.500,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	15.000.000,00		*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	15.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	12.865.500,00		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	12.865.500,00	
4,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**			**286.721.643,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**			**286.721.643,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan (%)*		10 %	286.721.643,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan (%)*		10 %	286.721.643,00	10 %
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	286.721.643,00		*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	286.721.643,00	50 Orang
5,	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**			**24.300.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**			**24.300.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa*		10 %	24.300.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa*		10 %	24.300.000,00	10 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	0,00		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	0,00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00		*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00		*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00		*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga					
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	0,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					
1	3	4	14	8	10	3	4	14	8	10	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	0,00		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	0,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	24.300.000,00		*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	24.300.000,00	13 Laporan
					5.692.352.644,00					**5.692.352.644,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Morowali. Khusus untuk Kecamatan Sombori Kepulauan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

TIDAK ADA USULAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakana upaya semua kompnen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 atau RPJMN Presiden terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Namun sebagaimana yang diminta dalam bagian ini, yakni penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD.

Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Sombori Kepulauan Daerah telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Kecamatan Sombori Kepulauan telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada OPD.

Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Sombori Kepulauan Daerah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pengetahuan melalui bimtek-bimtek dan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sombori Kepulauan Daerah

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra), tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sombori Kepulauan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sombori Kepilauan	Meningkatnya Pelayanan Terpadu	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Peningkatan Pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa	Peningkatan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Meningkatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7	**NON URUSAN**
7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7.01.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.02.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sombori Kepulauan Kab. Morowali

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET KINERJA 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN			**5.692.352.644,00**			Pendanaan Masih Sangat Kurang Berhubung Pemekaran Kecamatan Baru masih banyak Kekurangan sarana dan Prasarana Serta SDM		**8.343.542.789,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**5.692.352.644,00**					**8.343.542.789,00**
7.01	**KECAMATAN**			**5.692.352.644,00**					**8.343.542.789,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**100 %**	**4.324.201.037,00**				**100 %**	**6.483.205.345,00**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***90 %***	***24.964.362,00***				***90 %***	***27.064.362,00***
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.264.362,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	7.264.362,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	8.000.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	5.900.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	5.900.000,00
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)***	***97 %***	***568.523.865,00***				***97 %***	***1.742.312.233,00***
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/bulan	277.267.632,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		10 Orang/bulan	1.300.000.000,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	251.760.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		10 Dokumen	402.816.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	39.496.233,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12 Laporan	39.496.233,00
7.01.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)***	***90 %***	***37.476.000,00***				***90 %***	***0,00***

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	37.476.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		20 Paket	0,00
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)***	***90 %***	***447.894.503,00***				***90 %***	***717.033.450,00***
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.033.450,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Paket	5.033.450,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	179.611.307,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		20 Paket	200.000.000,00

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	23.273.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		30 Paket	100.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	21.411.257,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		10 Paket	50.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.000.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Paket	12.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	29.564.700,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		20 Laporan	150.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	177.000.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Laporan	200.000.000,00
7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***persentase Ketrsediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)***	***100 %***	***3.200.064.892,00***				***100 %***	***3.962.000.000,00***
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	41.025.600,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	450.000.000,00
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.075.520.249,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	250.000.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	179.574.300,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		30 Unit	125.000.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.451.400,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	17.000.000,00
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	36.147.332,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.780.265.662,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	3.000.000.000,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	71.080.349,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Unit	70.000.000,00
7.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***100 %***	***15.482.115,00***				***100 %***	***5.000.000,00***
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	15.482.115,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Laporan	5.000.000,00

7.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***90 %***	***29.795.300,00***				***90 %***	***29.795.300,00***
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	29.795.300,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		5 Unit	29.795.300,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sombori Kepilauan**		**226.007.824,00**					**236.857.824,00**
7.01.02.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Meningkatnya Pelayanan Terpadu Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)***	***10 Laporan undefined undefined***	***147.857.824,00***				***10 Laporan undefined undefined***	***147.857.824,00***
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	147.857.824,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Laporan	147.857.824,00
7.01.02.2.03	***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	***Persentase Pemeliharaan Prasarana danSarana Umum***	***100%***	***13.350.000,00***				***100%***	***25.000.000,00***
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	13.350.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			25.000.000,00
7.01.02.2.04	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)***	***10 %***	***64.800.000,00***				***10 %***	***64.000.000,00***
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	64.800.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		8 Laporan	64.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**		**803.256.640,00**					**884.479.580,00**
7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan***	***10 %***	***803.256.640,00***				***10 %***	***884.479.580,00***
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	84.479.580,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		13 Lembaga Kemasyarakatan	84.479.580,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	718.777.060,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		13 Laporan	800.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**		**27.865.500,00**					**39.000.000,00**
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)***	***10 %***	***27.865.500,00***				***10 %***	***39.000.000,00***
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	15.000.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		13 Laporan	25.000.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	12.865.500,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	14.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**		**286.721.643,00**					**600.000.020,00**
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan (%)***	***10 %***	***286.721.643,00***				***10 %***	***500.000.000,00***
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	286.721.643,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Orang	500.000.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**		**24.300.000,00**					**100.000.020,00**

7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa***	***10 %***	***24.300.000,00***				***10 %***	***100.000.020,00***
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			0,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13 Dokumen	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			0,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			25.000.000,00
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	13 Dokumen	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			25.000.000,00
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa								
2	3	4	8	10	14	15		19	20
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6 Dokumen	0,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Dokumen	25.000.000,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								

		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	24.300.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		13 Laporan	25.000.000,00
J U M L A H				**5.692.352.644,00**					**8.343.542.789,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sombori Kepulauan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan telah berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Sombori Kepulauan Daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi Kecamatan Sombori Kepulauan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap aparatur Kecamatan Sombori Kepulauan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.
2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walau dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan.
4. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembanguan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

Tanjung Harapan, 3 Juli 2024



LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN KAB. MOROWALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN							**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan**	**90%**			**100 %**	**100 %**	**4,324,201,037.00**	**9,436,802,195.00**	**10,366,795,085.00**	**-537,181,837.00**							**3,787,019,200.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	90%			90 %	90 %	24,964,362.00	76,785,000.00	76,785,000.00	51,820,638.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	ASN DAN NON ASN		8,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3			1 Dokumen	1 Dokumen	7,264,362.00	23,685,000.00	23,685,000.00	16,420,638.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3			1 Dokumen	1 Dokumen	5,900,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	11,800,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			8,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3			1 Dokumen	1 Dokumen	5,900,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	11,800,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3			1 Dokumen	1 Dokumen	5,900,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	11,800,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)*	98%			97 %	97 %	568,523,865.00	2,431,442,738.00	2,492,422,738.00	1,923,898,873.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	ASN DAN NON ASN		278,019,200.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92			2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	277,267,632.00	2,105,462,738.00	2,105,462,738.00	1,828,195,106.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			278,019,200.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51			10 Dokumen	12 Dokumen	251,760,000.00	251,760,000.00	0.00	-251,760,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7	**NON URUSAN**							**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15			12 Laporan	12 Laporan	39,496,233.00	74,220,000.00	74,220,000.00	34,723,767.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)*	90%			90 %	90 %	37,476,000.00	36,376,000.00	56,098,500.00	18,622,500.00			-	- -	-		0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92			20 Paket	31 Paket	37,476,000.00	36,376,000.00	56,098,500.00	18,622,500.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)*	80%			90 %	90 %	447,894,503.00	443,224,970.00	915,823,753.00	467,929,250.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	ASN DAN NON ASN		132,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30			2 Paket	2 Paket	5,033,450.00	5,033,450.00	5,033,450.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60			20 Paket	42 Paket	179,611,307.00	135,507,450.00	287,787,543.00	108,176,236.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			50,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60			10 Paket	10 Paket	23,273,789.00	21,740,370.00	21,740,370.00	-1,533,419.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60			10 Paket	21 Paket	21,411,257.00	43,234,200.00	90,733,890.00	69,322,633.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9			3 Paket	5 Paket	12,000,000.00	10,331,500.00	16,682,500.00	4,682,500.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			12,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36			20 Laporan	40 Laporan	29,564,700.00	40,200,000.00	80,970,000.00	51,405,300.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			70,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150			50 Laporan	113 Laporan	177,000,000.00	187,178,000.00	412,876,000.00	235,876,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase Ketrsediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*	100%			100 %	100 %	3,200,064,892.00	6,404,823,487.00	6,781,515,094.00	3,581,450,202.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	ASN DAN NON ASN		3,369,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4			1 Unit	2 Unit	41,025,600.00	579,190,300.00	908,746,320.00	867,720,720.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			37,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4			2 Unit	2 Unit	1,075,520,249.00	0.00	0.00	-1,075,520,249.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45			30 Unit	30 Unit	179,574,300.00	132,232,807.00	139,603,807.00	-39,970,493.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			125,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5			1 Unit	2 Unit	16,451,400.00	342,240,605.00	509,719,260.00	493,267,860.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			17,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4			6 Unit	27 Unit	36,147,332.00	32,837,910.00	150,354,470.00	114,207,138.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			120,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6			3 Unit	3 Unit	1,780,265,662.00	5,045,930,621.00	4,600,225,125.00	2,819,959,463.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas			3,000,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18			3 Unit	5 Unit	71,080,349.00	272,391,244.00	472,866,112.00	401,785,763.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas			70,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*	100%			100 %	100 %	15,482,115.00	3,360,000.00	3,360,000.00	-12,122,115.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	ASN DAN NON ASN		0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36			6 Laporan	6 Laporan	15,482,115.00	3,360,000.00	3,360,000.00	-12,122,115.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*	90%			90 %	90 %	29,795,300.00	40,790,000.00	40,790,000.00	10,994,700.00			-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan	ASN DAN NON ASN		0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4			5 Unit	5 Unit	29,795,300.00	40,790,000.00	40,790,000.00	10,994,700.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan kualitas Pelayanan dasar Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung Investasi dan			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sombori Kepilauan**	90%					**226,007,824.00**	**489,971,550.00**	**290,875,306.00**	**-64,800,000.00**							**161,207,824.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Pelayanan Terpadu Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)*	100%			10 Laporan undefined undefined	10 Laporan undefined undefined	147,857,824.00	0.00	0.00	-147,857,824.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	ASN DAN NON ASN		147,857,824.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12			3 Laporan	3 Laporan	147,857,824.00	0.00	0.00	-147,857,824.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			147,857,824.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	12			-	-	13,350,000.00	0.00	0.00	-13,350,000.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	masyarakat		13,350,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	13,350,000.00	0.00	0.00	-13,350,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			13,350,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)*	100%			10 %	10 %	64,800,000.00	489,971,550.00	290,875,306.00	226,075,306.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	masyarakat		0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12			8 Laporan	5 Laporan	64,800,000.00	489,971,550.00	290,875,306.00	226,075,306.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase APBDesa Terhadap Kegiatan Pemberdayaan)**	**65%**			**65%**	**65%**	**803,256,640.00**	**280,993,000.00**	**316,844,000.00**	**-718,777,060.00**							**84,479,580.00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan*	100%			100 %	100 %	803,256,640.00	280,993,000.00	316,844,000.00	-486,412,640.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	masyarakat		84,479,580.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39			13 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	84,479,580.00	43,080,000.00	58,250,000.00	-26,229,580.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			84,479,580.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39			13 Laporan	13 Laporan	718,777,060.00	237,913,000.00	258,594,000.00	-460,183,060.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kasus K3 di Kecamatan**	**10%**			**10%**	10%	**27,865,500.00**	**53,425,500.00**	**53,425,500.00**	**-13,865,500.00**							**14,000,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)*	100%			100 %	100 %	27,865,500.00	53,425,500.00	53,425,500.00	25,560,000.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	masyarakat		14,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12			13 Laporan	13 Laporan	15,000,000.00	40,560,000.00	40,560,000.00	25,560,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12			4 Laporan	4 Laporan	12,865,500.00	12,865,500.00	12,865,500.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			14,000,000.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di Laksanakan**	**100%**			**100%**	**100%**	**286,721,643.00**	**352,125,000.00**	**434,765,000.00**	**-286,721,643.00**							**0.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan (%)*	100%			100%	100%	286,721,643.00	352,125,000.00	434,765,000.00	148,043,357.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	ASN DAN NON ASN		0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	360			50 Orang	61 Orang	286,721,643.00	352,125,000.00	434,765,000.00	148,043,357.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**Persentase Desa Tertib Administrasi (%)**	**100%**			**100%**	**100%**	**24,300,000.00**	**54,000,000.00**	**111,080,000.00**	**-24,300,000.00**							**0.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa*	100%			100%	100%	24,300,000.00	54,000,000.00	111,080,000.00	86,780,000.00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	masyarakat		0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13			3 Dokumen	3 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		

			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13			13 Dokumen	13 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39			13 Dokumen	13 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39			13 Dokumen	13 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	39			13 Dokumen	13 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15			6 Dokumen	6 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	39			13 Laporan	26 Laporan	24,300,000.00	54,000,000.00	111,080,000.00	86,780,000.00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN
	J U M L A H								**5,692,352,644.00**	**10,667,317,245.00**	**11,573,784,891.00**	**5,881,432,247.00**							**4,046,706,604.00**	

Tanjung Harapan, 03 Juli 2024

CAMAT SOMBORI KEPULAUAN

SUAIB AMJA, S.Pt., M.Si

NIP. 19750619200312100[illegible]

Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Bungku Selatan

Tahun Anggaran
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu dokumen perencanaan yang hendak dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan indikator kinerja, atau program dan kegiatan serta pendanaannya yang masih membutuhkan untuk penyesuaian.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bungku Selatan Tahun 2025 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi Program dan kegiatan yang akan disesuaikan. Penyusunan Renja Kecamatan Bungku Selatan ini dilakukan dengan melibatkan aparatur Kecamatan Bungku Selatan guna memperoleh masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. Tahapan penyusunan Renja Kecamatan Bungku Selatan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya yang masih membutuhkan penyesuaian atau perbaikan dalam proses Penyusunan Renja awal. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang

selanjutnya menjadi acuan dalam membuat RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada visi misi Bupati Morowali, RPJMD, rancangan awal RKPD, Renstra Kecamatan Bungku Selatan Tahun 2024 – 2025, serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bungku Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintrah Daerah tahun 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 110);
19. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 atas surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkleatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisaasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021:
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepilauan;
24. Peraturan Bupati Morowali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 2)
25. Peraturan Bupati Morowali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 6)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2024 adalah untuk memperoleh gambaran target kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bungku Selatan Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
3. Sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
4. Sebagai bahan bahan evaluasi tolak ukur kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Tahun 2025 yang merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGKU SELATAN DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGKU SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bungku Selatan Pada Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Bungku Selatan

Dari Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan dana, terdapat beberapa program dan kegiatan baik dana maupun fisik yang tidak memenuhi target yang direncanakan serta faktor- factor penyebabnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Realisasi Capaian Tahun 2023		Rasio Capaian pada Tahun 2023		UNIT PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		6		(7) = 6/5X100		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan Desa.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan	105.26%	4.685.994.235,00	84.02%	3.937.086.885,00	79.82%	84.02	Kecamatan Bungku Selatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Perencanaan	100%	33.120.000,00	98.16%	32.510.000,00	98.16%	98.16	Kecamatan Bungku Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	22.080.000,00	99.32%	21.930.000,00	99.32%	99.32	Kecamatan Bungku Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	11.040.000,00	95.83%	10.580.000,00	95.83%	95.83	Kecamatan Bungku Selatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian kegiatan administrasi keuangan	100%	3.852.093.180,00	80.74%	3.110.279.537,00	80.74%	80.74	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	3.517.453.180,00	78.98%	2.778.045.437,00	78.98%	78.98	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	327.280.000,00	99.26%	324.874.100,00	99.26%	99.26	Kecamatan Bungku

										Selatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	7.360.000,00	100%	7.360.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib	100%	11.040.000,00	97.1%	10.720.000,00	97.1%	97.10	Kecamatan Bungku Selatan
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	11.040.000,00	97.1%	10.720.000,00	97.1%	97.10	Kecamatan Bungku Selatan
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	Rasio PAD	100%	5.520.000,00	97.1%	5.360.000,00	97.1%	97.10	Kecamatan Bungku Selatan
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	5.520.000,00	97.1%	5.360.000,00	97.1%	97.10	Kecamatan Bungku Selatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Kepegawaian yang Tertib	100%	40.406.500,00	100%	40.406.500,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	20.756.500,00	100%	20.756.500,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	19.650.000,00	100%	19.650.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku

									Selatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum	100%	521.029.060,00	99.63%	519.110.553,00	99.63%	99.63	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	79.421.300,00	100%	79.421.300,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	114.201.260,00	99.97%	114.164.910,00	99.97%	99.97	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	17.924.500,00	100%	17.924.250,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	46.100.000,00	100%	46.100.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	263.382.000,00	99.29%	261.500.093,00	99.29%	99.29	Kecamatan Bungku Selatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	69.694.600,00	95.41%	66.497.600,00	95.41%	95.41	Kecamatan Bungku Selatan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	37.380.000,00	91.45%	34.183.000,00	91.45%	91.45	Kecamatan Bungku

										Selatan
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100%	22.314.600,00	100%	22.314.600,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	648.000,00	75%	486.000,00	75%	75.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	648.000,00	75%	486.000,00	75%	75.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	152.442.895,00	99.52%	151.716.695,00	99.52%	99.52	Kecamatan Bungku Selatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	97.120.000,00	99.25%	96.393.800,00	99.25%	99.25	Kecamatan Bungku Selatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	55.322.895,00	100%	55.322.895,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan

3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100%	5.700.000,00	100%	5.700.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	5.700.000,00	100%	5.700.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	5.700.000,00	100%	5.700.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDesa	100%	500.788.700,00	99.84%	499.980.700,00	99.84%	99.84	Kecamatan Bungku Selatan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada APBD Kelurahan dan APBDes	100%	500.788.700,00	99.84%	499.980.700,00	99.84%	99.84	Kecamatan Bungku Selatan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	91.000.000,00	99.89%	90.900.000,00	99.89%	99.89	Kecamatan Bungku Selatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	409.788.700,00	99.83%	409.080.700,00	99.83%	99.83	Kecamatan Bungku Selatan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Kriminal	2500%	4.560.000,00	99.87	4.554.000,00	399.48	0.00	Kecamatan Bungku

								%		Selatan
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Kriminal yang ditindaklanjuti	100%	4.560.000,00	99.87	4.554.000,00	9,987%	99.87	Kecamatan Bungku Selatan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tercapainya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	4.560.000,00	99.87	4.554.000,00	9,987%	99.87	Kecamatan Bungku Selatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100%	53.390.000,00	66.64%	35.580.000,00	66.64%	66.64	Kecamatan Bungku Selatan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	53.390.000,00	66.64%	35.580.000,00	66.64%	66.64	Kecamatan Bungku Selatan
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	17.800.000,00	0%	0,00	-	0.00	Kecamatan Bungku Selatan
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	31.600.000,00	99.97%	31.590.000,00	99.97%	99.97	Kecamatan Bungku Selatan
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	3.990.000,00	100%	3.990.000,00	100%	100.00	Kecamatan Bungku Selatan
							Rata-rata capaian kinerja (%)	**539.**	**90.93%**	Kecamatan Bungku Selatan

	14%		
Predikat Kinerja	A	A	
Faktor Pedorong Pencapaian Kinerja : Adanya hubungan yang baik antara Pimpinan OPD, Kepala Seksi dan Staf pada Kantor Kecamatan Bungku Selatan			
Faktor Penghambat : Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan Komputer dan tidak adanya Jaringan Internet (WiFi)			
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota berikut : Perlu Penambahan ASN/PHL yang mampu mengoperasikan Komputer dan perlu Pengadaan Jaringan Internet			

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran *(Output)*, merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. Indikator Hasil *(Outcome),* merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Morowali

Kecamatan Bungku Selatan Daerah Kabupaten Morowali

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Permendagri 13 Tahun 2017										
1	**Presentase Peningkatan Partsisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
2	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersusunnya usulan prioritas tingkat Kecamatan			1	1	1	1	1	1	1	
4	Terlaksananya lomba desa			1	1	1	1	1	1	1	
5	Terlaksananhya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan			2	2	2	2	2	2	2	
6	Terbinanya Kegiatan PKK di Desa/Kelurahan			23	23	23	26	23	23	23	
7	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan			1	1	1			1	1	
	Kep Mendagri 050-5889 tahun 2021 dan Rentra										
1	**Nilai SAKIP (Nilai)**										
2	**Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)**										
3	**Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)**			**90**	**90**	**90**			**90**	**90**	
4	**Ketepatan Waktu Perencanaan (Tepat/Tidak Tepat)**			**90**	**90**	**90**			**90**	**90**	
5	**Persentase Capaian Kinerja OPD (%)**			**90**	**90**	**90**			**90**	**90**	

6	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegitan RENSTRA Kecamatan Bungku Selatan ke dalam RENJA Kecamatan Bungku Selatan (%)				100	100	100			100	100	
7	Persentase Kesesuai Anggaran Renja dan RKA (%)				100	100	100			100	100	
8	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah (%)				20	20	15			20	15	
9	Persentase Kesesuai Anggaran RKA dan DPA (%)				100	100	100			100	100	
10	Persentase Capaian Kinerja OPD (%)				90	90	90			90	90	
11	**Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)**				97	**98**	**98**			**97**	**98**	
12	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah)				35	37	40	32	37	40	35	
13	Jumlah Pegawai PHL yang Dibayarkan Jasanya (Jumlah)				14	14	14	14	14	14	14	
14	Persentase SILPA (%)											
15	**Persentase Barang Milik Daerah yang tertib (%)**				90	**100**	**100**			**90**	**100**	
16	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor (%)				100	95	90			100	90	
17	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tertib administrasi (Jumlah)											
18	**Rasio PAD (%)**				1	**2**	**3**			**1**	**3**	
19	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi (%)				1	1	2			1	3	
20	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)**				90	**90**	**90**			**90**	**90**	
21	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Jumlah)				14	14	15	0	13	0	0	
22	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat PIM				2	3	3			2	3	
23	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek (Jumlah)				4	4	4	4	4	4	4	
24	**Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)**				90	**90**	**90**			**90**	**90**	
25	Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Listrik (%)				80	90	100			80	100	
26	Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Bungku Selatan (%)				70	70	75	70	75	70	75	
27	Cakupan ketersediaan peralatan rumah tangga kecamatan Bungku Selatan (%)				70	70	80	70	80	70	80	

28	Cakupan Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)				100	100	100			100	100	
29	Cakupan Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Bungku Selatan (%)				100	100	100			100	100	
30	Cakupan Pelayanan Tamu				100	100	100			100	100	
31	Cakupan Ketersediaan Anggaran Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (%)				100	100	100			100	100	
32	**Cakupan Ketrsediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**				70	**70**	**75**			**70**	**75**	
33	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas (Jumlah)				2	1	1	0	1	2	2	
34	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jumlah)				1	1	1	0	1	1	1	
35	Jumlah Pengadaan Mebel (Jumlah)				20	20	5			20	5	
36	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor (Jumlah)				3	3	3	1	2	2	2	
37	Jumlah Aset Tetap				2	1	1			2	1	
38	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan (Jumlah)				3	2	1	0	1	3	1	
39	**Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**				100	**100**	**100**			**100**	**100**	
40	Cakupan Ketersediaan Jasa Surat Menyurat (%)				100	100	100			100	100	
41	Cakupan Ketersediaan Jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik (%)				100	100	100			100	100	
42	Presentase peralatan Kerja yang Diperbaiki (%)				50	50	55			50	55	
43	Cakupan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (%)				100	100	100			100	100	
44	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**				0	**90**	**90**			**0**	**90**	
45	Presentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (%)				0	90	90			0	90	
46	Presentase rumah Jabatan yang Direhabilitasi (%)				0	30	50			0	50	
47	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)**											
48	**Cakupan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**				100	**100**	**100**			**100**	**100**	
49	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Urusan Vertikal				100	100	100			100	100	

50	**Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintah yang dilimpahkan ke Camat (%)**				100	**100**	**100**			**100**	**100**	
51	Cakupan Kewenangan yang diberikan kepada Camat (%)				100	100	100			100	100	
52	**Presentase kemandirian masyarakat desa dan kelurahan (%)**											
53	**Persentase Kenaikan Indeks Desa Membangun (%)**											
54	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa**				60	**65**	**65**			**60**	**65**	
55	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu (%)				100	100	100			100	100	
56	Persentase desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara efektif (%)				80	80	80	90	90	90	90	
57	**Persentase Msyarakat Kelurahan yang mendapat Kegiatan Pemberdayaan (%)**											
58	Persentase Keikutsertaan Musrenbang Kelurahan (%)											
59	Jumlah Sarana dan Prasarana (Jumlah)				1	1	1	1	0	1	1	
60	Persentase Anggaran Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan (%)											
61	**Persentase penurunan kasus keamanan dan trantib (%)**					**2**	**3**			**2**	**3**	
62	**Angka Kriminal (Jumlah)**					**6**	**5**			**6**	**5**	
63	**Persentase kasus kriminal yang ditindaklanjuti (%)**					**100**	**100**			**100**	**100**	
64	Jumlah kasus yang diselesaikan bersama (Jumlah)					6	5			6	5	
65	Cakupan hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat (%)					100	100			100	100	
66	**Persentase desa berstatus desa Maju (Permendes 17/2019) (%)**					**30**	**35**			**30**	**35**	

67	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)**					**100**	**100**			**100**	**100**	
68	**Cakupan kerjasama yang dilaksanakan forkompimcam (%)**					**100**	**100**			**100**	**100**	
69	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan Forkompimcam (jumlah)					10	12			10	12	
70	**Persentase Desa yang dibina (%)**				100	**100**	**100**			**100**	**100**	
71	**Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa (%)**				100	**100**	**100**			**100**	**100**	
72	Cakupan Desa yang tertib aturan perundang-undangan (%)				100	100	100			100	100	
73	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kades (Jumlah)				23	23	23	23	23	23	23	
74	Jumlah Desa yg mendapatkan rekomendasi Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Jumlah)				23	23	23	23	23	23	23	
75	Persentase Kesesuaian Perencanaan Desa dan Kabupaten (%)				100	100	100			100	100	
76	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga (Jumlah)				23	23	23	23	23	23	23	
77	Persentase Desa yang memiliki batas desa (%)				70	80	100			70	100	
78	Cakupan Pendampingan Desa (%)				100	100	100			100	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungku Selatan

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali sesuai dengan RENSTRA KECAMATAN BUNGKU SELATAN tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungku Selatan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2026	2022	2023	2024	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Presentase Peningkatan Partsisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah					80	95	93	95	80	100	
2	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam pembangunan					80	95	93	95	80	100	
3	Tersusunnya usulan prioritas tingkat Kecamatan					1	1	1	1	1	1	
4	Terlaksananya lomba desa					1	1	1	1	1	1	
5	Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan					2	2	2	2	2	2	
6	Terbinanya Kegiatan PKK di Desa/Kelurahan					23	23	23	23	23	23	
7	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan					1	1	1	1	1	1	

8	Tersedianya Operasional Kelurahan											
9	**Nilai SAKIP (Nilai)**					**75**	**80**			**75**	**80**	
10	**Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)**					**75**	**80**			**75**	**80**	
11	**Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)**					**90**	**90**		84	**90**	**90**	
12	**Ketepatan Waktu Perencanaan (Tepat/Tidak Tepat)**					**90**	**90**		98	**90**	**90**	
13	**Persentase Capaian Kinerja OPD (%)**					**90**	**90**		**90**	**90**	**90**	
14	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegitan RENSTRA Kecamatan Bungku Selatan ke dalam RENJA Kecamatan Bungku Selatan (%)					100	100		100	100	100	
15	Persentase Kesesuai Anggaran Renja dan RKA (%)					100	100		99	100	100	
16	Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah (%)					20	15		20	20	15	
17	Persentase Kesesuai Anggaran RKA dan DPA (%)					100	100		95	100	100	
18	Persentase Capaian Kinerja OPD (%)					90	90		90	90	90	
19	**Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)**					**90**	**90**		**80**	**90**	**90**	

20	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah)					27	27		29	27	27	
21	Jumlah Pegawai PHL yang Dibayarkan Jasanya (Jumlah)					14	18		13	14	18	
22	Persentase SILPA (%)					5	4			5	4	
23	**Persentase Barang Milik Daerah yang tertib (%)**					**90**	**90**		**97**	**90**	**90**	
24	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor (%)					90	100		100	90	100	
25	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tertib administrasi (Jumlah)					5	5			5	5	
26	**Rasio PAD (%)**					**1**	**3**		97	**1**	**3**	
27	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi (%)					1	3			1	3	
28	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)**					**90**	**80**		100	**75**	**80**	
29	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Jumlah)					14	14		25	14	14	
30	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat PIM					2	2		1	2	2	
31	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek (Jumlah)					2	2		4	2	2	
32	**Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)**					**90**	**90**		99	**90**	**90**	
33	Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Listrik (%)					100	100			100	100	
34	Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Bungku Selatan (%)					70	90		100	70	90	

35	Cakupan ketersediaan peralatan rumah tangga kecamatan Bungku Selatan (%)					30	90		95	30	90	
36	Cakupan Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)					100	100		99	100	100	
37	Cakupan Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Bungku Selatan (%)					100	100		100	100	100	
38	Cakupan Pelayanan Tamu					100	100		100	100	100	
39	Cakupan Ketersediaan Anggaran Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (%)					100	100		99	100	100	
40	**Cakupan Ketrsediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**					**100**	**100**		95	**10**	**100**	
41	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas (Jumlah)					2	2			2	2	
42	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jumlah)					2	2		1	2	2	
43	Jumlah Pengadaan Mebel (Jumlah)					7	5		1	5	5	
44	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor (Jumlah)					4	4		1	4	4	
45	Jumlah Aset Tetap					2	1		9	2	1	
46	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan (Jumlah)					3	2		2	3	3	

47	**Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**					**100**	**100**		75	**100**	**100**	
48	Cakupan Ketersediaan Jasa Surat Menyurat (%)					100	100		100	100	100	
49	Cakupan Ketersediaan Jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik (%)					100	100		75	100	100	
50	Presentase peralatan Kerja yang Diperbaiki (%)					50	55		50	50	55	
51	Cakupan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (%)					100	100			100	100	
52	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**					**50**	**55**		99	**50**	**55**	
53	Presentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (%)					100	100		100	100	100	
54	Presentase rumah Jabatan yang Direhabilitasi (%)					100	50			100	50	
55	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)**					**75**	**80**		100	**75**	**80**	
56	**Cakupan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**					**100**	**100**		100	**100**	**100**	
57	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Urusan Vertikal					100	100		100	100	100	
58	**Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintah yang dilimpahkan ke Camat (%)**					**100**	**100**			**100**	**100**	
59	Cakupan Kewenangan yang diberikan kepada Camat (%)					100	100			100	100	

60	**Presentase kemandirian masyarakat desa dan kelurahan (%)**					**60**	**62**			**60**	**62**	
61	**Persentase Kenaikan Indeks Desa Membangun (%)**					1	**3**			1	**3**	
62	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa**					**60**	**65**		99	**60**	**65**	
63	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu (%)					100	100		100	100	100	
64	Persentase desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara efektif (%)					50	52		50	50	52	
65	**Persentase Msyarakat Kelurahan yang mendapat Kegiatan Pemberdayaan (%)**											
66	Persentase Keikutsertaan Musrenbang Kelurahan (%)											
67	Jumlah Sarana dan Prasarana (Jumlah)											
68	Persentase Anggaran Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan (%)											
69	**Persentase penurunan kasus keamanan dan trantib (%)**											
70	**Angka Kriminal (Jumlah)**											

71	**Persentase kasus kriminal yang ditindaklanjuti (%)**					**100**	**100**		**99**	**100**	**100**	
72	Jumlah kasus yang diselesaikan bersama (Jumlah)								3			
73	Cakupan hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat (%)					100	100		99	100	100	
74	**Persentase desa berstatus desa Maju (Permendes 17/2019) (%)**					**30**	**35**			**30**	**35**	
75	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)**					**100**	**100**			**100**	**100**	
76	**Cakupan kerjasama yang dilaksanakan forkompimcam (%)**					**100**	**100**			**100**	**100**	
77	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan Forkompimcam (jumlah)					10	10			10	10	
78	**Persentase Desa yang dibina (%)**					**100**	**100**			**100**	**100**	
79	**Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa (%)**					**100**	**100**		**66**	**100**	**100**	
80	Cakupan Desa yang tertib aturan perundang-undangan (%)					100	100			100	100	
81	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kades (Jumlah)						0		14	0	0	

82	Jumlah Desa yg mendapatkan rekomendasi Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Jumlah)					23	23			23	23	
83	Persentase Kesesuaian Perencanaan Desa dan Kabupaten (%)					100	100		100	100	100	
84	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga (Jumlah)					23	23			23	23	
85	Persentase Desa yang memiliki batas desa (%)					70	70			70	70	
86	Cakupan Pendampingan Desa (%)					100	100			100	100	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :
   - Struktur Organisasi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Nomor 6 Tahun 2023, sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
   - Mekanisme kerja Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
   - Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
   - Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :
   - Belum memadainya kualitas aparatur yang memiliki kompentensi.
   - Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
   - Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
   - Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bungku Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bungku Selatan Kabuapten Morowali tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali secara keseluruhan harus dibenahi. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan akan berjalan lambat walaupun di tahun 2018 menunjukkan progres yang menggembirakan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan

peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2024, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Morowali

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2		3	5	7	8	9					10
	Kep Mendagri 050-5889 tahun 2021 dan Rentra											
	KECAMATAN BUNGKU SELATAN					**9.943.300.000**	**KECAMATAN BUNGKU SELATAN**				**9.943.300.000**	**1. Masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi terutama pemenuhan sara dan prasarana Kantor dan Rumah Jabatan 2. Masih Kurangnya Kapasitas Sumber daya Manusia sehingga perlu peningkatan kapasitanya**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Bungku Selatan**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**%**	**100**	**9.237.300.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Bungku Selatan**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**90**	**9.237.300.000**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec.Bungku Selatan**	**Presentase Capaian Kinerja OPD %**	**%**	**90**	**31.500.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec.Bungku Selatan**	**Presentase capaian kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**90**	**31.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Dokumen	1	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	1	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Bungku Selatan**	**Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)**	**%**	**97**	**3.774.200.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Bungku Selatan**	Presentase capaian kegiatan adminstrasi keuangan (%)	97	**3.278.101.500**	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang	32	3.270.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	27	3.270.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	14	492.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	492.700.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Bungku Selatan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Dokumen	4	11.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Bungku Selatan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4	11.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tertib (%)**	**%**	**90**	**56.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tertib (%)**	**90**	**56.000.000**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	40.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	40.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)	Laporan	4	16.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)	4	16.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Kec.Bungku Selatan**	**Rasio PAD (%)**	**%**	**1**	**10.000.000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kec.Bungku Selatan**	**Rasio PAD (%)**	**1**	**10.000.000**
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	10.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	10.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)**	**%**	**90**	**93.800.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)**	**100**	**93.800.000**
	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut Kelengkapanya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	27	21.600.000	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut Kelengkapanya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	27	21.600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	2	43.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	43.000.000
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	2	26.200.000	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	26.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec.Bungku Selatan**	**Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)**	**%**	**90**	**395.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Bungku Selatan**	**Presentase capaian kegiatan adminstrasi umum (%)**	**90**	**395.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	10	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	50.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	20	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket))	20	40.000.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket))	Paket	20	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	20	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	40.000.000
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	3	15.000.000	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	15.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	12	120.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bungku Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	120.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	50	120.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	120.000.000
	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	**Kecamatan Bungku Selatan**	**Cakupan Ketrsediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**%**	**100**	**4.468.500.000**	**Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bungku Selatan**	**Cakupan Ketrsediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**100**	**4.468.500.000**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Bungku Selatan	JumlahUnit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	unit	3	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	50.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	2	80.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	2	80.000.000
	Pengadaan Mebel	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Unit	10	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	50.000.000
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	3	8.500.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	8.500.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	.	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	2	160.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	.	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	160.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	3	4.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4.000.000.000
	Pengadaan sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	6	120,000,000	Pengadaan sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	120,000,000
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	**Kec.Bungku Selatan**	**Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**%**	**100**	**116.000.000**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	**Kec.Bungku Selatan**	**Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**116.000.000**
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	60.000.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	60.000.000
	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	15.000.000	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.000.000

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	36.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan))	1	36.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	5.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		100	**295.000.000**				100	**295.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		**3**	20.000.000				**3**	20.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		**3**	20.000.000				**3**	20.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		**3**	15.000.000				**3**	15.000.000
	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Pembangunan Lainya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		**3**	90.000.000				**3**	90.000.000
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		**3**	150.000.000				**3**	150.000.000
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Urusan Pelayanan Publik Yang di Laksankan di Kecamatan**	**%**	**90**	**87,000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Urusan Pelayanan Publik Yang di Laksankan di Kecamatan**	**90**	**87,000.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)**	**%**	**100**	**12.500.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di Koordinasikan (%)**	**100**	**12.500.000**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Bungku Selatan	umlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Laporan	4	12,500,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Bungku Selatan	umlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	12,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)**	**%**	**100**	**75.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)**	**100**	**75.000.000**

	Pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Laporan	4	75.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	**Kec.Bungku Selatan**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	75.000.000
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec.Bungku Selatan	**Persentase APBDesa Terhadap Kegiatan Pemberdayaan (%)**	**%**	**60**	**150.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase APBDesa Terhadap Kegiatan Pemberdayaan (%)**	**60**	**150.000.000**
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa		**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa%**	**%**	**60**	**150.000.000**	**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec.Bungku Selatan**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa%**	**60**	**150.000.000**
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga Masyarakat	23	50.000.000	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	23	50.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	13	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	100.000.000
4.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Desa Tertib Administrasi (%)**	**%**	**100**	**283.500.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Desa Tertib Administrasi (%)**	**100**	**283.500.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa (%)**	**%**	**100**	**283.500.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa (%)**	**100**	**283.500.000**
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan (Laporan)	Laporan	23	25.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan (Laporan)	23	25.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Dokumen	23	30.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	23	30.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokuen)	Dokumen	14	75.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokuen)	14	75.000.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Desa yg mendapatkan rekomendasi Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Jumlah)	Jumlah Desa	23	30.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Desa yg mendapatkan rekomendasi Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Jumlah)	23	30.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Dokumen	23	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	23	30.000.000

	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	Dokumen	23	45.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	23	45.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	Dokumen	5	27.500,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	5	27.500,000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Laporan	23	21.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	23	21.000.000	
5.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Kasus K3 di Kecamatan**	**%**	**15**	**51.300.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Kasus K3 di Kecamatan**	**100**	**51.300.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)**	**%**	**100**	**51.300.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)**	**100**	**51.300.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)a	Laporan	4	24.300.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	24.300.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Laporan	4	27.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	27.000.000	
6.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di Laksanakan (%)**	**%**	**100**	**134.000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec.Bungku Selatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di Laksanakan (%)**	**100**	**134.000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec.Bungku Selatan**	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan (%)**	**%**	**100**	**134.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec.Bungku Selatan	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan (%)**	**100**	**134.000.000**	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Dokumen)	**Dokumen**	120	**45.000.000**	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Dokumen)	120	**45.000.000**	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	**Dokumen**	1	**65.000.000**	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	1	**65.000.000**	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	**Dokumen**	12	**24.000.000**	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Bungku Selatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	**24.000.000**	

Total	**9.943.300.000**		**9.943.300.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Morowali. Khusus untuk Kecamatan Bungku Selatan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pembangunan Rumah Jabatan Camat Bungku Selatan	Desa Kaleraong	Terciptanya Pelayanan Publik di Kecamatan Bungku Selatan	1 unit	
2.	Pembangunan Gedung Serbaguna	Desa Kaleroang	Terciptanya Paratisipasi Masyrakat dalam forum Musyawarah	1 unit	
3.	Pembangunan Jalan Penghubung Antar Desa	Desa Buajangka, Waru-Waru, Padabale, Pado-Pado, Pulau Bapa, Kaleroang	Terciptanya Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Penurunan Kesenjangan Sosial	2000 KM	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakana upaya semua kompnen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 atau RPJMN Presiden terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Namun sebagaimana yang diminta dalam bagian ini, yakni penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD.

Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Bungku Selatan Daerah telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Kecamatan Bungku Selatan telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada OPD.

Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Bungku Selatan Daerah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pengetahuan melalui bimtek-bimtek dan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bungku Selatan Daerah

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra), tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungku Selatan Daerah sebagai berikut:

Tabel.3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sebelum Renstra)

Visi **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI YANG SEJAHTERA BERSAMA**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	*2*	*3*	*4*
Misi I	**Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan**		
1.1.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	1.1.1.Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	1.1.1.1.Peningkatan Kualitas Pelayanan umum	Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat.
	1.1.2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor		Peningkatan sarana dan prasarana, dalam pelayanan menuju pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat
1.2.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1.2.1.Meningkatnya Pelayanan Terpadu	1.2.1.1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan PelayananPublik	Peningkatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait,
	1.2.2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah	1.2.2.1. Peningkatan Kualitas Pemerintahan Umum dan Perencanaan Keuangan Kecamatan	Meningkatnya peran birokrasi yang transparan terhadap kinerja pemerintah
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan keuangan anggaran kecamatan

Misi 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Pembiayaan Kesehatan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, Kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman			
4.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah	4.1.1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan Desa.	4.1.1.1.Penimgkatan Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong pengembangan Lembaga perdesaan
			Mendorong partisipasi masyarakat Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Setelah Renstra)

MISI ke 1 : Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas	Menciptakan akuntabilitas kinerja
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan public	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayann umum serta mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan public
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa/ Kelurahan	Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun	Mengoptimalkan koordinasi pemberdayaan kegiatan pemberdayaan Desa dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Memfasilitasi kemandirian masyarakat

4	Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Terciptanya keamanan,ketentraman dan ketertiban umum	Mengoptimalkan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Menciptakan Ketentraman dan ketertiban umum

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Sebelum Renstra)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	*2*
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01.	**KECAMATAN**
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
7.01.01.1.01.	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.0101.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.0.101.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.04.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut Kelengkapanya
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
7.01.01.2.07.	**Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah**
7.01.012.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.012.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.012.07.10	Pengadaan sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainya
7.01.01.2.08.	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.02.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.04.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
7.01.03.201.	**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Suku, Ras dan Golonan Lainnya Guna Mewujudakan Stabilitas Keamana dan Ketertiban umum
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenagan dan Tidak dilaksanakan Instansi Vetikal
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bungku Selatan Kab. Morowali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan danSub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024			
						K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Indeks Kepuasan Msyarakat Pada Layanan Publik IKM) Kecamatan Bungku Selatan						*83*			
	Persentase Pelayanan terpadu yang dilaksanakan								
		7.01. 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan Bungku Selatan**	**NA**	**100**	**9.943.300.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.1. 01	**Perencanaan penganggarandan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**Persentase urusan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan**	**NA**	**90**	**31.500.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	NA	1	5.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 01.02	Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	NA	1	7.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 01.03	Koordinasi danpenyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	NA	1	5.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 01.04	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Jumlah DokumenDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	NA	1	5.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan

		7.01. 01.2. 01.06	Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD (Laporan)	NA	1	4.500.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	NA	1	5.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01 01.2. 02	**AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah**	**Presentase capaiankegiatan adminstrasi keuangan (%)**	**NA**	**97**	**3.774.200.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 02.01	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	NA	32	3.270.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.010 1.2.0 2.02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (orang)	NA	14	492.700.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.010 1.2.0 2.05	Koordinasi danPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	NA	4	11.500.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 03	**AdministrasiBarang MilikDaerah padaPerangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang tertib (%)**	**NA**	**90**	**56.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	NA	1	40.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 03.06	PenatausahaanBarang milik Daerah pada SKPD	Jumlah LaporanPenatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)	NA	4	16.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 04	**AdministrasiPendapatan Daerah Kewenangan PerangkatDaerah**	**Rasio PAD (%)**	**NA**	**1**	**10.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 04.07	Pelaporan PengelolaanRetribusi Daerah	Jumlah DokumenRencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	NA	4	10.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 05	**Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang Yertib (%)**	**NA**	**90**	**90.800.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 05.02	Pengadaan pakaian dinas Beserta atributKelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	NA	27	21.600.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 05.09	Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas danFungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	NA	2	43.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan

		7.01. 01.2. 05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	NA	2	26.200.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 06	**AdministrasiUmum Perangkat Daerah**	**Presentase capaiankegiatan adminstrasi umum (%)**	**NA**	**90**	**395.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	NA	10	50.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket)	NA	20	40.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	NA	20	10.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 06.04	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	NA	20	40.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	NA	3	15.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 06.08	Fasilitasi KunjunganTamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	NA	12	120.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD (Laporan)	NA	50	160.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 07	**Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketrsediaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah (%)**	**NA**	**10 0**	**4.468.500.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 0.12. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yangDisediakan (Unit)	NA	2	50.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 0.12. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	NA	2	80.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	NA	20	50.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan

		7.01. 01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan danmesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	NA	2	8.500.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	NA	2	160.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 07.09	Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantoratau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit)	NA	3	4.000.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 012.0 7.10	Pengadaan sarana dan Prasarana gedung Kantor atau BangunanLainya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnyayang Disediakan (Unit)	NA	6	120.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 08	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**	**Cakupan Penyediaan jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (%)**	**NA**	**100**	**116.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 08.01	PenyediaanJasa surat menyurat	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	NA	12	60.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan (Laporan)	NA	12	15.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	NA	1	36.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan (Laporan)	NA	1	5.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 09	**PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah (%)**	**NA**	**90**	**295.000.000-**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	NA	3	20.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	NA	3	20.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan

		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	NA	3	15.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantordan Pembangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	NA	3	90.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	NA	3	150.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sombori Kepilauan				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Layanan Publik Kecamatan Bungku Selatan**	**NA**	**100**		Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
	MeningkatnyaPelayanan Terpadu			**Persentase Pelayanan Terpaduyang dilaksanakan(%)**	**NA**	**90**		Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Urusan Pelayanan Publik Yang di Laksankandi Kecamatan**	**NA**	**90**	**87.500.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diKoordinasikan (%)**	**NA**	**100**	**12.500.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	NA	4	12.500.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan PemerintahanYang dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)**	**NA**	**100**	**75.000.000**	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengankewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah LaporanPelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan(Laporan)	NA	4	75000000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN**	**Persentase APBDesa Terhadap Kegiatan Pemberdayaan (%)**	**NA**	**60**	**75.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**

		7.01. 03.2. 01	**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan(%)**	**NA**	**100**	**150.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 03.2. 01.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan PembangunanDesa	Jumlah LembagaKemasyarakatan yang Berpartisipasidalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa(LembagaKemasyarakatan)	NA	23	50.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 03.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah LaporanPeningkatan Efektivitas KegiatanPemberdayaan MasyarakatdiWilayah Kecamatan (Laporan)	NA	23	100.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA**	**Persentase DesaTertib Administrasi (%)**	**NA**	**100**	**112.700.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 06.2. 01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yag mendapati fasilitasi, rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah desa(%)**	**NA**	**100**	**283.500.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 06.2. 01.04	Fasilitasi Penerapan danPenegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndanga n (Laporan)	NA	23	25.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 06.2. 01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka PelaksanaanTugas Kepala Desa dan Perangkat Desa(Dokumen)	NA	23	30.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 06.2. 01.06	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka PelaksanaanPemilihan Kepala Desa (Dokuen)	NA	14	75.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 06.2. 01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa	Jumlah Desa ygmendapatkan rekomendasi Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Jumlah)	NA	23	30.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 06.2. 01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	NA	23	30.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 06.2. 01.14	Fasilitasi KerjaSama Antar desa dan KerjaSama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja SamaAntar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	NA	23	45.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan

		7.01. 06.2. 01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang DesaSerta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangka Penataan,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	NA	5	27.500.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 06.2. 01.17	Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	NA	23	21.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase KasusK3 di Kecamatan**	**NA**	**20**	**51.300.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 04.2. 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum**	**Persentase K3 Tertangani di Kecamatan (%)**	**NA**	**100**	**51.300.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 04.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia daninstansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah LaporanHasil Sinergitasdengan KepolisianNegaraRepublikIndonesia, TentaraNasional Indonesiadan Instansi Vertikal di WilayahKecamatan (Laporan)	NA	4	24.300.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 04.2. 01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah LaporanPelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat (Laporan)	NA	4	27.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01. 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di Laksanakan di Kecamatan(%)**	**NA**	**100**	**134.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 05.2. 01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah**	**Persentase UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan (%)**	**NA**	**100**	**134.000.000**	**Kantor Camat Bungku Selatan**	**Kecamatan Bungku Selatan**
		7.01. 05.2. 01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yangMengikuti Pembinaan KerukunanAntarSuku dan IntraSuku UmatBeragama, Ras, danGolongan LainnyaGuna MewujudkanStabilitas KeamananLokal,Regional, danNasional (Dokumen)	NA	12	45..000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan

		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakanoleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen SemuaUrusan Pemerintahan yang Bukan MerupakanKewenangan Daerah dan TidakDilaksanakan olehInstansi Vertikal(Dokumen)	NA	1	65.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah DokumenTugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	NA	12	24.000.000	Kantor Camat Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan
			Urusan KewilayahanKecamatan Bungku Selatan				**9.943.300.000**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Bungku Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026. Dalam mengakomodasikan program dan kegiatan telah berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Bungku Selatan Daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi Kecamatan Bungku Selatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap aparatur Kecamatan Bungku Selatan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.
2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walau dalam pembahasan nanti terjadi anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan.
4. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembanguan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

Kaleroang, 02 Januari 2024

CAMAT BUNGKU SELATAN

MUHAMMAD FADLI, S.IP, M.A.P
NIP. 19900108 201406 1 001